



Pemerintah Kabupaten Lumajang

Peraturan Bupati Lumajang

Nomor 41 Tahun 2022

Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2023





**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 41 TAHUN 2022**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah diperlukan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Pasal 104 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2023 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 115);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 142);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025.
6. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2023 merupakan penjabaran tahunan dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan RKPD adalah :

- a. Menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, urusan pembangunan dan tingkat pemerintahan;
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
- c. Sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- d. Sebagai dasar penyusunan KUA APBD serta PPAS Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RKPD adalah :

- a. Menjabarkan kebijakan perencanaan tahunan dalam pencapaian Visi dan Misi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang 2018-2023;
- b. Mengintegrasikan dan mensinergikan pembangunan daerah antar ruang, waktu, fungsi Pemerintahan maupun tingkat pemerintahan;

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2023 disusun sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
BAB VII : PENUTUP.
- (2) Penjabaran RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI LUMAJANG,

H. THORJUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 41

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan KaruniaNya sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2023 sebagai dokumen perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah dan dapat terselesaikan Ini merupakan dokumen perencanaan yang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama setahun kedepan.

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan Program, Kegiatan dan target yang menjadi acuan penyusunan kebijakan untuk mencapai Visi dan misi Kepala Daerah.

Disamping itu melalui review evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun sebelumnya terhadap capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan targetnya, diharapkan menjelaskan keberhasilan Capaian kinerja pada setiap unit kerja serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2023.

Lumajang, 7 Juli 2022

BUPATI LUMAJANG

THORIQUL HAQ, M.ML.

DAFTAR ISI

BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	6
1.4 Maksud dan Tujuan	8
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	9
BAB II	13
2.1 Kondisi Umum Daerah	13
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	13
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	90
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	122
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	217
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2021 dan Realisasi P-RPJMD	229
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program sampai dengan Tahun 2021 231	
2.2.2 Review Capaian Kinerja RPJMD	350
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	407
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	407
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	430
2.3.3 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Penelaahan Pokok Pikiran DPRD	446
BAB III	448
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	448
3.1.1 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	448
3.1.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2023 (Nasional)	455
3.1.2 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Propinsi Jawa Timur	456

3.1.2.1	Kondisi Ekonomi Propinsi Jawa Timur	456
3.1.2.2	Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur	457
3.1.3	Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lumajang 458	
3.1.3.1	Kondisi Ekonomi Kabupaten Lumajang	458
3.1.3.2	Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lumajang	461
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	464
3.2.1	Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.....	467
3.2.2	Kebijakan Umum Belanja Daerah	481
3.2.3	Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah	487
3.2.4	Proyeksi Keuangan Daerah	494
BAB IV	513
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	514
4.1.1	Visi.....	514
4.1.2	Misi	515
4.1.3	Tujuan dan Sasaran	516
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	523
4.2.1	Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023).....	523
4.2.2	Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RKPD Jawa Timur Tahun 2023).....	536
4.2.3	Prioritas Program Strategis Kepala Daerah Terpilih.....	538
4.2.4	Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD	541
4.2.5	Telaah Proyek Strategis Nasional	565
1. A.	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.....	566
B.	Integrated Area Development Lumajang.....	568
4.2.6	Telaah Pemulihan Ekonomi Dampak Covid 19 dan Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)	568
A.	Pemulihan Ekonomi Paska Pandemi Covid 19	568

B. Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak.....	571
4.2.7 Tema Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2023 .	572
4.2.8 Logical Framework Prioritas dan Strategi Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2023.....	574
BAB V.....	771
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	771
a. 5.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2023.....	772
d. 5.2. Program Prioritas Daerah yang Mendukung Pogram Prioritas Nasional.....	1588
BAB VI.....	1623
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	1623
2. 6.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU).....	1624
3. 6.2 Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	1631
1. 6.2.1 Indikator Kinerja Kunci Tingkat Dampak (Impact)...	1631
6.2.2 Indikator Kinerja Kunci Tingkat Hasil (Outcome).....	1650
BAB VII.....	1682

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lumajang.....	13
Tabel 2.2Klasifikasi tinggi wilayahdi Kabupaten Lumajang.....	15
Tabel 2.3 Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah	17
Tabel 2.4 Klasifikasi Jenis Tanah di Kabupaten Lumajang.....	19
Tabel 2.5 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lumajang.....	21
Tabel 2.6 Nama sungai dan debit rata-rata sungai yang dikelola Balai PSA WS Bondoyudo Baru di Kabupaten Lumajang.....	23
Tabel 2.7 Nama Sungai dan Debit Sungai di Kabupaten Lumajang 2020	23
Tabel 2.8 Luas Rawa Kabupaten Lumajang tahun 2020	25
Tabel 2.9 Rata-Rata Curah Hujan di Kabupaten Lumajang Tahun 2021	25
Tabel 2.10 Penggunaan Lahan di Kabupaten Lumajang.....	28
Tabel 2.11 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032	28
Tabel 2.12 Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lumajang	31
Tabel 2.13 Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan.....	33
Tabel 2.14Luas Lahan Tegal/Kebun, Perkebunan, Hutan Rakyatdan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan.....	33
Tabel 2. 15 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi.....	34
Tabel 2. 16 Luas Panen Jagung dan Kedelai	35
Tabel 2. 17Produktivitas Jagung dan Kedelai.....	35
Tabel 2. 18Produksi Jagung dan Kedelai	36
Tabel 2. 19Luas Panen Tanaman Sayuran.....	37
Tabel 2. 20Produksi Tanaman Sayuran.....	38
Tabel 2. 21Produksi Buah-buahan dan Jenis Buah (Kw)	38
Tabel 2. 22 Luas Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman	40
Tabel 2. 23 Luas Panen dan Produksi Tanaman Tebu Giling	41
Tabel 2. 24Sentra Industri di Kabupaten Lumajang	50
Tabel 2. 25 Hasil Telaahan Struktur Ruang Kabupaten Lumajang....	60
Tabel 2. 26 Kawasan Rawan Bencana Berdasarkan Statusnya.....	83
Tabel 2. 27Jumlah PendudukKabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	87
Tabel 2. 28Luas Wilayah dan KepadatanPenduduk Kabupaten Lumajang tahun 2017-2021	88
Tabel 2. 29 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lumajang Tahun 2021	89
Tabel 2. 30 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	89
Tabel 2. 31 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Rasio di Kabupaten Lumajang 2017-2021	90
Tabel 2. 32Capaian PertumbuhanEkonomidi Kabupaten Lumajang 2017 - 2021	91

Tabel 2. 33 PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Berlaku 2017-2021 (dalam miliar).....	92
Tabel 2. 34Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan Dalam Perekonomian Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021 (dalam miliar).....	94
Tabel 2. 35 Distribusi PDRB Kabupaten Lumajang Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	96
Tabel 2. 36 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah).....	97
Tabel 2. 37 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanandan Perikanan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah).....	98
Tabel 2. 38 Laju Inflasi Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	99
Tabel 2. 39 PDRB Perkapita Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	99
Tabel 2. 40 Gini Ratio Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang	100
Tabel 2. 41 Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang	100
Tabel 2. 42 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang	101
Tabel 2. 43Angka IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021.....	102
Tabel 2. 44 IKLH Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	103
Tabel 2. 45 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021.....	104
Tabel 2. 46 Capaian Kinerja Lalu Lintas Daerah di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021	104
Tabel 2. 47 Capaian Indeks Resiko Bencana Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang	105
Tabel 2. 48 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang	106
Tabel 2. 49Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang	106
Tabel 2. 50 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	107
Tabel 2. 51 Predikat Indeks SPBE Kabupaten Lumajang 2016 - 2020.....	108
Tabel 2. 52 Capaian Efektifitas Pengelolaan Risiko Kabupaten Lumajang 2016 - 2020	108
Tabel 2. 53 Capaian Opini BPK Kabupaten Lumajang 2016 - 2020..	109
Tabel 2. 54 Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap pendapatan Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah).....	110
Tabel 2. 55 Rasio Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Target PAD Kabupaten Lumajang 2017 - 2021.....	111
Tabel 2. 56 Capaian Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten Lumajang 2017 - 2021.....	111

Tabel 2. 57 Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang 2017 – 2021	112
Tabel 2. 58 Nilai SAKIP Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang ...	112
Tabel 2. 59 Indeks PendidikanTahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang.....	113
Tabel 2. 60 Angka Harapan Lama SekolahTahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang	114
Tabel 2. 61 Indeks KesehatanTahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang.....	114
Tabel 2. 62 Capaian IndeksPembangunan Gender Tahun 2017-2021	115
Tabel 2. 63 Angka LajuPertumbuhanPenduduk Tahun 2017-2021 .	116
Tabel 2. 64Usia Harapan HidupTahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang.....	116
Tabel 2. 65 Prevalensi StuntingKabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	117
Tabel 2. 66 Presentase balita Gizi KurangKabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	118
Tabel 2. 67 Presentase balita Gizi BurukKabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	119
Tabel 2. 68Cakupan Desa Siaga AktifKabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	119
Tabel 2. 69 Capaian Persentase Capaian IndikatorPPKSMandiri di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021	120
Tabel 2. 70 Capaian Persentase Peningkatan StatusDesaMandiri di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021	120
Tabel 2. 71 Capaian KebudayaanKabupaten Lumajang tahun 2016-2020.....	121
Tabel 2. 72 Angka Partisipasi KasarTahun 2017 – 2021 Kabupaten Lumajang.....	122
Tabel 2. 73 Angka Partisipasi MurniTahun 2017 – 2021 Kabupaten Lumajang.....	123
Tabel 2. 74 Angka Rata-rata Lama SekolahTahun 2017-2020 Kabupaten Lumajang	124
Tabel 2. 75 Capaian Persentase Sekolah Terakreditasi B di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021.....	125
Tabel 2. 76 Capaian Persentase KeluargaSehat di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021	126
Tabel 2. 77Angka Kematian Ibu Sehat di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021	126
Tabel 2. 78Angka Kematian Bayi di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021	127
Tabel 2. 79Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021.....	128
Tabel 2. 80Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021	128

Tabel 2. 81	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021.....	129
Tabel 2. 82	Angka Keberhasilan pengobatan pasien TB Semua Kasus di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021.....	130
Tabel 2. 83	Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021.....	130
Tabel 2. 84	Angka Penemuan Kasus Baru Kusta di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021	131
Tabel 2. 85	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021	131
Tabel 2. 86	Data Keadaan Jalan Di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	132
Tabel 2. 87	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap dan Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 - 2021	133
Tabel 2. 88	Jaringan Irigasi Kondisi Baik di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	134
Tabel 2. 89	Jaringan Irigasi Kondisi Rusak Ringan di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	135
Tabel 2. 90	Jaringan Irigasi Kondisi Rusak Berat di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	135
Tabel 2. 91	Capaian Indeks Kinerja Irigasi dan Persentase cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 - 2021	136
Tabel 2. 92	LUASAN RUANG TERBUKA HIJAU (TAMAN) KOTA LUMAJANG CAPAIAN TAHUN 2017 S.D 2021.....	137
Tabel 2. 93	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH KABUPATEN LUMAJANG REALISASI TAHUN 2017 S.D 2021.....	139
Tabel 2. 94	Jumlah Rumah yang Dibangun dan Jumlah Kebutuhan Rumah di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	140
Tabel 2. 95	Capaian Persentase Peningkatan CapaianLayananKeciptakarya di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021.....	141
Tabel 2. 96	Persentase penegakanPerda / Perkada Tahun 2016-2020.....	142
Tabel 2. 97	Daftar Rekapitulasi KejadianBencana Alam Tahun 2017-2021	143
Tabel 2. 98	Capaian Persentase Tingkat waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah MenejemenKebakaran (WMK) Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang.....	144
Tabel 2. 99	Persentase CapaianIndikator Tingkat Ketahanan Daerah dalamPenanggulanganBencana (Indeks Ketahanan Derah) di Kabupaten Lumajang 2017-2021	145
Tabel 2. 100	Capaian Persentase PPKSyang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan PersentasePeningkatanJumlah PSKS yang berperan aktif dalampenangananPPKS di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021	146

Tabel 2. 101	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020	147
Tabel 2. 102	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Lumajang	148
Tabel 2. 103	Capaian Kinerja Persentase Pencari Kerja Terlatih di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021	148
Tabel 2. 104	Capaian Kinerja Persentase Tenaga Kerjayang Produktif di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021	149
Tabel 2. 105	Capaian Kinerja Persentase Pencari Kerjayang ditempatkan di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	149
Tabel 2. 106	Capaian Persentase Perusahaan yang menerapkantata kelolakerja yang layak di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021.....	150
Tabel 2. 107	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2016-2020	151
Tabel 2. 108	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lumajang Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2017 – 2021	152
Tabel 2. 109	Skor Pola Pangan Harapan Aktual Berdasarkan	153
Tabel 2. 110	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	154
Tabel 2. 111	Perbandingan skor PPH.....	155
Tabel 2. 112	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021	155
Tabel 2. 113	Capaian Persentase titik pantau dengan.....	156
Tabel 2. 114	Persentase Titik Pantau Dengan Kualitas Air Baik di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021	157
Tabel 2. 115	Persentase Tutupan Lahandi Kabupaten Lumajang 2017 – 2021.....	158
Tabel 2. 116	Jumlah Kendaraan Angkut Sampah Kabupaten Lumajang Tahun 2017- 2021	159
Tabel 2. 117	Persentase Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021.....	159
Tabel 2. 118	Capaian indikator urusan kependudukan dan catatan sipil Tahun 2016-2020.....	160
Tabel 2. 119	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	162
Tabel 2. 120	Capaian Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	162
Tabel 2. 121	Capaian Persentase Desa Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Berkualitas di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021.....	163
Tabel 2. 122	Capaian Persentase Dana Swadaya Masyarakat di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021	164
Tabel 2. 123	Capaian Persentase Desa Cepat Berkembang Tahun 2017-2021	164
Tabel 2. 124	Status Desa Mandiri IDMTahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang	164

Tabel 2. 125 Angka Capain Total FertilityRate (TFR)di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021	166
Tabel 2. 126 Angka Capain UnmeetNeeddi Kabupaten Lumajang 2017 - 2021	166
Tabel 2. 127 Angka MCPR di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021....	167
Tabel 2. 128 Capaian Angka Kecelakaan Lalu LintasTahun 2017-2021	168
Tabel 2. 129 Rasio Penurunan PelanggaranLalu Lintas di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021	168
Tabel 2. 130 Capaian Persentase Angkutan Umum yangBerstandar Keselamatan di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021.....	169
Tabel 2. 131 Capaian Persentase Peningkatan KualitasPrasarana perhubungan di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021	169
Tabel 2. 132 Capaian PersentasePenerapan SPBE oleh Perangkat Daerah	170
Tabel 2. 133 Capaian indikator Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	172
Tabel 2. 134 Capaian Persentase PertumbuhanUsaha Mikro dan Persentase Koperasi AktifKabupaten Lumajang Tahun 2017-2021.	173
Tabel 2. 135 Perbandingan Jumlah Usaha KoperasiAktif dan Koperasi Tidak Aktif Tahun 2017-2021.....	174
Tabel 2. 136Jumlah Usaha MikroKabupatenLumajan Tahun 2017-2021	174
Tabel 2. 137 Capaian indikator urusan Koperasi & UKM di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	176
Tabel 2. 138 Nilai Investasi PMA, PMDN dan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021.....	177
Tabel 2. 139Jumlah Atlet danPemuda Yang Berprestasi 2016-2020	178
Tabel 2. 140 Persentase Atlet danPemuda Yang Berprestasi 2016-2020	179
Tabel 2. 141 Persentase Data Statistik YangTerintegrasi Di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020.....	180
Tabel 2. 142Capaian indikator Urusan Persandian Di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020	181
Tabel 2. 143Cagar Budaya yang dipelihara Tahun 2021 di Kabupaten Lumajang	182
Tabel 2. 144 Capaian Kebudayaanantahun 2017 – 2021 Kabupaten Lumajang.....	182
Tabel 2. 145 Persentase Cakupan Pelestarian Budaya Di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021.....	183
Tabel 2. 146 Capaian PerpustakaanTahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang.....	184
Tabel 2. 147Koleksi Buku Di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020	185
Tabel 2. 148Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020.....	185
Tabel 2. 149 Capaian Persentase tingkatKetersediaanarsip daerah di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021	186

Tabel 2. 150 Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2017-2021 .	186
Tabel 2. 151 Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	188
Tabel 2. 152 Jumlah PAD sektor Pariwisata	188
Tabel 2. 153 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	189
Tabel 2. 154 Jumlah produksi dan produktivitas dalam tahun 2020 dan 2021	190
Tabel 2. 155 Persentase Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Khususnya Buah-Buahan Dominan	191
Tabel 2. 156 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura 2020-2021	191
Tabel 2. 157 Produksi dan Produktivitas Perkebunan Tahun 2020 – 2021	192
Tabel 2. 158 Perbandingan Realisasi Populasi Ternak Tahun 2017 – 2021	193
Tabel 2. 159 Jumlah Produksi Komoditas tahun 2017-2021.....	194
Tabel 2. 160 Produksi Hasil Tambang Galian C Tahun 2017- 2021 ..	194
Tabel 2. 161 Persentase desa yang teraliri Listrik di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021.....	195
Tabel 2. 162 Pasar Yang Dikelola Dinas Perdagangan	196
Tabel 2. 163 Ekspor Bersih Perdagangan ADHB (Net Ekspor Barang dan Jasa)	197
Tabel 2. 164 Ekspor Bersih Perdagangan ADHK (Net Ekspor Barang dan Jasa)	197
Tabel 2. 165 Capaian Nilai PDRB sektor perdagangan dan Nilai Pendapatan per kapita di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2021	198
Tabel 2. 166 Perkembangan Industri di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2021	199
Tabel 2. 167 Capaian Nilai PDRB Sektor Industri di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021.....	200
Tabel 2. 168 Persentase Penempatan Transmigran Sesuai Standar di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020	201
Tabel 2. 169 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang 2016 – 2020.....	202
Tabel 2. 170 Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi 2017–2021	204
Tabel 2. 171 Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi 2016-2020	205
Tabel 2. 172 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang	205
Tabel 2. 173 Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang.....	206
Tabel 2. 174 Persentase Ketepatan waktu penyampaian Perubahan APBD Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang.....	207
Tabel 2. 175 Persentase Ketepatan waktu penyampaian LKPD kepada BPK RI Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang	207

Tabel 2. 176 Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang	207
Tabel 2. 177 capaian Kinerja Persentase Penerimaan Pajak Daerah dan Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lumajang 2017-2020	208
Tabel 2. 178 Data Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	209
Tabel 2. 179 Indeks ASN di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021	209
Tabel 2. 180 Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	211
Tabel 2. 181 Jumlah OPD yang Diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK/WBBM ke Kementerian PAN dan RB Tahun 2016-2020	212
Tabel 2. 182 Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3 Kabupaten Lumajang 2017 - 2021	213
Tabel 2. 183 Nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Lumajang 2017 - 2021	213
Tabel 2. 184 Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten Lumajang 2017 - 2021	214
Tabel 2. 185 Persentase Perangkat Daerah/Unit kerjayang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan self assessment WBK 2017- 2021	214
Tabel 2. 186 Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Integritas Pengawasan Minimal 3,5 Tahun 2017 - 2021	215
Tabel 2. 187 Capaian indikator Fungsi Kewilayahan 2017 - 2021	216
Tabel 2. 188 Persentase Masalah Strategis Yang Ditangani Tahun 2017-2021	217
Tabel 2. 189 Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	219
Tabel 2. 190 Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	219
Tabel 2. 191 Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020	220
Tabel 2. 192 Perbandingan Kondisi Sistem Jaringan Jalan Di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 - 2021	224
Tabel 2. 193 Kondisi Jembatan Di Kab. Lumajang Tahun 2017 - 2021	225
Tabel 2. 194 Luas Sawah Yang Terairi Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	225
Tabel 2. 195 Kondisi Jaringan Irigasi Di Kabupaten Lumajang Tahun 2016 - 2020 (dalam Km)	226
Tabel 2. 196 Nilai Investasi di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2020	228
Tabel 2. 197 T.E-1	230
Tabel 2. 198 T-C. 19	284
Tabel 2. 199 Evaluasi Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2021	351

Tabel 2. 200 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2021	354
Tabel 2. 201 Evaluasi Kinerja Indikator Makro Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun sampai dengan Tahun 2021	363
Tabel 2. 202 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2021	367
Tabel 2. 203 Realisasi Kinerja Anggaran Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020	375
Tabel 2. 204 Analisis Capaian Kinerja Program Strategis Kepala Daerah	391
Tabel 2. 205 Tabel Permasalahan Utama dalam RPJMD	407
Tabel 2. 206 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD	416
Tabel 2. 207 Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Analisis Capaian Program Strategis Kepala Daerah Terpilih.....	418
Tabel 2. 208 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Capaian Indikator Sasaran PD	430
Tabel 3. 1 Postur RAPBN Tahun 2021 (Triliun Rupiah)	449
Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional 2018-2022	454
Tabel 3. 3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2021	458
Tabel 3. 4 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2021-2022	460
Tabel 3. 5 Perbedaan Struktur Pendapatan Daerah Berdasarkan Permendagri nomor 1 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019	465
Tabel 3. 6 Perbedaan Struktur Belanja Daerah.....	466
Tabel 3. 7 T-C.20 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 s.d Tahun 2023	477
Tabel 3. 8 T-C 21 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 s.d Tahun 2023	484
Tabel 3. 9 T-C.22 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 s.d Tahun 2023	491
Tabel 3. 10 Skenario Pembayaran Pinjaman Daerah Kabupaten Lumajang.....	495
Tabel 3. 11 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lumajang.....	497
Tabel 3. 12 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021-2023.....	500
Tabel 3. 13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021-2023.....	509
Tabel 3. 14 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah.....	512
Tabel 4 1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.....	518

Tabel 4 2 Program Strategis Kabupaten Lumajang.....	538
Tabel 4 3TB-57 Rumusan Usulan Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi Kabupaten Lumajang.....	542
Tabel 4 4 Keterkaitan Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur, dan RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2023	573
Tabel 4 5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lumajang	574
Tabel 4 6 Prioritas Tematik Kabupaten Lumajang Tahun 2023.....	575
Tabel 5 1 Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023.....	773
Tabel 5 2 Rekapitulasi Pagu Indikatif RKPD 2023 berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah.....	800
Tabel 5 3 Rekapitulasi Pagu Indikatif RKPD 2023 berdasarkan Perangkat Daerah	805
Tabel 5 4 Matriks Program RKPD 2023 yang Mendukung Program	1589
Tabel 6 1 Penetapan Indikator Makro Kabupaten Lumajang Tahun 2023	1623
Tabel 6 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lumajang Tahun 2023	1625
Tabel 6 3 Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact.....	1632
Tabel 6 4 Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome	1650

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	20
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Lumajang	13
Gambar 2. 2 Peta Rencana Jaringan Irigasi	21
Gambar 2. 3 Rata-Rata Kelembapan Udara	26
Gambar 2. 4 Rata-Rata Suhu Udara	27
Gambar 2. 5 Peta Rencana Penggunaan Lahan	30
Gambar 2. 6 Visualisasi Kawasan Pertanian di Kabupaten Lumajang	40
Gambar 2. 7 Visualisasi Kawasan Perikanan Kabupaten Lumajang...	43
Gambar 2. 8 Visualisasi Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Lumajang.....	44
Gambar 2. 9 Peta Rencana Pengembangan Potensi Daerah berbasis Kewilayahan	45
Gambar 2. 10 Sistem Perwilayahan Propinsi Jawa Timur dengan WP Probolinggo – Lumajang.....	45
Gambar 2. 11 Visualisasi Kawasan Pertambangan Kabupaten Lumajang.....	47
Gambar 2. 12 Peta Pemanfaatan Ruang dan Rekomendasi Pemanfaatan Lingkungan Jawa Timur.....	54
Gambar 2. 13 Peta Kawasan Perindustrian Kabupaten Lumajang.....	55
Gambar 2. 14 Peta Rencana Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi.....	81
Gambar 2. 15 Peta Kawasan Rawan Gempa Bumi	82
Gambar 2. 16 Peta Rencana Kawasan Banjir.....	84
Gambar 2. 17 Peta Rencana Kawasan Rawan Bencana Longsor.....	86
Gambar 2. 18 Peta Kawasan Peruntukkan Perkebunan Kabupaten Lumajang.....	221
Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2016-2021	449
Gambar 3. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	459
Gambar 3. 3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Lumajang 2019-2023	469
Gambar 3. 4 Alokasi DBHCHT Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021	470
Gambar 3. 5 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023	489
Gambar 4 1 Komponen penyusun RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2023	514
Gambar 4 2 Pemetaan Arah Kebijakan.....	573

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Perencanaan pembangunan tahunan daerah yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Perencanaan pembangunan yang baik akan menjadi arah dalam pencapaian cita-cita pembangunan daerah. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari P-RPJMD Tahun 2018-2023. Tahun 2023 menjadi tahun kelima atau terakhir dari rangkaian proses pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023. Dokumen RKPD disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.1.1 Pengertian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD pasal 1 ayat 28 menyebutkan : Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

1.1.2 Proses Penyusunan RKPD

Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, demokratis partisipatif, politis, serta atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) serta berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16 (1) RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan.

1.1.3 Kedudukan RKPD Tahun 2023 dalam periode RPJMD Kabupaten

Guna memenuhi kewajiban dimaksud dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 untuk melaksanakan visi dan Misi Bupati ini menjadi sangat penting untuk memantapkan langkah dalam mencapai target pembangunan jangka menengah menjelang berakhirnya periode pembangunan daerah jangka menengah di tahun 2023.

RKPD Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022, serta memperhatikan dinamika lingkungan global yang kemungkinan terjadi keberlangsungan pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat. RKPD Tahun 2023 juga diselaraskan dengan Rancangan RKP Tahun 2023.

1.1.4 Keterkaitan Antara RKPD dengan R-RPJMD, P-Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta Proses Penyusunan RAPBD

Dokumen RKPD Tahun 2023 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

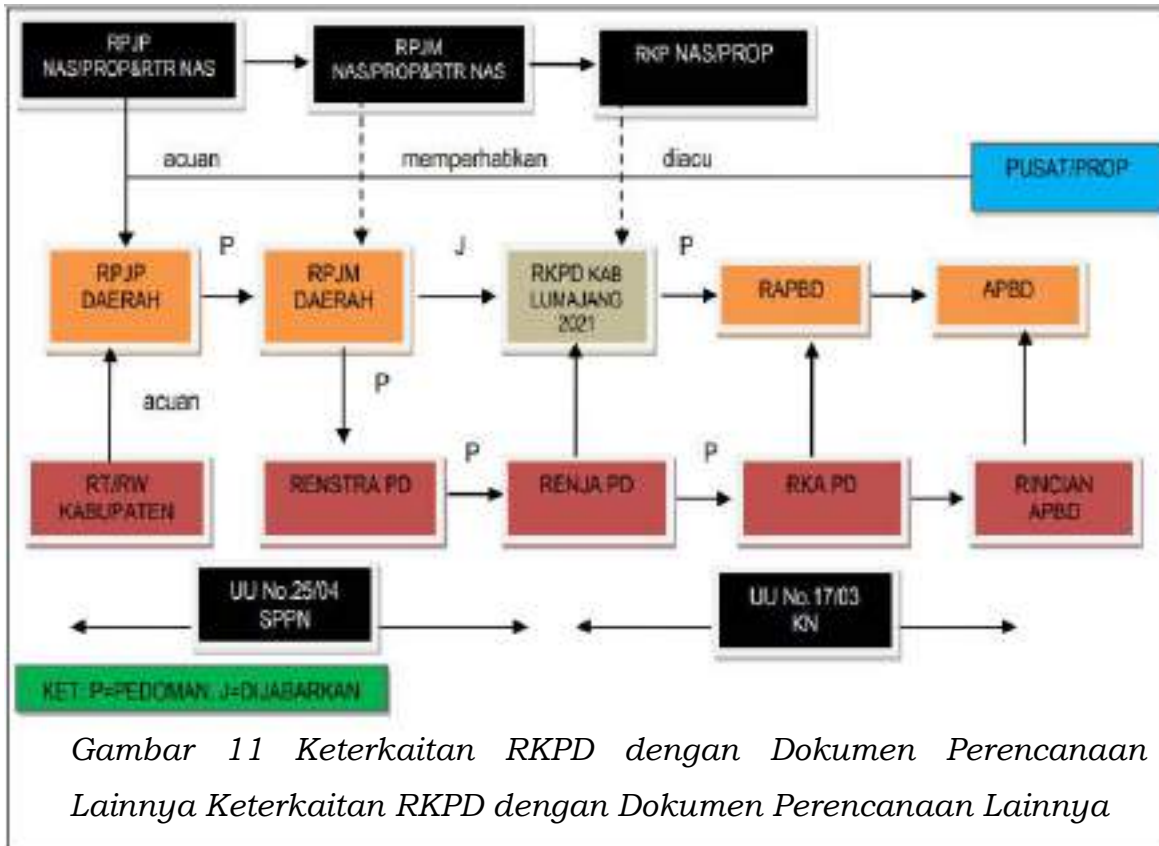
- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keagan Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
 14. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keagan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republic Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi

- Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) tahun 2018-2023.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional maupun daerah. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, antara lain : (1) RPJPD, (2) PRPJMD, (3) P-Renstra-PD, (4) RKPD, dan (5) Renja-PD. Sedangkan dokumen di luar Kabupaten Lumajang yang terkait dengan dokumen ini, antara lain : (1) RPJP Nasional dan Provinsi, (2) RPJM Nasional dan Provinsi, dan (3) RKP Nasional dan Provinsi. Bagan keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 11 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Lumajang tahun 2023 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Lumajang. Kemudian setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijabarkan dalam bentuk RKPD Kabupaten Lumajang, yang selanjutnya akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah untuk menyusun KUA-PPAS (Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Lumajang Tahun 2023. RKPD kabupaten Lumajang tahun 2023 ini merupakan implementasi penjabaran dari P-RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 untuk tahun ke-5. Dokumen RKPD ini juga berpedoman pada RTRW Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032 berkaitan dengan pembangunan yang terkait dengan penataan ruang.

Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari

perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antar wilayah dan lintas sektor. Pengembangan pola kerjasama antara wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan, Maksud Penyusunan RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2023 dimaksudkan untuk :

1. Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023;
2. Menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target P-RPJMD Tahun 2018-2023;
3. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar urusan pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2023 adalah sebagai pedoman :

1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023;
2. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tertuang Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023;
3. Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023;
4. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lumajang Tahun 2023.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2023 adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Lumajang, RKP/program strategis nasional, dan RPKD Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk penyusunan RPKD Kabupaten Lumajang.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Bagian Ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi

daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2023, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan Umum dan aspek daya saing daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2021 dan Realisasi P-RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi/Kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan proyeksi keuangan.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kabupaten Lumajang.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Berisi Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2023

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

5.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Tahun 2023

Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama pada akhir tahun perencanaan.

6.2 Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertujuan memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Lumajang berada di Wilayah Tapal Kuda tepatnya di Provinsi Jawa Timur Bagian Selatan. Secara Geografis terletak pada 112°50'-113°22' Bujur Timur dan 7°52'-8°23' Lintang Selatan. Kabupaten Lumajang berbatasan dengan 3 kabupaten lain yaitu Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Jember di sebelah Timur dan Kabupaten Malang di sebelah barat. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, untuk lebih jelas dapat dilihat pada berikut.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Lumajang

Luas wilayah Kabupaten Lumajang yaitu sebesar 1.790,90 Km² atau berkisar 3,74% dari luas keseluruhan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan yaitu Kecamatan Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari, Rowokangkung, Tekung, Lumajang, Sumbersuko, Sukodono, Senduro, Pasrujambe, Padang, Gucialit, Jatiroto, Randuagung, Kedungjajang, Klakah dan Ranuyoso, selain itu terdapat 198 Desa, 7 Kelurahan, 1.749 RW dan 7.023 RT. Secara lebih rinci dapat dilihat dalam berikut.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lumajang

No	Kecamatan	Luas (ha)	Jumlah				Persen-tase (%)
			Desa/ Kelurahan	Dusun	RW	RT	

1	Tempursari	10.535,00	7	24	48	191	5,88
2	Pronojiwo	14.149,00	6	25	64	161	7,90
3	Candipuro	14.309,40	10	61	83	403	7,99
4	Pasirian	12.839,00	11	55	105	506	7,17
5	Tempeh	7.321,00	13	70	101	586	4,09
6	Lumajang	2.847,15	12	18	134	536	1,59
7	Sumbersuko	2.907,35	8	28	55	279	1,62
8	Tekung	2.788,00	8	29	68	212	1,56
9	Kunir	5.330,00	11	48	81	376	2,98
10	Yosowilangun	7.244,00	12	31	71	396	4,04
11	Rowokangkung	5.888,00	7	29	66	188	3,29
12	Jatiroto	5.369,00	6	26	72	272	3,00
13	Randuagung	9.392,25	12	60	127	440	5,24
14	Sukodono	2.880,86	10	44	94	363	1,61
15	Padang	5.383,14	9	42	70	312	3,01
16	Pasrujambe	16.247,45	7	37	95	287	9,07
17	Senduro	17.089,65	12	50	122	384	9,54
18	Gucialit	10.179,25	9	38	62	222	5,68
19	Kedungjajang	6.613,00	12	55	88	314	3,69
20	Klakah	8.742,00	12	54	87	306	4,88
21	Ranuyoso	11.035,50	11	55	56	289	6,16
Jumlah		179.090,00	205	879	1.749	7.023	7.023

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Berdasarkan data di atas, kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Lumajang adalah Kecamatan Senduro dengan luas 17.089,65 ha dan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil yaitu Kecamatan Tekung dengan luas 2.788 ha. Sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan paling banyak adalah Kecamatan Tempeh dengan jumlah 13 desa. Sedangkan untuk Kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Jatiroto dengan jumlah 6 desa.

1. Topografi

Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Lumajang terdiri dari: daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Kabupaten Lumajang diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo dan Gunung Lemongan. Beberapa wilayah yang termasuk ke dalam daerah gunung/pegunungan diantaranya Kec. Pronojiwo, Pasrujambe, Tempursari, Candipuro, Senduro, Gucialit, Ranuyoso dan Klakah. Sedangkan wilayah yang termasuk ke dalam kategori dataran fluvial adalah kecamatan Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono serta wilayah yang termasuk ke dalam dataran alluvial adalah kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun hingga Tempursari. Selain itu terdapat beberapa sungai yang mengalir di Kabupaten Lumajang diantaranya Kali Glidik, Kali Rawaan, Kali Gede, Kali Regoyo, Kali Rejali, Kali Besuk Sat, Kali Mujur dan Kali Bondoyudo.

Berdasarkan ketinggian tempat Kabupaten Lumajang memiliki ketinggian tempat bervariasi pada umumnya berkisar 100-500 meter dari permukaan laut sekitar 63.109,15 ha (35,24% dari luas wilayah) yang tersebar di bagian Tengah - Barat dan Utara wilayah Kabupaten. Ketinggian 0-25 mdpl ada di 9 daerah kecamatan yang luasnya sekitar 19.721,90 ha (11,01%), ketinggian antara 25-100 mdpl tercatat 38.600,86 ha atau 21,55%, ketinggian 500-1000 mdpl ada di 9 daerah kecamatan yang luasnya sekitar 30.561,60 ha (17,06%), ketinggian 1000-2000 mdpl ada di 8 daerah kecamatan yang luasnya sekitar 20.207,09 ha (11,28%), sedangkan ketinggian >2000 mdpl ada di 3 daerah kecamatan yang luasnya sekitar 6.889,40 ha yang terletak di Kecamatan Pronojiwo, Senduro dan Gucialit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Klasifikasi tinggi wilayah di Kabupaten Lumajang

No	Kecamatan	Luas Tanah Sesuai Dengan Ketinggian Tempat (ha)					
		0-25 mdpl	25-100 mdpl	100-500 mdpl	500-1000 mdpl	1000-2000 mdpl	Lebih dari 2000 mdpl
1	Tempursari	2.914,98	2.059,74	4.941,24	619,04	-	-
2	Pronojiwo	-	-	1.119,65	8.918,34	3.405,61	705,40
3	Candipuro	123,51	287,90	9.289,05	4.240,29	368,65	-
4	Pasirian	1.549,9	3.997,1	7.291,9	-	-	-

No	Kecamatan	Luas Tanah Sesuai Dengan Ketinggian Tempat (ha)					
		0-25 mdpl	25-100 mdpl	100-500 mdpl	500-1000 mdpl	1000-2000 mdpl	Lebih dari 2000 mdpl
		0	8	2			
5	Tempeh	1.047,64	4.054,29	2.219,07	-	-	-
6	Lumajang	-	2.847,15	-	-	-	-
7	Sumbersuko	-	2.038,34	869,01	-	-	-
8	Tekung	200,08	2.587,92	-	-	-	-
9	Kunir	2.009,08	3.321,92	-	-	-	-
10	Yosowilangun	7.213,40	30,60	-	-	-	-
11	Rowokangkuning	3.514,20	2.378,80	-	-	-	-
12	Jatiroto	1.150,11	4.218,89	-	-	-	-
13	Randuagung	-	3.819,49	5.572,76	-	-	-
14	Sukodono	-	2.880,86	-	-	-	-
15	Padang	-	1.318,75	4.064,39	-	-	-
16	Pasrujambe	-	-	3.150,20	4.200,75	5.646,25	3.250,25
17	Senduro	-	-	2.540,00	5.225,10	6.390,80	2.933,75
18	Gucialit	-	-	3.193,73	3.367,81	3.617,71	-
19	Kedungjajang	-	2.764,03	3.428,02	405,75	15,20	-
20	Klakah	-	-	6.956,02	1.473,11	312,87	-
21	Ranuyoso	-	-	8.474,0	2.111,4	450,00	-

No	Kecamatan	Luas Tanah Sesuai Dengan Ketinggian Tempat (ha)					
		0-25 mdpl	25-100 mdpl	100-500 mdpl	500-1000 mdpl	1000-2000 mdpl	Lebih dari 2000 mdpl
				9	1		
Jumlah		19.721,90	38.600,86	63.109,15	30.561,60	20.207,09	6.889,40

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Berdasarkan faktor lereng/kemiringan tanah yang terjal terdapat 6 kecamatan yang termasuk yaitu Kec. Pronojiwo, Candipuro, Pasrujambe, Senduro, Randuagung dan Kedungjajang. Dilihat dari faktor lereng/kemiringan tanah yang landai, sebagian besar kecamatan di Kabupaten Lumajang memiliki kemiringan lereng 0-4% kecuali Tekung, Yosowilangun dan Rowokangkung. Sedangkan Kecamatan yang lainnya masuk pada kategori tanah dengan kemiringan lereng 8-15%. Kondisi kemiringan berkisar 0-15 % merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman semusim, 15-25 % untuk pertanian tanaman perkebunan, 25-40 % untuk pertanian tanaman perkebunan dan kehutanan dengan menggunakan prinsip konversasi dan 40% keatas merupakan daerah hutan.

Tabel 2.3 Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah

No	KECAMATAN	Kelerengan Tanah/Lereng (ha)							Jumlah
		0 - 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 15 %	15 - 30 %	30 - 40%	> 40%	
1	TEMPURSARI	2.747,56	172,61	50,80	1.073,82	5.608,15	660,17	15,11	10.328,23
2	PRONOJIWO	337,48	1.110,53	3.087,09	3.637,27	4.823,69	1.067,72	86,90	14.150,69
3	CANDIPURO	1.163,73	7.254,42	1.632,49	543,37	1.334,14	273,85	-	12.202,00
4	PASIRIAN	9.247,04	1.563,04	164,24	491,85	2.741,92	91,75	-	14.299,84
5	TEMPEH	7.426,84	134,13	24,96	-	-	-	-	7.585,93
6	LUMAJANG	0,02	31,41	1,77	-	-	-	-	33,20
7	SUMBERSUKO	2.348,02	290,21	12,41	0,10	-	-	-	2.650,74
8	TEKUNG	3.032,63	-	-	-	-	-	-	3.032,63
9	KUNIR	5.274,23	24,39	-	-	-	-	-	5.298,61

No	KECAMATAN	Kelerengan Tanah/Lereng (ha)							Jumlah
		0 - 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 15 %	15 - 30 %	30 - 40%	> 40%	
10	YOSOWILANG UN	6.979,57	-	-	-	-	-	-	6.979,57
11	ROWOKANGKUNG	6.334,46	-	-	-	-	-	-	6.334,46
12	JATIROTO	4.615,69	183,47	69,56	-	-	-	-	4.868,72
13	RANDUAGUNG	4.570,07	2.665,99	1.850,50	550,33	342,31	87,88	-	10.067,08
14	SUKODONO	0,02	6,37	-	-	3,86	-	-	10,24
15	PADANG	1.087,09	2.356,56	1.551,27	276,00	115,37	3,53	-	5.389,81
16	PASRUJAMBE	326,48	1.639,65	3.093,82	3.562,30	5.370,09	2.230,51	270,33	16.493,18
17	SENDURO	246,86	837,15	2.296,23	6.323,25	6.646,85	1.727,62	206,89	18.284,85
18	GUCIALIT	31,51	286,08	1.602,15	6.114,72	1.694,36	44,28	-	9.773,11
19	KEDUNGJAJANG	2.087,01	1.506,84	487,34	124,48	1.506,84	677,94	6.390,45	12.780,90
20	KLAKAH	2.669,99	1.551,89	1.572,89	853,54	687,67	171,62	-	7.507,61
21	RANUYOSO	2.058,91	2.666,42	2.817,24	1.882,93	1.310,68	282,40	-	11.018,59
TOTAL		62.585,18	24.281,16	20.314,77	25.433,97	32.185,94	7.319,29	6.969,69	179.090,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Lumajang, 2020 (data diolah)

2. Geologi

Geologi pada umumnya membahas mengenai material pembentuk bumi dan segala proses yang terjadi baik di dalam bumi (bawah permukaan) maupun yang terjadi di atas permukaan bumi. Gaya yang bekerja di dalam bumi (endogen) menghasilkan gempa bumi dan aktivitas vulkanik, sementara itu gaya eksternal (eksogen) menyebabkan terjadinya pelapukan, erosi, dan pembentukan bentang alam semua proses itu menyebabkan batuan memiliki ciri yang khusus.

Berdasarkan formasinya geologi batuan terdiri dari beberapa macam yaitu kuartar (Q), Mesozoikum (Mz), batuan beku dalam ultra basa (Pdt), Miosen bawah (L Mi), Sekis hablur (Pr), Mio Pliosen (Mi Pl), batuan beku dalam basa (Gb), Paleogen (Pg), batuan beku dalam asam kapur (K Gr). Kabupaten Lumajang dibentuk dari batuan vulkanik, old quarternary volcanic product, batuan endapan (alluvium) dan Miosen

Sedimentary. Batuan terbentuk dengan fisiografi yang bergelombang dimana batuan old kwarter vulkanik dan alluvium di sebelah barat Kabupaten Lumajang berasal dari dua pegunungan tinggi yaitu Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Pada umumnya Kabupaten Lumajang disusun oleh formasi batuan Alluvium (68.005,87 Ha) yang mencapai 38% dan terkecil Miosen Sedimentary 8% dari luas wilayah.

Berdasarkan jenis tanahnya, daerah ini terdiri dari jenis tanah alluvial hidromorf, aluvial coklat kekelabuan, gley, regusol, andosol, mediteran dan latosol. Jenis tanah didominasi oleh regusol yang tersebar di bagian barat, utara dan bagian tengah wilayah kabupaten (dari mulai Kecamatan Senduro hingga ke kecamatan Lumajang, Kunir, dan Pasirian serta Ranuyoso) yang mencapai 66.284,94 hektar atau 37,01% dari luas wilayah. Jenis tanah yang paling sedikit luas sebarannya adalah alluvial coklat kekelabuan yang hanya mencakup 2,76% saja dari luas wilayah.

Tabel 2.4 Klasifikasi Jenis Tanah di Kabupaten Lumajang

No	Kecamatan	Klasifikasi Jenis Tanah						
		A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	F (m)	G (m)
1	Tempursari	666,3	1.547,90	-	933,8	-	-	7.387,10
2	Pronojiwo	-	-	-	8.161,30	2.355,40	-	3.632,30
3	Candipuro	132,5	-	-	6.989,20	2.733,80	-	4.453,60
4	Pasirian	1.250,0	-	-	8.759,00	-	-	2.830,10
5	Tempeh	548,6	-	214,5	6.558,00	-	-	-
6	Lumajang	-	-	-	5.442,30	-	-	-
7	Sumbersuko	-	-	461	2.327,10	-	-	-
8	Tekung	452,3	-	1.383,50	3.494,20	-	-	-
9	Kunir	2.813,1	-	3.907,10	524,3	-	-	-
10	Yosowilangun	-	-	6.170,80	-	-	-	-
11	Rowokangkuning	-	-	3.640,60	1.445,40	-	-	-
12	Jatiroto	-	3.306,1	3.368,80	700,1	-	-	2.017,20
13	Randuagung	-	17,1	-	3.938,10	-	-	4.308,80
14	Sukodono	-	-	-	9.328,70	19.572,7	-	4.748,30
15	Padang	-	-	-	-	2.914,20	-	7.265,10
16	Pasrujambe	-	-	-	-	-	812,9	5.799,80

No	Kecamatan	Klasifikasi Jenis Tanah						
		A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	F (m)	G (m)
17	Senduro	-	73,3	-	4.213,70	-	3.798,4	657,1
18	Gucialit	-	-	-	3.469,90	28,4	4.309,1	3.228,10
19	Kedungjajang	666,3	1.547,9	-	933,8	-	-	7.387,10
20	Klakah	-	-	-	8.161,30	2.355,40	-	3.632,30
21	Ranuyoso	132,5	-	-	6.989,20	2.733,80	-	4.453,60
Jumlah		5.862,7	4.944,3	19.146,1	66.284,9	27.604,5	8.920,4	46.327,3
%		3,3	2,8	10,7	37	15,4	5	25,9

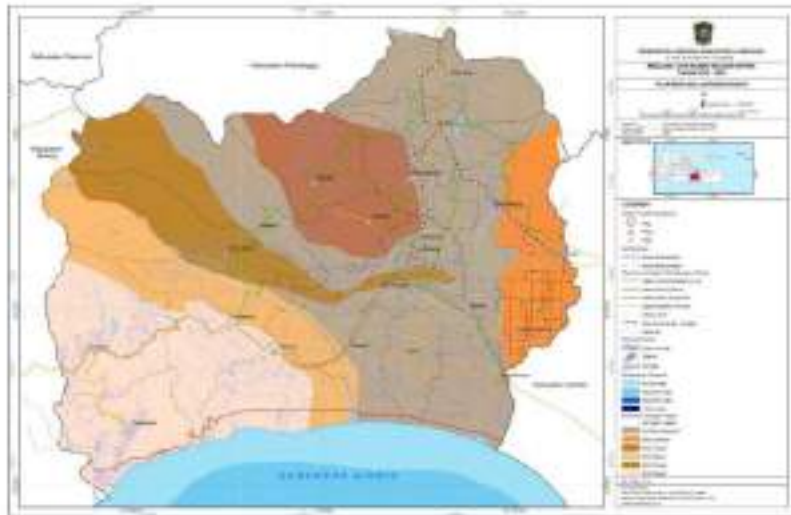
Sumber: BPN Kabupaten Lumajang, 2021

Keterangan : A : Alluvial Hidromorf, B : Alluvial Coklat Kekelabuan, C : Gley, D : Regusol, E : Andosol, F : Mediteran dan G : Latosol

3. Hidrologi

Keberadaan tiga (3) gunung di Kabupaten Lumajang menjadikan potensi air permukaan dan air tanah cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk di sekitarnya. Pada tahun 1996, tercatat 480 buah mata air di Kabupaten Lumajang yang berfungsi, dengan spesifikasi 364 buah memiliki debit besar dan 116 buah memiliki debit kecil. Kemudian pada tahun 2003, jumlah mata air yang ada hanya tersisa 150 buah dengan debit yang kecil serta 281 buah dengan debit yang besar. Berdasarkan kondisi tersebut, maka diadakan penanganan sumber mata air pada tahun 2003-2008 untuk 199 buah mata air, diperoleh hasil pada tahun 2006 sejumlah 6 buah sumber mata air yang mati hidup kembali, satu buah di Kecamatan Kunir, satu buah di Kecamatan Padang, 1 di Kecamatan Kedungjajang, serta tiga buah di Kecamatan Guccialit.

Beberapa mata air Kabupaten Lumajang terletak di Kecamatan Pronojiwo, Randuagung, Klakah, Kedungjajang, Pasrujambe, Senduro, Guccialit, Ranuyoso, Summersuko, Tekung, Candipuro, Tempursari, Lumajang, Sukodono, Pasirian, Tempeh dan Kunir. Beberapa sumber mata air besar yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mahameru antara lain adalah: Sumbertopo di Kecamatan Kedungjajang, Selokambang di Kecamatan Summersuko, Sumberjebuk di Kecamatan Pasirian, Ranubedali di Ranuyoso, Sumberwringin di Klakah, Gunung Kenek di Randuagung, Sewu di Randuagung, Glintungan di Pasirian, Ireng-ireng di Senduro dan Umbulsari di Tempursari.



Sumber Bappeda Kab. Lumajang, 2013

Gambar 2. 2 Peta Rencana Jaringan Irigasi

Wilayah Kabupaten Lumajang berdasarkan kondisi hidrologinya merupakan daerah yang dilewati oleh beberapa sungai besar dan juga sungai kecil. Kondisi hidrologi Kabupaten Lumajang dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya oleh sungai, curah hujan, dan terdapat daerah rawa. Terdapat 30 sungai yang mengalir di Kabupaten Lumajang, 369 DAM, 254 pompa air dan 12 air terjun. Adapun sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lumajang

No.	Nama Sungai	Luas (Ha) / Panjang (m)
1	Rondoningo	95.200
2	Pandan Laras	43.500
3	Kertosono	39.700
4	Kadang Jati	8.000
5	Besuk	13.200
6	Jabung	20.500
7	Pancarglagas	85.700
8	Paiton	18.000
9	Kresek	24.500
10	Taman	24.100
11	Legundi	12.500

No.	Nama Sungai	Luas (Ha) / Panjang (m)
12	Curah Manjangan	5.000
13	Klumprit	12.500
14	Lumbang	17.500
15	Blibis	20.000
16	Blabo	10.000
17	Besi	15.500
18	Patalan	22.500
19	Kedung Galeng	38.000
20	Banyubiru	11.000
21	Gending	20.000
22	Klaseman	11.000
23	Pekalen	35.100
24	Afour Bujel	2.000
25	Lawean	16.700
26	Bondoyudo	62.500
27	Kali Asem	32.000
28	Kali Glidik	28.000
29	Kali Rejali	29.000
30	Kali Mujur	17.000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang, 2017

Pengelolaan sungai di Kabupaten Lumajang dilakukan oleh dua instansi yaitu Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Bondoyudo Baru yang merupakan UPT Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur di Lumajang yang mengelola jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dengan luas 1000-3000 Ha atau daerah irigasi <1000 Ha yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, sedangkan untuk jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten dengan luas <1000 Ha dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang. Penjelasan jaringan primer dan sekunder tersebut diatas, sebagaimana yang tertuang dalam Permen PUPR Nomer 14 tahun 2015 dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Tabel 2.6 Nama sungai dan debit rata-rata sungai yang dikelola Balai PSA WS Bondoyudo Baru di Kabupaten Lumajang

No	Sungai	Lokasi	Debit rata-rata per tahun (m ³ /dtk)
1	Kaliasem	Mojosari-Sumbersuko	3,809.08
2	Curah Menjangan	Banjarwaru-Lumajang	3,764.42
3	Kali Jatiroto	Kaliboto-Jatiroto	8.189.42
4	Bondoyudo	Tekung-Tekung	8,336.00
5	Bondoyudo	Banyuputih Kidul-Jatiroto	16,374.83
6	Curah Menjangan	Sentul-Sumbersuko	9,046.00

Sumber : Dinas PUTR Kab. Lumajang, 2020

Tabel 2.7 Nama Sungai dan Debit Sungai di Kabupaten Lumajang 2020

No	Nama Sungai	Debit (m ³ /detik)	
		Kemarau	Hujan
1	Bondoyudo	16.268,00	35.141,00
2	Bodang	125,00	250,00
3	Curah Menjangan	3.200,00	5.885,00
4	Kajaran	500,00	2.000,00
5	Kresek	600,00	1.900,00
6	Grobogan	1.000,00	5.000,00
7	Paleran	1.500,00	4.000,00
8	Umbul Pring Tali	950,00	4.500,00
9	Jatiroto	2.717,00	7.519,00
10	Batu Lubang	7.000,00	3.250,00
11	Boto	2.492,00	2.717,00
12	Banter	1.250,00	2.550,00
13	Dilem	461,00	525,00
14	Blukon	409,00	1.746,00
15	Asem/Laban	409,00	13.931,00
16	Betoto	300,00	774,00

No	Nama Sungai	Debit (m ³ /detik)	
		Kemarau	Hujan
17	Ireng-ireng	461,00	7.500,00
18	Lateng	409,00	13.200,00
19	Pakel	150,00	250,00
20	Krai	1.000,00	11.000,00
21	Mujur	300,00	7.790,00
22	Tunggeng	60,00	250,00
23	Besuk Tempeh	40,00	400,00
24	Poh	25,00	90,00
25	Klatakan	200,00	1.000,00
26	Besuk Sat	4.650,00	7.000,00
27	Pancing	1.000,00	2.100,00
28	Besuk Semut	300,00	750,00
29	Durek	3.540,00	10.250,00
30	Rejali	6.500,00	12.000,00
31	Wuluh	1.050,00	4.800,00
32	Krumbang	30,00	3.200,00
33	Regoyo	50,00	3.800,00
34	Gede	2.700,00	6.000,00
35	Welang	600,00	2.000,00
36	Damoar	2.000,00	6.000,00
37	Rawaan	1.000,00	11.000,00
38	Glidik	1.500,00	13.000,00
39	Lenkong	1.200,00	2.500,00
40	Besuk Bang	975,00	2.900,00

Sumber : Dinas PUTR Kab Lumajang, 2011

Selain sungai, di Kabupaten Lumajang juga terdapat danau/ranu yang potensial seperti Ranu Pakis, Ranu Bedali, Ranu Klakah, dll serta terdapat 9 rawa dengan luas total 174,50 Ha yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang, daftar rawa dan luasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Luas Rawa Kabupaten Lumajang tahun 2020

No.	Nama Rawa	Lokasi		Luas (Ha)
		Desa	Kecamatan	
1	Rawa Asin	Wotgalih	Yosowilangun	± 20,00
2	Rawa Sumo	Wonokerto	Tekung	± 4,50
3	Rawa Kancu	Kali semut	Padang	± 7,00
4	Rawa Dampar	Bades	Pasirian	± 40,00
5	Rawa Gedang Kluthuk	Kraton	Yosowilangun	± 30,00
6	Rawa Krasak	Jatimulyo	Kunir	± 30,00
7	Rawa Tunjung Putih	Wotgalih	Yosowilangun	± 6,00
8	Rawa Pandan	Gondoruso	Pasirian	± 25,00
9	Rawa Kutuk	Bulurejo	Tempursari	± 12,00
JUMLAH				174,50

Sumber : Dinas PUTR Kab Lumajang, 2011

4. Klimatologi

Kabupaten Lumajang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan terjadinya perubahan iklim dua jenis, yaitu musim kemarau dan hujan. Untuk musim kemarau umumnya terjadi pada bulan April hingga Oktober, hal ini berkaitan dengan arus angin yang berasal dari daerah Australia dan tidak mengandung uap air. Sedangkan, musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober-April dimana pada bulan tersebut arus angin berasal dari arah Asia dan Samudra Pasifik, yang banyak mengandung uap air. Selama kurun waktu tahun 2020 ini jumlah hari hujan per bulan berkisar antara 6 sampai dengan 21 hari dengan intensitas curah hujan berkisar antara 71 mm³ sampai 384 mm³.

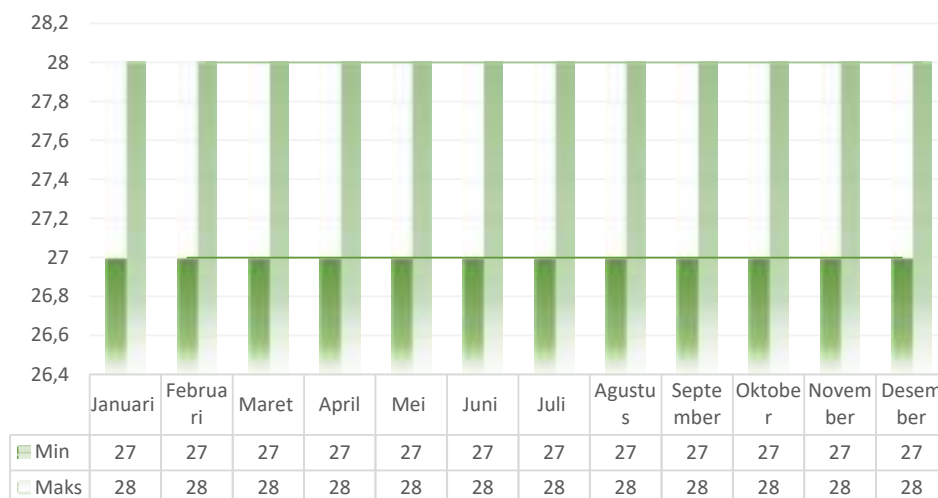
Tabel 2.9 Rata-Rata Curah Hujan di Kabupaten Lumajang Tahun 2021

No	Bulan	Rata-Rata Curah Hujan (mm ³)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	356	247	247	384	387
2	Februari	354	363	363	274	473
3	Maret	284	182	182	274	285
4	April	244	293	293	318	156

No	Bulan	Rata-Rata Curah Hujan (mm ³)				
		2017	2018	2019	2020	2021
5	Mei	49	7	7	148	47
6	Juni	34	7	7	82	153
7	Juli	17	4	4	95	50
8	Agustus	17	5	5	71	157
9	September	32	-	-	-	171
10	Oktober	32	-	-	224	130
11	November	613	322	322	472	10
12	Desember	184	328	328	320	231

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

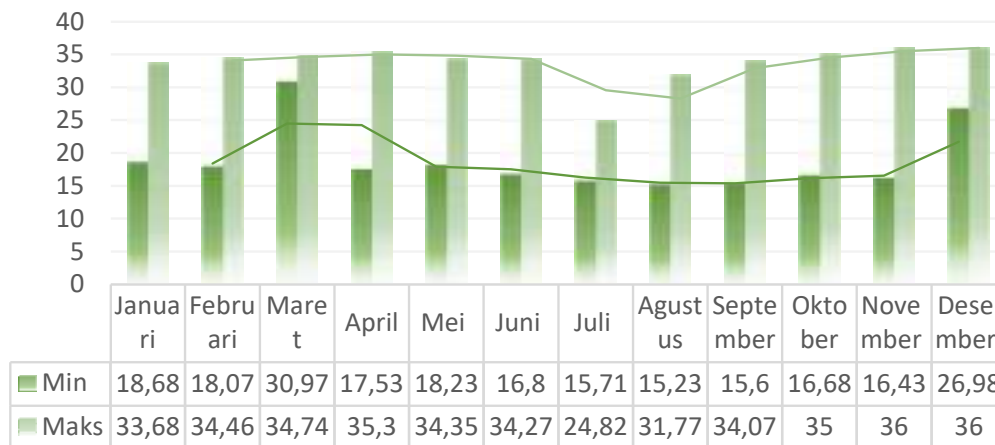
Klasifikasi Schmidt Ferguson membagi tipe iklim berdasarkan siklus data pada curah hujan di suatu wilayah menjadi 4 tipe yaitu iklim basah, agak basah, sedang dan agak kering. Wilayah Kabupaten Lumajang yang termasuk tipe basah dengan jumlah Bulan Kering (BK) rata-rata 3 bulan setahun mencakup daerah Gucialit, Padang Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari, dan Pasrujambe. Untuk daerah dengan tipe sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Sumpersuko, Randuagung, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3 - 4 bulan per tahunnya. Sedang daerah dengan tipe kering umumnya meliputi Tekung, Kunir, Tempeh dan Yosowilangun. Gambaran rata-rata kelembapan udara di Kab. Lumajang dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Gambar 2. 3 Rata-Rata Kelembapan Udara

Kabupaten Lumajang termasuk wilayah tropis yang tergolong pada iklim tipe C dan sebagian kecamatan lainnya beriklim D, berdasarkan klasifikasi Schmidt Ferguson. Jumlah curah hujan tertinggi di Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 yaitu 473 mm³ di Bulan Februari. Kabupaten Lumajang memiliki keadaan suhu dengan rata-rata kisaran minimum 15 derajat celcius pada bulan Oktober November dan kisaran maksimum 36,00 derajat celcius pada bulan Maret.



Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Gambar 2. 4 Rata-Rata Suhu Udara

5. Penggunaan Lahan

Beberapa permasalahan dan potensi dari pola penggunaan lahan pada Kabupaten Lumajang dapat diketahui melalui aspek tata guna lahan. Aspek penggunaan lahan erat kaitannya dengan pola pemanfaatan ruang yang mencakup kegiatan dan peruntukan ruang. Kabupaten Lumajang merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang difungsikan untuk beberapa pola penggunaan dan memiliki beberapa fungsi tertentu. Penggunaan lahan tersebut diantaranya sebagai permukiman, persawahan, padang rumput, rawa, hutan, perkebunan, tambak dan lain sebagainya.

Fungsi penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Lumajang masih didominasi oleh fungsi pertanian dan hutan, sehingga sebagian besar (>50%) wilayah Kabupaten Lumajang masih merupakan lahan belum terbangun. Lahan-lahan terbangun bersifat teraglomerasi, yaitu lebih terkonsentrasi di sekitar wilayah perkotaan yang memiliki nilai strategis lahan lebih tinggi karena merupakan pusat berlangsungnya kegiatan-kegiatan perekonomian seperti di sekitar Kecamatan Lumajang dan Sukodono, namun pada saat ini perkembangannya cenderung mulai mengalami perubahan ke arah pembangunan yang bersifat horizontal keluar dari pusat kota. Hal tersebut mengakibatkan

sejumlah lahan produktif (pertanian dan hutan) mengalami peralihan fungsi.

Peralihan fungsi tersebut sebagian besar mengarah kepada peralihan fungsi permukiman. Berdasarkan arah perkembangan lahan terbangun yang cenderung mulai bersifat horizontal, maka diperlukan suatu perencanaan tepat yang untuk mengendalikan proses konversi fungsi lahan tersebut, sehingga dapat mempertahankan keberadaan lahan-lahan produktif, mengingat sektor pertanian merupakan sektor unggulan Kabupaten Lumajang, selain itu berdasarkan fungsi kawasan, Kabupaten Lumajang merupakan pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang mendukung perkembangan sektor pertanian dan pangan holtikultura. Wilayah Kabupaten Lumajang memiliki proporsi penggunaan lahan yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.10 Penggunaan Lahan di Kabupaten Lumajang

No	Peruntukan	Luas (ha)
1	Bangunan Industri	105,71
2	Danau	169,82
3	Hampanan Pasir	32,67
4	Hutan	58.174,55
5	Lahan Terbuka	55,71
6	Padang Rumput	894,33
7	Perkebunan	23.342,21
8	Permukiman	17.169,90
9	Sawah Irigasi	40.271,17
10	Sawah Tadah Hujan	8.418,81
11	Sungai	2.827,69
12	Tambak	123,09
13	Tegalan / Ladang	27.504,35
Total Penggunaan		179.090,00

Sumber: Bappeda Kab. Lumajang (diolah), 2020

Tabel 2.11 Rencana Penggunaan Lahan Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032

Peruntukan		Rencana (Ha)	Peruntukan	Eksisting (2010)
Kawasan Hutan Lindung		11.493,00	Kawasan Hutan Lindung	11.527,60
Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya :			Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya :	
Taman Nasional		23.340,35	Taman Nasional	23.539,45
Zonasi Inti	11.406,74		Zonasi Inti	11.605,84
Zonasi Rimba	11.299,26		Zonasi Rimba	11.299,26
Zona Rehabilitasi	0		-	-
Pemanfaatan Intensif	150		Pemanfaatan Intensif	150
Pemanfaatan Tradisional	484,35		Pemanfaatan Tradisional	484,35
Kawasan Hutan Produksi		23.341,20	Kawasan Hutan Produksi	22.735,00
Kawasan Hutan Rakyat		66.936,69	Kawasan Hutan Rakyat	56.436,00
Total Luasan Hutan		125.111,20	Total Luasan Hutan	114.238,05
Penggunaan lain		53.978,80	Penggunaan lain :	64.851,95
Permukiman		18.284,00	Permukiman	15.927,00
Sawah lahan basah		32.322,00	Sawah lahan basah	35.993,00
			Perikanan(tambak,kolam,empang)	127,00
Lain-lain untuk budidaya		3.372,76		

Sumber : Bappeda Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Lumajang didominasi oleh penggunaan lahan sebagai Hutan dengan luas 58.174,55 Ha atau 32,48% dari luas total lahan Kabupaten Lumajang. Kemudian diikuti oleh penggunaan lahan sebagai Sawah irigasi

yaitu dengan luas 40.271,17 Ha atau 22,49 % dari luas total lahan Kabupaten Lumajang. Penggunaan lahan yang paling kecil adalah sebagai Hampan pasir dengan luas 32,67 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lumajang didominasi oleh lahan hutan dan persawahan dan yang paling kecil kawasannya adalah hampan pasir. Berikut disajikan peta rencana penggunaan lahan Kabupaten Lumajang.



Sumber : Bappeda Kab. Lumajang, 2013

Gambar 2. 5 Peta Rencana Penggunaan Lahan

B. Potensi Kewilayahan

Kabupaten Lumajang memiliki wilayah yang cukup potensial untuk dikembangkan. Karakteristik wilayah di Kabupaten Lumajang relatif beragam. Adanya wilayah pertanian, perkebunan, hutan, perikanan dan sebagainya, dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana pengembangan fungsi wilayah Kabupaten Lumajang diantaranya sebagai berikut :

1. Sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang mendukung perkembangan sektor pertanian pangan dan hortikultura;
2. Mengendalikan kawasan hutan lindung dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya;
3. Mengendalikan konversi kawasan pertanian beririgasi teknis menjadi kawasan permukiman dan perkotaan;
4. Mengembangkan pusat sentra agribisnis/hortikultura serta mengembangkan aksesnya menuju titik distribusi wilayah;
5. Mengendalikan pertumbuhan kota secara ekspansif yang tidak terkendali (urban sprawl) dan pertumbuhan menerus (konurbasi) melalui pengembangan jalur hijau yang membatasi fisik kota;

6. Meningkatkan aksesibilitas Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang (Probolinggo-Leces-Lumajang), dengan meningkatkan prasarana jalan; dan Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, energi, telekomunikasi, drainase) sesuai standar nasional.

Dalam penggunaan lahannya, Kabupaten Lumajang didominasi oleh guna lahan kawasan hutan meliputi hutan lindung, taman nasional, hutan produksi dan hutan rakyat dengan luas 114.238,05 Ha atau sekitar 63,79% dari total luas Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk pemanfaatan lainnya yaitu budidaya pertanian, budidaya perikanan, budidaya perkebunan, permukiman, perindustrian, rawa/waduk dan sebagainya. Komposisi pemanfaatan ruang terkecil adalah pemanfaatan ruang untuk perikanan (tambak, kolam, empang) yaitu 127 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa ruang di Kabupaten Lumajang masih didominasi oleh lahan tidak terbangun. Terkait dengan optimalisasi potensi pengembangan wilayah, Kabupaten Lumajang perlu memusatkan perhatian pada sektor industri berbasis pertanian dan sektor pariwisata untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah. Adapun potensi pendukung wilayah Kabupaten Lumajang dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Kawasan Pertanian

Sebagai salah satu daerah dengan hasil PDRB pertanian yang tinggi, Kabupaten Lumajang memiliki keunggulan daerah dalam bidang pertanian. Sumber daya alam yang mendukung tingkat produktifitas lahan serta hasil panen membuat daerah ini sangat menggantungkan pada hasil pertanian. Pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada pelestarian dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menyebar di 20 wilayah Kecamatan di Kabupaten Lumajang. Kawasan pertanian merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan sawah dan kawasan pertanian lahan kering; yang dimanfaatkan untuk komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan komoditi peternakan. Kawasan peruntukan pertanian terbagi menjadi:

1. kawasan peruntukan tanaman pangan;
2. kawasan peruntukan perkebunan;
3. kawasan peruntukan hortikultura; dan
4. kawasan peruntukan peternakan.

Tabel 2.12 Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Lumajang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)			
			Irigasi	Non Irigasi	Jumlah	%
1	Tempursari	10.136	1.516	-	1.516	15
2	Pronojiwo	3.874	787	-	787	20
3	Candipuro	14.493	4.776	-	4.776	33
4	Pasirian	18.391	4.412	-	4.412	24
5	Tempeh	8.805	3.251	-	3.251	37
6	Lumajang	3.026	678	-	678	22
7	Sumbersuko	2.654	563	-	563	21
8	Tekung	3.040	1.689	-	1.689	56
9	Kunir	5.018	2.013	-	2.013	40
10	Yosowilangun	8.130	3.057	-	3.057	38
11	Rowokangkung	7.795	1.851	-	1.851	24
12	Jatiroto	7.706	1.321	-	1.321	17
13	Randuagung	10.341	2.228	179	2.407	23
14	Sukodono	3.079	754	-	754	24
15	Padang	5.279	466	-	466	9
16	Pasrujambe	9.730	1.428	-	1.428	15
17	Senduro	22.868	372	-	372	2
18	Gucialit	7.283	0	-	0	0
19	Kedungjajang	9.233	174	-	174	2
20	Klakah	8.367	801	-	801	10
21	Ranuyoso	9.842	7	-	7	0
JUMLAH		179.090	32.144	179	32.323	18

Sumber: Dinas Pertanian, tahun 2020

Kabupaten Lumajang menjadi salah satu daerah dengan hasil PDRB pertanian yang tinggi dengan memiliki keunggulan daerah dalam bidang pertanian. Kondisi geografis Kabupaten Lumajang yang diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo dan Gunung Lemongan menjadikan kondisi tanah menjadi subur dan berpotensi dalam bidang pertanian. Tingkat produktifitas lahan serta hasil panen membuat daerah ini sangat menggantungkan pada hasil pertaniannya.

a. Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan

Lahan Pertanian tanaman padi tersebar di seluruh Kecamatan, kecuali di Kecamatan Gucialit dan Ranuyoso untuk Jenis Irigasi; dan Kecamatan Pronojiwo, Candipuro, Tekung, Kunir, Jatiroto, Randuagung, Padang, Senduro, Kedungjajang, Klakah dan Ranuyoso untuk Jenis Non Irigasi. Luas penggunaan lahan sawah irigasi dan non irigasi yang ditanami padi di Kabupaten Lumajang adalah 36.372 Ha, dengan rincian lahan sawah irigasi 34.198Ha dan sisanya adalah luas lahan non irigasi sebesar 2.174Ha.

Tabel 2.13 Luas Lahan Sawah dan Jenis Pengairan

No	Tahun	Satuan	Irigasi	Non Irigasi	Total
1	2017	Ha	33.209	3.152	36.361
2	2018	Ha	33.323	3.069	36.392
3	2019	Ha	33.167	3.225	36.392
4	2020	Ha	33.167	3.225	36.392
5	2021	Ha	34.198	2.174	36.372

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

b. Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, Perkebunan, Hutan Rakyat dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan

Pemanfaatan lahan tegal terbesar digunakan untuk tanaman palawija yaitu sebesar 53.501 hektar. Selanjutnya luas hutan rakyat menjadi luasan terluas kedua yaitu seluas 6.537 hektar yang menunjukkan bahwa masih luasnya potensi lahan di Kabupaten Lumajang.

Tabel 2.14 Luas Lahan Tegal/Kebun, Perkebunan, Hutan Rakyat dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan

No	Tahun	Satuan	Tegal	Kebun	Hutan Rakyat	Tidak Diusahakan
1	2013	Ha	55.931	16.316	4.265	148
2	2014	Ha	55.674	11.938	2.023	148
3	2015	Ha	55.078	12.106	2.745	273
4	2016	Ha	53.016	13.011	6.539	273

No	Tahun	Satuan	Tegal	Kebun	Hutan Rakyat	Tidak Diusahakan
5	2017	Ha	53.309	14.930	6.539	247
6	2018	Ha	53.443	14.930	6.537	247
7	2019	Ha	53.520	14.930	6.537	197
8	2020	Ha	53.520	14.930	6.537	197
9	2021	Ha	53.501	12.533	6.537	50

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

c. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi

Tingkat produktivitas lahan tanaman padi di Kabupaten Lumajang memiliki angka yang cukup tinggi dengan rata-rata 61,68 kw/hektarnya.

Tabel 2. 15 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi

No	Tahun	Luas Area (ha)	Produktifitas (kw/ha)	Produksi (kw)
1	2013	75.548	60,68	4.584.066
2	2014	75.535	60,94	4.603.321
3	2015	78.899	61,40	4.844.272
4	2016	85.434	62,09	5.304.645
5	2017	82.110	60,73	4.986.900
6	2018	81.626	61,06	4.984.186
7	2019	84.413	61,06	5.154.110
8	2020	82.053	60,88	4.995.031
9	2021	78.093	61,68	4.816.728

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

d. Luas Panen Jagung dan Kedelai

Jagung menjadi komoditas yang paling tinggi dibandingkan kedelai, dilihat dari luasan panennya. Luas panen adalah luas tanaman yang dipungut hasilnya paling sedikit 11% dari keadaan normal. Selain karena umur panen yang pendek,

jagung memiliki karakteristik tanaman yang tidak membutuhkan air banyak dan juga lebih tidak mudah terkena hama penyakit tanaman. Pertanian tanaman Jagung umumnya tersebar di seluruh kecamatan kecuali Pronojiwo, Ranuyoso dan Gucialit untuk jenis Irigasi; dan kecamatan Lumajang dan Jatiroto untuk jenis Non Irigasi. Luas panen jagung pada Tahun 2021 memiliki luas 16.763 hektar.

Tabel 2. 16 Luas Panen Jagung dan Kedelai

No	Kecamatan	Satuan	Jagung	Kedelai
1	2013	Ha	30.308	1.074
2	2014	Ha	30.293	2.444
3	2015	Ha	31.523	2.202
4	2016	Ha	26.497	909
5	2017	Ha	27.030	401
6	2018	Ha	25.168	1.918
7	2019	Ha	28.685	674
8	2020	Ha	28.388	793
9	2021	Ha	16.763	198

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

e. Produktivitas Jagung, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar

Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Di Sektor Pertanian produktifitas adalah rata-rata produksi dalam 1 hektar lahan merupakan perhitungan jumlah produksi dibagi luas lahan panen dalam satuan kuintal/ha. Sesuai dengan hasil luas panen di atas bahwa jagung memiliki luas panen terbesar, dengan produktifitas 53,25 kw/hektar.

Tabel 2. 17 Produktivitas Jagung dan Kedelai

No	Tahun	Satuan	Jagung	Kedelai
1	2013	Kw/Ha	47,32	14,59

No	Tahun	Satuan	Jagung	Kedelai
2	2014	Kw/Ha	50,12	15,83
3	2015	Kw/Ha	51,74	17,25
4	2016	Kw/Ha	52,57	16,70
5	2017	Kw/Ha	52,57	18,04
6	2018	Kw/Ha	52,74	16,22
7	2019	Kw/Ha	47,76	15,17
8	2020	Kw/Ha	51,12	14,75
9	2021	Kw/Ha	58,35	14,61

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

f. Produksi Jagung dan Kedelai

Produksi tanaman Jagung dan Kedelai ialah hasil panen areal pertanaman dalam kurun waktu satu tahun dalam satuan kuintal. Berdasarkan data di bawah, jagung kembali menempati hasil produksi tertinggi. Hal ini berbanding lurus dengan luas lahan yang paling tinggi serta produktivitasnya yang juga tinggi sehingga hasil produksi jagung terakhir mencapai 978.112 Kw.

Tabel 2. 18Produksi Jagung dan Kedelai

No	Tahun	Satuan	Jagung	Kedelai
1	2013	Kw	1.437.508	15.675
2	2014	Kw	1.518.310	39.688
3	2015	Kw	1.631.072	37.977
4	2016	Kw	1.392.973	15.185
5	2017	Kw	1.439.382	7.233
6	2018	Kw	1.327.460	31.103
7	2019	Kw	1.369.910	10,228
8	2020	Kw	1.451.213	11.693
9	2021	Kw	978.112	2.892

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

g. Luas Panen Tanaman Sayuran

Sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan asal tumbuhan yang biasanya mengandung kadar air tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal. Luas panen sayuran tertinggi di Kabupaten Lumajang merupakan sayuran jenis bawang daun. Bawang Daun memiliki luas panen sebesar 1.388 hektar disusul wortel sebesar 271 hektar. Kedua komoditas ini berpusat pada Kecamatan Senduro yang terletak tidak jauh dari Gunung Semeru. Hal ini membuat tanah di kawasan tersebut sangat subur.

Tabel 2. 19 Luas Panen Tanaman Sayuran

No	Tahun	Satuan	Wortel	Tomat	Ketimun	Labu Siam	Bawang Daun
1	2013	Ha	197	322	292	0	1272
2	2014	Ha	197	294	357	0	1272
3	2015	Ha	197	280	323	0	1272
4	2016	Ha	197	276	249	1	1272
5	2017	Ha	197	315	261	0	1267
6	2018	Ha	187	375	354	1	1.286
7	2019	Ha	159	308	336	0	1.330
8	2020	Ha	244	197	192	0	1.272
9	2021	Ha	271	245	222	0	1.388

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

h. Produksi Tanaman Sayuran

Hasil produksi tanaman sayuran di Kabupaten Lumajang selain digunakan untuk melihat spesialisasi lahan di setiap kecamatan, produksi tanaman ini juga berguna untuk memetakan kecamatan yang memiliki tingkat kesuburan tinggi dan rendah. Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa kubis merupakan komoditas yang memiliki produksi paling banyak diantara komoditas lain sebesar 127.881 Kw dan yang terendah adalah bawang merah sebesar 400 Kw. Selain faktor harga, faktor lahan dan kemudahan dalam penanaman merupakan faktor yang mempengaruhi produksi tanaman di Kabupaten Lumajang.

Tabel 2. 20Produksi Tanaman Sayuran

No	Tahun	Satuan	Bawang Merah	Cabe Merah	Cabe Rawit	Kentang	Kubis	Sawi
1	2013	Kw	0	60.258	239.022	88.125	105.770	45.368
2	2014	Kw	239	86.400	234.042	81.500	116.930	56.275
3	2015	Kw	104	42.109	206.603	193.143	116.148	58.909
4	2016	Kw	202	62.182	116.160	90.036	115.840	59.148
5	2017	Kw	588	85.102	181.437	91.571	122.096	55.326
6	2018	Kw	350	71.715	205.141	36.821	112.293	57.986
7	2019	Kw	1.215	74.031	162.477	97.507	106.692	51.789
8	2020	Kw	150	47.162	211.569	97.676	123.721	59.779
9	2021	Kw	400	50.463	126.321	118.895	127.811	65.777

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

i. Produksi Buah-buahan dan Jenis Buah (Kw)

Hasil tanaman pertanian dan perkebunan sangat melekat pada Kabupaten Lumajang. Pertanian untuk tanaman buah-buahan di Lumajang terdiri atas Jeruk, Pepaya, Anggur, Pisang yang tersebar di seluruh Kecamatan, Alpukat di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang kecuali Kecamatan Tekung, Durian di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang kecuali Pasirian, Lumajang, Tekung dan Kunir, serta Mangga yang tersebar di seluruh Kecamatan di Lumajang. Bahkan Kabupaten Lumajang terkenal dengan daerah penghasil pisang terbesar di Jawa Timur. Hal tersebut diperkuat dengan hasil rekap data produksi tanaman buah yang tertera pada tabel di bawah. Produksi tanaman pisang di Kabupaten Lumajang mencapai 1.1.231.218 Kw disusul dengan produksi pepaya sebesar 296.218 Kw, lalu produksi terendah ada pada durian besar 30.217 Kw.

Tabel 2. 21Produksi Buah-buahan dan Jenis Buah (Kw)

No	Tahun	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Anggur	Apuk t
1	2013	62.286	13.682	122.285	1.156.076	392.104	0	17.218
2	2014	84.921	34.013	189.697	1.102.888	510.683	0	21.682
3	2015	69.260	30.006	190.550	1.104.733	485.106	0	22.374
4	2016	33.344	27.542	157.133	1.106.507	486.628	0	22.033
5	2017	94.956	19.068	221.409	1.192.627	330.246	290	37.095

No	Tahun	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Anggur	Apukat
6	2018	105.167	63.088	170.045	1.040.965	251.861	0	33.524
7	2019	132.022	39,229	201.133	994.344	399,483	2	25.026
8	2020	114.449	37.579	143.965	1.104.707	319.402	0	27.611
9	2021	94.121	18.233	144.995	1.231.218	296.218	0	30.217

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Komoditi - komoditi pertanian berpeluang dikembangkan untuk diproses lebih lanjut menjadi berbagai produk turunan sehingga memberi nilai tambah yang cukup tinggi. Sektor pertanian yang merupakan sektor unggulan Kabupaten Lumajang, dan berdasarkan fungsi kawasan Kabupaten Lumajang merupakan pusat pertumbuhan wilayah propinsi yang mendukung perkembangan sektor pertanian dan pangan hortikultura. Pengembangan pertanian juga dapat dilaksanakan melalui pengembangan kegiatan agroindustri sehingga mampu memberi nilai tambah serta meraih pangsa pasar yang lebih besar.

Pertanian hortikultura merupakan budidaya tanaman yang mengolah tanaman bunga, buah, sayuran dan obat-batan dengan komoditi berupa bunga sedap malam, kenanga, semangka, alpukat, durian, pisang, kentang, bawang daun, wortel, sawi, kacang panjang, temu lawak, jahe dan lidah buaya. Pertanian hortikultura pada umumnya terletak pada kawasan lahan basah maupun lahan kering, sehingga luasan lahan peruntukan tanaman hortikultura mempunyai luasan yang menyatu dengan kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering. Peruntukan hortikultura yang ada di Kabupaten Lumajang antara lain berupa kawasan yang ditanami jenis sayuran dan buah-buahan.



Sumber :

Gambar 2. 6 Visualisasi Kawasan Pertanian di Kabupaten Lumajang

j. Luas Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman

Letak geografis lahan yang diperuntukkan untuk perkebunan, mayoritas berada di daerah pegunungan. Maka dari itu, perkebunan juga menjadi sumber kekayaan hasil alam yang dimiliki Kabupaten Lumajang. Kelapa menjadi produk perkebunan yang menjadi andalan Kabupaten Lumajang. Dengan luas areal 7.939 Ha produksi kelapa mencapai 8.237 ton.

Tabel 2. 22 Luas Tanaman Perkebunan dan Jenis Tanaman

No	Tahun	Kelapa		Kopi Robusta		Kopi Arabika	
		Luas Areal (Ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	2013	8.092	8.224	4.189	2.016	0	0
2	2014	8.096	7.922	4.029	1.834	300	47,5
3	2015	8.050	8.077	4.200	1.680	300	75,2
4	2016	8.129	8.147	4.200	1.673	388	75,6
5	2017	8.244	8.271	4.166	1.684	499	89,5
6	2018	8.105	8.247	4.073	1,131	410	70,0
7	2019	8.036	8.308	4.019	1.184,6	405	64,6
8	2020	8.101	8.298	3.954	1.179	407	65
9	2021	7.939	8.237	3.884	1.169	388	64,7

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

k. Luas Panen dan Produksi Tanaman Tebu Giling

Tebu merupakan tanaman yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi gula. Tanaman tebu menjadi tanaman yang hampir selalu ada di kawasan Tapal Kuda (Madura, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Jember, dan Lumajang). Dengan luas lahan panen tebu mencapai 13.290 hektar, Kabupaten Lumajang dapat memproduksi tebu hingga 1.092.837 ton.

Tabel 2. 23 Luas Panen dan Produksi Tanaman Tebu Giling

No	Kecamatan	Luas PanenArea (Ha)	Produksi Tebu (ton)
1	2013	12.504	1.054.875
2	2014	12.550	1.036.630
3	2015	12.425	1.018.850
4	2016	13.035	1.071.477
5	2017	13.224	1.084.368
6	2018	13.293	1.077.800
7	2019	13.285	1.092.027
8	2020	13.292	1.092.602
9	2021	13.290	1.092.837

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Pengembangan Kawasan perkebunan di Kabupaten Lumajang diklasifikasikan berdasarkan potensi wilayah masing-masing dan prospek ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan mengembangkan kawasan industri masyarakat perkebunan.

Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dapat dibagi dalam dua kelompok yakni perkebunan tanaman tahunan seperti cengkeh, kopi, coklat, karet dan perkebunan tanaman semusim antara lain berupa tebu, dan tembakau. Sedangkan berdasarkan data kepemilikan yang ada, kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Lumajang meliputi perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Berdasarkan tingkat kesesuaian lahan dan potensi ekonominya, maka rencana pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Lumajang diarahkan pada wilayah sebagai berikut:

1. Kelapa di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang;
2. Kopi di wilayah Kecamatan Tempursari, Pronojiwo, Candipuro, Randuagung, Senduro, Gucialit, Klakah, Parujambe dan Padang;
3. Cengkeh di wilayah Kecamatan Tempursari, Pronojiwo, Candipuro, Senduro, Gucialit, Kedungjajang dan Pasrujambe
4. Pinang diseluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang

5. Tebu diseluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang kecuali Kecamatan Tempursari;
6. Tembakau di Kecamatan Candipuro, Pasirian, Tempeh, Lumajang, Sumbersuko, Tekung, Kunir, Yosowilangun, Rowokangkung, Randuagung, Sukodono dan Kecamatan Padang;
7. Kakaodi Wilayah Kecamatan Tempursari, Pronojiwo, Candipuro, Tempeh, Randuagung, Padang, Pasrujambe, Senduro dan wilayah Kecamatan Ranuyoso;
8. Teh di wilayah Kecamatan Gucialit;
9. Lada di wilayah Kecamatan Randuagung, Kedungjajang dan Klakah.

Pengembangan perkebunan ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta, efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan, dengan mengembangkan kawasan industri masyarakat perkebunan yang dikembangkan di setiap lokasi pengembangan dan sentra produksi yang diselenggarakan dengan kebersamaan ekonomi dan berwawasan lingkungan tetapi masih rendahnya teknologi pengolahan hasil perkebunan, dan teknologi pembudidayaan tanaman menyebabkan hasil yang diperoleh kurang maksimal.

Selain Peternakan dan Perkebunan, kawasan Pertanian juga meliputi :

1. Kawasan Peternakan

Pengembangan Potensi Peternakan memiliki 2 macam yaitu ternak besar dan ternak kecil. Kawasan Peternakan di Kabupaten Lumajang juga dikembangkan berdasarkan potensi yang ada pada masing-masing kecamatan berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Pengembangan kawasan peternakan diarahkan untuk meningkatkan peran, efisiensi, produktivitas yang berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah.

Potensi tersebut dapat dikembangkan berdasarkan lokasi, kondisi lahan, jenis tanah dan kelerengan tanah meliputi :

- 1) Peternakan unggas (ayam kampung, ras dan itik) di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang;
- 2) Peternakan sapi potong di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang;
- 3) Peternakan sapi perah: Senduro, Tekung, Kunir, Gucialit dan Yosowilangun.

- 4) Peternakan kerbau: Tempursari, Pronojiwo, Candipuro, Pasirian,
- 5) Peternakan kambing di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang, kambing etawa di Kecamatan Senduro.

2. Kawasan Perikanan

Peningkatan perkenomian Kabupaten Lumajang bidang perikanan dikembangkan melalui perikanan disekitar danau/ranu di wilayah Kabupaten Lumajang, sungai dan empang-empang, serta kawasan selatan yang berbatasan dengan Samudera Indonesia merupakan potensi untuk mengembangkan sektor perikanan dan mengembangkan kawasan Minapolitan di Kabupaten Lumajang yang dapat diarahkan pada budidaya air tawar, tambak, perikanan umum, kolam, ranu dan penangkapan di laut. Potensi Perikanan Kabupaten Lumajang :

- 1) Potensi kawasan lokasi perikanan laut yang terdapat di Kabupaten Lumajang adalah Kecamatan Tempursari, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Kunir dan Kecamatan Yosowilangun.
- 2) Potensi kawasan lokasi perikanan air tawar terdapat di Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Randuagung, Kecamatan Klakah dan Kecamatan Sukodono.



Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Lumajang

Gambar 2. 7 Visualisasi Kawasan Perikanan Kabupaten Lumajang

3. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Adapun hutan produksi di Kabupaten Lumajang, yaitu :

- 1) Hutan produksi mahoni terdapat di Kecamatan Ranuyoso, Kecamatan Klakah dan kecamatan Randuagung.
- 2) Hutan produksi jati terdapat di Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Yosowilangun.
- 3) Hutan produksi pinus terdapat di Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Tempursari.
- 4) Hutan produksi damar di Kecamatan Gucialit dan Kecamatan Senduro.

Besarnya permintaan terhadap kayu hasil hutan merupakan prospek untuk mengembangkan hutan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan untuk mengantisipasi dampak negatif lingkungan yang akan terjadi. Kawasan hutan juga berpotensi dikembangkan sebagai suatu kawasan wisata tanpa harus merusak keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.



Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Lumajang

Gambar 2. 8 Visualisasi Kawasan Hutan Produksi Kabupaten Lumajang

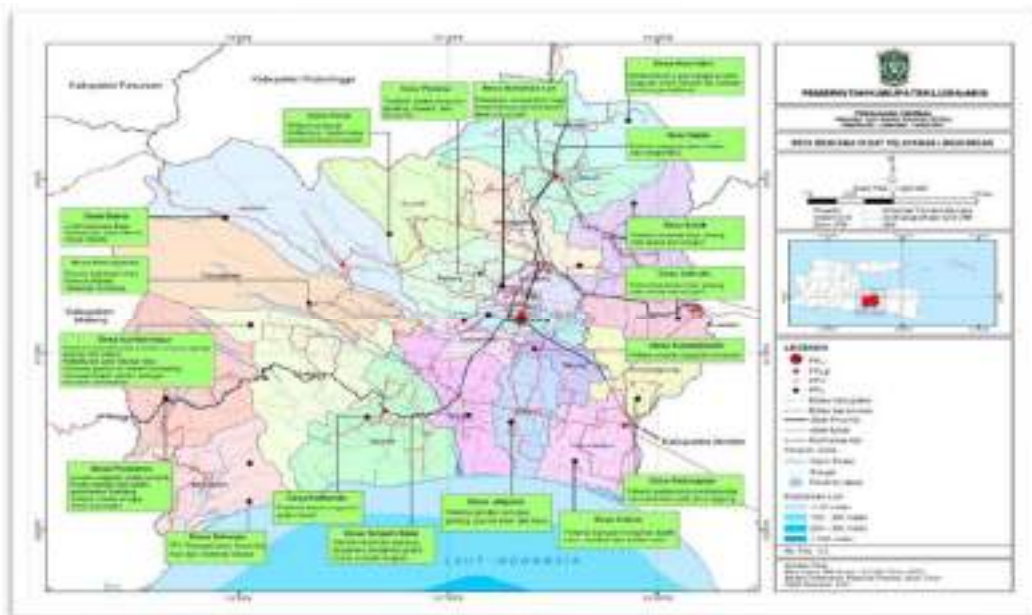
Berikut adalah potensi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Lumajang berbasis kewilayahan sebagaimana yang

akan diterapkan melalui perubahan atas peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Lumajang berdasarkan sistem perwilayahan Propinsi Jawa Timur. Gambar berikut menunjukkan bahwa pengembangan sektor perekonomian Kabupaten Lumajang untuk jangka panjang fokus pada sektor pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan yang secara bersamaan sejalan dengan pengembangan Kota Probolinggo sebagai pusat wilayah pengembangan.



Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Lumajang

Gambar 2. 9 Peta Rencana Pengembangan Potensi Daerah berbasis Kewilayahan



Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Lumajang

Gambar 2. 10 Sistem Perwilayahan Propinsi Jawa Timur dengan WP Probolinggo – Lumajang

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan peruntukannya di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lumajang mencakup pengembangan skala wilayah meliputi Kecamatan Lumajang, Sukodono, Pasirian, Senduro, Klakah dan Yosowilangun. Sedangkan untuk kecamatan yang lain dikembangkan perdagangan skala lokal. Adanya perkembangan penduduk yang cukup pesat pada beberapa tahun terakhir di wilayah Kabupaten Lumajang tentunya menuntut semakin berkembangnya kawasan perdagangan dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada kondisi eksisting, perkembangan kawasan perdagangan di wilayah Kabupaten Lumajang ini adalah linier mengikuti jalur jalan utama.

3. Kawasan Pertambangan

Sektor pertambangan bukan dikembangkan untuk kawasan pertambangan namun untuk pengembangan budidaya pertambangan. Potensi pertambangan yang ada adalah berupa mineral bukan logam dan batuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Perwujudan kawasan peruntukan pertambangan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan meningkatkan pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. Kawasan pertambangan tidak diarahkan pada pengembangan koridor/wilayah, melainkan diarahkan pada pengembangan budidaya potensi bahan galian yaitu pada Kecamatan Tempursari, Pasirian, Tempeh, Kunir, Yosowilangun, Pronojiowo, Pasrujambe, Senduro, Candipuro, Sumpalsuko dan Ranuyoso.

Potensi ketersediaan pasir di Kabupaten Lumajang sangat melimpah seiring dengan aktivitas Gunung Semeru yang selalu mengirim material berupa batuan, kerikil, dan pasir melewati aliran kali-kali Leprak, Glidik, Besuksat, Mujur, Rejali, dan sungai-sungai lain berukuran besar atau kecil yang berperan sebagai saluran transportasi bahan-bahan rombakan hasil erupsi Gunung Semeru.



Sumber : Dokumen RTRW Kabupaten Lumajang

Gambar 2. 11 Visualisasi Kawasan Pertambangan Kabupaten Lumajang

Potensi bahan tambang yang dapat dikembangkan tersebar di beberapa tempat, yaitu :

- 1) Pasir besi (mineral logam) di Kecamatan Yosowilangun, Tempel, Kunir, Pasirian dan Tempursari;
- 2) Pasir ayak, pasang, sirtu (batuan) di Kecamatan Tempel, Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari dan Pasrujambe;
- 3) Pasir urug (batuan) yang hampir terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lumajang, tembaga dan emas (mineral logam) di Kecamatan Pronowijo, Candipuro dan Tempursari.

Kegiatan penggalian bahan tambang sebagian besar masih berupa pertambangan rakyat yang dikelola secara tradisional. Kegiatan penggalian ini, khususnya pasir, sering kali masyarakat setempat kurang memperhatikan aspek pelestarian lingkungan sehingga menimbulkan perubahan morfologi sungai pada saat penggalian batu kali dan pasir. Pasir Lumajang banyak dicari dan punya harga tinggi karena selain kandungan lumpurnya rendah juga apabila dicampur dengan bahan bangunan lain mempunyai daya rekat yang baik. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengancam/merusak struktur bangunan yang terdapat di sepanjang aliran sungai, misalnya jembatan, saluran irigasi dan

sebagainya. Sehingga peraturan melarang menggali pasir 50 meter di atas tanggul, 100 meter di bawah tanggul, 500 meter di atas jembatan dan 1 km di bawah jembatan.

4. Kawasan Permukiman

Pengembangan kawasan permukiman dibedakan atas permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan dimana dikembangkan di seluruh kecamatan Kabupaten Lumajang. Permukiman perkotaan terdiri dari permukiman perkotaan Kabupaten dan permukiman perkotaan Kecamatan. Permukiman perkotaan kabupaten memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan kabupaten, pusat pertumbuhan skala kabupaten dan pusat kegiatan perkotaan kecamatan. Sedangkan permukiman perkotaan kecamatan terdapat di sub satuan wilayah pengembangan yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan kecamatan, pusat pertumbuhan skala kecamatan dan pusat kegiatan perdesaan. Ketentuan mengenai permukiman perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan permukiman (perumahan) baru tidak diperbolehkan pada kawasan rawan bencana, lindung setempat, konservasi dan lahan pertanian irigasi teknis.
2. Pengawasan dan pengendalian pada kawasan yang terbangun. Khususnya pada wilayah dengan pola penggunaan lahan campuran.
3. Mengembangkan pola cluster permukiman untuk menghindari penyatuan (aglomerasi) kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau.
4. Pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan tetap memperhatikan arahan fungsi dan hirarki kawasan perkotaan, dengan optimalisasi kemampuan pelayanan kota yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah sekitarnya.

Permukiman perdesaan meliputi permukiman perdesaan, permukiman pada pusat perdesaan dan permukiman pada pusat perdesaan. Ketentuan mengenai permukiman perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Permukiman yang berada di area kawasan lindung dapat dipertahankan dengan pengendalian/pembatasan secara

ketat agar tidak meluas mengancam fungsi konservasi/lindung.

2. Pada permukiman dalam kawasan lindung dan rawan bencana dapat dilakukan relokasi (*resettlement*) ke luar permukiman semula dan diupayakan dekat dengan pusat pelayanan atau akses pelayanan umum.
3. Demi kelestarian dan keseimbangan lingkungan diupayakan untuk tidak melakukan peralihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman, khususnya sawah beririgasi teknis.
4. Pembangunan unit rumah baru dikembangkan dengan konsep mengisi pekarangan yang ada (penambahan intensitas/peningkatan kepadatan).
5. Mempertahankan pola *cluster-cluster* permukiman untuk menghindari penyatuan (*aglomerasi*) kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau.
6. Optimalisasi fungsi permukiman perdesaan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai: pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan internal desa, dan pusat pelayanan pada internal dusun atau kelompok permukiman

5. Kawasan Pendidikan

Pengembangan kawasan pendidikan diarahkan menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang.

6. Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran

Pengembangan kawasan Pemerintahan dan Perkantoran diarahkan menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lumajang.

7. Kawasan Peruntukan Industri

Secara umum, Kabupaten Lumajang tetap memiliki ruang untuk membangun kawasan peruntukan industri meskipun secara garis besar harus dibarengi dengan regulasi yang ketat.

Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis Kabupaten Lumajang yang dikelilingi oleh kawasan hutan dan beberapa wilayah rawan bencana. Kawasan peruntukan industri Kabupaten Lumajang ditetapkan dengan kriteria, yaitu berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup dan tidak mengubah lahan produktif. Penentuan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Lumajang mempertimbangkan pemanfaatan ruang dan rekomendasi pemanfaatan lingkungan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2016. Arah pengembangan kawasan industri Kabupaten Lumajang, yaitu:

1. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis, memperhatikan daya dukung lahan dan tidak mengkonversi lahan pertanian secara besar-besaran.
2. Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi bawahan.
3. Pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana industri.
4. Pengembangan kegiatan industri berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan.
5. Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial.
6. Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metode atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

Tabel 2. 24Sentra Industri di Kabupaten Lumajang

No	Nama sentra/Komoditi	Kecamatan
1	Anyaman bambu	Candipuro
		Tempeh
2	Batik	Candipuro

No	Nama sentra/Komoditi	Kecamatan
		Kunir
		Padang
		Yosowilangun
		Pasirian
3	Kue Kering	Lumajang
		Tempursari
		Randuagung
		Tekung
4	Genteng	Kunir
		Sukodono
		Padang
5	Gula kelapa	Pasirian
		Candipuro
		Klakah
6	Gula Tebu	Padang
		Candipuro
7	Kerajinan kelambu	Yosowilangun
8	Kerajinan emas/perak	Tempeh
		Kunir
9	Keripik	Klakah
		Lumajang
		Tempeh
		Pasrujambe
		Kedungjajang
		Pronojiwo
		Senduro
		Padang
		Candipuro
10	Kerupuk	Lumajang
		Sumbersuko
		Randuagung

No	Nama sentra/Komoditi	Kecamatan
		Pasirian
		Sumbersuko
		Ranuyoso
		Sukodono
		Yosowilangun
		Seduro
11	Kayu Olahan	Sumbersuko
		Kunir
		Klakah
		Padang
		Tempeh
		Randuagung
		Pasrujambe
		Candipuro
		Sukodono
12	Air minum dalam Kemasan	Yosowilangun
		Lumajang
		Candipuro
		Tempeh
		Pasrujambe
		Randuagung
		Kunir
		Sumbersuko
13	Mebel kayu	Tempeh
		Jatiroto
		Lumajang
		Randuagung
		Tekung
		Sukodono
		Yosowilangun
		Kunir

No	Nama sentra/Komoditi	Kecamatan
		Ranuyoso
15	Roti	Lumajang
		Sukodono
		Tekung
16	Sapu ijuk	Tempeh
17	Tahu dan tempe	Lumajang
		Jatiroto
		Rowokangkung, Senduro, Sukodono
		Klakah
		Tempeh
18	Pande besi	Kunir
		Tempeh
19	Tas dan dompet	Tempeh
20	Palet/Kayu Persagen	Sumbersuko
		Senduro
		Candipuro
		Gucialit
		Kedungjajang
		Klakah
		Lumajang
		Padang
		Pasirian
		Pasrujambe
		Pronojiwo
		Sukodono
		Tekung
		Tempeh
		Yosowilangun
Kunir		
Tempursari		
Ranuyoso		

No	Nama sentra/Komoditi	Kecamatan
21	Paving	Sumbersuko
		Lumajang
		Candipuro
		Tekung
		Pasirian
22	Penggergajian Kayu	Candipuro
		Jatiroto
		Kunir
		Kedungjajang
		Klakah
		Lumajang
		Pasirian
		Randuagung
		Ranuyoso
		Senduro
		Sukodono
		Sumbersuko
		Tempeh

Sumber: Bappeda Kab. Lumajang, 2020



Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup, 2016
Gambar 2. 12 Peta Pemanfaatan Ruang dan Rekomendasi Pemanfaatan Lingkungan Jawa Timur

Dengan pertimbangan tersebut di atas, Kabupaten Lumajang tetap dapat membangun kawasan-kawasan industri, namun disertai dengan regulasi yang ketat, Kawasan peruntukan industri yang mana dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Kawasan Peruntukan Industri Besar di Kecamatan Pasirian, Tempeh, Sumpersuko, Kunir, Jatiroto, Kedungjajang dan Klakah.
2. Kawasan Peruntukan Industri Menengah dikembangkan di Kecamatan Candipuro, Tekung, Yosowilangun, Sukodono, Rowokangkung, Randuagung dan Ranuyoso.
3. Kawasan Peruntukan Industri Kecil dan/atau Mikro, dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan.



Sumber : Bappeda Kab. Lumajang, 2013

Gambar 2. 13Peta KawasanPerindustrianKabupaten Lumajang

8. KawasanPeruntukkan Pariwisata

Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Lumajang dalam pengembangannya telah sangat baik dan potensial. Perwujudan kawasan peruntukan pariwisata Kabupaten Lumajang dapat meliputi pengembangan obyek dan daya tarik wisata budaya, alam dan buatan, pengembangan prasarana dan sarana pariwisata dan peningkatan dan pengembangan kemitraan. Rencana pengembangan kawasan pariwisata dilakukan pada tiap kecamatan yang memiliki potensi pariwisata buatan yang ditujukan untuk peningkatan perekonomian masyarakat lokal dan tetap menjaga keserasian dengan ekologi di sekitarnya, salah satunya adalah peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata di Kabupaten

Lumajang. Kawasan pariwisata di Kabupaten Lumajang, meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam dan pariwisata buatan. Pariwisata budaya, meliputi:

1. Wisata desa adat berada di Desa Argosari Kecamatan Senduro;
2. Watu Klosot berada di Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe;
3. Pura Mandara Giri Semeru Agung berada di Desa Senduro Kecamatan Senduro;
4. Pura Rondo Kuning berada di Desa Ranupane Kecamatan Senduro;
5. Makam Mbah Drajid berada di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun;
6. Situs Candipuro berada di Desa Candipuro Kecamatan Candipuro;
7. Arca Lembu Andini berada di Desa Kertosari Kecamatan Pasrujambe;
8. Candi Agung berada di Desa Ledoktempuro Kecamatan Randuagung;
9. Candi Gedong Putri berada di Desa Kloposawit Kecamatan Candipuro;
10. Situs Biting dan Makam Minak Koncar berada di Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono.

Pariwisata alam, meliputi:

1. Taman wisata pegunungan meliputi:
 - a. Puncak Gunung Sawur berada di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro;
 - b. Puncak Gunung Wayang berada di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro;
 - c. Hutan Bambu berada di Desa Sumbermujur Kecamatan Candipuro;
 - d. Puncak Gunung Lemongan dan Puncak Gunung Fuji berada di Desa Papringan Kecamatan Klakah;
 - e. Panorama Gunung Tambuh berada di Desa Bago Kecamatan Pasirian;

- f. Loji Tawon Songo berada di Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe;
 - g. Piket Nol berada di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro;
 - h. Puncak Gunung Semeru berada di Desa Ranupane Kecamatan Senduro;
 - i. Puncak B-29 Argosari berada di Desa Argosari Kecamatan Senduro;
 - j. Puncak Sriti berada di Desa Tamanayu Kecamatan Pronojiwo;
 - k. Wisata Agro Kebun Teh berada di Desa Kertowono Kecamatan Gucialit.
2. Taman wisata ranu, meliputi:
- a. Ranu Klakah berada di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah;
 - b. Ranu Pakis berada di Desa Ranupakis Kecamatan Klakah;
 - c. Ranu/Rowo Damungan berada di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang;
 - d. Ranulading berada di Desa Sumberwringin Kecamatan Klakah;
 - e. Rowo Kancu berada di Desa Kalisemut Kecamatan Padang;
 - f. Ranu Glebeg berada di Desa Ranuwurung Kecamatan Randuagung;
 - g. Ranu Bedali berada di Desa Ranu Bedali Kecamatan Ranuyoso;
 - h. Ranu Pane, Ranu Kumbolo, dan Ranu Regulo berada di Desa Ranu Pane Kecamatan Senduro; dan
 - i. Rowo Sumo berada di Desa Wonokerto Kecamatan Tekung.
3. Taman wisata goa, meliputi:
- a. Goa Bima berada di Desa Bades Kecamatan Pasirian;
 - b. Goa Lowo berada di Desa Bades Kecamatan Pasirian;
 - c. Goa Terowongan berada di Desa Bades Kecamatan Pasirian;
 - d. Goa Tetes berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo.
4. Taman wisata air terjun, meliputi:

- a. Air Terjun Semingkir berada di Desa Gucialit Kecamatan Gucialit;
 - b. Air Terjun Pawon berada di Desa Kertowono Kecamatan Gucialit;
 - c. Air Terjun Trap Sewu berada di Desa Bodang Kecamatan Padang;
 - d. Air Terjun Tumpak Sewu berada di Desa Sidomulyo Kecamatan Pronojiwo;
 - e. Air Terjun Kabut Pelangi berada di Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo;
 - f. Air Terjun Kapas Biru berada di Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo;
 - g. Air Terjun Sumber Telu berada di Desa Pronojiwo Kecamatan Pronojiwo;
 - h. Air Terjun Coban Sriti berada di Desa Tamanayu Kecamatan Pronojiwo;
 - i. Air Terjun Watu Lapis berada di Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe;
 - j. Air Terjun Manggisan berada di Desa Kandangan Kecamatan Senduro;
 - k. Air Terjun Antrukun berada di Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro;
 - l. Air Terjun Sobyok berada di Desa Burno Kecamatan Senduro.
5. Wisata pantai, meliputi:
- a. Pantai Watu Godek dan Pantai Watu Gedhek berada di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari;
 - b. Pantai TPI Permai berada di Desa Tegalrejo Kecamatan Tempursari;
 - c. Pantai Bantengan dan Pantai Bulu berada di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari;
 - d. Pantai Bambang berada di Desa Bago Kecamatan Pasirian;
 - e. Pantai Watu Pecak berada di Desa Selok awar-awar Kecamatan Pasirian;
 - f. Pantai Dampar berada di Desa Bades Kecamatan Pasirian;
 - g. Pantai Ciut di Desa Bades Kecamatan Pasirian;

- h. Pantai Tlepuk berada di Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian
 - i. Pantai Translog berada di Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh;
 - j. Pantai Parupa berada di Desa Jatimulyo Kecamatan Kunir; dan
 - k. Pantai Wotgalih berada di Desa Wotgalih Kecamatan Yosowilangun.
6. Pariwisata buatan, yaitu berupa taman pemandian meliputi:
- a.** Pemandian Selokambang berada di Desa Purwosono Kecamatan Sumpalsari;
 - b.** Pemandian Tirtosari berada di Desa Penanggal dan Pemandian Tirtowono berada di Desa Jarit Kecamatan Candipuro;
 - c.** Water Park berada di Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang;
 - d.** Kolam Renang Veteran berada di Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono;
 - e.** Pemandian Surojoyo berada di Kelurahan Citrodiwangsan Kecamatan Lumajang;
 - f.** Pemandian Telaga Semeru dan Pemandian Mina Sari berada di Desa Sememu Kecamatan Pasirian;
 - g.** Pemandian Batu Kambang berada di Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung;
 - h.** Pemandian Kayu Batu di Desa Pulo dan Pemandian Joyokarto di Desa Jokarto Kecamatan Tempeh;
 - i.** Pemandian Alam Tirtosari View berada di Desa Penanggal Kecamatan Candipuro;
 - j.** Pemandian Umbulan berada di Desa Tegalorejo Kecamatan Tempursari; dan
 - k.** Pemandian Al-Kautsar berada di Desa Kalipepe Kecamatan Yosowilangun.

Tabel 2. 25 Hasil Telaahan Struktur Ruang Kabupaten Lumajang

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
I.	Rencana Pusat Kegiatan							
I.1	Rencana Sistem Perkotaan	a.Pengembangan pusat pemerintahan kabupaten b.Pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten; c.Pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala kabupaten; d.Pengembangan pusat industri kecil dan mikro; e.Pengembangan pusat permukiman kepadatan menengah dan rendah; f. Pembangunan pusat pariwisata; dan g.Pengembangan pusat perdagangan dan jasa	a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau sebagai Ibukota Kabupaten meliputi Perkotaan Lumajang (Kecamatan Lumajang dan Sukodono) b. Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi Kecamatan Pasirian, Klakah, Yosowilangun, Senduro					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		skala regional.						
		<p>Pengembangan perkotaan Ibu Kota Kecamatan yang bukan pusat PKL sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).</p> <p>a. Pengembangan pusat pemerintahan skala desa;</p> <p>b. Pengembangan pusat permukiman perkotaan;</p> <p>c. Pengembangan pusat pendidikan;</p> <p>d. Pengembangan pusat kesehatan;</p> <p>e. Pembangunan pusat industri kecil dan/atau mikro; dan</p> <p>f. Pengembangan pusat perdagangan dan jasa.</p>	<p>Kecamatan Sukodono, Sumpoko, Padang, Jatiroto, Tempeh, Candipuro, Pronojiwo, Tempursari, Ranuyoso, Randuagung, Kedungjajang, Kunir, Tekung, Rowokangkung, Pasrujambe, Gucialit</p>					
I.2	Rencana SistemPerdesaan	Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan di tiap-tiap kecamatan	Desa Umbul, Kecamatan Kedungjajang, Desa Kraton, Kecamatan Yosowilangun,					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		<p>a. Pengembangan pasar koleksi dan distribusi komoditas pertanian;</p> <p>b. Pengembangan layanan kesehatan skala lingkungan;</p> <p>c. Pengembangan desa wisata; dan</p> <p>d. Pengembangan permukiman perdesaan.</p>	<p>Pronowijo, Kecamatan Pronojiwo, Desa Banjarwaru, Kecamatan Lumajang, Desa Burno, Kecamatan Senduro, Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe, Desa Kedungrejo, Kecamatan Rowokangkung, Desa Kalibendo, Kecamatan Pasirian, Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Desa Jatigono, Kecamatan Kunir, Desa Bulurejo, Desa Tempursari Kecamatan Tempursari, Desa Alun-Alun, Kecamatan Ranuyoso, Desa Petahunan, Kecamatan Sumbersuko, Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Desa Tempeh kidul, Kecamatan Tempeh, Desa Padang, Kecamatan Padang, Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Desa Salak, Kecamatan Randuagung, Desa Karangbendo, Kecamatan Tekung, Desa Klakah, Kecamatan Klakah</p>					
II.	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat							
II.1	Rencana Jaringan Jalan	Peningkatan dan pemeliharaan rencana jaringan Jalan Nasional	1. Ruas batas Kabupaten Malang (Pronojiwo) – batas Kota (Sumbersuko); Jalan Teratai					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		Kolektor Primer 2 (JKP-2)	<p>(Lumajang); Jalan Imam Bonjol (Lumajang); Jalan Brigjen Slamet Riadi (Lumajang); Jalan Jendral Gatot Subroto (Lumajang); Jalan Sunandar Priyo Sudarmo (Lumajang); Jalan Sukarno – Hatta atau ruas Lumajang - Wonorejo (Sukodono);</p> <p>2. Ruas Wonorejo - batas Kabupaten Jember Jatiroto);</p> <p>3. Batas Kabupaten Probolinggo (Ranuyoso) – Grobogan (Kedungjajang);</p> <p>4. Ruas Grobogan – Wonorejo (Kedungjajang).</p>					
		Peningkatan dan pembangunan rencana jalan strategis Nasional	Jalan Lintas Selatan (JLS) meliputi ruas batas Kabupaten Malang (Tempursari) – ruas batas Kabupaten Jember (Yosowilangun)					
			Jalan Tol Probolinggo – Lumajang meliputi ruas batas Kabupaten Probolinggo (Ranuyoso) – pintu keluar tol (Kedungjajang)					
		Peningkatan dan pemeliharaan rencana	Ruas Grobogan (Kedungjajang) – batas Kabupaten Jember (Jatiroto);					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		jaringan Jalan Provinsi Kolektor Primer 3 (JKP-3)	Jalan Letjen Pandjaitan (Lumajang); Jalan Kapten Suwandak (Lumajang); Jalan Mayjend Sukertiyo (Lumajang); Jalan Mahakam (Lumajang); dan					
			Ruas batas Kota Lumajang (Tekung) - batas Kabupaten Jember (Yosowilangun).					
		Peningkatan dan pemeliharaan rencana jalan strategis Provinsi	1.Ruas Tempeh – Kunir; 2.Ruas Kunir–Karangrejo; dan 3.Ruas Karangrejo–Yosowilangun					
		Peningkatan dan pemeliharaan rencana jaringan Jalan Kabupaten Kolektor Primer 4 (JKP-4)	1.Ruas Banyuputih Kidul - Randuagung; Ruas Suko – Dawuhan Wetan; Ruas Dawuhan Wetan–Sumbersari; Ruas Sumbersari–Rowokangkung; Ruas Tukum – Kunir; Ruas Pasirian – Tempursari; Jalan Semeru (Lumajang); Ruas Klanting – Purwosono; Ruas Purwosono – Sarikemuning; Ruas Sarikemuning – Senduro; Ruas Sarikemuning – Jambe Kumbu; Jalan Dieng (Lumajang); 2.Ruas Dawuhan Lor – Padang;					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
			Ruas Padang – Gucialit; Dan Dawuhan Lor – Wonokerto.					
		Peningkatan dan pemeliharaan rencana jaringan jalan Kabupaten lokal primer antar PKL	22 ruas di wilayah Kabupaten Lumajang					
		Peningkatan dan pengembangan rencana jaringan jalan strategis Kabupaten	1. Peningkatan jaringan Jalur Lingkar Timur meliputi ruas Lumajang – Sukodono – Kedungjajang.					
			2.Pembangunan jaringan Jalur Lingkar Barat meliputi ruas Kedungjajang – Sukodono – Padang - Lumajang – Sumbersuko.					
			3.Rencana jaringan Jalur Lingkar Luar Kabupaten a. ruas Ranuyoso – Klakah – Randuagung melalui 9 (sembilan) ruas jalan Kabupaten; b. ruas Randuagung – Jatiroto – Rowokangkung melalui 7 (tujuh) ruas jalan Kabupaten; c. ruas Candipuro – Pasrujambe – Senduro melalui 6 (enam) ruas					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
			jalan Kabupaten; d. ruas Senduro – Gucialit – Ranuyoso melalui 13 (tiga belas) ruas jalan Kabupaten					
		Peningkatan dan pemeliharaan rencana jaringan jalan desa	1.Rencana jaringan jalan lokal primer antara PKL dengan Pusat Kegiatan Lingkungan (PK-Ling) meliputi 109 ruas jalan di wilayah Kabupaten Lumajang					
			2.Rencana jaringan jalan lingkungan primer di seluruh Kabupaten Lumajang					
II.2	Rencana Terminal	1. Peningkatan terminal penumpang a. Terminal penumpang Tipe B b. Terminal penumpang Tipe C	Kecamatan Kedungjajang Kecamatan Lumajang, Pronojiwo, Pasirian dan Klakah					
		2. Pembangunan terminal barang	Kecamatan Sukodono					
II.3	Rencana Prasarana Lalu Lintas	1. Peningkatan jembatan timbang a. Jembatan Timbang	Kecamatan Klakah Kecamatan Tempeh, Pasirian					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		Klakah b. Jembatan Timbang Pasir						
		2. Peningkatan unit pengujian kendaraan bermotor	Kecamatan Kedungjajang					
		3. Pengembangan dan peningkatan rute angkutan umum	rute Senduro - Gucialit - Sukodono; rute Pasrujambe - Tempeh; rute Yosowilangun - Tempeh; rute Candipuro - Pasrujambe; rute Pasirian - Tempursari; dan rute Tempursari - Pronojiwo					
II.4	Sistem Jaringan Kereta Api	1. Pengembangan jalur kereta api umum	Jalur Ranuyoso - Klakah - Randuagung - Jatiroto					
		2. Peningkatan prasarana transportasi kereta api	Kecamatan Klakah; Kecamatan Jatiroto					
		3. Reaktivasi jalur kereta api mati	Jalur Klakah- Kedungjajang - Lumajang - Tempeh - Pasirian Jalur Lumajang - Tekung - Rowokangkung - Yosowilangun					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
III	Sistem Prasarana Lainnya							
III.1	Sistem Jaringan Telekomunikasi	1. Pengembangan jaringan telepon	Kecamatan Gucialit, Tempursari dan Pronojiwo					
		2. Penggunaan menara telekomunikasi secara bersama	Seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Lumajang					
		3. Pengembangan dan/atau peningkatan pelayanan internet melalui <i>wireless fidelity</i>	Seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Lumajang					
		4. Peningkatan dan/atau pemeliharaan jaringan kabel telepon	Seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Lumajang					
		5. Pengembangan dan/atau peningkatan pelayanan internet	Seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Lumajang					
		6. Pengembangan penggunaan menara telekomunikasi secara bersama	Seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Lumajang					
III.2	Rencana Sistem Jaringan	1. Pengembangan	Kecamatan Jatiroto, Kecamatan Kedungjajang, Kecamatan					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
	Prasarana Energi	transmisi tenaga listrik	Sukodono dan Kecamatan Lumajang					
		2. Pengembangan jaringan tenaga listrik	Kecamatan Lumajang, Kecamatan Klakah dan Kecamatan Pasirian					
		3. Arah pengembangan energi baru dan terbarukan (pembangkit listrik tenaga surya)	Kecamatan Yosowilangun, Kecamatan Kunir, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Tempursari					
		4. Arah pengembangan energi baru dan terbarukan (pengembangan energi mikrohidro)	Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Gucialit, Kecamatan Senduro, Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Tempursari dan Kecamatan Pasirian					
III.3	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber daya Air	1. Peningkatan dan normalisasi wilayah sungai	Daerah Aliran Sungai (DAS) Bondoyudo, DAS Wotgalih, Mujur, Rejali, Dampar, Gede, Wealang, Tempurejo Hulu, Tempurejo Hilir, Bulurejo Hulu, Bulurejo Tengah, Bulurejo Hilir, Rawaan, dan Glidik					
		2. Penyediaan air baku untuk kebutuhan domestik	Seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Lumajang					
		3. Penyediaan air baku untuk kebutuhan industri	Kecamatan Pasirian, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Klakah, Kecamatan Kunir, Kecamatan					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
			Candipuro, dan Kecamatan Sumpoko					
		4. Penyediaan air baku untuk pengembangan budidaya pertanian	Seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Lumajang					
		5. Pengembangan dan pelestarian daerah irigasi	<p>1. Daerah irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:</p> <p>a. DI Bondoyudo; dan</p> <p>b. DI Jatiroto</p> <p>2. DI kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi :</p> <p>a. DI Jurang Dawir;</p> <p>b. DI Brug Purwo;</p> <p>c. DI Tekung I;</p> <p>d. DI Bodang ;</p> <p>e. DI Curah Menjangan/ Kedungsangku; dan</p> <p>f. DI Umbul Pringtali</p> <p>3. DI kewenangan Pemerintah Kabupaten sebanyak 315 (tiga ratus</p>					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
			lima belas) DI tersebar di seluruh Kecamatan					
		6. Peningkatan bangunan pengendali banjir						
		a. Cekdam	Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Pronojiwo; dan Kecamatan Candipuro					
		b. Tanggul	Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Tempursari					
		c. Groundsill	Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Tempeh; dan Kecamatan Tempursari					
		d. Konsolidasi Dam	Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Candipuro					
		e. Krib Kanal	Kecamatan Tempursari, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Candipuro					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		f. Dispersion Dam	Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Candipuro					
IV	Rencana Sistem Prasarana Wilayah lainnya							
IV.1	Sistem Prasarana Persampahan	1. Penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan;						
		2. Pengoptimalan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Besuk	Desa Besuk Kecamatan Tempeh					
		3. Peningkatan lokasi TPA Lempeni	Kecamatan Tempeh					
		4. Pembangunan lokasi TPA Baru	Kecamatan Ranuyoso, Pronojiwo, Yosowilangun					
		5. Pengembangan prasarana pengolahan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)	Kecamatan Pasirian					
		6. Pengembangan Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) dengan	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		peningkatan Konsep 4R						
		7. Pengembangan penerapan sistem pengurangan timbunan sampah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahunan	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					
		8. Pengembangan penerapan teknologi ramah lingkungan	TPS/TPA					
		9. Peningkatan penerapan label produk ramah lingkungan	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					
		10. Pengembangan kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					
		11. Peningkatan fasilitas pemasaran produk-produk daur ulang	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					
IV.2	Sistem Prasarana Air Minum	1. Pengembangan jaringan air minum perpipaan dan non perpipaan	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		2. Pengembangan jaringan distribusi air minum kawasan perkotaan	Kecamatan Tekung, Kecamatan yosowilangun, Kecamatan rowokangkung dan Kecamatan Sumbersuko					
		3. Peningkatan jaringan distribusi air minum kawasan pedesaan	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					
		4. Pengoptimalan sumber mata air sebagai air baku air minum	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					
		5. Peningkatan peran serta Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPPAM) dalam memelihara dan mengelola sistem air minum pedesaan	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					
		6. Peningkatan upaya konservasi lingkungan disekitar sumber mata air untuk mempertahankan debit air baku	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					
		7. Pengendalian kebocoran air melalui upaya penentuan sub zona kebocoran, rehabilitasi	Seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Lumajang					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		jaringan distribusi, dan penggantian pipa yang rusak						
IV.3	Sistem Prasarana Limbah	1. Peningkatandan pengelolaan limbah padat rumah tangga dengan sistem tanki septikkomunal	Wilayah Kabupaten Lumajang					
		2. Peningkatan penanganan limbah kegiatan di kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pertambangan, kawasan permukiman dan fasilitas umum lainnya dengan menerapkan sistem instalasi pengolah air limbah setempat (<i>on site</i>) dan komunal (<i>off site</i>)	Wilayah Kabupaten Lumajang					
		3. Pengembangan sistem pengolahan air limbah dan kegiatan pemantauan instalasi atau prasarana pengolah air limbah Bahan Berbahaya dan	Wilayah Kabupaten Lumajang					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		Beracun (B3)						
		4. Peningkatan pemantauan pengelolaan limbah pemanfaatan ruang di kawasan budidaya						
IV.4	Sistem Prasarana Drainase	1. Pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase	Wilayah Kabupaten Lumajang					
		2. Normalisasi peningkatan saluran induk/primer	Sungai Bondoyudo, Rejali, Besuk Sat, Mujur dan Kali Glidik					
		3. Normalisasi/peningkatan saluran pembuang (<i>afvoer</i>)	Wilayah Kabupaten Lumajang					
		4. Pengembangan dan pengelolaan saluran pematusan dan drainase di setiap jaringan jalan	Wilayah Kabupaten Lumajang					
		5. Pembuatan daerah tangkapan air terutama dalam skala lingkungan	Wilayah Kabupaten Lumajang					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
IV.5	Sistem Prasarana Jalur dan Ruang Evakuasi	1. Peningkatan, pemeliharaan, dan pengembangan jalur evakuasi bencana						
		2. Pembangunan nampungan sementara dan/atau hunian sementara (huntara)						
		3. Pembangunan tempat hunian tetap (huntap)						
		4. Peningkatan dan pengembangan barak pengungsi						
		5. Pengembangan ruang terbuka						
IV.6	Rencana Sistem Prasarana Sistem Proteksi Kebakaran	1. Penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran						
		2. Pengembangan bangunan-bangunan penampung pasokan air/hidran pada setiap Kawasan	Wilayah Kabupaten Lumajang					

No	Rencana Struktur Ruang	Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Lima tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke-4	Lima tahun ke-5
		3.Pengadaan kendaraan pemadam kebakaran						
		4.Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, perusahaan dan pemerintahan untuk melengkapi bangunan gedungnya dengan sarana penyelamatan						

C. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana alam adalah suatu wilayah yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi mengalami bencana alam. Perwujudan kawasan rawan bencana alam Kabupaten Lumajang secara umum meliputi : a) Peningkatan kesiagaan pencegahan dan penanganan bencana; b) Peningkatan upaya pembentukan *buffer zone* berupa tanaman mangrove; c) Peningkatan dan/atau pemeliharaan bangunan sungai serta pengaman jalan; d) Pengembangan prasarana dan sarana evakuasi bencana; dan e) Pemetaan wilayah rawan bencana.

Kabupaten Lumajang merupakan wilayah yang memiliki ancaman bencana yang cukup banyak dan sewaktu-waktu dapat terjadi. Ancaman bencana yang dihadapi Kabupaten Lumajang antara lain gunung meletus, gempa dan gelombang pasang/tsunami, banjir dan tanah longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

1. Gunung Meletus

Kabupaten Lumajang dikelilingi oleh gunung-gunung berapi aktif yang membuatnya berpotensi tinggimengalami bencana alam gunung meletus. Pada bagian barat daya Kabupaten Lumajang, sekitar 30 km dari Kota Lumajang, terdapat Gunung Semeru. Menurut catatan sejarah, 5 Mei 1963 mulai jam 14.10 WIB terjadi awan panas dan aliran lava melanda Curah Lengkong, Kali Pancing dan Besuk Semut, awan panas mencapai 8 km dari kawah, letusan ini berlangsung hingga akhir Juli. Tahun 1967 letusan yang terjadi pada bulan September dan pembentukan kubah lava dititik letusan 1963 pinggir kawah selatan (hulu Kali Glidik, Besuk Bang dan Besuk Kobokan) mencapai ketinggian 3.730 m (54 m di atas puncak Mahameru). Lahar terjadi di lembah Kali Glidik, Besuk Kobokan dan Kali Rejali. Pada tahun 1968, pertumbuhan kubah lava terus berlangsung. Banjir lahar membawa korban tiga orang penduduk Desa Sumber Wungkil.

Gunung berapi lain selain Gunung Semeru yang berdekatan dengan Kabupaten Lumajang adalah Gunung Lemongan. Gunung Lemongan terletak di wilayah utara Kabupaten Lumajang, sekitar 20 km dari Kota Lumajang. Pemantauan Gunung Lemongan dilakukan di Pos PGA, Kecamatan Klakah dengan menggunakan seismograf satu komponen bersistem RTS, sedangkan seismometernya ditempatkan di Gunung Anyar pada daerah aliran lava termuda dari letusan samping Gunung Lemongan. Peralatan yang ada dapat merekam gempa tektonik jauh dan tektonik lokal disamping merekam gempa vulkanik. Secara visual dilakukan pengukuran suhu puncak/fumarola/solftara dan pengukuran sifat keasaman secara berkala (1 bulan sekali atau 3 bulan sekali).

Aliran lava yang berpengaruh kuat, dari puncak Lemongan diperkirakan akan terhenti di daerah Gunung Anyar dan Ranu Kambang (sebelah barat daya puncak Lemongan), oleh karena itu kawasan sekitar Alun-alun, Papringan, Ranulading, Kali Banter dan Puncak Lemongan merupakan daerah dengan pengaruh kuat dan sedang terhadap kemungkinan terkena material berupa aliran lava, lontaran batu (pijar), hujan abu lebat. Kemungkinan dapat terkena aliran lahar lava yang berpengaruh sedang, menyebar di sekitar perkampungan, Alun-Alun, Guntoran, Papringan, G. Kinik, Ranulading, Kalibanter, sebagian lagi menyebar disekitar puncak Lemongan. Aliran lahar yang berpengaruh rendah, menyebar di sekitar perkampungan ; Alun-alun Sumber Petung, Ranu Pakis, Sumber Wringin, Salak Tengah, Laroyan, Pakisan, Tegalsari, Tiris, Ranu Gedang, Bedian dan Jambuan Lontaran/jatuhan piroklastika yang berpengaruh kuat, menyebar di bagian timur puncak Lemongan. Lontaran/jatuhan piroklastika yang berpengaruh sedang dan rendah, pada umumnya berada di kaki dan lereng Gunung Lemongan.

Arahan pengelolaan kawasan rawan letusan gunung api, aliran lava, lahar dan awan panas ialah penetapan zona bahaya dan zona aman terhadap letusan gunung berapi serta dengan menetapkan desa-desa lokasi pengungsian dan juga arah pengungsian. Kawasan rawan bencana ini telah diidentifikasi oleh beberapa studi dan dalam proyek Gunung Semeru yang meliputi areal seluas 26,520 Ha dengan perincian sebagai berikut:

1. Daerah terlarang yaitu daerah yang terletak di sekitar gunung berapi yang berdekatan dengan sumber letupan ditetapkan pada sebagian wilayah Kecamatan Senduro, Pronojiwo, dan Candipuro. Rencana pengembangannya adalah daerah perlindungan mutlak yang tidak bisa dibudidayakan
2. Daerah bahaya 1 merupakan daerah yang dianggap paling berbahaya berdasarkan pengalaman letusan dimasa lampau ditetapkan pada sebagian wilayah Kecamatan Senduro, Pronojiwo, Pasirian, Tempeh, Kunir, Yosowilangun, Rowokangkung, Tekung, Jatiroto, Lumajang, Sukodono, Randuagung, Kedungjajang, Gucialit, Klakah dan Ranuyoso

3. Daerah bahaya 2 ditetapkan pada wilayah Kecamatan Pronojiwo, Tempursari, Candipuro, Pasirian, Tempeh, Senduro, Tekung, Lumajang Dan Sukodono



Sumber: Bappeda Kab. Lumajang, 2013

Gambar 2. 14 Peta Rencana Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi

2. Gempa dan Gelombang Pasang/Tsunami

Kabupaten Lumajang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di bagian selatan dan termasuk ke dalam daerah yang rawan bencana yaitu gempa bumi dan dapat berpotensi menimbulkan tsunami. Hal ini dikarenakan terdapat pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia disepanjang Selatan Lumajang tepatnya berada kira-kira 150 km dari pantai di Samudera Hindia. Beberapa skenario perkiraan gelombang tsunami yang kemungkinan terjadi apabila gempa adalah sebagai berikut:

1. Apabila terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar (lebih dari 6,3 SR) dengan pusat gempa di laut dengan kedalaman 30 km, maka diperkirakan gempa tersebut akan dapat menimbulkan tsunami di wilayah pesisir Lumajang. Tsunami yang ditimbulkan dapat mencapai kecepatan 900 km/jam dengan ketinggian diperkirakan antara 4 m hingga 12 m di pantai.
2. Apabila terjadi gempa bumi di lepas pantai Pesisir Selatan diperkirakan akan menimbulkan gelombang tsunami dengan ketinggian 4 m (ringan), 8 m (sedang)

dan 12 m (berat). Namun menurut penilaian para ahli yang paling mungkin terjadi adalah 4 m (ringan).

Sebagai dampak dari gempa bumi dan gelombang tsunami tersebut, maka bentuk kerusakan yang ditimbulkan adalah runtuhnya beberapa bangunan dan prasarana dan kemudian gelombang tsunami akan menyapu pemukiman di tepi pantai. Ada 5 Kecamatan dan 21 Desa di Kabupaten Lumajang berbatasan dengan laut. Terdapat 5 kecamatan yang diperkirakan akan terdampak apabila terjadi tsunami adalah Kecamatan Tempursari, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Kunir, dan Kecamatan Yosowilangun. Diperkirakan sebanyak 81 Dusun yang berada 5 kecamatan tersebut terancam bencana gempa bumi dan tsunami. Berdasarkan data Kabupaten Lumajang dalam Angka 2021 pada tahun 2018 terjadi gempa sebanyak 17 kali dan pada tahun 2020 sebanyak 1 kali.



Sumber: Bappeda Kab. Lumajang, 2013

Gambar 2. 15 Peta Kawasan Rawan Gempa Bumi

3. Banjir

Kabupaten Lumajang dilalui oleh beberapa sungai yang menyebabkan kawasan-kawasan di sekitarnya berpotensi rawan banjir. Beberapa faktor penyebab banjir di Kabupaten Lumajang diantaranya terbagi menjadi:

1. Banjir pengaruh Gunung Semeru, yaitu kawasan disekitar aliran Sungai Glidik dan Rejali, serta Sungai Mujur akibat aliran lava yang mengakibatkan pendangkalan sungai. Kecamatan yang rawan banjir pengaruh Gunung Semeru

adalah Kecamatan Pronojiwo (Desa Supiturang); Kecamatan Candipuro (Desa Jugosari); Kecamatan Tempursari; dan Kecamatan Pasirian

2. Kawasan rawan banjir pengaruh topografi disebabkan curah hujan yang tinggi dan tidak adanya penahan air yaitu di Kecamatan Pasrujambe (Desa Kertosari), Kecamatan Padang (Desa Barat dan Kedawung), Kecamatan Ranuyoso (Desa Ranu Bedali dan Desa Alun-alun), Kecamatan Senduro dan Kecamatan Klakah.
3. Kawasan rawan banjir akibat luapan atau genangan yang disebabkan meningkatnya debit sungai dan ketidakmampuan sungai menampung air. Terdapat di Kecamatan Rowokangkung yaitu Desa Rowokangkung dan Sidorejo; Kecamatan Yosowilangun yaitu Desa Tunjungrejo, Wotgalih, Kalipepe dan Yosowilangun; Kecamatan Tempursari yaitu Desa Kaliuling, dan Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari.

Adapun kawasan rawan bencana di Kabupaten Lumajang dengan kriteria daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan lainnya disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 26 Kawasan Rawan Bencana Berdasarkan Statusnya

No	Status Daerah	Daerah yang Berpotensi Terdampak Bencana
1.	Daerah Terlarang	a. Kecamatan Senduro b. Kecamatan Pronojiwo c. Kecamatan Candipuro
2.	Daerah Bahaya I	a. Kecamatan Senduro b. Kecamatan Pronojiwo c. Kecamatan Pasirian d. Kecamatan Tempeh e. Kecamatan Kunir f. Kecamatan Yosowilangun g. Kecamatan Rowokangkung

No	Status Daerah	Daerah yang Berpotensi Terdampak Bencana
		h. Kecamatan Tekung i. Kecamatan Jatiroto j. Kecamatan Lumajang k. Kecamatan Sukodono l. Kecamatan Randuagung m. Kecamatan Kedungjajang n. Kecamatan Gucialit o. Kecamatan Klakah p. Kecamatan Ranuyoso
3.	Daerah Bahaya II	a. Kecamatan Pronojiwo b. Kecamatan Tempursari c. Kecamatan Candipuro d. Kecamatan Pasirian e. Kecamatan Tempeh f. Kecamatan Senduro g. Kecamatan Tekung h. Kecamatan Lumajang i. Kecamatan Sukodono

Sumber : Bappeda Kab. Lumajang, 2020 (diolah)



Sumber : Bappeda Kab. Lumajang, 2013

Gambar 2. 16 Peta Rencana Kawasan Banjir

4. Gerakan Tanah

Kawasan yang rawan gerakan tanah adalah daerah yang memiliki kemiringan >50% dengan kandungan air tanah sedang sampai tinggi dan sifat tanah lunak atau gembur. Di Kabupaten Lumajang, wilayah yang rentan akan gerakan tanah adalah daerah di sekitar Sungai Besuk Semut dan Sungai Besuk Tunggal di Kecamatan Pronojiwo, Tempursari, Candipuro, Pasirian, Pasrujambe dan Senduro. Daerah aliran sungai ini umumnya memiliki kontur tajam. Untuk itu, diperlukan pengelolaan DAS dengan membuat terasering dan penanaman tanaman keras produktif bersama masyarakat. Mengingat kawasan sepanjang DAS ini sekaligus merupakan kawasan penyangga untuk mencegah pendangkalan waduk yang disebabkan oleh longsor dan erosi, maka upaya penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi juga harus diikuti oleh pengembangan tutupan tanah atau ground cover yang juga memiliki fungsi ekonomi seperti rumput gajah yang dapat digunakan untuk pakan ternak. Upaya pengendalian kawasan rawan gerakan tanah tertuang dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai berikut:

1. Pengendalian pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota/Provinsi dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten/Kota /Provinsi atau rencana detail tata ruang Kabupaten/ Kota
2. Dalam pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat risiko terjadinya longsor dan daya dukung lahan/tanah
3. Tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/tingkat risiko tinggi terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan ditingkatkan fungsi lindungnya
4. Kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan yang ketat



Sumber : Bappeda Kab. Lumajang, 2013

Gambar 2. 17 Peta Rencana Kawasan Rawan Bencana Longsor

5. Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan umumnya dapat terjadi disebabkan oleh faktor kelalaian atau kurangnya pemahaman tentang pengelolaan lahan hutan ataupun erupsi gunung berapi. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan minimnya sosialisasi, informasi dan pengetahuan masyarakat. Erupsi gunung dimana lava pijar yang dikeluarkan oleh Gunung berapi umumnya mengalir ke arah kawasan hutan yang gundul, pada musim kemarau dapat memicu terjadinya kebakaran hutan.

6. Kekeringan

Kekeringan disebabkan oleh kurangnya area resapan dan kurangnya vegetasi atau tumbuh-tumbuhan yang dapat menyimpan cadangan air. Tanda-tanda kekeringan berupa berkurangnya air sumur dan dam, mendangkalnya aliran sungai, serta semakin minimnya saluran irigasi. Banyaknya rekahan pada tanah akan mempercepat terjadinya penguapan sehingga dapat menyebabkan terjadinya bencana kekeringan sewaktu-waktu di musim kemarau setiap tahun.

2.1.1.2 Aspek Demografi

A. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 berdasarkan data BPS (2021) sebanyak 1.092.729 jiwa. Dari sisi jumlah penduduk,

Kecamatan Pasirian merupakan wilayah yang memiliki penduduk terbanyak yaitu 88.939 jiwa. Sedangkan daerah dengan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Gucialit yang memiliki penduduk 25.762 jiwa.

Tabel 2. 27Jumlah PendudukKabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tempursari	28.714	28.746	35.417	33.819	33.701
2	Pronojiwo	32.106	32.146	38.155	37.759	37.358
3	Candipuro	63.476	63.595	73.179	73.617	71.633
4	Pasirian	86.449	86.735	92.640	92.035	88.939
5	Tempeh	81.544	81.804	86.684	85.929	83.771
6	Lumajang	82.102	82.187	87.195	84.649	84.494
7	Sumbersuko	35.234	35.374	37.034	36.137	36.138
8	Tekung	33.768	33.894	36.413	35.565	35.177
9	Kunir	53.276	53.431	57.283	56.181	55.168
10	Yosowilangun	57.327	57.422	62.587	61.299	60.003
11	Rowokangkung	34.565	34.608	39.016	38.391	38.001
12	Jatiroto	47.053	47.252	50.040	48.226	47.694
13	Randuagung	62.525	62.682	70.798	70.343	67.966
14	Sukodono	53.750	54.189	57.133	56.352	55.647
15	Padang	35.859	35.984	37.528	37.943	36.678
16	Pasrujambe	35.887	35.972	42.363	40.987	40.269
17	Senduro	44.314	44.464	49.721	49.314	48.850
18	Gucialit	23.644	23.670	26.034	26.274	25.762
19	Kedungjajang	45.339	45.421	47.194	47.685	45.694
20	Klakah	52.412	52.523	54.902	56.664	53.448
21	Ranuyoso	47.468	47.695	47.461	50.082	46.338
Jumlah		1.036.812	1.039.794	1.128.777	1.119.251	1.092.729

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang2020 (diolah)

Sedangkan tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 mencapai 840 jiwa per km². Kepadatan penduduk tingkat Kecamatan Kabupaten Lumajang paling tinggi terdapat di Kecamatan Lumajang yaitu sebesar 2.968 jiwa per km² dan Kecamatan Sukodonosebesar 1.932 jiwa per km². Sedangkan wilayah Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling jarang adalah Kecamatan Pasrujambe 248 jiwa per km² dan Kecamatan

Gucialit sebesar 253 jiwa per km² . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.28 berikut.

Tabel 2. 28 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Lumajang tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km)	Kepadatan Penduduk (per Km ²)				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tempursari	10.535,00	273	273	336	321	320
2	Pronojiwo	14.149,00	227	227	270	267	264
3	Candipuro	14.309,40	444	444	511	514	501
4	Pasirian	12.839,00	673	676	722	717	693
5	Tempeh	7.321,00	1.114	1.117	1.184	1.174	1.144
6	Lumajang	2.847,15	2.884	2.887	3.063	2.973	2.968
7	Sumbersuko	2.907,35	1.212	1.217	1.274	1.243	1.243
8	Tekung	2.788,00	1.211	1.216	1.306	1.276	1.262
9	Kunir	5.330,00	1.000	1.002	1.075	1.054	1.035
10	Yosowilangun	7.244,00	791	793	864	846	828
11	Rowokangkung	5.888,00	587	588	663	652	645
12	Jatiroto	5.369,00	876	880	932	898	888
13	Randuagung	9.392,25	666	667	754	749	724
14	Sukodono	2.880,86	1.866	1.881	1.983	1.956	1.932
15	Padang	5.383,14	666	668	697	705	681
16	Pasrujambe	16.247,45	221	221	261	252	248
17	Senduro	17.089,65	259	260	291	289	286
18	Gucialit	10.179,25	232	233	256	258	253
19	Kedungjajang	6.613,00	686	687	714	721	691
20	Klakah	8.742,00	600	601	628	648	611
21	Ranuyoso	11.035,50	430	432	430	454	420
Jumlah		179.090	579	581	630	625	840

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang

Selanjutnya berdasarkan pada struktur kelompok umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Lumajang memiliki jumlah yang hampir sama atau seimbang. Pada tahun 2021, rasio penduduk Kabupaten Lumajang berdasarkan jenis kelamin, jumlah jenis kelamin laki-laki di Kabupaten Lumajang dari semua kelompok umur sebesar 542.614 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 550.115 jiwa. Dari data tersebut dapat diartikan

bahwa penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Lumajang lebih sedikit daripada jenis kelamin perempuan.

Tabel 2. 29 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lumajang Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Satuan	Laki-Laki	Perempuan	2021
1	0-4	Jiwa	35.457	33.696	69.153
2	5-9	Jiwa	41.487	39.203	80.690
3	10-14	Jiwa	42.393	39.844	82.237
4	15-19	Jiwa	41.035	39.068	80.103
5	20-24	Jiwa	42.964	40.925	83.889
6	25-29	Jiwa	40.985	39.544	80.529
7	30-34	Jiwa	37.967	36.899	74.866
8	35-39	Jiwa	40.659	41.783	82.442
9	40-44	Jiwa	39.194	41.849	81.043
10	45-49	Jiwa	39.129	42.445	81.574
11	50-54	Jiwa	36.686	39.903	76.589
12	55-59	Jiwa	32.329	36.487	68.816
13	60-64	Jiwa	28.008	29.717	57.725
14	65-69	Jiwa	19.692	19.743	39.345
15	70-74	Jiwa	12.736	13.425	26.161
16	≥75	Jiwa	11.893	15.584	27.477
Jumlah		Jiwa	542.614	550.115	1.092.729

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lumajang, 2021

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Selama periode 2017-2021, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lumajang sebesar 0,25%, dimana pertumbuhan penduduk yang paling tinggi pada tahun 2017 sebesar 0,84% dan pertumbuhan penduduk terendah berada pada tahun 2020 sebesar 0,25%. Sedangkan pertumbuhan tertinggi rata rata ada di kecamatan Randuagung sebesar 1,13% dan terendah di Kecamatan Padang sebesar -1,06 %.

Tabel 2. 30 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Laju pertumbuhan penduduk (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Lumajang	%	0,34	0,30	0,29	0,25	0,22

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

C. Komposisi dan Populasi Masyarakat

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 terhitung sebanyak 1.092.729 jiwa dengan komposisi penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 542.614 jiwa dan perempuan sebanyak 550.115 jiwa. Sex ratio merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan dikalikan dengan 100. Tahun 2021, sex ratio penduduk Kabupaten Lumajang sebesar 98,64 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 jiwa penduduk laki-laki. Dengan sex ratio seperti itu, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir setara.

Tabel 2. 31 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Rasio di Kabupaten Lumajang 2017-2021

No	Tahun	Laki Laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
1	2017	505.771	531.040	1.036.811	95,24
2	2018	507.781	532.013	1.039.794	95,45
3	2019	557,366	565,715	1.123.081	99,03
4	2020	553.888	563.748	1.117.636	98,25
5	2021	542.614	550.115	1.092.729	98.64

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lumajang, 2021

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat perlu dicermati dan dilaksanakan karena menyangkut hak konstitusional setiap warga negara. Suatu wilayah dikatakan masyarakatnya sejahtera apabila warga di wilayah tersebut mampu mengembangkan diri melalui pemenuhan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidup dan taraf perekonomiannya. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Merujuk pada esensi kesejahteraan tersebut, keterpenuhan hak setiap orang di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perumahan, ketentraman dan ketertiban serta jaminan sosial akan dijabarkan sebagai berikut.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menggambarkan tingkat produktivitas penduduk di dalam menghasilkan barang dan jasa di daerah tersebut pada suatu periode. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), tingkat inflasi dan tingkat suku bunga. Berikut akan ditampilkan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021 :

Tabel 2. 32 Capaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Daerah	Satuan	Realisasi Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Ekonomi	Lumajang	%	5,05	5	4,61	-2,79	3,14
		Jawa Timur	%	5,45	5,50	5,52	-2,39	3,57
		Indonesia	%	5,07	5,17	5,02	-2,07	5,02

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Pada Tahun 2017 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang sebesar 5,05 %, masih berada di bawah capaian Jawa Timur sebesar 5,45% dan capaian Nasional sebesar 5,07%. Kemudian pada tahun 2019 perekonomian Kabupaten Lumajang mengalami penurunan secara bertahap hingga tahun 2020 menjadi -2,79% dikarenakan adanya pandemi Covid-19 seperti halnya Jawa Timur yang mengalami penurunan hingga -2,39% dan Nasional penurunan hingga -2,07%.

Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mulai berangsur naik lagi, tidak hanya di Kabupaten Lumajang tetapi Provinsi Jatim dan juga Nasional. Untuk Kabupaten Lumajang pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 3,41 %, Provinsi Jawa Timur 3,57 % dan Nasional sebesar 5,02 %. Hal ini membuktikan pada tahun 2021, perekonomian secara keseluruhan berangsur pulih.

B. Pertumbuhan PDRB

Product Domestic Regional Bruto atau yang selanjutnya disebut PDRB merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang mengindikasikan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Keberhasilan pembangunan ekonomi, dapat dilihat dari pendapatan per kapita yang tinggi, rendahnya tingkat kemiskinan, pengangguran dan

ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga tercermin dengan meningkatnya produktivitas penduduk di dalam menghasilkan barang dan jasa di daerah tersebut.

Terdapat tujuh belas sektor yang mencerminkan pertumbuhan PDRB diantaranya sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Indikator - indikator yang mencerminkan kesejahteraan di bidang ekonomi dengan rasionalisasi sebagai berikut: (i) pertumbuhan ekonomi mengindikasikan peningkatan kapasitas produksi suatu daerah yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional; (ii) pendapatan per kapita menjelaskan tentang besarnya pendapatan rata-rata setiap penduduk di suatu daerah; (iii) tingkat kemiskinan mengindikasikan persentase jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (besaran rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok); (iv) tingkat pengangguran terbuka mencerminkan persentase jumlah pengangguran terhadap total penduduk usia kerja; dan (v) ketimpangan pendapatan dilihat dari gini rasio mencerminkan distribusi pendapatan di antara kelompok masyarakat.

Secara makro pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Penggunaan atas dasar harga konstan ini, karena pengaruh harga telah dikeluarkan sehingga hasil yang diperoleh hanya mencerminkan kenaikan produksi barang dan jasa. Untuk selanjutnya nilai PDRB Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada Tabelberikut.

Tabel 2. 33 PDRB Kabupaten Lumajang Atas Dasar Harga Berlaku 2017-2021 (dalam miliar)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.838,18	10.944,17	11.209,67	11.314,47	11.650,49
2	Pertambangan dan Penggalian	1.181,81	1.335,65	1.386,20	1.314,64	1.372,51

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
3	Industri Pengolahan	5.562,03	6.234,65	6.772,35	6.587,69	7.135,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12,99	13,92	14,95	14,57	15,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	14,59	15,40	16,41	17,14	18,60
6	Konstruksi	2.225,25	2.417,10	2.611,54	2.465,89	2.542,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.776,83	4.215,96	4.572,27	4.288,29	4.639,46
8	Transportasi dan Pergudangan	510,96	564,89	628,95	596,86	640,21
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	354,01	394,52	434,88	392,03	424,41
10	Informasi dan Komunikasi	879,77	949,16	1.046,58	1.129,68	1.203,05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	493,86	534,28	560,81	562,11	579,54
12	Real Estate	450,29	505,88	567,94	581,16	605,04
13	Jasa Perusahaan	91,56	102,35	111,50	105,81	108,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	852,96	962,25	1.057,57	1.087,72	1.088,45
15	Jasa Pendidikan	729,71	770,20	831,60	864,09	861,78
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	202,48	220,22	242,61	267,05	285,01
17	Jasa lainnya	455,58	509,83	555,13	472,78	508,20

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
	Produk Domestik Regional Bruto	28.632,85	30.690,44	32.620,95	32.062,01	33.678,62

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Berdasarkan pengelompokan sektor di atas, secara keseluruhan hampir semua sektor mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Lumajang disusul oleh Sektor Industri Pengolahan. Total PDRB atas dasar harga berlaku dari kelompok sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2021 mencapai 11,650 miliar atau naik sebesar 336,02 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun sektor industri pengolahan mengalami peningkatan sebesar 7,135 miliar pada tahun 2021 atau naik sebesar 547,66 miliar dibandingkan pada tahun 2020. Meskipun sempat mengalami penurunan 6,77 miliar pada tahun 2019 menjadi 6,58 miliar pada tahun 2020. Kendati demikian penurunan tersebut belum menunjukkan kinerja aktual dari kelompok sektor bersangkutan, karena pada PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung inflasi.

Tabel 2. 34 Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan Dalam Perekonomian Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021 (dalam miliar)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.262,15	7.220,05	7.262,20	7.250,66	7.278,51
2	Pertambangan dan Pengalihan	849,02	915,77	926,92	864,28	879,28
3	Industri Pengolahan	4.099,40	4.490,96	4.801,33	4.650,16	4.923,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,07	11,42	12,06	11,84	12,16
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,18	12,80	13,35	13,91	15,13
6	Konstruksi	1.424,12	1.533,41	1.643,43	1.544,76	1.591,28
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.988,66	3.212,95	3.430,40	3.161,71	3.328,27

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
8	Transportasi dan Pergudangan	394,15	427,34	466,44	439,31	474,77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	263,33	289,38	314,20	281,35	291,32
10	Informasi dan Komunikasi	823,63	888,15	967,48	1.040,80	1.107,25
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	344,42	363,22	378,60	378,81	382,29
12	Real Estate	343,96	372,65	407,46	414,01	427,79
13	Jasa Perusahaan	67,57	72,43	77,00	71,79	73,06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	636,59	679,05	698,06	682,93	684,24
15	Jasa Pendidikan	529,51	553,99	590,62	607,50	610,74
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	149,03	160,58	173,27	189,16	198,81
17	Jasa lainnya	344,13	365,63	393,56	330,82	345,41
Produk Domestik Regional Bruto		20.542,93	21.569,78	22.563,39	21.933,79	22.623,40

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Berdasarkan harga konstan tahun dasar 2010, kinerja sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, jasa pendidikan, informasi dan komunikasi, real estate serta jasa keuangan dan asuransi selama tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan, sedangkan sektor lainnya mengalami penurunan. Kinerja kelompok sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial mampu tumbuh sebesar 9,65 miliar pada tahun 2021. Sedangkan sektor informasi dan komunikasi meningkat sebesar 66.45 miliar pada tahun 2021. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dari tahun 2020 sebesar 7.25 triliun dan mengalami kenaikan menjadi 7.278 triliun

Pada sisi penawaran, Kabupaten Lumajang didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan. Sektor pertanian mampu mencatatkan kontribusi sebesar 37,85% pada tahun 2017, namun peranan secara konsisten mengalami penurunan menjadi sebesar 35,66% pada tahun 2018, 34,36% pada tahun 2019, pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi sebesar 35,29% dan mengalami penurunan kembali di tahun

2021 menjadi sebesar 34,59%. Sektor industri pengolahan pada tahun 2017 mencapai sebesar 19,43% mengalami sedikit peningkatan menjadi sebesar 20,31% pada tahun 2018, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 21,19%. Sektor perdagangan pada tahun pada tahun 2017 mencatatkan kontribusi sebesar 13,19% persen, meskipun fluktuatif namun menunjukkan tren peningkatan sehingga kontribusinya menjadi 14,02% pada tahun 2019, walaupun mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi 13,37% dan meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 13,78%. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan memiliki peningkatan yang hampir sama dengan sektor industri pengolahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transformasi ekonomi di Kabupaten Lumajang telah terjadi dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Hal yang menarik transformasi ekonomi yang terjadi tidak linear dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan akan tetapi tersebar ke sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Tabel 2. 35 Distribusi PDRB Kabupaten Lumajang Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	37,85	35,66	34,36	35,29	34,59
2	Pertambangan dan Penggalian	4,13	4,35	4,25	4,1	4,08
3	Industri Pengolahan	19,43	20,31	20,76	20,55	21,19
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
6	Konstruksi	7,77	7,88	8,01	7,69	7,55
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,19	13,74	14,02	13,37	13,78
8	Transportasi dan pergudangan	1,78	1,84	1,93	1,86	1,9
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,24	1,29	1,33	1,22	1,26
10	Informasi dan Komunikasi	3,07	3,09	3,21	3,52	3,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,72	1,74	1,72	1,75	1,72
12	Real Estate	1,57	1,65	1,74	1,81	1,8
13	Jasa Perusahaan	0,32	0,33	0,34	0,33	0,32

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,98	3,14	3,24	3,39	3,23
15	Jasa Pendidikan	2,55	2,51	2,55	2,7	2,56
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,71	0,72	0,74	0,83	0,85
17	Jasa Lainnya	1,59	1,66	1,7	1,47	1,51

Terkait dengan transformasi struktural, pertumbuhan PDRB pada setiap sektor dapat menjelaskan fenomena tersebut. Selama periode 2017-2021, pertumbuhan PDRB sektor pertanian memang selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang secara keseluruhan. Hal ini berbeda dengan capaian pertumbuhan PDRB pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Sektor industri pengolahan misalnya, mencatat pertumbuhan PDRB yang hampir sama dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Lumajang, bahkan lebih tinggi pada tahun 2014-2015. Sektor perdagangan mencatatkan pertumbuhan PDRB yang lebih akseleratif jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Lumajang secara keseluruhan. Dari fakta yang ada, rendahnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian Kabupaten Lumajang menjadi perhatian, sebab selama ini, Kabupaten Lumajang menyandang predikat sebagai Lumbung Pangan. Oleh karenanya, transformasi ekonomi Kabupaten Lumajang tetap didasarkan pada basis sektor pertanian seperti industri pengolahan berbasis pertanian (agroindustri), usaha berbasis pertanian (agribisnis), dan sebagainya. Selain itu diperlukan usaha untuk merealisasikan potensi pengurangan kemiskinan pertanian beririgasi, dengan meningkatkan produktivitas pertanian agar tercapai keberlanjutan pertanian beririgasi dan ketahanan pangan.

C. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Berikut disajikan data Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan:

Tabel 2. 36 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan	10.838,18	10.944,17	11.209,67	11.314,47	11.650,49

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
	Perikanan					
2	Produk Domestik Regional Bruto	28.632,85	30.690,44	32.620,95	32.062,01	33.678,62
3	Persentase	37,85%	35,67%	34,32%	35,29%	34,59%

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Tabel 2. 37 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanandan Perikanan Terhadap PDRB Atas Dasar HargaKonstan 2010 Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.262,15	7.220,05	7.262,20	7.250,66	7.278,51
2	Produk Domestik Regional Bruto	20.542,93	21.569,78	22.563,39	21.933,79	22.623,40
3	Persentase	35,35%	33,48%	32,18%	33,06%	33,18%

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Tampak bahwa kontribusi sektor pertanian kehutanan dan perikanan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami penurunan namun terdapat kenaikan di Tahun 2020 dan 2021. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan, dari berkontribusi 35,35% di tahun 2017 menjadi 33,18 % di tahun 2021.

Penurunan persentase kontribusi PDRB sector pertanian merupakan indikasi keberhasilan hilirisasi pertanian yang ditandai peningkatan persentase sektor hilir yaitu perdagangan dan pemasaran (jasa), namun PDRB sektor pertanian tetap mengalami kenaikan.

D. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu peristiwa meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Menurut Bank Indonesia, secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.

Tabel 2. 38 Laju Inflasi Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Daerah	Satuan	Tahun				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Laju Inflasi Daerah	Lumajang	%	3,89	3,17	1,61	1,11	0,91
		Jawa Timur	%	4,04	2,76	2,12	1,44	0,69
		Nasional	%	3,61	3,13	2,72	1,68	0,57

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Sejalan dengan perkembangan laju inflasi di Provinsi Jawa Timur dan Nasional, perkembangan laju inflasi Kab. Lumajang terus mengalami penurunan, tingkat inflasi Kabupaten Lumajang berada pada level 4%-6%. Pada tahun 2017 inflasi berada pada angka 3,89% dan terus menurun sampai pada tahun 2021 dengan angka 0,91%, (angka ini mengacu dari kabupaten terdekat karena kab. Lumajang tidak ada penilaian IHK). Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk menurunkan laju inflasi daerah melalui TPID dapat dikategorikan berhasil.

E. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah nilai produksi yang dihasilkan oleh setiap penduduk setiap tahun. Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan indikator pendekatan terhadap pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto per kapita Kabupaten Lumajang terus meningkat seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Lumajang baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Adapun PDRB perkapita secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2. 39 PDRB Perkapita Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	PDRB per Kapita	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	ADHB	(juta Rp)	27.794	29.791	31.665	31.122	33.679
2	ADHK	(juta Rp)	19.813	20.744	21.646	20.995	22.623

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Capaian kinerja dari sisi tingkat Pendapatan perkapita penduduk, berdasarkan PDRB ADHB di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 mencapai 27,794 juta rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2019 menjadi 31,665 juta rupiah. Kemudian mengalami penurunan menjadi 31,122 juta rupiah di tahun 2020 dan kembali meningkat pada 2021 menjadi 33.679 Sedangkan, dengan menggunakan PDRB ADHK tingkat

pendapatan perkapita penduduk tahun 2017 sebesar 19,813 juta rupiah dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga menjadi 21,646 pada tahun 2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 20,995 juta rupiah dan meningkat pada 2021 menjadi 22.623. Kenaikan ini terjadi karena pemulihan ekonomi kaena dampak pandemi Covid-19, yang mempengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara social telah berjalan dengan baik.

F. Indeks Gini

Gini ratio adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan. Semakin rendah mendekati nilai 0 (nol) yang berarti pemerataan semakin baik. Hasil analisis Gini ratio disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 40 Gini Ratio Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang

Uraian	Satuan	Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
GINI RASIO	Indeks	Lumajang	0,310	0,320	0,295	0,297	0,309
	Indeks	Jawa Timur	0,400	0,379	0,370	0,366	0,374
	Indeks	Indonesia	0,393	0,389	0,380	0,381	0,381

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Trend gini ratio di kabupaten Lumajang naik pada tahun 2018 dari 0,310 pada tahun 2017 menjadi 0,320 pada tahun 2018, sedangkan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 Gini Ratio turun menjadi 0,297 akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 Gini Ratio naik dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 0,309. Secara propinsi dan nasional, nilai gini ratio di Kabupaten Lumajang lebih rendah dari gini ratio di Provinsi Jawa Timur dan Indonesia.

G. Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan yang digunakan sebagai indikator makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Berikut akan disajikan data kemiskinan Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021 :

Tabel 2. 41 Data Jumlah PendudukMiskinTahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang

URAIAN	Satuan	Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
--------	--------	--------	------	------	------	------	------

Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	Lumajang	112,65	103,69	98,88	102,60	105,25
------------------------	-----------	----------	--------	--------	-------	--------	--------

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lumajang dari tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami penurunan yaitu 112, 65 ribu Jiwa pada tahun 2017, turun menjadi 103,69 ribu jiwa pada tahun 2018 dan kembali turun pada tahun 2019 sebesar 98,88 ribu jiwa. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah penduduk miskin di kabupaten lumajang mengalami peningkatan yaitu sebesar 102,6 ribu jiwa pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 105,25 ribu jiwa, Kenaikan jumlah penduduk miskin juga salah satunya merupakan dampak dari pandemi Covid 19. Selanjutnya Hasil analisis Angka Kemiskinan, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 42 Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang

URAIAN	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Penduduk Miskin	Lumajang	%	10,87	9,98	9,49	9,83	10,05
	Jawa Timur	%	11,77	10,98	10,37	11,09	11,40
	Indonesia	%	10,12	9,66	9,22	9,78	10,14

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang 2020

Tren Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lumajang dalam 5 tahun terakhir cenderung turun naik, pada tahun 2017, angka masih pada posisi 2 (dua) digit yaitu 10,87%, Sedangkan persentase penduduk miskin paling rendah pada tahun 2019 sebesar 9,49%, tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan 0,34% menjadi 9,83% dan naik kembali dalam 2 digit pada tahun 2021 sebesar 10,05%.

Tren Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lumajang masih di bawah Propinsi Jawa Timur, hal ini terlihat pada tabel mulai tahun 2017 s.d 2021, di Kabupaten Lumajang persentase penduduk miskin masih konsisten di bawah Propinsi Jawa Timur, akan tetapi masih lebih tinggi daripada rata-rata di Indonesia mulai tahun 2017 s.d 2020, sedangkan tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Lumajang lebih rendah secara nasional, dimana di Lumajang sebesar 10,05% sedangkan nasional masih sebesar 10,14%. Persentase penduduk miskin di Indonesia paling rendah adalah pada tahun 2019 yaitu sebesar 9,22%.

H. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada hakikatnya terkait erat dengan ukuran kesejahteraan masyarakat. IPM yang tinggi mencerminkan perbaikan kehidupan masyarakat, baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun daya beli. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

- a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) yang diwakili dengan usia harapan hidup dalam perhitungannya;
- b. Pengetahuan (*knowledge*) yang diwakili dengan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah dalam perhitungannya; dan
- c. Standar hidup layak (*decent standard of living*) yang diwakili dengan Pengeluaran Perkapita dalam perhitungannya.

Hasil analisis Indeks Pembangunan Manusia, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 43 Angka IPM Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

URAIAN	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Manusia	Lumajang	Indeks	64,23	64,83	65,33	65,46	66,07
	Jawa Timur	Indeks	70,27	70,77	71,50	71,71	72,14
	Indonesia	Indeks	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019-2021

Berdasarkan tabel diatas, IPM Kabupaten Lumajang tahun 2017 s.d 2021 naik dari 64,23 pada Tahun 2017 menjadi 66,07 pada Tahun 2021. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2021 dengan laju 0,61 dan terendah pada Tahun 2020 sebesar 0,13.

Dari hasil penghitungan angka IPM se-Provinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten Lumajang termasuk dalam kabupaten/Kabupaten yang mempunyai IPM kategori rendah di tingkat Jawa Timur. Pada tahun 2016 pada posisi 35 sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan 2021 peringkat IPM Kabupaten Lumajang masih tetap menempati posisi ke 36 dari 38 kabupaten/Kabupaten yang ada di Jawa Timur. IPM di Kabupaten Lumajang juga masih terpaut jauh dengan rata-rata IPM di Indonesia pada tahun 2021 yang mencapai 72,29.

I. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Kesejahteraan sosial dapat dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup tempat seluruh penduduk bermukim. Kondisi lingkungan hidup daerah di Indonesia diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH berguna untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, IKLH juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH antara lain Kualitas Pencemaran Air, Kualitas Pencemaran Udara, dan Tutupan Lahan.

Tabel 2. 44 IKLH Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks kualitas air	Indeks	54,06	54,17	54,22	54,34	53,54
2	Indeks kualitas Udara	Indeks	83,87	84,14	86,44	84,37	84,74
3	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	88,14	88,21	88,38	92,40	47,95
4	IKLH	Indeks	76,64	76,78	77,55	78,57	64,95

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun, 2021

Indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lumajang tahun 2021 sebesar 64,95, capaian ini turun dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 78,57, penurunan ini disebabkan karena perubahan metode perhitungan IKLH dan penyesuaian target berdasarkan surat Edaran Direktorat Jendral Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tanggal 4 desember 2020 Nomer: S.318/PPKL/SCT/REN.O/12/2020 perihal metode perhitungan IKLH 2021-2024 dan hasil rapat penyesuaian target IKLH provinsi Jawa Timur 2021.

J. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dimana pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan

terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Lumajang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024 bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan. Berikut disajikan capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lumajang

Tabel 2. 45 Capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A	N/A	55,96	56,66	58,94

Sumber : Inspektorat Daerah, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 mengalami kenaikan secara bertahap. Pada tahun 2019 capaian Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 55,95 kemudian mengalami peningkatan di Tahun 2020 sebesar 56,66 serta meningkat kembali di Tahun 2021 dengan capaian sebesar 58,94 yang masih dalam kategori “CC”

K. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten

Berikut akan disajikan capaian indikator Kinerja Lalu Lintas Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 -2021 :

Tabel 2. 46 Capaian Kinerja Lalu Lintas Daerah di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kinerja Lalu Lintas Daerah	Nilai	0,37	0,38	0,40	0,40	0,39

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Lumajang, 2020

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator Kinerja Lalu Lintas daerah pada tahun 2017 sebesar 0,37. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terdapat tren kenaikan dari 0,38 sampai pada angka 0,40. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,39, penurunan ini merupakan progres kinerja yang baik, semakin kecil maka kinerja lalu lintas daerah semakin baik.

L. Indeks Risiko Bencana

Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Dalam hal ini Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-undang di atas pada pasal 9 bahwa Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai kewenangan diantaranya meliputi penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana.

Berikut Capaian Indeks Resiko Bencana di kabupaten Lumajang yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 47 Capaian Indeks Resiko Bencana Tahun 2016-2020 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks resiko bencana	Indeks	148	161,7	174,9	122,62	118,74

Sumber : BPBD Kabupaten Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Indeks resiko bencana tahun 2018 sebesar 161,7 dan naik pada 2019 menjadi 174,9, tetapi pada tahun 2020 turun menjadi 122,62, dan kembali turun pada tahun 2021 dengan capaian 118,74.

M. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator TPT secara tidak langsung dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah. Tinggi rendahnya angka

ini memiliki kepekaan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat maupun keamanan dan stabilitas regional. Hasil analisis Tingkat Pengangguran Terbuka, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 48 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang

Uraian	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka	Lumajang	%	2.91	2.55	2.81	3.36	3,51
	Jawa Timur	%	4.00	3.99	3.92	5.84	5,74
	Indonesia	%	5.5	5.30	5.30	7.07	6,49

Sumber : www.bps.go.id

Trend Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung *fluktuatif*, pada tahun 2017 sampai dengan 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan dari 2,91 pada 2017 menjadi 2,55 pada tahun 2018 tetapi terjadi kenaikan pada tahun 2019 - 2021 sebesar 3,51 pada tahun 2021 karena dampak dari adanya Pandemi Covid-19.

Trend Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Lumajang masih dibawah Propinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 2021 jawa Timur mencapai 5,74 dan Indonesia sebesar 6,49 pada tahun 2021.

N. Indeks Profesionalitas ASN

Salah satu pilar reformasi birokrasi adalah ASN (Aparatur Sipil Negara), maka untuk mengukur sampai sejauhmana reformasi birokrasi di Kabupaten Lumajang telah berjalan, salah satunya adalah mengukur indeks profesionalitas ASN.

Tata cara pengukuran indeks profesionalitas ASN ini telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, dimana disebutkan dalam pasal 1 angka 12 bahwa pengukuran indeks profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Hasil analisa indeks profesionalitas ASN dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 49 Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	N/A	N/A	64,66	66,13	76,49

Sumber : Data BKD Kab. Lumajang 2021

Berdasarkan Data tabel diatas, dapat diketahui bahwa Indeks Profesionalitas ASN tahun 2019 sebesar 64,66% dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 66,13%. Tahun 2021 capaian ini meningkat menjadi 76,49%. Pada tahun 2018 belum dilakukan pengukuran kinerja atas indikator indeks profesionalitas ASN dikarenakan pedoman teknis atas pengukuran tersebut belum diterbitkan, sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran.

O. Indeks Kepuasan Masyarakat

Perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada Permenpan dan RB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun OPD pengampu terkait kepuasan masyarakat ada 26 OPD yang terdiri dari Sekretariat Daerah (10 Bagian), Sekretariat DPRD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan 21 Kecamatan. Hasil analisis indeks kepuasan masyarakat, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 50 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

Uraian	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kepuasan Masyarakat	Lumajang	Indeks	77,65	80	81,33	81,50	84,11

Sumber: LKjIP Kabupaten Lumajang, 2017-2021

Trend indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung naik, pada tahun 2017 nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 77,65 dan meningkat sampai tahun 2021 menjadi senilai 84,11. Pertumbuhan kenaikan IPM paling tinggi adalah pada tahun 2020 ke tahun 2021 dimana kenaikannya sebesar 2,61 yang berasal dari capaian 81,50 pada tahun 2020 menjadi 84,11 pada tahun 2021.

P. Indeks SPBE

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan,

dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini selanjutnya disingkat SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dengan melakukan serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.

Adapun Predikat Indeks SPBE berupa predikat Kurang, Cukup, Baik, Sangat Baik dan Memuaskan. Berikut capaian Predikat Indeks SPBE Kab. Lumajang dari Tahun 2017-2021:

Tabel 2. 51 Predikat Indeks SPBE Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Predikat Indeks SPBE	indeks	N/A	1,99 (Cukup)	2,60 (Baik)	3,20 (Baik)	3,20 (Baik)

Sumber : Diskominfo Kab Lumajang, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 belum dapat ditampilkan capaian kinerja karena pedoman teknis atas pengukuran indikator tersebut belum diterbitkan sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran. Pada tahun 2019 Capaian Predikat Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan dari tahun 2018 dengan capaian 1,99 menjadi 2,60 di tahun 2019 dan 3,20 di tahun 2020. Indeks SPBE Kabupaten Lumajang di tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi SPBE dari Kementerian PanRB diketahui mengalami penurunan dibandingkan indeks SPBE tahun 2020, dikarenakan adanya perubahan pedoman, dimana Evaluasi SPBE Tahun 2020 berpedoman pada PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE, sedangkan Evaluasi SPBE Tahun 2021 berpedoman pada PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Perubahan pedoman tersebut didasari adanya beberapa amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 yang belum terakomodasi dalam pedoman sebelumnya, yang berpengaruh pada perubahan indikator dan pengukuran tingkat maturitas implementasi SPBE

Q. Efektifitas Pengelolaan Risiko

Tabel 2. 52 Capaian Efektifitas Pengelolaan Risiko Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021

1	Efektifitas Pengelolaan Risiko	Angka	N/A	N/A	N/A	2,5	2,5
---	--------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : Inspektorat Daerah Kab Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator Efektifitas Pengelolaan Risiko dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 belum ada data capaian yang disajikan karena indikator ini merupakan indikator baru yang belum dilakukan pengelolaan kinerja sebelumnya. Namun pada Tahun 2020 capaian kinerja Efektifitas Pengelolaan Risiko dapat diketahui yakni sebesar 2,5 dan pada tahun 2021 tetap pada angka sebesar 2,5.

R. Opini BPK

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah antara lain Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar Dan Pernyataan Menolak Memberikan Opini. Berikut capaian Opini BPK Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021 :

Tabel 2. 53 Capaian Opini BPK Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Opini BPK	Opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKD Kab Lumajang, 2021

Pada tabel di atas dapat diketahui capaian indikator Opini BPK dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada Tahun 2017 dapat

diketahui bahwa hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Lumajang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun di tahun 2017 Kabupaten Lumajang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Selanjutnya pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 terdapat peningkatan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Lumajang menjadi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

S. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD diperoleh daerah dengan cara memungut pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. 54 Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap pendapatan Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan Daerah	1.956,13	2.077,39	2.186,59	2.282,43	2.161,88
2	PAD	324,25	270,14	295,36	320,54	325,05
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	16,58%	13,00%	13,51%	14,04%	15,03%

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel diatas, pendapatan daerah Kabupaten Lumajang meningkat dari tahun 2017 sampai dengan 2020, akan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan. Sedangkan PAD yang di hasilkan dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif / naik turun. Ada penurunan perbandingan pendapatan Daerah dengan PAD tahun 2018 di bandingkan dengan tahun 2017, namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2021.

T. Rasio Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD

Tabel 2. 55 Rasio Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Target PAD Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD	%	35,75	41.28	44,69	29,70	37,37

Sumber : BPRD Kab Lumajang, 2021

Pada indikator Rasio Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD dari Tahun 2017 sebesar 35,75 % sampai dengan Tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan hingga 44,69%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan terdapat capaian kinerja sebesar 29,70%, penurunan ini terjadi karena akibat adanya pandemi covid 19. Namun data terbaru pada tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan yaitu sebesar 37,37 %. Hal ini membuktikan bahwa pada tahun 2021 berangsur mengalami pemulihan.

U. Indeks Kualitas Perencanaan

Dalam konteks penyelenggaraan pembangunan daerah, tahap perencanaan merupakan bagian ujung tombak yang sangat menentukan ke mana arah pembangunan akan diarahkan, dalam hal ini kualitas dokumen perencanaan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu pembangunan yang direncanakan.

Tabel 2. 56 Capaian Indeks Kualitas Perencanaan Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : BAPPEDA Kab Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator Indeks Kualitas Perencanaan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 belum ada data capaian yang disajikan karena indikator ini

merupakan indikator baru yang belum dilakukan pengelolaan kinerja sebelumnya.

V. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Dalam hal ini, Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Tabel 2. 57 Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	N/A	60,89	N/A	66,61	N/A

Sumber : BPKD Kab Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dari Tahun 2017 belum dinilai, tahun 2018 indeks nya sebesar 60,89 dan 2020 sebesar 66,61 sedangkan 2019 belum bisa dinilai. Penilaian IPKD dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur melalui Keputusan Gubernur.

W. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hasil analisa nilai sakip dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 58 Nilai SAKIP Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai	Lumajang	Nilai	CC	B	B	B	N/A

	Sakip	Jawa Timur	Nilai	A	A	A	A	N/A
--	-------	------------	-------	---	---	---	---	-----

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lumajang, 2021

Pada tahun 2017 nilai sakip Kabupaten Lumajang mendapatkan nilai CC dan meningkat pada tahun 2018 sampai 2020 menjadi B, akan tetapi nilai ini masih jauh dari Provinsi Jawa Timur dimana mulai 2017 sampai 2020 berpredikat A. Pada tahun 2021 nilai SAKIP belum diketahui hasilnya, mengingat Kementerian PAN&RB selaku evaluator belum melaksanakan evaluasi atas capaian SAKIP Tahun 2021, karena jadwal pelaksanaan evaluasi berada pada timeline tribulan ke 2, untuk kemudian menerbitkan hasil evaluasi implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021, sehingga tidak dapat diketahui apakah nilai SAKIP di Tahun 2021 mengalami peningkatan atau penurunan. Namun demikian menilik perjalanan hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Lumajang dalam rentang waktu 3 Tahun terakhir, yakni Tahun 2019 sampai dengan 2020 selalu mengalami peningkatan nilai, walaupun belum mengalami peningkatan kategori.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Hasil analisis indeks Pendidikan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 59 Indeks Pendidikan Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pendidikan	Lumajang	Indeks	0,53	0,53	0,54	0,54	0,55
		Jawa Timur	Indeks	0,61	0,61	0,62	0,63	0,63
		Indonesia	Indeks	0,63	0,63	0,64	0,64	0,64

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2021 (data diolah)

Tren indeks pendidikan di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung naik, pada tahun 2017 nilai indeks pendidikan sebesar 0,53 dan meningkat sampai tahun 2021 menjadi sebesar 0,55.

Tren indeks pendidikan di Kabupaten Lumajang masih dibawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 2021 Provinsi Jawa Timur mencapai 0,63 dan Indonesia sebesar 0,64 pada tahun 2021.

B. Angka Harapan Lama Sekolah

Menurut BPS, Angka Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. Hasil analisis angka harapan lama sekolah, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 60 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Lumajang	Angka	11,78	11,79	11,80	11,81	11,88
		Jawa Timur	Angka	13,09	13,10	13,16	13,19	13,36
		Indonesia	Angka	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Angka HLS Pada Kabupaten Lumajang tahun 2021 berada pada angka 11,88 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bersekolah selama 11,88 tahun atau setara dengan SMA.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Lumajang selama 5 (lima) tahun terakhir 2017-2021 cenderung terus mengalami peningkatan meskipun tidak secara signifikan serta masih lebih rendah dari pada AHLS Provinsi Jawa Timur dan Indonesia.

C. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan diperoleh dari hasil perhitungan Usia Harapan Hidup (UHH), dimana UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Hasil analisis Indeks Kesehatan, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 61 Indeks Kesehatan Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kesehatan	Lumajang	Indeks	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77
		Jawa Timur	Indeks	0,78	0,78	0,79	0,79	0,79
		Indonesia	Indeks	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, 2020

Tren indeks kesehatan di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung naik, pada tahun 2017 nilai indeks kesehatan sebesar 0,76 dan meningkat sampai tahun 2021 menjadi sebesar 0,77.

Secara umum tren Indeks kesehatan di Kabupaten Lumajang masih dibawah Propinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 2021 Provinsi Jawa Timur mencapai 0,79 dan Indonesia sebesar 0,79 pada tahun 2021. Artinya terdapat kesenjangan Indeks Kesehatan Lumajang dengan Jawa Timur Sebesar 0,02 dan dengan Indonesia sebesar 0,02.

D. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPG dengan memperhatikan ketimpangan gender. Hasil analisis Indeks Pembangunan Gender dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 62 Capaian IndeksPembangunan Gender Tahun 2017-2021

No	Uraian	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Gender	Lumajang	%	87,72	87,88	88,04	88,09	88,39
		Jawa Timur		90,76	90,77	90,91	91,07	91,67
		Indonesia		90,96	90,99	91,07	91,06	91,27

Sumber : Disdalduk, KB dan PP Kabupaten Lumajang tahun 2020 dan BPS 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya pencapaian IPG Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami kenaikan. Akan tetapi Kabupaten Lumajang masih dibawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, dimana pada tahun 2021 IPG di

Provinsi Jawa Timur sebesar 91,67 dan Indonesia sebesar 91,27 pada tahun 2021.

E. Angka Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik. Adapun hasil analisis angka laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 63 Angka Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017-2021

No	Uraian	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Lumajang	%	0,43	0,29	0,25	0,25	0,25
		Jawa Timur	%	0,56	0,65	0,64	0,79	0,70
		Indonesia	%	1,23	1,19	1,15	1,25	0,98

Sumber : BPS 2020 dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Lumajang

Berdasarkan tabel diatas, angka laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2017 sebesar 0,43 pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 turun menjadi 0,25. Angka laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lumajang masih dibawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, untuk provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 sebesar 0,70 dan Indonesia sebesar 0.98.

F. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. UHH Kabupaten Lumajang selama periode tahun 2017-2021 terus meningkat setiap tahun. Hasil analisis Usia Harapan Hidup, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 64 Usia Harapan Hidup Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Usia Harapan Hidup	Lumajang	Tahun	69,50	69,70	69,94	70,10	70,21
		Jawa Timur	Tahun	70,80	70,97	71,18	71,30	71,38

(UHH)	Indonesia	Tahun	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57
-------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Usia harapan hidup di Kabupaten Lumajang dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan, yaitu pada tahun Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, usia harapan hidup mengalami kenaikan dari 69,50 pada Tahun 2017 menjadi 70,21 di Tahun 2021.

Tren usia harapan hidup di Kabupaten Lumajang masih dibawah Propinsi Jawa Timur, hal ini terlihat pada tabel mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, di Kabupaten Lumajang usia harapan hidup masih dibawah Propinsi Jawa Timur dan Indonesia. Hal ini terlihat dari usia harapan hidup di Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 belum mampu melampaui capaian usia harapan hidup di Jawa Timur secara keseluruhan yaitu 71,38 dan Indonesia yang berada pada angka 71,57.

G. Stunting

Persentase Balita Stunting (Balita Gizi Buruk) adalah Jumlah anak balita pendek selama 1 tahun dibagi dengan Jumlah anak balita pada waktu yang sama. Balita pendek (*stunting*) dapat diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada di bawah normal. Balita pendek adalah balita dengan status gizi yang berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut umurnya bila dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) tahun 2005, nilai z-scorenya kurang dari -2SD dan dikategorikan sangat pendek jika nilai z-scorenya kurang dari -3SD.

Dalam upaya perbaikan Stunting harus meliputi upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung (intervensi gizi spesifik) dan upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung (intervensi gizi sensitif). Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan di sektor kesehatan, namun hanya berkontribusi 30%, sedangkan 70% nya merupakan kontribusi intervensi gizi sensitif yang melibatkan berbagai sektor seperti ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Sehingga memerlukan peran semua sektor dalam mengisi kontribusi demi prevalensi balita stunting yang semakin rendah semakin baik.

Tabel 2. 65 Prevalensi StuntingKabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Prevalensi Stunting	%	8,52	6,74	8,41	10,63	6,6

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Tren Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Lumajang dalam lima tahun terakhir ini mengalami kenaikan dan penurunan, Pada tahun 2017 Persentase Balita Stunting sebesar 8,52 dan mengalami penurunan tahun 2018 sebesar 6,74, akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 8,41 dan naik kembali menjadi 10,63 pada tahun 2020. Tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 6,6.

H. Persentase balita gizi kurang

Gizi kurang merupakan keadaan kurang gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Balita dikategorikan mengalami gizi kurang apabila berat badannya berada pada rentang Zscore ≥ -2.0 s/d Zscore ≤ -3.0 . Anak dengan status gizi kurang ditandai dengan tidak adanya kenaikan berat badan setiap bulannya atau mengalami penurunan berat badan sebanyak dua kali selama enam bulan

Tabel 2. 66 Presentase balita Gizi Kurang Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase balita gizi kurang	%	7,22	6,78	8,25	9,63	7,3

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tren Persentase balita gizi kurang di Kabupaten Lumajang dalam lima tahun terakhir ini mengalami kenaikan dan penurunan, Pada tahun 2017 Persentase balita gizi kurang sebesar 7,22 dan mengalami penurunan tahun 2018 sebesar 6,78, akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 8,25 dan naik kembali menjadi 9,63 pada tahun 2020. Tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 7,3.

I. Persentase balita gizi buruk

Gizi buruk merupakan suatu kondisi kekurangan gizi pada tingkatan yang sudah berat, dimana status gizinya berada jauh di bawah standar. Gizi buruk akan terjadi manakala kebutuhan tubuh akan kalori, protein, atau bahkan keduanya tidak tercukupi. Menurut WHO salah satu masalah gizi buruk terjadi akibat

konsumsi makanan yang tidak cukup mengandung energi dan protein serta karena adanya gangguan kesehatan. Anak disebut gizi buruk apabila berat badannya kurang dari berat badan normal. Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score <-3 dan atau dengan tanda-tanda klinis

Tabel 2. 67 Presentase balita Gizi Buruk Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase balita gizi kurang	%	0,6	0,56	0,77	1,25	1,20

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tren Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Lumajang dalam lima tahun terakhir ini mengalami kenaikan dan penurunan, Pada tahun 2017 Persentase balita gizi kurang sebesar 0,6 dan mengalami penurunan tahun 2018 sebesar 0,56, akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 0,77 akan tetapi tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 1,25, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,20.

J. Cakupan Desa Siaga Aktif

Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Suatu desa dikatakan sebagai desa siaga aktif jika desa tersebut minimal memiliki poskesdes yang buka setiap hari. Jumlah desa siaga yang terbentuk di Kabupaten Lumajang sebanyak 205 buah dari 205 desa/kelurahan yang ada.

Tabel 2. 68 Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase balita gizi kurang	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Lumajang dalam lima tahun terakhir mulai

tahun 2017 sampai dengan 2021 secara konsisten 100% dari 205 desa dan kelurahan.

K. Persentase PPKS Mandiri

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial dijelaskan bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Hasil analisis Persentase PPKS mandiri disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 69 Capaian Persentase Capaian Indikator PPKS Mandiri di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase PPKS mandiri	%	8,17	10,82	11,89	13,08	14,40

Sumber : Dinsos Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas bahwa persentase PPKS mandiri di Kabupaten Lumajang memiliki tren peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2021, dimana pada tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 2,65% menjadi 10,82%. Selanjutnya di tahun 2019, 2020 dan 2021 juga mengalami peningkatan realisasi namun belum melebihi kenaikan di tahun 2018, yaitu menjadi 11,89%, 13,08%. dan 14,40%.

L. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Hasil analisis Capaian Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 - 2021, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 70 Capaian Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Peningkatan Status Desa	%	N/A	N/A	N/A	N/A	8,26

	mandiri						
--	---------	--	--	--	--	--	--

Sumber : DPMD Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator Persentase Peningkatan Status Desa mandiri dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 belum ada data capaian yang disajikan karena indikator ini merupakan indikator baru yang belum dilakukan pengelolaan kinerja. Tahun 2021 capaian atas indikator ini adalah sebesar 8,26%

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Pencapaian pembangunan seni, budaya, dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 71 Capaian Kebudayaan Kabupaten Lumajang tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	35	29	7	N/A	N/A
2	Persentase Benda, Situs, Monumen dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mendorong pelestarian budaya daerah yang hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai luhur budaya daerah yang antara lain tercermin dalam berbagai Penyelenggaraan festival seni dan budaya dan pelestarian Benda, Situs, Monumen dan Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten Lumajang. sebagaimana tabel di atas, upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah akan terus ditingkatkan utamanya dalam rangka mengangkat potensi sumber daya manusianya sebagai pelaku seni serta adanya fasilitas yang dapat digunakan dalam rangka berinteraksi dan berkreasi di bidang seni budaya daerah.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam pelayanan umum berdasarkan kewenangannya, dibagi menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

Dikatakan urusan pemerintahan wajib karena urusan pemerintahan tersebut wajib diselenggarakan oleh semua daerah, tanpa terkecuali. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Aspek pelayanan umum ini sudah dibantu teknologi informasi yang digunakan sebagai urusan, namun belum terintegrasi secara sistem. Merujuk pada pembagian tersebut, bagian ini akan membahas mengenai Layanan Urusan Pemerintahan Wajib dan Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

A. Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Dalam konstitusi Indonesia, pendidikan merupakan aspek wajib yang harus didapat setiap warga negara Indonesia. 9 tahun adalah minimal pendidikan yang ditempuh setiap warga negara melalui program wajib belajar 9 tahun. Bahkan 20% APBN dialokasikan untuk pendidikan menunjukkan sangat pentingnya pendidikan bagi seseorang. Penambahan jumlah guru, perbaikan infrastruktur, hingga pengadaan buku dan alat bantu pendidikan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia.

a. Angka Partisipasi Kasar

Partisipasi Kasar digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan. Hasil analisis Angka Partisipasi Kasar, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 72 Angka Partisipasi Kasar Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Daerah	Tingkatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Partisipasi	Lumajang	SD/MI	110,04	110,04	109,99	108,53	107,49
			SMP/MTS	95,63	95,63	87,03	94,11	96,62

Kasar	Jawa Timur	SD/MI	106,79	106,69	105,56	104,35	104,52
		SMP/MTS	92,22	94,93	94,24	96,40	97,17
	Indonesia	SD/MI	108,50	108,61	107,32	106,32	106,20
		SMP/MTS	90,23	91,52	90,57	92,06	92,80

Sumber : BPS, 2021

Tren Angka Partisipasi Kasar SD/MI di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung turun, pada tahun 2017 nilai Angka Partisipasi Kasar SD/MI sebesar 110,04 dan menurun sampai tahun 2021 menjadi sebesar 107,49, sedangkan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung turun, pada tahun 2017 nilai Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS sebesar 95,63 dan menurun sampai tahun 2019 menjadi sebesar 87,03, tetapi naik pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 92,80 dan 96,62.

Tren Angka Partisipasi Kasar SD/MI di Kabupaten Lumajang masih di atas Propinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 2021 Provinsi Jawa Timur mencapai 104,52 dan Indonesia sebesar 106,32 pada tahun 2020, sedangkan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS di Kabupaten Lumajang masih di bawah Propinsi Jawa Timur, hal ini terlihat pada tahun 2021 Provinsi Jawa Timur mencapai 97,17 akan tetapi masih di atas Indonesia yang sebesar 92,06 pada tahun 2020.

b. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) artinya persentase dari anak kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Nilai APM yang lebih besar dari 100% disebabkan karena adanya siswa usia sekolah dari luar daerah, dan adanya siswa yang mengulang atau tidak naik kelas. Hasil analisis Angka Partisipasi Murni, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 73 Angka Partisipasi Murni Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Daerah	Tingkatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Partisipasi Murni	Lumajang	SD/MI	95,90	96,53	97,06	96,85	96,24
			SMP/MTS	75,95	76,90	76,59	79,03	79,03
		Jawa	SD/MI	99,74	99,78	99,99	100,26	97,90

No	Uraian	Daerah	Tingkatan	2017	2018	2019	2020	2021
		Timur	SMP/MTS	104,34	100,80	98,75	99,72	83,80
		Indonesia	SD/MI	99,69	99,57	100,02	99,98	97,80
			SMP/MTS	102,35	102,58	101,76	100,41	80,59

Sumber : BPS, 2021

Tren Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2017 - 2021 cenderung fluktuatif, tahun 2017 Angka Partisipasi Murni SD/MI sebesar 95,90 dan pada tahun 2018 menjadi 96,53 dan naik kembali sampai dengan 2019 sebesar 97,06, tetapi turun pada tahun 2020 menjadi sebesar 96,85, serta turun kembali pada tahun 2021 sebesar 96,24, sedangkan pada tingkatan SMP/MTs di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 nilai Angka Partisipasi Murni sebesar pada tahun 2017 sebesar 75,95 dan naik pada 2018 sebesar 76,90 tetapi menurun kembali pada tahun 2019 sebesar 76,59 kemudian naik lagi pada tahun 2020 menjadi 79,03, sedangkan di tahun 2021 tetap sebesar 79,03.

Tren Angka Partisipasi Murni SD/MI di Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 2021 Provinsi Jawa Timur mencapai 97,90 dan Indonesia sebesar 97,80 pada tahun 2021, sedangkan Angka Partisipasi Murni SMP/MTs di Kabupaten Lumajang masih di bawah Provinsi Jawa Timur, hal ini terlihat pada tahun 2021 Provinsi Jawa Timur mencapai 83,80 dan Indonesia yang sebesar 80,59 pada tahun 2021.

c. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Kesejahteraan di bidang pendidikan secara sederhana dapat dijelaskan melalui capaian angka rata-rata lama sekolah. Definisi dari angka rata-rata lama sekolah mencerminkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Pengukuran angka rata-rata lama sekolah membutuhkan komponen partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, serta tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.

Tabel 2. 74 Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2017-2020 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
----	--------	--------	--------	------	------	------	------	------

1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Lumajang	Angka	6,20	6,21	6,22	6,40	6,67
		Jawa Timur	Angka	7,34	7,39	7,59	7,78	7,88
		Indonesia	Angka	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54

Sumber : BPS, 2021

Selama periode 2017-2021, angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 capaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lumajang sebesar 6,20 dan mengalami peningkatan secara bertahap mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 yaitu sebesar 6,20 pada tahun 2017, Capaian angka pada tahun 2018 sebesar 6,21 dan mengalami peningkatan secara konsisten menjadi sebesar 6,22 pada tahun 2019, dan peningkatan yang cukup besar pada tahun 2020 menjadi 6,40 serta meningkat kembali yang cukup signifikan di 2021 yaitu sebesar 6,67 atau setara pendidikan Sekolah Dasar (SD). Tingginya angka ini menunjukkan bahwa secara umum, jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk di Kabupaten Lumajang semakin tinggi. Namun demikian, peningkatan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lumajang belum mampu melampaui capaian rata-rata lama sekolah di Jawa Timur secara keseluruhan yaitu 7,88 pada tahun 2021 atau setara dengan tahun pertama di Sekolah Menengah Pertama (SMP).

d. Persentase Sekolah yang terakreditasi B

Tabel 2. 75 Capaian Persentase Sekolah Terakreditasi B di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Sekolah yang terakreditasi B	%	75,05	81,30	82,85	83,06	86,42

Sumber : Dinas Pendidikan Kab Lumajang, 2021

Dari rentang waktu antara tahun 2017-2021 persentase sekolah yang terakreditasi B mengalami kenaikan. Dilihat dari Persentase d Tahun 2017 sebesar 75,05%, mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2021 menjadi 86,42%. Hal ini menunjukkan kualitas baik dan diakui oleh Lembaga Akreditasi. Hal ini berarti juga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Lumajang semakin merata dan mempunyai kualitas baik.

2. Kesehatan

Didalam dasar negara kita menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa negara wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Semakin meningkatnya kesehatan masyarakat maka akan semakin pula produktifitas mereka yang berdampak pada perekonomian bangsa.

a. Persentase Keluarga Sehat Kabupaten Lumajang

Tabel 2. 76 Capaian Persentase Keluarga Sehat di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Keluarga Sehat	%	N/A	N/A	8	9	10.8

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Lumajang, 2021

Pada tahun 2019-2021 persentase keluarga sehat di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dari 8 % di tahun 2019 menjadi 9 % di tahun 2020 dan 10,8% di tahun 2021. Walaupun kenaikannya tidak signifikan tapi menunjukkan perbaikan tingkat kesehatan pada taraf keluarga di Kabupaten Lumajang.

b. Angka Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian wanita yang terjadi pada saat kehamilan atau dalam 42 hari setelah kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut, atau penanganannya, akan tetapi bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan. Sedangkan angka kematian ibu yaitu jumlah kematian ibu dalam 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2. 77 Angka Kematian Ibu Sehat di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	66	104	98	97	309

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Lumajang, 2021

Trend angka kematian ibu di Kabupaten Lumajang dalam tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung *fluktuatif*, pada tahun 2017 angka kematian ibu sebesar 66 per 100.000 KH ini adalah angka terendah kematian ibu pada 5 tahun terakhir dan naik pada 2017 sebesar 104, tetapi turun pada tahun 2019 menjadi 98 dan turun kembali pada tahun 2020 menjadi 97. Tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 309 dan ini capaian tertinggi di 5 tahun terakhir, hal ini berarti perlu adanya upaya-upaya dalam rangka menurunkan angka kematian ibu.

c. Angka Kematian Bayi

Kematian Bayi adalah Kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Hasil analisis angka kematian bayi, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 78Angka Kematian Bayi di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	8,9	9,45	10,1	10,05	7,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Lumajang, 2021

Trend angka kematian bayi di Kabupaten Lumajang mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung *fluktuatif*, pada tahun 2017 angka kematian bayi sebesar 8,90, naik pada 2017 sebesar 9,45 dan naik kembali sampai tahun 2020 menjadi 10,1 pada tahun 2019 dan 10,05 pada tahun 2020. Penurunan terendah adalah pada tahun 2021 dimana angka kematian bayi turun menjadi 7,4 per 1.000 KH.

d. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Tekanan Darah Tinggi/ Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah yaitu keadaan dimana tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg. Tekanan darah tinggi merupakan hasil pengukuran tekanan darah terakhir atau hasil pengukuran minimal 1 kali setahun. Pengukuran dilakukan

pada penduduk yang berusia lebih dari atau sama dengan 15 tahun.

Tabel 2. 79 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	13,21	20,28	46,6	29,7	43,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Lumajang, 2021

Trend Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten Lumajang mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung *fluktuatif*, pada tahun 2017 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar 13,21 dan naik pada 2018 sebesar 20,28 dan naik kembali pada tahun 2019 menjadi 46,6 dan tahun 2020 mengalami penurunan signifikan menjadi 29,7, sedangkan pada tahun 2021 dimana Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi naik signifikan kembali menjadi 43,7.

e. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Diabetes Melitus (DM) adalah merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pancreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang di produksi secara efektif. Insulin adalah hormone yang mengatur keseimbangan kadar gula darah, akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah (hiperglikemi)

Tabel 2. 80 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	-	26,47	95,1	96	112,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Lumajang, 2021

Trend Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus di Kabupaten Lumajang mulai tahun 2017 sampai dengan

2021 cenderung naik, pada tahun 2018 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar 26,47% dan naik signifikan pada 2019 sebesar 95,1% dan naik kembali sampai dengan tahun 2021, dimana pada 2020 sebesar 96% dan tahun 2021 sebesar 112,5%.

f. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) sesuai standar merupakan indikator SPM dengan target 100%. Pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat (psikotik akut dan skizofrenia) sebagai upaya pencegahan sekunder, meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi.

Tabel 2. 81 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	-	65,38	91,4	88,2	101,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Lumajang, 2021

Trend Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat di Kabupaten Lumajang mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung *fluktuatif*, pada tahun 2018 Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 65,38% dan naik signifikan pada 2019 sebesar 91,4%, akan tetapi turun pada tahun 2020 sebesar 88,2%, namun naik kembali secara signifikan pada tahun 2021 menjadi 101,1%.

g. Angka Keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus

Angka Keberhasilan pengobatan pasien TB Semua Kasus (Success Rate) adalah jumlah semua kasus TB yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Angka keberhasilan pengobatan menggambarkan kualitas pengobatan TB.

Tabel 2. 82 Angka Keberhasilan pengobatan pasien TB Semua Kasus di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Keberhasilan pengobatan pasien TB Semua Kasus	%	95,20	94,70	84,40	91	90

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Lumajang, 2021

Trend Angka Keberhasilan pengobatan pasien TB Semua Kasus di Kabupaten Lumajang mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung *fluktuatif*, pada tahun 2017 sapaianya sebesar 95,20 dan turun pada 2018 sebesar 26,47%, turun kembali di 2019 menjadi 84,40% sedangkan pda tahun 2020 naik menjadi 91% namun turun kembali di 2021 menjadi 90%.

h. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah sejenis virus yang menyerang/menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV.

Tabel 2. 83 Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	-	13.70	41.7	43,9	97.3

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Lumajang, 2021

Trend Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar di Kabupaten Lumajang mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung naik, pada tahun 2017 sapaianya sebesar 13,70 dan

naik pada 2018 sebesar 41,7%, naik kembali pada tahun 2020 menjadi 43,9%, dan naik kembali secara signifikan pada tahun 2021 menjadi 97,3%.

i. Angka Penemuan Kasus Baru Kusta

Kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi *Mycobacterium leprae* yang menyerang berbagai bagian tubuh diantaranya saraf dan kulit. Bila tidak ditangani, kusta dapat sangat progresif menyebabkan kerusakan pada kulit, saraf-saraf, anggota gerak dan mata. Kusta menular melalui kontak langsung dengan penderita dan melalui pernapasan. Kusta tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan, melainkan juga masalah ekonomi dan sosial bagi penderitanya terutama di negaranegara berkembang seperti Indonesia.

Tabel 2. 84 Angka Penemuan Kasus Baru Kusta di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	%	15,62	16,83	13,05	7,2	10,7

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Lumajang, 2021

Trend Angka Penemuan Kasus Baru Kusta di Kabupaten Lumajang mulai tahun 2017 sampai dengan 2021 cenderung *fluktuatif*, pada tahun 2017 capaiannya sebesar 15,62 dan naik pada 2018 sebesar 16,83%, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 13,05% dan turun kembali menjadi 7,2%. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 10,7.

j. IKM Pelayanan Kesehatan Kabupaten Lumajang

Tabel 2. 85 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat sektor pelayanan kesehatan	Indeks	N/A	81,01	81,84	85,05	85,56

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Lumajang, 2021

Pada tahun 2018-2020 Indeks Kepuasan Masyarakat akan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dari 81,01 di tahun 2018 menjadi 81,84 di tahun 2019, 85,05 di

tahun 2020 dan 85,56 di tahun 2021. Walaupun kenaikannya tidak signifikan tapi menunjukkan perbaikan tingkat kesehatan dan dalam pelayanan serta pelayanan sarana dan prasarana di Kabupaten Lumajang.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemenuhan dan peningkatan fasilitas umum merupakan kewajiban dari pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Perencanaan kebutuhan daerah juga dibuat melalui berbagai mekanisme yang harus dilakukan elemen-elemen terkait guna membuat tatanan kehidupan yang mampu membuat semua pihak sejahtera. Urusan Pekerjaan Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang. Beberapa kegiatan penyelenggaraan yang dikerjakan diantaranya sebagai berikut :

a. Kondisi Perkerasan Jalan

Kondisi jalan raya di Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 terdiri dari 1.047,71 Km jalan jenis aspal, 61,29 Km merupakan jalan tidak aspal. Dilihat dari kondisi jalan, maka sepanjang 595,02 Km dalam keadaan baik, 316,02 Km dalam keadaan sedang dan 138,98 Km dalam keadaan rusak serta 58,98 Km dalam keadaan rusak berat. Total panjang jalan rayanya pada tahun 2021 mencapai 1.109,00 km, sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/89/427.12/2017 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Fungsi Jalan dan Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten.

Tabel 2. 86 Data Keadaan Jalan Di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Jenis Permukaan Jalan	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Aspal/Paved	Km	1.064,15	1.065,10	1.057,00	1.067,32	1.047,71
2	Tidak Aspal/Not Paved	Km	31,25	16,05	17,935	1,51	61,29
3	Lainnya	Km	13,60	27,85	33,865	40,17	N/A
Jumlah		Km	1.051,987	1.109,00	1.109,00	1.109,00	1.109,00

Sumber: Dinas PUTR Kab. Lumajang, 2021

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa kondisi jaringan jalan aspal pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 19,61 Km dibandingkan dengan tahun 2020. Ini disebabkan karena terjadi perubahan terutama dari jalan dengan tipe perkerasan aspal yang kondisinya rusak ringan, menjadi rusak berat dimana jenis perkerasannya berubah menjadi kerikil, umumnya karena tidak mendapatkan penanganan sedangkan jalan tetap terus dimanfaatkan untuk kegiatan lalu lintas. Sedangkan kondisi jaringan jalan aspal pada tahun 2020 meningkat sebesar 2,1 Km dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun 2018 sebesar 7,9 km. Untuk kondisi jalan yang tidak beraspal pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup drastis dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 59,78 Km. Ini disebabkan karena imbas dari refocusing anggaran untuk penanganan covid 19 mengakibatkan penanganan pemeliharaan jalan untuk menambah umur rencana jalan tidak tercapai. Adanya penurunan dana sub kegiatan pemeliharaan rutin jalan di TA 2020 sebesar Rp 10.916.722.900 menjadi Rp 8.096.734.208 di TA 2021. Berikut akan ditampilkan Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap dan Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik di Kabupaten Lumajang pada tabel dibawah.

Tabel 2. 87 Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap dan Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	%	70,27	73,10	71,21	78,70	88,80
2	Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	%	N/A	N/A	91,29	91,06	79,06

Sumber : Dinas PUTR Kab. Lumajang Tahun, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada persentase panjang jalan kondisi mantap sejak tahun 2017 cenderung mengalami peningkatan dari 70,27 % menjadi 73,10%. Namun pada Tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 1,89% menjadi 71,21% ini disebabkan karena penanganan (berkaitan dengan penambahan nilai kemantapan), tidak berimbang dengan penambahan kerusakan (nilai tidak mantab), bisa dikarenakan umur perkerasan telah tercapai dan belum mendapatkan penanganan, atau karena factor dari pengguna jalan seperti adanya kendaraan ODOL (Over load & Over Dimension) yang melintas terutama didaerah yang di lalui oleh angkutan pasir.

Namun kembali naik di tahun 2020 menjadi 78,70% dan meningkat pesat pada tahun 2021 yaitu sebesar 88,80 %. Selanjutnya untuk Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2017 dan tahun 2018 belum dilakukan pengukuran kinerja namun dilakukan pengukuran pada tahun 2019, untuk data di Tahun 2020 sebesar 91,06% mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019 yaitu 91,29%. Data tahun 2021 menunjukkan penurunan yang cukup drastis persentase jumlah jembatan kondisi baik menjadi 79,06 %. Hal ini dikarenakan adanya bencana alam (Erupsi Semeru dan Banjir).

b. Kondisi Jaringan Irigasi

Kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Lumajang relatif mengalami peningkatan kondisinya namun masih perlu pemeliharaan dan pengaturan operasional irigasi yang sejalan dengan program pertanian. Pada Tabel berikut akan dijelaskan kondisi jaringan irigasi dalam kondisi baik, kondisi rusak ringan, dan kondisi rusak berat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 88 Jaringan Irigasi Kondisi Baik di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

Jaringan Irigasi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Bendung	buah	112	112	112	126	124
Bangunan Bagi	buah	50	51	52	52	52
Bangunan Bagi Sadap	buah	21	21	21	21	21
Bangunan Sadap	buah	185	185	185	185	183
Talang	buah	18	18	18	18	18
Sypon	buah	14	14	14	14	14
Saluran Primer	meter	3.379	3.371	3.371	3.371	3.771
Saluran Sekunder	meter	153.085	153.085	153.085	165.082	165.082
Saluran Tersier	meter	30.336	30.336	30.336	38.600	38.600

Sumber: Dinas PUPR Tahun 2021

Berdasarkan data tabel Jaringan Irigasi Kondisi Baik di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2021 cenderung mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini terlihat di Tahun 2021 pada kondisi jaringan irigasi Bendung turun menjadi 124 buah, Bangunan Bagi tetap 52 buah, Bangunan Bagi Sadap tetap sejumlah 21 buah, Bangunan Sadap tetap sejumlah 183 buah,

Talang sejumlah 18 buah, Sypon sejumlah 14 buah, Saluran Primer menjadi 3.771 meter, Saluran Sekunder 165.082 meter, Saluran Tersier 38.600 meter.

Tabel 2. 89 Jaringan Irigasi Kondisi Rusak Ringan di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

Jaringan Irigasi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Bendung	buah	17	16	15	13	13
Bangunan Bagi	buah	14	14	14	14	14
Bangunan BagiSadap	buah	0	0	0	0	0
Bangunan Sadap	buah	42	42	42	42	42
Talang	buah	8	8	8	8	8
Sypon	buah	0	0	0	0	0
Saluran Primer	meter	1.325	1.325	1.325	1.025	947
Saluran Sekunder	meter	26.337	26.337	26.337	18.365	16.465
Saluran Tersier	meter	11.064	11.064	11.064	6.480	5.770

Sumber Dinas PUTR Kab. Lumajang Tahun 2017-2021

Berdasarkan data tabel Jaringan Irigasi Kondisi Rusak Ringan di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2021 cenderung mengalami penurunan. Hal ini terlihat di Tahun 2021 pada kondisi jaringan irigasi Bendung tetap 13 buah, bangunan bagi tetap pada tahun 2021 menjadi 14 buah, bangunan sadap tetap 42 buah, Talang tetap 8 buah, Saluran Primer mengalami penurunan menjadi 947 meter, diikuti dengan saluran sekunder menjadi 16.465 meter serta saluran tersier 5.770 meter.

Tabel 2. 90 Jaringan Irigasi Kondisi Rusak Berat di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

Jaringan Irigasi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Bendung	buah	21	19	17	15	17
Bangunan Bagi	buah	5	3	3	3	3
Bangunan Bagi Sadap	buah	0	0	0	0	0
BangunanSadap	buah	55	55	55	55	57
Talang	buah	5	5	5	5	5
Sypon	buah	0	0	0	0	0
Saluran Primer	meter	700	700	700	600	530
Saluran Sekunder	meter	7.900	7.900	7.900	3.875	2.975

Jaringan Irigasi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Saluran Tersier	meter	6.600	6.600	6.600	2.920	2.220

Sumber Dinas PUPR Kab. Lumajang Tahun 2017-2021

Berdasarkan data tabel Jaringan Irigasi Kondisi Rusak Berat di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2021 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat di Tahun 2021 pada kondisi jaringan irigasi Bendung meningkat menjadi 17 buah, Bangunan Bagi tetap 3 buah, Bangunan Sadap menjadi 57 buah. Talang tetap menjadi 5 buah,. Saluran Primer turun menjadi 530 meter, diikuti Saluran Sekunder turun menjadi 2.975 meter dan Saluran Tersier turun menjadi 2.220 meter.

Tabel 2. 91 Capaian Indeks Kinerja Irigasi dan Persentase cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kinerja Irigasi	Indeks	53	56	57	59	64
2	Persentase cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	7,93	14,66	21,38	32,37	67,58

Sumber : Dinas PUTR Kab. Lumajang Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat indeks kinerja irigasi di Kabupaten Lumajang dari tahun 2017 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 64. Sedangkan persentase cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dapat terlihat dari tahun 2017 hingga 2020 terus mengalami peningkatan dan meningkat pesat pada tahun 2021 yaitu mencapai 67,58%. Hal ini menunjukkan kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tersebut sudah sangat baik dan sesuai dengan rencana tata ruang.

Selanjutnya akan dijelaskan terkait kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten lumajang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pada tabel sebagai berikut. Berikut disajikan tabel Ruang Terbuka Hijau.

Tabel 2. 92LUASAN RUANG TERBUKA HIJAU (TAMAN) KOTA LUMAJANG CAPAIAN TAHUN 2017 S.D 2021

NO	JENIS	PENGELOLAAN RTH	LOKASI (KEC)	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
				LUAS (M ²)				
	TAMAN KOTA							
1		Taman Alun alun Lumajang	Lumajang	N/A	40000	40000	40000	40000
2		Taman Nasional	Lumajang	N/A	301	301	301	301
3		Taman Imam Bonjol / Bahagia	Lumajang	N/A	250	250	250	250
4		Taman Adipura	Lumajang	N/A	451	451	451	451
5		Taman Tugu pancasila	Lumajang	N/A	620	620	620	620
6		Taman Garuda	Lumajang	N/A	-	230	230	230
7		Taman Panjaitan	Lumajang	N/A	100	100	100	100
8		aman Hutan Kota	Lumajang	N/A	4198	4198	4198	4198
9		Taman Embong Kembar	Lumajang	N/A	20000	20000	20000	20000
10		Taman Pasar baru 1	Lumajang	N/A	600	600	600	600
11	Berubah fungsi 25m2 (katamso utara)	Taman Simpang 5	Lumajang	N/A	4000	4000	4000	4000
12		Taman Bundaran SDK	Lumajang	N/A	-	1913	1913	1913
13		Taman bantaran Sungai(Juanda)	Lumajang	N/A	4000	4000	4000	4000
14		Taman Depan TMP	Lumajang	N/A	639	639	639	639
15		Taman Jl. Tamrin (Depan Ediso) / Taman Burung	Lumajang	N/A	10000	10000	10000	10000
16		Taman Adipura Baru	Sukodono	N/A	150	150	150	150
17		Taman Median Jalan	Sukodono	N/A	6000	6000	6000	6000
18		Taman Dawuhan	Sukodono	N/A	2660	2660	2660	2660
19		Taman Ariawiraraja	Wonorejo	N/A	252	252	252	252
20		Taman Delta Wonorejo I	Wonorejo	N/A	1200	1200	1200	1200
21		Taman Delta Wonorejo 2	Wonorejo	N/A	1200	1200	1200	1200
22		Taman JLT	Tukum	N/A	443	443	443	443

NO	JENIS	PENGELOLAAN RTH	LOKASI (KEC)	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
				LUAS (M ²)				
23	TAMAN LUAR KOTA	Taman Perbatasan Lumajang Malang	Pronojiwo	N/A	3150	3150	3150	3150
24		Taman Perbatasan Lumajang Jember	Jatiroto	N/A	5000	5000	5000	5000
25		Taman Pulau Perbatasan Lumajang Probolinggo	Ranuyoso	N/A	124	124	124	124
26		Taman Perbatasan Lumajang Probolinggo	Ranuyoso	N/A	3000	3000	3000	3000
27		Taman Alun- alun Pasirian	Pasirian	N/A	5000	5000	5000	5000
28		Taman Perbatasan Tukum	Tukum	N/A	92	92	92	92
29		Taman Perbatasan Dawuhan	Dawuhan	N/A	10	10	10	10
30		Taman Perbatasan Banjarwaru	Banjarwaru	N/A	10	10	10	10
31		Taman Perbatasan Labruk Tempeh	Tempeh	N/A	10	10	10	10
32		Taman Kapten Swandak	Klakah	N/A	186	-	-	-
33		Taman Alun alun Tempursari	Tempursari	N/A	8620	8620	8620	8620
34		Taman PlayGround Glagah Arum	Senduro	N/A	-	-	-	174,2
35		Taman Alun alun Jarit	Candipuro	N/A	-	-	-	4502
JUMLAH					12,22663 Ha	12,42228 Ha	12,42228 Ha	12,889905 Ha

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui Ruang Terbuka Hijau (RTH) dibedakan menjadi dua jenis antara lain Taman Kota dan Taman Luar Kota. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada taman kota dan taman luar kota pada tahun 2017 belum dapat disajikan data, baru pada tahun 2018 diketahui luasan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yaitu 12,22663 Ha dan pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kenaikan tercatat menjadi 12,42228 Ha. Selanjutnya terdapat kenaikan lagi di tahun 2021 yaitu tercatat menjadi 12,889905 Ha ini karena adanya penambahan pengelolaan RTH di kecamatan Senduro dan Kecamatan Candipuro.

Berikut juga akan dijelaskan Tabel dibawah jumlah pengurangan sampah Kabupaten Lumajang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Berikut disajikan tabel pengurangan sampah

Tabel 2. 93JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH KABUPATEN LUMAJANG REALISASI TAHUN 2017 S.D 2021

No	URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pembatasan timbulan sampah	Ton	N/A	N/A	60,78	124,4	0,46
2	Jumlah sampah termanfaatkan disumber sampah	Ton	N/A	N/A	7.097,55	7.026,57	7.0377,9
3	Jumlah sampah didaur ulang di sumber sampah	Ton	N/A	N/A	639,3	686,36	0,35
JUMLAH					7.797,63	7.837,33	7.378,71

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pada pembatasan timbulan sampah di tahun 2017 dan 2018 belum dapat disajikan data namun pada tahun 2019 mencapai 60,78 Ton mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 124,4 Ton tetapi di tahun 2021 terdapat penurunan signifikan menjadi 0,46 Ton. Untuk jumlah sampah termanfaatkan disumber sampah pada tahun 2019 mencapai 7.097,55 Ton mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 7.026,57 Ton tetapi pada tahun 2021 terdapat kenaikan menjadi 7.0377,9 Ton. Dan untuk jumlah sampah didaur ulang di sumber sampah pada tahun 2019 mencapai 639,3 Ton mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 686,36 Ton tetapi di tahun 2021 terdapat penurunan signifikan menjadi 0,35.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sektor perumahan saat ini menjadi prioritas nasional dikarenakan masuk ke dalam isu strategis nasional yang harus diamati dan diselesaikan. Salah satu isu strategis tersebut adalah meningkatnya backlog perumahan. Backlog perumahan merupakan jumlah kebutuhan/ kekurangan rumah. Nilai backlog didapatkan dari selisih antara jumlah rumah tangga dengan jumlah rumah yang ada. Pada rentang tahun 2017-2021 kondisi perumahan di Kabupaten Lumajang menunjukkan peningkatan, terlihat dari jumlah rumah yang dibangun, dari 419 pada tahun 2017 menjadi 4.545 pada tahun 2021 dengan target total kebutuhan rumah (Backlog Kepenghunian Rumah) angkanya berkisar 59.205 rumah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 94 Jumlah Rumah yang Dibangun dan Jumlah Kebutuhan Rumah di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rumah yang Dibangun (akumulatif)	Rumah	419	1.655	3.066	4.016	4.545
2	Jumlah Kebutuhan Rumah (Backlog Kepenghunian Rumah)	Rumah	59.205	59.205	59.205	59.205	59.205

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Lumajang, 2021

Terdapat delapan karakteristik perumahan layak huni. **Pertama**, dilihat berdasarkan status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati terbagi menjadi milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa milik orang lain, dan lainnya. **Kedua**, berdasarkan bahan bangunan utama atap rumah terluas. Atap dalam bahan bangunan sendiri terbagi menjadi empat jenis yaitu beton, gentang, asbes, seng, dan lainnya. **Ketiga**, berdasarkan bahan bangunan utama dinding rumah terluas, terbagi menjadi empat jenis yaitu tembok, kayu/batang kayu, anyaman bambu, dan lainnya. **Keempat**, berdasarkan bahan utama lantai terluas, terdapat empat klasifikasi yaitu: (i) marmer, granit, dan kramik; (ii) parket, vinil, karpet, ubin, tegel, dan teraso; (iii) kayu dan papan; serta (iv) bambu, tanah, dan sejenisnya. **Kelima**, berdasarkan penggunaan fasilitas buang air besar terbagi menjadi milik sendiri, kontrak/sewa dan bebas sewa. **Keenam**, berdasarkan sumber air utama yang digunakan untuk minum

terbagi menjadi lima jenis yaitu : air kemasan isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur mata air terlindung, dan sumur mata air tidak terlindung. **Ketujuh**, berdasarkan sumber utama penerangan. Pada Kabupaten Lumajang, terdiri dari tiga jenis sumber utama penerangan lampu, yaitu listrik PLN, listrik non PLN, dan bukan listrik. **Kedelapan**, berdasarkan bahan bakar utama untuk memasak terdiri dari kategori (i) Elpiji / Gas Kota/ Biogas, (ii) Minyak Tanah dan (iii) Briket/Arang/Kayu Bakar.

Berdasarkan capaian indikator Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya, Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pada Kawasan strategis, Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani, dan Persentase pemenuhan backlog akan dijelaskan pada table 2.106 berikut.

Tabel 2. 95 Capaian Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya	%	67,84	68,96	70,61	72,89	75,34
2	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pada Kawasan strategis	%	2,49	46,50	61,20	26,67	14,96
3	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani	%	4,60	7,35	13,01	48,08	60,82
4	Persentase pemenuhan backlog	%	50,35	51,40	52,59	53,39	53,81

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, 2021

Tabel di atas menjelaskan bahwa Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dimana selama 5 tahun terjadi peningkatan. Pada tahun 2017 capaian sebesar 67,84 % dan meningkat secara bertahap sampai dengan Tahun 2021 menjadi 75,34%.

Sedangkan pada indikator persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pada kawasan strategis pada Tahun 2017 menampilkan data capaian sebesar 2,49%

mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2019 menjadi 61,20%. Namun di Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 26,67% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 14,96%. Hal ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran akibat dampak pandemic Covid-19.

Untuk Indikator persentase peningkatan luasan kawasan kumuh tertangani pada tahun 2017 menunjukkan capaian sebesar 4,60%. Mengalami peningkatan secara signifikan hingga tahun 2020 naik menjadi 48,04%. Pada tahun 2021 kembali naik hingga di angka 60,82%.

Selanjutnya indikator persentase pemenuhan Backlog. Backlog dalam hal ini bertujuan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian persentase pemenuhan Backlog di Kabupaten Lumajang mulai tahun 2017 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 53,39% dan kembali naik pada tahun 2021 di angka 53,81%. Hal ini menunjukkan persentase pemenuhan backlog dari tahun ke tahun sangat baik dan konsisten.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 30 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini negara wajib memberikan perlindungan dan memberikan ketentraman kepada masyarakat dengan menjaga ketertiban umum. Menurunkan angka kriminalitas, menyelesaikan tindak pidana, dan tindakan preventif lain merupakan jalan bagi pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang aman, tentram, dan tertib.

a. Capaian Persentase Penegakan Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah

Hasil analisis Persentase Penegakan Perda/Perkada, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 96 Persentase penegakan Perda / Perkada Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase penegakan Perda (Peraturan Daerah)/Perkada (Peraturan Kepala	%	N/A	N/A	95,88	100	100

	Daerah)						
--	---------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Satpol PP Kab. Lumajang, 2021

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase penegakan Perda (Peraturan Daerah)/Perkada (Peraturan Kepala Daerah) tahun 2021 dan tahun 2020 mengalami kenaikan dari 95,88% pada tahun 2019 menjadi 100% pada tahun 2020 dan 2021. Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 tidak ada data terkait Persentase penegakan Perda (Peraturan Daerah)/Perkada (Peraturan Kepala Daerah), karena di tahun tersebut belum dilakukan pengelolaan data kinerja mengingat indikator tersebut mulai diimplementasikan di tahun 2019, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023.

b. Penanganan bencana alam Kabupaten di Lumajang

Kabupaten Lumajang termasuk ke dalam wilayah rawan bencana karena secara geografis diapit oleh 3 (tiga) gunung berapi yaitu: Gunung Semeru (3.676 m), Gunung Bromo (3.292 m) dan Gunung Lemongan serta berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Beberapa potensi bencana alam yang memungkinkan terjadi diantaranya gempa bumi, tsunami, angin topan, dan ancaman letusan gunung berapi. Selain itu terdapat potensi ancaman bencana lain, seperti tanah longsor dan kebakaran hutan. Belum lagi bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim global seperti banjir, gelombang pasang, serta kekeringan dan angin puting beliung yang hampir setiap tahun melanda di beberapa wilayah di Kabupaten Lumajang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.108 berikut.

Tabel 2. 97 Daftar Rekapitulasi KejadianBencana Alam Tahun 2017-2021

No	Jenis Kejadian	Tahun					Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Banjir	9	39	4	26	7	85
2	Tanah Longsor	20	66	17	28	22	153
3	Gempa Bumi	1	0	0	2	9	12
4	Angin Puyuh	22	0	0	0	30	52
5	Gelombang Pasang	1	13	1	4	9	28

6	Kekeringan	17	0	0	1	41	59
7	Kebakaran	15	60	10	35	17	137
8	Gunung Meletus	0	0	0	0	6	6
9	Lain-Lain	27	57	30	55	7	176
Jumlah		143	112	235	151	151	707

Atas dasar banyaknya bencana alam yang mungkin terjadi, Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan beberapa langkah yang merupakan bagian dari mitigasi bencana, diantaranya adalah :

1. Peringatan Dini Bencana;
2. Penetapan Kawasan Rawan Bencana;
3. Pembentukan Tim Tanggap Darurat;
4. Pelatihan Evakuasi.

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan mengurangi / mengantisipasi timbulnya bahaya.

c. Persentase Penanganan Kebakaran sesuai Tingkat waktu tanggap (Response time rate) Daerah Wilayah Menegemen Kebakaran (WMK)

Hasil analisis Persentase Penanganan Kebakaran sesuai Tingkat waktu tanggap (Response time rate) Daerah Wilayah Managemen Kebakaran (WMK), disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 98 Capaian Persentase Tingkat waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah MenejemenKebakaran (WMK) Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Penanganan Kebakaran sesuai Tingkat waktu tanggap (Response time rate) Daerah Wilayah Menegemen Kebakaran (WMK)	%	N/A	N/A	95	100	100

Sumber : Satpol PP Kabupaten Lumajang 2021

Berdasarkan data tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian Persentase Penanganan Kebakaran sesuai Tingkat

waktu tanggap (*Response time rate*) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) pada tahun 2019 hanya sebesar 95% dan meningkat pada tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 100%. Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 tidak ada data terkait Persentase Tingkat waktu tanggap (*Response time rate*) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), karena di tahun tersebut belum dilakukan pengelolaan data kinerja mengingat indikator tersebut mulai diimplementasikan di tahun 2019, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018 - 2023.

d. Persentase Capaian Indikator Tingkat Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Indeks ketahanan Daerah atau IKD merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana di wilayah administrasinya. Terdapat 71 Indikator yang digunakan dalam penilaian tingkat ketahanan daerah di suatu wilayah yang terbagi menjadi 7 prioritas diantaranya :

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklay dan Logistik
4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
6. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah tersebut harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Hasil analisis Persentase capaian indikator tingkat ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 99 Persentase Capaian Indikator Tingkat Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana (Indeks Ketahanan Daerah) di Kabupaten Lumajang 2017–2021

No	Indikator Kinerja	Sat uan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Capaian Indikator Tingkat Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana (IKD)	%	82,39	82,75	71	71,65	N/A

Sumber : BPBD kab Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui persentase capaian indikator tingkat ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana tahun 2017 hingga 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,36%. Namun di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 11,75% dan naik kembali sebesar 0,65% pada tahun 2020.

6. Sosial

Penjelasan Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PPKS di Kabupaten Lumajang pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 100 Capaian Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PPKS di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Sat uan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	26,71	15,07	26,43	78,76	84,47
2	Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PPKS	%	70	73	76,6	82,83	83.42

Sumber : Dinsos Kab. Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pada indikator Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Kabupaten Lumajang memiliki fluktuasi realisasi. Realisasi pada tahun 2017 sebesar 26,71%, pada tahun 2018 mengalami penurunan terhadap tahun 2017 sebesar 11,64% menjadi 15,07%. Selanjutnya mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi

26,43 %. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2020 dan menjadi peningkatan tertinggi sebesar 55,33 % menjadi 78,76 %. Tahun 2021 kembali meningkat menjadi 84,47% Selanjutnya pada indikator Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penanganan PPKS memiliki tren peningkatan yang konsisten sampai dengan tahun 2021. Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2020 mencapai 6,23 % dengan realisasi 82,83 %.

B. Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Lumajang dalam periode tahun 2017-2021 secara umum menunjukkan adanya perbaikan, yang terlihat dengan semakin meningkatnya angkatan kerja dan menurunnya jumlah pengangguran serta tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 2. 101Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020

INDIKATOR	2017	2018	2019	2020	2021
Angk Kerja (orang)	515.516	553.923	539.370	557.754	554.318
Jml Orang Bekerja (orang)	500.530	539.800	524.189	539.007	534.879
Jml Penganggur (orang)	14.986	14.123	15.181	18.747	19.439
Tingk. Pengangguran Terbuka (%)	2,91%	2,55%	2,81%	3,36%	3,51%
Upah Minimum Kabupaten (Juta Rp)	1.555	1.691	1.826	1.982	1.982

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang 2021

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini

menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (Labour Supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Hasil analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 102 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2017 – 2021 Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Daerah	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Lumajang	%	63,70	68,10	65,92	66,92	66,19
		Jawa Timur	%	68,78	69,37	69,45	71,20	70,33
		Indonesia	%	66,70	67,30	67,50	67,77	67,80

Sumber : BPS, 2021

Tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lumajang dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif, pada tahun 2017 dan 2018, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan dari 63,70 pada 2017 menjadi 68,10 pada tahun 2018 akan tetapi menurun kembali pada 2019 sebesar 65,92 serta naik kembali sebesar 66,92 pada tahun 2020 tetapi turun kembali di 2021 sebesar 66,19.

Secara umum tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Lumajang masih di bawah Propinsi Jawa Timur dan Indonesia, hal ini terlihat pada tahun 2021 Jawa Timur mencapai 70,33 dan Indonesia sebesar 67,80.

b. Capaian Kinerja Indikator urusan Tenaga Kerja

Berikut akan dijelaskan realisasi kinerja indikator urusan tenaga kerja:

Tabel 2. 103 Capaian Kinerja Persentase Pencari Kerja Terlatih di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pencari Kerja yang Terlatih	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Lumajang, 2021

Dari rentang waktu antara tahun 2017-2021 Persentase pencari kerja terlatih mencapai 100%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan Dinas Tenaga Kerja dalam melakukan pelatihan terhadap para pencari kerja telah mencakup semua pencari kerja yang terdaftar.

Tabel 2. 104 Capaian Kinerja Persentase Tenaga Kerjayang Produktif di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	%	N/A	100	100	81,82	100

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Lumajang, 2021

Dari rentang waktu antara tahun 2018-2020 capaian kinerja tenaga kerja produktif mengalami penurunan persentase. Pada tahun 2018 dan 2019 mencapai 100 % dan mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 81,82%. Penurunan ini terjadi disebabkan karena pada Tahun 2020 kegiatan pembinaan tenaga kerja tidak dapat berjalan dengan optimal. Pada tahun 2021 meningkat

Tabel 2. 105 Capaian Kinerja Persentase Pencari Kerjayang ditempatkan di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	142,99	107,60	125,65	122,93	131,86

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Lumajang, 2021

Dari segi penempatan pencari kerja yang ditempatkan rentang waktu antara tahun 2017 sampai 2021 Persentase pencari kerja yang ditempatkan mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2017 yang semula mencapai 142,99% mengalami dan turun pada Tahun 2018 menjadi 107,60%. Mengalami peningkatan kembali di tahun 2019 sebesar 125,65% tetapi mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 122,93% tetapi meningkat kembali 131,86%.

Tabel 2. 106 Capaian Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	67,01	68,04	56,22	62,52	72,69

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Lumajang, 2020

Tahun 2017 sampai dengan 2018 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak mengalami kenaikan, dari 67,01 % menjadi 68,04 %. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 56,22% dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2020 sebesar 62,52 % pada tahun 2020. Kenaikan kembali terjadi di tahun 2021 sebesar 72,69%, kenaikan capaian ini menunjukkan kepatuhan perusahaan dalam menerapkan tata kelola sesuai standar ketenagakerjaan mengalami peningkatan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Namun perwujudan tersebut belum dapat menjamin terpenuhinya akses, partisipasi kontrol, serta manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan yang berdampak berkurangnya kesenjangan gender. Untuk itu perlu didukung dengan perencanaan yang responsif gender guna mendorong terwujudnya Anggaran Responsif Gender (ARG), yang dapat meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Peningkatan peran perempuan dalam pemerintahan dan lembaga perekonomian adalah indikator yang menggambarkan

peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan yang berperan serta dalam pemerintahan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

a. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen serta partisipasi ekonomi. Hasil analisis Indeks Pembangunan Gender dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 107 Capaian IndeksPemberdayaan Gender Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2020
1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	60,11	59,23	59,16	58,91	59,38

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Indeks Pemberdayaan Gender mengalami penurunan secara terus menerus dari tahun 2017 pada angka 60,11 sampai tahun 2020 pada angka 58,91, tetapi meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 59,38.

3. Pangan

Pangan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012, adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman konsumsi manusia, termasuk bahan pangan bahan baku dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan suatu wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan dengan mempertimbangkan aspek

sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Adapun skor pola pangan harapan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 108 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lumajang Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2017 – 2021

No	Kelompok Pangan	2017	2018	2019	2020	2021
		Skor AKE				
1	Padi-padian	25,5	25,0	48,4	50,0	24,2
2	Umbi-umbian	2,7	5,7	5,2	5,7	2,9
3	Pangan hewani	17,8	10,7	10,2	10,7	22,3
4	Minyak dan lemak	4,8	9,8	11,1	9,8	5,6
5	Buah/Biji berminyak	1,8	3,3	3,4	3,3	1,8
6	Kacang-kacangan	19,2	9,1	9,6	9,1	19,7
7	Gula	2,6	4,6	5,4	4,6	2,7
8	Sayur dan buah	26,9	5,4	5,5	5,4	27,9
9	Lain-lain	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
	Jumlah	101,4	99,9	99,8	99,9	107,2

,2*AKE = Angka Kecukupan Energi

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lumajang 2021

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Lumajang Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2017 hingga tahun 2021 cenderung mengalami kenaikan. Dari data di atas diketahui bahwa skor pada padi-padian dan sayur buah merupakan kelompok pangan tertinggi. Misalnya di tahun 2021 pada kelompok padi-padian, skor AKE, maksimum sebesar 24,2 diikuti dengan sayuran dan buah 27,9 kemudian hewani 22,3, umbi-umbian yang turun menjadi 2,9. Untuk minyak & lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada kelompok pangan tersebut perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kembali nilai AKE nya.

Terdapat ketimpangan dalam Pola konsumsi pangan penduduk Indonesia hal ini dikarenakan:

1. Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras.
2. Masih rendahnya konsumsi pangan hewani, umbi-umbian, serta sayur dan buah.
3. Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi, jagung, dan sagu masih rendah.
4. Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan. (PPH) masih belum mencapai kondisi ideal.
5. Diperlukan upaya untuk menganekaragamkan konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH yang ideal agar hidup sehat, aktif, dan produktif.
6. Kebijakan terfokus pada peningkatan produksi dan belum mempertimbangkan kecukupan gizi (nutrition sensitive production system)

Dengan pendekatan PPH, keadaan perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kecukupan gizi (Nutritional Adequacy), tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi (Nutritional Balance) yang didukung oleh cita rasa (Palatability), daya cerna (Digestability), daya terima masyarakat (Acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (Affortability).

Penghitungan Skor PPH dimaksudkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan suatu masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal, yakni skor 100. Pada tahun 2021, Skor PPH Kabupaten Lumajang adalah 95,43, dimana skor PPH tersebut masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 95,62, sehingga capaian kinerja atas indikator kinerja skor PPH adalah 99,80%. Perhitungan atas skor PPH didapatkan berdasarkan survei konsumsi pangan di wilayah agroekologi (pertanian dan perkotaan/industri) tahun 2021 dari 9 unsur kelompok pangan yaitu : 1) Padi-Padian; 2) Umbi-Umbian; 3) Pangan Hewani; 4) Minyak dan Lemak; 5) Buah/biji berminyak; 6) Kacang-Kacangan; 7) Gula; 8) Sayur dan Buah; 9) Lain-Lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 109 Skor Pola Pangan Harapan Aktual Berdasarkan

Survei Konsumsi Pangan Tahun 2021 Kabupaten Lumajang

No	Kelompok Pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kalori	%	AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	969,7	47,4	48,5	0,5	23,7	24,2	25,0	24,2
2	Umbi-umbian	116,9	5,7	5,8	0,5	2,9	2,9	2,5	2,5
3	Pangan hewani	222,7	10,9	11,1	2,0	21,8	22,3	24,0	22,3
4	Minyak dan Lemak	222,8	10,9	11,1	0,5	5,4	5,6	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	73,0	3,6	3,6	0,5	1,8	1,8	1,0	1,0
6	kacang-kacangan	197,3	9,6	9,9	2,0	19,3	19,7	10,0	10,0
7	Gula	107,8	5,3	5,4	0,5	2,6	2,7	2,5	2,5
8	Sayur dan Buah	111,7	5,5	5,6	5,0	27,2	27,9	30,0	27,9
9	Lain-Lain	23,1	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JUMLAH		2044,9	100,0	102,2	11,5	104,8	107,2	100,0	95,43

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pola konsumsi pangan masyarakat Lumajang untuk pemenuhan kalorinya masih didominasi padi-padian (47,4). Hampir setiap tahun luas lahan baku sawah selalu mengalami penurunan. Oleh karena itu, antisipasi terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat Lumajang harus semakin dieksplorasi dan dikembangkan. Salah satu upayanya adalah melalui Si Gempal (Aksi Gerakan Kembali ke Pangan Lokal). Adapun pengukuran kinerjanya tampak dalam tabel Pengukuran Capaian berikut.

Tabel 2. 110Skor Pola Pangan HarapanKabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Daerah	Satu	Skor Pola Pangan Harapan
----	--------	--------	------	--------------------------

			an	2017	2018	2019	2020	2021
1	Skor pola pangan harapan	Lumajang	Skor	90,5	91	93,16	94,20	95,43
		Jawa Timur	Skor	84,8	89,7	92,5	91,2	N/A
		Nasional	Skor	90,4	91,3	90,8	86,3	N/A

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas setiap tahun skor pola pangan harapan Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan, sampai dengan Tahun 2021 mencapai angka 95,43. Ini menggambarkan bahwa mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan Kabupaten Lumajang semakin baik dan ideal.

Sebagai perbandingan antar daerah perihal skor PPH tampak dalam tabel berikut.

Tabel 2. 111 Perbandingan skor PPH

Uraian Yang Dijadikan Perbandingan	Hasil Perbandingan	Keterangan
Rata-Rata Skor PPH Tingkat Nasional tahun 2021	N/A	Skor PPH Kab. Lumajang diatas Rata-Rata Nasional

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lumajang, 2021

4. Pertanahan

Rencana penggunaan tanah di Kabupaten Lumajang sesuai Perda RTRW Kabupaten Lumajang terbagi menjadi Kawasan Pertanian; Kawasan Perdagangan dan Jasa; Kawasan Pertambangan; Kawasan Permukiman; Kawasan Pendidikan; Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran; Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Peruntukan Pariwisata.

Tabel 2. 112 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks tertib administrasi pertanahan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator tersebut dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 belum ada data capaian kinerja yang disajikan dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru yang belum dilakukan pengelolaan kinerja pada tahun-tahun tersebut.

5. Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas pengelolaan Lingkungan Hidup di suatu wilayah dapat tercermin melalui Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Selain untuk mencerminkan kualitas suatu wilayah, IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform ; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO₂ dan NO₂; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. Adapun untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut :

1) Udara

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah, khususnya di perkotaan. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir. Selain itu kebutuhan akan transportasi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi ini akan menimbulkan dampak berupa meningkatnya pencemaran udara yang tentunya berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Tabel 2. 113 Capaian Persentase titik pantau dengan

kualitas udara baik di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021

1	Persentase titik pantau dengan kualitas udara baik	%	92,9	51,28	69,23	16,70	75
---	--	---	------	-------	-------	-------	----

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2021

Berdasarkan data diatas persentase titik pantau kualitas udara dari tahun 2017 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan dari 92,9% menjadi 51,28% akan tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 69,23% dan turun kembali menjadi 16,70% pada tahun 2020 kemudian naik kembali pada tahun 2021 menjadi 75%. Kenaikan ini dapat disebabkan parameter ukur, yaitu SO₂ dan NO₂ bernilai rendah pada titik-titik pantau, sehingga pada penentuan kategorinya adalah menjadi baik. Pengaruh lain dari luar seperti penurunan jumlah pencemar udara yang disebabkan jumlah kendaraan yang menurun serta dan peningkatan kesadaran atas perilaku masyarakat juga mengakibatkan peningkatan pada titik-titik pantau yang telah ditetapkan.

Selanjutnya terdapat penurunan yang diakibatkan perubahan rumusan indikator 2017 ke 2018, dimana awalnya titik pantau hanya penataan usaha/kegiatan terhadap pengendalian pencemaran udara menjadi titik pantau udara pada fasilitas umum (fasum). Selain itu pada tahun 2020 ke 2021 terjadi perbedaan yang cukup signifikan dari 16,70% menjadi 75%, hal ini juga dikarenakan adanya penyesuaian target dan parameter ukur serta rumus perhitungan terbaru dari Kementrian LHK sehingga angkanya meningkat pesat.

2) Air

Air mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, tidak hanya sebagai sumber air minum tetapi juga dapat digunakan sebagai sarana irigasi pertanian maupun industri di beberapa daerah. Oleh karenanya kondisi kualitas air, dalam hal ini air sungai memiliki peran penting ditengah intervensi terhadap lingkungan seperti pembuangan limbah industri ke badan sungai dan aktifitas manusia yang mengakibatkan penurunan kualitasnya.

Tabel 2. 114 Persentase Titik Pantau Dengan Kualitas Air Baik di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase titik pantau dengan kualitas air baik	%	100	25	33,33	30,56	55,95

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase titik pantau dengan kualitas air di kabupaten Lumajang mengalami fluktuatif, hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 mencapai 100% sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 25% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi 33,33%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 30,56%. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 55,95%.

Penyebab turunnya capaian persentase titik pantau dengan kualitas air tersebut karena adanya perubahan rumusan indikator dari tahun 2017 ke 2018, dimana awalnya titik pantau hanya penataan usaha/kegiatan terhadap pengendalian pencemaran air menjadi titik pantau pada air permukaan/sungai. Penyebab lain adanya penurunan juga diakibatkan adanya parameter yang melebihi baku mutu yang ditetapkan seperti BOD, COD, PO4 dari hasil uji kualitas air yang sudah dilakukan. Disamping itu curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan nilai beberapa parameter seperti TSS dan TDS di semua titik-titik pantau menjadi tinggi.

3) Tutupan Lahan

Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam keberlangsungan ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga memiliki fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, tutupan lahan (vegetasi) memiliki peran penting yang harus turut serta diamati dan dikendalikan.

Tabel 2. 115 Persentase Tutupan Lahandi Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase tutupan lahan	%	71,42	7	14,30	17,20	105,62

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase tutupan lahan di kabupaten Lumajang cenderung fluktuatif, pada tahun 2017 sebesar 71,42%, mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 7%. belum optimalnya beberapa kegiatan yang mendukung, belum maksimalnya Ruang Terbuka Hijau (RTH), perubahan Iklim yang tidak menentu dan sulit diprediksi

membuat penanaman untuk tutupan vegetasi kurang maksimal serta perubahan perumusan penghitungan pada indikator persentase tutupan lahan. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan kembali dari 14,30% menjadi 17,20%, dan meningkat drastis pada tahun 2021 sebesar 105,62 %. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian target dan parameter ukur serta rumus perhitungan terbaru dari Kementerian LHK sehingga angkanya meningkat pesat.

b. Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Lumajang dilakukan dengan dua cara yaitu pengelolaan sampah terpusat dan pengelolaan sampah setempat. Pengelolaan sampah setempat dilakukan dengan dua cara yaitu tradisional dan TPS. Pengelolaan sampah setempat oleh petugas dikumpulkan dari tempat sampah hunian ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Pengumpulan sampah oleh petugas didukung oleh peralatan atau kendaraan angkut dimana terdapat gerobak sampah, dump truck, Arm Roll Truk, motor sampah dan lain-lain. Berikut adalah jumlah kendaraan angkut sampah sebagai pendukung kinerja pengelolaan sampah Kabupaten Lumajang Tahun 2021.

Tabel 2. 116 Jumlah Kendaraan AngkutSampah Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Nama Asset	Jumlah (Unit)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Gerobak Sampah				176	127
2	Becak Sampah	125	142	162	195	162
3	Dump Truck	11	14	14	13	14
4	Truk Terbuka	1	1	1	1	1
5	Truk Tangki	2	2	2	3	2
6	Pick Up	2	3	3	2	3
7	Amroll Truck	12	13	13	11	13
8	Container	37	49	59	77	59
9	Bulldozer	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang Tahun 2021

Berdasarkan persentase pengelolaan sampah di Kabupaten Lumajang dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 117Persentase PengelolaanSampahdi Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase pengelolaan sampah	%	N/A	31	33,40	33,10	39,25

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lumajang Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2017 belum ada data yang tersedia terkait persentase pengelolaan sampah. Kemudian pada tahun 2018 hingga 2019 persentase pengelolaan sampah mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 31% pada tahun 2018 dan 33,40 % pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 33,10% disebabkan karena kondisi potensi timbunan sampah cukup tinggi tetapi tidak sebanding dengan tersedianya sarana prasarana, sumber daya manusia dan biaya operasional serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber timbunan sampah. Kemudian pada tahun 2020 hingga menuju 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 33,10 % menjadi 39,25%, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan pengurangan sampah mulai mengalami peningkatan.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan pembangunan kependudukan di suatu wilayah ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu lahir, meninggal, pindah dan datang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang dominan di Kabupaten Lumajang adalah faktor kelahiran sedangkan ditinjau dari sisi migrasi netto, maka Kabupaten Lumajang termasuk migrasi netto negatif karena jumlah penduduk yang keluar lebih banyak dari jumlah penduduk yang masuk. Pada table berikut merupakan Perkembangan Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2021, dimana bisa dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk setiap tahun mengalami fluktuasi.

Tabel 2. 118Capaian indikator urusankependudukan dan catatan sipil Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan (KK,	%	96	92	81,7	94,01	95,75

KTP, KIA, AKTA, HAK AKSES)							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lumajang, 2021

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang terus meningkatkan pelayanannya, hal tersebut terbukti pada tahun 2021 rata-rata pelayanan penyelesaiannya KK, akte dan dokumen kependudukan lainnya dapat dilakukan dalam waktu 1 hari dengan realisasi indikator kinerja di Tahun 2021 mencapai 95,75 % .

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan. Untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif dan sejahtera yakni masyarakat yang memiliki kesadaran untuk ikut serta berperan aktif dan peduli dalam pembangunan diimplementasikan dalam Gerakan Membangun Masyarakat Sehat (Gerbangmas) yang telah direvitalisasi kembali menjadi Gerbangmas Siaga.

Upaya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pemberian dana stimulan dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan yang bertujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dan swadaya dalam pembangunan, peningkatan infrastruktur lingkungan pemukiman serta meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan.

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan juga dilaksanakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Perkotaan yang bertujuan untuk mensinergikan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan membantu masyarakat untuk mampu mengidentifikasi persoalan kemiskinan di wilayahnya yang selanjutnya bersama stakeholder terkait merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya, sehingga diharapkan dapat terwujud masyarakat yang berdaya dan mandiri. Dalam PNPM masyarakat mempunyai peran yang besar dan strategis dalam mengelola kegiatan ekonomi (perguliran dana), kegiatan sosial dan kegiatan lingkungan, meskipun PNPM Mpd sudah berakhir pada tahun 2015 tetapi kegiatan masih tetap dilaksanakan dengan pelestarian aset yang masih dikelola oleh BKAD dan UPK. Selain itu Pemberdayaan masyarakat dalam Pembangunan khususnya pembangunan Ekonomi dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang merupakan suatu lembaga perekonomian Desa yang memiliki peranan penting dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Desa dan Pemerintah Desa. Dengan demikian kegiatan pemberdayaan ekonomi Badan Usaha Milik Desa secara ideal merupakan bagian dari pembangunan usaha peningkatan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian Nasional berbasis pemberdayaan masyarakat dan desa. Berikut jumlah Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Lumajang dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.

Tabel 2. 119 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)	Lembaga	27	31	78	84	92

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang, 2020

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu terdapat 31 lembaga BUMDesa, tren peningkatan berlanjut di Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Penambahan Lembaga BUMDesa tertinggi terjadi di tahun 2019, yaitu dengan bertambahnya 47 lembaga menjadi 78 Lembaga BUMDesa. Selanjutnya di Tahun 2020 terdapat penambahan 6 Lembaga menjadi 84 lembaga BUMDesa. Tahun 2021 menalami peningkatan sejumlah 8 lembaga sehingga total sampai dengan tahun 2021 sejumlah 92 lembaga.

Tabel 2. 120 Capaian Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	Rp (Juta)	N/A	N/A	218,5	220,5	-826,1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang, 2020

Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa yaitu SHU lembaga ekonomi desa Tahun berkenaan dikurangi dengan SHU lembaga ekonomi desa tahun sebelumnya dimana tabel di

atas menjelaskan bahwasannya nilai SHU pada tahun 2019 sebesar Rp. 218,5 Juta dan meningkat pada tahun 2020 sebesar Rp. 220,5 Juta. Yang dimaksud lembaga ekonomi desa terdiri atas BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa), UPKu (Unit Pengelola Keuangan dan Usaha), BKD (Badan Kredit Desa), dan UPK eks PNPMPd (Unit Pengelola Kegiatan). Tahun 2017 s.d 2018 tidak ada data terkait Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa, karena di tahun tersebut belum dilakukan pengelolaan data kinerja mengingat indikator tersebut mulai diimplementasikan di tahun 2019, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023. Sedangkan pada tahun 2021 nilai SHU adalah – Rp. 826,171,711 hal ini dikarenakan kegiatan di tahun 2021 sangat minim.

Tabel 2. 121Capaian Persentase DesaDenganPenyelenggaraan Pemerintahan Desa YangBerkualitas di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	%	60,10	59,60	8,59	15	16,33

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang 2021

Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas pada tahun 2017 dan 2018 yang digunakan sebagai perhitungan Persentase Desa yang telah menyusun laporan Pelaksanaan APBDes tepat waktu. Hal ini berbeda dengan tahun 2019, 2020 dan 2021 yang digunakan perhitungan ada 3 komponen yaitu persentase desa yg pengelolaan keuangan desa sesuai aturan, persentase desa yang tertib laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan persentase desa yang tertib perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sebesar 60,10% dan tahun 2018 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 59,60% dan penurunan kembali terjadi pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 8,59%, akan tetapi pada tahun 2020 capaian mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu capaiannya sebesar 15%. Pada tahun 2021 capaian ini meningkat kembali menjadi 16,33%.

Tabel 2. 122 Capaian Persentase Dana Swadaya Masyarakat di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Dana Swadaya Masyarakat	%	7,36	15,49	2,01	8,50	6,67

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang, 2021

Dana swadaya masyarakat yang dimaksud terdiri atas dana swadaya murni dan dana swadaya pendukung program, dimana datanya berasal berjenjang dari desa ke kecamatan kemudian ke kabupaten. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase Dana Swadaya Masyarakat di kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sebesar 7,36% dan tahun 2018 mengalami peningkatan dengan capaian sebesar 15,49% dan penurunan signifikan terjadi pada tahun 2019 dengan capaian hanya sebesar 2,01% dimana hal ini terjadi dikarenakan dampak dari Pandemi Covid 2019, akan tetapi pada tahun 2020 capaian mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu capaiannya sebesar 8,50%. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 6,67% .

Tabel 2. 123 Capaian Persentase Desa Cepat Berkembang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Desa Cepat Berkembang	%	23	25	16,70	35,35	25,37

Sumber :Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas, Pada tahun 2021 realisasi persentase desa cepat berkembang adalah 52 desa atau sebesar 25,37 % dari 205 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Lumajang. Capaian ini Menurun 30,25% dari Tahun 2020 yang sebesar 35,35%.

Tabel 2. 124 Status Desa Mandiri IDMTahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang

Status Desa	Satuan	2017	2018	2019	2020	2020
Sangat Tertinggal	Desa	0	0	0	0	0
Tertinggal	Desa	46	46	9	0	0
Berkembang	Desa	121	121	149	134	121

Status Desa	Satuan	2017	2018	2019	2020	2020
Maju	Desa	31	31	40	64	67
Mandiri	Desa	0	0	0	0	10
Jumlah	Desa	198	198	198	198	198

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. IDM menggunakan indikator yang dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Sejak 2020 di kabupaten lumajang sudah tidak ada desa dengan status tertinggal, artinya arah pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa sudah bisa mengentaskan desa desa dari status tertinggal menjadi desa berkembang dan maju.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilaksanakan dengan upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta pencegahan terhadap pernikahan dini khususnya terhadap anak dan remaja usia sekolah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lumajang bahwa pada rentang waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lumajang mengalami fluktuatif. Sempat mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi 0,43%. Namun kemudian mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2021 menjadi 0,25 %. Selanjutnya akan dijelaskan capaian dari Total Fertility Rate atau angka kelahiran, ASFR (Age Specific Fertility Rate) atau Angka Kelahiran menurut umur, Unmeet Need atau angka keinginan memakai kontrasepsi yang tidak terlayani, MCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate atau pemakaian kontrasepsi modern di Kabupaten Lumajang.

Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran merupakan jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15-49 tahun). TFR

digunakan sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu perencana program pembangunan meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Tabel 2. 125 Angka Capain Total FertilityRate (TFR)di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Total Fertility Rate (TFR)	%	1,97	1,97	1,93	1,93	1,93

Sumber : Disdalduk, KB dan PP Kab Lumajang, 2020

Dilihat dari tabel pada di atas tahun 2017-2018 TFR di angka 1,97 dan pada tahun 2019 dan 2021 di angka 1,93. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata dalam usia subur wanita hanya memiliki 2 orang anak saja. Keberhasilan program KB dalam mengendalikan kelahiran ataupun kebijakan dua anak cukup di Kabupaten Lumajang cukup berhasil dilihat dari angka TFR tersebut.

Tabel 2. 126 Angka Capain UnmeetNeeddi Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Unmeet Need	%	10,19	9,69	10,02	9,04	10,33

Sumber : Disdalduk, KB dan PP Kab Lumajang 2021

Definisi unmet need menurut BKKBN, BPS, dan Kementerian Kesehatan, adalah proporsi wanita usia subur berstatus kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya (ingin menunggu dua tahun atau lebih sebelum kelahiran berikutnya), tetapi tidak memakai alat/cara kontrasepsi.

Unmet need merupakan fenomena yang banyak terjadi, terutama di negara-negara berkembang. Di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa 105,2 juta wanita berstatus kawin tergolong unmet need. Satu dari sepuluh wanita pasangan usia subur (PUS) di Indonesia yang tidak ingin hamil, tidak menggunakan kontrasepsi (BPS dan ORC Macro, 2003).

Pada rentang waktu tahun 2017-2021 angka unmeet need turun dari 10,19 di tahun 2017 menjadi 10,33 di tahun 2021. Hal ini membuktikan bahwa Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) yang seharusnya ber KB tetapi belum terlayani menjadi semakin kecil.

Selanjutnya MCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) adalah persentase jumlah pasangan usia subur yang menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern (IUD, Implant, vasektomi/MOP, Tubektomi/MOW, Suntik, Pil dan Kondom). Berikut adalah capaian MCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 :

Tabel 2. 127 Angka MCPR di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Uraian	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	MCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)	%	76,89	75,74	75,44	75,36	73,75

Sumber : Disdalduk, KB dan PP Kab Lumajang, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian MCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami fluktuasi. Penurunan mulai tahun 2018 sampaim dengan 2021, dimana Tahun 2017 menjadi 76,89%, dan turun di tahun 2018 sebesar 75,74, Tahun 2019 turun kembali menjadi 75,44%. Selanjutnya di tahun 2020 juga kembali turun menjadi 75,36%, penurunan kembali terjadi di tahun 2021 sebesar 73,75%

9. Perhubungan

Pada tahun 2021 angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lumajang mengalami penurunan dibandingkan tahun - tahun sebelumnya, yaitu sebesar 14,27 % pada tahun 2021. Tercatat pada tahun 2018 angka kecelakan lalin sebesar 30,49 %, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 43,84% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 46,52%. Angka kecelakaan lalu lintas tertinggi dalam rentang waktu 2017 - 2021 adalah di tahun 2020, sedangkan terendah tercatat 14,27 pada tahun 2021. Hal ini membuktikan upaya penurunan angka kecelakan lalu lintas cukup berhasil. Angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 2017-2021 di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 128 Capaian Angka Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Angka	75,11	30,49	43,84	46,52	14,27

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, 2021

Masih adanya kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lumajang dapat dikarenakan :

1. Geografis Kabupaten Lumajang kebanyakan daerah pegunungan yang mana kondisi jalan banyak tikungan tajam dan mengikuti kontour yang tidak diikuti pemenuhan rambu jalan yang memadai
2. Sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Lumajang kurang memahami ketertiban dalam berlalu lintas di jalan;
3. Kelalaian manusia dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Sedangkan rasio penurunan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Lumajang tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 129 Rasio Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	%	7	4,96	3	6	0,01

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lumajang 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas di kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sebesar 7% dan tahun 2018 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 4,96% dan penurunan kembali terjadi pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 3%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran di Kabupaten Lumajang menurun dari tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2020 capaian mengalami peningkatan sebesar 6%, hal ini dikarenakan jumlah pelanggaran tahun 2020 meningkat kemudian tahun 2021 turun signifikan menjadi 0,01. dan untuk jumlah kendaraan baru berkurang.

Selanjutnya, peningkatan jumlah kendaraan di Kabupaten Lumajang yang tidak sebanding dengan peningkatan ruas jalan memerlukan penanganan di sektor perhubungan secara optimal, guna mewujudkan pelayanan perhubungan yang handal, efektif, terkoordinasi dan berkesinambungan. Pelayanan perhubungan yang baik dan berkelanjutan akan berdampak positif terhadap pembangunan baik di Kabupaten Lumajang maupun daerah sekitarnya.

Tabel 2. 130 Capaian Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	%	25	20,87	19	10	8,1

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan di Kabupaten Lumajang mengalami penurunan secara bertahap, hal ini dapat dilihat pada tahun 2017 sebesar 25%, tahun 2018 dengan capaian sebesar 20,87%, tahun 2019 dengan capaian sebesar 19%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 10% kemudian pada tahun 2021 kembali turun menjadi 8,1%, hal ini dikarenakan kendaraan angkutan umum masih banyak yang tidak layak jalan (tidak lulus uji KIR) sehingga tidak mendapatkan Ijin Usaha Angkutan.

Sedangkan persentase peningkatan kualitas prasarana perhubungan di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021 :

Tabel 2. 131 Capaian Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	%	99,43	94,96	88	90	92,37

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan di kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sebesar 99,43% dan tahun 2018 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 94,96%, penurunan kembali terjadi pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 88%, akan tetapi pada tahun 2020 capaian mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu capaiannya sebesar 90% dan tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 92,37% hal ini menunjukkan bahwa prasarana Perhubungan di Kabupaten Lumajang dalam kondisi baik.

10. Komunikasi dan Informatika

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Akselerasi penerapan SPBE di tingkat daerah telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana diharapkan pada akhir tahun 2025 pemerintah sudah berhasil mencapai keterpaduan SPBE, baik di dalam dan antar instansi pusat dan pemerintah daerah, dan keterhubungan SPBE antara instansi pusat dan pemerintah daerah. Berikut realisasi kinerja Capaian Persentase penerapan SPBE oleh Perangkat Daerah tampak dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 132 Capaian Persentase Penerapan SPBE oleh Perangkat Daerah

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase	%	N/A	N/A	52	90	100

Penerapan SPBE oleh PD							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Lumajang, 2020

Berdasarkan table di atas, tampak bahwa untuk tahun 2020 mengalami perkembangan signifikan OPD yang menerapkan SPBE, dari 52 % pada tahun 2019 menjadi 90 % di tahun 2020 dan meningkat kembali di tahun 2021 sebesar 100%. Selanjutnya dalam menyebarluaskan informasi pembangunan daerah sebagaimana berikut :

- a. Perkembangan informatika di Kabupaten Lumajang telah mampu mendukung terwujudnya e-government di Kabupaten Lumajang. Portal web www.lumajangkab.go.id terus dikembangkan yang bertujuan untuk diseminasi informasi dan meningkatkan kemudahan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat. Semakin banyak media informasi dan komunikasi yang tersedia antara pemerintah dengan masyarakat. Saat ini portal web www.lumajangkab.go.id memiliki 19 sub domain yang dikelola oleh masing-masing instansi ditambah 198 sub domain desa yang dikelola oleh masing-masing desa. Koneksi internet berkapasitas 142 Mbps yang digunakan untuk menunjang operasional seluruh server portal web www.lumajangkab.go.id beserta seluruh sub domain yang ada.
- b. Pemerintah telah membuka saluran khusus bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya melalui website (pengaduan.lumajangkab.go.id). Peningkatan ini disebabkan oleh kemudahan sistem dan kecepatan respon dari masing-masing OPD sedangkan salah satu penyebab minimnya jumlah pengaduan adalah adanya maintenance sistem, jaringan, server serta pengembangan aplikasi layanan pengaduan sehingga aplikasi layanan pengaduan tidak bisa diakses.
- c. Untuk itu dengan melihat antusiasme masyarakat yang cukup besar tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk terus mengembangkan konten website pengaduan, surat, telepon, maupun pengaduan

secara langsung untuk lebih meningkatkan pelayanan masyarakat.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pembentukan sebuah koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro/Kecil/Menengah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun capaian indikator urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah di Kabupaten Lumajang dari Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 133 Capaian indikator Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase usaha mikro yang berwirausaha	%	0,20	0,39	0,78	0,80	31,01
2	Persentase koperasi berkualitas	%	75,32	80,9	80,34	49,16	69,9
3	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	%	25,75	26,39	28,21	N/A	12,62

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian daa Perdagangan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator Persentase usaha mikro yang berwirausaha terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 sebesar 0,20% dan terus meningkat drastis menjadi 31,01% di tahun 2021. Selanjutnya untuk indikator Persentase koperasi berkualitas untuk tahun 2017 sebesar 75,32% mengalami kenaikan sampai dengan Tahun 2019 menjadi 80,34% namun mengalami penurunan hampir 40% di Tahun

2020 menjadi 49,16%. Penurunan ini disebabkan karena dampak pandemi Covid 19 yang menyebabkan banyak koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dimana RAT ini menjadi salah satu indikator pengukuran koperasi berkualitas. Pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 69,9%, hal ini mengindikasikan kegiatan koperasi sudah mulai pulih dan kembali normal seperti sedia kala.

Sedangkan untuk capaian pada indikator Persentase koperasi sehat dan cukup sehat di tahun 2017 sebesar 25,75% terus mengalami kenaikan sampai dengan Tahun 2019 menjadi 28,21%. Di tahun 2020 tidak dapat menampilkan data capaian kinerja indikator disebabkan kegiatan monitoring tidak dapat dilakukan karena kondisi pandemi Covid 19. Kemudian nilai capaian pada tahun 2021 sebesar 12,62 %, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan monitoring mulai kembali normal seperti sedia kala meskipun belum maksimal. Penilaian koperasi sehat dan cukup sehat ini selain menilai buku Rapat Akhir Tahun (RAT) juga dilakukan monitoring untuk melihat langsung struktur dan manajemen koperasi. Capaian persentase pertumbuhan usaha mikro dan koperasi aktif dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 134 Capaian Persentase PertumbuhanUsaha Mikro dan Persentase Koperasi AktifKabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase pertumbuhan usaha mikro	%	0,69	0,59	0,87	1,10	44,83
2	Persentase koperasi aktif	%	71,25	71,25	71,19	69,99	70,98

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian daa Perdagangan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator persentase pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2017 sebesar 0,69% hingga tahun 2020 sebesar 1,10% dan meningkat pesat pada tahun 2021 menjadi 44,83%. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan usaha mikro tetap mengalami kenaikan selama pandemi dan berangsur pulih sehingga naik pesat pada tahun 2021.

Selanjutnya terkait dengan capaian indikator Persentase Koperasi aktif dapat diketahui terdapat 683 koperasi, dimana dari jumlah tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 hal, yaitu :

Koperasi aktif sejumlah 475 ; Koperasi tidak aktif sejumlah 208. Adapun sebuah koperasi dinyatakan sebagai koperasi aktif adalah apabila koperasi tersebut dalam 3 tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat. Adapun perbandingan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 135 Perbandingan Jumlah Usaha Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Koperasi	Koperasi Aktif	Koperasi Tidak aktif
1	2017	654	462	192
2	2018	666	462	204
3	2019	672	468	204
4	2020	686	482	204
5	2021	703	499	204

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Pelaksanaan pembangunan urusan koperasi dan usaha Mikro diarahkan pada pencapaian sasaran dengan indikator antara lain jumlah koperasi, jumlah anggota, volume usaha koperasi, laba usaha, bantuan modal kepada UM dan Koperasi dan Jumlah UM dan koperasi yang dibina/dilatih. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Untuk Usaha Mikro yakni memiliki modal usaha sampai paling banyak Rp. 1.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jumlah usaha mikro dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 136 Jumlah Usaha Mikro Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Usaha Mikro	Kelompok	25.241	25.391	25.611	25.894	37.502

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2021

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Usaha Mikro di 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal tersebut dapat terlihat pada tahun

2017 usaha mikro sebesar 25.241. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 150 Usaha Mikro menjadi 25.391. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2019 sebesar 220 Usaha Mikro sehingga menjadi 25.611 dan terus berlanjut pada Tahun 2020 dengan kenaikan sejumlah 283 Usaha Mikro menjadi 25.894, dan meningkat pesat pada tahun 2021 menjadi 37.502. Adapun Capaian indikator untuk urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 137 Capaian indikator urusan Koperasi & UKM di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Koperasi	654	666	659	686	703
2	Jumlah anggota	122.145	75.736	59.180	51.925	76.319
3	Volume usaha koperasi	97.441.507	313.251.194.526	317.100.275.896	1.095.479.656.697	1.179.654.828.046
4	Laba usaha	3.411.664.500	10.225.081.560	10.225.081.56	9.741.341.465	14.661.968.656
5	Bantuan modal kepada UKM dan Koperasi	1.541.500.000	0	1.407.000.000	17.691.479.000	12.237.500.000
6	Jumlah UM yang dibina/dilatih	2.702	324	2.830	1.525	1.440
7	Jumlah koperasi yang dibina/dilatih	654	666/300	667/200	668/200	608
8	Koperasi Aktif	462	462	468	482	499
9	Koperasi Pasif	192	204	204	204	204
10	Koperasi Wanita	293	221	221	221	221

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2021

12. Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (multiplier effect) yang dapat menimbulkan dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian.. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih kompetitif di era perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan persaingan yang semakin ketat. Pemerintah Daerah terus berbenah melakukan regulasi melalui kebijakan-kebijakan yang intinya diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar.

Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah perusahaan yang di dalamnya terdapat kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau yang biasa disebut dengan PT merupakan bentuk entitas bisnis yang paling banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas bisnis di Indonesia. Bentuk ini dianggap memiliki dasar hukum yang paling jelas dan dianggap sebagai salah satu pilihan utama untuk para investor asing yang ingin mengembangkan bisnis. Berikut ditampilkan Nilai Investasi PMA, Nilai Investasi PMDN dan Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Penanaman Modal di Kabupaten Lumajang.

Tabel 2. 138 Nilai Investasi PMA, PMDN dan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Investasi PMA	Rp (Juta)	39.826,5	670	38.314,5	1.991,5	1.384,14
2	Nilai Investasi PMDN	Rp (Juta)	N/A	653,39	25.114,8	172.293,4	59.891,10
3	Indeks Kepuasan Masyarakat sektor penanaman	Indeks	81,42	81,48	86,13	86,33	86,59

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	modal						

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai investasi PMA Kabupaten Lumajang mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2021, namun perbedaan yang cukup terlihat pada tahun 2021 yaitu terjadi penurunan sebesar 607,36 juta diikuti dengan indikator investasi PMDN di Kabupaten Lumajang yang ikut mengalami penurunan drastis sebesar 112.402,3 juta, sehingga hanya menjadi 59.891,10 jt pada tahun 2021.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Pembinaan pemuda secara terus menerus dan berkesinambungan dilakukan untuk membentuk generasi yang berkepribadian, mandiri, tangguh, berkualitas, terampil, berdaya saing, sehat fisik maupun mental. Pembinaan generasi muda diarahkan pada kegiatan inovatif, edukatif, rekreatif, dan sosial ekonomi produktif, olah raga serta kegiatan organisasi pemuda keagamaan.

Prestasi pemuda yang berhasil diraih meliputi bidang kepemudaan dan bidang olahraga. Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan pembinaan kepada semua pemuda yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah. Berikut ditampilkan data jumlah atlet dan pemuda yang berprestasi yang dibina di Kabupaten Lumajang:

Tabel 2. 139 Jumlah Atlet dan Pemuda Yang Berprestasi 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Atlet yang Berprestasi	Orang	N/A	70	144	63	110
2	Jumlah Pemuda yang Berprestasi	Orang	N/A	75	76	4	3

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lumajang, 2020

Data pada tabel di atas menunjukkan Tahun 2017 belum ada data pemuda dan atlet yang berprestasi. Kemudian di Tahun 2018 terdapat 70 Orang atlet berprestasi dan 75 orang pemuda berprestasi. Terjadi penambahan di Tahun 2019 menjadi 144 Orang atlet berprestasi dan 76 Orang pemuda yang berprestasi.

Namun di Tahun 2020 terdapat penurunan pada atlit berprestasi menjadi 63 orang dan pemuda berprestasi menjadi 4 Orang. Peningkatan kembali terjadi di tahun 2021 yaitu menjadi 95 atlet dengan 3 pemuda

Kemudian hasil analisa Persentase Atlet dan Pemuda Yang Berprestasi di Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 140 Persentase Atlet dan Pemuda Yang Berprestasi 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Atlet dan Pemuda yang Berprestasi	Orang	75,1	53,3	80,9	25	40,4

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui tahun 2017 persentase atlet dan pemuda yang berprestasi sebesar 75,1% dan menurun menjadi 53,3% di Tahun 2018. Peningkatan kembali terjadi di Tahun 2019 menjadi 80,9% dan merupakan kenaikan tertinggi. Namun penurunan drastis kembali terjadi di Tahun 2020 menjadi 25%. Hal ini dipengaruhi kondisi Pandemi Covid 19 yang menyebabkan penyelenggaraan kejuaraan olah raga dan pengiriman atlet dalam ajang kejuaraan olah raga tidak dapat terlaksana. Pencapaian ini kembali meningkat di 2021 sebesar 40,4%

14. Urusan Statistik

Data statistik adalah sangat vital dalam perencanaan pembangunan. Dari data statistik diperoleh banyak informasi tentang potensi, peluang, kekuatan dan kelemahan suatu daerah sehingga dapat dilakukan pengambilan keputusan dalam merencanakan tindakan yang tepat. Oleh karena itu, validitas dan kontinuitas data statistik menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan pembangunan.

Untuk mencukupi data statistik dasar, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menjalin kerjasama dalam menyediakan data dasar (Lumajang dan Kecamatan Dalam Angka serta PDRB Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk data sektoral dihimpun dan dikelola melalui Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD) yang terkoneksi dengan Kementrian Dalam Negeri yang berisi lebih dari 3.000 jenis data.

Tabel 2. 141 Persentase Data Statistik Yang Terintegrasi Di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase data statistik yang terintegrasi	%	N/A	N/A	27,02	43,24	56,75

Sumber : Diskominfo Kab Lumajang, 2020

Tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tidak ada data terkait indikator persentase data statistik yang terintegrasi, karena di tahun tersebut belum dilakukan pengelolaan data kinerja dan mulai diimplementasikan di tahun 2018, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023.

Data kinerja terlihat pada tahun 2018 dari angka 27,02% naik menjadi 43,24% di tahun 2019, dan mengalami kenaikan lagi menjadi 56,75% di tahun 2020. Hal tersebut sebanding dengan semakin naiknya indeks SPBE di tahun yang sama.

15. Urusan Persandian

Urusan Persandian di selenggarakan oleh Dinas Kominfo, dengan tujuan:

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah terdapat Aspek dan Indikator Kinerja Urusan Persandian yakni Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah. Adapun capaian dari Aspek dan indikator kinerja tersebut sebagai berikut :

Tabel 2. 142Capaian indikator Urusan Persandian Di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	N/A	100	100	100	100

Sumber : Diskominfo Kab Lumajang, 2020

Tahun 2017 tidak ada data terkait indikator urusan persandian, karena di tahun tersebut belum dilakukan pengelolaan data kinerja dan mulai diimplementasikan di tahun 2018, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023. Selanjutnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 untuk indikator Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah telah menyajikan realisasi kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Perangkat Daerah telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

16. Kebudayaan

Dalam bidang Seni Budaya, telah dilakukan upaya dalam rangka pelestarian dan pengembangan potensi seni budaya daerah melalui berbagai kegiatan kesenian, seperti gelar seni budaya daerah, festival seni budaya daerah hingga kegiatan-kegiatan festival seni budaya ditingkat regional serta pembinaan para pelaku seni hingga berhasil mencapai beberapa prestasi seni budaya di tingkat regional.

Penyelenggaraan festival seni budaya dari tahun ketahun semakin turun, tapi secara kualitas terus di tingkatkan dan mulai fokus kepada seni budaya asli lumajang yang ikonik dan perlu dilestarikan. Sedangkan semua peninggalan sejarah terus dipelihara agar terawat dengan baik dan menjadi warisan penting sejarah lumajang.

Selanjutnya Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Lumajang terdiri Unsur Benda Cagar Budaya sebanyak 86 jenis, Unsur Situs Cagar Budaya sebanyak 19 jenis, Unsur Struktur Cagar Budaya sebanyak 30 jenis, Unsur Bangunan Cagar Budaya sebanyak 16 Jenis dan Unsur Kawasan Cagar Budaya sebanyak 3 Jenis. Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melindungi Cagar Budaya sebagaimana yang tertuang dalam

Undang undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang Struktur Cagar Budaya yang dipelihara pada tahun sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 143 Cagar Budaya yang dipelihara Tahun 2021 di Kabupaten Lumajang

No	Cagar Budaya	Alamat	Bentuk Pemeliharaan
1	Monumen Bambu Runcing	Randuagung	Kebersihan
2	Monumen Meleman Lautan Api	Wotgalih/yosowilangun	Kebersihan
3	Monumen BOM	Pronojiwo	Kebersihan
4	Monumen Kompi Slamet Wardoyo	Sumbermujur	Kebersihan
5	Monumen Serangan Umum Pasirian	Pasirian	Kebersihan
6	Monumen kapt. Kyai ilyas	Banjarwaru	Kebersihan
7	Monumen Peta	Rowobujel	Kebersihan
8	monumen Peta pasirian	Pasirian	Kebersihan
9	Monumen Pertempuran	Pasirian	Kebersihan
10	Monumen Prajurit Miftah	Candipuro	Kebersihan
11	Monumem Batalyon Tunggeng	Pasrujambe	Kebersihan
12	Monumen Gugurnya Prajurit Sapari dan Kusnan	Candipuro	Kebersihan
13	Monumen Joeang POLRI	Candipuro	Kebersihan
14	Monumen Gladak Perak	Candipuro	Kebersihan
15	Situs Biting	Kutorenon	Kebersihan
16	Situs Candi Agung	Randuagung	Kebersihan
17	Situs Gedong Putri	Candipuro	Kebersihan

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lumajang, 2021

Sedangkan untuk capaian Kebudayaan di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 144 Capaian Kebudayaan tahun 2017 – 2021 Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
-----------	--------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	35 kali	29 kali	7 kali	0	0
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	6 buah	5 buah	N/A	N/A	N/A
3	Benda, Situs, Monumen dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lumajang, 2021

Ke depan, upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah akan terus ditingkatkan utamanya dalam rangka mengangkat potensi sumber daya manusianya sebagai pelaku seni serta adanya fasilitas yang dapat digunakan dalam rangka berinteraksi dan berkreasi di bidang seni budaya daerah.

Selain itu, Pengembangan nilai budaya dan pengelolaan keragaman serta kekayaan budaya dapat dilihat berdasarkan perkembangan jumlah desa yang masih melestarikan adat budaya setempat, jumlah kelompok seni budaya yang dikembangkan dan jumlah kelompok seniman yang mengikuti festival seni dan budaya daerah baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional serta peningkatan jumlah sarana prasarana kesenian dan kebudayaan daerah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang terus mendorong pelestarian budaya daerah yang hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai luhur budaya daerah yang antara lain tercermin dalam berbagai upacara adat dan tradisi budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat di Kabupaten Lumajang.

Tabel 2. 145 Persentase Cakupan Pelestarian Budaya Di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Cakupan Pelestarian Budaya	%	9,75	12,71	13,56	13,56	13,56

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Indikator Persentase cakupan pelestarian budaya pada Tahun 2017 sebesar 9,75% dan mengalami kenaikan di Tahun 2018. Sebesar 12,71 dan pada tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 meningkat dan konstan pada angka sebesar 13,56%

17. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai salah satu media pembelajaran maupun media transfer pengetahuan berperan dalam mencerdaskan masyarakat dan menciptakan sumber daya manusia berkualitas, karena perpustakaan dapat menjadi pusat kegiatan belajar mandiri yang dapat membantu masyarakat dalam belajar, tanggap dengan kemajuan berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial politik. Hasil analisis capaian terbagi menjadi persentase lembaga pemerintahan yang memiliki perpustakaan dan persentase pengunjung perpustakaan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 146 Capaian Perpustakaan Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Lembaga Pemerintah yang memiliki perpustakaan	%	N/A	N/A	59,42	28,37	24,64
2	Persentase Pengunjung Perpustakaan	%	N/A	N/A	49,63	2,60	1,54

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang, 2020

Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 tidak ada data terkait indikator capaian perpustakaan, karena di tahun tersebut belum dilakukan pengelolaan data kinerja tersebut karena Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023 mulai diimplementasikan di tahun 2018. Selanjutnya capaian indikator persentase lembaga yang memiliki perpustakaan dan persentase pengunjung perpustakaan baru terlihat pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada Persentase Lembaga Pemerintah yang memiliki perpustakaan menjadi sebesar 24,64 pada tahun 2021 dari , 28,37% di tahun 2020 dan dari 59,42% di tahun 2019 dan Persentase Pengunjung Perpustakaan menjadi 1,54 pada tahun 2021, 2,60% di tahun 2020 dari 49,63% di tahun 2019.

Pelaksanaan pembangunan urusan perpustakaan diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang tentang peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya perpustakaan, meningkatkan

minat baca untuk mensukseskan pendidikan sepanjang hayat. Berikut koleksi buku di Perpustakaan Kabupaten Lumajang :

Tabel 2. 147 Koleksi Buku Di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Uraian	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Koleksi Buku	Eksemplar	91.358	93.666	97.419	97.419	97.419

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang, 2021

Data koleksi buku di Kabupaten Lumajang di Tahun 2017 sejumlah 91.358 eksemplar terus mengalami penambahan sampai dengan Tahun 2018 menjadi 93.666 eksemplar, meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 97.419 eksemplar, sedangkan Tahun 2020 dan tahun 2021 tidak terdapat penambahan buku.

Tabel 2. 148 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Di Kabupaten Lumajang 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Tingkat Kegemaran membaca Masyarakat	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak disajikan capaian dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 karena indikator ini merupakan indikator baru sehingga belum dilakukan penghitungan kinerja.

18. Kearsipan

Pembangunan urusan kearsipan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 - 2020, dengan indikator jumlah lembaga/instansi yang arsip inaktifnya diakuisisi, jumlah

berkas arsip inaktif yang terkelola, jumlah petugas pengelola arsip yang dilatih.

Pengelolaan arsip secara profesional akan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan penyelamatan dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 149 Capaian Persentase tingkat Ketersediaan arsip daerah di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase tingkat Ketersediaan arsip daerah	%	N/A	N/A	48,80	50,12	75

Sumber : Disarpus Kab. Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Persentase tingkat ketersediaan arsip daerah di kabupaten Lumajang baru disajikan di tahun 2019 dan 2020, hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 sampai dengan 2018 indikator Persentase tingkat Ketersediaan arsip daerah belum digunakan. Dari data realisasi tahun 2019 sebesar 48,80% dan tahun 2020 sebesar 50,12% kemudian meningkat di tahun 2021 sebesar 75%

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan alam sangat besar dan beragam. Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Adapun sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari species ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Pemanfaatan sumber daya perikanan di Kab. Lumajang dapat dilihat pada tabel perkembangan produksi perikanan tahun 2017-2021 berikut.

Tabel 2. 150 Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2017-2021

Uraian	Produksi (dalam Ton)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Penangkapan :					
• Laut	4.847,45	5.018,97	5.150,90	5.517,409	5.656,56
• Perairan umum	692,05	732,45	716,77	750,598	772,40
Jumlah	4.917,8	5.751,42	5.867,67	6.268,01	6.428,96
Budidaya :					
• Tambak	893,15	831,40	821,50	814,00	833,00
• Inbudkan/kolam dan Keramba	2.298,49	2.354,02	2.463,10	2.552,10	2.622,14
Jumlah	3191,64	3.185,42	3.464,60	3.366,10	3.455,14
TOTAL	8.109,44	8.936,84	9.332,27	9.634,11	9.884,10

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang, 2021

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan dari tahun 2017 hingga 2021 perkembangan produksi perikanan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Produksi perikanan tangkap dari tahun 2020 sebesar 6.268,01 ton naik menjadi 6428,96 ton pada tahun 2021. Sedangkan produksi budidaya dari tahun 2020 sebesar 3.464,60 ton naik menjadi 3.366,10 ton pada tahun 2021. Sehingga secara keseluruhan produksi perikanan tahun 2020 sebesar 9.332,27 ton naik menjadi 9.634,11 ton, hal tersebut tentunya berdampak positif dan cukup signifikan terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja perikanan dan pendapatan petani ikan. Pengembangan SDM di bidang perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan.

Tantangan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan saat ini yaitu (1) struktur armada penangkapan ikan masih didominasi skala kecil dan tradisional, (2) pemanfaatan potensi perikanan budidaya masih terkendala dengan tata ruang dan biaya produksi yang tinggi, (3) ketersediaan bahan baku yang tidak stabil untuk mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan (4) akses permodalan untuk peningkatan skala usaha, (5) daya saing dan mutu produk perikanan untuk ekspor yang masih perlu ditingkatkan (6) sarana prasarana pendukung di daerah belum seluruhnya memadai seperti pelabuhan perikanan, balai benih, pertambakan garam dan budidaya ikan, dan lain lain, dan (7) degradasi ekosistem, perubahan iklim dan cuaca ekstrim.

Tabel 2. 151 Capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai PDRB sub sektor perikanan	Rp (Juta)	476,9	481,8	474,2	470,5	468,71

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan tiap tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2022 cenderung fluktuatif (naik turun). Realisasi nilai PDRB sub sektor perikanan Kabupaten Lumajang tertinggi pada tahun 2018 yakni 481,8 juta. Namun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 Realisasi nilai PDRB sub sektor perikanan Kabupaten Lumajang terus mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19.

2. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menunjukkan tren peningkatan dalam PDRB. Pengembangan sektor pariwisata dapat mendorong perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta menyerap lebih banyak tenaga kerja. Karakteristik wilayah, sumber daya alam, seni dan budaya merupakan potensi bagi pengembangan pariwisata khususnya destinasi pariwisata regional, nasional dan internasional. Pada tahun 2019 tercatat jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 3.608.467 orang (Wisnu = 3.598.474; Wisman = 9.993)

Pada tahun 2021, jumlah penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sektor pariwisata sebesar Rp. 9.909.400.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Capaian ini naik jauh dari tahun 2020 yang sebesar Rp. 4.691.732.945, (empat milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah). Capaian dimaksud dibentuk dari 4 (empat) hal yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Adapun untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 152 Jumlah PAD sektor Pariwisata

Indikator Kinerja	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah PAD sektor Pariwisata	-	8.285.014 .724	9.549.173. 020	4.691.732. 945	9.909.400. 000

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Lumajang, 2021

Kepariwisata dapat dijadikan sebagai katalisator dalam menggalakkan pembangunan perekonomian karena memberikan dampak terhadap perekonomian di negara yang dikunjungi wisatawan. Seperti halnya dengan sektor lainnya, pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian di suatu daerah atau negara tujuan wisata.

Dari tahun 2017-2021 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lumajang mengalami puncaknya pada tahun 2019, baik wisatawan Nusantara maupun Mancanegara, dan pada tahun 2021 karena pandemi covid-19 yang berefek pada sektor pariwisata menyebabkan turunnya jumlah wisatawan secara drastis, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 153 Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	3.250.890	3.597.712	3.767.712	821.327	379.748
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	7.480	9.993	10.054	3.678	0

Sumber Data : BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Dari data diatas dapat dilihat, bahwa pada tahun 2017 jumlah wisatawan nusantara mencapai 3.250.890 orang dan terus meningkat sampai pada tahun 2019 mencapai 3.767.712 orang. Begitu juga jumlah wisatawan mancanegara di tahun 2017 yang semula berjumlah 7.480 orang meningkat menjadi 10.054 orang di tahun 2019. Akibat pandemi yang berefek pada sektor pariwisata pada tahun 2021 menyebabkan turunnya jumlah kunjungan wisatawan, baik wisata mancanegara maupun nusantara yang mencapai 379.748 orang yang didominasi oleh wisatawan lokal Lumajang.

3. Pertanian

Sebagai salah satu daerah dengan hasil PDRB pertanian yang tinggi, Kabupaten Lumajang memiliki keunggulan daerah dalam bidang pertanian. Tanaman hortikultura tanaman pangan dan perkebunan seperti padi, pisang, ubi jalar, kopi menjadi keunggulan Kabupaten Lumajang. Tingkat produktifitas lahan serta hasil panen membuat Kabupaten Lumajang sangat diuntungkan.

Pelaksanaan pembangunan urusan pertanian diarahkan untuk pencapaian sasaran dengan indikator antara lain meningkatnya produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan. Untuk produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 154 Jumlah produksi dan produktivitas dalam tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Luas panen	Produksi	Produktivitas	Luas panen	Produksi	Produktivitas
		(Ha)	(Kw)	(Kw/Ha)	(Ha)	(Kw)	(Kw/Ha)
1	Padi	79.159	4.881.825	61,67	78.093	4.816.728	61,68
2	Jagung	16.458	935.888	56,87	16.763	978.112	58,35
3	Kedelai	320	4.547	14,21	198	2.892	14,61
4	Kacang tanah	119	1.526	12,82	149	2.122	14,24
5	Ubi kayu	25	5.897	235,88	18	5.360	297,78
6	Kacang hijau	38	646	17	15	180	12
7	Ubi Jalar	411	93.362	227,16	411	97.120	236,30
Total		96.530	5.932.691	61,46	95.647	5.902.514	61,71

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lumajang Tahun 2020 dan 2021

Realisasi produktivitas tanaman pangan padi tahun 2020 sebesar 61,67 kw/hektar meningkat sebesar 0,01 kw/ha pada tahun 2021 menjadi 61,68 kw/hektar. Bertambahnya Luas Tambah Tanam (LTT) yang merupakan salah satu program Kementerian Pertanian secara signifikan juga menambah jumlah produksi tanaman padi.

Tabel 2. 155 Persentase Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Hortikultura Khususnya Buah-Buahan Dominan

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Luas panen	Produksi	Produktivitas	Luas panen	Produksi	Produktivitas
		(Ha)	(Kw)	(Kw/Ha)	(Ha)	(Kw)	(Kw/Ha)
1	Pisang	5.706,47	1.106.399	193,59	6.476,76	1.231.218	190,10
2	Manggis	131,35	5.699	43,38	229,80	6.728	29,28
3	Durian	363,90	37.579	103,27	198,99	18.233	138,80
4	Rambutan	708,36	56.027	79,09	665,51	52.539	78,95
5	Alpukad	341,91	27.612	80,75	306,22	30.217	98,67
6	Nangka	375,49	31.632	84,24	413,91	36.131	87,29
7	Jeruk Siam	380,65	143.966	378,21	472,12	144.995	307,11
TOTAL :		8.008,13	1.406.914	175,68	8.763,31	1.520.061	173,46

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lumajang Tahun 2020 dan 2021

Tabel 2. 156 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura 2020-2021

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Luas panen	Produksi	Produktivitas	Luas panen	Produksi	Produktivitas
		(Ha)	(Kw)	(Kw/Ha)	(Ha)	(Kw)	(Kw/Ha)
1	Kentang	721	94.676	131,31	912	118.895	130,37
2	Bawang Daun	1.272	159.847	125,67	1.388	174.057	125,40
3	Kobis	487	123.721	254,05	502	127.811	254,60
4	Cabe Rawit	3.021	211.459	69,99	2.071	126.321	60,99
TOTAL		5.501	589.703	107,20	4.873	547.084	112,27

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lumajang Tahun 2020 dan 2021

Perbandingan target dan realisasi jumlah produksi dan produktivitas Tanaman Perkebunan pada tahun 2020 dan 2021, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 157 Produksi dan Produktivitas Perkebunan Tahun 2020 – 2021

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Luas panen	Produksi	Produktivitas	Luas panen	Produksi	Produktivitas
		(Ha)	(Kw)	(Kw/Ha)	(Ha)	(Kw)	(Kw/Ha)
A Tanaman semusim							
1	Tebu	13.292	10.926.024	82,210	13.290	10.928.370	822,30
2	Tembaku	769,2	6.080	7,90	337	2.117,0	6,28
JUMLAH:		14.061,2	10.932.104	777,47	13.627	10.930.487	802,12
B Tanaman tahunan							
1	Kopi	3.570	12,638	3,54	3,468	12.336,9	3,56
2	Kelapa	7.216	82.984	11,5	7.132	82.374,6	11,55
3	Cengkeh	835	2.254,5	2,7	807	2.219,3	2,75
4	Kakao	216	907	4,20	211	886	4,20
5	Pinang	235	911	3,88	224	806	3,60
JUMLAH:		12.072	99.694,5	8,25	11.842	98.622,8	8,33
TOTAL		26.133,2	11.031,798,5	422,14	25.469	11.029.109,8	433,04

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Lumajang Tahun 2020 dan 2021

Selanjutnya pada urusan pertanian sub peternakan, potensi sumber daya lahan di Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 dapat menampung 239.975 ekor ternak besar, 640.934 ekor ternak kecil dan 73.886 ekor ternak unggas. Sementara dari populasi yang ada relatif masih mungkin untuk dikembangkan. Atas dasar kondisi, peluang dan tantangan tersebut, untuk pemenuhan terhadap komoditi hasil ternak khususnya daging sapi masih dapat terus dioptimalkan melalui berbagai implementasi program/kegiatan pada urusan pertanian sub urusan peternakan yaitu Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib

Bunting (UPSUS SIWAB). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 158 Perbandingan Realisasi Populasi Ternak Tahun 2017 – 2021

JENIS		2017	2018	2019	2020	2021
		Ekor	Ekor	Ekor	Ekor	Ekor
a	Ternak besar :	213.870	221.110	226.284	234.187	239.975
	1 Sapi potong	203.044	208.242	212.673	221.172	225.394
	2 Sapi perah	5.005	6.390	6.944	7.308	7.462
	3 Kerbau	4.817	5.312	5.447	5.707	5.836
	4 Kuda	1.004	1.166	1.220	1.273	1.283
b	Ternak kecil :	152.245	164.040	168.764	180.013	640.934
	1 Kambing	103.658	111.657	114.533	121.591	73.886
	2 Domba	45.829	49.616	52.508	55.624	565.746
	3 Babi	2.758	2.767	1.723	2.798	1.302
c	Unggas :	14.446.34 8	15.330.18 4	6.272.71 9	14.830.52 8	13.091.18 6
	1 Ayam buras	1.343.244	1.754.937	1.758.09 9	1.848.606	2.173.536
	2 Ayam ras petelur	838.409	836.380	847.330	873.009	283.176
	3 Ayam ras pedaging	11.947.74 3	12.421.37 5	3.347.88 5	11.748.19 4	10.399.26 6
	4 Itik	316.952	317.492	319.405	360.719	235.211

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Lumajang Tahun 2021

4. Energi dan Sumber daya Mineral

Secara umum potensi tambang dan energi di Kabupaten Lumajang cukup besar, baik dari sisi jumlah cadangan yang ada dan banyaknya aktivitas pemanfaatan di sektor pertambangan dan energi. Sejak dahulu Kabupaten Lumajang dikenal sebagai daerah penghasil pasir berkualitas tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kegiatan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur yang menggunakan pasir Lumajang sebagai bahan baku bagi

proyek di tingkat daerah maupun nasional. Namun demikian sektor pertambangan pasir ini masih perlu ditingkatkan pengelolaannya dalam upaya meningkatkan nilai manfaat bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat lumajang dan juga pengawasan serta pemantauan agar tidak menimbulkan dampak bagi Lingkungan. Berikut disajikan jumlah produksi komoditas tahun 2017-2021 pada table 2.197.

Tabel 2. 159 Jumlah Produksi Komoditas tahun 2017-2021

No	Komoditas	Jumlah Produksi (Ton)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pasir dan kerikil	906.054	N/A	583.949	1.108.512	1.604.004
2	Batu Kali	73.022	N/A	28.993	110.216	127.302
3	Tanah Urug	83.525	N/A	57.325	343.936	30.655

Sumber : BPS dan Adm. ESDA Perekonomian, Kab. Lumajang, 2021

Tabel 2. 160 Produksi Hasil Tambang Galian C Tahun 2017- 2021

Tahun	Satuan	Jumlah Produksi
2017	ton	1.062.600
2018	ton	1.987.923
2019	ton	2.352.876
2020	ton	1.562.664
2021	ton	1.797.961

Sumber : Bagian Adm. ESDA dan Perekonomian Setda Kab. Lumajang 2021

Dari data tersebut, pada tahun 2017 hingga 2021 hasil galian C Kabupaten Lumajang sempat mengalami kenaikan dan memperoleh jumlah produksi tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2.352.876 ton. Namun pada 2020 mengalami penurunan menjadi 1.562.664 pada tahun 2020, galian C mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 33,5%. Namun pada tahun 2021 produksi Galian C kembali mengalami kenaikan menjadi 1.797.961 ton.

Selanjutnya berkaitan dengan pemanfaatan energi listrik sampai dengan tahun 2021 dari keseluruhan jumlah Desa dan kelurahan sebanyak 205 Desa dan Kelurahan yang telah teraliri

jaringan listrik sebanyak 205 Desa dan Kelurahan mencapai 100%.

Tabel 2. 161 Persentase desa yang teraliri Listrik di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase desa yang teraliri listrik	%	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kab. Lumajang, 2021

Disamping upaya penyediaan energi listrik yang berasal dari PLN, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga berupaya untuk menyediakan listrik untuk masyarakat yang tidak terjangkau layanan listrik PLN melalui Pembangunan Energi Skala Kecil, yaitu dengan menggunakan listrik tenaga surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang merupakan alternatif dengan menggunakan teknologi sederhana untuk menghasilkan sumber energi dengan kemampuan output di bawah 500 KW dan pemanfaatan energi biogas dengan memanfaatkan kotoran sapi.

5. Perdagangan

Berdasarkan potensi daerah maka bidang perdagangan merupakan sektor unggulan dan merupakan penyumbang kontribusi kedua terhadap pertumbuhan ekonomi daerah setelah sektor pertanian. Pembangunan perdagangan sebagai salah satu kegiatan di bidang ekonomi mempunyai peran strategis dalam mendukung upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang sangat cukup berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan dalam kerangka pembangunan daerah.

Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan antara lain melalui pembenahan dan pembangunan pasar tradisional serta pembinaan terhadap pelaku usaha juga menjadi prioritas, agar para pengusaha dapat memperluas jaringan dan pemasaran, baik di dalam maupun di luar negeri.

Tabel 2. 162 Pasar Yang Dikelola Dinas Perdagangan

No	Nama Pasar	Lokasi Kecamatan	Kondisi
1	Pasar Baru	Lumajang	Baik
2	Pasar Plaza	Lumajang	Baik
3	Pasar Klojen	Lumajang	Baik
4	Pasar Senduro	Senduro	Baik
5	Pasar Sukodono	Sukodono	Baik
6	Pasar Dawuhan	Sukodono	Cukup
7	Pasar Gucialit	Gucialit	Tidak Baik
8	Pasar Senggol	Lumajang	Baik
9	Pasar Toga	Lumajang	Baik
10	Pasar Serangin	Lumajang	Baik
11	Pasar Klakah	Klakah	Baik
12	Pasar Wateswetan	Ranuyoso	Tidak Baik
13	Pasar Randuagung	Randuagung	Tidak Baik
14	Pasar Nogosari	Rowokangkung	Cukup
15	Pasar Tekung	Tekung	Tidak Baik
16	Pasar Pasirian	Pasirian	Baik
17	Pasar Candipuro	Candipuro	Baik
18	Pasar Pronojiwo	Pronojiwo	Baik
19	Pasar Yosowilangun	Yosowilangun	Cukup
20	Pasar Tempeh	Tempeh	Tidak Baik
21	Pasar Kunir	Tempeh	Cukup
22	Pasar Agropolitan	Senduro	Baik
23	Pasar Hewan Jogotrunan	Lumajang	Baik
24	Pasar Hewan Condro	Pasirian	Cukup
25	Pasar Hewan Klakah	Klakah	Tidak Baik
26	Pasar Hewan Krai	Yosowilangun	Baik

No	Nama Pasar	Lokasi Kecamatan	Kondisi
27	Pasar Hygienis	Lumajang	Baik
28	Pasar Artagama	Lumajang	Tidak Baik
29	Pasar M.K.S	Lumajang	Tidak Baik
30	Pasar Damai	Lumajang	Tidak Baik

Sumber : Dinas Perdagangan Kab. Lumajang tahun 2021

Untuk melihat aktivitas perdagangan secara umum di suatu daerah dapat menggunakan tolok ukur ekspor bersih. Ekspor bersih sama dengan ekspor dikurangi impor. Ekspor mewakili pembelian orang asing untuk barang dan jasa dalam negeri. Impor adalah pembelian produk dan layanan asing oleh konsumen lokal. Ekspor bersih ini juga dikenal sebagai neraca perdagangan. Nilai ekspor bersih Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada table di bawah, baik di ukur dari ADHB maupun ADHK.

Tabel 2. 163 Ekspor Bersih PerdaganganADHB (Net Ekspor Barang dan Jasa)

No	Tahun	Satuan	Nilai Ekspor Barang dan Jasa Bersih	Naik/turun
1	2017	Rupiah	208.182,66	Turun
2	2018	Rupiah	19.462,83	Turun
3	2019	Rupiah	24.266,06	Naik
4	2020	Rupiah	123.048,70	Naik
5	2021	Rupiah	N/A	N/A

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020

Dari data ekspor bersih ADHB di atas, nilainya terus mengalami penurunan Rp 208.182,66 Juta di tahun 2017 selanjutnya mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 123.048,70 Juta.

Tabel 2. 164 Ekspor BersihPerdaganganADHK (Net Ekspor Barang dan Jasa)

No	Tahun	Satuan	Nilai Ekspor Barang dan Jasa Bersih	Naik/Turun
1	2017	Rp (juta)	257.548,28	Naik

2	2018	Rp (juta)	302.275,23	Naik
3	2019	Rp (juta)	401.784,35	Naik
4	2020	Rp (juta)	462.739,77	Naik
5	2021	Rp (juta)	275.123,29	Turun

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2021

Dari data ekspor bersih ADHK di atas, nilainya terus mengalami kenaikan mulai dari tahun 2017 Rp 257.548,28Juta hingga tahun 2021 menjadi 275.123,29 Juta.

Selanjutnya berikut akan dijelaskan realisasi kinerja Nilai PDRB sektor Perdagangan dan Nilai Pendapatan Per kapita di kabupaten Lumajang :

Tabel 2. 165 Capaian Nilai PDRB sektorperdagangan dan Nilai Pendapatan per kapita diKabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai PDRB sektor perdagangan	Rp (milyar)	2.988.658,3	3.213.655,7	3.431.648,7	3.161.711,2	3.328.270
2	Nilai Pendapatan Per Kapita	Rp (juta)	19,81	20,74	21,64	20,99	20,70

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui realisasi nilai PDRB sektor perdagangan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi. Realisasi selama empat tahun dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 senilai Rp 3.431.648,7 Juta mengalami kenaikan 7% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 yang senilai Rp 3.213.655,7 Juta. Namun pada tahun 2020 realisasi nilai PDRB sektor perdagangan mengalami penurunan sebesar 8% menjadi 3.161.711,2 Juta. Tahun 2021 nilai realisasi PDRB sektor perdagangan mengalami peningkatan sebesar 5,27% menjadi 3.328.270 Juta

Selanjutnya untuk indikator Nilai pendapatan per kapita Kabupaten Lumajang pada tahun 2017–2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Realisasi Nilai Pendapatan Per Kapita pada tahun 2019 tercatat Rp 21,64 Juta dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 20,99 Juta dan tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 20,70 juta.

6. Perindustrian

Arah pelaksanaan pembangunan urusan industri bertumpu pada pencapaian sasaran meningkatnya produk sektor industri dengan indikator pertumbuhan industri dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2. 166 Perkembangan Industri di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Katagori	Unit Usaha	Nilai Investasi (Rp 000,-)	Nilai Produksi (Rp000,-)	Tenaga Kerja
1.	2017	Industri Besar	0	0	0	0
		Indst. Menengah & Kecil	873	305.303.718	1.818.481.729	24,429
		Non Formal	13.122	16.868.997	846.217.094	36,835
Jumlah			13.995	322.172.715	2.664.698.823	61.264
2.	2018	Industri Besar	0	0	0	0
		Indst. Menengah & Kecil	997	345.610.312	2.296.522.401	28.892
		Non Formal	13.850	17.580.222	761.595.385	39.124
Jumlah			14.847	363.190.534	3.058.1717.785	68.016
3.	2019	Industri Besar	0	0	0	0
		Indst. Menengah & Kecil	1.061	346.000.000	2.313.092.691	29.270
		Non Formal	13.900	107.362	78.900.000	39.907
Jumlah			14.961	346.107.362	2.391.992.692	69.177
4.	2020	Industri Besar	0	0	0	0

No	Tahun	Katagori	Unit Usaha	Nilai Investasi (Rp 000,-)	Nilai Produksi (Rp000,-)	Tenaga Kerja
		Indst. Menengah & Kecil	1.106	203.767.290	1.099.857.895	26.684
		Non Formal	12.542	15.653.322	51.454.463	35.036
Jumlah			13.648	219.420.612	1.151.312.358	61.720
5.	2021	Industri Besar	0	0	0	0
		Indst. Menengah & Kecil	1.036	321.998.743	1.309.532.200	24934
		Non Formal	10.071	12.781.777	39.555.618	27815
Jumlah			11.107	334.780.520	1.349.087.818	52.749

Sumber : Dinas Perdagangan Kab. Lumajang 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui perkembangan industri dengan kategori industri besar, industri menengah, industri kecil, dan industri non formal baik dari unit usaha, nilai investasi, nilai produksi, dan tenaga kerja. Mulai dari Tahun 2017-2021 perkembangan industry dengan beberapa kategori mengalami fluktuasi hingga tahun 2021 tercatat capaian perkembangan industri dengan komponen unit usaha mencapai 11.107 unit, pada nilai investasi mencapai Rp 334.780.520.000, pada nilai produksi Rp 1.349.087.818.000, dan tenaga kerja mencapai 52.749 orang.

Pembangunan urusan industri yang dilakukan sampai pada tahun 2021 telah mampu mendorong peningkatan pertumbuhan unit industri, terutama Industri Kecil dan menengah (IKM) maupun industri kerajinan rakyat. Pertumbuhan industri informal dipicu adanya peluang untuk membuka usaha baru utamanya makanan olahan, karena tersedia bahan baku yang melimpah, seperti buah pisang, ubi-ubian, salak dan nangka. Berikut realisasi kinerja indikator Nilai PDRB sektor Industri kabupaten Lumajang :

Tabel 2. 167 Capaian Nilai PDRB Sektor Industri di Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp (Juta)	4.099.401,8	4.490.960	4.836.325,6	4.650.158,8	4.923.084,5

Sumber : BPS Kabupaten Lumajang, 2020 (data diolah)

Realisasi nilai PDRB sektor industri Kabupaten Lumajang pada tahun 2017–2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Realisasi nilai PDRB sektor industri pada tahun 2019 tercatat Rp 4.836.325,6 Juta namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 4.650.158,8 Juta. Dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 menjadi Rp 4.923.084,5 Juta.

7. Transmigrasi

Dengan bertambahnya wawasan, pemahaman dan persepsi masyarakat tentang ketransmigrasian diharapkan minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi juga meningkat. Pada tahun 2015 telah diberangkatkan sebanyak 10 KK dari target sebanyak 40 KK atau 25 persen. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan jumlah penerimaan transmigran di daerah tujuan. Untuk meningkatkan kerjasama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi. Pada tahun 2014 telah direalisasikan perjanjian kerjasama lokasi transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara lokasi penempatan untuk 5 KK calon transmigran dengan lokasi penempatan Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka. Pada tahun 2015 telah direalisasikan perjanjian kerjasama lokasi transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara, lokasi penempatan untuk 10 KK calon transmigran dengan lokasi penempatan UPT Tanjung Buka Kabupaten Bulungan. Berikut dijelaskan data kinerja Persentase penempatan transmigran sesuai standar telah terealisasi di tahun 2018.

Tabel 2. 168 Persentase Penempatan Transmigran Sesuai Standar di Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021

1	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	%	100	100	100	N/A	N/A
---	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : Dinas Ketenaga Kerjaan Kab. Lumajang 2020

Dalam urusan transmigrasi Tahun 2017 sampai dengan 2019 telah berhasil 100 % dalam penempatan transmigran sesuai standar ke beberapa daerah di luar Pulau Jawa. Namun di Tahun 2020 dan 2021 dengan adanya pandemi Covid 19, Kabupaten Lumajang tidak melakukan penempatan transmigran ke luar pulau jawa.

2.1.3.3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Berikut akan ditampilkan capaian indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagai Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020:

Tabel 2. 169 Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kerumahtanggaan	Indeks	70,05	80,66	81,59	90,85	87,42
2	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Keprotokolan	Indeks	73,15	80,66	80,66	81,8	85,73
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadaan Barang /Jasa	Indeks	N/A	N/A	84,77	85,33	87,72
4	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Tata Pemerintahan	Indeks	71,5	81,14	81,59	80,59	86,11

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
5	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perekonomian	Indeks	71,15	86,3	85,66	87,14	87,47
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Indeks	78,95	89,17	83,51	84,45	86,73
7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Persentase Kebijakan yang mendukung penyalangan regulasi, penyederhanaan prosedur, dan menjawab kebutuhan masyarakat	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Sekretariat Daerah Kab Lumajang, 2020

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik. Metode dilakukan dengan survei Indeks Kepuasan Konsumen (IKM) dengan mengambil responden dari masyarakat dan instansi penerima pelayanan publik. Indeks ini diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Untuk Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda Lumajang) seperti Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kerumah tanggaan, Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan Keprotokolan, Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadaan Barang /Jasa, Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perekonomian, Indeks /kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat mengalami kenaikan dalam rentang waktu tahun 2017-2020. Lalu pada Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Tata Pemerintahan mengalami kenaikan pada tahun 2021. Pada indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan SAKIP sesuai dengan ketentuan serta Persentase Kebijakan yang mendukung penyelarasan regulasi, penyederhanaan prosedur dan menjawab kebutuhan masyarakat belum memiliki capaian karena belum dilakukan perhitungan atas indikator tersebut.

2. Sekretariat DPRD

Berikut disajikan Realisasi Kinerja pada Indikator Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi dan Persentase Aspirasi Masyarakat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 :

Tabel 2. 170 Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi 2017–2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi	%	71,07	96,32	68,18	71,43	90,91

Sumber : Sekretariat DPRD Kab Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi pada tahun 2017 sebesar 71,07% dan mengalami kenaikan tahun 2018 dengan capaian sebesar 96,32% sehingga menjadi capaian tertinggi, lalu mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 68,18%, akan tetapi pada tahun 2020 terjadi peningkatan capaian sebesar 71,43%,

pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 90,91%.

Tabel 2. 171 Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi	%	51,38	89,67	100	100	100

Sumber : Sekretariat DPRD Kab Lumajang 2020

Persentase aspirasi masyarakat yang dapat difasilitasi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan capaian. Pada tahun 2017 capaian sebesar 51,38%, dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 89,67%. Terjadi peningkatan capaian sebesar 10,33% pada tahun 2019 sehingga persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi mencapai 100% pada tahun 2019, 2020 dan 2021.

2.1.3.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. RPJMD memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan untuk jangka waktu 5 tahunan. Dalam hal ini, rencana program pembangunan daerah merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Hasil Analisa Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 172 Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam	%	N/A	100	100	100	85

	RKPD						
--	------	--	--	--	--	--	--

Sumber : Bappeda Kabupaten Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD pada tahun 2018,2019 dan 2020 sebesar 100%. Namun untuk tahun 2017 dan 2018 belum dapat disajikan realisasi karena pada tahun tersebut indikator Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD belum digunakan dan belum dilakukan penghitungan capaian kinerja. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 15% menjadi 85%.

2. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah antara lain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah. Kegiatan ini mampu meningkatkan pendapatan asli daerah sebesar 50,12 persen dari Rp 296.467.374.174,37 pada tahun 2019 menjadi Rp 300.258.568.642,77 pada tahun 2020 dan naik kembali pada tahun 2021 sebesar 385,111,173,877,- Kenaikan dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Berikut merupakan Capaian Kinerja Indikator Keuangan Tahun 2017-2020:

Tabel 2. 173 Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD	%	N/A	N/A	100	100	100

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2021

Pada indikator Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD untuk Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 tidak dapat menampilkan capaian kinerja karena pada tahun tersebut belum menggunakan indikator Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan belum dilakukan penghitungan capaian kinerja. Namun pada Tahun 2019, 2020 dan 2021 telah mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa penyampaian Raperda APBD dilaksanakan tepat waktu.

Tabel 2. 174 Persentase Ketepatan waktu penyampaian Perubahan APBD Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Perubahan APBD (P-APBD)	%	N/A	N/A	100	100	100

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2021

Pada indikator Persentase Ketepatan waktu penyampaian Perubahan APBD untuk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 tidak dapat menunjukkan capaian kinerja karena indikator tersebut belum digunakan dan belum dilakukan penghitungan capaian kinerja. Di tahun 2019, 2020 dan 2021 capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian Perubahan APBD dilakukan tepat waktu.

Tabel 2. 175 Persentase Ketepatan waktu penyampaian LKPD kepada BPK RI Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Ketepatan waktu penyampaian LKPD kepada BPK RI	%	N/A	N/A	100	100	100

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2021

Pada indikator Persentase Ketepatan waktu penyampaian LKPD kepada BPK RI Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 tidak dapat menampilkan capaian kinerja karena pada tahun tersebut belum dilakukan penghitungan capaian kinerja. Namun pada Tahun 2019, 2020 dan 2021 telah terdapat capaian 100%, hal ini menunjukkan bahwa penyampaian LKPD kepada BPK RI dilaksanakan tepat waktu.

Tabel 2. 176 Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2017-2021 Kabupaten Lumajang

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
----	-------------------	--------	------	------	------	------	------

1	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD	%	N/A	N/A	100	100	100
---	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, 2021

Pada indikator Persentase Ketepatan waktu penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD untuk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 tidak dapat menunjukkan capaian kinerja karena indikator tersebut belum digunakan dan belum dilakukan penghitungan capaian kinerja. Namun, di tahun 2019, 2020 dan 2021 capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD dilakukan tepat waktu.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) agar kemandirian daerah meningkat. Kemandirian daerah dicerminkan oleh besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sementara pajak daerah merupakan komponen penting dalam PAD. Berikut disajikan Persentase Penerimaan Pajak Daerah dan Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lumajang :

Tabel 2. 177 capaian Kinerja Persentase Penerimaan Pajak Daerah dan Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Lumajang 2017–2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	104,95	103,73	73,1	98,09	90,34
2	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	%	14,19	23,23	11,23	-7,51	18,97

Sumber : BPRD Kab. Lumajang, 2020

Dari tabel di atas digambarkan untuk indikator penerimaan pajak daerah tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Di Tahun 2018 penerimaan pajak sebesar 104,95%, tahun 2018 juga penurunan menjadi 103,33%, penurunan kembali terjadi di tahun 2019 dengan Persentase penurunan semakin besar yaitu mencapai 30,63%. Namun Persentase

penerimaan pajak ini mengalami peningkatan di tahun 2020 hingga 24,99% menjadi 98,09%. Sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 90,34%. Selanjutnya pada Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah juga mengalami fluktuasi, sempat mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar 23,23% namun kembali turun pada tahun 2019 sebesar 11,23%. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2020 hingga mencapai -7,51%, namun di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 18,97%

3. Kepegawaian dan Diklat

Dalam rangka pemenuhan SDM aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, berikut disajikan data jumlah PNS sampai dengan tahun 2021:

Tabel 2. 178 Data Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PNS	Orang	7.977	7.389	7.333	6.755	6.370
2	Jumlah Pejabat Struktural	Orang	856	726	720	695	662
3	Jumlah pejabat fungsional	Orang	5299	6.663	6.613	6.060	5708

Sumber : BKD Kab. Lumajang, 2020

Dari tabel di atas digambarkan bahwa jumlah PNS dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan, misalnya tahun 2017 berjumlah 7.977, pada tahun 2021 turun menjadi 6.370. Untuk jumlah pejabat struktural juga mengalami penurunan, dari 856 pada tahun 2017 menjadi 662 pada tahun 2021. Sedangkan untuk jabatan fungsional mengalami perkembangan fluktuatif dan stabil.

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur adalah dengan mengikutkan pada diklat-diklat yang terkait dan menghadirkan pada bimbingan-bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Berikut akan dijelaskan capaian indikator Kepegawaian dan Diklat :

Tabel 2. 179 Indeks ASN di Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks kualifikasi pendidikan ASN	Indeks	N/A	N/A	12,19	11,71	77,40
2	Indeks Kinerja ASN	Indeks	N/A	N/A	23,35	23,50	84,52
3	Indeks Disiplin ASN	Indeks	N/A	N/A	4,89	4,90	1,1
4	Indeks Kompetensi ASN	Indeks	N/A	N/A	24,23	26,02	78,54

Sumber : BKD Kab Lumajang, 2021

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Pengukuran ini dimaksudkan sebagai acuan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan tujuan agar Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dapat melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara benar. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN mencakup :

a. Dimensi kualifikasi.

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS. Dari data diatas dapat dilihat dari tahun 2019, Indeks kualifikasi pendidikan ASN Kabupaten Lumajang mengalami penurunan dari 12,19 menjadi 11,71 di tahun 2020, dan meningkat menjadi 77,40 di tahun 2021

b. Dimensi kompetensi.

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi

diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis dan Seminar. Dari data diatas dapat dilihat dari tahun 2019, Indeks kompetensi ASN Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dari 24,23 menjadi 26,02 di tahun 2020 dan meningkat menjadi 28,54 di tahun 2021

c. Dimensi kinerja.

Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP).

Dari data diatas dapat dilihat dari tahun 2019, Indeks kinerja ASN Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dari 23,35 menjadi 23,50 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja PNS di Kabupaten Lumajang meningkat terutama pada tahun 2020 walaupun dengan adanya refokusing anggaran dan adanya pandemi Covid-19 tidak mengurangi kinerja ASN dalam bertugas, sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 28,52

d. Dimensi disiplin.

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:

1. Hukuman disiplin ringan;
2. Hukuman disiplin sedang;
3. Hukuman disiplin berat

Dari data diatas dapat dilihat dari tahun 2019, Indeks Disiplin ASN Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dari 4,89 menjadi 4,90 di tahun 2020 dan menurun di tahun 2021 menjadi sebesar 1,1

4. Penelitian Dan Pengembangan

Tabel 2. 180 Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Hasil Inovasi dan Kelitbangan yang Dijadikan Dasar Perencanaan	%	N/A	N/A	90	90	87,77

Sumber: Bappeda Kab. Lumajang, 2021

Pada indikator Persentase Hasil Inovasi dan Kelitbangan yang Dijadikan Dasar Perencanaan untuk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 tidak dapat menampilkan capaian kinerja karena indikator tersebut mulai diimplementasikan di tahun 2019, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023. Realisasi kinerja ini disajikan di Tahun 2019 sebesar 90% dan tidak ada perubahan di Tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 87,77%.

2.1.3.5 Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan

Salah satu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah dengan memastikan bahwa unit kerja telah ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat menuju WBK/WBBM. Predikat tersebut dapat diberikan jika instansi pemerintah telah memiliki komitmen yang kuat dalam membangun zona integritas dengan memperhatikan beberapa syarat yang ditetapkan, yaitu : 1) Dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik; 2) Mengelola sumber daya yang cukup besar, serta 3) Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut. Hasil analisa Jumlah OPD yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK / WBBM ke Kementerian PAN dan RB dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 181 Jumlah OPD yang Diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK/WBBM ke Kementerian PAN dan RB Tahun 2016-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah OPD yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK / WBBM ke Kementerian PAN dan RB	N/A	N/A	2 OPD	14 OPD	1 OPD

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Lumajang, 2021

Pada indikator Persentase Dokumen Kajian yang bisa dimanfaatkan untuk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 tidak dapat menampilkan capaian kinerja karena indikator tersebut mulai diimplementasikan di tahun 2019, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023. Pada tahun 2019 Jumlah OPD yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai WBK/WBBM ke Kementerian PAN dan RB terdapat 2 OPD / unit kerja dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 14 OPD / unit kerja, sedangkan di tahun 2021 menurun menjadi 1 OPD saja yang ditetapkan.

Tabel 2. 182 Persentase OPD dengan maturitasSPIP level 3 Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	%	N/A	N/A	31	31	48

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Lumajang 2021

Tahun 2017 sampai dengan 2018 tidak ada data terkait persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3 hal tersebut karena penilaian maturitas SPIP pada level OPD baru dilaksanakan pada tahun 2019. Jika dilihat Pada tabel berikut realisasi Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3 pada tahun 2019 dan 2020 tercatat tetap yakni sebesar 31%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan 17% menjadi 48%.

Tabel 2. 183 Nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Lumajang 2017 – 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Kapabilitas APIP	Nilai	2	3	3	3	3

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Lumajang 2021

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan Tabel diatas Realisasi Nilai kapabilitas APIP pada tahun 2021, 2020, sama

dengan tahun 2019 dan 2018 yaitu 3. Pada tahun 2017 nilai kapabilitas APIP adalah 2.

Tabel 2. 184 Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Kabupaten Lumajang 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	%	N/A	N/A	86	79	91,17

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Lumajang 2021

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa realisasi persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tahun 2020 capaiannya sebesar 79% mengalami penurunan sebesar 7% dari tahun 2019. Tahun 2017 sampai dengan 2018 tidak ada data terkait Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tahun 2017-2018 merupakan renstra lama dan belum memakai 4 indikator sebagaimana indikator yang terdapat pada tabel. Penilaian pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi baru dilaksanakan oleh KPK pada tahun 2018, namun data capaian 2018 tidak dapat diakses di website KPK karena ada migrasi sistem di KPK.

Tabel 2. 185 Persentase Perangkat Daerah/Unit kerjayang layak ditetapkan sebagai zona integritas menujuWBKberdasarkan self assessment WBK 2017- 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat Daerah / unit kerja yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan Self Assessment WBK	%	N/A	23	26	32	62

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Lumajang 2021

Zona Integritas/Wilayah Bebas Korupsi merupakan miniatur dari Reformasi Birokrasi di tingkat Perangkat Daerah. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada pada tahun 2018 sampai dengan 2020 capaian Persentase Perangkat Daerah /unit kerja yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan *Self Assessment* WBK mengalami kenaikan, pada tahun 2019 capaiannya sebesar 26% dan pada tahun 2020 sebesar 32%. Tahun 2016 dan 2017 tidak ada data terkait Persentase Perangkat Daerah / unit kerja yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK berdasarkan *Self Assessment* WBK. Data dimulai pada tahun 2018 dikarenakan pembinaan Zona Integritas (ZI) baru dimulai pada tahun 2018.

Tabel 2. 186 Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Integritas Pengawasan Minimal 3,5 Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Integritas Pengawasan Minimal 3,5	%	N/A	N/A	N/A	57,63	57,63

Sumber: Inspektorat Daerah Kab. Lumajang 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Integritas Pengawasan Minimal 3,5 dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 belum memiliki capaian kinerja karena indikator tersebut merupakan indikator baru yang belum dilakukan penghitungan sebelumnya. Namun data capaian kinerja indikator ini muncul di Tahun 2020 dan 2021 mencapai 57,63%.

2.1.3.6 Unsur Kewilayahan

Kecamatandibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan, melaksanakan urusan pemerinatahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan, melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Kabupaten Lumajang memiliki 21 Kecamatan dengan mencakup 198 Desa dan 7 Kelurahan. Berikut akan disajikan capaian indikator fungsi kewilayahan di Kabupaten Lumajang tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 :

Tabel 2. 187Capaian indikator Fungsi Kewilayahan 2017 - 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	86,29	88,03	82,13	90,50	91,16
2	Persentase Desa Tertib Administrasi	%	76,40	81,57	75,05	82,84	90,57

Sumber: Bappeda Kab. Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami fluktuasi. Capaian kinerja sampai dengan Tahun 2018 mengalami tren peningkatan mencapai 88,03%. Namun di Tahun 2019 terdapat penurunan sebesar 5,9% menjadi 82,13%. Kenaikan kembali terjadi di Tahun 2020 sebesar 8,37% dan merupakan kenaikan tertinggi selama kurun waktu 5 tahun menjadi 90,50%. Pada tahun 2021 kembali naik menjadi 91,16%. Selanjutnya pada indikator Persentase Desa Tertib Administrasi memiliki peningkatan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 sebesar 81,57%. Namun di Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 6,52% menjadi 75,05%. Capaian kinerja Kembali mengalami kenaikan di Tahun 2020 hingga mencapai 82,84% dan naik kembali pada tahun 2021 sebesar 90,57%

2.1.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

Dalam pelaksanaan pembangunan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian dan persandiandiarahkan untuk pencapaian sasaran prioritas pembangunan dalam penegakan supremasi hukum, HAM, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur sedangkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan cakupan tugas, serta sarana dan prasarana organisasi perangkat daerah telah dilakukan penataan kelembagaan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.

Maksud perumusan produk hukum daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pemasyarakatan produk hukum senantiasa dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi yang berlaku.

Hasil analisis Persentase Masalah Strategis Yang Ditangani, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 188 Persentase MasalahStrategisYang Ditangani Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Masalah Strategis Yang Ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Timmas)	%	N/A	100	100	100	100

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang, 2020

Berdasarkan data tahun 2018sampai 2021, tercapai 100% terkait konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Lumajang dan seluruhnya berhasil ditangani sehingga tidak berdampak luas. Tahun 2017 tidak ada data terkait masalah strategis yang ditangani, karena di tahun tersebut belum dilakukan pengelolaan data kinerja mengingat indikator kinerja Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas) mulai diimplementasikan di tahun 2018, yakni sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD 2018-2023.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam konteks daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang telah ada dan yang akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Kondisi daerah Kabupaten Lumajang terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator pengeluaran per kapita, pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan dan Rasio PDRB UMKM terhadap Total PDRB.

Pertama, Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama satu bulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan daya beli. Berdasarkan data statistik Kabupaten Lumajang, pengeluaran per kapita Tahun 2017 sebesar Rp 8.503 Juta kemudian mengalami kenaikan di Tahun 2018 menjadi Rp 8.931 Juta Kembali mengalami kenaikan di Tahun 2019 menjadi Rp 9.274 Juta. Namun mengalami penurunan sampai dengan Tahun 2020 menjadi Rp 9.088 Juta dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 9.203 Juta.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Berdasarkan publikasi statistik Kabupaten Lumajang, dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020), pengeluaran konsumsi rumah tangga penduduk Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan yang cukup signifikan misalnya pada tahun 2016 sebesar 17.403.440,00, pada tahun 2020 meningkat menjadi 22.003.440,00. Untuk kedepannya, pengeluaran ini diperkirakan akan terus mengalami kenaikan. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan pada aspek kesejahteraan masyarakat Lumajang.

Kedua, pengeluaran konsumsi non pangan. Secara teoritis, semakin tinggi pendapatan/kesejahteraanseorang, maka proporsi pendapatan untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, dan sebaliknya, proporsi pendapatan untuk konsumsi kebutuhan non-makanan akan meningkat (Hukum Engel). Pada tahun 2020 konsumsi non pangan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 hal ini terjadi karena pada kondisi pandemi Covid-19 ini masyarakat semakin sadar untuk

beralih belanja konsumsi pangan untuk meningkatkan imun dibandingkan belanja barang non pangan.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Untuk meningkatkan daya saing daerah, dibutuhkan kelancaran pendistribusian arus barang, mobilitas penumpang serta kemudahan akses terhadap prasarana transportasi lainnya. Pelayanan transportasi yang efektif dan efisien melalui pemaduan jaringan pelayanan dan juga prasarana, diharapkan menjadi daya tarik yang kuat bagi masuknya investasi. Indikator penyediaan fasilitas infrastruktur dipengaruhi oleh indikator-indikator berikut:

1. Indeks Layanan Infrastruktur

Tabel 2. 189 Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	4,69	5,33	7,60	8,25	7,84

Sumber : DPUTR Kabupaten Lumajang, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada indikator capaian Indeks Layanan Infrastruktur memiliki tren kenaikan sampai dengan Tahun 2020. Kenaikan tertinggi terjadi di Tahun 2019 sebesar 2,27 menjadi 7,6. Pada Tahun 2020 kenaikan Kembali terjadi hingga mencapai di Indeks 8,25 akan tetapi pada tahun 2021 turun menjadi 7,84.

2. Indeks Layanan Infrastruktur Dasar

Berikut ditampilkan data capaian Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Kabupaten Lumajang Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 :

Tabel 2. 190 Indeks Layanan Infrastruktur Dasar Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Indeks	0,31	0,44	0,49	0,50	0,51

Sumber : DPKP Kabupaten Lumajang, 2021

Berdasarkan tabel di atas pada capaian indikator Indeks Layanan Infrastruktur dasar dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 mengalami kenaikan. Di Tahun 2017 capaian sebesar 0,24 menjadi 0,50 di Tahun 2020 dan meningkat di tahun 2021 menjadi 0,51. Hal ini menunjukkan bahwa

pemenuhan layanan infrastruktur dasar di Kabupaten Lumajang terdapat peningkatan.

3. Perhubungan: Jumlah Kendaraan Bermotor

Ketersediaan transportasi darat khususnya jalan merupakan syarat vital untuk menunjang aktivitas daerah. Terutama untuk aktivitas ekonomi, jalan berfungsi sebagai konektor atau penghubung dalam memobilisasikan bahan baku dan pemasaran hasil produksi. Semakin baik transportasi di suatu daerah, maka akan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri di daerah tersebut, salah satunya berupa penurunan biaya produksi.

Tabel 2. 191Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Lumajang Tahun 2016-2020

Jumlah Kendaraan Bermotor	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Mobil	Unit	N/A	N/A	24.015	26.414	27.824
Bus	Unit	N/A	N/A	618	678	719
Truk	Unit	N/A	N/A	14.201	15.302	15.869
Sepeda Motor	Unit	N/A	N/A	341.467	360.323	370.713
Kendaraan Berat	Unit	N/A	N/A	14	14	14

Sumber : BPS Jawa Timur, 2020

Data jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lumajang di atas dibagi menurut jenisnya antara lain Mobil, Bus, Truk, Sepeda Motor dan Kendaraan berat. Secara umum data jumlah kendaraan bermotor dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Dapat dilihat rincian kendaraan bermotor sampai dengan Tahun 2020 antara lain jumlah mobil mencapai 27.824 unit, jumlah bus mencapai 719 unit, jumlah truk mencapai 15.869 unit, jumlah sepeda motor mencapai 370.713 unit dan jumlah kendaraan berat mencapai 14 unit.

4. Penataan Ruang

Ketersediaan fasilitas daerah telah diatur sedemikian rupa dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang. Fasilitas ini kemudian menjadi penunjang bagi aktivitas kawasan-kawasan strategis yang memberikan nilai ekonomi tinggi, seperti pertanian, industri dan perdagangan. Untuk itu, pada sub-bahasan ini, perlu kiranya mengkaji beberapa luas kawasan peruntukkan di Kabupaten Lumajang berdasarkan arahan RTRW, yaitu kawasan produktif, industri

dan perkotaan. Kawasan-kawasan ini diyakini dapat mendorong daya saing untuk Kabupaten Lumajang sendiri.

Pertama, luas kawasan produktif, yang terdiri dari kawasan pertanian, perkebunan dan wilayah kehutanan (hutan rakyat). Luas wilayah produktif ini kedepannya akan mengalami pergeseran akibat perubahan peruntukkan lahan, khususnya untuk lahan pemukiman dan perumahan. Pengurangan luas lahan produktif tentunya menghadirkan permasalahan baru, khususnya untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayahnya, kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Lumajang terdiri dari peruntukkan pertanian lahan basah dengan luas lahan sebesar 34.324 Ha dan peruntukkan pertanian lahan kering seluas 56.535 Ha. Lebih lanjut, untuk kawasan peruntukkan hutan rakyat Kabupaten Lumajang memiliki luas aktual sebesar 56.436 Ha. Selain itu, untuk kawasan perkebunan Kabupaten Lumajang menurut kepemilikannya dibagi atas perkebunan besar dan perkebunan rakyat masing-masing seluas 9.921 Ha dan 11.979 Ha (untuk komoditi tebu yang memiliki luas lahan melebihi komoditi unggulan lainnya).



Sumber Bappeda Kab Lumajang, 2013

Gambar 2. 18 Peta Kawasan Peruntukkan Perkebunan Kabupaten Lumajang

Kedua, luas kawasan industri. Untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, pemerintah melakukan upaya pembangunan kawasan industri melalui penyediaan lokasi

industri. Kawasan ini harus terencana dan didukung oleh fasilitas serta prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan dalam pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri. Dalam pengelolaan kawasan industri disamping oleh pemerintah (BUMN) juga dilakukan oleh pihak swasta.

Dokumen RTRW Kabupaten Lumajang menyebutkan bahwa salah satu kriteria penetapan kawasan peruntukkan industri adalah area cakupan luas lahan yang minimal 20 Ha. Lahan ini memiliki karakteristik tanah yang bertekstur sedang sampai kasar, dan berada pada tanah marginal pertanian. Bisa dilihat dari karakteristik tersebut, pengembangan sektor industri masih belum maksimal. Hal ini terbukti dari unit industri, baik industri besar maupun kecil yang masih tergolong sedikit.

Ketiga, luas wilayah perkotaan. Penentuan struktur kegiatan tata ruang/hierarki kota-kota di Kabupaten Lumajang didasarkan pada jalur upaya pemantapan-pemantapan fungsi kota dalam kerangka strategi dan kebijaksanaan pengembangan peta struktur tata ruang wilayah Kabupaten Lumajang. Dengan demikian struktur kegiatan tata ruang diarahkan pada tujuan keseimbangan pembangunan antar wilayah. Artinya, adanya keseimbangan pembangunan antara perkembangan wilayah pusat, wilayah transisi, dan wilayah belakang sehingga wilayah sekitar dapat ikut berkembang akibat *multiplier effect* dari sistem kegiatan ekonomi pada pusat-pusat pengembangan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi Jawa Timur, pengembangan wilayah Kabupaten Lumajang difungsikan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL). Adapun kecamatan-kecamatan yang berpotensi menjadi Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) bagi Kabupaten Lumajang adalah kecamatan Candipuro, Pasirian, Tempeh, Lumajang, Yosowilangun, Randuagung dan Klakah. Terkait dengan luas wilayah perkotaan, dokumen RTRW menyebutkan sebesar 7.413 Ha atau 4.14% dari total luas wilayah keseluruhan.

5. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sub-bahasan ini terkait dengan fasilitas-fasilitas umum yang tersedia di Kabupaten Lumajang, seperti perbankan, restoran /rumah makan dan penginapan hotel. Fasilitas tersebut tidak dapat dipungkiri memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi Kabupaten Lumajang, sehingga penting untuk menjadi pertimbangan dalam kajian pembangunan daerah. Berikut jabaran lebih lengkap, terkait jumlah dan fungsi ke tiga fasilitas tersebut di Kabupaten Lumajang.

Pertama, perbankan. Sektor perbankan menjadi vital dalam perekonomian suatu negara, khususnya menghadapi era keterbukaan ini. Sebagai lembaga intermediasi, bank hadir untuk menyalurkan dana dari pemilik modal kepada pengusaha. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji eksistensi perbankan di Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan laporan statistik, nampaknya jumlah kantor bank di Kabupaten Lumajang cenderung stagnan, yaitu 48 unit, dengan jumlah kantor bank umum sebesar 23 unit dan BPR 25 unit. Artinya, tidak ada penambahan kantor baru selama tahun 2013-2015. Hal ini menjadi masalah, mengingat pertumbuhan unit kantor bank di suatu wilayah mengindikasikan adanya potensi ekonomi yang lebih tinggi di wilayah tersebut.

Kedua, jenis kelas dan jumlah restaurant. Dewasa ini, bisnis kuliner menjadi lahan yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Berbagai lapisan masyarakat mencoba untuk membangun rumah makan, dari yang sederhana sampai yang berskala mewah seperti restoran. Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi di daerah tersebut. Sedangkan banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

Terkait dengan data jumlah unit restoran dan rumah makan di Kabupaten Lumajang masih sulit diperoleh. Terakhir, publikasi statistik tahun 2017 mencatat bahwa jumlah restoran dan rumah makan di Kabupaten Lumajang masing-masing sebanyak 9 dan 95 unit. Angka ini menunjukkan masih rendahnya daya tarik investasi di Kabupaten Lumajang, khususnya untuk pengembangan bisnis kuliner dan rumah makan.

Ketiga, jenis kelas dan jumlah hotel/penginapan. Ketersediaan hotel/dan penginapan memiliki korelasi erat dengan pembangunan sektor pariwisata. Peningkatan sektor pariwisata tidak dipungkiri menjadi pendorong bertambahnya unit/jumlah hotel/penginapan di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan laporan statistik yang menganalisis data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, tercatat 3 Kecamatan yang mempunyai fasilitas Akomodasi Hotel sebanyak 13 unit, di Klakah 2 unit, Sukodono 3 unit, dan Lumajang 8 unit. Jumlah kamar hotel terbanyak di Lumajang 173 unit disusul Sukodono sebanyak 92 unit.

6. Lingkungan Hidup : Konsumsi Air Bersih

Ketersediaan air bersih bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi sangat penting karena berdampak terhadap tingkat kesehatan. Semakin tinggi persentase masyarakat yang menggunakan air bersih, semakin baik kondisi kesehatan di daerah tersebut. Oleh sebab itu air

yang diperlukan masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan, yaitu mencakup fisik, kimia dan bakteriologis. Penggunaan air yang tidak bersih dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, antara lain: penyakit cholera, typhus, disentri dan penyakit kulit.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik tahun 2018, pelanggan air bersih di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 sebanyak 29.659 orang, naik sebesar 6.57% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk air yang disalurkan sebesar 6.713.144 m³ dengan nilai 20.027,133 juta rupiah. Khusus untuk rumah tangga, pelanggan air bersih sebanyak 2.981 orang (rumah tangga A) dan 24.828 orang (rumah tangga B).

7. Komunikasi dan Informasi : ketersediaan daya listrik.

Sebagai salah satu energi, ketersediaan listrik menjadi penting untuk mendorong aktivitas masyarakat Kabupaten Lumajang. Listrik dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, khususnya untuk industri. Kapasitas daya listrik di Kabupaten Lumajang sudah cukup memadai. Merujuk pada publikasi statistik, pelanggan listrik Kabupaten Lumajang pada tahun 2013 sebanyak 35.548 menjadi 45.753 pelanggan pada tahun 2017. Adapun daya terpasang untuk tiga kantor PLN di Kecamatan Lumajang, Klakah dan Tempeh mengalami kenaikan yang konsisten.

8. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kinerja pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum pada tahun 2017 – 2021 dapat ditunjukkan melalui indikator antara lain sebagai berikut :

a. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Jalan

Kondisi sistem jaringan jalan di Kabupaten Lumajang pada tahun 2017 - 2021 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 192 Perbandingan Kondisi Sistem Jaringan Jalan Di Kabupaten Lumajang Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Panjang jalan (km)	1.051,99	1.051,99	1.051,99	1.051,99	1.109,00
2	Jalan dalam kondisi baik (km)	682,48	797,81	790,80	753,41	668,8
3	Jalan dalam kondisi sedang (km)	96,82	108,80	107,84	119,54	316,02

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	Jalan dalam kondisi rusak (km)	78,60	88,57	52,99	59,91	92,32
5	Jalan dalam kondisi rusak berat (km)	251,10	113,83	157,37	176,14	31,86

Sumber Data : Dinas PUTR Kab. Lumajang , 2021

Berdasarkan data tersebut bahwa kondisi sistem jaringan di Kabupaten Lumajang sampai dengan tahun 2021 panjang total mencapai 1.109,00 Km. Adapun jalan yang berada dalam kondisi baik mencapai 668,8 Km, kondisi sedang mencapai 316,02 km , Kondisi rusak mencapai 92,32 Km dan jalan kondisi rusak berat mencapai 31,86 Km.

b. Peningkatan kuantitas dan kualitas jembatan

Pada tahun 2020 di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan menjadi 425 unit dibandingkan dengan tahun 2019 sejumlah 424 unit, tahun 2021 tetap 425 unit, sedangkan untuk jembatan dengan kondisi baik dan sedang/rusak pada tahun 2021 yaitu sejumlah 335 unit dan 90 unit.

Kondisi jembatan di Kabupaten Lumajang pada akhir tahun 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 193 Kondisi Jembatan Di Kab. Lumajang Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Jembatan (unit)	346	424	424	425	425
2	Jembatan dalam kondisi baik (unit)	248	392	391	392	335
3	Jembatan dalam kondisi sedang /rusak (unit)	98	32	33	33	90

Sumber Data : Dinas PUTR Kab. Lumajang ,2021

c. Pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi penanggulangan banjir

Indikator kinerja penurunan daerah dampak bencana banjir dan rawan kurang air dan Persentase peningkatan jaringan irigasi dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 194 Luas Sawah Yang Terairi Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas sawah yang harus terairi (ha)	38.714	38.174	38.174	38.174	27.579
2	Luas sawah yang terairi (ha)	38.714	38.174	38.174	38.174	27.579
	Rasio (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas PUTR Kab. Lumajang ,2021

Dari data 2017-2021 jumlah luas sawah yang harus dialiri setiap tahunnya adalah tetap yaitu 38.174, kemudian untuk luas sawah yang terairi juga tetap 38,174 ha sehingga bisa disimpulkan sawah yang harus diairi di Kabupaten Lumajang selalu terpenuhi sebanyak 100% pada tiap tahunnya.

Tabel 2. 195 Kondisi Jaringan Irigasi DiKabupaten Lumajang Tahun 2016 – 2020 (dalam Km)

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2020
1	Panjang jaringan irigasi	240.718	240.718	240.718	240.718	496.839
	• Dalam kondisi baik	186.792	194.193	199.893	207.718	331.127
	• Dalam kondisi rusak	38.726	32.306	27.306	22.150	71.245
	• Dalam kondisi rusak berat	15.200	14.219	13.519	11.115	94.467
2	Luas Jaringan Irigasi	38.714	38.714	38.714	38.174	27.579
	• Dalam kondisi baik	30.264	32.200	33.986	34.398	19.083
	• Dalam kondisi rusak	6.700	5.151	3.751	3.097	49,50
	• Dalam kondisi rusak berat	1.750	1.363	977	679	8.447

Sumber Data : Dinas PUTR Kab. Lumajang 2021

Dari data tabel diatas bisa dilihat tahun 2017-2021 panjang dan jaringan irigasi kabupaten Lumajang berada pada 496.839 dan 27.579 Kemudian untuk kondisi baik panjang dan luas jaringan irigasi terus mengalami peningkatan sehingga bisa disimpulkan pemeliharaan dan perbaikan terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan mampu

mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan.

Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

Pertama, angka kriminalitas. Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama. Tindak kejahatan/kriminalitas dapat terjadi karena adanya kepincangan sosial, tekanan mental, dan kebencian. Selain itu juga karena adanya perubahan masyarakat dan kebudayaan yang cepat tetapi tidak dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi penyesuaian yang sempurna.

Tingginya angka kriminalitas di suatu daerah tidak hanya berdampak negatif pada kondisi lingkungan sosial. Kondisi ekonomi, khususnya iklim investasi di suatu daerah tidak dapat dipungkiri terimbas dampak negatif kriminalitas. Kepercayaan investor akan sangat dipertaruhkan. Tingginya angka kriminal membuat investor tidak percaya dan enggan untuk menanamkan dananya di suatu daerah, sehingga pada akhirnya jumlah investasi di daerah tersebut akan menurun.

Merujuk pada publikasi statistik bahasan sebelumnya, diketahui bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Lumajang masih cenderung rendah, dan bahkan berada di bawah Jawa Timur. Kendatipun demikian, perlu diperhatikan bahwa *Tren* angka kriminalitas menunjukkan kenaikan, artinya, dalam beberapa tahun ke depan ada potensi yang cukup besar meningkatnya tindak kriminal di Kabupaten Lumajang. Kondisi ini perlu penanganan yang cepat dari pemerintah, agar tidak mengganggu iklim investasi di Kabupaten Lumajang.

Kedua, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah. Salah satu perubahan mendasar dari perubahan paradigma dengan adanya reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan lebih besar dalam bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal, yang bermuara pada terciptanya dinamika serta corak pembangunan baru di daerah. Salah satu aspek penting kebijakan di bidang keuangan daerah adalah kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan daerah. Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya, yang dibebankan pada seluruh masyarakat

Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk mengupayakan peningkatan daerah dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara konsep, PAD adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian daerah dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat. Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan investasi bagi sektor swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta. Sumber-sumber PAD diantaranya adalah hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang selalu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memacu penggalan sumber keuangan baru secara intensif, wajar dan tertib agar dana pembangunan tidak terlalu tergantung dari Pemerintah Pusat. Pajak dan retribusi daerah sampai saat ini masih merupakan sumber penggalan dana dari masyarakat yang paling efektif. Hasil publikasi statistik menyebutkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk Kabupaten Lumajang naik secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Jika melihat rerata pertumbuhannya selama lima tahun tersebut, masing-masing mencapai 33.5% dan 26,4 %. Melihat adanya konsistensi penerimaan pajak dan retribusi di Kabupaten Lumajang ini memberikan gambaran tentang tingginya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak. Hasil akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang.

Ketiga, **Capaian Nilai investasi.** Berikut akan disajikan tabel Nilai Investasi di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021.

Tabel 2. 196 Nilai Investasi di Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Investasi	Rp (Juta)	39.826,50	1.323,40	63.429,30	174.284,90	61.275,24

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Lumajang, 2021

Dari tabel di atas, terdapat penurunan investasi yang cukup signifikan di Kabupaten Lumajang selama tahun 2017 sampai Tahun 2018, yaitu menjadi Rp.1.323,4 Juta. Namun

kenaikan Kembali terjadi hingga Tahun 2020 menjadi Rp. 174.284,9 Juta tetapi pada tahun 2021 kembali menurun menjadi Rp. 61.275,24 Juta, sehingga Perlu usaha yang lebih keras dan terstruktur untuk meningkatkan jumlah investasi, salah satunya dengan memberikan kemudahan bagi investor melalui penetapan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Lumajang. RUPM merupakan grand design yang akan memerikan kepastian bagi investor dalam jangka panjang.

2.1.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Berperan sebaga pelaku dalam aktivitas ekonomi, kemampuan dan kapasitas sumberdaya manusia menjadi penting untuk dipertimbangkan guna mendorong tercapainya target pembangunan daerah. Oleh karena itu, secara tidak langsung, dapat disimpulkan bahwa kualitas sumberdaya manusia berbanding lurus dengan peningkatan daya saing daerah. Kualitas masyarakat yang baik di suatu daerah mencerminkan potensi bagi pengembangan daerah tersebut.

Dalam beberapa kajian, telah banyak dibahas tentang tolak ukur kualitas sumberdaya manusia. Salah satu indikator yang umum digunakan adalah tingkat pendidikan. Untuk itu, berikut disajikan grafik pemetaan tingkat pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur untuk melihat kondisi sumber daya manusia Kabupaten Lumajang.

Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Lumajang masih tergolong rendah. Hasil ini diperkuat oleh publikasi Badan Pusat Statistik tentang angka partisipasi sekolah, baik sekolah dasar, menengah dan atas yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan untuk APS sekolah dasar dan menengah menunjukkan *Tren* negatif dalam lima tahun terakhir. Masalah ini sangat urgent untuk ditindaklanjuti, mengingat indikator pendidikan menjadi salah satu variabel pembentuk indeks pembangunan manusia.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2021 dan Realisasi P-RPJMD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, setelah pelaksanaan RKPD setiap tahun perlu dilakukan evaluasi kinerja, untuk melihat pencapaian kinerja daerah pada tahun tersebut. Penyusunan evaluasi RKPD tersebut sangat penting, karena untuk melihat pencapaian daerah di tahun tersebut, dan juga menjadi dasar dalam penentuan rencana pembangunan daerah di tahun berikutnya.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RKPD yang tergambarkan dalam tabel (terlampir) dengan terbagi menjadi beberapa kategori status, yaitu:

Tabel 2. 197 T.E-1

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dalam Evaluasi Hasil RKPD terdiri dari beberapa kriteria penilaian sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja;

2. Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal;

3. Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program sampai dengan Tahun 2021

Evaluasi pelaksanaan program RKPD mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu, yang mana evaluasi meliputi seluruh program yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, serta menyangkut realisasi capaian target kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Berikut evaluasi pencapaian program menurut kategori urusan pemerintahan daerah sampai dengan tahun 2021.

2.2.1.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

A. Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pendidikan merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Lumajang. Di Kabupaten Lumajang, seluruh urusan pendidikan dibebankan kepada Dinas Pendidikan. Berdasarkan data hasil evaluasi rencana kerja Tahun 2021 dapat diketahui bahwa Urusan Pendidikan memiliki 4 (empat) Program dan 7 (tujuh) Indikator Program dengan total pagu anggaran urusan sebesar Rp. 250.893.513.149. Adapun program pada Urusan Pendidikan antara lain Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Dan Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Kemudian untuk realisasi capaian kinerja RKPD Tahun 2021 didapatkan rata-rata capaian indikator kinerja program Urusan Pendidikan mencapai 99,29 %, capaian ini termasuk kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi. Tujuh indikator program yang mencapai kriteria kinerja sangat tinggi tersebut diuraikan sebagai berikut Persentase Siswa yang mengikuti Ujian, Persentase Lembaga Pendidikan yang terakreditasi, Persentase Lembaga Pendidikan yang terfasilitasi Kurikulum Muatan Lokal dan Persentase Pendidik yang terakreditasi, Persentase Lembaga Pendidikan yang terakreditasi Persentase Pendidik yang tersertifikasi dan Persentase Lembaga Pendidikan yang memiliki Izin. Selanjutnya jika dilihat dari sisi penyerapan anggaran, realisasi anggaran Urusan Pendidikan sebesar Rp. 242.482.135.840 dengan tingkat penyerapan sebesar 96,65% terhadap total anggaran Urusan Pendidikan yang ditetapkan di Tahun 2021. Dari ke 4

(empat) program yang adaterdapat 1 (satu) Program dengan realisasi anggaran di bawah 50 % yaitu pada Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

Dari uraian capaian kinerja dan anggaran di atas, terdapat beberapa factor penyebab tidak terpenuhinya target capaian indikator program dan terserapnya target anggaran antara lain :

1. Pandemi Covid 19 serta adanya bencana alam yang menghambat proses kegiatan, pelaporan, dan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan;
2. Terdapat beberapa kegiatan dan sub-kegiatan yang telah direncanakan dalam renja 2021 tidak dapat dilaksanakan karena adanya pengalihan anggaran.

2. Kesehatan

Urusan wajib pelayanan dasar kedua yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Urusan Kesehatan. Di Kabupaten Lumajang urusan kesehatan dibebankan kepada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan. Dijelaskan dalam hasil evaluasi rencana kerja Tahun 2021 bahwa terdapat 4 (empat) program dan 6 (enam) indikator pada Urusan Kesehatan dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 194.409.755.629. Adapun Program Urusan Kesehatan tersebut antara lain Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Dari seluruh program tersebut, rata -rata pencapaian kinerja indikator program mencapai 97.07% dan tergolong pada tingkat kriteria realisasi kinerja sangat tinggi. Dari 6 (enam) Indikator yang ditetapkan terdapat 5 (lima) indikator program yang telah memilikicapaian kinerja di atas 90 % yaitu AKI, AKB, persentase fasyankes dengan manajemen SDMK sesuai standar, persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar, persentase desa siaga aktif purnama mandiri. Sedangkan terdapat 1(satu) indikator, Persentase fasyankes terakreditasi termasuk pada tingkat kriteria realisasi kinerja tinggi.

Untuk realisasi penyerapan anggaran, Urusan Kesehatan melakukan penyerapan sebesar Rp. 138.217.361.966 atau mencapai 71% dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran pada urusan ini termasuk kategori sedang hampir mencapai 30% anggaran tidak terserap. Program yang

memiliki realisasi anggaran di atas 90 % yaitu hanya pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sedangkan untuk ke 3(tiga) program yang lain yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan mencapai realisasi dengan kategori sedang antara 66 % sampai dengan 75%.

Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran di atas, terdapat beberapa factor penyebab tidak terpenuhinya target capaian program dan terserapnya target anggaran antara lain :

1. Rasio dan kompetensi tenaga kesehatan belum sesuaistandar serta belum terpenuhinya peningkatan kapasitas untuk seluruh tenaga Kesehatan;
2. Terbatasnya akses dan mutu pelayanan kegawat daruratan;
3. Cakupan pelayanan kesehatan luar gedung yang masih rendah;
4. Masih terdapat fasilitas pelayanan kesehatan belum memiliki sarana dan prasarana pendukung sesuai standar;
5. Lambatnya waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat;
6. Terbatasnya akses kesehatan bagi masyarakat yang letak geografisnya sulit;
7. Terbatasnya akses kesehatan pada kelompok rentan (orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat);
8. Masih rendahnya kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
9. Terdapat kendala administrasi dalam proses pengadaan alat Kesehatan;
10. Kurangnya koordinasi internal sehingga Penyerapan anggaran tidak sesuai dengan time schedule.

Selanjutnya untuk menjawab permasalahan yang ada dalam pencapaian kinerja urusan Kesehatan akan dilakukan beberapa upaya yang dikoordinasikan baik internal maupun eksternal antara lain :

1. Menyusun perencanaan kegiatan sesuai dengan prioritas program dan ketersediaan anggaran;

2. Melakukan perencanaan dengan mengikuti standar biaya daerah yang berlaku sehingga diharapkan sudah tidak ada gap antara anggaran dan kinerja yang harus dilaksanakan;
3. Menyusun perencanaan kegiatan sesuai dengan time schedule RAK dan KAK;
4. Meningkatkan koordinasi kegiatan dengan lintas sektor dan lintas bidang guna perencanaan kegiatan yang lebih matang dan adaptasi kebiasaan baru;
5. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi profesi dalam rangka pembinaan dan pengawasan nakes serta peningkatan kompetensi dan kualifikasi nakes;
6. Membentuk tim penyusun rencana kebutuhan SDMK bersama lintas sektor dan lintas bidang;
7. Melakukan advokasi pemenuhan kebutuhan SDMK di fasyankes kepada pemangku kebijakan;
8. Medorong pemilik usaha untuk menghubungi atau koordinasi dengan organo profesi atem atau farmasi;
9. Memaksimalkan program inovasi dokter muter;
10. Memaksimalkan program inovasi PSC 119.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar selanjutnya yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Di Kabupaten Lumajang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dibebankan kepada dua perangkat daerah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PUTR). Dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 5 (lima) Program dan 6 (enam) Indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp. 233.292.594.566.

Berdasarkan hasil evaluasi yang ada dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja program pada urusan Pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar 96,22% dan tergolong pada pada tingkat kriteria realisasi kinerja sangat tinggi. Dari 6 (enam) indikator yang ada, terdapat tiga indikator yang telah mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan di Tahun 2021 yaitu pada indikator Prosentase ketersediaan gedung/bangunan di wilayah daerah kabupaten/kota, Prosentase panjang jalan kondisi mantap dan Prosentase luas wilayah pemanfaatan sesuai dengan

rencana tata ruang. Sedangkan indikator belum mencapai target adalah Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik, Prosentase jumlah jembatan kondisi baik, Persentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis.

Dari sisi penyerapan anggaran dilaporkan bahwa kinerja anggaran sebesar Rp. 119.867.438.801 atau mencapai 51 % termasuk dalam kategori penyerapan anggaran rendah. Dari 5 (lima) Program yang ada terdapat program yang memiliki realisasi anggaran di atas 90% yaitu pada Program Penataan bangunan Gedung, Program Pengembangan Jasa Konstruksi dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sedangkan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Penyelenggaraan Jalan memiliki realisasi anggaran dibawah 70%.

Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran di atas, terdapat beberapa faktor penghambat tidak terpenuhinya target yaitu :

1. pengalihan anggaran untuk penanganan pandemic covid 19 sehingga berdampak pada capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dalam pelayanan infrastruktur kepada masyarakat;
2. Dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengakibatkan terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan;
3. Belum diterimanya anggaran khusus pekerjaan PEN pada Kas Daerah dari PT. SMI sehingga penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan belum terlaksana secara maksimal;
4. Terbatasnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sehingga menyebabkan Adanya pekerjaan tidak terealisasi di Tahun 2021;
5. Adanya bencana alam erupsi Gunung Semeru di Tahun 2021 yang membuat beberapa ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan.

Selanjutnya faktor penghambat di atas akan ditindaklanjuti dengan mengkoordinasikannya dan mengkomodir kembali pekerjaan yang tidak dapat terlaksana pada Tahun 2021 dalam perencanaan Tahun 2022.

Selain terdapat faktor penghambat belum tercapainya kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga terdapat faktor

keberhasilan terhadap indikator kinerja yang telah memenuhi target yang ditetapkan antara lain:

1. Dukungan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dalam pelaksanaan teknis kegiatan;
2. Adanya ketepatan perencanaan dengan pelaksanaan *time schedule* kegiatan;
3. Adanya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang membuat beberapa dana dari PT. SMI dialirkan untuk peningkatan jalan di 39 ruas jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Lumajang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Di Kabupaten Lumajang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki 8 (delapan) Program dan 8 (delapan) indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp. 46.105.417.388.

Dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2021 sebesar 83,03 % dengan kategori kriteria realisasi kinerja Tinggi. Dari seluruh indikator program yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat lima indikator yang telah mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan antara lain Persentase PSU Perumahan yang terpelihara, Luas Kawasan Permukiman yg mempunyai izin, Persentase Penataan Bangunan di Kabupaten, Persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum, dan Persentase Panjang Drainase Terbangun. Sedangkan tiga indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan yakni pada indikator Persentase Infrastruktur terfasilitasi dengan baik, Ratio Rumah terbangun, Persentase penduduk yang Terlayani Sanitasi.

Selanjutnya untuk realisasi penyerapan anggaran dilaporkan bahwa secara umum penyerapan anggaran sebesar Rp. 44.066.196.420 atau mencapai 95,58%. Realisasi penyerapan anggaran initermasuk dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan uraian capaian kinerja dan realisasi anggaran di atas, terdapat faktor penghambat tidak terpenuhinya target yaitu :

1. Adanya ketidakjelasan kepemilikan aset sebelum pekerjaan dimulai karena diketahui aset pekerjaan ternyata milik warga;
2. Warga Perumahan yang difasilitasi pemeliharaan PSU menghendaki perubahan ruas yang dipelihara dari perencanaan awal;
3. Adanya Bencana Erupsi Gunung Semeru yang menyebabkan akses jalan menuju ke Kecamatan Pronojiwo terbatas;
4. Kurangnya kompetensi teknis Pelaksanaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat (pemberdayaan) dengan swakelola;
5. Adanya perubahan ketentuan dan nomenklatur IMB menjadi PBG dan perubahan alur permohonan terbaru melalui SIMBG;
6. Sulitnya akses masuk lokasi relokasi sehingga menyebabkan proses pengangkutan material dan progres pembangunan membutuhkan waktu yang lebih lama;
7. Debit air pada musim kemarau berkurang, dan sebaliknya pada saat musim penghujan bertambah, sehingga mempengaruhi kinerja target pelayanan air minum;
8. Minimnya regulasi terkait air minum di Kabupaten Lumajang;
9. Mayoritas tangki septik yang dimiliki masyarakat belum berstandar SNI;
10. Permasalahan kesediaan lahan untuk pembangunan IPAL komunal;
11. Terjadi genangan dan banjir di lingkungan masyarakat

Selanjutnya beberapa upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan antara lain :

1. Menyelenggarakan Sosialisasi dan pendekatan secara personal terhadap warga tentang Pelaksanaan Program Pemerintah Kabupaten Lumajang;
2. Mengadakan koordinasi dengan warga perumahan untuk mendapatkan kesepakatan bersama;
3. Mengajukan Perda terkait retribusi PBG, membuat SK Peralihan IMB ke PBG, Pemda mulai mempelajari alur permohonan melalui SIMBG dengan mengikuti sosialisai dan bimtek dari Provinsi maupun pusat;

4. Mengkoordinasikan Penyusunan peraturan Bupati dan Peraturan Daerah terkait air minum;
5. Menyupayakan pembangunan infrastruktur tangki septik individual sesuai dengan standart SNI;
6. Memfaatkan lahan pribadi atau lahan Pemerintah Desa untuk pembangunan IPAL Komunal;
7. Mengkoordinasikan pembangunan saluran drainase lingkungan.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kelima yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Di Kabupaten Lumajang urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dibebankan kepada perangkat daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada urusan Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat terdapat 3 (tiga) program dan 3 (tiga) indikator. Berikut nama program pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, Program Penanggulangan Bencana dengan pagu anggaran urusan Tahun 2021 sebesar Rp. 8.746.286.011,-.

Rata-rata capaian kinerja program dilaporkan mencapai 96,15 % dan termasuk kategori kriteria realisasi kinerja sangat tinggi. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa urusan Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat memiliki 3 (tiga) Program dan 3 (tiga) indikator. Indikator yang mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain Persentase peningkatan Penyelenggaraan Kententruman dan Ketertiban umum dan Persentase Penanganan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di wilayah Kabupaten. Sedangkan indikator Persentase Tingkat Ketahanan Daerah mencapai kinerja dengan kriteria Tinggi.

Secara umum realisasi penyerapan anggaran pada urusan urusan Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat mencapai 97,46 % dan tergolong dalam kategori Sangat Tinggi. Penyerapan anggaran pada seluruh program urusan urusan

Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat di atas 90 %.

Adapun Faktor Penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya jumlah personil dalam menangani jangkauan wilayah pelaksanaan tugas yang luas;
2. Sarana prasarana yang tersedia belum memadai dengan beban pekerjaan yang ada termasuk terbatasnya alat pelindung diri bagi petugas pemadam kebakaran;
3. Belum Optimalnya program bersama antar lembaga dalam menjalankan peran bagi pengguna data dan informasi kebencanaan;
4. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan fasilitas kritis pada darurat Bencana;
5. Kurangnya membangun kemandirian informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat;
6. Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan/atau Perkada masih cukup tinggi

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Melakukan usulan penambahan jumlah personil dalam menangani jangkauan wilayah pelaksanaan tugas yang luas;
2. Melakukan usulan penyediaan Sarana prasarana belum memadai serta alat pelindung diri bagi petugas pemadam kebakaran;
3. Penguatan komunikasi lintas lembaga pemanfaatan data dan informasi bencana untuk pengurangan risiko bencana;
4. Adanya perbaikan kebijakan dan mekanisme perbaikan fasilitas kritis pada darurat bencana sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi kejadian lapangan;
5. Meningkatkan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya dengan mengoptimalkan peran kelompok informasi masyarakat;

6. Melaksanakan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat.

6. Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terakhir yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah Urusan Sosial. Di kabupaten Lumajang untuk Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa Urusan Sosial memiliki 5 (lima) program dan 5 (lima) indikator program dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 11.785.127.497. Berikut nama Program dalam Urusan Sosial antara lain Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Dijelaskan bahwa rata -rata capaian kinerja program pada urusan sosial mencapai 109 %, capaian kinerja ini melebihi dari target yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja yang telah mencapai target bahkan melebihi dari terget yang telah ditetapkan yaitu pada indikator Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan social, Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi kesejahteraan social, Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan social, Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Penanganan, Prosentase Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola. Selanjutnya dari sisi penyerapan anggaran dilaporkan bahwa realisasi anggaran urusan sebesar Rp. 11.564.508.480 mencapai 98,13 % dari Pagu anggaran yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran ini termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dalam hal ini seluruh program memiliki penyerapan di atas 90 %.

Namun demikian pencapaian indikator sasaran tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih rendahnya kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kewenangan kabupaten Lumajang;
2. Masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
3. Data DTKS yang masih kurang valid;
4. Kurang pahamnya Kelompok Penerima Manfaat(KPM)/penerima bantuan sosial terhadap program

dan layanan yang diterima sehingga banyak pengaduan yang masuk ke Dinas Sosial maupun ke Pemerintah Daerah;

5. Belum melakukan pengelolaan TMP sesuai standart KEMENSOS NO 23 TAHUN 2014 Tentang pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Melakukan Pembinaan dan pemberdayaan kepada PSKS yang ada;
2. Pengembangan kamapuan PSKS melalui bimtek dan sosialisasi;
3. Mengirimkan PSKS untuk mengikuti pelatihan dan bimtek UKS baik yang diselenggarakan oleh DINSOS Prov ataupun KEMENSOS;
4. Memberikan kesempatan kepada seluruh desa untuk memperoleh "USER" yang dapat digunakan oleh Operator SIKS-NG desa untuk memperbaiki data/updating data penerima bantuan sosial (meninggal dunia, pindah alamat, NIK tidak padan) secara online melalui aplikasi SIKS-NG
5. Memberikan bimbingan kepada pendamping KPM PKH agar bisa menjelaskan dengan baik kepada KPM PKH terhadap prosedur penerimaan bantuan;
6. Melakukan pengelolaan TMP dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia.

B. Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tenaga kerja merupakan salah satu urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah. Di Kabupaten Lumajang, seluruh urusan tenaga kerja dibebankan kepada Dinas Tenaga Kerja. Dalam hasil evaluasi dapat diketahui bahwa Urusan Tenaga Kerja memiliki 3 (tiga) program dan 5 (lima) indikator dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 610.550.944. Berikut ketiga program tersebut antara lain Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial.

Pada Urusan Tenaga Kerja diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja mencapai 80 %. Dari ke lima indikator kinerja program yang ada terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang telah mencapai target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan yakni pada indikator Prosentase peningkatan produktifitas perusahaan, Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan dan prosentase perusahaan yang mempunyai PP, prosentase data dan informasi ketenagakerjaan yang tersedia. Namun selain itu terdapat 1 (satu) indikator yang belum menampilkan data capaian kinerja Program yakni pada indikator Prosentase Pencari Kerja dilatih. Selanjutnya dari sisi realisasi penyerapan anggaran dijelaskan bahwa Urusan Tenaga Kerja memiliki realisasi anggaran sebesar Rp. 599.448.744 atau mencapai 98,18% dari keseluruhan pagu anggaran yang ditetapkan.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Dampak dari Pandemi Covid-19, dimana terdapat protokol kesehatan yang harus di laksanakan terutama dalam hal kegiatan Job Mini Fair (JMF) yang tidak dapat terlaksana baik dalam skala kecil maupun besar;
2. Keterbatasan jumlah personil, sarana dan prasarana sudah pasti mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak maksimal;
3. Pembatasan jumlah penempatan calon transmigran oleh Pemerintah Pusat/Propinsi sehingga menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pendaftar calon transmigran yang belum diberangkatkan dari tahun-tahun sebelumnya;
4. Masih kurangnya kesadaran perusahaan dalam mentaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Mengikuti himbauan dari pihak terkaitserta lebih aktif dalam menyampaikan lowongan pekerjaan melalui media sosia;
2. Untuk menyelesaikan semua beban tugas dilakukan dengan cara memaksimalkan personil yang ada;
3. Sampai saat ini masih memenuhi kebutuhan penempatan calon transmigran sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Propinsi;

4. Melakukan sosialisasi secara terus-menerus dan berkesinambungan kepada perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, dan Pertanian

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Di Kabupaten Lumajang Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibebankan kepada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berdasarkan data evaluasi dapat diketahui bahwa jumlah program dan indikator pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah 5 (lima) program dan 8 (delapan) indikator dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 89.839.000.

Dilihat dari realisasi kinerja, rata-rata capaian kinerja program pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencapai 103 % melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh indikator telah mencapai target. Adapun indikator tersebut antara lain Jumlah dokumen yang responsif Gender, Jumlah OPD yang telah melaksanakan PPRG, Persentase penurunan perceraian, Persentase cakupan pernikahan usia anak, Persentase cakupan KDRT, Jumlah data yang dikelola, Persentase kelembagaan yang memfasilitasi hak anak, Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Selanjutnya dari sisi penyerapan anggaran dilaporkan bahwa realisasi anggaran sebesar Rp. 73.616.406 mencapai 81,94 % terhadap pagu di Tahun 2021. Capaian realisasi anggaran ini termasuk dalam kategori tinggi. Dari seluruh Program terdapat 4 (empat) program yang memiliki realisasi anggaran di atas 90 % yaitu Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA). Namun terdapat satu program dengan serapan anggaran masih di bawah 70 % yakni Program Perlindungan Khusus Anak.

Berdasarkan uraian capaian kinerja dan realisasi anggaran di atas, terdapat faktor penghambat tidak terpenuhinya target yaitu :

1. Belum optimalnya implementasi perencanaan pembangunan yang responsif gender;
2. Kurangnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

3. Belum tersusunnya buku Profil Gender;
4. Kurangnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. Banyak kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan sehingga angka riil dilapangan sulit diketahui;

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Mengoptimalkan Kegiatan Pengarusutamaan Gender;
2. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak anak;
3. Mengkoordinasikan penyusunan Buku Profil Gender;
4. Meningkatkan pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak;
5. Meningkatkan Perlindungan khusus anak dan perempuan.

3. Pangan

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Pangan. Di Kabupaten Lumajang Urusan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dengan memiliki 4 (empat) program dan 4 (empat) indikator dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 1.228.006.514. Adapun nama program tersebut adalah sebagai berikut: Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Pada capaian kinerja indikator program urusan Pangan mencapai 100 %, hal ini menunjukkan bahwa seluruh target indikator program telah tercapai dengan baik. Adapun indikator tersebut antara lain Presentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi, Prosentase Penanganan Kerawanan Pangan, Presentase Konsumsi Energi dan Prosentase Aman Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)Jumlah Wilayah pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan .

Selanjutnya realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.227.052.900 atau mencapai99,92% terhadap pagu di Tahun 2021. Capaian realisasi anggaran ini termasuk dalam kategori tinggi. Seluruh Program memiliki realisasi anggaran di atas 90 %.

Dalam pelaksanaan urusan pangan tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan antara lain :

1. Pelaku usaha binaan ketahanan pangan belum siap dan belum paham dalam pengurusan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan;
2. Masih adanya ego sektoral antarinstansi terkait sehingga menjadi penghalang dalam melakukan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Akan disampaikan sosialisasi melalui media sosial agar pelaku usaha memahami pengurusan registrasi PSAT;
2. Mengembangkan kerjasama antar instansi demi terciptanya harmonisasi dan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien sehingga dapat terjalin.

4. Pertanahan

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah urusan pertanahan. Di Kabupaten Lumajang Urusan Pertanahan dibebankan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Berdasarkan evaluasi rencana kerja diketahui bahwa jumlah program dan indikator pada urusan pertanahan adalah 2 (dua) program dan 2 (dua) indikator dengan jumlah pagu anggaran urusan sebesar Rp.336.808.600. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dan Program Pengelolaan Tanah Kosong.

Selanjutnya untuk rata-rata capaian kinerja indikator program pada urusan pertanahan mencapai 100 % dengan kategori kriteria realisasi kinerja sangat tinggi. Indikator yang memiliki capaian kinerja tersebut yakni Prosentase redistribusi tanah dan Prosentase pengelolaan tanah kosong. Pada sisi penyerapan anggaran dilaporkan bahwa realisasi anggaran sebesar Rp. 312.136.250 mencapai 92,67% dari total pagu yang ada di Tahun 2021. Realisasi penyerapan anggaran ini termasuk dalam kategori sangat tinggi.

5. Lingkungan Hidup

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah urusan Lingkungan Hidup. Di Kabupaten Lumajang urusan lingkungan hidup dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Pada urusan Lingkungan Hidup,

dapat diketahui bahwa Urusan Lingkungan Hidup memiliki 8 (delapan) Program dan 8 (delapan) Indikator dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 8.654.853.711. Berikut 8 (delapan) program tersebut antara lain Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pengelolaan Persampahan, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh), Program Perencanaan Lingkungan Hidup (Rpplh), Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).

Dari hasil keseluruhan capaian program dapat diketahui rata-rata capaian kinerja program mencapai 83,94 % termasuk dalam kategori kriteria realisasi kinerja tinggi. Adapun indikator yang telah mencapai atau melebihi target yaitu pada indikator Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi perizinan lingkungannya, Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun, Persentase lembaga /masyarakat yang mendapat fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup dan Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati. Sedangkan indikator Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah tertangani mencapai kategori kinerja tinggi, indikator Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup mencapai kategori sedang dan 2 (dua) indikator lainnya mencapai kinerja dengan kategori rendah yakni Prosentase titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai standar, Persentase sampah terkelola.

Dari sisi penyerapan anggaran dilaporkan bahwa penyerapan anggaran Urusan Lingkungan Hidup mencapai 94,43 % dalam kategori sangat tinggi. Dijelaskan dari ke delapan program yang ada telah mencapai penyerapan anggaran di atas 90 % kecuali pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) realisasi anggarannya di bawah 90 %. Terdapat factor penghambat pencapaian kinerja antarlain:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan, persyaratan dan mekanisme teknis yang belum optimal, serta anggaran, sumber daya manusia, dan kebijakan daerah;
2. Kondisi potensi timbulan sampah cukup tinggi tetapi tidak sebanding dengan tersedianya sarana prasarana, sumber daya manusia dan biaya operasional serta kurangnya

- kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber timbulan sampah.
3. *Refocusing* anggaran untuk penanganan Covid 19 sehingga menyebabkan pencapaian kinerja Program tidak maksimal.
 4. Pelaksanaan program/kegiatan tidak sesuai dengan *time schedule* yang ditetapkan.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di Kabupaten Lumajang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibebankan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa pada urusan Kependudukan dan catatan Sipil memiliki 3 (tiga) Program dan 3 (tiga) Indikator dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 1.722.785.500. Program urusan Kependudukan dan catatan Sipil tersebut antara lain Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil Dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Dari sisi capaian kinerja indikator program urusan Kependudukan dan catatan sipil mencapai 108,9 % melebihi target yang telah ditetapkan. Indikator tersebut antara lain Persentase Penerbitan Dokumen pendaftaran pendudukan, Persentase Penerbitan Dokumen Capil dan Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SIAK. Selanjutnyadalam penyerapan anggaran, secara umum dilaporkan bahwa realisasi anggaranurusan Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp. 1.722.789.500 mencapai 99,98 % dengan kategori kriteria realisasi kinerja sangat tinggi. Realisasi penyerapan anggran pada seluruh program pada urusan ini di atas 90 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;

2. Masih kurangnya Sarana Prasarana dalam mendukung tercapainya target Dokumen Administrasi Kependudukan misalkan terkendala printer KTP-el yang rusak;
3. Pelaksanaan program/kegiatan yang tidak sesuai *time schedule*.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Melakukan sosialisasi layanan administrasi kependudukan sampai ke tingkat desa;
2. Mengoptimalkan Sarana Prasarana yang ada dalam mendukung tercapainya target Dokumen Administrasi;
3. Melakuka koordinasi internal dalam Pelaksanaan program/kegiatan agar sesuai *time schedule*.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Di Kabupaten Lumajang urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dibebankan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD). Dalam urusan ini, terdapat 3 (tiga) Program dan 3 (tiga) Indikator Program dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 1.875.786.400. Adapun program dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa dengan rata-rata capaian kinerja indikator program mencapai 90,22 %. Capaian ini tergolong sangat tinggi. Dari ke 3 (tiga) indikator program terdapat 2 (dua) indikator yang telah mencapai target yaitu Persentase Desa yang melakukan Kerjasama dan Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa sedangkan pada indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif mencapai 70,67 %. Dalam realisasi penyerapan anggaran Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan desa sebesar Rp. 1. 820.102.700 atau sebesar 97,03% dari pagu yang telah ditetapkan. Seluruh realisasi program di atas 90% dan tergolong dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021,

ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain:

1. Adanya *Refocusing* anggaran untuk penanganan Covid 19 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan;
2. Kurangnya pemahaman PP 11 tahun 2021 tentang BUMDesa dan permendesa tahun 2021 tentang tatacara pembentukan pengelolaan DBM ex PNPM-MPd ke BUMDesma;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat atas pengelolaan potensi ekonomi desa dan BUMDesa;
4. Sering adanya pergantian operator atau petugas entri data yang menghambat proses *Updating* profil desa dan kelurahan;
5. Tidak dilaksanakannya kegiatan penguatan LKD, LAD, BBGRM dan penguatan posyandu yang rencananya menggunakan metode Comunitie Base dengan mengumpulkan massa karena adanya PPKM;
6. Belum optimalnya sumber daya manusia KPSPAM dalam mengelola sumber daya alam yang menggunakan alat TTG.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Kegiatan yang bersifat penguatan dan mengumpulkan massa dilaksanakan secara virtual (*zoom meeting*);
2. Melakukan Diseminasi PP 11 tahun 2021 tentang BUMDesa dan permendesa tahun 2021 tentang tatacara pembentukan pengelolaan DBM ex PNPM-MPd ke BUMDesma;
3. Mengkoordinasikan pihak terkait dapat bersinergi dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dan BUMDesa dan penguatan unsur kecamatan dengan metode TOT untuk menjadi fasilitator tingkat desa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
4. Perlu adanya bimbingan teknis dalam pelaksanaan *Updating* profil desa dan kelurahan dengan tetap melibatkan unsur kecamatan;
5. Melakukan kegiatan pembinaan dan monitoring KPSPAM secara berkala.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Di Kabupaten Lumajang urusan diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk KB dan PP. Jumlah Program dan indikator pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sejumlah 3 (tiga) Program dan 4 (empat) indikator Program. Adapun rincian program tersebut adalah Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Selanjutnya pagu anggaran urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 8.272.382.453.

Secara umum rata-rata capaian kinerja indikator program mencapai 88,75 % dan capaian ini tergolong kategori tinggi. Terdapat 3 (tiga) Indikator Program yang memiliki realisasi sangat tinggi antara lain Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Seharusnya BerKB tetapi Belum Terlayani (Unmet Need), Persentase Peserta KB terhadap Pasangan Usia Subur (PUS), Persentase Tribina dan UPPKS yang ikut KB. Selain terdapat indikator dengan capaian tinggi juga terdapat indikator dengan realisasi sangat rendah yaitu pada indikator Persentase Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 Tahun.

Dalam realisasi penyerapan anggaran Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum dilaporkan mencapai 81,95 % atau sebesar Rp. 6.778.816.878 dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Dari ke tiga (3) Program yang ada, program yang memiliki serapan tertinggi pada Program Persentase Peserta KB terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) yakni 83,77%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan pada urusan ini belum optimal dilakukan.

Berdasarkan uraian capaian kinerja dan realisasi anggaran di atas, terdapat faktor penghambat tidak terpenuhinya target yaitu :

1. Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) masih kurang;
2. Cakupan PUS dalam ber KB masih belum terpenuhi karena kurangnya kesadaran masyarakat.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Mengoptimalkan Fungsi Lini Lapangan dan KIE;
2. Meningkatkan Mutu dan akses Pelayanan Keluarga Berencana;

3. Melakukan pemenuhan Sarana Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana.

9. Perhubungan

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Perhubungan. Penyelenggaraan Urusan Perhubungan dilasanakan oleh Dinas Perhubungan. Berdasarkan hasil evaluasi dilaporkan bahwa Urusan Perhubungan memiliki satu (satu) Program dan 3 (tiga) indikator dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 22.158.094.723. Adapun program pada Urusan Perhubungan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Hasil evaluasi dilaporkan bahwa rata-rata capaian indikator program mencapai 78,01 % dan tergolong predikat kinerja Tinggi. Dari ketiga indikator yang ada terdapat 2 (dua) indikator yang capaian kinerjanya melebihi 90 % yaitu pada Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai dan Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai. Sedangkan capaian kinerja pada indikator Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas sangat rendah dengan capaian di bawah 50%. Selanjutnya pada penyerapan anggaran pada Urusan Perhubungan sebesar Rp. 21.798.933.989 atau mencapai 98,38 % dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran pada urusan ini termasuk dalam kategori sangat Tinggi.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih ditemui hambatan dan permasalahan antara lain :

1. Belum Terpenuhinya target pemenuhan angkutan umum yang memadai;
2. Belum terpenuhinya target pemasangan Perlengkapan Jalan;
3. Belum tersedianya prasarana pelaksanaan pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih ditemui hambatan dan permasalahan antara lain :

1. Perlu adanya kegiatan pemutihan pada pelayanan perhubungan dikarenakan pada masa pandemi COVID-19, angkutan umum tidak memperoleh keuntungan sesuai dengan target yang diharapkan;
2. Membuat kajian manfaat tentang rencana pemasangan perlengkapan jalan;

3. Melakukan usulan penyediaan prasarana pelaksanaan pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

10. Komunikasi dan Informatika

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Komunikasi dan Informatika. Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa Urusan Komunikasi dan Informatika memiliki 2 (dua) Program dan 2 (dua) Indikator dengan Pagu anggaran urusan Rp. 2.097.330.530. Adapun program pada urusan ini antara lain Program Aplikasi Informatika Dan Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Secara umum capaian kinerja pada Urusan Komunikasi dan Informatika mencapai 95,85 % dan tergolong dalam predikat kinerja sangat tinggi. Dari ke dua indikator yang ada, memiliki realisasi capaian kinerja di atas 90 % yaitu pada indikator Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu serta Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat. Selanjutnya pada penyerapan anggaran dilaporkan bahwa realisasi anggaran program sebesar Rp. 2.056.906.163 atau mencapai 98,07 % dari pagu urusan yang ada. Penyerapan anggaran ini termasuk ke dalam kategori sangat tinggi dimana seluruh Program pada urusan ini memiliki realisasi anggaran di atas 90 %.

Berdasarkan Capaian Kinerja terhadap program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang ada;
2. Keterbatasan Sumber Daya manusia yang ada dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika;
3. Adanya *Refocusing* anggaran terhadap penanganan pandemi covid-19 berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan termasuk kegiatan pemeliharaan yang tidak dapat dilaksanakan;
4. Adanya ketimpangan beban kerja antara Bidang Informasi Publik dan Bidang Komunikasi Publik serta kesulitan dalam

pengukuran kinerja karena sama-sama melaksanakan Program yang sama yakni Informasi dan Komunikasi Publik.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Di Kabupaten Lumajang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Pada Urusan Koperasi dan Usaha Mikro memiliki 4 (empat) program dan 4 (empat) indikator dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 12.021.595.154. Program pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm), Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Dan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi.

Secara umum capaian indikator kinerja pada Urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata capaian kinerja program mencapai 99,81 %. Dari ke 4 (empat) indikator program terdapat 3 (tiga) indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan yakni pada indikator Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan, Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan dan Jumlah kesehatan KSP/USP koperasi. Selanjutnya pada indikator Jumlah UM yang diberdayakan belum mencapai target yang ditetapkan namun termasuk kategori predikat sangat tinggi dengan capaian kinerja di atas 90%.

Selanjutnya pada penyerapan anggaran dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp. 11.751.243.295 atau mencapai 97,75% dari pagu yang ditetapkan serta termasuk dalam kategori penyerapan sangat tinggi. Program yang memiliki penyerapan anggaran di atas 90 % antara lain Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm), Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Dan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi. Selanjutnya Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi memiliki realisasi anggaran di bawah 90 %.

Berdasarkan hasil capaian kinerja diatas dapat diketahui bahwa penyelenggaraan program Urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki permasalahan antara lain:

1. Adanya *Refocusing* anggaran untuk penanganan Covid 19 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan;

2. Terbatasnya Jumlah sumber Daya Masusiyang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Masih kurang memadainya kualitas sumber daya manusia pada koperasi di Lumajang.

Selanjutnya upaya dalam menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan program Urusan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

1. Mengoptimalkan anggaran yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
2. Mengoptimalkan Sumber Daya Masusiyang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Mengikutsertakan pengurus dalam bimbingan teknis perkoperasian;
4. Memberi pembinaan kepada pengurus, pengawas, anggota koperasi tentang pentingnya dan manfaat berkoperasi.

12. Penanaman Modal

Urusan non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Penanaman Modal. Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan hasil evaluasi, Urusan Penanaman Modal memiliki 5 (lima) Program dan 5 (lima) Indikator dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 1.082.611.900. Berikut nama program pada urusan Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Rata-rata capaian kinerja urusan Penanaman Modal sebesar 47,27 % termasuk dalam kategori predikat kinerja sangat rendah. Rendahnya capaian kinerja urusan ini dapat terlihat dengan adanya 3 (tiga) indikator dengan capaian di bawah 50 % yakni pada indikator Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal, Nilai Investasi Penanaman Modal dan Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM. Namun terdapat 2 (dua) indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan yakni pada indikator Persentase Pengaduan Yang Diselesaikan dan Persentase Jenis Layanan Perijinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik.

Dari sisi penyerapan anggaran dilaporkan bahwa realisasi anggaran urusan Penanaman Modal sebesar Rp. 867.263.450 atau mencapai 80 % dari total pagu yang telah ditetapkan. Dari ke 5 (lima) program terdapat 2 (dua) program dengan capaian di atas 90% yaitu pada Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Selanjutnya program dengan kategori serapan anggaran tinggi dan sedang pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal Dan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Adanya perubahan regulasi yang mengacu pada UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dan aturan turunannya yang mana usaha mikro (0 s.d 1 M) tidak wajib menyampaikan LKPM;
2. Adanya perubahan sistem OSS yang sebelumnya OSS versi 1.1 menjadi OSS berbasis Risiko sehingga membutuhkan migrasi data dan membutuhkan waktu untuk penyesuaiannya. Disamping itu sistem masih dalam proses penyempurnaan dari pusat sehingga sistem masih sering bermasalah yang mengakibatkan terhambatnya proses penyampaian LKPM karena untuk menyampaikan LKPM disarankan untuk migrasi data terlebih dahulu;
3. Masih dalam situasi pandemi covid 19 yang mempengaruhi profit perusahaan sehingga pelaku usaha kesulitan dalam mengembangkan usahanya;
4. Penyusunan Peraturan Bupati Insentif yang nantinya menjadi aturan pemberian insentif dan kemudahan berusaha belum bisa dilakukan karena masih menunggu proses peraturan daerah Urusan Penanaman Modal diundangkan sehingga target 40% prosentase perusahaan yang mendapat insentif belum dapat dicapai;
5. Target Investasi 500 Juta tidak tercapai dikarenakan target investasi daerah yang dimaksud belum memiliki feasibility study/ studi kelayakan, sehingga investor kurang tertarik untuk mengembangkan potensi tersebut;

6. Belum optimalnya dukungan dari Perangkat Daerah teknis, hal ini dikatehui dari proses pemberian rekomendasi teknis yang membutuhkan waktu relatif lama bahkan belum terstandar waktu layanannya;
7. Jenis layanan perizinan yang dilayani bergantung pada jenis izin yang dimohonkan oleh pemohon sehingga tidak seluruh jenis layanan dilayani;
8. Terbatasnya sarana penunjang proses verifikasi lapangan dan pengaduan (kendaraan dan ketersediaan biaya perjalanan dinas);
9. Banyaknya para pelaku usaha yang mengabaikan penyampaian pelaporan LKPM karena berbagai alasan disamping itu kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk patuh menyampaikan LKPM;
10. Adanya perubahan regulasi yang mengacu pada UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020, yang sebelumnya skala usaha Mikro 0 s.d 50jt menjadi 0 s.d 1 Milyar. Pada regulasi yang baru Penyampaian LKPM untuk skala usaha Mikro tidak diwajibkan untuk melaporkan LKPM sedangkan pelaku usaha yang dipantau lebih dominan yang usaha mikro sehingga pencapaian target hanya 44 pelaku usaha yang telah menyampaikan LKPM sedangkan sisanya belum melaporkan meskipun sudah sebagian telah dilakukan pengawasan;
11. Masih banyaknya para pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya yaitu salah satu nya menyampaikan LKPM walapun telah dilakukan pemantauan dan pembinaan tetapi masih kurangnya kesadaran dari pelaku usaha, sehingga perlu adanya regulasi dari daerah untuk menekan para pelaku usaha agar sadar dan patuh menyampaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha;
12. Terbatasnya jumlah Sarana penunjang pengelolaan data dan sistem informasi (Server dan Storage Aplikasi /Network Allocation Storage)
13. Kurangnya pelatihan lanjutan kepada personil IT dalam pelaksanaan manajemen pengelolaan teknologi informasi yang baik dan benar.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas antara lain :

1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha tentang perubahan regulasi penyampaian LKPM secara online;
2. Melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha dalam proses migrasi data perizinannya guna mengatasi terhambatnya pelaporan LKPM;
3. Menyusun kebijakan yang dapat memberikan stimulus kepada pelaku usaha guna meningkatkan perkembangan usahanya;
4. Melakukan penyempurnaan terhadap Raperda yang selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah yang menjadi dasar pemberian insentif kepada pelaku usaha;
5. Mengkoordinasikan penyusunan *feasibility study* pada setiap potensi investasi di daerah guna meyakinkan investor bahwa potensi investasi tersebut layak untuk ditanamkan modalnya;
6. Mengkoordinasikan dukungan Perangkat Daerah teknis lebih maksimal dan proses penerbitan rekomendasi teknis lebih cepat dan terstandar waktu;
7. Mengkoordinasikan penerbitan Peraturan Daerah yang mengatur pemberian insentif maka jenis layanan yang dimohonkan dapat terlaksana secara maksimal;
8. Mengkoordinasikan penyediaan sarana penunjang;
9. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya pelaporan LKPM;
10. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi serta menekankan sanksi yang akan diberikan jika tidak secara berkala melaporkan LKPM;
11. Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi serta melakukan penyusunan peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang menekankan pentingnya pelaporan LKPM;

12. Mengkoordinasikan penyediaan sarana penunjang dengan menyediakan storage aplikasi untuk mendukung pengelolaan data dan sistem informasi;
13. Meningkatkan pembinaan kepada personil IT guna menambah ilmu pengetahuan dibidang IT yang terbaru.

13. Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Kepemudaan dan Olah. Di Kabupaten Lumajang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olah Raga. Pada urusan ini terdapat 3 (tiga) Program dan 4 (empat) indikator program dengan pagu urusan sebesar Rp. 16.834.849.848. Selanjutnya nama program pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga antara lain Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

Berdasarkan hasil laporan evaluasi bahwa capaian kinerja pada Urusan Kepemudaan dan Olah Raga mencapai 101 % telah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja program antara lain Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, Jumlah Fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing OKP, Persentase peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan dan Persentase fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan.

Dalam penyerapan anggaran pada Urusan kepemudaan dan Olah Raga dilaporkan sebesar Rp. 15.836.002.935 atau mencapai 94,07% dari Pagu anggaran urusan yang ditetapkan. Terdapat 2 (dua) Program yang telah memiliki penyerapan sebesar 100% yakni pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan. Sedangkan pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan mencapai 93,35%.

Meskipun dalam pencapaian kinerja tergolong Sangat Tinggi namun dalam pelaksanaan program terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan belum mencakup semua keterwakilan pemuda dan Organisasi Kepemudaan;
2. Belum tersedianya data kepemudaan yang komprehensif;

3. Adanya penundaan dan pembatasan kegiatan event / kejuaraan (olahraga prestasi maupun rekreasi) sehingga tidak semua cabang mengikuti kejuaraan tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional;
4. Selama PPKM Masyarakat/pelaku olahraga tidak bisa menggunakan sarana dan prasarana olahraga karena ada penutupan sementara;
5. Adanya *Refocusing* anggaran terhadap penanganan pandemi covid-19 berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan termasuk kegiatan pemeliharaan yang tidak dapat dilaksanakan.

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengkoordinasikan Pembentukan forum dan sentra kepemudaan serta memfasilitasi Penyusunan rencana aksi kepemudaan;
2. Melakukan Pembentukan pemuda kader di setiap kecamatan;
3. Mengoptimalkan sarana prasarana guna memfasilitasi cabang Olahraga dalam pelaksanaan PORPROV;
4. Meningkatkan Sinergitas dengan KONI dan Dispora provinsi serta pendukung lain dalam upaya peningkatan prestasi olahraga khususnya dalam pelaksanaan tuan rumah PORPROV 2022;
5. Melakukan monitoring dan Evaluasi baik internal maupun eksternal (KONI, Kepramukaan dan kelompok/komunitas olahraga) terkait pelaksanaan kegiatan maupun pertanggungjawaban.

14. Statistik

Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada urusan ini terdapat 1 (satu) Program dan 1 (satu) indikator program dengan pagu urusan sebesar Rp. 31.928.500. Program pada Urusan Statistik adalah program penyelenggaraan statistik sektoral dengan indikator Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi. Selanjutnya capaian kinerja pada urusan statistik telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan dengan

penyerapan anggaran sebesar Rp. 31.918.700 atau mencapai 99,97 % dari pagu anggaran urusan yang ada.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Adanya Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat daerah melalui pemanfaatan media online;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pembina pelaksanaan urusan statistik.

15. Persandian

Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada urusan ini terdapat 1 (satu) Program dan 1 (satu) indikator program dengan pagu urusan sebesar Rp. 30.000.000. Program pada Urusan Statistik adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

Selanjutnya dilaporkan bahwa capaian kinerja dan anggaran pada urusan statistik tergolong predikat kinerja rendah. Hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja mencapai 60% dari target kinerja yang ditetapkan dan begitu halnya dengan penyerapan anggaran dilaporkan sebesar Rp. 18.000.000 atau mencapai 60 % dari pagu anggaran urusan yang ada. Rendahnya capaian kinerja ini disebabkan salah satunya adalah dengan adanya *Refocusing* anggaran untuk penanganan Covid 19 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat terlaksana sehingga berpengaruh terhadap tercapainya kinerja.

16. Kebudayaan

Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pada urusan ini terdapat 5 (lima) Program dan 5 (lima)

indikator program dengan pagu urusan sebesar Rp. 3.066.409.000. Adapun program pada urusan kebudayaan antara lain Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pembinaan Sejarah, Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Dan Program Pengelolaan Permuseuman.

Secara umum capaian kinerja pada urusan kebudayaan termasuk pada kategori kinerja sangat tinggi yaitu mencapai 94,29 %. Capaian ini ditunjukkan dengan telah tercapainya target pada 4 (empat) indikator yakni Jumlah kesenian tradisional yang dikembangkan, Jumlah pembinaan yang dilaksanakan, jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikelola serta Jumlah museum yang dikelola. Sedangkan pada indikator Jumlah kebudayaann yang dikembangkan belum mencapai target dengan capaian di bawah 75 %.

Selanjutnya pada penyerapan anggaran untuk urusan kebudayaan sebesar Rp. 3. 055.828.900 atau mencapai 99,65 % dari pagu anggaran urusan yang ada. Terdapat 2 (dua) program dengan penyerapan anggaran 100% yaitu pada Program Pengembangan Kebudayaan Dan Program Pembinaan Sejarah. Kemudian 3 (tiga) Program memiliki serapan anggaran di atas 90 % antara lain Program Pengembangan Kesenian Tradisional, Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Dan Program Pengelolaan Permuseuman

17. Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan Pemerintah Daerah selanjutnya adalah Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan. Pada urusan ini terdapat 1 (satu) Program dan 1 (satu) indikator program dengan pagu urusan sebesar Rp. 2.507.974.000 di Tahun 2021. Program pada Urusan Perpustakaan adalah Program Pembinaan Perpustakaan dengan indikator Persentase perpustakaan yang melakukan pengelolaan sesuai ketentuan. Selanjutnya capaian kinerja pada urusan Perpustakaan telah memenuhi dari target yang telah ditetapkan namun sebaliknya pada penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.979.102.700 atau mencapai 78,91 % dari pagu anggaran urusan yang ada.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengakibatkan terdapat kegiatan yang

bersifat tatap muka tidak dapat terlaksana;

2. Untuk layanan eksensi belum bisa mencapai target mengingat kondisi di tahun 2021 hampir seluruh lembaga pendidikan melakukan kegiatan *via* daring (Dalam Jaringan).

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Melakukan dan memaksimalkan pelayanan pembinaan dengan *via* daring dan menyebarkan kuisisioner melalui google form untuk mengetahui perkembangan eksisting perpustakaan binaan;
2. Memaksimalkan pelayanan *e-book* yang akan di sebar dengan link melalui aplikasi di *google playstore*, diharapkan siswa di lembaga pendidikan bisa menikmati layanan *e-book* berbasis *elektronik book*.

18. Kearsipan

Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Kearsipan. Di Kabupaten Lumajang Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas kearsipan dan Perpustakaan. Pada Urusan Kearsipan memiliki 2 (dua) program dan 2 (dua) indikator. Program tersebut antara lain Program Pengelolaan Arsip Dan Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 13.956.000.

Kemudia untuk rata-rata capaian kinerja mencapai 97,25 % termasuk dalam interval penilaian sangat tinggi. Tingginya capaian urusan ini ditunjang dengan tingginya capaian setiap indkator yakni pada indikator Persentase arsip yang di kelola LKD dan Persentase peningkatan arsip yang di lindungi dan diselamatkan. Selanjutnya dari sisi penyerapan anggaran dilaporkan bahwa realisasi sebesar 13.954.000 atau mencapai 99,99 % dan tergolong dalam kategori sangat sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan Program Pengelolaan Arsip dan Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip telah dilakukan dengan baik.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Adanya *Refocusing* anggaran dalam penanganan Covid 19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak

dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan;
2. Aktivitas kegiatan yang belum terlaksana akan dievaluasi dan direncanakan kembali di tahun berikutnya dengan tetap mempertimbangkan perkembangan pandemi Covid 19.

2.2.1.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu urusan pilihan yang dapat diselenggarakan pemerintah daerah. Di Kabupaten Lumajang, urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan kepada Dinas Perikanan. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa pada urusan Kelautan dan Perikanan terdapat 4 (empat) Program dan 4 (empat) indikator dengan pagu anggaran urusan sebesar Rp. 1.490.509.050. Adapun program pada urusan kelautan dan Perikanan antara lain Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Secara umum capaian kinerja pada urusan Kelautan dan Perikanan termasuk kriteria realisasi kinerja sedang. Rata-rata capaian kinerja program dilaporkan mencapai 75,51%. Hal ini disebabkan karena dari 4 (empat) indikator yang ada terdapat satu indikator belum memiliki realisasi kinerja yakni pada indikator Persentase penurunan angka pelanggaran. Sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu pada indikator Jumlah produksi perikanan tangkap, Jumlah produksi perikanan budidaya, dan Jumlah produksi olahan hasil perikanan.

Selanjutnya jika dilihat dari sisi penyerapan anggaran dilaporkan bahwa realisasi anggaran Urusan Kelautan dan Perikanan mencapai 91,12 % dalam kategori sangat tinggi. Dari keseluruhan program yang memiliki serapan anggaran sangat tinggi antara lain pada Program Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Dan Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan. Sedangkan

penyerapan pada program Pengelolaan Perikanan Budidaya termasuk dalam kategori tinggi.

Berdasarkan uraian capaian kinerja dan realisasi anggaran di atas, terdapat faktor penghambat tidak terpenuhinya target yaitu :

1. Terdapat kendala dalam aplikasi OMSPAN sehingga tidak dapat memasukkan nilai kontrak DAK Tahun 202;
2. Adanya *Refocusing* anggaran dalam penanganan Covid 19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan Tim APIP Inspektorat Daerah selaku Tim Pengawasan dan Pengendalian DAK dan BPKD Kabupaten Lumajang;
2. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ;
3. Aktivitas kegiatan yang belum terlaksana akan dievaluasi dan direncanakan kembali di tahun berikutnya dengan tetap mempertimbangkan perkembangan pandemi Covid 19;

2. Pariwisata

Urusan pilihan yang dapat diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Pariwisata. Di Kabupaten Lumajang, Urusan Pariwisata dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki 4 (empat) Program dan 4 (empat) indikator dengan pagu anggaran Rp. 10.646.597.126. Pada urusan Pariwisata memiliki Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata, Program Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan hasil evaluasi, dari ke empat indikator yang ada telah memenuhi target yang telah ditetapkan yakni pada indikator Jumlah Daya Tarik Destinasi wisata yang ditingkatkan, Jumlah pemasaran kepariwisataan, Jumlah zona kreatif yang berkembang dan Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang.

Selanjutnya pada penyerapan anggaran Urusan Pariwisata dilaporkan bahwa realisasi anggaran sebesar Rp. 9.719.731.900 mencapai 91,29 % dalam kategori sangat tinggi. Dari ke empat program terdapat tiga program yang memiliki penyerapan anggaran di atas 90 % yakni pada Program Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Namun Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Adanya *Refocusing* anggaran untuk penanganan Covid 19 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan;
2. Dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengakibatkan terdapat kegiatan dalam obyek wisata yang ada di kabupaten Lumajang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ;
2. Melakukan analisis situasi tempat-tempat obyek wisata yang berisiko menjadi tempat penularan Covid 19 selanjutnya melakukan himbauan dan memastikan bahwa obyek wisata tersebut telah menerapkan protokol Kesehatan.

3. Pertanian

Urusan pilihan yang dapat diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Pertanian. Di Kabupaten Lumajang Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Pada urusan Pertanian memiliki 6 (enam) Program dan 6 (enam) Indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.254.790.500. Adapun ke enam program tersebut antara lain Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Sarana : Alsintan Dan Sapropdi), Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Pengendalian Dan

Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian Dan Program Perizinan Usaha Pertanian.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi dijelaskan bahwa kinerja program Urusan Pertanian tergolong dalam kategori kinerja sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 99,62%. Dari ke enam indikator yang ada pada Urusan Pertanian terdapat lima indikator telah mencapai target yakni pada indikator Jumlah kelompok yang terfasilitasi prasarana pertanian, Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur), Persentase pengurangan nilai kerugian, Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan dan Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian. Selanjutnya terdapat satu indikator dengan realisasi kinerja belum mencapai target yang ada namun masih tergolong pada kategori kinerja sangat tinggi yaitu pada indikator Jumlah produksi pertanian dengan rincian produksi pada Tanaman pangan, Tanaman buah, Tanaman Buah dan sayur semusim, Tanaman Tahunan, Tanaman Semusim, Daging, Telur, Susu, Populasi ternak besar, Populasi ternak kecil dan Populasi ternak unggas.

Pada penyerapan anggaran dilaporkan bahwa kinerja anggaran Urusan Pertanian sebesar Rp. 16.521.704.505 atau mencapai 90,51 % dan termasuk pada kategori penyerapan sangat tinggi. Dalam laporan penyerapan anggaran dijelaskan bahwa dari enam program yang ada terdapat tiga program dengan penyerapan di atas 90 % yakni Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian (Sarana : Alsintan Dan Saprodi), Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Program dengan serapan anggaran dalam kategori tinggi pada Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dan Program Perizinan Usaha Pertanian. Selanjutnya satu program dengan penyerapan anggaran rendah pada Program Penyuluhan Pertanian.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang terlaksananya tugas dan fungsi kedinasan;
2. Adanya dampak *recofusinganggaran* mengakibatkan pengurangan calon penerima bantuan pada kelompok tani;
3. Belum adanya komitmen dalam pengendalian alih fungsi lahan;
4. Ketidaksesuaian waktu realisasi anggaran DAK (termin 3)

sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran dan kelanjutan program;

5. Masih terdapat rumah pemotongan hewan/tempat pemotongan hewan yang belum memiliki ijin operasional;
6. Adanya gangguan reproduksi hewan betina;
7. Masih tingginya tingkat pemotongan hewan betina produksi;
8. Semakin menurunnya tingkat kebutuhan asuransi pertanian di setiap tahun;
9. Masih tingginya usaha bidang pertanian yang belum memiliki ijin usaha;
10. Terbatasnya sarana dan prasarana IT pendukung penyuluhan;
11. Semakin menurunnya jumlah tenaga penyuluh pertanian.

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ;
2. Mengupayakan calon penerima bantuan yang terhapus dapat menerima program bantuan di tahun anggaran berikutnya;
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan semua *stakeholder* terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
4. Melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah terkait realisasi anggaran;
5. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap rumah pemotongan hewan untuk mendapatkan ijin pelaku usaha Rumah Pemotongan Hewan/Tempat Pemotongan Hewan;
6. Penggunaan bibit unggul untuk mengatasi reproduksi hewan ternak;
7. Melakukan sosialisasi dan pembinaan dalam optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) pada hewan ternak betina;
8. Melakukan peningkatan upaya dalam sosialisasi asuransi pertanian dengan penambahan program klaim asuransi;

9. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk mendaftarkan ijin usaha khususnya di bidang pertanian;
10. Mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana penyuluh pertanian;
11. Mengkoordinasikan penambahan tenaga penyuluh pertanian.

4. Perdagangan

Urusan pilihan yang dapat diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Perdagangan. Di Kabupaten Lumajang Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada urusan Perdagangan memiliki 5 (lima) Program dan 6 (enam) Indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.837.941.471. Adapun ke enam program tersebut antara lain Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen Dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Rata-rata capaian kinerja Urusan Perdagangan tergolong pada kategori kinerja sedang yaitu mencapai 79,19% dari target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan tingkat capaian kinerja, dilaporkan bahwa tiga indikator program dengan capaian di atas 90% atau kategori terdapat pada indikator Prosentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil, Nilai Ekspor dan Nilai Perdagangan Antar Daerah. Selanjutnya dua indikator program dengan kategori tinggi terdapat pada indikator Nilai retribusi pelayanan pasar dan Prosentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang. Sedangkan satu indikator, Prosentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah belum mencapai target yang telah ditetapkan dan memiliki kinerja sangat rendah.

Untuk realisasi penyerapan anggaran pada Urusan Perdagangan sebesar Rp. 5.458.017.826 atau mencapai 93,49%. Terdapat tiga program yang memiliki penyerapan anggaran sangat tinggi di atas 90 % antara lain Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen Dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Satu program lainnya memiliki realisasi anggaran dengan kategori tinggi yaitu pada Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sedangkan program terakhir memiliki serapan anggaran dengan kategori sedang yakni pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Adanya *Refocusing* anggaran untuk penanganan Covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan;
2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
3. Pemenuhan Data nilai ekspor dan nilai perdagangan daerah masih menunggu data dari perusahaan/industri;
4. Belum terlaksananya misi dagang di kabupaten Lumajang karena belum adanya informasi misi dagang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur selain itu juga mempertimbangkan perkembangan pandemi Covid – 19 di Kabupaten Lumajang.
5. Capaian kinerja pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota melebihi target kinerja yang ditetapkan karena adanya penyesuaian target kinerja sesuai dengan jumlah produk lokal potensi ekspor yang dipromosikan baik melalui pameran maupun misi dagang;
6. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan rehabilitasi/ pemeliharaan pasar rakyat padahal masih banyak pasar dengan kondisi memerlukan rehabilitasi dan pemeliharaan;
7. Capaian kinerja kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya sejumlah 125 orang melebihi target kinerja yaitu 64 orang, karena penyesuaian pembinaan pengelolaan pasar tidak hanya untuk pengelola pasar berstatus PNS akan tetapi juga untuk pengelola pasar yang berstatus tenaga kontrak
8. Kebijakan tentang harga dikendalikan oleh pusat;
9. Kebijakan tentang jumlah pupuk bersubsidi ditentukan oleh pusat;
10. menurunnya daya beli dan pendapatan masyarakat akibat

adanya pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya nilai perdagangan dalam daerah.

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ;
2. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan yang telah direncanakan misalnya pelayanan tera - tera ulang dengan menyesuaikan zona covid di tiap wilayah kabupaten;
3. Pengadaan aplikasi SIDILAN (Sistem Informasi perDagangan dan Industri LumAjaNg) di tahun 2021 untuk mempermudah pelaporan baik dari perusahaan maupun Industri Kecil Menengah;
4. Berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut terkait pelaksanaan misi dagang dengan Dinas Perdagangan dan Industri Provinsi Jawa Timur;
5. Menyesuaikan target kinerja pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota pada dokumen perencanaan kinerja (renja) tahun berikutnya;
6. Mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus maupun Tugas Pembantuan dari pusat;
7. Penyesuaian target kinerja Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya pada dokumen perencanaan kinerja (renja) tahun mendatang. Selanjutnya Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan di Wilayah Kerjanya mempunyai indikator kinerja jumlah pengelola yang dibina yang lebih difokuskan ke petugas retribusi pasar dengan tujuan meningkatkan ketelitian dalam perhitungan kembali retribusi yang telah diterima sangat dibutuhkan
8. Mengupayakan terjaminnya ketersediaan stock barang sehingga harga tidak terlalu tinggi dan juga melakukan monitoring harga dan stock barang di beberapa pasar induk

setiap hari agar dapat melihat adanya lonjakan harga maupun kelangkaan barang.

9. Melaksanakan pengawasan pupuk bersubsidi secara berkala;
10. Berupaya meningkatkan nilai perdagangan dalam daerah dengan melaksanakan pameran virtual dan pelatihan pemasaran *online* yang bekerjasama dengan *marketplace* untuk mempromosikan produk-produk Kabupaten Lumajang secara digital.

5. Perindustrian

Urusan pilihan yang dapat diselenggarakan pemerintah daerah selanjutnya adalah Urusan Perindustrian. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui bahwa Urusan Perindustrian memiliki 3 (tiga) Program dan 3 (tiga) Indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp. 626.600.875. Adapun 3 (tiga) program tersebut antara lain Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Dari rata-rata capaian kinerja indikator program tergolong dalam kategori Tinggi atau mencapai 85,66 %. Dari ketiga indikator kinerja program tersebut terdapat dua indikator dengan realisasi kinerja melebihi target yakni pada indikator Nilai produksi industri dan Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh IUI. Namun pada indikator ketiga tergolong kinerja rendah yakni pada indikator Prosentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri.

Pada sisi penyerapan anggaran, dijelaskan bahwa realisasi anggaran mencapai 73,30 % termasuk dalam kategori penyerapan sedang. Dari ke tiga program, terdapat dua program dengan tingkat penyerapan tinggi yakni Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dan Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota. Sedangkan pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri tergolong pada penyerapan sedang.

Selanjutnya berikut hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Adanya *Refocusing* anggaran untuk penanganan Covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan;
2. Keterbatasan anggaran dalam bantuan peralatan, fasilitasi sertifikasi merk, halal, uji nutisi dan pelatihan – pelatihan;

3. Adanya masa transisi dari online single submission (OSS) lama ke OSS berbasis risiko.
4. Masih banyak Industri yang tidak menyampaikan laporan semester di SIINAS;
5. Belum adanya sanksi yang mengikat bagi perusahaan yang tidak melaporkan data industrinya;

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selanjutnya kegiatan yang belum terlaksana akan dievaluasi dan direncanakan kembali di tahun berikutnya dengan tetap mempertimbangkan perkembangan pandemi Covid 19;
2. Mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Kementerian Perindustrian untuk bantuan peralatan, rehab dapur bersih IKM, pelatihan - pelatihan serta fasilitasi merk, halal dan uji nutrisi;
3. Berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Satu Pintu (DPMPSTP);
4. Melaksanakan Sosialisasi pada Industri Kecil dan Menengah secara langsung (ke lokasi);
5. Pengadaan aplikasi SIDILAN (Sistem Informasi perDagangan dan Industri LumAjaNg) di tahun 2021 untuk mempermudah pelaporan baik dari perusahaan maupun IKM.

2.2.1.3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Selain urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan, juga dilakukan evaluasi untuk Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang meliputi, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Berikut hasil evaluasi program RKPD tahun 2021:

1. Sekretariat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Sekretariat Daerah adalah unsur staf pendukung kepala daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan,

koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya.

Pada Sekretariat Daerah memiliki 2 (dua) Program dan 2 (dua) Indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.964.908.910. Adapun 2 (dua) program tersebut antara lain Program Perekonomian Dan Pembangunan dengan indikator Angka Inflasi Daerah Dan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi. Dari rata-rata capaian kinerja indikator program tergolong dalam kategori sangat Tinggi atau mencapai 100 %.

Namun sebaliknya pada sisi penyerapan anggaran, dijelaskan bahwa realisasi anggaran mencapai 81,16 % termasuk dalam kategori penyerapan tinggi. Terdapat program dengan realisasi penyerapan anggaran di bawah 50 % yakni pada Program Perekonomian Dan Pembangunan.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Adanya Refocusing anggaran dalam penanganan Covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Terbatasnya jumlah staf di beberapa bagian sehingga beberapa pejabat merangkap tugas sebagai pelaksana;
3. Kurangnya pengembangan dan penyempurnaan produk hukum daerah;
4. Kurangnya pemahaman prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum;
5. Kurangnya kepatuhan terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan;
6. Ditiadakannya kompetisi kelompok budaya kerja tahun 2021 sehingga mengakibatkan OPD/UK tidak lagi bersemangat dalam penyusunan RBK.

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan kegiatan yang belum terlaksana akan dievaluasi dan direncanakan kembali di tahun berikutnya dengan tetap mempertimbangkan perkembangan pandemi Covid 19;
2. Memaksimalkan kinerja pejabat dan staf yang ada dengan pembagian tugas yang jelas dan sesuai Tusi;
3. Melakukan percepatan dan peningkatan kualitas pembentukan produk hukum daerah;
4. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum;
5. Melakukan koordinasi yang lebih intens kepada OPD pengusul produk hukum daerah;
6. Melakukan pembinaan penyusunan Risalah Budaya Kerja kepada semua OPD / Unit kerja dan mengingatkan betapa pentingnya memiliki budaya kerja karena termasuk pada salah satu area pada 8 area perubahan reformasi birokrasi.

2. Sekretariat DPRD

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Sekretariat DPRD adalah unsur staf pendukung DPRD. Organisasi sekretariat DPRD kabupaten/kota dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota, dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi Perangkat Daerah.

Pada Sekretariat DPRD memiliki Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD dan Indikator Indeks Kepuasan Layanan Administrasi DPRD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 19.181.813.900. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja indikator program tergolong dalam kategori sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan capaian kinerja sebesar 97,88 %. Sangat tingginya capaian kinerja ini juga diimbangi dengan sangat tingginya penyerapan anggaran program yakni mencapai 94,53%.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Adanya Refocusing anggaran dalam penanganan Covid 19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

2. Adanya kendala teknis dan administrasi sehingga pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional tidak dapat dilaksanakan.

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan kegiatan yang belum terlaksana akan dievaluasi dan direncanakan kembali di tahun berikutnya dengan tetap mempertimbangkan perkembangan pandemi Covid 19;
2. Kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang belum terlaksana akan dievaluasi dan direncanakan kembali di tahun berikutnya.

2.2.1.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Pada dasarnya unsur penunjang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan.

1. Perencanaan Pembangunan

Pada unsur Perencanaan memiliki 2 (dua) Program dan 2 (dua) Indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.548.637.265 Adapun program tersebut antara lain Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah Dan Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Rata-rata capaian kinerja indikator program mencapai 100 % atau tergolong dalam kategori capaian kinerja sangat tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator program secara umum telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Pada sisi penyerapan anggaran, dijelaskan bahwa realisasi anggaran mencapai Rp. 1.548.637.265 atau 92,39 % dari pagu anggaran dan termasuk dalam kategori penyerapan anggaran sangat tinggi.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Dengan adanya pengalihan anggaran untuk penanganan Covid 19 kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Adanya kendala teknis dan administrasi sehingga pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional tidak dapat dilaksanakan.

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan;
2. Kegiatan pengadaan Kendaraan Dinas Operasional yang belum terlaksana akan dievaluasi dan direncanakan kembali di tahun berikutnya.

2. Keuangan

Pada unsur Keuangan memiliki 3 (tiga) Program dan 7 (tujuh) Indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp.397.391.617.282. Adapun program tersebut antara lain Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda APBD, Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD, Persentase ketetapan waktu Laporan Penatausahaan BUD, Prosentase ketetapan waktu penyusunan LKPD. Selanjutnya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah serta Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator Prosentase Penerimaan Pajak Daerah dan Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah .

Berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja indikator program mencapai 98,43 % atau tergolong dalam kategori capaian kinerja sangat tinggi. Dari hasil persentase kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat indikator program belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari ke tujuh indikator program tersebut terdapat dua indikator program yang belum mencapai target yakni pada indikator Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah dan Prosentase Penerimaan Pajak Daerah. Namun disisi lain terdapat indikator dengan capaian melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah.

Pada sisi penyerapan anggaran, dijelaskan bahwa realisasi anggaran mencapai Rp. 390.517.641.102 atau 98,27 % dari pagu anggaran yang ditetapkan dan termasuk dalam kategori penyerapan

anggaran sangat tinggi. Dari ke tiga program, penyerapan anggaran di atas 90% kecuali Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mencapai 78.48%.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih terdapat hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
2. Kurang optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada;
3. Belum tersedianya peraturan pelaksana teknis;
4. Belum optimalnya fungsi Aplikasi SIRUP sehingga menghambat proses pengumuman paket dan proses pengadaan;
5. Belum optimalnya Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam penatausahaan dan pelaporan serta belum terintegrasi dengan bank terkait;
6. Belum optimalnya Implementasi aplikasi Barang Milik Daerah E-simbada;
7. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan Perda pajak dan retribusi daerah dengan pihak terkait;
8. Pemutakhiran data obyek pajak belum dilaksanakan secara optimal;
9. Penerapan Aplikasi Pajak On Line belum maksimal;
10. Belum tertibnya pengelolaan SKAB Pajak Daerah;
11. Sarana dan prasarana belum memadai.

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Melakukan peningkatan kapasitas Sumber Daya manusia (SDM) melalui Bimbingan Teknis, Pelatihan, Workshop dan lainnya;
2. Kegiatan yang belum terlaksana akan dievaluasi dan direncanakan kembali di tahun berikutnya;
3. Melakukan penyusunan peraturan pelaksana teknis;
4. Melakukan koordinasi teknis dengan Layanan Pengadaan Secara (LPSE);

5. Melakukan koordinasi terkait penyempurnaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) terkait penatausahaan dan pelaporan dengan Kementerian Dalam Negeri;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Barang Milik Daerah e-Simbada;
7. Melakukan pembentukan Tim intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Melakukan Pengembangan Pemutakhiran data obyek dan subyek pajak daerah;
9. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan penyempurnaan aplikasi secara bertahap;
10. Mengkoordinasikan Pembentukan Tim gabungan dalam rangka operasi dan pengawasan penggunaan SKAB Pajak Daerah;
11. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia dan mengkoordinasikan penyediaan sarana/prasarana yang baru.

3. Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Pada unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memiliki 2 (dua) Program dan 2 (dua) Indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.752.229.150. Adapun program tersebut antara lain Program Kepegawaian Daerah dengan indikator Indeks Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator Persentase Pengembangan SDM. Rata-rata capaian kinerja indikator program mencapai 88,07 % atau tergolong dalam kategori capaian kinerja tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator program belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada sisi penyerapan anggaran, dijelaskan bahwa realisasi anggaran mencapai Rp. 1.523.450.054 atau 86,94 % dari pagu anggaran dan termasuk dalam kategori penyerapan anggaran tinggi.

Secara umum pelaksanaan program di tahun 2021 terkendala dengan adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan adanya penyesuaian dan perubahan rencana kerja sehingga berdampak pada beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana. Selanjutnya upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut yakni dengan mengoptimalkan Sumber Daya manusia (SDM) dan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang ada serta mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat daerah melalui pemanfaatan media online.

Selanjutnya memaksimalkan kinerja pejabat dan staf yang ada dengan pembagian tugas yang jelas dan sesuai tupoksi untuk dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

4. Penelitian dan Pengembangan

Pada unsur Penelitian dan Pengembangan memiliki Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan indikator Persentase hasil penelitian/kajian yang menjadi acuan kebijakan. Pagu anggaran yang dimiliki sebesar Rp.1.018.035.250. Rata-rata capaian kinerja indikator program mencapai 100 % atau tergolong dalam kategori capaian kinerja sangat tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator program telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada sisi penyerapan anggaran, dijelaskan bahwa realisasi anggaran mencapai Rp. 1.012.38.250. atau 99,44 % dari pagu anggaran dan termasuk dalam kategori penyerapan anggaran tinggi.

2.2.1.5 Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan

Pada unsur Pengawas memiliki 2 (dua) Program dan 2 (dua) Indikator dengan pagu anggaran sebesar Rp.425.448.000 Adapun program tersebut antara lain Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan indikator Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti. Adapun Rata-rata capaian kinerja indikator program mencapai 132 % atau tergolong dalam kategori capaian kinerja tinggi. Dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator program belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada sisi penyerapan anggaran, dijelaskan bahwa realisasi anggaran mencapai Rp. 341.725.500 atau 80,32 % dari pagu anggaran dan termasuk dalam kategori penyerapan anggaran tinggi.

Berikut permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja secara umum antara lain :

1. Tidak terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dan sosialisasi kebijakan bidang pengawasan karena adanya bencana erupsi Gunung Semeru sehingga para pejabat yang terlibat dalam kegiatan Rakorwas terkonsentrasi dilokasi bencana;
2. Belum terpenuhinya target kinerja kegiatan Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah karena waktu pelaksanaan

bersamaan dengan pelaksanaan Monitoring MCP, Evaluasi ZI, dan SPIP

3. Terbatasnya anggaran Diklat APIP sehingga mempengaruhi capaian Kapabilitas APIP.

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Pada Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu kinerja dapat melampaui target karena pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu diintegrasikan dengan pemenuhan monitoring MCP seperti Reviu ASB, SSH, HSPK, Reviu BMD, Reviu Kinerja Pelayanan Perizinan, Reviu HPS, Reviu Promosi, Rotasi, Mutasi ASN, Reviu Kinerja UKPBJ
2. Meskipun kegiatan Rakorwas tidak terlaksana akan tetapi Laporan Pengawasan Tahun 2021 dan Rencana Pengawasan tahun 2022 tetap disampaikan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah;
3. Penyusunan Risk Based Audit tetap dilaksanakan dengan mengacu pada Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP yang kemudian disusun Peta Pengawasan Tahun 2022.
4. Menganggarkan diklat APIP pada DPA 2022. secara umum, tidak terdapat kendala pada pelaksanaan penyerapan anggaran penunjang karena dilaksanakan sesuai dengan Time Schedule dan merujuk pada Perbup Standar Biaya.

2.2.1.6 Unsur Kewilayahan

Kewilayahan juga menjadi unsur yang dievaluasi dalam evaluasi RKPD Kabupaten Lumajang tahun 2021. Pada unsur Kewilayahan di Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan memiliki 5 (lima) Program dan 5 (lima) indikator. Adapun Program pada unsur kewilayahan antara lain Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Total anggaran yang ditetapkan pada unsur kewilayahan sebesar Rp. 5.694.635.000.

Berdasarkan hasil evaluasi rata-rata capaian program yaitu sebesar 90,34 % dan termasuk dalam interval nilai realisasi kinerja sangat tinggi. Selanjutnya jika dilihat dari sisi penyerapan anggaran dilaporkan bahwa realisasi anggaran pada urusan Kewilayahan sebesar Rp. 5.676.925.260 atau mencapai 99,69 % termasuk pada kategori penyerapan sangat sangat tinggi.

Berikut permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja secara umum antara lain :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang memadai;
2. Terbatasnya Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan operasional perkantoran yang memadai;
3. Dengan adanya pengalihan anggaran untuk penanganan Covid 19 terdapat kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Koordinasi internal instansi belum dilakukan secara maksimal;
5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pelayanan perijinan dikecamatan terutama masyarakat dengan jangkauan wilayah yang jauh dari kecamatan;
6. Kurangnya peran serta Kelompok Masyarakat pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat lainnya;
7. Belum optimalnya pelaporan keuangan desa tepat waktu;
8. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait tertib administrasi kependudukan;
9. Adanya Desa yang masih terlambat dalam melakukan penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa sehingga dapat menghambat penyaluran (SPJ).

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengoptimalkan Sumber Daya aparatur yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsi kecamatan;
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan operasional perkantoran yang ada;
3. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang tersedia dengan memperhatikan protokol kesehatan;

4. Meningkatkan koordinasi internal kecamatan dengan melakukan rapat evaluasi secara berkala;
5. Memberikan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan perijinan dikecamatan;
6. Mendorong dan memberikan fasilitasi kepada Kelompok Masyarakat untuk aktif dalam kegiatan Musrenbang maupun kegiatan Pemberdayaan Masyarakat lainnya;
7. Melakukan pembinaan dan pendekatan persuasif pada perangkat desa terkait pelaporan keuangan desa tepat waktu;
8. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan tetap melibatkan perangkat desa tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan;
9. Melakukan Pembinaan dan monitoring administrasi tata pemerintahan desa secara berkala.

2.2.1.7 Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum di kabupaten Lumajang memiliki 5 (lima) program dan 5 (lima) indikator program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.081.166.348. Berikut nama Program dalam unsur Pemerintahan Umum Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja program pada unsur Pemerintahan Umum mencapai 62,04%, capaian kinerja ini jauh dari target kinerja yang telah ditetapkan dan tergolong dalam kategori kinerja rendah. Adapun indikator kinerja yang telah mencapai target yang telah ditetapkan yakni pada indikator Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, dan Persentase potensi permasalahan strategis yang ditangani. Sedangkan dua indikator yaitu indikator Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dan Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya memiliki realisasi kinerja di bawah 50%.

Namun sebaliknya jika dilihat dari sisi penyerapan anggaran dilaporkan bahwa realisasi anggaran urusan sebesar Rp. 4.080.713.348 atau mencapai 99,99 % dari Pagu anggaran yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran ini termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dalam hal ini seluruh program memiliki penyerapan di atas 90 %.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tentunya masih mengalami hambatan dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Adanya *Refocusing* anggaran dalam penanganan Covid 19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Berikut upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ;
2. Memanfaatkan media sosial yang ada untuk melaksanakan sosialisasi pentingnya karakter kebangsaan dan cinta tanah air bagi masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya;
3. Menjalani kerjasama dengan jajaran samping terkait dalam upaya meredam potensi konflik di wilayah;
4. Melaksanakan sosialisasi akan pentingnya pendaftaran suatu lembaga melalui media sosial yang ada;
5. Melaksanakan kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lumajang terkait sosialisasi pendaftaran ormas/lembaga di daerah.
6. Melaksanakan kerjasama dengan Badan narkotika Nasional (BNN) terkait Kegiatan dalam rangka Pencegahan Penyalagunaan Narkotika bagi generasi muda;
7. Melaksanakan kerjasama, koordinasi dengan jajaran samping/ *stakeholder* terkait kondusifitas wilayah di Kabupaten Lumajang

Berikut akan disajikan Tabel 19.

Tabel 2. 198 T-C. 19

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

KABUPATEN LUMAJANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket																	
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%																										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13																	
A		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB																																		
1		Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																																		
1		PENDIDIKAN																																		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sarana Prasarana Lembaga Pendidikan dengan kondisi Baik	84	%			84,62	%			83	%			74	%			89,16		84,62	%			100,74										
			Persentase Siswa yang mengikuti Ujian	100	%	209.633.908.756		100	%	108.914.998.591		100	%	378.127.487.957		100	%	33.682.278.484		100,00	8,91			100	%	142.597.277.075		100,00	68,02							
			Persentase Lembaga Pendidikan yang terakreditasi	92	%			97,10	%			91	%			77,33	%			84,98				80,00	%			86,96								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Lembaga Pendidikan yang terfasilitasi Kurikulum Muatan Lokal	100	%	67.939.909	100	%	27.006.000					0,00	0,00			27.006.000	0	39,75			
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik yang tersertifikasi	65	%	597.863.700	60	%	59.152.000	60	%	6.000.000	60	%	100,00	0,00	60	%	59.152.000	92,31	9,89		
			Persentase Pendidik yang terqualifikasi	97	%		93	%		96	%		93	%	96,88		93	%		95,88			
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan yang memiliki Izin	74	%	115.256.342	70	%	24.430.000						0,00	0,00			24.430.000	0,00	21,20		
2		KESEHATAN																					
	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	persentase fasyankes terakreditasi	58	%	553.151.247.456	49	%	70.427.123.749	56	%	68.796.107.151	0	%	9.968.495.600	0,00	14,49	49	%	80.395.619.349	84,48	14,53	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
		PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	AKI	105/100.000	K.H	94,03/100.000	K.H	218/100.000	K.H	29,8/100.000	K.H	88,71	29,8/100.000	K.H	89,55									
			AKB	9/1.000	K.H	7,45/1.000	K.H	13,9 per 1.000	K.H	8,7/1.000	K.H	80,11	8,7/1.000	K.H	82,78									
03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	persentase fasyankes dengan manajemen SDMk sesuai standar	70	%	12.737.893.500	60	%	11.917.600.667	60	%	3.171.984.500	0	%	987.485.000	0,00	31,13	60	%	12.905.085.667	85,71	101,31		
04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar	94	%	11.373.137.429	84	%	254.155.950	92	%	340.811.950	0	%	43.826.400	0,00	12,86	84	%	297.982.350	89,36	2,62		
05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	persentase desa siaga aktif purnama mandiri	23	%	19.571.110.139	24	%	625.382.580	22	%	912.174.300	23,90	%	29.905.750	108,64	3,28	23,90	%	655.288.330	103,91	3,35		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																				
	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	93	%	55.240.840.000	78,63	%	22.406.978.108	90,86	%	21.483.695.460	78,63	%	3.182.746.470	86,54	14,81	78,63	%	25.589.724.578	84,55	46,32
	03	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1. Prosentase panjang jalan kondisi mantap	88,10	%		88,8	%		90,77	%		78,82	%		86,83	43,93	78,82	%		89,47	59,11
			2. Prosentase jumlah jembatan kondisi baik	93,77	%	291.439.838.935	78,82	%	84.943.509.599	85,10	%		88,8	%	87.336.255.250	104,35		88,8	%	172.279.764.849	94,70	
	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang	78,56	%	5.545.000.000	67,58	%	1.546.990.020	71,06	%	1.145.696.000	67,58	%	74.515.750	95,10	6,50	67,58	%	1.621.505.770	86,02	29,24

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
1	07	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengguna yang puas terhadap layanan teknis;	96	%	4.450.000.000	93	%	684.270.600	65	%	580.796.300	60	%	13.795.000	92,31	2,38	93	%	698.065.600	96,88	15,69	12	13
08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Prosentase kegiatan perencanaan pembangunan di wilayah daerah kabupaten	Prosentase ketersediaan gedung/ bangunan di wilayah daerah kabupaten	100	%	32.249.999.322	100	%	10.285.690.474	100	%	1.817.204.000	25	%	-	25	0,00	100	%	10.285.690.474	100,00	31,89		
				70	%		60	%		65	%		60	%		92			60	%		85,71		
4		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN ANNIA	Persentase Kawasan yang tertangani	40	%	50.000.000	0	%	-	30	%	4.190.850.000	0	%	92.111.600	0,00	2,20	0	%	92.111.600	0,00	184,22
	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan terfasilitasi dengan baik	100	%	4.600.000.000	70	%	2.101.846.175	100	%	86.000.000	0	%	1.125.000	0,00	1,31	70	%	2.102.971.175	70,00	45,72
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU Perumahan yang terpelihara	20	%	300.000.000	0,89	%	184.786.400	10	%	170.999.950	0	%	9.594.000	0,00	5,61	0,89	%	194.380.400	4,45	64,79
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Kumuh	10	HA	16.150.000.000	10	HA	13.784.612.457	5,8	HA	3.344.362.550	0	HA	602.920.800	0,00	18,03	10	HA	14.387.533.257	100,00	89,09
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penataan Bangunan di Kabupaten	40	%	700.000.000	29,8	%	317.236.270	20	%	465.800.000	0	%	181.648.120	0,00	39,00	29,8	%	498.884.390	74,50	71,27
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Ratio Rumah terbangun	35	Ratio	23.058.500.000	0	Ratio	1.122.774.900	25	Ratio	2.131.431.183	0	Ratio	1.229.942.300	0,00	57,70	0	Ratio	2.352.717.200	0,00	10,20

NO	KODE	URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
	1.04.02			79,53	%	20.985.000.000	77,96	%	16.233.126.385	77,53	%	14.944.500.198	0	%	4.985.371.642	0,00	33,36	77,96	%	21.218.498.027	98,03	101,11
	1.04.02	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang Terlayani Sanitasi	73,29	%	1.732.000.000	67,21	%	6.959.179.033	71,29	%	7.357.960.320	0	%	2.136.341.952	0,00	29,03	67,21	%	2.136.341.952	91,70	123,35
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase Terbangun	20	%	3.367.809.500	23,9	%	3.362.634.800	20	%	3.075.411.500	0	%	2.350.215.600	0,00	76,42	23,9	%	3.362.634.800	119,50	99,85
5		KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Kentraman dan Ketertiban umum	100	% 20.528.775.529	80,33	% 5.828.379.350	85	% 4.452.446.000	62,50	% 3.265.166.000	73,53	73,33	80,33	% 9.093.545.350	80,33	44,30		
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGU LANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanganan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di wilayah Kabupten	100	% 2.717.542.609	100	% 605.116.500	100	% 552.508.400	67,20	% 318.188.000	67,20	57,59	100	% 923.304.500	100,00	33,98		
		PROGRAM PENANGGU LANGAN BENCANA	Prosentase Tingkat Ketahanan Daerah	100	% 8.068.747.500	76	% 2.090.558.900	87,32	% 3.337.153.909	47,54	% 1.667.275.500	54,44	49,96	76	% 3.757.834.400	76,00	46,57		
6		SOSIAL																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
1	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
				94	%	32.870.593.400	84,55	%	5.653.074.200	83	%	712.905.400	4,03	%	23.100.000	4,86	3,24			84,55	%	5.676.174.200	89,94	17,27
				91	%	1.539.740.428	84	%	242.036.750	83	%	4.204.710.860	27,90	%	1.033.271.400	33,61	24,57			84	%	1.275.308.150	92,31	82,83
				95	%	7.795.111.200	84	%	5.296.360.110	83	%	7.490.666.750	0	%	-	0,00	0,00			84	%	5.296.360.110	88,42	67,94
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase Korban Bencana Yang Mendapat Penanganan	100	%	787.092.838	133,29	%	162.635.200	100	%	831.492.000	0,30	%	495.022.000	0,30	59,53	133,29	%	657.657.200	133,29	83,56		
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola	100	%	460.777.746	100	%	210.402.220	62	%	102.245.800	25	%	23.317.650	40,32	22,81	100	%	233.719.870	100,00	50,72		
2		Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan																						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Dasar																	
1		TENAGA KERJA																	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja dilatih	100	%	1.800.000.000	0	%	591.557.744					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00
			Prosentase peningkatan produktifitas perusahaan	100	%		100	%											
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Pencari Kerja yang ditempatkan	76	%	1.200.000.000	131,86	%	3.040.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	prosentase perusahaan yang mempunyai PP	80	%	720.000.000	23,06	%	4.851.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00
			prosentase data dan informasi ketenagakerjaan yang tersedia	100	%		100	%						#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	%	6.000.000	0	%	-	100	%	6.000.000	100	10,00	100	%	600.000	100,00	10,00	
3		PANGAN																		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Presentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi	100	%	610.513.333	100	%	609.899.800	7	%	3.999.461.000	0	0,00	100	%	609.899.800	100,00	99,90	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANA	Prosentase Penanganan Kerawanan Pangan	100	%	49.368.000	100	%	49.309.000	100	%	-	0	0,00	100	%	49.309.000	100,00	99,88	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
		N PANGAN																				
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase Konsumsi Energi	100	%	513.586.431	100	%	513.325.350	1	%	276.000.000	0	%	104.000.000	0,00	37,68	100	%	513.325.350	100,00	99,95
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Prosentase Aman Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT),Jumlah Wilayah pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100	%	54.598.750	100	%	54.518.750	100	%	43.200.000	0	%	14.400.000	0,00	33,33	100	%	54.518.750	100,00	99,85
4		PERTANAHAN																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	05	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Prosentase luas tanah yang direistribusikan	30	%	225.520.800	10	%	71.639.750	25	%	275.000.000	10	%	17.530.000	40,00	6,37	10	%	89.169.750	33,33	39,54
5		LINGKUNGAN HIDUP																				
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan yang telah tertangani	100	%	2.694.777.036	64,80	%	327.659.230	74	%	495.572.742	37	%	92.682.700	50,00	18,70	37	%	92.682.700	37,00	3,44

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100	%	496.500.000	60	%	101.005.424	100	%	65.760.000	66,67	%	28.115.000	66,67	%	28.115.000	66,67	5,66		
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai standar	211,67	unit usaha	513.157.980	24,75	%	98.943.500	66,67	%	103.000.000	20	%	25.968.000	30,00	25,21	20	%	25.968.000	9,45	5,06
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah terkelola	93	%	15.120.857.713	35,98	%	3.985.512.069	77,08	%	8.600.815.161	17,82	%	1.751.541.670	23,12	20,36	17,82	%	1.751.541.670	19,16	11,58

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang dibangun dan diawasi perizinan lingkungannya	100	%	1.071.550.000	140	%	52.086.000	100	%	155.360.000	45	%	59.940.000	45,00	38,58	45	%	59.940.000	45,00	5,59
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	100	%	2.439.420.000	100	%	312.554.000	100	%	164.800.000	100	%	125.485.000	100,00	76,14	100	%	125.485.000	100,00	5,14
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/masyarakat yang mendapat fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100	%	1.140.758.400	100	%	157.835.150	100	%	180.000.000	68	%	70.772.500	68,00	39,32	68	%	70.772.500	68,00	6,20

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/masyarakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup	100	%	129.702.320	0	%	-	100	%	43.000.000	50	%	16.651.000	50,00	38,72	50	%	16.651.000	50,00	12,84
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	100	%	13.522.506.812	26,08	%	3.137.000.445	30	%	2.467.912.872	10	%	933.681.644	33,33	37,83	10	%	933.681.644	10,00	6,90
6		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																				
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penerbitan Dokumen pendaftaran penduduk	270	%	2.276.733.260	88,89	%	331.332.000	90	%	519.912.000	83,33	%	-	92,59	0,00	88,89	%	331.332.000	32,92	14,55

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Dokumen Capil	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
				270	%	1.338.704.000	88,89	%	272.865.500	85	%	473.112.000	75	%	-	88,24	0,00	88,89	%	272.865.500	32,92	20,38
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SIAK	260	%	6.583.733.730	100	%	1.118.588.000	85	%	1.085.538.000	57,14	%	-	67,22	0,00	100	%	1.118.588.000	38,46	16,99
7		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																				
	2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan kerjasama	7	%	329.845.300	7	%	23.470.000	12	%	17.845.000	12	%	17.245.000	100,00	96,64	12	%	40.715.000	171,43	12,34

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH DESA	Persentase Desa yang Administrasi Pemerintahan Desa sesuai aturan	70	%	1.778.719.907	70	%	490.089.000	75	%	579.501.900	0	%	158.938.900	0,00	27,43	70	%	649.027.900	100,00	36,49
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	75	%	5.106.659.100	53	%	1.306.543.700	80	%	1.086.431.500	0	%	267.131.500	0,00	24,59	53	%	1.573.675.200	70,67	30,82
8		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																				
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Seharusnya BerKB tetapi Belum Terlayani (Unmet Need)	8,35	%	171.467.740	10	%	138.000	8,33	%	171.467.740	10,33	%	16.093.360	124,01	9,39	10,33	%	16.231.360	123,71	9,47

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peserta KB terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)	76,5	%	12.866.364.890	74	%	6.048.854.533	76,50	%	5.642.712.529	73,75	%	393.015.000	96,41	6,97	73,75	%	6.441.869.533	96,41	50,07	12	13
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Tribuna dan UPPKS yang ikut KB	81	%	100.460.000		%		81	%	5.061.694.100	73,75	%		91,05	0,00	73,75	%		91,05	0,00		
			Persentase Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 Tahun	21,02	%				%		21,02		%		10,33	%		49,14		10,33	%		49,14	
9		PERHUBUNGAN																						

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	2,81	%	2.480.000.000	1,10	%	1.637.258.808	3,06	%	940.625.000	0,00	0,00	%	0,00	0,00	12	13
	2.15.02		Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	100	%	1.120.000.000	18,1	%	334.018.501	100	%	378.775.000	0,00	0,00	%	0,00	0,00		
	2.15.02		Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai	90,57	%	27.270.000.000	92	%	19.827.656.680	90,57	%	19.026.067.729	0,00	0,00	%	0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
10		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase terbangunnya website perangkat daerah, kelurahan dan desa yang terpadu.	100	%	4.745.988.852	84,44	%	578.371.800	80	%	819.304.000	25	%	70.976.300	31,25	8,66	84,44	%	649.348.100	84,44	13,68
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	100	%	767.445.132	97,88	%	1.478.534.363	100	%	876.564.000	25	%	269.843.700	25,00	30,78	97,88	%	1.748.378.063	97,88	227,82
11		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UM yang diberdayakan	540	UM	12.368.300.000	397	UM	11.040.890.100	180	UM	12.368.300.000	0	UM	6.800.000	0,00	0,05	180	UM	11.047.690.100	33,33	89,32
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan	30	Koperasi	132.300.000	30	Koperasi	24.302.250	35	Koperasi	32.400.000	15	Koperasi	3.400.000	42,86	10,49	35	Koperasi	27.702.250	116,67	20,94
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah diklat /sosialisasi yang dilaksanakan	100	Koperasi	551.250.000	100	Koperasi	446.251.600	100	Koperasi	404.200.000	6	Koperasi	5.000.000	6,00	1,24	100	Koperasi	451.251.600	100,00	81,86
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah kesehatan KSP/USP koperasi	50	Koperasi	165.375.000	50	Koperasi	42.620.000	50	Koperasi	75.360.000	10	Koperasi	8.100.000	20,00	10,75	50	Koperasi	50.720.000	100,00	30,67

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	PENANAMAN MODAL																				
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Prosentase Pencapaian Realisasi Investasi	4,5	Triliun	752.597.605	-68	%	57.642.000	10	%	149.067.000	0	%	5.400.000	0,00	3,62	0	%	63.042.000	0,00	8,38
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase Investor yang menanamkan modal	3	Orang	438.400.000	0	Juta	58.905.600	5	%	62.068.000	0	%	960.000	0,00	1,55	0	%	59.865.600	0,00	13,66
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pemohon yang dilayani	9.000	Pemohon	1.600.643.535	100	%	301.446.600	70	%	262.307.000	90	%	40.350.000	128,57	15,38	90	%	341.796.600	1,00	21,35
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	405	Pelaku Usaha	337.600.000	18,10	%	226.305.750	50	%	405.578.000	0	%	6.900.000	0,00	1,70	18,10	%	233.205.750	4,47	69,08

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemohon yang mengakses data dan informasi penanaman modal	9,000	Pemohon	275.203.940	60	%	222.963.500	60	%	308.120.200	68	%	5.100.000	113,33	1,66	68	%	228.063.500	0,76	82,87	12	13
13		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																						
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100	%	2.854.517.910	1,43	%	318.500.625	3,80	%	317.409.500	2,50	%	120.978.500	65,79	38,11	2,50	%	439.479.125	2,50	15,40		
		Jumlah Fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing OKP		6	Kegiatan		2	Kegiatan		2	Kegiatan		1	Kegiatan	50,00		1	Kegiatan		16,67				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan	100	%	2.269.178.442	18,94	%	1.500.000.000	18,90	%	2.000.000.000	18,90	%	2.000.000.000	100,00	100,00	18,90	%	2.000.000.000	18,90	88,14		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	Persentase fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
				51,61	%	34.339.828.672	100	%	14.017.502.310	32,3	%	8.954.934.814	0	%	4.829.594.980	0,00	53,93	100	%	18.847.097.290	193,75	54,88
14		STATISTIK																				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Jumlah sistem data dan statistik yang terintegrasi	32	Data	1.128.356.420	1	Sistem	31.918.700	28	Data	28.683.000	0	Sistem	6.240.000	0,00	21,76	1	Sistem	38.158.700	3,13	3,38
15		PERSANDIAN																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	%	82.639.854	60	%	18.000.000	100	%	49.995.000	100	%	-	100,00	0,00	100	%	18.000.000	100,00	21,78
16		KEBUDAYAAN																				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Pemajuan Kebudayaan	90	%	3.011.332.000	5	OPK	84.400.000	90	%	2.592.067.250	70	%	57.600.000	77,78	2,22	70	%	142.000.000	77,78	4,72
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	40	%	2.032.905.000	3	Jenis	2.031.750.000	40	%	2.223.893.000	40	%	2.223.893.000	100,00	100,00	40	%	2.223.893.000	100,00	109,39
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Pembinaan Sejarah yang dilaksanakan	67	%	434.125.000	67	%	44.080.000		%			%		0,00	0,00	67	%	44.080.000	100,00	10,15

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	60	% 1.450.972.787	60	% 123.524.000		%		%	0,00	0,00	60	% 123.524.000	100,00	8,51			
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Museum yang dikelola	100	% 1.551.460.500	100	% 772.074.900		%		%	0,00	0,00	100	% 772.074.900	100,00	49,76			
17		PERPUSTAKAAN																		
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN (DAU)	persentase perpustakaan yang melakukan pengelolaan sesuai ketentuan	100	% 1.268.959.334,00	50	% 1.979.102.700					#DIV/0!	#DIV/0!					0,00	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)			REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)			REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				5	6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12		13							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13			
1	8	KEARSIPAN																								
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip yang di kelola LKD	100	%	314.450.000		30	%	11.958.000				#DIV/0!	#DIV/0!					0,00	0,00					
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase peningkatan arsip yang di lindungi dan diselamatkan	22,22	%	1.998.000		21	%	1.996.000				#DIV/0!	#DIV/0!					0,00	0,00					
	B	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN																								
	1	KELAUTAN DAN PERIKANAN																								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket					
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	30.755	ton	3.190.362.000	6.187	ton	342.325.441	6.301	ton	115.003.500	2.873	ton	89.000.000	45,59	77,39	9.060	ton	431.325.441	29,46	13,52		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	17.136	ton	6.629.774.200	3.455	ton	790.306.239	1.743	ton	200.603.750	1.743	ton	107.400.000	100,00	53,54	5.198	ton	897.706.239	30,33	13,54		
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	21.176	ton	19.233.888,877	4.233	ton	215.152.500	4.250	ton	89.010.500	2.125	ton	44.086.500	50,00	49,53	6.358	ton	259.239.000	30,02	1,35		
2		PARIWISATA																						
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA	Jumlah Daya Tarik Destinasi Wisata Yang Ditingkatkan	1	DTW	32.715.124,382	1	DTW	6.764.886,266	1	DTW	2.113.925,070	0	DTW	272.504.000	0,00	12,89	1	DTW	7.037.390,266	100,00	21,51		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah pemasaran kepariwisataan	35	Jenis 7.996.543.312	35	jenis 350.763.234	35	jenis 1.270.669.000	0	jenis 50.150.000	0,00	3,95	35	jenis 400.913.234	100,00	5,01		
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah zona kreatif yang berkembang	1	zona 682.736.000	1	zona 920.656.000	1	zona 924.202.000	0	zona 19.600.000	0,00	2,12	1	zona 940.256.000	100,00	137,72		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkembang	100	orang 2.632.653.072	100	orang 1.683.426.400	100	orang 1.400.440.500	0	orang 41.000.000	0,00	2,93	100	orang 1.724.426.400	100,00	65,50		
3		PERTANIAN																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp				
1	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBAANGAN SARANA PERTANIAN (sarana : alsintan dan saprodi)	Jumlah produksi pertanian	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13						
				- Tanaman Pangan	20.230.801	Kw	6.735.863	Kw	5.923.868	Kw	2.691.470	Kw	45,43	9.427.333	Kw	46,60									
				- Tanaman Buah	3.135.254	Kw	1.517.929	Kw	1.581.854	Kw	409.741	Kw	25,90	1.927.669	Kw	61,48									
				- Tanaman Buah dan Sayur Semusim	1.362.711	Kw	730.660	Kw	583.109	Kw	143.978	Kw	24,69	874.638	Kw	64,18									
				- Tanaman Tahunan	201.325	Kw	99.135	Kw	99.725	Kw	27.075	Kw	27,15	126.210	Kw	62,69									
				- Tanaman Semusim	21.581.718	Kw	10.928.881	Kw	10.933.359	Kw	0	Kw	0,00	10.928.881	Kw	50,64									
				- Produksi Ternak :																					
				- Daging	48.188.247	Kg	19.732.920	Kg	20.740.917	Kg	4.965.186	Kg	23,94	24.698.106	Kg	51,25									
				- Telur	20.987.238	Kg	12.652.129	Kg	13.029.090	Kg	3.169.146	Kg	24,32	15.821.275	Kg	75,39									
- Susu	27.937.45	Kg	14.962.28	Kg	15.435.15	Kg	3.822.05	Kg	24,7	18.784.33	Kg	67,2													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket	
				5		6		7			8			9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	7		0		8		4		6		4		4		4		12	13	
			- Populasi Ternak Besar	483.460	Ekor	239.975	Ekor	249.872	Ekor	240.554	Ekor	96,27		480.529	Ekor	99,39						
			- Populasi Ternak Kecil	358.676	Ekor	196.430	Ekor	191.031	Ekor	132.195	Ekor	69,20		328.625	Ekor	91,62						
			- Populasi Ternak Unggas	33.519.646	Ekor	14.854.071	Ekor	15.496.037	Ekor	5.998.357	Ekor	38,71		20.852.428	Ekor	62,21						
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah kelompok yang terfasilitasi prasarana pertanian	750	kelompok	13.964.558,836	250	kelompok	8.190.039.900			0,00	0,00	250	kelompok	8.190.039.900	33,33	58,65				
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	180	%	4.462.775,625	90	%	714.804.400	90	%	870.000.000	85	%	216.900.000	94,44	24,93	90	%	931.704.400	50,00	20,88
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	% pengurangan nilai kerugian	200	%	3.281.395,730	100	%	230.792.500	100	%	100.000.000	6,56	%	13.300.000	6,56	13,30	100	%	244.092.500	50,00	7,44

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	200	%	645.524.000	100	%	61.200.000	100	%	89.000.000	40,00	40,00	100	%	96.800.000	50,00	15,00					
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian	5	%	4.181.664.512	5	%	1.548.519.827	5	%	2.214.725.000	0,00	6,12	5	%	1.683.996.310	100,00	40,27					
4		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																						
5		PERDAGANGAN																						
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nilai retribusi pelayanan pasar	42.591.329.950	Rupiah	33.594.818.628	7.967.269.208	Rupiah	4.777.197.997	8.921.132.500	Rupiah	3.682.000.000	3.688.400.070	Rupiah	985.364.000	41,34	26,76	11.655.669.278	Rupiah	5.762.561.997	27,37	17,15		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket				
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Prosentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil	84	%	817.850.000		125,58	%	131.004.750	80	%	37.690.000	85,19	%	900.000	106,48	2,39	85,19	%	131.904.750	101,41	16,13
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	5.924.337.200.024	Rupiah	2.253.724.000		877.445.12.412	Rupiah	137.170.655	950.000.000.000	Rupiah	167.000.000	211.028.099.604	Rupiah	11.494.000	22,21	6,88	1.088.473.212.016	Rupiah	148.664.655	18,37	6,60
			Nilai Perdagangan Antar Daerah			Rupiah			4.686.497.416.698	Rupiah		4.080.000.000.000	Rupiah		32.327.949.614	Rupiah		0,79		Rupiah		79,65	
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase tingkat kepatuhan wajib terulang	16	pasar	2.293.185.973		71,13	%	334.050.424	82	%	163.572.000	20,00	%	50.325.000	24,39	30,77	20,00	%	384.375.424	125,00	16,76
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Prosentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah	24	%	876.509.200		-6,87	%	78.594.000	4	%	170.000.000	0,00	%	102.303.200	0,00	60,18	4	%	180.897.200	16,67	20,64

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6		PERINDUSTRIAN																	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Nilai produksi industri	1.379.000.000.000	rupiah 5.356.205.760	1.349.087.819.586	Rupiah 404.347.700	1.339.000.000.000	Rupiah 6.569.008.386	243.356.049.218	Rupiah -	18,17	0,00	243.356.049.218	Rupiah 404.347.700	17,65	7,55		
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA	Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh IUI	80	% 33.644.000	93,75	% 30.213.160	85	% 25.433.798	25	% 15.418.150	29,41	60,62	25	% 30.213.160	31,25	89,80		
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri	66	% 150.000.000	34,19	% 24.718.800	63	% 8.480.000	47,00	% 5.304.000	74,60	62,55	47,00	% 30.022.800	71,21	20,02		
7		TRANSMIGRASI																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Jumlah Catrans dilatih dan ditempatkan																
C		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
1		SEKRETARIAT DAERAH																	
		BAGIAN UMUM																	
		BAGIAN PROTOKOL DAN TATA USAHA PIMPINAN																	
		BAGIAN PEREKONO																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		MIAN																	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	ANGKA INFLASI DAERAH	2,35	% 1.099.500.000	2,35	% 5.442.050.100					#DIV/0!	#DIV/0!			0	0,00		
		BAGIAN HUKUM																	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi	2	% 1.235.000.000	2	% 351.306.500					#DIV/0!	#DIV/0!			0	0,00		
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terfasilitasi	95	% 47.903.151.673	100	% 33.652.943.802					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		
		BAGIAN ORGANISA																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		SI																	
		BAGIAN TATA PEMERINTAHAN																	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERFASILITASI	100	%	160.000.000	100	%	64.994.545			#DIV/0!	#DIV/0!			0	0,00		
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA																	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Angka Inflasi Daerah	100	%	268.860.000	100	%	228.340.200			#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	2	SEKRETARIAT DPRD																	
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indek Kepuasan Layanan Administrasi DPRD	80	Angka 49.405.011.360	71,45	Angka 18.133.030.416	75	Angka 18.698.256.000	49,41	Angka 9.240.436.946	65,88	49,42	71,45	Angka 27.373.467.362	89,31	55,41		
	D	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
	1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN																	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	100	% 9.561.476.000	100	% 698.394.390					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
		NAN DAERAH		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%	4.818.659.521		100	%	732.414.190				#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00	
2		KEUANGAN																		
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda APBD	100	%	1.404.356.424.188		100	%	418.242.369.605	56	%	84.772.139.354	56,00	20,27	100	%	469.883.313.231	100,00	33,46
			Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda Perubahan	100	%			100	%		0	%		0,00		100	%			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
			APBD																			
			Persentase ketetapan waktu Laporan Penatausahaan BUD	100	%	100	%	100	%	47	%	47,00		100	%	100,00						
			Persentase ketetapan waktu penyusunan LKPD	100	%	100	%	100	%	100	%	100,00		100	%	100,00						
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik Daerah	100	%	3.964.800.000	99	%	599.569.130	100	%	1.236.800.000	42	%	155.573.500	42,00	12,58	99	%	755.142.630	99,00	19,05
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100	%	5.214.978.000	90,34	%	4.806.898.095	100	%	4.698.847.500	43,46	%	1.480.814.800	43,46	31,51	90,34	%	4.806.898.095	90,34	92,17
			2. Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	10	%		18,97	%		8,50	%		7,10	%		83,53		7,10	%		71,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket	
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13					
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3		KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT																		
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepegawaian Daerah	90	Angka 2.313.777.318	81,88	Angka 570.403.700	89	Angka 483.972.000	83,50	Angka 193.531.800	93,82	39,99	83,50	Angka 763.935.500	92,78	33,02			
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan SDM	100	% 7.043.537.500	83,09	% 953.046.354	100	% 730.799.000	100	% 220.125.779	100,00	30,12	100	% 1.173.172.133	100,00	16,66			
4		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																		
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan	100	% 9.368.880.000	100	% 1.012.380.250							#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket	
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
E		UNSUBUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindak Lanjuti	70	% 3.800.000,00	73,18	% 239.484.500	65	% 341.459.000	0	% 115.010.000	0,00	33,68	73,18	% 354.494.500	104,54	9,33			
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	70	% 2.730.000,00	86	% 102.241.000	65	% 238.880.000	0	% 24.429.000	0,00	10,23	86	% 126.670.000	122,86	4,64			
F		UNSUBUR KEWILAYAHAN																		
		KECAMATAN LUMAJANG																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13			
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	86	%	14.386.781.916	100	%	4.544.156.795	86	%	3.506.178.910	17,04	%	1.495.007.350	19,81	42,64	17,04	%	1.495.007.350	19,81	10,39
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pemenuhan upaya trantibum	100	%	437.537.240	100	%	57.785.000	100	%	129.660.000	50	%	49.635.000	50,00	38,28	50	%	49.635.000	50,00	11,34
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti dan Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi/keuangan tepat waktu	100	%	11.340.000	75	%	1.800.000	95	%	2.400.000	50	%	600.000	52,63	25,00	50	%	600.000	50,00	5,29
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi	100	%	408.240.000	100	%	129.600.000	90	%	129.600.000	50	%	64.800.000	55,56	50,00	50	%	64.800.000	50,00	15,87
		KECAMATAN SUKODON																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket		
				5		6		7			8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K			Rp	
1	2	3	4																12	13		
		0																				
	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	78,29	%	19.860.000	100	%	3.600.000	0	%	-	0	%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	%	-	0,00	0,00
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	78,29	%	173.775.000	100	%	22.360.000	79,20	%	18.000.000	11	%	6.900.000	13,89	38,33	11	%	6.900.000	14,05	3,97
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	78,29	%	28.135.000	100	%	1.200.000	79,20	%	2.400.000	25	%	600.000	31,57	25,00	25	%	600.000	31,93	2,13
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib Administrasi	78,29	%	33.100.000	100	%	237.600.000	79,20	%	237.600.000	25	%	99.000.000	31,57	41,67	25	%	99.000.000	31,93	299,09
		KECAMATAN PADANG																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90	%	72.820.000	0,00	%	-	90	%	3.750.000	0,00	%	-	0,00	0,00	0,00	%	-	0,00	0,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	90	%	196.945.000	98,19	%	18.087.000	100	%	16.380.000	79,95	%	13.095.000	79,95	79,95	%	13.095.000	88,83	6,65	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	90	%	66.200.000	100	%	1.200.000	100	%	2.850.000	35,09	%	1.000.000	35,09	35,09	%	1.000.000	38,99	1,51	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib Administrasi	90	%	591.270.000	99,70	%	235.600.000	100	%	217.200.000	42	%	91.125.000	42	42	%	91.125.000	46,67	15,41	
		KECAMATAN GUCIALIT																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa / kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	343.459.800	100	%	18.620.000	100	%	13.500.000	67,19	%	9.070.000	67,19	%	9.070.000	67,19	%	2,64
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100	%	25.000.000	100	%	1.200.000	100	%	2.400.000	25	%	600.000	25	%	600.000	25,00	%	2,40
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa teradministrasi	100	%	821.850.000	107,14	%	232.270.000	100	%	216.000.000	41,67	%	90.000.000	41,67	%	90.000.000	41,67	%	10,95
		KECAMATAN SENDURO																			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	376.395.000	100	%	18.000.000	100	%	17.805.000	15,92	%	8.570.000	15,92	%	8.570.000	15,92	%	2,28

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100	%	283.200.000	100	%	296.100.000	100	%	2.400.000	16,67	%	600.000	16,67	%	600.000	16,67	0,21
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	100	%	1.009.680.000	100	%	281.400.000	100	%	280.800.000	50,00	%	140.400.000	50,00	%	140.400.000	50,00	13,91
		KECAMATAN PASRUJAMBE																		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	401.283.775	100	%	17.412.250	100	%	15.575.000	48,00	%	9.950.000	48,00	%	9.950.000	48,00	2,48

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket				
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12	13				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100	%	50.812.500	100	%	1.200.000	100	%	2.400.000	50	%	1.200.000	50,00	50,00	50	%	1.200.000	50,00	2,36	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	100	%	998.209.000	100	%	186.459.000	100	%	172.800.000	100	%	86.400.000	100,00	50,00	100	%	86.400.000	100,00	8,66	
		KECAMATAN SUMBERSUKO																					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100	%	22.698.000	100	%	4.200.000	100	%	2.400.000	100	%	600.000	100,00	25,00	100	%	600.000	100,00	2,64	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi	100	%	671.577.075	100	%	208.884.000	100	%	194.400.000	100	%	97.200.000	100,00	50,00	100	%	97.200.000	100,00	14,47
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	212.383.926	100	%	11.225.000	100	%	13.250.000	33,33	%	9.275.000	33,33	70,00	33,33	%	9.275.000	33,33	4,37
		KECAMATAN TEMPEH																				
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	88	%	708.349.650	102,33	%	15.698.000													
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	88	%	57.298.900	38,82	%	1.800.000													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	87	% 43.199.100	117,65	% 305.380.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		
		KECAMATAN PASIRIAN																	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa / kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	90	% 564.359.910	66,67	% 13.084.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	90	% 82.375.000	25	% 1.800.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi	90	% 1.570.626.900	90	% 264.190.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		KECAMATAN CANDIPUR																		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	80	%	218.100.000	100	%	600.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa / Kelurahan yang terfasilitasi Pemberdayaan	90	%	807.496.500	100	%	18.360.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum	80	%	25.200.000	100	%	2.600.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi	100	%	799.200.000	100	%	255.400.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00	
		KECAMATAN PRONOJITW																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90	% 336.625.000	100	% 67.400.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	90	% 517.151.000	100	% 25.064.500					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	90	% 46.380.000	100	% 1.200.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13				
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	90	%	837.315.000	100	%	171.243.000			#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		
		KECAMATAN TEMPURSA RI																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	73.874.100	100	%	14.349.000			#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	262.460.700	100	%	26.581.000			#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100	%	27.540.000	100	%	1.800.000			#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH DESA	persentase desa tertib administrasi	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				100	%	566.400.000	100	%	178.320.000					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00		
		KECAMATAN KUNIR																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	45.870.000	100	%	40.800.000					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	47.355.000	100	%	12.025.000					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100	%	2.640.000	100	%	1.800.000					#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	100	%	288.997.500	100	%	258.600.000			#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		
		KECAMATAN YOSOWILANGUN																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	5.000.000	100	%	22.500			#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	5.100.000	99,95	%	10.920.000			#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100	%	15.000.000	100	%	1.800.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi	100	%	280.800.000	100	%	295.200.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00	
		KECAMATAN TEKUNG																		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE FASILITASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	86	%	26.525.000	100	%	940.500					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				5	6	7	8	9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE HASIL FASILITASI DAN KOORDINASI YANG DITINDAK LANJUTI DAN PERSENTASE DESA YANG MENYUSUN DOKUMEN ADMINISTRASI /KEUANGAN TEPAT WAKTU	86	% 1.007.800.000	100	% 208.170.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE FASILITASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	86	% 685.216.000	29,07	% 35.106.760					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		
		KECAMATAN ROWOKANGKUNG																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	90	% 65.614.913	89,96	% 40.800.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	90	%	101.066.460	95,27	%	16.528.000			#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	90	%	10.599.600	100	%	1.800.000			#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi	90	%	237.125.394	98,95	%	195.210.000			#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		
		KECAMATAN JATIROTO																	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	95	%	36.400.000	90	%	6.400.000			#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa / kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	95	%	355.600.000	90	%	33.075.500					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan upaya trantibum	95	%	26.500.000	45	%	2.900.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	93,33	%	78.460.000	25	%	1.800.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi	91,67	%	957.500.000	82,17	%	169.821.000					#DIV/0!	#DIV/0!			0,00	0,00	
		KECAMATAN RANDUAGUNG																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	20.000.000	90	%	4.206.250	100	%	2.400.000	67	%	600.000	67,00	25,00	67	%	600.000	67,00	3,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa / kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	28.305.000	90	%	16.805.000	100	%	28.305.000	67	%	17.505.000	67,00	61,84	67	%	17.505.000	67,00	61,84
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	10.000.000	100	%	1.800.000		%			%		#DIV/0!	#DIV/0!		%		0,00	0,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100	%	2.400.000	90	%	1.260.000		%			%		#DIV/0!	#DIV/0!		%		0,00	0,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa tertib administrasi	100	%	280.800.000	83,17	%	296.600.000	100	%	280.800.000	23,00	%	117.000.000	23,00	41,67	23,00	%	117.000.000	23,00	41,67

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
		KECAMATAN KLAKAH																				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	15.040.000	100	%	4.206.250	100	%	4.175.000	75	%	3.725.000	75,00	89,22	75	%	3.725.000	75,00	24,77
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	100	%	1.608.085.000	100	%	296.600.000	100	%	141.300.000	33,33	%	141.300.000	33,33	100,00	33,33	%	141.300.000	33,33	8,79
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pemenuhan upaya trantibum	100	%	114.465.000	100	%	1.800.000	100	%	1.500.000	50	%	1.500.000	50,00	100,00	50	%	1.500.000	50,00	1,31
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	638.716.200	100	%	16.805.000	100	%	9.750.000	75	%	9.750.000	75,00	100,00	75	%	9.750.000	75,00	1,53

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	100	%	35.150.000	100	%	1.260.000	100	%	1.275.000	40	%	1.065.000	40,00	83,53	40	%	1.065.000	40,00	3,03
		KECAMATAN RANUYOSO																				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	115.850.000	76,29	%	21.510.000	100	%	20.400.000	41,67	%	8.500.000	41,67	41,67	%	8.500.000	41,67	7,34	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	100	%	877.150.000	100	%	260.325.000	100	%	259.200.000	40,28	%	104.400.000	40,28	40,28	%	104.400.000	40,28	11,90	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	23.832.000	100	%	1.800.000	100	%	2.400.000	50	%	1.000.000	50,00	41,67	%	1.000.000	50,00	4,20	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	100	%	331.000.000	94,12	%	28.312.000	100	%	23.500.000	50	%	12.500.000	50,00	53,19	50	%	12.500.000	50,00	3,78
		KECAMATAN KEDUNGGAJANG																				
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	90	%	155.570.000	85,71	%	9.925.000	89	%	16.350.000	7	%	7.350.000	7,87	44,95	7	%	7.350.000	7,78	4,72
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib Administrasi	90	%	1.009.965.000	95,95	%	296.414.000	89	%	283.200.000	36	%	117.000.000	40,45	41,31	36	%	117.000.000	40,00	11,58
G		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RPKD s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RPKD TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RPKD YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPKD (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RPKD s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	
		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	100	%	504.500.000	6,10	%	30.770.000	100	%	78.458.770	35,47	%	27.836.750	35,47	35,48	35,47	%	58.606.750	35,47	11,62
		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100	%	697.580.000	100	%	1.113.477.348	100	%	1.165.317.088	3,13	%	36.494.850	3,13	3,13	3,13	%	1.113.477.348	3,13	159,62
		PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	300	%	463.270.000	100	%	2.427.860.000	100	%	2.451.730.000	0,27	%	6.800.000	0,27	0,28	0,27	%	2.427.860.000	0,09	524,07

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CAPAIAN KINERJA RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2023 (Akhir Periode RPJMD)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RKPd s/d TAHUN LALU (n-2) 2021		TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RKPd TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd YANG DIEVALUASI (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RKPd (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RKPd s/d TAHUN (n-1) 2022		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN (n-1) 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	100	%	410.500.000	4,10	%	179.290.000	100	%	120.400.020	24,37	%	29.343.750	24,37	24,37	%	208.633.750	24,37	50,82
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi permasalahan strategis yang ditangani	100	%	3.472.000.000	100	%	329.316.000	100	%	237.600.000	54,55	%	129.610.000	54,55	54,55	%	458.926.000	54,55	13,22

2.2.2 Review Capaian Kinerja RPJMD

2.2.2.1 Analisis Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran P-RPJMD s/d Tahun 2021 Kabupaten Lumajang

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja misi pada tahun N-2,N-1 terhadap target akhir RPJMD 2018-2023 dengan mencantumkan status capaiannya. Adapun status capaian digambarkan dalam simbol penanda dengan bentuk dan warna yang berbeda untuk memudahkan evaluasi. Simbol penanda yang digunakan adalah sebagai berikut:

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023, bahwa indikator tujuan merupakan indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut adalah capaian kinerja 5 (lima) indikator kinerja utama sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2. 199 Evaluasi Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir	Satuan	Target	Realisasi		Capaian	Kategori Status
			RPJMD		2021	2020	2021		
Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6,5	%	5,90	-2,79	3,14	48.31	Sangat Rendah
	Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,65	Indeks	77,21	77,24	64,95	83.64	Tinggi
Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat	IPM	68,53	Indeks	67,23	65,46	66.07	96.41	Sangat Tinggi

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Akhir	Satuan	Target	Realisasi		Capaian	Kategori Status
			RPJMD		2021	2020	2021		
	Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja	Angka Kemiskinan	8	%	9	9,83	10,05	125.63	Sangat Tinggi
Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)	Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	85	Indeks	80	56,66	58,94	69.34	Sedang

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 (data diolah)

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Makro antara lain Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan dan Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tabel evaluasi kinerja diatas dapat dilihat capaian indikator Tahun 2021 terhadap target RPJMD Tahun 2018 -2023, terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori status *Sangat Rendah* dalam pencapaian target yaitu Angka Kemiskinan. Terdapat kenaikan Angka kemiskinan sebesar 22% terhadap Tahun 2020. Tingginya Angka Kemiskinan ini merupakan salah satu dampak dari pandemi global Covid-19. Kondisi pandemic ini juga berpengaruh terhadap beberapa pencapaian Indikator Kinerja Makro di Tahun kabupaten Lumajang Tahun 2021. Selanjutnya terdapat 1 (satu) indikator dengan kategori status Sedang yakni pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan mengalami kenaikan 2,28 angka dari tahun 2020. Selanjutnya terdapat 1 (satu) indikator dengan status kategori *Tinggi dan 2* (dua) indikator dengan kategori Status *Sangat Tinggi* yakni indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan.

Berikutnya disajikan data Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021.

Tabel 2. 200 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Kinerja Tahun 2021			Capaian	Kategori Status	OPD
			Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian (%)	Terhadap Target Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya aktivitas ekonomi / nilai PDRB	Nilai PDRB	27.508,59 Milyar	24,942.40	23,425.30	93.92	85.16	Tinggi	Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan
	Meningkatnya PAD sektor Pariwisata	Jumlah PAD sektor pariwisata	12.067.791.441	9,909,411,125	4,307,199,997	43.47	35.69	Sangat Rendah	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Meningkatnya kemandirian fiskal daerah	Rasio penerimaan pajak dan retribusi terhadap PAD	53.75	47.75	37.37	78.26	69.53	Sedang	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
	Meningkatnya akses infrastruktur	Indeks layanan infrastruktur	7,75	6.25	7.84	125.44	101.16	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Kinerja Tahun 2021			Capaian	Kategori Status	OPD
			Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian (%)	Terhadap Target Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
	daerah								Tata Ruang
	Meningkatnya jumlah usaha mikro	Persentase pertumbuhan usaha mikro	0,73	0.66	44.83	6,792.42	6,141.10	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan UM
Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian bencana	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	55	54.6	53.54	98.06	97.35	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	84,95	84.55	84.74	100.22	99.75	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	89.16	88.66	47.95	54.08	53.78	Rendah	Dinas Lingkungan Hidup
	Mewujudkan masyarakat yang tangguh	Indeks resiko bencana	115,5	138.6	118.74	85.67	102.81	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Kinerja Tahun 2021			Capaian	Kategori Status	OPD
			Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian (%)	Terhadap Target Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
	bencana								
Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks pendidikan	0,57	0.56	0.55	98.21	96.49	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	0.762	0.755	0.77	101.99	101.05	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	97,74	95.62	95.43	99.80	97.64	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya penanganan kawasan kumuh	Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani	4,25	3.58	3.58	100.00	84.24	Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Kinerja Tahun 2021			Capaian	Kategori Status	OPD
			Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian (%)	Terhadap Target Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Persentase masalah strategis yang Ipoleksosbud dantibmas) ditangani)	100	100	100	100.00	100.00	Sangat Tinggi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	Angka kecelakaan lalu lintas	52,34	62.25	14.27	177,07	172,73	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya pemberdayaan pemuda serta prestasi dan budaya olahraga	Persentase atlet dan pemuda yang berprestasi	48.7	45.10	40.40	89.58	82.96	Tinggi	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender	89,05	88.55	88.39	99.82	99.26	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Kinerja Tahun 2021			Capaian	Kategori Status	OPD
			Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian (%)	Terhadap Target Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
									Perempuan
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka laju pertumbuhan penduduk	0.34	0.35	0.25	71.43	73.53	Sedang	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya penyerapan dan partisipasi angkatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka	1,98	2.01	3.51	174.63	177.27	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,15	70.3	66.19	94.15	93.03	Sangat Tinggi	
	Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	72,02	71.71	70.98	98.98	98.56	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Kinerja Tahun 2021			Capaian	Kategori Status	OPD
			Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian (%)	Terhadap Target Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase desa cepat berkembang	33	25	25.37	101.48	76.88	Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	23,24	19.21	84.47	439.72	363.47	Sangat Tinggi	
Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks profesionalitas ASN	98	89	76.49	85.94	78.05	Tinggi	BKD
	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	90	88	84.11	95.58	93.46	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Kinerja Tahun 2021			Capaian	Kategori Status	OPD
			Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian (%)	Terhadap Target Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Persentase penerapan SPBE oleh PD	100	100	100	100	100.00	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP	WTP	100	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM	1	1	1	100.00	100.00	Sangat Tinggi	Inspektorat Daerah

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Kinerja Tahun 2021			Capaian	Kategori Status	OPD
			Tahun 2023	Target	Realisasi	Capaian (%)	Terhadap Target Akhir RPJMD		Penanggung Jawab
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	85.00	85.00	85.00	Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Perkada (Peraturan Kepala Daerah) penegakan Perda (Peraturan Daerah) /	95	85	100	117.65	105.26	Sangat Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP	A	BB (70-80)	B (66,88)	83,60	66,88	Sedang	1. Setda (Bag. Organisasi) 2. Bappeda 3. Inspektorat 4. BPKD

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 diatas terdapat sebanyak 30 (tiga puluh) Sasaran dan 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran. Terdapat 5 (lima) indikator sasaran dengan kategori status *SangatRendah/Rendah/Sedang* antara lain pada indikator Jumlah PAD sektor pariwisata, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Rasio penerimaan pajak dan retribusi terhadap PAD, Angka laju pertumbuhan penduduk dan Nilai SAKIP.

Terdapat 6 (enam) indikator sasaran dengan kategori status *Tinggi* antara lain Nilai PDRB, Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani, Persentase atlet dan pemuda yang berprestasi, Persentase Desa cepat berkembang, Indeks profesionalitas ASN dan Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.

Selanjutnya terdapat 20 (dua puluh) indikator sasaran dengan kategori status *Sangat Tinggi*. Hal ini berarti bahwa target indikator sasaran tersebut telah tercapai atau bahkan telah melebihi dari target yang telah ditetapkan. Adapun inidikator tersebut antara lain Indeks Layanan Infrastruktur, Persentase pertumbuhan usaha mikro, Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara, Indeks resiko bencana, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Skor pola pangan harapan (PPH), Persentase masalah strategis yang Ipoleksosbud dan tibmas dilayani, Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Indeks pembangunan gender, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat partisipasi angkatan kerja, Persentase koperasi aktif, Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, Indeks kepuasan masyarakat, Persentase penerapan SPBE oleh PD, Opini BPK terhadap LKPD, Jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai sebagai zona integritas menuju WBK/WBBM, Persentase Perkada (Peraturan Kepala Daerah) dan Perda (Peraturan Daerah).

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023, bahwa indikator tujuan merupakan indikator makro penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut adalah capaian kinerja 6 (Enam) indikator kinerja utama sampai dengan tahun 2021.

Tabel 2. 201 Evaluasi Kinerja Indikator Makro Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun sampai dengan Tahun 2021

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target P-RPJMD	Target 2023	Realisasi 2021	Capaian P-RPJMD %	Kategori Status
Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	1.Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	2	-1,00	3.14	157	Sangat Tinggi
	2.Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	64.44	64,26	64.95	100.79	Sangat Tinggi
Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan	1.Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67.53	66,23	66.07	97.84	Sangat Tinggi

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target P-RPJMD	Target 2023	Realisasi 2021	Capaian P-RPJMD %	Kategori Status
mandiri	masyarakat							
	2.Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja	Indeks Gini	Indeks	0.258	0.284	0.309	119.77	Sangat Tinggi
		Angka Kemiskinan	%	8.5	9,50	10.05	118.24	Sangat Tinggi
Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan	1.Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	60,00	58.94	84.20	Tinggi

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target P-RPJMD	Target 2023	Realisasi 2021	Capaian P-RPJMD %	Kategori Status
pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>)								

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 (data diolah)

Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki 6 (lima) Indikator Kinerja Makro antara lain Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Gini, Angka Kemiskinan dan Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tabel evaluasi kinerja diatas dapat dilihat realisasikinerja indikator Tahun 2021 terhadap target RPJMD Tahun 2018 -2023, terdapat 4 (empat) indikator dengan Kategori Status *Sangat Tinggi* dalam pencapaian target yaitu Persentase Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Gini, Angka Kemiskinan Indeks Pembangunan Manusia. Selanjutnya terdapat 1 (Satu) indikator dengan Status Kategori *Tinggi* yakni pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Berikutnya disajikan data Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021.

Tabel 2. 202 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2021

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target P-RPJMD	Target 2021	Realisasi	Capaian	Kategori Status	Perangkat Daerah
Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	1.Meningkatnya aktivitas ekonomi/ nilai PDRB	Nilai PDRB	Rp (juta)	22.370.23	21.714.45	23.425.30	104.72	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
	2.Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	8.85	8.45	7.84	88.59	Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Indeks	0.53	0.51	N/A	N/A	Sangat Rendah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target P-RPJMD	Target 2021	Realisasi	Capaian	Kategori Status	Perangkat Daerah
		Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Nilai	0.36	0.39	0.39	108.33	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
	3.Meningkatnya nilai Investasi	Nilai Investasi	Rp (juta)	201756.6	182999.2	61275.24	30.37	Sangat Rendah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	1.Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Indeks	53.59	53.39	53.54-	99.91	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
	2.Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84.75	84.55	84.74	99.99	Sangat Tinggi	
	3.Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	45.5	45.4	47.95	105.38	Sangat Tinggi	
	4.Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Indeks risiko bencana	Indeks	107.9	118	118.7	110.01	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target P-RPJMD	Target 2021	Realisasi	Capaian	Kategori Status	Perangkat Daerah
Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	1.Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks pendidikan	Indeks	0.58	0.56	0.55	94.83	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	Indeks	0.777	0.771	0.77	99.10	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3.Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita	Rp (juta)	9.644	9.270	9.203	95.43	Sangat Tinggi	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
	4. Meningkatkan peran serta perempuan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88.17	88.12	88.09	99.91	Sangat Tinggi	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target P-RPJMD	Target 2021	Realisasi	Capaian	Kategori Status	Perangkat Daerah
	dalam pembangunan								Perlindungan Anak
	5.Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0.22	0.24	0.25	86.36	Tinggi	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	1.Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.5	3	3.51	59.60	Rendah	Dinas Tenaga Kerja
	2.Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	29.7	8.26	8.26	27.81	Sangat Rendah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	3.Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Persentase PPKS mandiri	%	17.35	14.4	14.4	83.00	Tinggi	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target P-RPJMD	Target 2021	Realisasi	Capaian	Kategori Status	Perangkat Daerah
Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>)	1.Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	66.75	66.32	76.49	114.59	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian Daerah
	2.Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	82	84.11	101.34	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Sekretariat DPRD, Sekretariat

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target P-RPJMD	Target 2021	Realisasi	Capaian	Kategori Status	Perangkat Daerah
									Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satpol PP, Bakesbangpol, Dinas Pemuda dan Olahraga
	3.Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Indeks	Sangat Baik (3.50- <4.20)	Baik (2.60- <3.50)	Cukup (2.56)	60,95	Rendah	Dinas Komunikasi dan Informatika
	4.Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Efektivitas pengelolaan risiko tingkat kabupaten	Angka	3	2.5	N/A	N/A	Sangat Rendah	Inspektorat daerah

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target P-RPJMD	Target 2021	Realisasi	Capaian	Kategori Status	Perangkat Daerah
	5.Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	Baik (7.43-8.70)	Cukup Baik (6.14-7.42)	N/A	N/A	Sangat Rendah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	6.Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	Kategori " Perlu Perbaikan "	Kategori " Perlu Perbaikan "	N/A	N/A	Sangat Rendah	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100.00	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		Rasio penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD	%	32	31.5	37.37	116.78	Sangat Tinggi	Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Misi	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target P-RPJMD	Target 2021	Realisasi	Capaian	Kategori Status	Perangkat Daerah
	7.Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	A	BB 70-80	B(66,88)	66,88	Sedang	Sekretariat Daerah

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 (data diolah)

Dari data tabel Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023 diatas terdapat sebanyak (dua puluh dua) Sasaran dan 26 (dua puluh enam) indikator. Berdasarkan dari tabel di atas diketahui bahwa 8 (delapan) indikator dengan kategori status *SangatRendah/Rendah/Sedang* antara lain Nilai Investasi, Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri, Efektivitas pengelolaan risiko tingkat kabupaten, Indeks Kualitas Perencanaan, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks SPBE dan Nilai SAKIP. Terdapat 3 (tiga) indikator sasaran dengan status kategori *Tinggi* antara lain Indeks Layanan Infrastruktur, Angka Laju Pertumbuhan Penduduk dan Persentase PPKS mandiri. Selanjutnya 15 (lima belas) indikator dengan status kategori *SangatTinggi* Nilai PDRB, Kinerja Lalu Lintas Kabupaten, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks risiko bencana, Indeks pendidikan, Indeks kesehatan, Pengeluaran per kapita, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Kepuasan Masyarakat, Opini BPK, Rasio penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD.

Selanjutnya evaluasi pelaksanaan program pada RKPD bertujuan tujuan untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai sehingga mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa pelaksanaan evaluasi hasil RKPD diperoleh dari pelaksanaan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.

Pelaksanaan program RKPD Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 berjumlah 131 Program. Selanjutnya dalam hal penghitungan realisasi penyerapan anggaran, dapat diketahui bahwa rata-rata penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Lumajang sebesar 87,51 %. Berikut disajikan rata-rata tingkat capaian kinerja anggaran setiap Program di Tahun 2021 :

Tabel 2. 203Realisasi Kinerja Anggaran Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2020

KOD E	PROGRAM DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5

KOD E	PROGRAM DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
001	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	250.716.798.899	242.371.547.840	96,67
002	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	31.118.000	27.006.000	86,79
003	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	121.153.500	59.152.000	48,82
004	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	24.442.750	24.430.000	99,95
005	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	170.925.374.950	116.658.203.984	68,25
006	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	21.557.809.609	20.193.439.452	93,67
007	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	364.358.980	254.155.950	69,75
008	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.562.212.090	1.111.562.580	71,15
009	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	34.854.140.300	22.406.978.108	64,29
010	PROGRAM PENATAAN	10.749.999.774	10.285.690.474	95,68

KOD E	PROGRAM DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
	BANGUNAN GEDUNG			
011	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	185.352.522.76 2	84.943.509.599	45,83
012	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	740.271.470	684.270.600	92,44
013	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.595.660.260	1.546.990.020	96,95
014	PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	2.452.836.474	2.101.846.175	85,69
015	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	221.444.043	184.786.400	83,45
016	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	13.875.306.022	13.784.612.457	99,35
017	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	361.793.250	317.236.270	87,68
018	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.197.658.875	1.122.774.900	93,75
019	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	17.636.581.574	16.233.126.385	92,04
020	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR	6.991.987.650	6.959.179.033	99,53

KOD E	PROGRAM DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
	LIMBAH			
021	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.367.809.500	3.362.634.800	99,85
022	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.861.594.000	5.828.379.350	99,43
023	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	605.946.860	605.116.500	99,86
024	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (DAU)	2.278.741.151	2.090.558.900	91,74
025	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	5.731.888.300	5.653.074.200	98,62
026	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	247.947.750	242.036.750	97,62
027	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.428.690.700	5.296.360.110	97,56
028	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	166.143.000	162.635.200	97,89
029	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	210.457.747	210.402.220	99,97
030	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN	602.659.944	591.557.744	98,16

KOD E	PROGRAM DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
	PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
031	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.040.000	3.040.000	100,0 0
032	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	4.851.000	4.851.000	100,0 0
033	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	25.050.000	24.560.406	98,05
034	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	4.350.000	4.350.000	100,0 0
035	PROGAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.486.000	2.486.000	100,0 0
036	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	14.049.000	13.422.000	95,54
037	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	43.904.000	28.798.000	65,59
038	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	610.513.333	609.899.800	99,90
039	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	49.368.000	49.309.000	99,88

KOD E	PROGRAM DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
040	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	513.586.431	513.325.350	99,95
041	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	54.598.750	54.518.750	99,85
042	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	75.173.600	71.639.750	95,30
043	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	261.635.000	240.496.500	91,92
044	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	346.997.262	327.659.230	94,43
045	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	105.693.995	101.005.424	95,56
046	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	99.350.000	98.943.500	99,59
047	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	4.092.143.910	3.985.512.069	97,39

KOD E	PROGRAM DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
048	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	52.087.250	52.086.000	100,00
049	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH)	313.500.000	312.554.000	99,70
050	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	157.881.550	157.835.150	99,97
051	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.487.199.744	3.137.000.445	89,96
052	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	331.356.000	331.332.000	99,99
053	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	272.960.000	272.865.500	99,97
054	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.118.780.000	1.118.588.000	99,98
055	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	23.470.000	23.470.000	100,00
056	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	512.370.200	490.089.000	95,65

KOD E	PROGRAM DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
	DESA			
057	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.339.946.200	1.306.543.700	97,51
058	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	276.000	138.000	50,00
059	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.221.191.453	6.048.854.533	83,77
060	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.050.915.000	729.824.345	69,45
061	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	22.158.094.723	21.798.933.989	98,38
062	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	586.783.200	578.371.800	98,57
063	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.510.547.330	1.478.534.363	97,88
064	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	11.491.259.904	11.238.069.445	97,80
065	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	27.784.250	24.302.250	87,47

KOD E	PROGRAM DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
066	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	459.181.000	446.251.600	97,18
067	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	43.370.000	42.620.000	98,27
068	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	64.226.000	57.642.000	89,75
069	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	84.400.000	58.905.600	69,79
070	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	314.443.000	301.446.600	95,87
071	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	394.353.900	226.305.750	57,39
072	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	225.189.000	222.963.500	99,01
073	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	318.500.625	318.500.625	100,0 0
074	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.500.000.000	1.500.000.000	100,0 0

KOD E	PROGRAM DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
075	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	15.016.349.223	14.017.502.310	93,35
076	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	31.928.500	31.918.700	99,97
077	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	30.000.000	18.000.000	60,00
078	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	84.400.000	84.400.000	100,00
079	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.032.905.000	2.031.750.000	99,94
080	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	44.080.000	44.080.000	100,00
081	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	128.624.000	123.524.000	96,03
082	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	776.400.000	772.074.900	99,44
083	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN (DAU)	2.507.974.000	1.979.102.700	78,91
084	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	11.958.000	11.958.000	100,00
085	PROGRAM PERLINDUNGAN	1.998.000	1.996.000	99,90

KOD E	PROGRAM DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
	DAN PENYELAMATAN ARSIP			
086	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	346.243.800	342.325.441	98,87
087	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	912.379.550	790.306.239	86,62
088	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.885.700	10.299.600	94,62
089	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	221.000.000	215.152.500	97,35
090	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI WISATA	7.675.330.126	6.764.886.266	88,14
091	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	352.745.500	350.763.234	99,44
092	PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	920.856.000	920.656.000	99,98
093	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.697.665.500	1.683.426.400	99,16

KOD E	PROGRAM DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
094	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (sarana : alsintan dan saprodi)	5.862.968.000	5.776.347.878	98,52
095	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8.320.225.500	8.190.039.900	98,44
096	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	714.872.000	714.804.400	99,99
097	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	275.750.000	230.792.500	83,70
098	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	72.000.000	61.200.000	85,00
099	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.008.975.000	1.548.519.827	51,46
100	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.056.727.000	4.777.197.997	94,47
101	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	177.338.851	131.004.750	73,87

KOD E	PROGRAM DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
102	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	169.585.650	137.170.655	80,89
103	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	347.833.970	334.050.424	96,04
104	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	86.456.000	78.594.000	90,91
105	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	565.769.075	404.347.700	71,47
106	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA	33.644.000	30.213.160	89,80
107	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	27.187.800	24.718.800	90,92
108	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	14.173.720.340	5.670.390.300	40,01
109	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	34.791.188.570	34.069.244.847	97,92
110	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19.181.813.900	18.133.030.416	94,53

KOD E	PROGRAM DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
111	PROGRAM KOORDINASI DAN SINGKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	768.348.030	698.394.390	90,90
112	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	780.289.235	732.414.190	93,86
113	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	391.528.349.137	385.111.173.877	98,36
114	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	764.022.450	599.569.130	78,48
115	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.099.245.695	4.806.898.095	94,27
116	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	610.356.400	570.403.700	93,45
117	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.141.872.750	953.046.354	83,46
118	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.018.035.250	1.012.380.250	99,44
119	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	265.995.000	239.484.500	90,03
120	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN	159.453.000	102.241.000	64,12

KOD E	PROGRAM DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
	DAN ASISTENSI			
121	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	262.625.750	262.094.250	99,80
122	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	408.749.250	407.476.010	99,69
123	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.900.000	2.900.000	100,00
124	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.060.000	32.060.000	100,00
125	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.033.773.000	3.028.853.000	99,84
126	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	30.790.000	30.770.000	99,94
127	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA	1.113.627.348	1.113.477.348	99,99

KOD E	PROGRAM DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5
	BUDAYA POLITIK			
128	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.427.860.000	2.427.860.000	100,0 0
129	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	179.310.000	179.290.000	99,99
130	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	329.579.000	329.316.000	99,92
131	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	572.187.361.74 7	522.550.083.30 9	91,32

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 (data.diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat capaian kinerja anggaran Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2020 termasuk pada kategori tinggi. Berikut Secara rinci dapat disampaikan bahwa 11 (sebelas) program tertinggi yang memiliki capaian kinerja anggaran di atas rata-rata yaitu:

1. Program Penempatan Tenaga Kerja;
2. Program Hubungan Industrial;

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
6. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan ;
8. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan;
9. Program Pengembangan Kebudayaan;
10. Program Pembinaan Sejarah ;
11. Program Pengelolaan Arsip ;
12. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
13. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
14. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

2.2.2.2 Capaian Program Strategis Kepala Daerah Terpilih

Program Strategis Kepala Daerah Kabupaten Lumajang merupakan Janji Politik Kepala Daerah kepada masyarakat sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penetapan program strategis ini dilakukan berdasarkan pemetaan permasalahan di masyarakat yang memerlukan prioritas penanganan. Selanjutnya Program Strategis ini sebagai representasi pendekatan politik yang menjadi salah satu rujukan penentuan proritas pembangunan di Kabupaten Lumajang sampai dengan akhir jabatan Kepala Daerah. Berdasarkan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 ditetapkan terdapat 20 (dua puluh) Program strategis yang akan diselesaikan selama masa jabatan Kepala Daerah. Berikut data capaian kinerja Program Strategis Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021.

Tabel 2. 204 Analisis Capaian Kinerja Program Strategis Kepala Daerah

No	Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi
1	Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di	Gratis biaya melahirkan dengan standart kelas 3	Ibu melahirkan dengan standart kelas 3	Tercapai

No	Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi
	lumajang dengan standart kelas 3 dan tanpa ada biaya tambahan obat			
2	Fasilitasi pemenuhan listrik di wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik dan pemenuhan air bersih di wilayah utara dan daerah rawan kekuarangan air lainnya	Pemenuhan listrik	Dusun belum berlistrik	Tercapai
		Pemenuhan air bersih	Dusun wilayah utara dan rawan air bersih	Tercapai
3	Memberikan bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/mts, SMA/SMK/MA serta SPP gratis untuk SMA/SMK/MA	Bantuan seragam gratis	Siswa baru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Tercapai
		Bantuan SPP gratis	Siswa SMA/SMK/MA	Tercapai
4	Memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan target 1000 penerima beasiswa	Bantuan beasiswa	Mahasiswa baru kurang mampu (1000 orang)	Sedang Berjalan

No	Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi
5	Memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar	Tambahan tunjangan/honor	Guru non NIP, Madin, TPQ, mengaji masjid/langgar	Tercapai
6	Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp 1.000.000,- yang dicairkan tepat waktu dan memberikan bantuan sarana dan prasarana rukun kematian	Tunjangan uang duka kematian	Penduduk meninggal	Tercapai
		Bantuan Rukem	Rukun kematian	Tercapai
7	Pengadaan WiFi di seluruh sarana publik dan di setiap desa/kelurahan dan juga pemasangan CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik dengan target pemasangan 1000 CCTV	Pengadaan WIFI	Sarana publik	Tercapai
			Desa/kelurahan	Sedang Berjalan
		Pengadaan CCTV	Sarana publik dan daerah rawan (1000 CCTV)	Sedang Berjalan
8	Pembangunan Stadion Semeru standart nasional, serta	Pembangunan stadion standart nasional	Stadion Semeru	Tercapai

No	Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi
	pembangunan standart regional di Kecamatan Klakah, Pasirian, dan Yosowilangun			
		Pembangunan stadion standart regional	Stadion Kecamatan Klakah, Pasiran, Yosowilangun	Sedang Berjalan
9	Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat	Pemberdayaan Karang Taruna	Karang Taruna	Tercapai
		Pemberdayaan kelompok organisasi pemuda	Kelompok organisasi pemuda	Tercapai
		Pemberdayaan lansia	Lansia	Tercapai
		Pemberdayaan kaum disabilitas	Kaum disabilitas	Tercapai
10	Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda	Pengalihfungsian sebagai gedung kesenian	Gedung Soedjono	Sedang Berjalan
11	Melakukan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang	Inisiasi dan koordinasi aktif tentang pembangunan jalan tol	Pemerintah Pusat	Tercapai

No	Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi
	sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi			
12	Pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, dan membangun jalan penghubung Pasirian-Tempursari	Infrastruktur jalan kabupaten standar hotmix	Jalan Kabupaten	Sedang Berjalan
		Pembangunan jalan penghubung Pasirian-Tempursari	jalan penghubung Pasirian-Tempursari	Sedang Berjalan
13	Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan	Pembangunan Ruang terbuka hijau	Seluruh kecamatan	Sedang Berjalan
		Pembangunan taman layak anak	Seluruh kecamatan	Sedang Berjalan
14	Fasilitasi pendirian BUM-Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi	Fasilitasi BUM Tren		Sedang Berjalan

No	Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi
15	Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli sekaligus mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga	Rehabilitasi pasar tradisional	Pasar tradisional	Tercapai
		Stimulasi pinjaman tanpa bunga	Koperasi pasar tradisional	Sedang Berjalan
16	Optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian	Optimalisasi potensi pariwisata	Stake holder sektor pariwisata	Tercapai
		Optimalisasi potensi pertanian	Stake holder sektor pertanian	Tercapai
17	Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di	Pelayanan adminduk sistem online	Seluruh Kecamatan	Tercapai

No	Program Strategis Kepala Daerah	Indikator Program	Target Sasaran	Interpretasi
	kecamatan			
18	Pembangunan mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan	Terbangun pusat pelayanan perizinan satu atap		Belum tercapai
19	Tambahkan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Pemberian TPP	PNS	Tercapai
		Standarisasi honor sesuai UMK	Tenaga kerja kontrak	Tercapai
20	Pemberian tunjangan kepala desa, perangkat desa di luar penghasilan tetap, dan memberikan tunjangan bagi RT/RW	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Seluruh Kepala Desa dan Perangkat	Sedang Berjalan
		Tunjangan RT/RW	Seluruh RT/RW	Tercapai

Secara umum hasil evaluasi pelaksanaan program prioritas kepala daerah sudah berjalan sesuai target yang ditetapkan, namun Namun dampak pandemi Covid 19 dengan adanya refocussing anggaran untuk penanganannya sangat berpengaruh terhadap

pencapaian target indikator Program Strategis Kepala Daerah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama pada fasilitasi pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang, pembangunan mall perijinan terpadu, pembangunan jalan poros penghubung Pasirian-Tempursari serta BUMDes yang difasilitasi.

Berikut akan dijelaskan capaian kinerja Program Strategis Kepala Daerah dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 :

1. Pada Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di lumajang dengan standart kelas 3 dan tanpa ada biaya tambahan obat dengan Indikator Gratis biaya melahirkan dengan standart kelas 3. Capaian kinerja tahun 2019 sebanyak 3.034 orang dan terdapat kenaikan pada tahun 2020 menjadi 5.556 orang, namun mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 3.501. Sampai dengan Tahun 2021 total ibu melahirkan yang ditangani secara gratis di Kabupaten Lumajang sampai mencapai 8.594 kelahiran.
2. Pada Program Stategis Fasilitasi pemenuhan listrik di wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik dan pemenuhan air bersih di wilayah utara dan daerah rawan kekuarangan air lainnya dengan indikator Pemenuhan Listrik dan Pemenuhan air bersih. Dari segi pemenuhan listrik pada tahun 2019 dari jumlah total 279.450 rumah tangga yang ada di Kabupaten Lumajang sudah sekitar 95,55 % telah teraliri listrik PLN atau sebanyak 267.014 rumah tangga. Pada tahun 2020 telah teraliri arus listrik PLN sebanyak 98,30 % atau sebanyak 286.298 rumah tangga dari total 291.244 jumlah rumah tangga. Dan di tahun 2021 telah mencapai 100% jumlah dusun yang teraliri listrik. Selanjutnya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah utara Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 mencapai 1.913 Sambungan Rumah, tahun 2020 sebanyak 2.057 Sambungan Rumah dan Tahun 2021 sebanyak 2916 Sambungan Rumah dengan total 6.886 Sambungan Rumah yang dibangun dari berbagai sumber pendanaan, mulai dari Hibah Air Minum Pedesaan (HAMP), DAK Fisik bidang Air Minum serta program Pamsimas III.
3. Pada Program Stategis Memberikan bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/mts, SMA/SMK/MA serta SPP gratis untuk SMA/SMK/MA dengan indikator Bantuan seragam gratis

dan Bantuan SPP gratis. Pada tahun 2019 sudah tersalurkan bantuan seragam gratis sebanyak 16.219 siswa Sd/MI, 15.341 siswa SMP/MTs dan 3.264 siswa MA, pada tahun 2020 telah tersalurkan sebanyak 15.412 siswa Sd/MI, 9.305 siswa SMP/MTs serta 2.478 siswa MA, sedangkan pada tahun 2021 telah tersalurkan sebanyak 15.524 siswa Sd/MI, 15.198 siswa SMP/MTs serta 3.408 siswa MA. Sehingga total bantuan seragam gratis sampai dengan Tahun 2021 mencapai 96.149 paket. Selanjutnya SPP gratis adalah salah satu upaya memberikan bantuan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu untuk meningkatkan akses pendidikan. Sesuai dengan SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/57/427.12/2019 tentang Lokasi dan Alokasi Pemberian Dana Belanja Hibah Biaya Operasional Sekolah melalui Komite Sekolah/Madrasah SMA/SMK/MA/PK-PLK Negeri/Swasta Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan sebanyak 34.571 siswa SMA/SMK/MA yang mendapatkan SPP gratis, pada tahun 2020 sesuai SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/78/427.12/2020 tentang Daftar Penerima dan Besaran Biaya Operasional Sekolah/Madrasah melalui Komite Madrasah Aliyah Negeri/Swasta Tahun ANgggaran 2020 telah ditetapkan 9.042 siswa SMA/SMK/MA penerima bantuan SPP gratis. Sedangkan pada tahun 2021 sesuai SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/159/427.12/2021 tentang Daftar Penerima dan Besaran Biaya Operasional Sekolah/Madrasah melalui Komite Madrasah Aliyah Negeri/Swasta Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan 9.660 siswa SMA/SMK/MA penerima bantuan SPP gratis. Selanjutnya total penerima bantuan hingga tahun 2021 mencapai 53.273 siswa SMA/SMK/MA.

4. Pada Program Strategis Memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan target 1000 penerima beasiswa memiliki indikator Bantuan Beasiswa. Bantuan Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa baru berprestasi yang kurang mampu dan diterima di Perguruan Tinggi Negeri. Target penerima beasiswa ini sejumlah 1000 mahasiswa. Pada tahun 2019 sebanyak 117 mahasiswa telah mendapatkan beasiswa, pada tahun 2020

sebanyak 182 mahasiswa, sedangkan tahun 2021 sebanyak 100 mahasiswa yang digunakan untuk melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri. Total sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai 399 mahasiswa yang telah mendapat beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Lumajang.

5. Pada Program Strategis Memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar dengan indikator Tambahan tunjangan/Honor. Untuk pemerataan kesejahteraan untuk tenaga pendidik Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar. Pada tahun 2019 sebanyak 3.000 guru ngaji dan TPQ telah mendapatkan tunjangan, pada tahun 2020 terdapat kenaikan jumlah penerima menjadi 6.000 guru ngaji dan TPQ, kenaikan kembali terjadi di Tahun 2021 mencapai 6.200 guru ngaji dan TPQ. Untuk guru non NIP baik di sekolah negeri ataupun swasta pada tahun 2019 sebanyak 8.944 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 9.353 orang, dan di tahun 2021 sebanyak 7.436 Orang. Selanjutnya Guru Madrasah Diniyah yang mendapatkan BOS MADIN (di jenjang Madin Ula, Madin Wustho, SD, MI, SMP, MTs) pada tahun 2019 sebanyak 1.190 orang, tahun 2020 sebanyak 1.145 orang dan di tahun 2021 sebanyak 1.436 orang;
6. Pada Program Strategis Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp 1.000.000,- yang dicairkan tepat waktu dan memberikan bantuan sarana dan prasarana rukun kematian dengan indikator Tunjangan uang duka kematian dan Bantuan Rukem. Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya meringankan beban keluarga yang ditinggalkan dengan memberikan Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp 1.000.000,-. Sampai pada tahun 2020 sudah sebanyak 33.040 keluarga/ahli waris yang telah mendapatkan santunan kematian. Selanjutnya Rukun Kematian yang telah mendapatkan penyediaan sarana prasarana sampai dengan tahun 2021 mencapai 1.372 Rukem.
7. Pada Program Strategis Pengadaan WiFi di seluruh sarana publik dan di setiap desa/kelurahan dan juga pemasangan CCTV di

tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik dengan target pemasangan 1000 CCTV dengan indikator Pengadaan WiFi dan Pengadaan CCTV. Dalam upaya menjaga keamanan dan kenyamanan di seluruh wilayah, Pemerintah kabupaten Lumajang meningkatkan pengawasan dan kemudahan akses informasi dan internet dengan Pengadaan WiFi di seluruh sarana public. Sampai dengan tahun 2021 telah dilakukan pemasangan WiFi di seluruh sarana public sejumlah 299 unit. selanjutnya di setiap desa/kelurahan dan juga pemasangan CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik dengan target pemasangan 1000 CCTV. Sampai dengan tahun 2021 terdapat 446 kamera CCTV di 174 titik yang tersebar di Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk keamanan dan kelancaran lalu lintas, sampai tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Perhubungan telah memasang sebanyak 77 kamera CCTV di 28 titik.

8. Pada Program Strategis Pembangunan Stadion Semeru standart nasional, serta pembangunan standart regional di Kecamatan Klakah, Pasirian, dan Yosowilangun memiliki indikator Pembangunan stadion standart nasional dan Pembangunan stadion standart regional. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah melakukan pembangunan Stadion Semeru standart nasional pada tahun 2021 sedangkan pembangunan stadion standart regional di Kecamatan Klakah, Pasirian, dan Yosowilangun akan direncanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2023.
9. Pada Program Strategis Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat Pemberdayaan Karang Taruna, Pemberdayaan kelompok organisasi pemuda, Pemberdayaan lansia dan Pemberdayaan kaum disabilitas. Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat sebagai salah satu tanggung jawab sosial Pemerintah Kabupaten Lumajang. Sampai pada tahun 2021 melalui Dinas Sosial P3A telah melakukan Melakukan Sosialisasi Pembentukan Karang Taruna Desa di Kabupaten Lumajang serta pembentukan Karang Taruna, pembinaan dan Bulan Bakti Karang Taruna, dengan jumlah karang

taruna aktif sebanyak 135 kelompok. Untuk Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan fasilitasi pelatihan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 sejumlah 29 kelompok, tahun 2020 telah melatih 20 kelompok, sedangkan tahun 2021 sejumlah 30 kelompok. Selanjutnya dalam meningkatkan kesejahteraan Lansia, Dinas Sosial P3A Kabupaten Lumajang telah melakukan penyantunan kepada lansia yang terdaftar di Griya Lansia. Pada tahun 2019 tercatat ada 15 orang lansia, tahun 2020 menjadi 18 orang dan tahun 2021 sebanyak 22 orang lansia. Untuk pemberdayaan kaum disabilitas pada tahun 2019, pada peringatan Hari Disabilitas Internasional diselenggarakan pentas seni disabilitas sekaligus ajang pertemuan para penyandang disabilitas dan penyerahan bantuan bagi 350 orang penyandang disabilitas, tahun 2020 dilakukan pelatihan menjahit bagi disabilitas daksa sejumlah 40 orang sedangkan tahun 2021 sebanyak 157 orang penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan.

10. Pada Program Strategis Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda dengan indikator Pengalihfungsian sebagai gedung kesenian. Dalam upaya Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda, sampai pada tahun 2021 perkembangan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Lumajang melalui Dinas Pariwisata masih dalam tahap desain oleh konsultan perencanaan dan direncanakan dilakukan rehabilitasi Gedung di Tahun 2023.
11. Pada Program Strategis Melakukan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi dengan indikator Inisiasi dan koordinasi aktif tentang pembangunan jalan tol. Dalam mengurai permasalahan kemacetan di jalur Probolinggo-Jember di ruas jalan yang melewati Kabupaten Lumajang telah diupayakan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi,

sampai dengan pada tahun 2021 telah melakukan koordinasi aktif dengan Kementerian PUTR tentang pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang. Akhirnya upaya yang dilakukan membuahkan hasil dengan disetujuinya pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang oleh Kementerian PUPR dan dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger- Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selata yang diharapkan segera terealisasi progress pembangunan fisiknya.

12. Pada Program Strategis Pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, dan membangun jalan penghubung Pasirian-Tempursari dengan indikator Infrastruktur jalan kabupaten standar hotmix dan Pembangunan jalan penghubung Pasirian-Tempursari. Pembangunan infrastruktur jalan akan mempermudah akses perekonomian masyarakat. Aspek yang menjadi sorotan utama adalah tentang kualitas jalan, jika kualitas jalan baik akan memperlancar dan mempermudah akses masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian. Pemerintah Kabupaten Lumajang terus melakukan pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, serta membangun jalan penghubung Pasirian-Tempursari yang terputus karena abrasi beberapa tahun yang lalu. Sampai tahun 2020 jalan mantap dan jembatan yang terbangun sebesar 78,7 % dan 91,06 %. Capaian tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebelumnya, dengan jalan mantap 71,21 % sedangkan jembatan mengalami penurunan yang semula sebesar 91,29 %. Sedangkan di tahun 2021 terdapat peningkatan Jalan mantap menjadi 88,80% namun sebaliknya terjadi penurunan pada jembatan menjadi 79.06%. Hal ini salah satunya disebabkan dengan adanya bencana erupsi Gunung Semeru yang menyebabkan kondisi banyak jembatan rusak dan hancur. Selanjutnya untuk perkembangan jalan penghubung Pasirian-Tempursari sampai tahun 2020 masih terbangun 2 km dari total

panjang 6,2 km. Terdapat penambahan 0,2 Km di tahun 2021 sehingga total Panjang jalan menjadi 2,2 Km.

13. Pada Program Strategis Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan dengan indikator Pembangunan Ruang terbuka hijau dan Pembangunan taman layak anak. Dalam menambah cakupan tutupan lahan di Kabupaten Lumajang, Pemerintah melakukan pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan. Sampai tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup telah membangun dan merevitalisasi Alun Alun Pasirian dan Taman Jarit Candipuro.
14. Pada Program Strategis Fasilitasi pendirian BUM- Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi dengan indikator Fasilitasi BUM Tren. Fasilitasi pendirian BUM- Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi. Sampai tahun 2021 baru terbentuk 1 BumTren di Desa Petahunan Kecamatan Summersuko. Kedepannya akan dikembangkan lagi BumTren di pondok-pondok pesantren lainnya
15. Pada Program Strategis Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli sekaligus mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga memiliki indikator Rehabilitasi pasar tradisional dan Stimulasi pinjaman tanpa bunga. Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli adalah salah satu langkah revitalisasi pasar tradisional yang lebih bersih, modern serta menghilangkan kesan kumuh. Sampai tahun 2021 telah terehab 16 pasar tradisional, diantaranya Pasar Klojen, Pasar Krai, Pasar Klakah, Pasar Pronojiwo, Pasar Baru, Pasar Plasa, Pasar Candipuro, Pasar Agropolitan, Pasar Klojen, Pasar Plasa, Pasar Klakah, Pasar Randuagung, Pasar Candipuro, Pasar Senduro, Pasar Yosowilangun, dan Pasar hewan Jogotrungan. Sedangkan untuk memperkuat ekonomi mikro Pemerintah Kabupaten Lumajang mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha

Mikro kabupaten Lumajang sampai dengan Tahun 2021 sudah ada 9 koperasi pasar tradisional yang mendapatkan pembinaan.

16. Pada Program Strategis Program strategis Optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian dengan indikator Optimalisasi potensi pariwisata dan Optimalisasi potensi pertanian. Dalam upaya pengembangan pariwisata, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah berupaya melakukan optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian. Dalam rangka optimalisasi potensi Pertanian di Kabupaten Lumajang telah dilakukan beberapa upaya antara lain Sertifikasi Padi Organik di 2 wilayah kecamatan (pengelola padi organik) Kecamatan Jatiroto dan Kecamatan Candipuro, Sertifikasi Kopi Organik di Pasrujambe, Pengembangan ubi jalar Pasrujambe sebagai komoditas ekspor di Kecamatan Pasrujambe, Pemberian bantuan Sapi Perah di Desa Burno Kecamatan Senduro dan membarikan Bantuan pengembangan kambing Perah Senduro sebanyak 15 ekor di Desa Burno - Kecamatan Senduro.
17. Pada Program Strategis Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan dengan indikator Pelayanan adminduk sistem online. Pelayanan pokok kependudukan telah dilakukan melalui Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online tuntas di kecamatan. Pada tahun 2021 pelayanan KTP sebanyak 854.241 buah, pelayanan KSK sebanyak 300.137 buah, akte kelahiran sebanyak 302.325 buah serta akte kematian sebanyak 12.137 buah.
18. Pada Program Strategis Pembangunan mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan dengan indikator Terbangun pusat pelayanan perizinan satu atap. Untuk terwujudnya pelayanan perijinan satu pintu Pemerintah Kabupaten Lumajang telah mengupayakan pembangunan

mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan. Sampai tahun 2021 progress usulan Mall Pelayanan Terpadu sudah tersusunnya kajian tentang adanya Mall Pelayanan Terpadu yang direncanakan akan dibangun di pusat kota dan diharapkan pada akhir 2023 akan terealisasi.

19. Pada Program Strategis Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK) dengan indikator Pemberian TPP dan Standarisasi honor sesuai UMK. Untuk mewujudkan kesejahteraan pegawai telah diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK), sampai tahun 2021 sebanyak 1900 orang PNS telah diberikan TPP dan sebanyak 6.985 tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang telah diberikan honorarium sesuai UMK
20. Pada Program Strategis Pemberian tunjangan kepala desa, perangkat desa di luar penghasilan tetap, dan memberikan tunjangan bagi RT/RW dengan indikator Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan RT/RW. Dalam peningkatan kesejahteraan aparat desa, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah memberikan tunjangan kepala desa, perangkat desa di luar penghasilan tetap, dan memberikan tunjangan bagi RT/RW. Untuk tunjangan Kades dan perangkat telah dilakukan dengan dana ADD di 198 desa yang tersebar di Kabupaten Lumajang, sedangkan untuk tunjangan RT/RW juga telah diberikan sebanyak 8.339 RT/RW di Kabupaten Lumajang.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pokok-pokok visi merupakan keinginan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang merupakan kondisi yang diinginkan, refleksi kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus diharapkan dapat menjawab permasalahan utama/pokok dan isu-isu strategis daerah

Tabel 2. 205Tabel Permasalahan Utama dalam RPJMD

No	Masalah Utama	Kondisi yang diharapkan
1	Rendahnya Persentase pertumbuhan sektor unggulan	Pertumbuhan sektor unggulan diharapkan meningkat sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah
2	Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana	Pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Lumajang
3	Belum meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas SDM	Kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Lumajang yang memperoleh akses kebutuhan dasar dan meningkatnya kualitas SDM yang tercermin dalam peningkatan kesejahteraan
4	Masih tingginya angka kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan Kabupaten Lumajang dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat
5	Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah	Peningkatan SDM aparatur pemerintah dan reformasi birokrasi dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat

A. Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Analisis Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran P-RPJMD

1. Pertumbuhan Ekonomi

Parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Lumajang salah satunya diukur dengan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang tahun 2021 sebesar 3,14 persen.

Berdasarkan kontribusi per sektor PDRB terlihat bahwa perekonomian Kabupaten Lumajang sebagian besar ditunjang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, diikuti sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa struktur/pola perekonomian masyarakat Kabupaten Lumajang mengalami pergeseran meskipun belum cukup signifikan namun terjadi secara keseluruhan berdampak positif pada levelling besaran PDRB. Pergeseran yang terjadi dari sektor pertanian/agraris ke sektor industri ataupun perdagangan yang merupakan ciri spesifik dari daerah perkotaan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang mengalami fluktuasi antara tahun 2015 sampai 2019. Sempat mengalami pertumbuhan sampai 2018 dan mengalami perlambatan kembali pada tahun 2019. Perlambatan pada tahun 2019, tentunya hal ini juga dampak dari perekonomian nasional yang juga mengalami perlambatan meskipun pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan. Hal ini juga seiring dengan menurunnya harga-harga ekspor komoditi utama. Disamping kondisi ekonomi global yang belum membaik, juga disebabkan kebijakan pemerintah yang kurang kondusif bagi dunia usaha diantaranya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan tingginya tingkat suku bunga bank (BI rate) yang memicu naiknya harga kebutuhan pokok maupun komoditas lain. Sehingga meskipun pada awal tahun 2015 pemerintah menurunkan harga BBM, dan kondisi sudah stabil hingga tahun 2016, tetapi tidak diikuti atau di respon dengan turunnya harga kebutuhan pokok maupun harga komoditi lain. Pada tahun 2016 perekonomian Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan dan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang kembali meningkat di atas 5 (lima) persen. Tahun 2020 pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terhentinya sebagian besar aktifitas ekonomi membuat pertumbuhan ekonomi berkontraksi tajam di angka -2,79. Tahun 2021 seiring meredanya pandemi Covid-19 dan berjalannya pemulihan ekonomi nasional angka pertumbuhan ekonomi naik menjadi 3,14.

Semua faktor ternyata memengaruhi perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten baik itu factor dari dalam (internal) maupun factor dari luar (eksternal). Dari sisi factor eksternal diantaranya adalah kondisi ekonomi global yang belum stabil atau membaik serta harga komoditas internasional yang masih berjalan lambat di level yang rendah sedangkan di faktor

internal, kinerja produktifitas komoditi sector pertanian sebagai leading sector bias dikatakan masih belum maksimal.

Berdasarkan trend nilai PDRB meningkat, Terutama pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta industri pengolahan. Beberapa sektor yang masih membutuhkan upaya pertumbuhan PDRB adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Jumlah PAD Sektor Pariwisata tahun 2021 meningkat seiring mulai redanya pandemic covid 19 setelah turun tajam pada tahun 2020. Demikian pula rasio penerimaan pajak dan retribusi terhadap PAD tahun 2021 mengalami peningkatan setelah turun pada tahun 2020 akibat dampak dari terjadinya pandemi Covid 19.

Capaian indeks layanan infrastruktur makin meningkat yang mengindikasikan kondisi infrastruktur yang makin baik di Kabupaten Lumajang. Peningkatan tersebut tampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas jalan, perbaikan infrastruktur bidang irigasi, serta kuantitas dan kualitas jembatan.

Perbaikan-perbaikan terhadap kondisi jalan yang rusak akan terus dilakukan terutama jalan yang masuk dalam kategori rusak sedang-berat dengan skala prioritas kerusakan sesuai dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang membuat inovasi NGAPLING (Ngaspal Keliling) yang tujuannya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Lumajang dalam mengatasi jalan berlubang secara cepat dan singkat.

Berdasarkan tabel 2.134, persentase pertumbuhan usaha mikro mengalami kenaikan, demikian pula dengan pertumbuhan persentasi koperasi aktif mengalami kenaikan.

Seiring dengan mulai pulihnya ekonomi akibat pandemi covid 19 yang perlu dilakukan adalah mempertahankan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi, mengingat di Kabupaten Lumajang pola kecenderungan pertumbuhan dengan laju inflasi yang lebih stabil.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing akan lebih signifikan jika didorong melalui peningkatan sarana dan prasarana penunjang produktivitas pertanian, dan pemasaran produksi pertanian yang difasilitasi dengan kemudahan akses pasar produk-produk pangan lokal yang sehat yang didukung dengan penyediaan jaringan informasi tepat guna hingga level desa guna memudahkan akses informasi pasar dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pertanian lokal. Dalam rangka pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah di Kabupaten Lumajang perlu distimulasi melalui penguatan peranan UMKM dalam peningkatan daya saing daerah, melalui

pembinaan dan pembekalan sumberdaya wirausahawan guna meningkatkan produktivitas usaha mikro dan informal.

Selain sektor pertanian dan sektor UMKM, pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah juga ditingkatkan melalui sektor pariwisata, khususnya pariwisata yang berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan potensi geografis dan sosiografis yang dimiliki Lumajang dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi daya tarik serta sektor unggulan yang memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat sebagai motor penggerak produktivitas perekonomian daerah. Pengembangan pariwisata juga diarahkan dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan serta didukung interkoneksi antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku wisata.

Bukan hanya daya saing ekonomi, namun juga ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata untuk mengatasi kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa dengan penyediaan akses infrastruktur berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai, jaringan komunikasi, dan jaringan energi yang penting.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dibentuk oleh Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Lahan. Telah terjadi penurunan kualitas air di Kabupaten Lumajang jika dibandingkan dengan hasil pengukuran di tahun sebelumnya.

Indeks kualitas air sampai dengan tahun 2019 cenderung menurun. Penurunan kualitas air ini dikarenakan beban pencemaran air semakin meningkat di tahun 2019, dimana status mutu air (kualitas air sungai) pada tahun 2019 mempunyai status cemar sedang pada 2 titik, yaitu Kali Bondoyudo 1 (pada periode 14 Maret 2019) dan Kali Bondoyudo 2 (pada periode 9 Agustus 2019). Sedangkan di tahun 2018 tidak ada kondisi status cemar sedang dan berat untuk status mutu air. Adapun titik pantau uji kualitas air didapatkan dari 8 titik dengan menggunakan metode SNI, padahal yang dapat dipantau sebenarnya lebih dari 8 titik. Pengecekan atas titik pantau tersebut dilakukan setiap bulan dalam kurun waktu 1 tahun.

Trend capaian indeks kualitas udara cenderung meningkat. Hal tersebut menandakan makin meningkatnya kualitas udara di Kabupaten Lumajang.

Trend capaian indeks kualitas tutupan lahan cenderung meningkat. Hal tersebut menandakan makin meningkatnya kualitas udara di Kabupaten Lumajang.

Trend capaian indeks resiko bencana cenderung menurun bahkan di bawah rata-rata Jatim dan Nasional. Hal tersebut menandakan masyarakat makin tangguh dalam menghadapi bencana.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil penghitungan, IPM Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan setiap tahunnya, tahun 2021 laju pertumbuhannya indeks pertumbuhan naik pesat namun belum bisa mendongkrak peringkat indeks IPM kabupaten di Jawa Timur. IPM Kabupaten Lumajang termasuk dalam Kabupaten yang mempunyai IPM kategori rendah di tingkat Jawa Timur yaitu, posisi ke 36 dari 38 Kabupaten/Kota.

Laju pertumbuhan indeks pendidikan mulai 2018-2020 cenderung stagnan dan naik sedikit pada tahun 2021, seiring dengan peningkatan angka HLS yang cenderung lambat, bahkan masih di bawah Jatim. Demikian juga dengan angka RLS yang cukup rendah dan di bawah angka RLS Jatim.

Untuk menaikkan angka RLS, diimplementasikan inovasi berupa program Gempita Desa (Gerakan Membangun Pendidikan Kesetaraan di Desa) dengan intervensi melalui APBDesa. Sedangkan upaya meningkatkan angka HLS melalui kemudahan akses pendidikan yaitu pemberian bantuan seragam gratis bagi siswa baru, bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu serta bantuan lain terutama bagi masyarakat miskin untuk meringankan biaya sekolah bagi anak usia sekolah.

Laju peningkatan indeks kesehatan cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan UHH. Kesadaran masyarakat Lumajang untuk berpola hidup sehat semakin membaik, sehingga mendukung meningkatnya usia harapan hidup. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan kesehatan di Lumajang semakin membaik meski masih dibawah capaian dari Provinsi Jawa Timur.

Upaya meningkatkan UHH dilakukan dengan intervensi untuk menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Program persalinan gratis merupakan salah satu program strategis untuk menekan AKI dan AKB.

Upaya meningkatkan IndeksPengeluaran/Daya Beli dilakukan dengan memberdayakan ibu rumah tangga yang dibekali dengan berbagai macam ketrampilan yang menghasilkan tambahan penghasilan bagi keluarga. Rencana pembangunan Perguruan Tinggi Negeri akan berdampak secara signifikan terhadap IndeksPengeluaran/DayaBeli, selain itu juga akan

meningkatkan Indeks Pendidikan di Kabupaten Lumajang. Daya beli suatu daerah juga akan terangkat manakala ada hal yang sifatnya fenomenal yang menunjang terpacunya ekonomi daerah seperti pembangunan jalan tol, industri yang mengolah hasil pertanian sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

Skor PPH cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir. Meskipun pola konsumsi pangan masyarakat Lumajang untuk pemenuhan kalorinya masih didominasi padi-padian. Padahal hampir setiap tahun luas lahan baku sawah selalu mengalami penurunan. Oleh karena itu, antisipasi terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat Lumajang harus semakin dieksplorasi dan dikembangkan.

Luasan kumuh yang tertangani cenderung meningkat. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Lumajang adalah melalui sosialisasi, perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung lingkungan sehat, yaitu RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), Jalan dan Drainase Lingkungan Permukiman, Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Air Minum Berbasis Masyarakat

Trend angka kecelakaan lalu lintas cenderung fluktuatif, meskipun turun signifikan di tahun 2021. Kejadian kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lumajang dikarenakan:

- a. Geografis Kabupaten Lumajang kebanyakan daerah pegunungan yang mana kondisi jalan mengikuti kontour;
- b. Sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Lumajang kurang memahami ketertiban dalam berlalu lintas di jalan ;
- c. Kelalaian manusia dalam mengendarai kendaraan bermotor
- d. Kendaraan dengan kelebihan dimensi dan kelebihan muatan (over dimention over loading/ODOL)

Sebelum terjadinya peandemi Covid 19, trend persentase atlet dan pemuda yang berprestasi cenderung meningkat, namun menurun drastis di tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan beberapa pembatasan dalam kegiatan olahraga dan kepemudaan terkait penerapan protocol kesehatan Covid 19 sudah dilonggarkan.

Peningkatan angka IPG Kabupaten Lumajang di tahun 2021, mengindikasikan bahwa upaya untuk mewujudkan pembangunan yang responsif gender pada beberapa sktor prioritas di Kabupaten Lumajang menunjukkan hasil yang lebih baik.

Angka laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 cenderung meningkat setelah menurun dalam 3 tahun sebelumnya, yang mengindikasikan upaya pengendalian laju pertumbuhan

penduduk dilaksanakan dengan cukup baik dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dalam 3 tahun sebelumnya mengalami penurunan.

3. Angka Kemiskinan

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P1 dan keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (P2).

Indeks Kedalaman Kemiskinan/Poverty Gap Index merupakan ukuran rata-rata 2 kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Nilai P pada tahun 2019 sebesar 1,09 kemudian mengalami kenaikan menjadi 1,14 pada tahun 2020 dan naik kembali menjadi 1,57 di tahun 2021.

Indeks Keparahan Kemiskinan/Poverty Severity Index merupakan tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin di suatu wilayah. Nilai P2 pada tahun 2019 sebesar 0,2 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,21 pada tahun 2020. Kemudian naik cukup tinggi di tahun 2021 menjadi 0,34.

Trend Angka kemiskinan cenderung menurun dan di bawah angka Jawa Timur, namun terdapat kenaikan persentase penduduk miskin di tahun 2020 dan 2021. Kenaikan tersebut disebabkan karena dampak Covid 19. Pandemi Covid-19 ini menyebabkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat, sekolah yang sekarang belum dibuka. Akibatnya, pembatasan kegiatan masyarakat ini menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi, khususnya ekonomi masyarakatbawah. Hal ini berakibat pada banyak pengangguran, pekerja yang dirumahkan, usaha yang ditutup, dan berimplikasi pada meningkatnya persentase kemiskinan.

Meningkatnya angka kemiskinan merupakan tantangan perekonomian daerah yang berdampak terhadap melemahnya pertumbuhan ekonomi daerah, naiknya harga berbagai komoditas akibat meningkatnya biaya produksi. Kondisi ini secara paralel juga akan menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat, sehingga harus segera ada langkah strategis dan konkrit dari Pemerintah Daerah untuk merancang program prioritas sebagai solusi dari permasalahan ini. Penambahan jumlah penduduk miskin akibat pandemic harus dimasukkan dalam data terkini.

Kemiskinan ekstrem mengacu pada definisi Bank Dunia dan PBB, yaitu kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan yakni memiliki pengeluaran perkapita per hari di bawah US \$ 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). PPP ini dihitung oleh Bank Dunia dengan membandingkan harga komoditas antar negara. Kemiskinan ekstrem Kabupaten Lumajang tahun 2020 mencapai angka 2,44% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 25.520 jiwa. Untuk penanganan kemiskinan ekstrim akan lebih efektif basis atau level desa menggunakan data mikro, karena data mikro bukan hanya bisa dibaca dan didengar tapi juga bisa dirangkul kebutuhan tiap-tiap warga, seperti kondisi rumah layak huni atau tidak, asupan gizi atau kalori juga muncul dalam data berbasis mikro, selain itu program elektrifikasi, program Renovasi Rumah Tinggal Layak Huni, program Bansos Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta program pemberdayaan usaha perempuan (JATIM PUSPA) yang diinisiasi provinsi dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem.

Sejak Tahun 2017, trend TPT cenderung fluktuatif bahkan terjadi peningkatan yang lebih besar di tahun sebelumnya pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021. Situasi tersebut disebabkan banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang melemah akibat pandemi Covid 19.

Capaian desa cepat berkembang meningkat tajam pada tahun 2020 kemudian menurun di Tahun 2021, meskipun perkembangan desa di wilayah Kabupaten Lumajang masih belum merata. Status desa cepat berkembang di wilayah Kabupaten Lumajang turun dari angka 35,35% di tahun 2020 menjadi 25,37 di Tahun 2021. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mempercepat perkembangan desa adalah menggelorakan Bursa Inovasi Desa. Selain itu, dengan adanya inovasi desa diharapkan pelayanan kepada masyarakat desa juga semakin baik disamping keberlanjutan program yang harus terus dijaga.

Capaian PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat tajam pada tahun 2020

4. Indeks Reformasi Birokrasi

Tata Kelola Birokrasi yang baik dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian dari manajemen pembangunan yang meliputi kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi relevan untuk

menciptakan pelayanan publik yang prima dalam perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Dengan dikembangkan teknologi informasi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat ruang komunikasi dengan masyarakat semakin terbuka dan mudah diakses sehingga dapat meningkatkan nilai aparatur sipil Negara, selain itu masyarakat dengan mudah dan cepat dapat memberikan masukan dan pengaduan.

Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung oleh ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan yang efektif. Untuk itu pemetaan ASN, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN, serta penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya menjadi hal sangat penting yang harus dilakukan.

Salah satu pilar reformasi birokrasi adalah ASN (Aparatur Sipil Negara), maka untuk mengukur sampai sejauhmana reformasi birokrasi di Kabupaten Lumajang telah berjalan, salah satunya adalah mengukur indeks profesionalitas ASN. Capaian indeks profesionalitas ASN meningkat pada tahun 2021

Capaian indeks kepuasan masyarakat tersebut didukung komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mematuhi ketentuan tentang pelaksanaan Standar Pelayanan. Dari hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia, tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Lumajang mendapat nilai 90,02 dan tahun 2021 mendapat nilai 92 yang merupakan kepatuhan tinggi (zona hijau).

Capaian penerapan SPBE oleh PD menurun pada tahun 2021 setelah sebelumnya meningkat di tahun 2020. Hal tersebut menggambarkan adanya akslerasi penerapan SPBE di Kabupaten Lumajang mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik masih belum konsisten.

Capaian opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Lumajang telah memenuhi target RPJMD, yaitu WTP. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur, maka di tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali memperoleh opini WTP ke empat kalinya secara berturut-turut dari BPK. Capaian tersebut didukung oleh capaian Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3, nilai kapabilitas APIP dan persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada tahun terdapat peningkatan drastis terhadap capaian jumlah OPD yang layak ditetapkan sebagai zona integrates menuju WBK. Capaian persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD tahun 2021 hanya tercapai sebesar 85%. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan capaian penegakan Perda/Perkada, semua kasus pelanggaran Perda/Perkada dapat tertangani. Kabupaten Lumajang tahun 2021 memperoleh predikat "B" atas hasil evaluasi AKIP-nya. Pencapaian atas hasil evaluasi AKIP tersebut masih tertinggal dari Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur.

Tabel 2. 206 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Masalah Utama Dalam RPJMD	Penyebab Masalah (Capaian Indikator Tujuan)	Penyebab Masalah (Capaian Indikator Sasaran)
1	Rendahnya Persentase pertumbuhan sektor unggulan	Rendahnya Pertumbuhan ekonomi	Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
			Penurunan PAD sektor pariwisata
			Rendahnya Rasio penerimaan pajak & retribusi terhadap PAD
2	Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana		Penurunan Kualitas air
			Tingginya beban pencermaran air
3	Belum meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas SDM	Rendahnya laju pertumbuhan IPM	Rendahnya Harapan Lama Sekolah
			Rendahnya Rata-rata lama sekolah
			Kurangnya variabilitas pola konsumsi pangan
			Tingginya kejadian kecelakaan lalu lintas
			menurunnya prestasi olahraga dan

No	Masalah Utama Dalam RPJMD	Penyebab Masalah (Capaian Indikator Tujuan)	Penyebab Masalah (Capaian Indikator Sasaran)
			kepemudaan
			Beberapa sektor pembangunan kurang responsif gender
4	Masih tingginya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin meningkat saat sebagai dampak Covid 19	Banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja
			Kurangunya kuantitas Desa dengan status desa cepat berkembang
			Rendahnya pertumbuhan koperasi aktif (kemiskinan)
5	Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas aparatur daerah		Menurunnya konsistensi program RPJMD ke RKPD
			Capaian nilai SAKIP belum optimal

B. Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Analisis Capaian Program Strategis Kepala Daerah Terpilih

Tabel 2. 207 Permasalahan Pembangunan Daerah berdasarkan Analisis Capaian Program Strategis Kepala Daerah Terpilih

Program Strategis Kepala Daerah	Indikator program	Target sasaran	Interpretasi	Permasalahan
Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di lumajang dengan standart kelas 3 dan tanpa ada biaya tambahan obat		Ibu melahirkan dengan standart kelas 3	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui program melahirkan gratis - Promosi yang telah dilakukan belum tersampaikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat
Fasilitasi pemenuhan listrik di wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik dan pemenuhan air bersih di wilayah utara dan daerah rawan kekuarangan air lainnya	Pemenuhan listrik	Dusun belum berlistrik	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> - Secara target sasaran telah tercapai namun masih terdapat beberapa rumah tangga yang belum terjangkau listrik karena kondisi

Program Strategis Kepala Daerah	Indikator program	Target sasaran	Interpretasi	Permasalahan
				goeografis dan kontur alam yang belum mendukung
	Pemenuhan air bersih	Dusun wilayah utara dan rawan air bersih	Tercapai	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran operasional pada KP SPAM
Memberikan bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/mts, SMA/SMK/MA serta SPP gratis untuk SMA/SMK/MA	Bantuan seragam gratis	Siswa baru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Tercapai	-
	Bantuan SPP gratis	Siswa SMA/SMK/MA	Tercapai	-
Memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan target 1000 penerima beasiswa	Bantuan beasiswa	Mahasiswa baru kurang mampu (1000 orang)	Sedang Berjalan	- Tidak terpenuhinya target karena terdapat kriteria khusus penerima antara lain diterima di PTN dengan IPK 3,

Program Strategis Kepala Daerah	Indikator program	Target sasaran	Interpretasi	Permasalahan
				hafal Al-Quran 10 juz
Memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar	Tambahan tunjangan/honor	Guru non NIP, Madin, TPQ, mengaji masjid/langgar	Tercapai	'-memungkinkan ada pegantian guru mengaji baru karena meninggal dunia atau sudah tidak mengajar lagi
Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp. 1.000.000,- yang dicairkan tepat waktu dan memberikan bantuan sarana dan prasarana rukun kematian	Tunjangan uang duka kematian	Penduduk meninggal	Tercapai	-
	Bantuan Rukem	Rukun kematian	Tercapai	-
Pengadaan WiFi di seluruh sarana publik dan di setiap desa/kelurahan dan juga pemasangan CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik dengan target pemasangan 1000 CCTV	Pengadaan WIFI	Sarana publik	Tercapai	
		Desa/kelurahan	Sedang Berjalan	-koneksi internet masih terbatas

Program Strategis Kepala Daerah	Indikator program	Target sasaran	Interpretasi	Permasalahan
				<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan camera masih analog, - Terdapat desa yang telah memasang CCTV belum melaporkan ke DISHUB terkait
	Pengadaan CCTV	Sarana publik dan daerah rawan (1000 CCTV)	Sedang Berjalan	
Pembangunan Stadion Semeru standart nasional, serta pembangunan standart regional di Kecamatan Klakah, Pasirian, dan Yosowilangun	Pembangunan stadion standart nasional	Stadion Semeru	Tercapai	Pelaksanaan pembangunan stadion standart regional masih terkendala penganggaran dan masih dalam proses perubahan anggaran di Tahun 2022
	Pembangunan stadion standart regional	Stadion Kecamatan Klakah, Pasiran, Yosowilangun	Sedang Berjalan	Direncanakan bertahap pada tahun 2022 dan 2023, terkendala status kepemilikan aset

Program Strategis Kepala Daerah	Indikator program	Target sasaran	Interpretasi	Permasalahan
				tanah
Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat	Pemberdayaan Karang Taruna	Karang Taruna	Tercapai	
	Pemberdayaan kelompok organisasi pemuda	Kelompok organisasi pemuda	Tercapai	
	Pemberdayaan lansia	Lansia	Tercapai	
	Pemberdayaan kaum disabilitas	Kaum disabilitas	Tercapai	
Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda	Pengalihfungsian sebagai gedung kesenian	Gedung Soedjono	Sedang Berjalan	Masih dalam tahap desain oleh konsultan perencana

Program Strategis Kepala Daerah	Indikator program	Target sasaran	Interpretasi	Permasalahan
Melakukan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi	Inisiasi dan koordinasi aktif tentang pembangunan jalan tol	Pemerintah Pusat	Tercapai	Pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang belum menjadi prioritas di tahun 2022
Pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, dan membangun jalan penghubung Pasirian-Tempursari	Infrastruktur jalan kabupaten standar hotmix	Jalan Kabupaten	Sedang Berjalan	Realisasi jalan standar hotmix masih 60%
	Pembangunan jalan penghubung Pasirian-Tempursari	jalan penghubung Pasirian-Tempursari	Sedang Berjalan	Masih dalam tahap perijinan oleh Perhutani
Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan	Pembangunan Ruang terbuka hijau	Seluruh kecamatan	Sedang Berjalan	- Ketersediaan Anggaran yang kurang mencukupi untuk rencana pembvangunan RTH - Terkendala kepemilikan aset (kecamatan tidak memiliki aset untuk

Program Strategis Kepala Daerah	Indikator program	Target sasaran	Interpretasi	Permasalahan
				RTH)
	Pembangunan taman layak anak	Seluruh kecamatan	Sedang Berjalan	
Fasilitasi pendirian BUM- Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi	Fasilitasi BUM Tren		Sedang Berjalan	
Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli sekaligus mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga	Rehabilitasi pasar tradisional	Pasar tradisional	Sedang Berjalan	
	Stimulasi pinjaman tanpa bunga	Koperasi pasar tradisional	Sedang Berjalan	
Optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian	Optimalisasi potensi pariwisata	Stake holder sektor pariwisata	Tercapai	

Program Strategis Kepala Daerah	Indikator program	Target sasaran	Interpretasi	Permasalahan
	Optimalisasi potensi pertanian	Stake holder sektor pertanian	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya off taker yang menampung produk organik (alses pasar) - sarana prasana pengolahan produk organik belum sepenuhnya tersedia (RMU, Packaging, dll) - Perijinan untuk persyaratan peredaran belum lengkap (ijin edar, sertifikat halal, PSAT dll) - akses permodalan terbatas
Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan	Pelayanan adminduk sistem online	Seluruh Kecamatan	Tercapai	- Terdapat peralatan pelayanan adminduk yang rusak
Pembangunan mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan	Terbangun pusat pelayanan perizinan satu		Sedang Berjalan	Adanya perubahan lokasi MPP yang semula di Disarpus (Perpusda) ke

Program Strategis Kepala Daerah	Indikator program	Target sasaran	Interpretasi	Permasalahan
	atap			Disnaker, sehingga sesuai dengan arahan Kemenpan RB diharuskan membuat kajian baru.
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Pemberian TPP	PNS	Tercapai	
	Standarisasi honor sesuai UMK	Tenaga kerja kontrak	Tercapai	Perangkat daerah belum melaporkan tenaga kontrak yang meninggal ataupun mutasi ke BKD
Pemberian tunjangan kepala desa, perangkat desa di luar penghasilan tetap, dan memberikan tunjangan bagi RT/RW	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Seluruh Kepala Desa dan Perangkat	Sedang Berjalan	
	Tunjangan RT/RW	Seluruh RT/RW	Tercapai	

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 2. 208 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan Capaian Indikator Sasaran PD

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
A	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2021, APM ditargetkan sebesar 100 % terealisasi sebesar 99,70%, Angka Rata-rata Lama Sekolah ditargetkan sebesar 6,8 hanya tercapai sebesar 6,67 Pencapaian target sasaran sangat dipengaruhi oleh fluktuasi jumlah penduduk dan perkembangan model penghitungan internasional seperti yang digunakan terbaru pada Sustainable Development Goals (SDGs) 2. Pandemi Covid 19 serta adanya bencana alam yang menghambat proses kegiatan, pelaporan, dan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan;
2	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio dan kompetensi tenaga kesehatan belum sesuai standar. 2. Terbatasnya akses dan mutu pelayanan kegawat daruratan 3. Terbatasnya akses dan mutu pelayanan kegawat daruratan. 4. Lambatnya waktu penanganan (respon time) korban/pasien gawat darurat 5. Masih terdapat sarana dan prasarana pendukung yang belum sesuai standart. 6. Adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. 7. Terbatasnya akses kesehatan pada kelompok rentan (orang lanjut usia, anak- anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat 8. Masih rendahnya kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. 9. Kurangnya dukungan dan koordinasi lintas sektor dan kurangnya sinergitas antar organisasi pemberdayaan masyarakat.

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadinya kerusakan jalan dan jembatan diakibatkan oleh penggunaan atau pemakaian jalan dan jembatan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. 2. Bahu dan drainase jalan yang tidak terawat dengan baik sehingga jalan tergenang oleh air yang menyebabkan pengurangan umur rencana. 3. Penumpukan sedimen dalam bangunan dan saluran irigasi yang menyebabkan pengurangan kapasitas dalam bangunan dan saluran irigasi sehingga dapat menyebabkan bangunan dan saluran irigasi menjadi rawan banjir dan rawan kekeringan. 4. Banyaknya kehilangan pintu-pintu air pada jaringan irigasi sehingga menyulitkan pengaturan dan pengoperasian ke petak-petak sawah serta adanya endapan sedimen di saluran sehingga mudah terjadi banjir. 5. Adanya bencana alam erupsi Gunung Semeru di Tahun 2021 yang membuat beberapa ruas jalan dan jembatan mengalami kerusakan 6. Pengalihan anggaran untuk penanganan pandemic covid 19 sehingga berdampak pada capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang dalam pelayan infrastruktur kepada masyarakat;
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan indikator capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga ada beberapa indikator yang diperbarui 2. Perubahan SOTK pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga Program dan Kegiatan berpengaruh ke realisasi target kinerja 3. Adanya ketidakjelasan kepemilikan aset sebelum pekerjaan dimulai karena diketahui aset pekerjaan ternyata milik warga; 4. Warga Perumahan yang difasilitasi pemeliharaan PSU menghendaki perubahan ruas yang dipelihara dari perencanaan awal; 5. Adanya Bencana Erupsi Gunung Semeru yang menyebabkan akses jalan menuju ke Kecamatan Pronojiwo terbatas; 6. Kurangnya kompetensi teknis Pelaksanaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat (pemberdayaan) dengan swakelola; 7. Sulitnya akses masuk lokasi relokasi sehingga menyebabkan proses pengangkutan material dan progres pembangunan membutuhkan waktu yang lebih lama; 8. Debit air pada musim kemarau berkurang, dan sebaliknya pada saat musim penghujan bertambah, sehingga mempengaruhi kinerja

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
		<p>target pelayanan air minum;</p> <p>9. Minimnya regulasi terkait air minum di Kabupaten Lumajang;</p> <p>10. Permasalahan kesediaan lahan untuk pembangunan IPAL komunal;</p> <p>11. Terjadi genangan dan banjir di lingkungan masyarakat</p>
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang memadainya sumber daya manusia dan terbatasnya jumlah personil dalam menangani jangkauan wilayah pelaksanaan tugas yang luas 2. Belum tertibnya administrasi dan manajemen logistik, sehingga stok opname kurang up to date.; 3. Susunan program kegiatan yang tidak terstruktur dan kurang berkesinambungan berpengaruh dalam memetakan kondisi masyarakat dengan kondisi trantibmas yang ada di wilayah; 4. Adanya selfblocking untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan sosialisasi. 5. Sarana prasarana yang tersedia belum memadai dengan beban pekerjaan yang ada termasuk terbatasnya alat pelindung diri bagi petugas pemadam kebakaran; 6. Belum Optimalnya program bersama antar lembaga dalam menjalankan peran bagi pengguna data dan informasi kebencanaan; 7. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan fasilitas kritis pada darurat Bencana; 8. Kurangnya membangun kemandirian informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat; 9. Pelanggaran Masyarakat Terhadap Perda dan/atau Perkada masih cukup tinggi
6	Sosial	<p>Masalah fasilitas dalam penanganan masalah sosial menjadi kendala utama serta dalam penanganan sosial membutuhkan SDM yang memadai, dibutuhkan penambahan peningkatan dan optimalisasi fasilitas penanganan sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kewenangan kabupaten Lumajang; 2. Masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 3. Data DTKS yang masih kurang valid; 4. Kurang pahamnya Kelompok Penerima Manfaat (KPM)/penerima bantuan sosial terhadap program dan layanan yang diterima sehingga banyak pengaduan yang masuk ke Dinas Sosial maupun ke Pemerintah Daerah;

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
		5. Belum melakukan pengelolaan TMP sesuai standart KEMENSOS NO 23 TAHUN 2014 Tentang pengelolaan Taman Makam Pahlawan
B	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	
1	Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah angkatan kerja yang memiliki keahlian dan atau ketrampilan masih relatif kecil mengakibatkan rendahnya daya saing dalam pemenuhan kesempatan kerja dan berusaha; 2. Terbatasnya perkembangan usaha swasta di sektor industri menengah ke atas yang diharapkan dapat menampung angkatan kerja lulusan sekolah kejuruan yang tersedia cukup banyak di Kabupaten Lumajang mengakibatkan sedikitnya peluang/ kesempatan kerja yang tersedia bagi penganggur. 3. Penempatan transmigran yang masih ketergantungan dengan kuota yang ditentukan oleh Pemerintah Propinsi/Pusat serta Daerah penempatan, mengakibatkan penempatan calon transmigran jumlahnya relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah pendaftar calon transmigran. 4. Dampak dari Pandemi Covid-19, dimana terdapat protokol kesehatan yang harus di laksanakan terutama dalam hal kegiatan Job Mini Fair (JMF) yang tidak dapat terlaksana baik dalam skala kecil maupun besar; 5. Keterbatasan jumlah personil, sarana dan prasarana sudah pasti mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak maksimal; 6. Pembatasan jumlah penempatan calon transmigran oleh Pemerintah Pusat/Propinsi sehingga menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pendaftar calon transmigran yang belum diberangkatkan dari tahun-tahun sebelumnya; 7. Masih kurangnya kesadaran perusahaan dalam mentaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
2	Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman lintas sektor tentang Pengarusutamaan Gender masih kurang dan belum optimalnya implementasi perencanaan pembangunan yang responsif gender; 2. Peran tim penggerak pengarusutamaan gender Kabupaten kurang optimal 3. Kurang optimalnya partisipasi perempuan dalam pembangunan 4. Animo masyarakat terhadap keberadaan PPT-PPA sudah baik, namun penyelesaian kasus

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
		<p>belum terintegrasi dengan optimal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Banyak kasus terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak dilaporkan sehingga angka riil dilapangan sulit diketahui 6. Kurangnya upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3	Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pola konsumsi masyarakat yang beragam 2. Rendahnya Pola Konsumsi pangan masyarakat yang berimbang 3. Rendahnya konsumsi pangan masyarakat yang aman pangan 4. Kelancaran Distribusi pangan yang masih rendah 5. Rendahnya stabilitas Ketersediaan pangan. 6. Pelaku usaha binaan ketahanan pangan belum siap dan belum paham dalam pengurusan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan; 7. Masih adanya ego sektoral antar instansi terkait sehingga menjadi penghalang dalam melakukan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan.
4	Pertanahan	
5	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta permukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, udara dan tanah serta tingginya timbulan sampah. 2. Perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan/lahan 3. Pelayanan sampah belum mencakup semua kecamatan, serta masih lemahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah. 4. Ketersediaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan, persyaratan dan mekanisme teknis yang belum optimal, serta anggaran, sumber daya manusia, dan kebijakan daerah; 5. Kondisi potensi timbulan sampah cukup tinggi tetapi tidak sebanding dengan tersedianya sarana prasarana, sumber daya manusia dan biaya operasional serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber timbulan sampah. 6. Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 sehingga menyebabkan pencapaian kinerja Program tidak maksimal.
6	Administrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelambatan proses penerbitan Dokumen

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
	Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	<p>Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ruang pelayanan baik di tingkat kecamatan maupun di Kabupaten kurang memadai 3. Kurangnya pelatihan bagi petugas pelayanan. 4. Validasi dan Verifikasi data pemohon kurang dicermati oleh petugas. 5. Penggantian perangkat komputer kependudukan yang memadai dalam mendukung SIAK online 6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil; 7. Masih kurangnya Sarana Prasarana dalam mendukung tercapainya target Dokumen Administrasi Kependudukan misalkan terkendala printer KTP-el yang rusak;
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya penguatan kapasitas kelembagaan terhadap peran dan fungsi kelembagaan 2. Belum adanya Benchmarking terhadap desa yang mempunyai kelembagaan masyarakat yang aktif 3. Belum adanya pembinaan secara teknis yang intens dan terpadu 4. Belum dilakukan monitoring keberfungsian kelembagaan masyarakat 5. Belum dilakukan evaluasi terhadap hasil monitoring dan difollow up ke desa 6. Belum adanya ajang pencarian Desa Terbaik dalam sisi Administrasi, gotong royong serta produk unggulan desa yang berkualitas 7. Belum adanya Benchmarking terhadap desa yang mempunyai kelembagaan masyarakat yang aktif 8. SDM masyarakat kurang bernovasi tentang TTG (Teknologi Tepat Guna) 9. Kurang adanya terfasilitasi dari Desa (Wilayah setempat) 10. Kurang adanya fasilitasi/perhatian dari Pemerintah Desa untuk pengembangan Pasar Desa 11. SDM pengurus/pergantian kurang paham tentang BUMDesa 12. Masih kurang fasilitasi dari Desa terkait BUMDesa 13. Tenaga ahli BUMDesa kurang mengatasi dengan jumlah 198 Desa/BUMDesa yang ada di Kabupaten Lumajang 14. Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan;

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
		<p>15. Kurangnya pemahaman PP 11 tahun 2021 tentang BUMDesa dan permendesa tahun 2021 tentang tatacara pembentukan pengelolaan DBM ex PNPM-MPd ke BUMDesma;</p> <p>16. Kurangnya pemahaman masyarakat atas pengelolaan potensi ekonomi desa dan BUMDesa;</p> <p>17. Tidak dilaksanakannya kegiatan penguatan LKD,LAD, BBGRM dan penguatan posyandu yang rencananya menggunakan metode Comunitate Base dengan mengumpulkan massa karena adanya PPKM;</p> <p>18. Belum optimalnya sumber daya manusia KPSPAM dalam mengelola sumber daya alam yang menggunakan alat TTG</p>
8	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	<p>1. Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) masih kurang</p> <p>2. Kurang optimalnya media Komunikasi, Informasi dan Edukasi</p> <p>3. Budaya masyarakat terkait usia pernikahan</p> <p>4. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah</p> <p>5. Cakupan PUS dalam ber KB masih belum terpenuhi karena kurangnya kesadaran masyarakat.</p>
9	Perhubungan	<p>1. Prasarana jalan yang kurang memadai;</p> <p>2. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan.</p> <p>3. Kondisi geografis yang bergunung-gunung sehingga sistem transportasi tidak efektif dan efisien;</p> <p>4. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas;</p> <p>5. Belum adanya aturan / acuan tentang kecelakaan Lalu Lintas baik penanganan kejadian, Sytem pelaporan, analisis kecelakaan serta penanggulangannya baik menyangkut sarana, prasarana maupun manusia;</p> <p>6. Kemacetan lalu lintas di beberapa titik (Pasar Ranuyoso dan pasar lokal lainnya).</p> <p>7. Masih banyak kendaraan yang kelebihan dimensi dan kelebihan muatan (over dimention over loading)</p> <p>8. Belum Terpenuhinya target pemenuhan angkutan umum yang memadai;</p> <p>9. Belum terpenuhinya target pemasangan Perlengkapan Jalan;</p> <p>10. Belum tersedianya prasarana pelaksanaan pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan.</p>

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
10	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK) dan blank spot pancaran sinyal radio. 2. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK / gagap teknologi (gaptek). 3. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting komunikasi dan informatika. 4. Kurang optimalnya ketersediaan data yang mutakhir. 5. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal pemanfaatannya. 6. Keterbatasan Sumber Daya manusia yang ada dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika; 7. Refocusing anggaran terhadap penanganan pandemi covid-19 berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan termasuk kegiatan pemeliharaan yang tidak dapat dilaksanakan
11	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seringnya pergantian pengelola koperasi, serta banyak pengelola koperasi yang kurang memahami akuntansi koperasi sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM dengan diklat akuntansi maupun koperasi 2. Data base Usaha Mikro belum update dan kurang valid serta pengelola Usaha Mikro banyak yang belum paham IT sehingga perlu pemutakhiran/ pengadaan perangkat IT dan meningkatkan SDM bidang IT 3. Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan; 4. Terbatasnya Jumlah sumber Daya Masusia yang melaksanakan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 5. Masih kurang memadainya kualitas sumber daya manusia pada koperasi di Lumajang.
12	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seluruhnya izin di daerah terintegrasi dalam sistem OSS 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang belum terintegrasi dalam sistem OSS; 3. Belum seluruhnya masyarakat memahami tata cara pengisian dan penentuan jenis izin berusaha berdasar KBLI-nya secara mandiri, karena salah dalam penentuan KBLI-nya maka salah juga dalam penentuan jenis produk izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Masyarakat masih belum memahami tentang cara pemenuhan komitmen untuk pengefektifan perizinannya 5. Pemenuhan komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum menggunakan aplikasi yang terintegrasi dengan sistem OSS. 6. Adanya perubahan regulasi yang mengacu pada UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dan aturan turunannya yang mana usaha mikro (0 s.d 1 M) tidak wajib menyampaikan LKPM; 7. Adanya perubahan sistem OSS yang sebelumnya OSS versi 1.1 menjadi OSS berbasis Risiko sehingga membutuhkan migrasi data dan membutuhkan waktu untuk penyesuaiannya. Disamping itu sistem masih dalam proses penyempurnaan dari pusat sehingga sistem masih sering bermasalah yang mengakibatkan terhambatnya proses penyampaian LKPM karena untuk menyampaikan LKPM disarankan untuk migrasi data terlebih dahulu; 8. Masih dalam pandemi covid 19 yang mempengaruhi profit sehingga pelaku usaha kesulitan dalam mengembangkan usahanya; 9. Penyusunan Peraturan Bupati Insentif yang nantinya menjadi aturan pemberian insentif dan kemudahan berusaha belum bisa dilakukan karena masih menunggu proses peraturan daerah Urusan Penanaman Modal diundangkan sehingga target 40% prosentase perusahaan yang mendapat insentif belum dapat dicapai; 10. Target Investasi 500 Juta tidak tercapai dikarenakan target investasi daerah yang dimaksud belum memiliki fisibility study/ studi kelayakan, sehingga investor kurang tertarik untuk mengembangkan potensi tersebut; 11. Belum optimalnya dukungan dari Perangkat Daerah teknis, hal ini dikatehui dari proses pemberian rekomendasi teknis yang membutuhkan waktu relatif lama bahkan belum terstandar waktu layanannya; 12. Banyaknya para pelaku usaha yang mengabaikan penyampaian pelaporan LKPM karena berbagai alasan disamping itu kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk patuh menyampaikan LKPM; 13. Adanya perubahan regulasi yang mengacu pada UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020, yang sebelumnya skala usaha Mikro 0 s.d 50jt menjadi 0 s.d 1 Milyar. Pada regulasi yang baru Penyampaian LKPM untuk skala usaha Mikro tidak diwajibkan untuk melaporkan LKPM

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
		<p>sedangkan pelaku usaha yang dipantau lebih dominan yang usaha mikro sehingga pencapaian target hanya 44 pelaku usaha yang telah menyampaikan LKPM sedangkan sisanya belum melaporkan meskipun sudah sebagian telah dilakukan pengawasan;</p> <p>14. Banyaknya para pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya salah satu nya menyampaikan LKPM walaupun telah dilakukan pemantauan dan pembinaan tetapi masih kurangnya kesadaran, sehingga perlu adanya regulasi dari daerah untuk menekan para pelaku usaha agar sadar dan patuh menyampaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha;</p> <p>15. Terbatasnya jumlah Sarana penunjang pengelolaan data dan sistem informasi (Server dan Storage Aplikasi /Network Allocation Storage)</p>
13	Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penundaan dan pembatalan kegiatan / even keolahragaan dan kepemudaan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. 2. Pelatihan kewirausahaan belum mencakup seluruh Kecamatan di Kabupaten Lumajang; 3. Keterbatasan anggaran sehingga progam/kegiatan belum bisa menyentuh semua pemuda di Kab. Lumajang khususnya di Desa serta pembinaan atlit dan pengoptimalan sarana dan prasarana; 4. Kurangnya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan event olahraga; 5. Sarana dan prasarana yang dimiliki Cabang olahraga belum tercukupi; 6. Reward / Penghargaan terhadap atlit berprestasi masih belum maksimal 7. Kurangnya minat pemuda dalam kewirausahaan 8. Minimnya jiwa kepeloporan, kreatifitas dan ketrampilan pemuda 9. Sebagian pemuda bekerja sebagai buruh dan TKI 10. Pelaksanaan kegiatan belum mencakup semua keterwakilan pemuda dan Organisasi Kepemudaan; 11. Belum tersedianya data kepemudaan yang komprehensif; 12. Selama PPKM Masyarakat/pelaku olahraga tidak bisa menggunakan sarana dan prasarana olahraga karena ada penutupan sementara;
14	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan satu data, dan masalah informasi yang belum terintegrasi dalam TIK 2. Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
		yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan
15	Persandian	Belum optimalnya sistem persandian yang modern. Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat terlaksana sehingga berpengaruh terhadap tercapainya kinerja.
16	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian dan pembinaan serta pengembangan dan pemanfaatan seni budaya masih belum optimal 2. Adanya keterbatasan anggaran pada kegiatan yang dimiliki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 3. Adanya kekosongan jabatan pada eselon IV, dan rangkap jabatan struktural sehingga pelaksanaan tupoksi kurang optimal 4. Sarana prasarana kantor yang kurang mencukupi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
17	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tersedianya ruangan yang representatif; 2. Kurangnya jumlah perpustakaan yang sesuai ketentuan 3. Belum optimalnya pengadaan bahan pustaka 4. Pengaplikasian bahan bacaan oleh masyarakat masih rendah 5. Dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengakibatkan terdapat kegiatan yang bersifat tatap muka tidak dapat terlaksana; 6. Untuk layanan eksensi belum bisa mencapai target mengingat kondisi di tahun 2021 hampir seluruh lembaga pendidikan melakukan kegiatan via daring (Dalam Jaringan).
18	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dibukanya formasi tenaga fungsional arsiparis Sumber daya manusia. 2. Rendahnya pemahaman aparatur dalam mengelola arsip 3. Sarana dan prasarana penyimpanan arsip kurang memadai 4. Ketersediaan pengelola arsip belum memadai 5. Refocusing anggaran dalam penanganan Covid 19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
C	Urusan Pilihan	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
1	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya produksi perikanan. 2. Masih kurangnya ketersediaan dan kualitas benih ikan 3. Masih rendahnya mutu, keamanan dan daya saing produk olahan perikanan 4. Masih kurangnya sinkronisasi antara produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 5. Masih rendahnya kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan pelaku usaha perikanan. 6. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha perikanan untuk pengurusan legalitas dan ijin usaha. 7. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan 8. Perubahan peraturan perundang – undangan dan pedoman kebijakan di bidang perikanan 9. Masih kurangnya koordinasi antara Dinas perikanan dengan instansi lain yang terkait 10. Kurangnya ketersediaan data dan informasi data serta kurangnya akurasi data di bidang kelautan dan perikanan. 11. Terdapat kendala dalam aplikasi OMSPAN sehingga tidak dapat memasukkan nilai kontrak DAK Tahun 2021; 12. Adanya Refocusing anggaran dalam penanganan Covid 19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
2	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penerimaan PAD Sektor Pariwisata; 2. Terdapat banyak obyek wisata baru yang belum memenuhi kriteria 4A; 3. Masih rendahnya sinergitas lintas sektoral perangkat daerah dalam pengembangan pariwisata 4. Adanya Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan; 5. Dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengakibatkan terdapat kegiatan dalam obyek wisata yang ada di kabupaten Lumajang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
3	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM Pertanian yang masih dirasa rendah 2. Perubahan iklim (hidrometeorologi) dan harga produk tanaman perkebunan yang fluktuatif. 3. Tingkat produktivitas ternak dan hasil olahannya fluktuatif 4. Keberadaan dan harga pupuk yang tidak stabil. 5. Penerapan kebijakan LP2B yang masih dirasa

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
		<p>lemah,</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Fragmentasi lahan pertanian sehingga luas kepemilikan lahan semakin sempit. 7. Fenomena aging farmer yang berbanding terbalik dengan regenerasi petani dilatari faktor sosio-kultural menjadi salah satu penyebab pertanian tidak lagi dianggap memiliki gengsi secara status sosial, pamor pertanian telah kalah jauh dengan naiknya subkultur baru yang berkembang di era digital saat ini, yg perlu dijawab dengan program regerasi petani (misal pelatihan petani milenial, pemasaran digital) 8. Dampak recofusing anggaran mengakibatkan pengurangan calon penerima bantuan pada kelompok tani; 9. Belum adanya komitmen dalam pengendalian alih fungsi lahan; 10. Masih terdapat rumah pemotongan hewan/tempat pemotongan hewan yang belum memiliki ijin operasional; 11. Merbaknya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang berdampak ekonomi dan social tinggi yang harus ditangani dengan dengan penanganan on farm (vaksinasi ternak) dan off farm (pengawasan distribusi ternak) 12. Adanya gangguan reproduksi hewan betina; 13. Masih tingginya tingkat pemotongan hewan betina produksi; 14. Semakin menurunnya jumlah tenaga penyuluh pertanian sehingga rasio petugas dan wilayah binaan tidak berimbang
4	Energi dan Sumber Daya Mineral	
5	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rehabilitasi dan pemeliharaan pasar rakyat masih mengalami beberapa kendala seperti kurangnya kerjasama pedagang yang menggunakan pasar dalam menjaga ketertiban dan kebersihan pasar 2. Kurang optimalnya pembayaran retribusi pasar 3. Kurang optimalnya fasilitasi dan penataan PKL 4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang tera/tera ulang 5. Adanya Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan; 6. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 7. Pemenuhan Data nilai ekspor dan nilai perdagangan daerah masih menunggu data dari perusahaan/industri;

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
		8. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan rehabilitasi/ pemeliharaan pasar rakyat padahal masih banyak pasar dengan kondisi memerlukan rehabilitasi dan pemeliharaan 9. Kebijakan tentang harga dikendalikan oleh pusat 10. Kebijakan tentang jumlah pupuk bersubsidi ditentukan oleh pusat 11. menurunnya daya beli dan pendapatan masyarakat akibat adanya pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya nilai perdagangan dalam daerah
6	Perindustrian	1. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku IKM khususnya dalam promosi dan pemasaran online 2. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk menstandarisasi produknya 3. Kurang berkembangnya teknologi permesinan untuk mendukung berkembangnya produk IKM 4. Adanya masa transisi dari online single submission (OSS) lama ke OSS berbasis risiko 5. Keterbatasan anggaran dalam bantuan peralatan, fasilitasi sertifikasi merk, halal, uji nutisi dan pelatihan – pelatihan 6. Belum adanya sanksi yang mengikat bagi perusahaan yang tidak melaporkan data industrinya
7	Transmigrasi	Makin rendahnya masyarakat yang berpartisipasi dalam program transmigrasi
D	Pendukung Urusan Pemerintahan	
1.	Sekretariat Daerah	1. Adanya Refocusing anggaran dalam penanganan Covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; 2. Adanya pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan <i>time schedule</i> ; 3. Terbatasnya jumlah staf di beberapa bagian sehingga beberapa pejabat merangkap tugas sebagai pelaksana; 4. Kurangnya pengembangan dan penyempurnaan produk hukum daerah; 5. Kurangnya pemahaman prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum; 6. Kurangnya kepatuhan terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan; 7. Ditiadakannya kompetisi kelompok budaya kerja tahun 2021 sehingga mengakibatkan OPD/UK tidak lagi bersemangat dalam

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
		penyusunan RBK.
2.	Sekretariat DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Refocusing anggaran dalam penanganan Covid 19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya; 2. Adanya kendala teknis dan administrasi sehingga pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional tidak dapat dilaksanakan.
E	Penunjang Urusan Pemerintahan	
1	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Refokusing anggaran menyebabkan banyak kegiatan kajian yang tidak bisa dilaksanakan, dan akhirnya hanya menjalankan hal yang bersifat dokumen rutin dan fasilitasi kegiatan perencanaan 2. Dengan adanya pengalihan anggaran untuk penanganan Covid 19 kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2	Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian kebijakan APBN dan APBD yang menyebabkan beberapa kali refokusing untuk penanganan COVID 19 dilakukan 2. Adanya Permendagri 90 tahun 2020 menyebabkan berubahnya program dan kegiatan baru 3. Adanya keijakan menggunakan SIPD Pusdatin dalam penganggaran menyebabkan banyak penyesuaian proses maupun output anggaran untuk kebijakan anggaran 2021. 4. SIP-APBD belum terintegrasi dengan Sistem Perencanaan. 5. SIP-APBD belum di dukung dengan Sistem Infomasi Standar Biaya / Standar Harga yang terintergrasi. 6. SIP APBD belum di dukung dengan RKBMD yang terintegrasi 7. Belum tersedia Sistem Informasi Persediaan yang terintegrasi. 8. Sistem Informasi Pendapatan Daerah belum terintegrasi dengan sistem pelaporan 9. Pemanfaatan IT dalam Penyusunan Laporan Keuangan Belum Optimal 10. Kapasitas SDM kurang memadai 11. e-simbada belum dimanfaatkan secara optimal. 12. Pencatatan Aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
		<p>jaringan) masih belum tertib.</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Pengelolaan BMD sebagian masih manual 14. Komunikasi dan koordinasi kurang optimal 15. Keterlambatan Proses Pengadaan Barang/ Jasa Sumber, Dana Transfer 16. Keterlambatan Penyampaian Laporan Kepada Pemerintah Pusat 17. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; 18. Belum optimalnya fungsi Aplikasi SIRUP sehingga menghambat proses pengumuman paket dan proses pengadaan; 19. Belum optimalnya Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam penatausahaan dan pelaporan serta belum terintegrasi dengan bank terkait; 20. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan Perda pajak dan retribusi daerah dengan pihak terkait; 21. Pemutakhiran data obyek pajak belum dilaksanakan secara optimal; 22. Penerapan Aplikasi Pajak On Line belum maksimal; 23. Belum tertibnya pengelolaan SKAB Pajak Daerah;
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi produk hukum bidang kepegawaian serta masih kurangnya Sistem Informasi Kepegawaian 2. Proses entry data melalui SAPK on line ke BKN masih berjalan 3. Sumber daya manusia belum berfungsi secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsi; 4. Terdapat OPD yang melakukan mutasi tidak melalui prosedur yang ada 5. Upaya pembinaan aparatur belum optimal 6. Pemberian penghargaan dan sanksi yang kurang optimal. 7. Pandemi covid-19 yang mengakibatkan adanya penyesuaian dan perubahan rencana kerja sehingga berdampak pada beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana.
4.	Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakandan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik; 2. Fasilitasi, sarana dan prasarana fisik dan non fisik bagipengembangan riset/penelitian baik ilmu dasarmaupun terapan sesuaidengan perkembanganteknologi global guna mendukungpeningkatanproduktivitas, efisiensi dan dayasaingdaerah masih belum optimal;

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan
F	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dan sosialisasi kebijakan bidang pengawasan karena adanya bencana erupsi Gunung Semeru sehingga para pejabat yang terlibat dalam kegiatan Rakorwas terkonsentrasi dilokasi bencana; 2. Belum terpenuhinya target kinerja kegiatan Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah karena waktu pelaksanaan bersamaan dengan Monitoring MCP, Evaluasi ZI, dan SPIP 3. Terbatasnya anggaran Diklat APIP sehingga mempengaruhi capaian Kapabilitas APIP.
G	Unsur Kewilayahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Refocusing anggaran menyebabkan banyak kegiatan yang tidak maksimal dilaksanakan, dan akhirnya hanya menjalankan kegiatan yang bersifat rutin 2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang memadai; 3. Terbatasnya Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan operasional perkantoran yang memadai; 4. Koordinasi internal instansi belum dilakukan secara maksimal; 5. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pelayanan perijinan di kecamatan terutama masyarakat dengan jangkauan wilayah yang jauh dari kecamatan; 6. Kurangnya peran serta Kelompok Masyarakat pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat lainnya; 7. Belum optimalnya pelaporan keuangan desa tepat waktu; 8. Adanya Desa yang masih terlambat dalam melakukan penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa sehingga dapat menghambat penyaluran (SPJ).
H	Unsur Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya <i>Refocusing</i> anggaran dalam penanganan Covid 19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran suatu lembaga ormas/lembaga

2.3.3 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Penelaahan Pokok Pikiran DPRD

Pokir atau Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota Dewan agar diperjuangkan di pembahasan RAPBD. Pokir DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas

pembangunan, rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber, serta hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang belum dibahas, yang kemudian menjadi masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil telaah pada pokok pikiran DPRD hasil reses III, tampak pada beberapa bidang urusan sebagai berikut:

1. Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
3. Social
4. Tenaga kerja
5. Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
6. Pertanian
7. Perhubungan
8. Pendidikan
9. Pekerjaan umum dan penataan ruang
10. Perdagangan
11. Pariwisata
12. Lingkungan hidup
13. Koperasi dan usaha mikro
14. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
15. Kesehatan
16. Kepemudaan dan olahraga
17. Kebudayaan
18. Energy dan Sumber daya mineral

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pembangunan Daerah merupakan suatu upaya sistematis dan terencana oleh seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan daerah tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Pada upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

3.1.1.1 Asumsi Makro Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 diproyeksikan meningkat. Dari sisi pengeluaran, konsumsi dan investasi serta aktivitas perdagangan internasional akan tumbuh seiring dengan keyakinan masyarakat terhadap kesehatan dan membaiknya perekonomian. Konsumsi pemerintah akan diarahkan untuk mendukung sisi permintaan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat melalui program bantuan sosial. Investasi diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi terutama karena dukungan belanja infrastruktur yang tetap dilanjutkan, utamanya untuk proyek strategis nasional serta investasi baru di tengah iklim investasi yang kondusif dan fundamental ekonomi yang semakin membaik.



Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2016-2021

Sementara itu, ekspor dan impor diperkirakan tumbuh bertahap seiring dengan perbaikan *demand* dan *supply global*. Di sisi produksi, beberapa sektor yang terimbas Pandemi Covid-19 akan mulai bangkit sejalan dengan meningkatnya *Purchasing Manufacturing Index* (PMI). Sektor manufaktur dan perdagangan diperkirakan mulai berproduksi normal didukung reformasi struktural melalui perbaikan regulasi dan birokrasi. Sektor-sektor yang terkena imbas yang dalam seperti transportasi dan pariwisata, diperkirakan mulai bangkit pada tahun 2022.

Tabel 3.1 menggambarkan kebijakan ekspansif konsolidatif pada RAPBN 2021 disajikan. Mencermati kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di tahun 2020 sebagai dampak Pandemi Covid-19 serta prospek perekonomian ke depan, maka pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel untuk melakukan *counter cyclical* dengan tetap memelihara kesinambungan fiskal. Strategi fiskal tersebut berdampak pada konsekuensi defisit anggaran, namun dengan besaran yang semakin menurun. Pada tahun 2023, defisit direncanakan sudah kembali di bawah 3 persen terhadap PDB sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, sebagai komitmen untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan sustainabel, maka rasio utang senantiasa dijaga dalam batas aman.

Tabel 3. 1 Postur RAPBN Tahun 2021 (Triliun Rupiah)

URAIAN	2020	2021	2022
--------	------	------	------

		APBN	Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020	RAPBN	RAPBN
A	PENDAPATAN NEGARA	2.232, 2	1.699,9	1.776, 4	1840,7
I	PENDAPATAN DALAM NEGERI	2.232, 7	1.698,6	1.775, 5	1840,1
	1. Penerimaan Perpajakan	1.865, 7	1.404,5	1.481, 9	1506,9
	2. Penerimaan Negara bukan Pajak	367,0	294,1	293,5	333,2
II	PENERIMAAN HIBAH	0,5	1,3	0,9	0,0
B	BELANJA NEGARA	2.540, 4	2.739,2	2.747, 5	2714,2
I	BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.683, 5	1.975,2	1.951, 3	1944,5
	1. Belanja K/L	909,6	836,4	1.029, 9	945,8
	2. Belanja Non K/L	773,9	1.138,9	921,4	998,8
II	TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	856,9	763,9	796,3	769,6
	1. Transfer ke Daerah	784,9	692,7	724,3	701,6
	2. Dana Desa	72,0	71,2	72,0	68
C	KESEIMBANGAN PRIMER	(12,0)	(700,4)	(597,9)	(462,2)
D	SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A- B)	(307,2)	(1.039,2)	(971,2)	(868,0)
	%	(1,76)	(6,34)	(5,50)	

	Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB				(4,85)
E	PEMBIAYAAN ANGGARAN	307,2	1.039,2	971,2	868,0

Sumber: Kementerian Keuangan RI

Mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global serta faktor-faktor yang memengaruhi penanganan Covid-19, reformasi struktural, serta ekspansi fiskal, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022 diperkirakan mencapai kisaran 5-5,5 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 mencapai kisaran 5,3 hingga 5,9 persen. Selanjutnya, kinerja perekonomian nasional akan didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang terjaga.

Mengacu kerangka ekonomi makro tahun 2022, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pemerintah akan meneruskan program-program *pro-poor* dan *pro-employment* untuk mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan program-program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.

Dengan upaya tersebut, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 5,5-6,3 persen yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan (gini ratio) pada tahun 2022 yang diperkirakan masing-masing berada pada kisaran 8,5-9,0 persen dan 0,376-0,378. Upaya perbaikan indikator kesejahteraan juga tecermin dari peningkatan angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang diharapkan mencapai 73,41-73,46. Pada prinsipnya, kebijakan fiskal tahun 2022 tetap akan memfokuskan pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dilakukan secara simultan melalui upaya reformasi struktural.

Arah kebijakan perekonomian pada tahun 2023 yaitu untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha, dengan terkendalinya pandemi Covid-19 menjadi faktor utama pemulihan ekonomi yang akan mendorong tingkat keyakinan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi dengan normal, pemberian bantuan untuk pemulihan dunia

usaha juga dilakukan dengan mendorong peningkatan investasi dan diarahkan pada sektor pariwisata dan industri. Upaya pemulihan dengan bantuan sosial juga diarahkan kepada masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan. Pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga dan bantuan pelatihan prakerja akan meningkatkan keterampilan dan menjaga tingkat produktivitas tenaga kerja yang dapat membantu mempercepat pencarian pekerjaan. Diversifikasi ekonomi juga dilakukan untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari COVID-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui reformasi struktural. Agenda reformasi struktural akan mempercepat pemulihan dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan perekonomian Provinsi Jawa Timur mengacu pada prioritas pembangunan tahun 2023 yang terdapat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2023, yaitu :

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata
2. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan Sumber Daya Energi
3. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur
4. Peningkatan kualitas pendidikan kesehatan produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan
5. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai – nilai budaya local
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
7. Peningkatan ketentraman ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur

Arah kebijakan perekonomian Kabupaten Lumajang tahun 2023 mencakup percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah, membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan

bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal, akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan yang menjadi tema pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2023 adalah Optimalisasi Reformasi Struktural untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan 2023 menyesuaikan dengan pemulihan pandemi COVID-19, yang menggambarkan upaya Kabupaten Lumajang untuk bangkit dari dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Tabel 3.2 Realisasi dan Proyeksi Ekonomi Makro Nasional 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,17	5,02	(1,7)-(0.6)	5,0	5-5.5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3	5,23	7,07	6,49	5,5-6,3
IPM (%)	71,39	71,92	71,94	72,29	73,41-73,46
Inflasi (%)	3,13	2,7	2,67	1,42	3,47
Indeks Gini	0,384	0,38	0,385	0,381	0,376-0,378
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,66	9,22	10,19	9,71	8,5-9,0
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,0	5,6	3,0-4,0		
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.427	14.146	14.400-14.800	14.200-14.600	14.350
Harga Minyak Mentah (US\$/barel)	67	62	35-40	55-65	63
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	778	746	705	680 -705	703
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.145	1.057	992	987-1.007	1.036

Sumber: Kementerian Keuangan RI dan Badan Pusat Statistik 2022

3.1.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Tahun 2023 (Nasional)

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, tema RKP tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan tujuh arah kebijakan prioritas sebagai fokus pembangunan tahun 2023 yang terdiri dari:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2023 antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3-5,9%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3-6,0%
3. Rasio Gini sebesar 0,375-0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,31-73,49%
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02%
6. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 106-107
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5-8,5 %

Terdapat 14 *Major Project* yang diidentifikasi memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan, yakni Kawasan Industri Prioritas dan Smelter, Pengelolaan Terpadu UMKM, Food Estate, Destinasi Pariwisata Prioritas, Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem

Kesehatan Nasional, Reformasi Pendidikan Keterampilan, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Wilayah Adat Papua: Laa Pago dan Domberay, Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Transformasi Digital, dan Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3

3.1.2 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Propinsi Jawa Timur

3.1.2.1 Kondisi Ekonomi Propinsi Jawa Timur

Perekonomian Jawa Timur Tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 2.454,50 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp 1.669,12 triliun.

Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2021 dibandingkan Triwulan IV-2020 meningkat sebesar 4,59 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Konstruksi yang tumbuh sebesar 9,91 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 8,49 persen.

Ekonomi Jawa Timur triwulan IV-2021 dibanding triwulan III-2021 (q-to-q) mengalami pertumbuhan sebesar 0,14 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, namun ada beberapa lapangan usaha yang berkontraksi yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; serta Pertambangan dan Penggalian masing-masing sebesar -23,70 persen dan -1,69 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,62 persen; dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,71 persen. Lapangan Usaha Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Konstruksi yang memiliki peran dominan juga mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 3,55 persen dan 3,24 persen. Sementara itu, lapangan usaha lainnya yang tumbuh tinggi di antaranya Industri Pengolahan sebesar 2,17 persen.

Ekonomi Jawa Timur sampai dengan Triwulan IV-2021 meningkat sebesar 3,57 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang tumbuh sebesar 7,83 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 2,69 persen.

Struktur PDRB Jawa Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan IV2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Jawa Timur masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 31,12 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,76 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,88 persen; dan Konstruksi sebesar 9,42 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Timur mencapai 69,19 persen.

3.1.2.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Serta Kesejahteraan Masyarakat menjadi isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Adapun tujuan dan sasaran dalam misi Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah

1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Industri Pengolahan;
 - b. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan;
 - c. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan dan Penggalian;
 - d. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
 - e. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal;
 - f. Meningkatnya Nilai Tambah KUMKM;
 - g. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata;
 - h. Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan;
 - i. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber Daya Air;
 - j. Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara.

2. Menurunnya Angka Kemiskinan yang memiliki sasaran sebagai berikut:
 - a. Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan;
 - b. Meningkatnya Kemandirian PMKS.

Dalam bidang ekonomi, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur diarahkan pada pengembangan dan peningkatan sektor unggulan dalam mengembangkan perekonomian yang produktif, efisien dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan, peningkatan nilai tambah sektor primer dengan hilirisasi produk unggulan, peningkatan kerjasama antardaerah dalam pengembangan kawasan, penyederhanaan regulasi untuk kemudahan investasi, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber pendanaan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

3.1.3 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lumajang

3.1.3.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Lumajang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

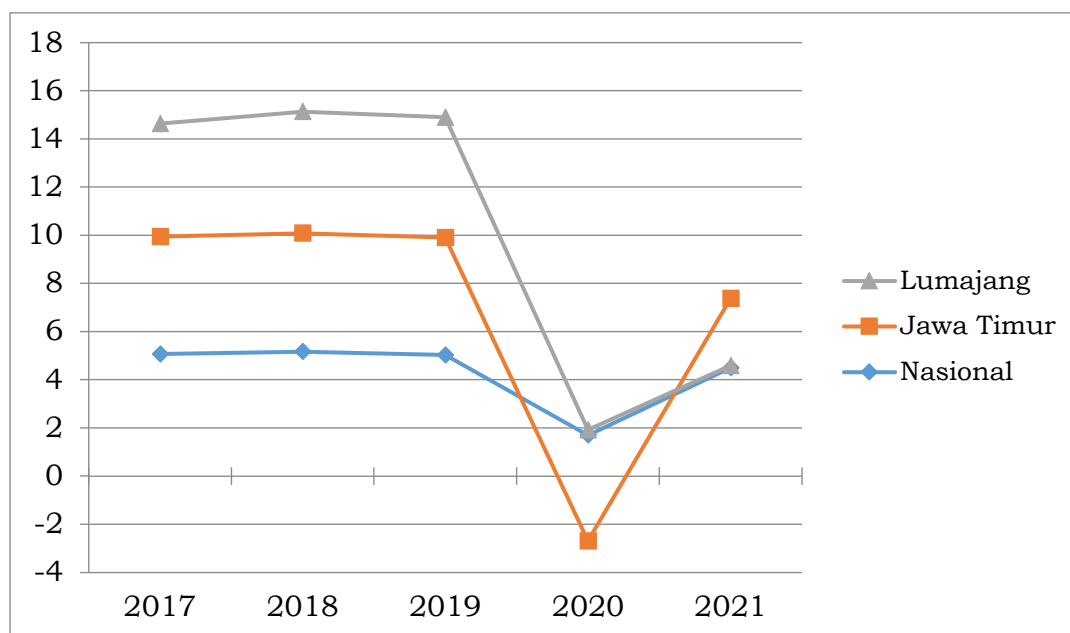
Perekonomian Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 tumbuh sebesar 4,77%, namun melambat daripada pertumbuhan ekonomi 2 tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 sebesar 5,02%.

Tabel 3. 3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2021

Sektor	2018	2019	2020	2021
1. PDRB Kabupaten Lumajang				
Atas Dasar Harga Berlaku (Rp, Milyar)	30.690,4 4	32,620,9 5	32.062,0 1	33.678,62
Atas Dasar Harga Konstan	21.569,7	22.563,3	21.933,7	22.623,40

Sektor	2018	2019	2020	2021
(Rp, Milyar)	8	9	9	
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (%)/Pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran	5,05	5,00	4,61	-2,79
3. PDRB Perkapita				
Atas Dasar Harga Berlaku (Rp, Ribuan)	2.515,99	31.294,23	28.707,02	29.880,94
Atas Dasar Harga Konstan (Rp, Ribuan)	20.744,36	2.645,72	19.638,63	20.073,33
4. Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan)	1.039,79	1.042,44	1.116,87	1.127,09
Inflasi (%)				
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,55	2,81	3,36	3,51

Sumber: Badan Pusat Statistik



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang pada tahun 2017-2018 berada dalam tren sedikit naik, seiring kondisi ekonomi global dan kawasan yang mulai sedikit membaik. Berdasarkan tabel diatas serta mendasari hasil analisis dan proyeksi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang berada pada angka -2,79 % pada tahun 2021 dengan pertimbangan focus pembangunan masih bergerak pada upaya pemulihan ekonomi akibat lumpuhnya perekonomian pada tahun 2020. Kemudian untuk tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di proyeksikan tumbuh sebesar 3%.

Tabel 3. 4 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lumajang Tahun 2021-2022

Sektor	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan (%)	4,77	-2,47	-0,06	3

Sumber: Lumajang dalam Angka 2021

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lumajang tiap tahun terus mengalami peningkatan. PDRB Kabupaten Lumajang berdasarkan harga konstan pada tahun 2021 adalah Rp 22.623,400.000, meningkat dari tahun 2020 sebesar Rp 21.933.790.000 atau sebesar 3,04%. Sedangkan PDRB berdasarkan harga berlaku, mengalami peningkatan sekitar 4,8% pada tahun 2021 dari Rp. 33.678.620.000 pada tahun 2020 menjadi 32.062.010.000.

PDRB Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 terbesar dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,59 persen; kemudian lapangan usaha kategori Industri Pengolahan sebesar 21,19 persen; lapangan usaha kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor sebesar 13,78 persen.

Lapangan usaha lapangan usaha Konstruksi sebesar menyumbang 7,55 persen, sedangkan 13 lapangan usaha lainnya berada di bawah 5 persen kontribusinya diantaranya lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 4,08%, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 3,23%, lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 3,57%, lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 2,56%, lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 1,90%, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 1,72%, lapangan usaha real estate sebesar 1,80%, jasa lainnya sebesar 1,51%, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 1,26%, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,85%, lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 0,32%, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,06%. lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 0,04%, dan lapangan usaha pengadaan air.

Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten

Lumajang Atas Dasar Harga Berlakudalam Perekonomian Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2021 yang mana data tercantum pada bab sebelumnya, sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami peningkatan. Hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan usaha yang semakin menurun jumlahnya. Adanya kemajuan teknologi yang diiringi peningkatan pengetahuan bagi para pelaku di sektor dapat meningkatkan nilai produktivitas. Sektor lapangan usaha lainnya juga bertambah nilainya, sesuai prinsip dasar ilmu ekonomi yaitu need dan demand, semakin dibutuhkan tetapi lapangan usaha berkurang akan semakin diminati dan akan meningkatkan nilai jualnya. Inflasi juga dapat menjadi penyebab naiknya nilai jual produk.

3.1.3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lumajang

Arah kebijakan ekonomi daerah didasari dan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara global, nasional, maupun regional. Dimana kondisi tersebut harus bersinergi, linier, dan berintergrasi. Hal tersebut tertuang dalam visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang untuk periode RPJMD 2018-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih, adalah sebagai berikut:

”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing,
Makmur dan Bermartabat”

Visi tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan utama/pokok dan isu-isu strategis daerah, yaitu:

1. Rendahnya Prosentase pertumbuhan sektor unggulan;
2. Terjadinya alih fungsi lingkungan yang menyebabkan tingginya resiko bencana;
3. Belum meratanya akses kebutuhan dasar masyarakat dan kualitas SDM;
4. Masih tingginya angka kemiskinan;
5. Belum Optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi dan kapasitas AparaturDaerah.

Adapun Misi yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai visi pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 diantaranya adalah:

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis padapertanian, usaha mikro, dan pariwisata;

2. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
3. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi.

Kabupaten Lumajang menetapkan tiga indikator kinerja utama yang berkaitan dengan fokus tahapan tersebut yaitu: pertumbuhan ekonomi (sebesar 5,30 % pada 2023), angka kemiskinan (sebesar 8,00% pada tahun 2023), dan indeks kualitas lingkungan hidup (80,11% pada tahun 2023). Beberapa sasaran dalam bidang ekonomi diantaranya adalah mewujudkan perekonomian yang kokoh berbasis pertanian, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas, mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pemerataan pembangunan.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang tahun 2022 tentunya mendasari strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lumajang, dengan Prioritas pembangunan pada tahun 2022 diarahkan untuk mempercepat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan dilaksanakan bersamaan dengan pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar serta peningkatan kualitas SDM. Arah kebijakan pembangunan yang menjadi tema pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2023 adalah Optimalisasi Reformasi Struktural untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan selaras dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang

Pelaksanaan arah kebijakan pada tahun 2022 mencakup empat hal yaitu: (i) percepatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat melalui penguatan kapasitas pemerintah; (ii) membangun SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif dan bermoral berbasis penguatan nilai agama dan kearifan lokal; (iii) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan sektor usaha prioritas; dan (iv) melakukan percepatan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang juga mempertimbangkan isu strategis lainnya yaitu penanganan pandemi COVID-19, serta pemulihan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur, peningkatan SDM serta peningkatan daya beli dan daya saing. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pandemic COVID-19 diselenggarakan dalam upaya pencegahan, penanganan hingga pengendalian dampak

pandemik yang masih berlanjut hingga tahun 2022 diantaranya adalah:

1. Percepatan seluruh masyarakat mendapatkan vaksin COVID-19;
2. Penelusuran kontak (*tracing*) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat;
3. Edukasi dan penyiapan lokasi isolasi secara mandiri pada sebagian hasil *tracing* yang menunjukkan hasil tes positif dari *rapid tes* atau negatif dengan gejala untuk melakukan isolasi mandiri;
4. Penyiapan ruang isolasi di Rumah Sakit yang dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan, seperti karena ada tanda klinis yang butuh layanan definitif di Rumah Sakit;
5. Pemberian insentif bagi masyarakat miskin, pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak dari pembebanan pajak dan retribusi yang ada;
6. Pendampingan kondisi tatanan kehidupan baru (*new normal*).

Untuk mencapai target perekonomian Tahun 2022 dibentuk strategi pemulihan ekonomi di Kabupaten Lumajang guna mencapai pertumbuhan ekonomi secara positif yang melebihi tahun-tahun sebelumnya diantaranya :

1. Mendorong peningkatan PDRB lapangan usaha yang tumbuh secara positif untuk mensubstitusi PDRB lapangan usaha yang tumbuh secara negatif seperti pertanian, perikanan dan kehutanan;
2. Mendorong pertumbuhan industri pengolahan sebagai upaya substitusi produk distribusi dari lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dengan penyerapan tenaga kerja yang banyak. Adanya peningkatan PDRB pada lapangan usaha ini akan memperlihatkan bahwa adanya peningkatan daya saing yang juga mendukung upaya peningkatan daya saing pada tahun 2022;
3. Mendorong perputaran ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda yang merupakan satu kesatuan ekonomi daerah.

Pertumbuhan sektor ini akan menyebabkan demand terhadap tenaga kerja yang cukup signifikan;

4. Peningkatan lapangan usaha konstruksi pada tahun 2022 tentunya akan berjalan linier dengan upaya pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap peningkatan kualitas infrastruktur;
5. Mengoptimalkan pengelolaan hasil tambang di Kabupaten Lumajang yang memiliki potensi besar.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan Daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, maka struktur APBD Kabupaten Lumajang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari : (1) Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, (2) Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah (3) Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Hibah, dana darurat, lain lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
2. Belanja Daerah, terdiri dari : (1) belanja operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial (2) belanja modal, meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan

gedung, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya (3) belanja tidak terduga; dan (4) belanja transfer, meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan;

3. Pembiayaan Daerah, terdiri: (1) penerimaan pembiayaan (2) pengeluaran pembiayaan.

Secara makro, struktur APBD terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur APBD berdasarkan Permendagri 13/2006 berlaku hingga tahun anggaran 2020. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terjadi perubahan struktur APBD yang diberlakukan di Pemerintah Kabupaten Lumajang mulai Tahun Anggaran 2021.

Sebagaimana diatur dalam regulasi-regulasi di atas, perbedaan struktur APBD pada unsur Pendapatan Daerah dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Perbedaan Struktur Pendapatan Daerah Berdasarkan Permendagri nomor 1 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019

Struktur Pendapatan Daerah berdasarkan PP 58/2005 (Berlaku hingga tahun 2020)	Struktur Pendapatan Daerah berdasarkan PP 12/2019 (Berlaku mulai tahun 2021)
PENDAPATAN	PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah	Pajak Daerah
Retribusi daerah	Retribusi daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan yg Dipisahkan	Hasil Pengelolaan Kekayaan yg Dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah	Lain-lain PAD yang sah
Dana Perimbangan	Pendapatan Transfer
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak	Transfer Pemerintah Pusat
Dana Alokasi Umum	Dana Perimbangan
Dana alokasi khusus	Dana Insentif Daerah

Struktur Pendapatan Daerah berdasarkan PP 58/2005 (Berlaku hingga tahun 2020)	Struktur Pendapatan Daerah berdasarkan PP 12/2019 (Berlaku mulai tahun 2021)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Dana Otonomi Khusus
Pendapatan hibah	Dana Keistimewaan
Dana darurat	Dana Desa
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Transfer Antar Daerah
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Pendapatan Bagi Hasil
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	Bantuan Keuangan
Sumbangan Pihak Ketiga	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan Lainnya	Hibah
	Dana Darurat
	Lain-Lain Pendapatan sesuai UU

Sumber: Permendagri 13/2006 dan PP 12/2019

Di sisi lain, struktur Belanja Daerah juga mengalami perubahan sebagaimana digambarkan pada table 3.6:

Tabel 3. 6 Perbedaan Struktur Belanja Daerah Berdasarkan Berdasarkan Permendagri nomor 1 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019

Struktur Belanja Daerah berdasarkan PP 58/2005 (Berlaku hingga tahun 2020)	Struktur Belanja Daerah berdasarkan PP 12/2019 (Berlaku mulai tahun 2021)
BELANJA DAERAH	BELANJA DAERAH
Belanja Tidak Langsung	Belanja Operasi
Belanja Pegawai	Belanja Pegawai
Belanja Bunga	Belanja Barang & Jasa
Belanja Hibah	Belanja Bunga
Belanja Bantuan Sosial	Belanja Hibah

Struktur Belanja Daerah berdasarkan PP 58/2005 (Berlaku hingga tahun 2020)	Struktur Belanja Daerah berdasarkan PP 12/2019 (Berlaku mulai tahun 2021)
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik	Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga	Belanja Modal Tanah
Belanja Langsung	Belanja Modal Peralatan&Mesin
Belanja Pegawai	Belanja Modal Gedung & Bangunan
Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal Tanah	Belanja Modal Aset Tetap lainnya
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Belanja Tidak Terduga
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Belanja Transfer
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Belanja Bagi Hasil
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Bantuan Keuangan
Belanja Modal Aset Lainnya	

Sumber: Permendagri 13/2006 dan PP 12/2019

Sedangkan pada unsur Pembiayaan, pemberlakuan PP 12/2019 tidak merubah struktur Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Permendagri 13/2006. Dalam hal kinerja Keuangan Daerah, parameter kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari 2 aspek yakni kinerja pelaksanaan APBD dan kinerja Neraca Daerah.

3.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan

dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, Pajak kewenangan pemerintah kabupaten meliputi Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Di sisi lain, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.

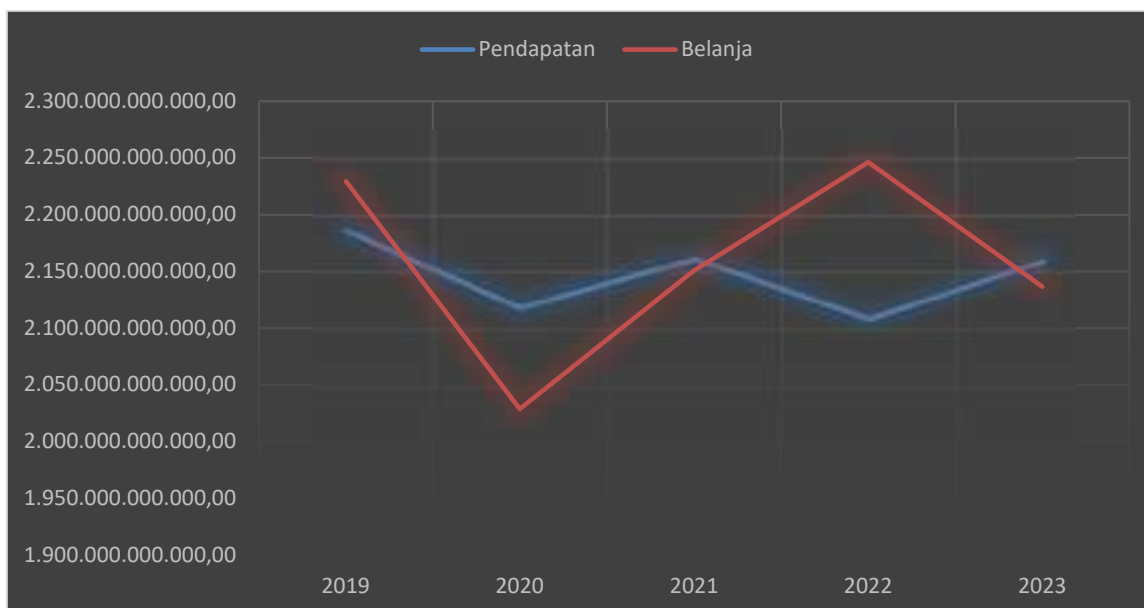
Kemudian untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini adalah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan,

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, serta Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

Pada dasarnya pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya seiring peningkatan perekonomian nasional dan daerah yang pada gilirannya akan semakin membuka peluang potensi pendapatan negara maupun daerah. Hal ini terutama dari kenaikan komponen dana transfer, juga dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli daerah diharapkan tetap meningkat sebagai wujud kemandirian daerah. Kenaikan PAD dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian untuk dapat mempertahankan kondisi daerah tetap kondusif terutama saat perekonomian sedang lesu.

Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang masih di dominasi oleh dana transfer yaitu sekitar 80%, sedangkan sumber pendapatan dari pendapatan asli daerah masih sebesar 14%. Hal ini berarti tingkat kemandirian kabupaten masih cukup rendah, dan masih cukup bergantung pada dana transfer yang ada.

Pendapatan dalam APBD Kabupaten Lumajang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.136.607.434.781,00 yang meliputi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 307.949.108.192,00, pendapatan transfer sebesar Rp. 1.708.830.477.589 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 119.827.849.000. Pendapatan Kabupaten Lumajang berfluktuatif dalam 3 tahun terakhir. Pendapatan Kabupaten Lumajang mengalami penurunan sekitar 3,10% pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan menurunnya pendapatan dari pendapatan transfer dan dari lain-lain pendapatan yang sah.

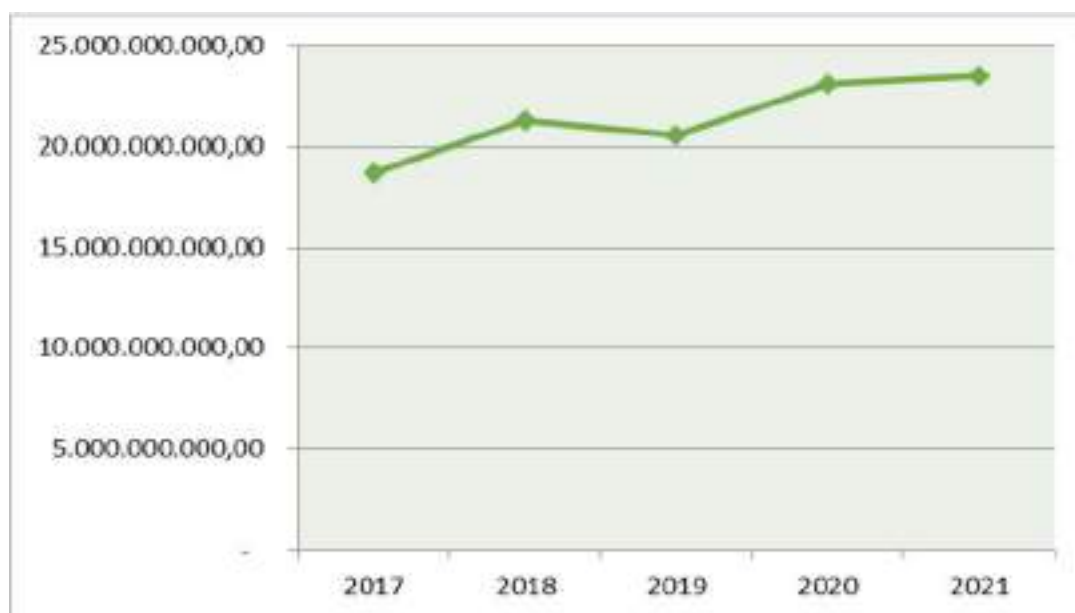


Gambar 3. 3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Lumajang 2019-2023

Adanya fluktuasi pendapatan di Kabupaten Lumajang pada 4 tahun terakhir tentunya berdampak pada pendekatan yang akan digunakan dalam menghitung proyeksi kekuatan pendapatan tahun 2023. Tahun 2020 sejatinya merupakan tahun awal dalam pendekatan perhitungan proyeksi pendapatan dikarenakan pada tahun 2021 hingga 2023 dipastikan masih berfokus pada upaya penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Guna mendorong peningkatan pendapatan dapat dioptimalkan pada tahun 2023, maka opsi peningkatan pendapatan asli daerah menjadi tumpuan utama dikarenakan merupakan sumber pendapatan yang pasti yaitu pada hasil retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli. Sedangkan pendapatan transfer yang menyumbang sebagian besar pendapatan Kabupaten Lumajang tidak dapat dipastikan besarnya, karena kondisi pendapatan nasional juga berfluktuatif.

Dalam 5 tahun terakhir trend alokasi DBHCHT untuk Kabupaten Lumajang selalu mengalami peningkatan. Harapannya trend ini akan berlanjut pada tahun 2023 sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional.



Gambar 3. 4 Alokasi DBHCHT Kabupaten Lumajang Tahun 2017-2021

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu terobosan paling penting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak dan retribusi

daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Lumajang sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Transfer serta Lain-lain Pendapatan Daerah.

Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang Sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru. Apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tahun anggaran 2016-2020 lebih fokus pada upaya untuk mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain melalui strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.
2. Penyesuaian tarif baru dengan didasarkan pada tingkat perekonomian masyarakat, diikuti dengan meningkatkan pelayanan baik dalam pemungutan maupun pengelolaannya.
3. Melakukan intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD yang sudah ada melalui peningkatan kualitas kemampuan sumber daya aparatur dalam mengoptimalkan pemungutan sumber-sumber PAD serta perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan. Sistem informasi diharapkan dapat menyediakan data menyeluruh yang mencakup jumlah dan potensi terhadap data obyek PAD.
4. Melakukan ekstensifikasi dengan mencari dan menggali potensi sumber-sumber PAD yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan dengan tidak menghambat kinerja perekonomian yang ada baik di pusat maupun daerah. Untuk itu dalam merencanakan sumber penerimaan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang akan berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi agar kebijakan tersebut tidak memiliki dampak yang kontraproduktif terhadap perekonomian masyarakat maupun nasional.
5. Meminimalkan kebocoran pemungutan PAD dengan mengimplementasikan sistem pengendalian intern yang memadai terhadap PAD dengan cara meningkatkan efisiensi pemungutan dan administrasi serta perbaikan kontrol terhadap petugas pemungutan. Meningkatkan efisiensi pemungutan dan administrasi

dilakukan melalui peningkatan sistem pemungutan. Implementasi kebijakan pemungutan PAD akan berhasil atau gagal tergantung kepada kualitas administrasi pemerintah daerah dan seberapa realitas kebijakan itu diformulasikan berdasarkan sumber-sumber yang tersedia. Kualitas administrasi pemerintah daerah dapat ditingkatkan melalui pembekalan-pembekalan yang diberikan kepada aparatur pemungut PAD melalui pelatihan-pelatihan agar lebih mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan sendiri dan menilai dampaknya terhadap perekonomian serta responsive terhadap tuntutan masyarakat. Perbaikan kontrol terhadap petugas pemungut PAD dilakukan dengan meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui pemberian insentif biaya pemungutan.

6. Meningkatkan peran Perusahaan Daerah melalui perbaikan dan peningkatan manajemen dengan harapan Perusahaan Daerah dapat dikelola secara profesional, efektif dan efisien serta dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sehingga mampu memberikan kontribusi PAD dalam bentuk bagian laba kepada Pemerintah Daerah.
7. Menerapkan manajemen kas pada saat terjadi kelebihan kas (idle cash) dengan cara melakukan investasi jangka pendek dengan periode kurang dari 3 (tiga) bulan dengan memilih instrumen investasi jangka pendek yang bebas resiko dan menguntungkan, sehingga saat diperlukan dapat dengan mudah dicairkan. Kebijakan ini dapat dilakukan pada saat kas daerah belum diperlukan untuk membiayai program dan kegiatan dan biasanya terjadi di awal tahun anggaran. Dengan adanya manajemen kas di harapkan perolehan PAD dapat meningkat melalui peningkatan pendapatan hasil investasi berupa pendapatan bunga.
8. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan dana perimbangan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah daerah ikut secara aktif dalam melakukan pembinaan dan pemantauan di bidang perpajakan, khususnya pajak pusat seperti PPh dan PBB. Kebijakan ini dapat diimplementasikan dalam bentuk pembinaan dan pemantauan bersama antara pemerintah daerah dan Kantor Pelayanan Pajak terhadap para bendahara selaku wajib pungut dan dunia usaha termasuk rekanan pemerintah daerah, serta pendataan terhadap wajib pajak bumi dan bangunan, dengan harapan semakin besar kontribusi pajak pusat yang dipungut di Kabupaten Lumajang, maka dana perimbangan dalam bentuk dana bagi hasil pajak yang diterima akan semakin meningkat.

b. Menyampaikan laporan keuangan dan menyediakan data dasar untuk kebutuhan perhitungan dana perimbangan secara tepat waktu serta melakukan analisis untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula dana perimbangan dan melakukan peran aktif berkoordinasi dengan Pemerintah, sehingga alokasi dana perimbangan yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan.

9. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari selain PAD dan dana perimbangan seperti pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian serta bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Seperti halnya komponen dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, juga tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan semua kebijakan yang berhubungan dengan lain-lain pendapatan yang sah sebagian ditentukan oleh kebijakan pemerintah pusat/propinsi serta pihak lainnya seperti pendapatan hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan bantuan keuangan.

Dalam rangka meningkatkan dana bagi hasil pajak dari pemerintah propinsi seperti bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pemanfaatan air bawah tanah/air permukaan dan bagi hasil lainnya, kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah senantiasa meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Propinsi dengan harapan dana bagi hasil pajak maupun bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi dapat meningkat sesuai dengan yang direncanakan.

10. Pembiayaan Pembangunan Daerah Dana Non APBD

Pembiayaan Pembangunan Daerah yang tidak dapat dipenuhi dengan anggaran APBD perlu dicarikan solusi dengan pembiayaan Non APBD antara lain:

a. Dana CSR

Dana CSR merupakan dana yang berasal dari perusahaan. Komitmen perusahaan dalam pengembangan ekonomi yang berkesinambungan dalam kaitannya dengan karyawan beserta keluarganya, masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya. Dana CSR digunakan untuk membiayai prioritas pembangunan yang tidak didanai oleh pemerintah, hal ini merupakan kepedulian perusahaan terhadap pembangunan daerah.

b. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA)

Skema KPBU mencakup 19 sektor yang dapat dikerjasamakan Pemerintah Indonesia meliputi konektivitas, perkotaan, dan sosial. Skema PINA memiliki tiga fungsi utama. Pertama, fungsi fasilitasi untuk memfasilitasi proyek-proyek untuk mencapai tahap financial close, serta memberikan saran penstrukturan proyek dan pembiayaan. Kedua, fungsi ekosistem untuk membangun iklim investasi infrastruktur melalui pengkajian regulasi serta percepatan implementasi instrumen creative financing. Ketiga, fungsi pipelining untuk mempersiapkan daftar proyek yang siap ditawarkan kepada investor serta potensial investor yang akan berinvestasi.

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2018)

Bentuk-bentuk upaya peningkatan intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD tentunya belum dapat terlaksana secara optimal pada tahun 2021 terkait beberapa kebijakan Kabupaten Lumajang dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemic COVID-19 melalui pemberian intensif kepada pelaku usaha. Begitu pula dengan upaya-upaya ekstensifikasi sumber-sumber PAD baru juga pastinya terdampak dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sepanjang tahun 2021, sehingga output yang akan dicapai dirasa belum optimal dan signifikan untuk peningkatan pendapatan Kabupaten Lumajang.

Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan insentif kepada para pelaku usaha dalam upaya pencegahan dan penanganan pandemic COVID-19 di Kabupaten Lumajang untuk menjamin bahwa sector usaha yang terdampak langsung dapat tetap memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Bentuk-bentuk insentif yang diberikan dalam upaya mendukung upaya pencegahan dan penanganan utamanya dalam masa PPKM diantaranya:

1. Pemberian Keringanan Retribusi sebesar 50% yang diberikan kepada Pemilik Rumah Toko (Ruko); Pemilik Toko/Pertokoan; Toko Emas (di dalam atau di luar Pasar); Kios yang menghadap ke jalan umum; Pemilik Rumah Makan; dan Pemilik cafe.
2. Pemberian Pembebasan Retribusi diberikan kepada penjual yang menempati bangunan permanen atau semi permanen yang ada di

dalam pasar, meliputi Kios menghadap ke dalam; Bedak; Los; dan Gerabatan

3. Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat Bagi Pemudik dengan Tujuan Kabupaten Lumajang Selama Masa Tanggap Darurat Corona Virus Disease (COVID-19). Jenis-jenis pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya meliputi : (a). rawat jalan pemeriksaan kesehatan umum (termasuk obat) non tindakan; (b). pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan rekomendasi/ surat keterangan kesehatan.
4. Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Daerah kepada Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran atas pajak terutang sampai dengan Tahun Pajak 2020 yang meliputi : (a). pajak hotel; (b). pajak restoran; (c). pajak hiburan; (d). pajak reklame; (e). pajak parkir; (f). pajak air tanah; (g). pajak mineral bukan logam dan batuan; (h). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan (i). pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
5. Pemberian keringanan dan pembebanan biaya sewa rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi warga terdampak Corona Virus
6. Pembebasan pembayaran tagihan langganan air minum pada perusahaan air minum bagi masyarakat pelanggan perusahaan daerah air minum dalam upaya penanganan dampak corona virus 2019
7. Pembebasan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dalam rangka penanganan pandemic Corona Virus disease 2019

Beberapa upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 untuk peningkatan pendapatan Kabupaten Lumajang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama dalam hal pelayanan kemudahan berinvestasi dan berusaha. Upaya penyampaian SOP yang jelas dengan ketepatan waktu pelayanan yang baik akan meningkatkan indeks layanan serta kepuasan masyarakat sehingga akan mendongkrak iklim investasi yang baik;
2. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi pengelolaan sumberdaya alam di Kabupaten Lumajang yang salah satunya sebagai dukungan terhadap pengembangan KSPN Bromo Tengger Semeru yang mencakup 3 hal yaitu peningkatan infrastruktur, SDM dan daya saing ekonomi;

3. Meningkatkan kapasitas SDM baik aparaturn pemerintah maupun kelompok usaha dan masyarakat melalui diklat, pelatihan, bimbingan teknis baik pelayanan, administrasi dan teknis. Hal ini untuk meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membantu pembangunan di Kabupaten Lumajang
4. Menyediakan dan mengoptimalkan pelaksanaan regulasi yang ada untuk meningkatkan keteraturan dalam penyelenggaraan pembangunan dan iklim usaha di Kabupaten Lumajang
5. Meningkatkan kinerja dan pelayanan Badan Usaha Milik daerah sebagai upaya kontribusi dalam meningkatkan pendapatan
6. Meningkatkan koordinasi sektor pendapatan secara holistik melalui pemantapan kelembagaan dan jaringan komunikasi

Rincian realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019-2021 dan proyeksi 2023 sebagaimana tabel T-C. 20.

Tabel 3. 7 T-C.20 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Lumajang Tahun 2019 s.d Tahun 2023

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi 2023
4	PENDAPATAN	2.186.593.815.093,29	2.118.849.571.641,14	2.161,880,436,241.41	2,109,082,604,028.00	2,159,948,018,718.00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	296.467.374.174,37	300.263.112.642,77	325,045,892,762.36	307,074,607,855.00	338,471,890,176.00
4.1.1	HASIL PAJAK DAERAH	74.232.832.052,00	68.659.995.181,00	81,665,216,472.00	92,415,000,000.00	92,415,000,000.00
4.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	58.197.444.588,18	46.060.581.317,00	32,014,323,150.50	22,677,767,980.00	22,677,767,980.00
4.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4.968.766.089,07	5.105.516.366,26	4,711,388,731.48	7,964,099,000.00	7,964,099,000.00
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	159.068.331.445,12	180.437.019.778,51	206,654,964,408.38	184,017,740,875.00	215,415,023,196.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.774.505.135.577,00	1.725.518.141.013,00	1,702,191,186,437.14	1,670,916,091,898.00	1,690,384,224,267.00
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.597.581.988.971.00	1.498.576.597.474,00	1,577,810,506,714.00	1,530,079,792,098.00	1,509,557,031,107.00
4.2.1.1	DANA TRANSFER UMUM	1.098.363.944.965,00	998.183.989.661,00	1.026.276.652.222,00	1.000.955.571.764,00	1,025,262,244,666.00
	BAGI HASIL PAJAK	17.345.158.115,00	23.800.062.748,00	35.512.873.266,00	26,006,761,000.00	29,407,192,030.00
	BAGI HASIL SDA	77.925.877.850,00	66.217.220.913,00	64.535.081.354,00	53,522,470,000.00	72,230,829,636.00
	BAGI HASIL CUKAI	1.003.092.909.000,00	908.166.706.000,00	26.776.425.602,00	25,046,811,000.00	24,171,951,000.00
	DANA ALOKASI UMUM	1.003.092.909.000,00	908.166.706.000,00	899.452.272.000,00	896.379.529.764,00	899,452,272,000.00
4.2.1.2	DANA TRANSFER KHUSUS	310.748.965.606,00	273.028.230.813,00	264.650.636,292,00	326,043,962,334.00	281,214,528,441.00

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi 2023
	DAK FISIK	310.748.965.606,00	273.028.230.813,00	107,536,218,200	97.936.818.600,00	67,298,281,220.00
	DAK NON FISIK	-	-	157,114,418,092	228,107,143,734.00	213,916,247,221.00
4.2.1.3	DANA INSENTIF DAERAH	-	-	-	0	0
4.2.1.4	DANA OTONOMI KHUSUS	-	-	-	0	0
4.2.1.5	DANA KEISTIMEWAAN	-	-	-	0	0
4.2.1.6	DANA DESA	188.469.078.400,00	227.364.377.000,00	242.064.327.200,00	203,080,258,000,00.	203,080,258,000,00.
4.2.2	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	176.923.146.606,00	226.941.543.539,00	169.199.570.723,00	123,890,061.157,00	180.827.193.160,00
4.2.2.1	PENDAPATAN BAGI HASIL	176.923.146.606,00	226.941.543.539,00	160.263.732.366,00	117.709.422.800,00	141,881,373,800.00
	BAGI HASIL PAJAK PROVINSI	143.138.787.606,00	123.312.451.789,00	160.263.732.366,00	117,709,422,800.00	141,881,373,800.00
	BAGI HASIL LAINNYA	33.784.359.000,00	103.629.091.750,00	-	-	-
4.2.2.2	BANTUAN KEUANGAN	-	-	8.935.838.357,00	6.180.638.357,00	38.945.819.360,00
	BANTUAN KEUANGAN DARI DAERAH PROPINSI	-	-	8.935.838.357,00	6,180,638,357.00	38,945,819,360.00
	BANTUAN KEUANGAN DARI DAERAH KAB/KOTA	-	-	-	-	-

No	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi 2023
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	115.621.305.341,92	93.068.317.985,37	134.643.357.041,91	131,091,904,275.00	131,091,904,275.00
4.3.1	PENDAPATAN HIBAH	115.280.781.160,00	90.502.574.768,00	22.351.760.226,00	20,320,904,275.00	20,320,904,275.00
4.3.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN	340.524.181,92	2.565.743.217,37	112.291.596.815,91	110,771,000,000.00	110,771,000,000.00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA 2019, 2020, 2021); P-RPJMD Kab. Lumajang Tahun 2018-2023

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga menggiatkan pada upaya mencari sumber-sumber dana pembangunan yang berasal dari APBN dan Provinsi. Diharapkan dengan menggiatkan upaya ini akan semakin meningkatkan alokasi dana yang diberikan ke Kabupaten Lumajang. Selain itu pula diharapkan akan semakin banyak proyek-proyek yang dibiayai pemerintah pusat dan provinsi dilaksanakan di Kabupaten Lumajang dengan harapan akan semakin memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dan memperkuat infrastruktur daerah.

Upaya peningkatan perolehan pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah tentu pula semakin dipacu. Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama dari PAD dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal dan nasional. Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memacu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat. Dengan demikian diharapkan peningkatan perolehan PAD merupakan dampak dari semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat dan merupakan suatu sinergitas dengan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Di samping itu, peningkatan retribusi daerah akan dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan publik yang diberikan.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini masih menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Lumajang. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi peran PAD dan pendapatan dari pemerintah pusat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang wajib berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru untuk dikembangkan. Upaya peningkatan yang dimaksud adalah melalui kebijakan revitalisasi pemungutan sumber/potensi pendapatan yang sudah ada, penciptaan sumber/potensi baru, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah termasuk juga peningkatan kinerja/penyehatan Badan Usaha Milik Daerah.

3.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah secara umum diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Data realisasi belanja daerah Kabupaten Lumajang pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Jumlah Belanja Kabupaten Lumajang tahun 2021 sebesar Rp. 2.232.107.634.781 dengan komposisi 73% untuk belanja operasi 7 yaitu sebesar Rp. 1.618.197.869.593 dengan rincian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Komposisi 16% untuk belanja transfer yaitu sebesar Rp. 362.278.367.900 yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Kemudian 10% belanja untuk belanja modal

sebesar Rp. 224.631.397.288 dan 1% untuk belanja tidak terduga yaitu sebesar Rp. 27.000.000.000.

Kebijakan belanja yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk tahun anggaran 2016-2020 diarahkan untuk melaksanakan program/kegiatan prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan menerapkan fungsi alokasi dan distribusi pengeluaran anggaran yang tepat, melalui kebijakan:

1. Merasionalkan pengeluaran atau belanja secara adil dan dapat dinikmati hasilnya secara proporsional oleh masyarakat luas;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Anggaran kegiatan dengan menetapkan pencapaian tujuan dan sasaran secara jelas;
3. Anggaran disusun dengan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja;
4. Menerapkan Disiplin Anggaran yang didasarkan atas skala prioritas yang telah ditetapkan, terutama program yang ditujukan pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan;
5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran melalui perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta evaluasi kegiatan secara terbuka baik teknis maupun ekonomi kepada pihak legislatif dan masyarakat;
6. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
7. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Lumajang yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
8. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, belanja bagi hasil, dan belanja operasional dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Pada tahun 2023, alokasi belanja untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 masih tetap dilaksanakan seperti halnya pemenuhan peralatan dan perlengkapan Kesehatan, pencapaian herd immunity melalui Gerakan vaksin ke seluruh elemen masyarakat, bantuan-bantuan untuk merangsang pemulihan ekonomi masyarakat serta kegiatan-kegiatan kampanye, edukasi dan sosialisasi sebagai upaya peningkatan kapasitas dari sisi sosial dan perilaku masyarakatnya.

Rincian realisasi Belanja Daerah Tahun 2019-2020 serta Proyeksi Belanja Kabupaten Lumajang Tahun 2021-2023 sebagaimana tabel T-C.21.

Tabel 3. 8 T-C 21 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 s.d Tahun 2023

NO	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun berjalan 2022	Proyeksi 2023
5	BELANJA	2.229.227.269.039,51	2,028,732,782,607.05	2,150,424,463,378,39	2,246,286,430,591.00	2,136,356,157,231.00
5.1	BELANJA OPERASI	1,593,976,061,580.43	1.479.285.551.604,79	1,556,327,937,520.29	1,622,186,274,181.00	1,602,613,749,213.00
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	780,427,298,106.50	741.631.927.441,00	801,049,030,923.46	842,693,557,621.00	839,760,561,069.00
5.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	599,495,571,358.03	555,859,126,089.79	554,887,017,328.26	570,466,430,448.00	565,134,865,004.00
5.1.5	BELANJA HIBAH	159,157,268,656.90	125,225,839,973.00	170,678,751,768.57	176,785,098,140.00	176,785,098,140
5.1.6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	54,895,923,459.00	56,568,658,101.00	29,713,137,500.00	20,933,225,000.00	20,933,225,000
5.2	BELANJA MODAL	247,326,031,850.58	198,145,592,481.26	211,211,038,105.98	218,662,716,902.00	141,554,556,822.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.608.071.300,00	18,033,773,257.00	22,985,623,243.32	52,558,268,952.00	40,000,000,000.00
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.608.071.300,00	18,033,773,257.00	22,985,623,243.32	52,558,268,952.00	40,000,000,000.00
5.4	BELANJA TRANSFER	386.317.104.309,00	333,267,865,264.00	359,899,864,510.80	352,879,170,556.00	352,187,851,196
5.4.1	BELANJA BAGI HASIL	7.098.522.081,00	-	7,464,059,814.00	7,270,293,196.00	7,270,293,196
	BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA	7.098.522.081,00	-	3,709,457,192.00	4,245,540,784	4,245,540,784
	BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA	-	-	3,754,602,622.00	3,024,752,412	3,024,752,412
5.4.2	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	379.218.582.228,00	333.267.865.264,00	352,435,804,696,00	345,608,877,360	344,917,558,000.00
	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN	379.218.582.228,00	333.267.865.264,00	352,435,804,696,00	345,608,877,360	344,917,558,000.00

NO	Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun berjalan 2022	Proyeksi 2023
	DESA DAN PARTAI POLITIK					
	JUMLAH BELANJA	2.229.227.269.039,51	2,028,732,782,607.05	2.150.424.463.380,39	2,246,286,430,591.00	2,136,356,157,231.00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(42.633.453.946,72)	90.116.789.034,09	11,455,972,861,10	(137,203,826,563.00)	23,591,861,487.00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA 2019, 2020, 2021); P-RPJMD Kab. Lumajang Tahun 2018-2023

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang untuk 5 tahun ke depan difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Upaya dimaksud diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum berupa infrastruktur yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, melalui penyediaan belanja urusan wajib yang secara regulasi sudah diamanatkan oleh peraturan perundangan meliputi :
 - a. Fungsi Pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja daerah;
 - b. Fungsi Kesehatan minimal paling sedikit 10% dari total belanja daerah diluar gaji;
 - c. Penggunaan Dana transfer umum yang penggunaannya diarahkan sebesar 25% untuk belanja infrastruktur;
 - d. Pemberian bantuan sosial akibat dampak pandemi;
 - e. Dukungan terhadap pencapaian SDG's/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - f. Anggaran fungsi pengawasan serta alokasi kelurahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - i. termasuk pada bagian ini adalah keagamaan khususnya fasilitas peribadatan masyarakat.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan usaha perekonomian masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pembangunan urusan pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan dan perkebunan, pariwisata, perdagangan, perindustrian dan perkoperasian.
3. Disamping itu peningkatan belanja daerah juga lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur, sehingga mampu menjadi aparatur yang handal dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diembannya serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima di masyarakat.
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas

pembangunan yang diharapkan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan reformasi birokrasi.
6. Tolak ukur dan target kinerja Belanja Daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.
7. Optimalisasi Belanja Modal yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif
8. Setiap pengeluaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan.
9. Perbaikan sistem Kesehatan, Pendidikan, dan kewirausahaan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
10. Penguatan struktur ekonomi kerakyatan yang berkualitas dengan membangkitkan keunggulan pertanian, perikanan, dan industri.
11. Pengembangan ekonomi keluarga dan desa untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dalam rangka pemerataan hasil pembangunan yang berkeadilan.
12. Perbaikan penataan ruang dan permukiman berdasarkan prinsip pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
13. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (b) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (c) Penerimaan Pinjaman Daerah; (d) Penerimaan

- Kembali Pemberian Pinjaman; (e) Penerimaan Piutang Daerah, dan (f) Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
2. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk (a) Pembentukan Dana Cadangan; (b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; (c) Pembayaran Pokok Utang; dan (d) Pemberian Pinjaman Daerah.

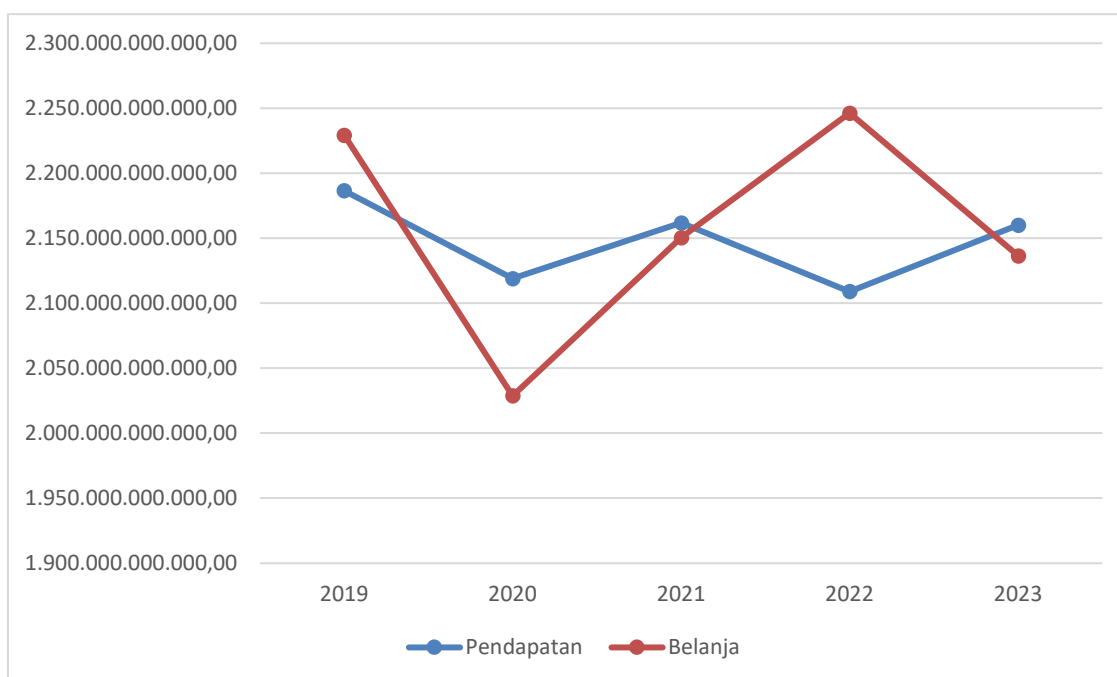
Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Penerimaan Pembiayaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, namun besarnya SiLPA tahun lalu perkembangannya cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Lumajang masih perlu ditingkatkan akurasi dan realibilitasnya. Pada aspek lain, analisis terhadap Pembiayaan Daerah di Kabupaten Lumajang tidak bisa dilakukan secara lebih mendetail karena terbatasnya ketersediaan data pendukung.

Secara umum permasalahan pembiayaan yang terjadi di daerah adalah kesulitan dalam mencari sumber pembiayaan guna menutup defisit anggaran. Apabila SiLPA tahun lalu tidak dapat menutup defisit yang terjadi, maka daerah dapat melakukan pencairan dana cadangan, menjual kekayaan daerah yang dipisahkan maupun melakukan pinjaman daerah. Di Kabupaten Lumajang, defisit yang terjadi dapat ditutup melalui SiLPA tahun lalu, sehingga secara garis besar Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak mempunyai permasalahan dalam menentukan sumber pembiayaan daerah.

Total APBD Kabupaten Lumajang pada tahun 2020 mengalami surplus sebesar Rp. 90.116.789.034,09, yang berarti bahwa jumlah belanja lebih rendah daripada alokasi pendapatan yang ada. Kondisi ini tentunya berbeda dengan tahun 2019 yang mengalami defisit. Pada tahun 2021 APBD Kabupaten Lumajang tidak mengalami defisit tetapi tahun 2022 diproyeksikan akan mengalami defisit. Secara umum permasalahan pembiayaan yang terjadi di daerah adalah kesulitan dalam mencari sumber pembiayaan guna menutup defisit anggaran. Apabila SiLPA tahun lalu tidak dapat menutup defisit yang terjadi, maka daerah dapat melakukan pencairan dana cadangan, menjual kekayaan daerah yang dipisahkan maupun melakukan pinjaman daerah. Di Kabupaten Lumajang, defisit yang terjadi dapat ditutup melalui SiLPA tahun lalu, sehingga secara garis besar Pemerintah

Kabupaten Lumajang tidak mempunyai permasalahan dalam menentukan sumber pembiayaan.



Gambar 3. 5 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023

Sumber penerimaan pembiayaan Kabupaten Lumajang pada tahun 2022 tetap pada sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), serta penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan pembentukan dana cadangan sebagai persiapan pemilihan kepala daerah tahun 2023 serta pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan Pembangunan Daerah yang tidak dapat dipenuhi dengan anggaran APBD perlu dicarikan solusi dengan pembiayaan Non APBD yaitu:

1. Dana CSR, merupakan dana yang berasal dari perusahaan. Komitmen perusahaan dalam pengembangan ekonomi yang berkesinambungan dalam kaitannya dengan karyawan beserta keluarganya, masyarakat sekitar dan masyarakat luas pada umumnya. Dana CSR digunakan untuk membiayai prioritas pembangunan yang tidak didanai oleh pemerintah, hal ini merupakan kepedulian perusahaan terhadap pembangunan daerah.
2. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA) Skema KPBU mencakup 19 sektor yang dapat dikerjasamakan Pemerintah Indonesia meliputi konektivitas, perkotaan, dan sosial. Skema PINA

memiliki tiga fungsi utama. Pertama, fungsi fasilitasi untuk memfasilitasi proyek-proyek untuk mencapai tahap financial close, serta memberikan saran penstrukturan proyek dan pembiayaan. Kedua, fungsi ekosistem untuk membangun iklim investasi infrastruktur melalui pengkajian regulasi serta percepatan implementasi instrumen creative financing. Ketiga, fungsi pipelining untuk mempersiapkan daftar proyek yang siap ditawarkan kepada investor serta potensial investor yang akan berinvestasi.

Tabel 3. 9 T-C.22 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 s.d Tahun 2023

NO	URAIAN	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahu Berjalan 2022	Proyeksi 2023
3	PEMBIAYAAN	130.844.409.582,33	88,542,490,226.24	221.145.999.960,00	137,203,826,563.00	-100,000,000,000.00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	141.544.909.582,33	88,542,490,226.24	212.703.825.963,00	212,703,825,963.00	-
6.1.1	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	141.024.677.582,33	88,217,717,326.24	178.539.279.260,00	154,604,673,000.00	-
6.1.2	PENCAIRAN DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
6.1.3	HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	-	-	-	-	-
6.1.4	PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH	-	-	41,730,007,100.00	58,099,152,963.00	-
6.1.5	PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH	520.232.000,00	324,772,900.00	1,376,713,600.00	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.700.500.000,00	-	500.000.000,00	75,499,999,400.00	100,000,000,000.00
6.2.1	PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	-	-	-	15,000,000,000.00	20,000,000,000.00
6.2.2	PENYERTAAN MODAL DAERAH	8.599.000.000,00	-	500.000.000,00	500,000,000.00	-
6.2.3	PEMBAYARAN CICILAN POKOK UTANG YANG JATUH TEMPO	-	-	-	59,999,999,400.00	80,000,000,000.00
6.2.4	PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH	2.101.500.000,00	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	130.844.409.582,33	88,542,490,226.24	221.145.999.960,00	137,203,826,563.00	(100,000,000,000.00)
3.3	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN	87.870.431.454,19	178,659,279,260.33	232,601,972,821.10	-	(76,408,138,513)

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (LRA 2019, 2020, 2021); P-RPJMD Kab. Lumajang Tahun 2018-2023

Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Pada Tahun Anggaran 2021, akan dilakukan Penerimaan Pembiayaan dalam bentuk Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 200.000.000.000,- yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dalam bentuk peningkatan kualitas 40 ruas jalan. Pinjaman Daerah ini akan dilunasi dalam durasi 3 Tahun Anggaran sebagaimana telah dijelaskan secara detail pada tabel 3.10.

Pada aspek Pengeluaran Pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada:

1. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo;
2. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan; serta
3. Kebijakan yang dilakukan dalam konteks Pengeluaran Pembiayaan harus mempertimbangan aspek efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Maksud dan Tujuan Pendirian BUMD sendiri adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, serta memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Kabupaten Lumajang memiliki 3 BUMD diantaranya adalah:

1. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Mahameru
Perumda Air Minum Tirta Mahameru didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 6

Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang diubah status badan hukumnya menjadi Perumda Air Minum Tirta Mahameru melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahameru.

Perumda Air Minum Tirta Mahameru bergerak di bidang layanan air minum bagi masyarakat Lumajang. Area layanannya meliputi 12 Kecamatan dari 21 kecamatan yang ada. Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Mahameru meliputi:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat;
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

2. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Bank Lumajang

Bergerak di bidang jasa keuangan, didirikan berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lumajang. Berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Lumajang, tujuan didirikannya Perumda BPR Bank Lumajang ini adalah untuk:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah
- b. Memperluas akses keuangan kepada masyarakat
- c. Mendorong pembiayaan usaha mikro dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
- d. Mendirikan Bank Lumajang dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik
- e. Memperoleh laba dan keuntungan.

3. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Semeru

Perusahaan Daerah Semeru Kabupaten Lumajang pertama kali didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Semeru Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2004 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 11), berubah bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah yang bernama Perusahaan Umum Daerah Semeru melalui

Perda nomor 5 tahun 2020. Perusahaan ini di bentuk dengan tujuan:

- a. menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Bidang usaha Perumda Semeru meliputi :

- a. produksi;
- b. distribusi;
- c. pengolahan;
- d. jasa;
- e. perdagangan;
- f. properti;
- g. percetakan;
- h. pariwisata;
- i. pertambangan;
- j. kerjasama investasi.

3.2.4 Proyeksi Keuangan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Lumajang memberikan informasi mengenai pendapatan daerah yang diperkirakan dapat dicapai oleh pemerintah Kabupaten Lumajang pada 3 tahun ke depan. Pertimbangan utama yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan proyeksi adalah analisi trend yang didasarkan pada data historis dalam 5 tahun terakhir pada masing-masing obyek pendapatan.

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk 5 Tahun ke depan diproyeksikan meningkat. Dengan memperhatikan perkembangan parameter makro ekonomi yang fluktuatif dan tidak menentu selama beberapa tahun terakhir terutama akibat adanya pandemi Covid-19, pendapatan daerah diproyeksikan tumbuh dalam tingkatan moderat. Proyeksi ini disusun dengan mengedepankan aspek kepastian pendapatan utamanya sektor penerimaan dari Dana Perimbangan serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penghitungan potensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selain hal tersebut diatas, untuk mendukung tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, opsional pembiayaan dari dana non APBD melalui pinjaman daerah juga dilakukan pada tahun 2021 ini. Untuk dana pinjaman daerah, Pemerintah Daerah telah bekerjasama dengan PT. SMI sebesar Rp. 200.000.000.000,-.

Pinjaman daerah tersebut dilatarbelakangi oleh potensi bahwa Kabupaten Lumajang sebagai daerah pertanian, pertambangan dan jasa mengalami dampak akibat adanya pandemi Covid-19 yang perlu dioptimalkan pengelolaannya melalui stimulant penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang sebagai upaya untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan ekonomi daerah.

Penggunaan dana pinjaman daerah diatas diarahkan pada kegiatan peningkatan ruas jalan kabupaten sebanyak 40 ruas jalan dengan lingkup pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

1. Pekerjaan hotmix 2 lapis;
2. Pekerjaan saluran drainase;
3. Pekerjaan talud/dinding penahan tanah

Adapun perhitungan nilai proyek dan profil Pinjaman Daerah secara detail dideskripsikan sebagai berikut:

1. Plafond Pinjaman : Rp. 200.000.000.000
2. Jangka Waktu : 3 Tahun
3. Masa Tenggang : 6 Bulan
4. Biaya Provisi : Rp. 2.000.000.000
5. Biaya Pengelolaan : Rp. 690.666.670,86
6. Bunga (Asumsi) : 5,3

Mekanisme pencairan pinjaman dilakukan dalam 2 termin, yaitu termin pertama pada tahun 2021 sebesar 140.000.000.000 dan termin kedua pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh milyar). Pembayaran Pinjaman Daerah dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun yaitu tahun 2022 sampai dengan 2024. Proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran dari pinjaman daerah sebagaimana tabel berikut:

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Pencairan Pinjaman	140.000.000.000	60.000.000.000		
2	Biaya Provisi		2.000.000.000		
3	Jumlah Pembayaran				
	a. Pokok Pinjaman		59.999.999.400	79.999.999.200	60.000.001.400

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
	b. Bunga (setelah subsidi)	881.861.110	9.011.962.972	5.543.407.460	1.343.648.214
	c. Biaya Pengelolaan	370.000.000	296.000.001	148.000.002	0
4	Saldo Pinjaman		140.600.000.000	60.000.001.400	

Tabel 3. 10 Skenario Pembayaran Pinjaman Daerah Kabupaten Lumajang

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited, 2021

Pemanfaatan Pinjaman Daerah di Kabupaten Lumajang yang digunakan untuk pekerjaan peningkatan jalan setiap tahunnya, dilakukan oleh penyedia jasa/kontraktor pelaksana yang berasal dari pengusaha lokal. Untuk pembelian/pengadaan bahan baku berasal dari Kabupaten Lumajang dengan menggunakan material pasir dan batu. Sehingga dengan adanya pekerjaan peningkatan jalan yang dilakukan oleh penyedia jasa/kontraktor pelaksana yang berasal dari pengusaha lokal dan juga mempergunakan material lokal maka diharapkan memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat dan juga diharapkan perekonomian di Kabupaten Lumajang segera pulih seperti sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Pada proyeksi anggaran pendapatan dan belanja daerah, juga dianggarkan dana cadangan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) sebagaimana pembentukan dana cadangan ini pada tahun 2024 telah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan *schedule* penganggaran pada tahun 2022 dan tahun 2023.

Di samping itu juga didasarkan pada realitas dan proporsionalitas pertumbuhan Belanja Daerah baik yang dialokasikan pada Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, maupun Belanja Tidak Terduga. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021-2023 disajikan dalam tabel 3.20 dan Tabel 3.21 di bawah ini:

Tabel 3. 11 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Lumajang

No	Uraian	Tahun Dasar (2020)	Pertumbuhan	2021	2022	2023
		Rp	%	Rp	Rp	Rp
A	Belanja Operasi					
1	Belanja Pegawai	741.631.927.441,00	1,87	801.049.030.923,00	842.693.557.621,00	839.760.561.069,00
2	Belanja Barang	555.859.126.089,79	(4,68)	544.887.017.328,26	570.466.430.448,00	559.443.457.542,00
3	Bunga	-	376,81	1.251.861.110,00	11.307.962.972,00	5.691.407.462,00
4	Subsidi	-	0,00	-	-	-
5	Hibah	125.225.839.973,00	3,13	170.678.751.768,57	176.785.098.140,00	191.994.089.224,00
6	Bantuan Sosial	56.568.658.101,00	(12,73)	29.713.137.500,00	20.933.225.000,00	20.933.225.000,00
7	Bantuan Keuangan Partai Politik	1.069.827.348,00	0,00	1.069.827.348,00	-	-
	Total Belanja Operasi	1.480.355.378.952,79	(0,71)	1.671.286.658.147,00	1.622.186.274.181,00	1.602.613.749.213,00
B	Belanja Modal					
1	Belanja Tanah	747.987.360,00	48,13	885.720.000,00	1.729.519.000,00	1.082.629.175,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	61.177.461.037,90	(18,45)	69.738.231.892,00	43.306.917.137,00	37.094.782.033,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	23.973.023.775,62	(15,37)	56.709.177.263,00	38.708.493.731,00	25.901.546.056,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.925.745.491,74	(33,02)	210.366.886.854,00	127.127.334.244,00	70.972.831.630,00

No	Uraian	Tahun Dasar (2020)	Pertumbuhan	2021	2022	2023
		Rp	%	Rp	Rp	Rp
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.346.598.272,00	(7,78)	9.336.272.516,00	7.790.452.790,00	6.556.767.928,00
6	Belanja Aset Lainnya	3.974.776.544,00	0,00	-	-	-
	Total Belanja Modal	198.145.592.481,26	(25,98)	347.036.288.525,00	218.662.716.902,00	141.554.556.822,00
C	Pembiayaan Pengeluaran					
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	(50,00)	500.000.000,00	500.000.000,00	-
3	Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat	-	-	-	-	-
4	Pembayaran Utang Belanja Pemerintah Daerah	-	-	-	59.999.999.400,00	80.000.000.000,00
	Total Pembiayaan Pengeluaran	-	7.518,21	500.000.000,00	75.499.999.400,00	100.000.000.000,00

Tabel 3. 12 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021-2023

No	Uraian	Pertumbuhan	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN	-			
11	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
111	Pendapatan Pajak Daerah	3,61	81.665.216.472,00	92.415.000.000,00	92.415.890.000,00
112	Pendapatan Retribusi Daerah	-17,56	32.014.323.150,50	22.677.767.980,00	22.677.767.980,00
113	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,66	4.711.388.731,48	7.964.099.000,00	7.964.099.000,00
114	Lain-lain PAD yang Sah	6,92	206.654.964.408,38	184.017.740.875,00	215.415.023.196,00
115	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2,97	325.045.892.762,36	307.074.607.855,00	338.471.890.176,00
12	PENDAPATAN TRANSFER				
121	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5,71	1.284.076.440.566,00	1.547.026.030.741,00	1.509.557.031.107,00
122	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	242.440.169.000,00		
123	TRANSFER PEMERINTAH	5,13	126.522.261.157,00	123.890.061.157,00	180.827.193.160,00

No	Uraian	Pertumbuhan	2021	2022	2023
	PROVINSI				
	Total Pendapatan Transfer	(3,19)	1.702.191.186.437,14	1.670.916.091.898,00	1.690.384.224.267,00
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
131	Pendapatan Hibah	-20,19	22.351.760.226,00	20.320.904.275,00	20.320.904.275,00
132	Pendapatan Dana Darurat	0,00			
133	Pendapatan Lainnya	11,54	112.291.596.815,91	110.771.000.000,00	110.771.000.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2,53	134.643.357.041,91	131.091.904.275,00	131.091.904.275,00
	JUMLAH PENDAPATAN	(1,94)	2.161.880.436.241,00	2.109.082.604.028,00	2.159.948.081.718,00
2	BELANJA				
21	BELANJA OPERASI				
211	Belanja Pegawai	1,87	801.049.030.923,46	842.693.557.621,00	839.760.561.069,00
212	Belanja Barang	-4,68	554.887.017.328,26	570.466.430.448,00	559.443.457.542,00
213	Bunga	376,81	1.251.861.110,00	11.307.962.972,00	5.691.407.462,00
214	Subsidi	0,00	-	-	

No	Uraian	Pertumbuhan	2021	2022	2023
215	Hibah	3,13	170.678.751.768,57	176.785.098.140,00	191.994.089.224,00
216	Bantuan Sosial	-12,73	29.713.137.500,00	20.933.225.000,00	20.933.225.000,00
217	Bantuan Keuangan Partai Politik	0,00	-	-	-
	Jumlah Belanja Operasi	(0,71)	1.556.327.937.520,29	1.622.186.274.181,00	1.602.613.749.231,00
22	BELANJA MODAL				
221	Belanja Tanah	48,13	885.720.000,00	1.729.519.000,00	1.082.629.175,00
222	Belanja Peralatan dan Mesin	-18,45	69.738.231.892,00	43.306.917.137,00	37.094.782.033,00
223	Belanja Gedung dan Bangunan	-15,37	56.709.177.263,00	38.708.493.731,00	25.901.546.056,00
224	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-33,02	210.366.886.854,00	127.127.334.244,00	70.972.831.630,00
225	Belanja Aset Tetap Lainnya	-7,78	9.336.272.516,00	7.790.452.790,00	6.556.767.928,00
226	Belanja Aset Lainnya				
	Jumlah Belanja Modal	(25,98)	211.211.038.105,98	218.662.716.902,00	141.554.556.822,00
23	BELANJA TAK TERDUGA				
231	Belanja Tak Terduga	16,77	22.985.623.243,32	52.558.268.952,00	40.000.000.000,00

No	Uraian	Pertumbuhan	2021	2022	2023
	Jumlah Belanja Tak Terduga	16,77	22.985.623.243,32	52.558.268.952,00	40.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	(4,69)	1.790.524.598.869,50	1.893.407.260.035,00	1.784.168.306.053,00
24	TRANSFER				
241	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
2411	Bagi Hasil Pajak	48,50	3.709.457.192,00	7.270.293.196,00	7.270.293.196,00
2412	Bagi Hasil Retribusi	0,00	3.754.602.622,00	-	-
2413	Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Desa	1,47	352.435.804.696,00	345.608.877.360,00	344.917.558.000,00
	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	1,43	359.899.864.510,00	352.879.170.556,00	352.187.851.196,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	(3,75)	2.150.424.463.379,50	2.246.286.430.591,00	2.136.356.157.231,00
	SURPLUS/DEBIT	2,32	11.455.972.862,00	(137.203.826.563,00)	23.591.861.487
3	PEMBIAYAAN				

No	Uraian	Pertumbuhan	2021	2022	2023
31	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
311	Penggunaan SILPA	-28,27	178.659.279.260,00	154,604,673,000.00	-
312	Pencairan Dana Cadangan	0,00	-	-	-
313	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-79,25	41,730,007,100.00	58.099.152.963,00	-
314	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	1,376,713,600.00	-	-
315	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	-	-	-
	Jumlah Penerimaan	(45,99)	221.645.999.960,00	212.703.825.963,00	-
32	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				

No	Uraian	Pertumbuhan	2021	2022	2023
321	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	-	15.000.000.000,00	20.000.000.000,00
322	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-50,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
323	Pemberian Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	-	-	-
324	Pembayaran Utang Belanja Pemerintah Daerah	0,00		59.999.999.400,00	80.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran	7.518,21	500.000.000,00	75.499.999.400,00	100.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(83,94)	221,145,999,960.00	137.203.826.563,00	(100.000.000.000,00)
33	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	232,601,972,821.00	-	(76.408.138.513,00)

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited, 2021

Berdasarkan data tentang proyeksi Pendapatan dan Belanja sebagaimana tersaji di atas, maka dapat dihitung proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang untuk Mendanai Pembangunan Daerah. Data tentang proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang untuk Mendanai Pembangunan Daerah dituangkan dalam tabel 3.14:

Tabel 3. 13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021-2023

No	Uraian	Proyeksi		
		2021	2022	2023
1	Pendapatan	2.088.249.570.888	2.109.082.604.028	2.159.948.018.718
2	Pencairan Dana Cadangan	-	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	178.659.279.260	154.604.673.000	0
	Total Penerimaan	2.266.908.850.148	2.263.687.277.028	2.159.948.018.718
	<i>Dikurangi:</i>			
4	Belanja Operasi (Selain Belanja Barang dan Jasa)	1.027.190.329.440	1.051.719.843.733	1.037.478.884.209
5	Belanja Tidak Terduga	28.259.968.080	52.558.268.952	40.000.000.000
6	Belanja Transfer	360.325.935.396	352.879.170.556	352.187.851.196
7	Pengeluaran Pembiayaan	500.000.000	75.499.999.400	100.000.0000.00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	850.632.617.232	731.029.994.387	630.281.283.313

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Audited, 2021

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana tertuang pada tabel 3.14, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

Prioritas I, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prioritas II, adalah program prioritas ditingkat organisasi perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan program unggulan perangkat daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi perangkat daerah. Termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan perangkat daerah untuk mendukung visi misi pembangunan daerah secara holistik. Kebijakan alokasi anggaran untuk prioritas II diarahkan pada:

1. Sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama bagi masyarakat miskin;
2. Pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung pembangunan sektor pertanian, dan pencegahan terhadap bencana alam, serta sekaligus yang dapat memperluas lapangan kerja di pedesaan;
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanganan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan melalui revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;

4. Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja operasi seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III dengan memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas antara lain sebagai berikut:

1. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi/distribusi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
2. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Mengacu pada skema tersebut, berikutnya ditentukan prosentase anggaran yang dialokasikan untuk mendanai prioritas-prioritas di atas dengan komposisi sebagai berikut:

1. Prioritas I sebesar 50 dari Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
2. Prioritas II sebesar 30 dari Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
3. Prioritas III sebesar 20 dari Kapasitas Riil Kemampuan Daerah

Berdasarkan formula tersebut, dapat diketahui besaran proyeksi alokasi anggaran untuk masing-masing Prioritas sebagaimana dituangkan pada tabel 3.14:

Tabel 3. 14 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No	Uraian	Proyeksi		
		2021	2022	2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	850,632,617,232	731,029,994,387	630,281,283,313
2	Prioritas I (50)	425,316,308,616	365,514,997,194	315,140,641,657
3	Prioritas II (30)	255,189,785,170	219,308,998,316	189,084,384,994
4	Prioritas III (20)	170,126,523,446	146,205,998,877	126,056,256,663

Sumber : BPKD Kabupaten Lumajang, Data Diolah

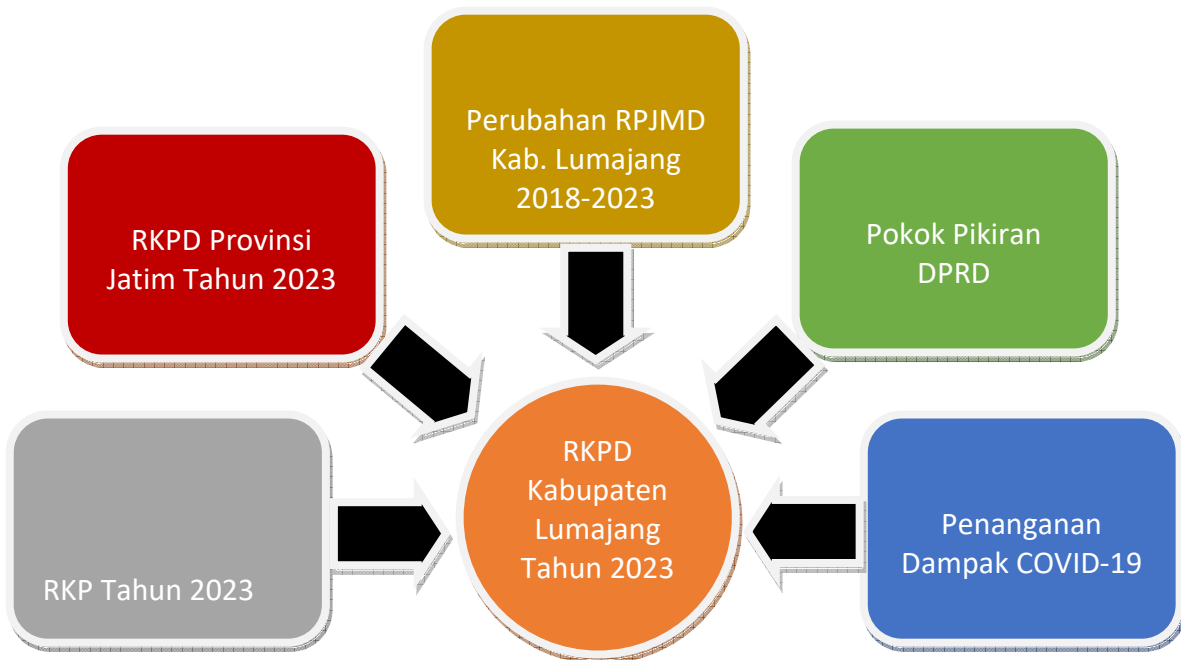
BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada RKPD diarahkan untuk mencapai target janji serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang 2018-2023. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah ditentukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada RKPD tahun 2023 mendasarkan dan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang tercantum pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
2. Arah kebijakan pada Perubahan RPJMD (P-RPJMD) Kabupaten Lumajang 2018-2023 di tahun 2023;
3. Solusi terhadap permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Lumajang yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2023;
4. Pokok-pokok pikiran DPRD;
5. Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi COVID-19.

Proses integrasi penyusunan RKPD Kabupaten Lumajang tahun 2023 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4 1Komponen penyusun RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2023

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menjabarkan program dan kegiatan. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2023 juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Visi

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang pada P-RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah sebagai berikut :

”Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing,
Makmur dan Bermartabat”

Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan dengan semangat Sasanti Kabupaten Lumajang yaitu “Amreta Brata Wira Bhakti”, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang tidak sekadar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, Masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut

serta dalam menjadikan Lumajang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat.

4.1.2 Misi

Misi dalam pembangunan dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan dapat lebih menggambarkan penyelesaian isu-isu strategis Kabupaten Lumajang. Adapun tiga rumusan misi P-RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Misi 1: Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun sisi penawaran (*supply side*); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan menengah dan usaha mikro dan partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing melalui pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha mikro, jasa pariwisata, serta sarana infrastruktur pendukung secara berkelanjutan.

Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana.

Misi 2: Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli masyarakat, upaya peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, serta peningkatan dukungan terhadap kesetaraan dan pengarusutamaan gender (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak).

Misi 3: Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang berbasis teknologi informasi

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang profesional sesuai dengan kompetensinya (*the right man on the right place*); penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintahan yang efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi; serta birokrasi yang bebas dari KKN didukung penciptaan ketentraman ketertiban umum dan kondusivitas wilayah.

Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan *good and clean governance* merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten Lumajang dalam mendukung implementasi Smart City (Kota Cerdas) sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai bagian dari Smart City, diharapkan dapat mempercepat proses reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang sebagaimana dalam P-RPJMD Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 adalah sebagaimana berikut:

- a. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian bencana;
- c. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat
- d. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja;
- e. Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun.

Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lumajang antara lain terkait dengan permasalahan kemiskinan ekstrem. Dengan terbitnya Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, menginstruksikan kabupaten/kota untuk :

- a. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi :
 1. pengurangan beban pengeluaran masyarakat
 2. peningkatan pendapatan masyarakat
 3. penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
- b. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa
- c. menyusun program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten / Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk

pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address)

- d. memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur.

Selain isu kemiskinan ekstrem, pada tahun 2024 Kabupaten Lumajang seperti halnya Kabupaten/Kota yang lain juga melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Dalam rangka menghadapi pilkada serentak tersebut, di tahun 2023 perlu dialokasikan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung suksesnya pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 pada urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik, khususnya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Pemerintah Daerah pada tahun 2023 memulai penyusunan rancangan awal RPJPD tahun 2025-2045, karena pada tahun 2024 Pemerintah Daerah melaksanakan Musrenbang RPJPD sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 11 ayat (4), Musrenbang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode yang sedang berjalan. Periode RPJPD yang sedang berjalan berakhir pada tahun 2025. RPJPD yang sudah disusun pada tahun 2023, dapat menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, disebutkan bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena ini pemerintah Kabupaten Lumajang perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah tersebut di tahun 2023.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang merupakan dalam kaitannya dengan misi P-RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4 1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023

Misi 1 : Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PD
Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya aktivitas ekonomi / nilai PDRB	Nilai PDRB	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Layanan Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Mewujudkan	Indeks risiko	Badan

Misi 1 : Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PD
		masyarakat yang tangguh bencana	bencana	Penanggulangan Bencana Daerah

Misi 2 : Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PD
Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Menurunnya angka kemiskinan	Indeks Gini	Meningkatnya penyerapan angkatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Tenaga Kerja

Misi 2 : Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PD
melalui peningkatan daya saing tenaga kerja		kerja		
		Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Persentase PPKS mandiri	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi 3 : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PD
Meningkatkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satpol PP, Bakesbangpol, Dinas Pemuda

Misi 3 : Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel , dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi informasi

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PD
				dan Olahraga
		Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Efektivitas pengelolaan risiko tingkat kabupaten	Inspektorat
			Indeks Survei Penilaian Integritas	
		Meningkatnya kualitas perencanaan daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah
			Opini BPK	
			Rasio penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap target PAD	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
		Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Sekretariat Daerah

Sumber : P-RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023 (data diolah)

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.2.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023)

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 : “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decentjob;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang- Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
- c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah;
- e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;

- f. pengentasan kemiskinan;
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan;
- c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien;
- e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan

ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
- c. pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Beberapa hal khusus lainnya yang menjadi arahan pemerintah meliputi :

1. Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Bersama mitra Pemerintah dalam hal ini Lembaga Kemasyarakatan, yaitu Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka menciptakan masyarakat yang sehat, maju, mandiri dan sejahtera, melalui :
 - a. Penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk;
 - b. Dukungan penguatan kelembagaan, pengelolaan dan pelaksanaan pada 10 Program Pokok PKK, yaitu

- Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Ketrampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat sampai di tingkat Desa/Kelurahan khususnya penuntasan dan penyelesaian stunting dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada peningkatan angka kesehatan dan penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas;
- c. Pembinaan dan penguatan kelembagaan serta program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan meliputi penguatan kapasitas kader serta dukungan alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, oxymeter, tensimeter, insentif kader posyandu dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
 - d. Melakukan program penguatan dan pengetahuan ketahanan keluarga kepada masyarakat melalui TP PPK, Kader PKK dan Posyandu dalam rangka mendukung Pemerintah terhadap pemberantasan bahaya Narkotika;
 - e. mendorong perekonomian berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai ekonomi dan produktif;
 - f. mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industry kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memperluas pangsa pasar hasil kerajinan;
 - g. Memajukan dan mendorong perekonomian melalui Desa Wisata dan usaha yang dikelola oleh keluarga.
2. Dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang tahapannya sudah dimulai pada bulan Juni tahun 2022, Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 agar memasukkan program,

kegiatan, sub kegiatan dukungan sukses pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 pada urusan pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sebesar 79,50 persen pada tahun 2024 sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 –2024 serta memelihara stabilitas politik dalam negeri sebagai berikut:

- a. Pendidikan politik bagi Partai Politik dan Masyarakat sesuai amanat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
- b. Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama sesuai amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ Tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Gerakan Kemitraan Bersama Organisasi Kemasyarakatan Sipil dan Perguruan Tinggi mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai amanat Permendagri Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Badan Atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
- d. Pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM) sesuai amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor

- 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
- e. Pembumian Nilai Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
 - f. Penanganan potensi ancaman, hambatan dan gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini melalui pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan melalui pusat komunikasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
 - g. Pembentukan dan Operasionalisasi Tim Pemantauan dan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan dan Tahapan Pemilihan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai amanat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
 - h. Penguatan Iklan Layanan Pendidikan Politik sesuai amanat Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik;
 - i. Pembinaan Karya Seni dan Budaya Sebagai Perekat Persatuan Kesatuan Bangsa Dalam Mendukung Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai amanat Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

- j. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN);
 - k. Koordinasi dan monitoring tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.
3. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu diperhatikan pemberdayaan satuan kerja pengelola urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menjadi pengelola sentra layanan terpadu penanganan kekerasan seksual, serta pembentukan dan pemberdayaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA).
 4. Dalam rangka meningkatkan pelayanan Bidang Pendidikan, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:
 - a. Meningkatkan pembinaan dan penguatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) baik pada lingkup provinsi maupun kab/kota, sesuai dengan Peraturan Bersama antara Mendikbud, Menkes, Menteri Agama dan Mendagri No. 6/X/PB/2014, No. 73 Tahun 2014, No. 41 Tahun 2014, No. 81 Tahun 2014, tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.
 - b. Dukungan terhadap Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD HI) melalui percepatan penyusunan Rencana Aksi Daerah, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan Permenko Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
 - c. Dukungan terhadap Implementasi Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan mendorong percepatan vaksinasi Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) bagi pendidik, tenaga kependidikan, serta pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas pada satuan Pendidikan, dengan memperhatikan level PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- d. Penguatan Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada satuan pendidikan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :420/4047/SJ Tentang Implementasi Pendidikan Karakter Dan Budaya Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan (Provinsi), dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 420/4048/SJ Tentang Implementasi Pendidikan Karakter Dan Budaya Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan (Kabupaten/Kota).
 - e. Penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan (Inklusi), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20018 tentang penyandang disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas.
5. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan bidang Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain:
- a. Dokumen kependudukan yang ditingkatkan kualitas pelayanannya paling sedikit:
 - 1) KK;

- 2) KTP-el;
 - 3) Akta Kelahiran;
 - 4) Akta Perkawinan;
 - 5) Akta Kematian; dan
 - 6) Surat Keterangan Pindah.
- b. Penerbitan dokumen kependudukan diselesaikan dalam waktu 1(satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
 - c. Batas waktu penyelesaian dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan;
 - e. Fasilitas peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan paling sedikit:
 - 1) Menyediakan layanan nomor telepon pengaduan (call center);
 - 2) Menyediakan nomor telepon pengaduan;
 - 3) Setiap hari mengumumkan semua dokumen yang sudah diterbitkan melalui situs web/papan pengumuman;
 - 4) Setiap hari mengumumkan jumlah blanko KTP-el yang masih tersedia melalui papan pengumuman/tempat layanan.
 - f. Bupati/wali Kota wajib memfasilitasi Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan.
6. Pemerintah Daerah pada tahun 2023 memulai penyusunan rancangan awal RPJPD tahun 2025-2045 yang tercantum dalam RKPD 2023, karena pada tahun 2024 Pemerintah Daerah melaksanakan Musrenbang RPJPD sesuai dengan amanat Undang-Undang 25 Pasal 11 ayat (4), Musrenbang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum

berakhirnya periode yang sedang berjalan. Periode RPJPD yang sedang berjalan berakhir pada tahun 2025.

RPJPD yang sudah disusun pada tahun 2023, dapat menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024 serta penyusunan RPJMD Teknokratik 2025-2030.

7. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk menetapkan Peraturan tentang RKPD Tahun 2023.
8. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk menetapkan Peraturan tentang RKPD Tahun 2023.
9. Pemerintah Daerah dalam menetapkan indikator makro dapat memperhatikan indikator makro yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 yaitu indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan (indeks gini). Selain indikator makro yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, Pemerintah Daerah juga dapat memperhatikan indikator yang tertuang dalam surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyelarasan indikator makro daerah antara lain: 1). Laju pertumbuhan ekonomi (%); 2). Tingkat kemiskinan (%); 3). Tingkat pengangguran terbuka (%); 4). Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 5). Rasio Gini; dan 6). Penurunan Emisi GRK (%). Selain kedua peraturan di atas, pemerintah dapat

memperhatikan peraturan perundangan yang terbaru dalam menetapkan indikator makro.

10. Dalam rangka terciptanya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan kegiatan usaha pertambangan khususnya dalam penerbitan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, diharapkan Pemerintah Provinsi dapat menyiapkan:

a. Pendanaan dalam pelaksanaan:

- pemberian sertifikat standar dan izin di bidang mineral dan batubara;
- pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan;
- pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan.

b. Pendanaan dalam pelaksanaan pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan yang didelegasikan;

c. Pendanaan dalam pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;

d. Pendanaan dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

11. Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas layanan Bidang Tenaga kerja, hal-hal yang harus diperhatikan antara lain :

a. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Lampiran G Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki hak memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja guna peningkatan kompetensinya dan Setiap Pekerja Migran Indonesia yang telah kembali ke Indonesia memiliki hak pelindungan setelah bekerja dilakukan

melalui pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ, tanggal 14 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Layanan Disabilitas melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan diprovinsi dan kabupaten/kota;
- c. Guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maka diminta perhatian Gubernur dan Bupati/Walikota memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai Pemerintah Daerah dengan status Non Apatatur Sipil Negara (ASN) untuk menjadi peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja beserta keluarganya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

4.2.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan RKPD Jawa Timur Tahun 2023)

Visi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam P-RPJMD tahun 2019-2024 adalah :

”Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”.

Dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan; dan
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam P-RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024 untuk tahun 2023 adalah Peningkatan dan Pemerataan Kualitas SDM Untuk Mendukung Daya Saing Daerah untuk Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Sedangkan tema RKPD Jawa Timur Tahun 2023 adalah Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Daya Saing Daerah Dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro.

Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;

5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi;
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

4.2.3 Prioritas Program Strategis Kepala Daerah Terpilih

Janji Politik Kepala Daerah sebagaimana dituangkan dalam P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebagai representasi pendekatan politik menjadi rujukan penentuan prioritas pembangunan RKPD Tahun 2023 dengan penyesuaian pada konteks isu strategis Tahun 2023.

Tabel 4 2 Program Strategis Kabupaten Lumajang

No	Program Strategis	Indikator Program	Target sasaran
1	Program semua ibu melahirkan gratis di semua puskesmas, rumah sakit di lumajang dengan standart kelas 3 dan tanpa ada biaya tambahan obat	Layanan Melahirkan gratis di Fasyankes standart kelas 3	Ibu melahirkan dengan standart kelas 3
2	Fasilitasi pemenuhan listrik di wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik dan pemenuhan air bersih di wilayah utara dan daerah rawan kekuarangan air lainnya	Pemenuhan listrik	Dusun belum berlistrik
		Pemenuhan air bersih	Dusun wilayah utara dan rawan air bersih
3	Memberikan bantuan seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta SPP gratis untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	Bantuan seragam gratis	Siswa baru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
		Bantuan SPP gratis	Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
4	Memberikan bantuan beasiswa untuk mahasiswa baru berprestasi yang tidak mampu yang diterima di perguruan tinggi negeri	Bantuan beasiswa	Mahasiswa baru kurang mampu

No	Program Strategis	Indikator Program	Target sasaran
5	Memberikan tambahan tunjangan/honor bagi guru non NIP, guru madrasah diniyah, guru TPQ, dan guru mengaji masjid/langgar	Tambahan tunjangan/honor	Guru non NIP, Madin, TPQ, mengaji masjid/langgar
6	Tunjangan uang duka kematian sebesar Rp. 1.000.000,- yang dicairkan tepat waktu dan memberikan bantuan sarana dan prasarana rukun kematian	Tunjangan uang duka kematian	Penduduk meninggal
		Bantuan Rukem	Rukun kematian
7	Pengadaan WiFi di seluruh sarana publik dan di setiap desa/kelurahan dan juga pemasangan CCTV di tempat rawan tindakan kriminal dan sarana publik	Pengadaan WIFI	Sarana publik
			Desa/kelurahan
		Pengadaan CCTV	Sarana publik dan daerah rawan
8	Pembangunan Stadion Semeru standart nasional, serta pembangunan standart regional di Kecamatan Klakah, Pasirian, dan Yosowilangun	Pembangunan stadion standart nasional	Stadion Semeru
		Pembangunan stadion standart regional	Stadion Kecamatan Klakah, Pasirian, Yosowilangun
9	Pemberdayaan karang taruna, kelompok organisasi pemuda, lansia, anak jalanan, dan kaum disabilitas atau cacat	Pemberdayaan Karang Taruna	Karang Taruna
		Pemberdayaan kelompok organisasi pemuda	Kelompok organisasi pemuda
		Pemberdayaan lansia	Lansia
		Pemberdayaan kaum disabilitas	Kaum disabilitas

No	Program Strategis	Indikator Program	Target sasaran
10	Pengalihfungsian gedung Soejono menjadi gedung kesenian dan kegiatan kreatifitas anak muda	Pengalihfungsi an sebagai gedung kesenian	Gedung Soedjono
11	Melakukan inisiasi dan koordinasi aktif kepada pemerintah pusat untuk pembangunan jalan tol Probolinggo-Lumajang sebagai langkah mengatasi problem kemacetan dan kemudahan akses ekonomi	Inisiasi dan koordinasi aktif tentang pembangunan jalan tol	Pemerintah Pusat
12	Pembangunan jalan poros desa, menyelesaikan infrastruktur jembatan/jalan kabupaten dengan standart hotmix, dan membangun jalan penghubung Pasirian-Tempursari	Infrastruktur jalan kabupaten standar hotmix	Jalan Kabupaten
		Pembangunan jalan penghubung Pasirian-Tempursari	Jalan penghubung Pasirian-Tempursari
13	Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman yang layak untuk anak di setiap kecamatan	Pembangunan Ruang terbuka hijau	Seluruh kecamatan
		Pembangunan taman layak anak	Seluruh kecamatan
14	Fasilitasi pendirian BUM-Tren (Badan Usaha Milik Pesantren) sebagai langkah penguatan ekonomi	Fasilitasi BUM Tren	Pondok Pesanren
15	Rehabilitasi pasar tradisional yang lebih tertata dan rapi serta nyaman bagi para pedagang besar dan pembeli sekaligus mendirikan koperasi di setiap pasar tradisional dengan pinjaman tanpa bunga	Rehabilitasi pasar tradisional	Pasar tradisional
		Stimulasi pinjaman tanpa bunga	Koperasi pasar tradisional
16	Optimalisasi potensi pariwisata dan pertanian dengan memaksimalkan	Optimalisasi potensi pariwisata	Stake holder sektor pariwisata

No	Program Strategis	Indikator Program	Target sasaran
	kerjasama dan keterlibatan masyarakat dengan jaringan pelaku investasi yang memiliki daya tarik pengembangan usaha pariwisata dan usaha pertanian	Optimalisasi potensi pertanian	Stake holder sektor pertanian
17	Pelayanan administrasi kependudukan (KTP, KSK, Akta Kelahiran, Akta Kematian) dengan sistem online, tuntas di kecamatan	Pelayanan adminduk sistem online	Seluruh Kecamatan
18	Pembangunan mall/pusat pelayanan perizinan satu atap yang terintegrasi dari seluruh proses perizinan	Terbangun pusat pelayanan perizinan satu atap	Integrasi Layanan Perizinan
19	Tambahkan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil dan menstandartkan honor tenaga kerja kontrak pemerintah Kabupaten Lumajang sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Pemberian TPP	PNS
		Standarisasi honor sesuai UMK	Tenaga kerja kontrak
20	Pemberian tunjangan kepala desa, perangkat desa di luar penghasilan tetap, dan memberikan tunjangan bagi RT/RW	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Seluruh Kepala Desa dan Perangkat
		Tunjangan RT/RW	Seluruh RT/RW

4.2.4 Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil reses III DPRD. Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD perlu diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Pokok pikiran DPRD yang diakomodir pada RKPD Kabupaten Kabupaten Lumajang, dijelaskan secara rinci pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4 3TB-57 Rumusan Usulan Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Validasi Kabupaten Lumajang

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Satgas Keamanan Desa	Permohonan pengadaan seragam linmas	Sukorejo	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan bantuan pembuatan paving, papan nama dan pagar	Wonosari	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Lingkungan	Bantuan pembangunan pavingisasi dan drainase	Wonosari	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Bantuan pengadaan LCD proyektor dan layar	Jogoyudan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sosial	Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	Bantuan dana penguatan dan pengembangan karang taruna	Seluruh Kelurahan/Desa	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan bantuan penyelesaian ruang kelas baru	Seluruh Kelurahan/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Permohonan bantuan dana sarana dan prasarana majlis	Tekung	SEKRETARIAT DAERAH

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
		taklim		
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Permohonan bantuan dana sarana dan prasarana rukun kematian	Tekung	SEKRETARIAT DAERAH
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RTLH	Rehab rumah tidak layak huni	Wonogriyo	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RTLH	Rehab rumah tidak layak huni	Wonogriyo	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RTLH	Rehab rumah tidak layak huni	Wonogriyo	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RTLH	Rehab rumah tidak layak huni	Wonogriyo	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perekonomian UMKM	Permohonan bantuan dana hibah kelompok usaha kecil wijaya kusuma	Grati	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
				PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perekonomian UMKM	Permohonan bantuan dana hibah kelompok usaha kecil lancar jaya	Jogoyudan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RTLH	Rehab rumah tidak layak huni	Wonosari	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RTLH	Rehab rumah tidak layak huni	Wonosari	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RTLH	Rehab rumah tidak layak huni	Wonosari	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RTLH	Rehab rumah tidak layak huni	Wonosari	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RTLH	Rehab rumah tidak layak huni	Wonosari	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perekonomian UMKM	Permohonan bantuan dana hibah kelompok usaha kecil sinar harapan	Blukon	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RTLH	Rehab rumah tidak layak huni	Wonosari	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perekonomian UMKM	Permohonan bantuan dana hibah kelompok usaha kecil wonomulyo	Wonogriyo	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kebudayaan	Kesenian/Kebudayaan	Permohonan dana kesenian masyarakat reog suryo widjoyo	Wonogriyo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perekonomian UMKM	Permohonan bantuan dana hibah kelompok umkm lanvcar jaya	Jogotrunan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
				DAN PERDAGANGAN
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perekonomian UMKM	Permohonan bantuan kelompok umkm lancar jaya	Karangbendo	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Bantuan dana sarana dan prasarana majelis taklim	Kepuharjo	SEKRETARIAT DAERAH
Kepemudaan dan Olahraga	Keolahragaan Non Profesional	Permohonan bantuan dana olahraga sepakbola	Tukum	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Bantuan seragam muslimat	Pandansari	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Bantuan seragam muslimat	Banyuputih Lor	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Permohonan bantuan pengadaan seragam anggota	Wonorejo	SEKRETARIAT DAERAH
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Lingkungan	Permohonan bantuan dana hibah pembangunan jalan paving	Grobogan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pekerjaan Umum dan Penataan	Jalan Lingkungan	Permohonan bantuan dana hibah pembangunan jalan	jatisari	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
Ruang		paving		PERMUKIMAN
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Lingkungan	Permohonan bantuan dana hibah pembangunan jalan paving	Kalidilem	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Lingkungan	Permohonan bantuan dana hibah pembangunan jalan paving	Kebonan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Permohonan bantuan pengadaan seragam anggota	Sawaran Kulon	SEKRETARIAT DAERAH
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Lingkungan	Permohonan bantuan dana hibah pembangunan jalan paving	jatisari	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Lingkungan	Permohonan bantuan dana hibah pembangunan jalan paving	Salak	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Lingkungan	Permohonan bantuan dana hibah pembangunan jalan paving	Tegalciut	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Lingkungan	Permohonan bantuan dana hibah pembangunan jalan paving	Tempursari	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Lingkungan	Permohonan bantuan dana hibah pembangunan jalan paving	Tegalciut	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Permohonan bantuan seragam	Wonorejo	SEKRETARIAT DAERAH
Sosial	Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	Bantuan sarpras karangtaruna wusanggeni	Lempeni	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Kebudayaan	Kesenian/Kebudayaan	Program bantuan dana hibah bintang radio semeru FM	Jogoyudan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perekonomian UMKM	Permohonan bantuan dana hibah dama modal usaha kecil mikro	Kalibendo	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perekonomian UMKM	Permohonan bantuan dana hibah modal usaha kecil mikro	Nguter	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Koperasi, Usaha	Perekonomian UMKM	Permohonan bantuan dana	Kalibendo	DINAS KOPERASI,

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
Kecil dan Menengah		hibah usaha kecil mikro		USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perekonomian UMKM	Permohonan bantuan dana hibah modal usaha kecil	Sumberejo	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi	Permohonan bantuan dana hibah modal usaha koperasi	Jogoyudan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kebudayaan	Kesenian/Kebudayaan	Program dana hibah lomba pidato remaja	Jogoyudan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi	Permohonan bantuan dana hibah koperasi	Dawuhan Lor	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kebudayaan	Kesenian/Kebudayaan	Permohonan bantuan alat kesenian orkes gambus	Selokbesuki	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perekonomian UMKM	Permohonan bantuan dana hibah pengadaan peralatan kopi	Tukum	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perekonomian UMKM	Permohonan bantuan dana hibah pengadaan peralatan jahit	Kaliboto Lor	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa	Pembangunan jalan rabat beton	Karangsari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan bantuan dana hibah	Wonorejo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan melanjutkan pembangunan ruang kelas baru madrasah diniyah "nurul hidayah"	Wonokerto	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sumur Bor	Permohonan pembangunan sumur bor air minum lingkungan permukiman nurul jadid	Denok	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
Pertanian	Ternak	Permohonan bantuan pengadaan budidaya ternak sapi	Labruk Kidul	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Lingkungan	Permohonan bantuan jalan aspal darungan lor	Curahpetung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Pertanian	Ternak	Permohonan penguatan modal usaha budidaya ternak bebek barokah jaya	Blukon	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan bantuan penguatan tanah (pelengsengan) tk muslimat nu	Tamanayu	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan pengadaan mobil operasional yayasan pesantren ar rahmah	Kunir Kidul	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kebudayaan	Kesenian/Kebudayaan	Permohonan pengadaan alat kesenian islami majelis taklim manakib fatayat	Dawuhan Wetan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sanitasi Lingkungan	Permohonan pembangunan sanitasi	Kaliboto Lor	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Lingkungan	Permohonan pembangunan pavingisasi	Kaliboto Lor	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sumur Bor	Permohonan pembangunan sumur bor RW 06	Sukosari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Lingkungan	Permohonan bantuan jalan aspal	Kaliboto Lor	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Pertanian	Ternak	Permohonan usaha ternak kambing etawa jaya	Sumbersuko	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sumur Bor	Permohonan pembangunan sumur bor	Kaliboto Lor	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Lingkungan	Permohonan bantuan jalan aspal	Jatiroto	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Drainase Permukiman	Permohonan pembangunan drainase desa jatiroto	Jatiroto	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Drainase Permukiman	Permohonan pembangunan drainase desa jatiroto RW 03	Jatiroto	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Balai Pertemuan Warga	Permohonan bantuan pembangunan panti PKK	Jatiroto	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Permohonan pembangunan mushola Al Ghozali	Gondoruso	SEKRETARIAT DAERAH
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) miftahul ulum	Krasak	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana pembangunan pagar sekolah kelompok bermain kurnia bangsa	Banjarwaru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) al - wardah	Kebonsari	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) sekar arum	Klampokarum	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) KB nusa indah	Karang Sari	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) KB mawar	Wonosari	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) KB nuri	Sukosari	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) KB dahlia	Rojopolo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) KB dewi sartika	Kebonsari	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) KB dahlia	Jatimulyo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) KB balita pintar	Boreng	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) KB	Rowokangkung	DINAS PENDIDIKAN

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
	Pendidikan	intan lestari		DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) KB RA. ar rahman	Kunir Kidul	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) KB kurnia bangsa	Banjarwaru	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) KB jati diri	Sukosari	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) TK intan mulia	Rowokangkung	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) RA. Al-ikhlas	Dawuhan Wetan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) KB khoirun nisa	Sumberejo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) KB kurnia bangsa	Kedungjajang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
Pendidikan	Sarana dan Prasarana Pendidikan	Permohonan dana bantuan APE luar (permainan edukatif) TK muslimat NU 04 Ranulogong	Ranulogong	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Drainase Permukiman	Permohonan bantuan dana pembangunan drainase persil nyeoran pokmas nyantri	Kaliboto Lor	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Permohonan bantuan dana pengadaan sarpras rukem al-qodiri	Tekung	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Permohonan bantuan dana pengadaan sarpras rukem al-ikhwan	Tukum	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Bantuan Baznas	Rogotrunan	SEKRETARIAT DAERAH
Pertanian	Ternak	Permohonan bantuan ternak sapi cempaka	Kaliboto Lor	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Drainase Permukiman	Permohonan pembangunan drainase genitri	Kaliboto Lor	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Drainase Permukiman	Permohonan pembangunan drainase	Kaliboto Lor	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	RKB LKSA fathul ulum pandanwangi	Pandanwangi	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Balai Pertemuan Warga	Permohonan bantuan pengadaan meubeler kantor LDII	Jogotrunan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	Baznas	Jogotrunan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Satgas Keamanan Desa	Peralatan satgas	Bades	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Koperasi, Usaha Kecil dan	Koperasi	Simpan Pinjam IGTKI	Candipuro	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
Menengah				MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perekonomian UMKM	Pemulihan Ekonomi	Jugosari	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Kebudayaan	Kesenian/Kebudayaan	Pengadaan alat hadroh & kelengkapan jam'iyah Darussalam (Hibah)	Seluruh Kelurahan/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kebudayaan	Kesenian/Kebudayaan	Pengadaan sarana & Prasarana jam'iyah muslimat	Supiturang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kebudayaan	Kesenian/Kebudayaan	Pengadaan alat hadroh & kelengkapan jam'iyah Al-Amin	Selok Awar - Awar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kebudayaan	Kesenian/Kebudayaan	Sarana & prasarana Majelis Ta'im (hibah)	Bades	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Rukem	Condro	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Rukem Dusun Gaplek	Pasirian	SEKRETARIAT DAERAH

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Rukem Dusun Karanganyar	Pasirian	SEKRETARIAT DAERAH
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perekonomian UMKM	Pemulihan Ekonomi	Seluruh Kelurahan/Desa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Perekonomian UMKM	Pemulihan Ekonomi	Seluruh Kelurahan/Desa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Pengadaan RKB Madin Darul Muqomah	Condro	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Pengadaan RKB Madin At Taqwa	Pundungsari	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Pengadaan RKB Madin Mamba"ul Huda	Tempursari	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Pengadaan RKB Madin Wustho Miftahul Ulum	Bago	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Pengadaan RKB Madin Ummul Quro	Bago	SEKRETARIAT DAERAH

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Pengadaan RKB Madin Fatihul Ulum	Bago	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	RKB Madin Kholafiyah	Nguter	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Rehap Musholah AT TAUBAT	Jarit	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Rehap Musholah Darul Jannah	Jarit	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Seragam Madin AL HIKMAH	Sumberejo	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Sarpras LKSA Darul Istiqomah	Pasirian	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Rukem RT 04 RW 02	Condro	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Rukem Dsn gaplek	Pasirian	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	Rukem den karanganyar	Pasirian	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	RKB DARUL MUQOMAH	Condro	SEKRETARIAT DAERAH

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
Sekretariat Daerah	Keagamaan	RKB main At Taqwa	Pundungsari	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	RKB Madin Mamba'ul Huda	Tempursari	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	RKB Madin Wustho miftahul ulum	Bago	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	RKB Madin Ummul Quro	Bago	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	RKB Faithful Ulum	Bago	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Keagamaan	RKB Madin Kholafiyah	Nguter	SEKRETARIAT DAERAH
Sosial	Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	Bantuan Perangkat Komputer dan Printer Kelompok "Randuagung Community"	Randuagung	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sosial	Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	Pengadaan Seragam RT dan RW	Sumberurip	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
Sosial	Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	Pengadaan Seragam RT dan RW	Purorejo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sosial	Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	Pengadaan Seragam PSM	Pronojiwo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sarana dan Prasarana Milik Desa	Pembangunan Gapuro RT 01/RW01 Kalibening Pronojiwo	Pronojiwo	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sosial	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	LKSA Muhammadiyah	Jambekumbu	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sarana dan Prasarana Milik Desa	Pagar Desa Kandang Tepus	Senduro	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan	Usulan	Aktivitas	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait
Sosial	Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	Bantuan Seragam Kelompok Masyarakat " Pam Swakarsa"	Nogosari	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sosial	Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	Bantuan Seragam Kelompok Masyarakat " Al Fajar"	Yosowilangun Kidul	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sosial	Penguatan Kelembagaan Karang Taruna	Bantuan Seragam Kelompok Masyarakat " Makmur"	Yosowilangun Kidul	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

4.2.5 Telaah Proyek Strategis Nasional

Pada tahun 2019 Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur, yang merupakan bagian integral perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Arah pembangunan nasional telah berorientasi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berdaya saing; pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi kesenjangan; peningkatan kualitas dan daya saing SDM yang cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter; serta penguatan infrastruktur yang berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah.

Guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi, penguatan konektivitas antar wilayah dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, yang diwujudkan dalam bentuk :

1. Merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi wilayah, pengembangan wilayah, serta sistem komunikasi dan informasi;
2. Identifikasi simpul- simpul transportasi (transportation hubs) dan distribution centers untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditi utama dan penunjang;
3. Penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat kegiatan ekonomi serta konektivitas nasional dan internasional;
4. Peningkatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan.

Selain penguatan konektivitas, percepatan pembangunan ekonomi dilakukan melalui optimalisasi pusat kegiatan ekonomi yang telah ada di Provinsi Jawa Timur yang dilakukan dengan cara penguatan infrastruktur. Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan dukungan infrastruktur yang telah ada ditambah dengan infrastruktur tambahan untuk mendukung pusat pertumbuhan baru. Pengembangan dilakukan untuk kawasan-kawasan yang aktivitas perekonomiannya belum optimal, dan perlu didorong untuk menciptakan kesejahteraan dan memajukan pemerataan ekonomi. Konsep percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur dilaksanakan dengan

pendekatan penetapan kawasan prioritas beserta masing-masing konsep tematiknya.

1. A. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional

Kabupaten Lumajang termasuk dalam Kawasan Selingkar Bromo - Tengger - Semeru dengan fungsi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dengan konsep pembangunan tematik pengembangan pariwisata dan agroproduksi – agroindustry. Sektor unggulan di Kawasan BTS adalah potensi-potensi wisata yang beragam dan menyebar, baik wisata alam dan wisata budaya misalnya, Tarnan Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS) memiliki potensi sumber daya alam yang menonjol, seperti keberadaan flora langka yang menarik dan endemic, ekosistem yang khas gunung berapi yang aktif, habitat satwa migran, fenomena/gejala alam yang unik dan menakjubkan seperti kaldera di dalam kaldera, ranu/danau yang sangat luas dan indah di atas pegunungan, keunikan Kaldera Tengger dengan laut pasirnya, budaya dan adat istiadat khas masyarakat Suku Tengger. Pemandangan kawah Bromo yang indah dan mempesona disaksikan secara dekat maupun dari titik penanjakan, kemudian adanya lautan pasir dan padang savanna yang mempesona.

Di bidang Agropolitan memiliki panorama alam yang unik, seperti lahan pertanian di Tosari, Argosari, dan lain-lain. Sektor budaya memiliki event tradisi budaya yang melembaga di masyarakat (terutama masyarakat Tengger), seperti: Karo, Yadnya Kasodo, Entas-entas, Unan-unan, Pujan Mubeng, dan lain-lain. Permukiman Suku Tengger yang memiliki ciri khas khusus sehingga bisa dijadikan sebagai objek tujuan wisata yang memiliki arsitektur vernacular. Selain itu fasilitas rekreasi yang beraneka ragam seperti taman rekreasi, kolam renang tempat berkemah, lapangan golf, dan lain-lain yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dan dapat membantu mengurangi kelebihan pengunjung di TN BTS, dimana di beberapa tempat telah melebihi kapasitas daya dukung lahan.

Kawasan Prioritas Bromo-Tengger-Semeru ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang berdampak pada diprioritaskannya program-program pembangunan di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur maupun program peningkatan kegiatan ekonomi yang mendukung kegiatan pariwisata telah menjadi prioritas dalam perencanaan K/L. Pengembangan ekonomi berbasis pengembangan kawasan ekonomi tematik berupa Agropolitan (termasuk agrowisata) dan Minapolitan, serta pengembangan Koridor dan Gugus Wisata, merupakan konsep yang tepat

terutama terkait upaya pemerataan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Pengembangan Agropolitan dan Minapolitan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Sebagai destinasi wisata alam, wilayah TN BTS harus dijaga keberlanjutannya agar tidak terjadi degradasi lingkungan yang tentunya mempengaruhi kualitas obyek wisata tersebut. Dengan demikian daya dukung lingkungan menjadi salah satu parameter untuk membatasi kegiatan yang dilakukan di wilayah TN BTS.

Di sisi lain, obyek wisata lainnya seperti wisata agro maupun budaya menjadi potensi untuk lebih ditingkatkan. Keberagaman jenis obyek wisata tersebut menjadi potensi untuk lebih mengembangkan kegiatan pariwisata di Kawasan BTS. Keberagaman potensi wisata dan produk perkebunan belum dioptimalkan, selain itu juga belum diintegrasikannya antar potensi wisata menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan pengembangan potensi-potensi tersebut agar dapat meningkatkan perekonomian khususnya bagi masyarakat sekitar maupun kontribusi PDRB sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur.

Sebagai contoh pengembangan paket-paket wisata yang terintegrasi diantara kawasan dikarenakan saat ini para wisatawan masih terfokus pada wisata kawasan kawah Bromo. Dengan adanya integrated tourism tour diharapkan destinasi wisata yang terdapat di Batu-Malang-Bromo dapat terintegrasi dan menarik wisatawan dalam meningkatkan waktu tinggal. Selain itu, tantangan terbesar di Kawasan BTS yaitu kurang optimalnya pengembangan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru dan sekitarnya serta kurangnya dukungan pengembangan Agropolitan dan Minapolitan untuk memberikan nilai tambah ekonomi.

Dukungan Kabupaten Lumajang terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 meliputi :

- Pengembangan kawasan wisata ranupane (pembangunan ampiteater, pembangunan bale bengong, pembangunan rest area Ranupane, pembangunan pedestrian pemukiman dan pedestrian kawasan Ranupane)
- Pengembangan kawasan wisata Argosari (Pembangunan landscape B29, pembangunan pedestrian B29, pembangunan plaza pengunjung B29)

- Pengembangan kawasan wisata Gunung Wayang Sumberwuluh (Pembangunan take off paralayang)
- Pengembangan kawasan wisata bumi perkemahan Glagah Arum (Pembangunan food court, pembangunan toilet glamping, pembelian perlengkapan glamping, pembangunan pendopo, dan kantor bumi perkemahan)
- Peningkatan ruas jalan Senduro - Ranupane

B. Integrated Area Development Lumajang

Pengembangan area yang terintegrasi atau biasa disebut Integrated Area Development yang berlokus di Kabupaten Lumajang memiliki fokus pada beberapa poin, salah satunya perhutanan sosial. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial menyebutkan bahwa, Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari, Desa Burno, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, adalah salah satu lokasi yang menerapkan Perhutanan Sosial. LMDH Wono Lestari memperoleh Surat Keputusan Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dengan Nomor : 5633/MENLHK-PSKL/PKPS/ PSL.0/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 dengan luas 940 ha terdiri dari 367 KK. LMDH ini menjadi salah satu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) unggulan.

4.2.6 Telaah Pemulihan Ekonomi Dampak Covid 19 dan Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

A. Pemulihan Ekonomi Paska Pandemi Covid 19

Dimulai dari Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok, sekitar kuartal akhir tahun 2019, penyakit virus Corona menyebar ke seluruh dunia dan menyebar juga masuk ke Indonesia, penyakit ini yang kemudian dikenal sebagai Covid-19 menjadi pandemi/wabah yang merenggut korban jiwa. Dampak

pandemi Covid-19 ini dirasakan secara nasional baik secara langsung pada aspek kesehatan (korban jiwa), tetapi juga pada aspek ekonomi, pendidikan dan sosial masyarakat. Pada kuartal II tahun 2020 dilakukan beberapa upaya mitigasi pandemi covid-19 antara lain melalui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota besar termasuk DKI Jakarta dan Surabaya Metropolitan. Berdasarkan rilis BPS, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan atau angka minus pada kuartal II dan III sebesar 5,32% (Q2) dan 3,49% (Q3) yang mengindikasikan terjadi resesi ekonomi yang merupakan dampak pandemi Covid-19. Selain dari dampak aspek ekonomi, untuk memitigasi pandemi Covid-19, diberlakukan social distancing dan pendidikan diselenggarakan secara daring / online yang menyebabkan perubahan pola pergerakan orang dan sosial.

Sebagai bagian upaya mitigasi pandemi Covid-19 dan untuk menyelamatkan kondisi ekonomi nasional, pemerintah mengambil langkah kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang antara lain berupa dukungan pada dunia usaha yaitu UMKM, korporasi, dan BUMN, berupa subsidi bunga, insentif pajak, dan stimulus kredit. Pemulihan Ekonomi Nasional juga mengupayakan pinjaman lunak kepada Pemerintah Daerah untuk menambah ketersediaan anggaran daerah dalam kegiatan atau proyek untuk upaya penanganan dan mitigasi dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 juga telah mengamanahkan penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya melalui upaya :

1. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik.
2. Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
4. Dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi Covid-19 untuk pos komando tingkat kelurahan.
5. Insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi Covid-19.

6. Belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pemulihan ekonomi menunjukkan tren menguat. Setelah mampu menjaga pertumbuhan positif 3,7% di tahun 2021 meski dihantam gelombang Covid-19 varian Delta, pemulihan ekonomi berlanjut di triwulan I-2022, dengan pertumbuhan mencapai 5,01%. Melonjaknya varian Omicron tidak terlalu berdampak pada proses pemulihan ekonomi nasional, ini hasil nyata dari akselerasi vaksinasi dan kekebalan alami yang tumbuh di masyarakat. Konsumsi dan investasi terus menunjukkan tren peningkatan, disertai pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk transportasi, akomodasi dan konstruksi, selain dua sektor utama yaitu manufaktur dan perdagangan. Secara kumulatif pada triwulan I-2022, neraca perdagangan tercatat surplus USD 9,3 miliar. Pada April 2022, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai USD 7,6 miliar. Neraca transaksi berjalan tahun 2022 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2021.

Upaya pemulihan ekonomi juga perlu dilanjutkan di tahun 2023 khususnya di sektor pariwisata, koperasi dan UMKM. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia yakni sebesar 64,19 juta, di mana komposisi Usaha Mikro dan Kecil sangat dominan yakni 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Untuk pemulihan ekonomi masyarakat khususnya UMKM paska masa pandemi, masyarakat dapat memanfaatkan program Pemerintah Kabupaten Lumajang yaitu Pinjaman Tanpa Bunga Tanpa Jaminan. Selain itu, dengan adanya Rumah Kita yang digagas komunitas UMKM Lumajang bisa menjadi solusi. Rumah Kita yang sekaligus sebagai sentra kegiatan UMKM, diharapkan bisa menampung Usaha Kecil Menengah (UKM). Dalam artian bisa membantu penjualan secara online maupun offline. Termasuk memberikan pendampingan dan pelatihan.

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terpuak oleh pandemi. Meski sebelumnya sektor ini tengah digenjut serta sosialisasi ekonomi berbasis pariwisata di tingkat desa dengan konsep desa wisata atau homestay semakin marak, sektor pariwisata terpaksa harus menahan napas akibat situasi Covid-19. Pemulihan sektor pariwisata di Kabupaten Lumajang kini tengah diupayakan setelah merosot dalam 2 tahun terakhir akibat pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dari mulai aktifnya berbagai event yang dijadwalkan di

setiap bulannya oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang.

Selain kalender event, perlu juga mengoptimalkan program desa wisata. Optimalisasi potensi desa dalam program desa wisata diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan warga sekitar, serta bangkitnya UMKM yang ada di masyarakat. Dalam pengelolaan program desa wisata di berbagai wilayah, pemerintah juga memerlukan keterlibatan pihak swasta. Selain dari dukungan pendanaan, pihak swasta diharapkan dapat terlibat pada tahap awal untuk mengidentifikasi potensi sumber daya desa untuk program desa wisata.

Program desa wisata dapat diawali dengan pelatihan pengembangan desa wisata berbasis BUMDesa. Berupa pembuatan rencana kerja, bisnis, tata kelola pengunjung, regulasi, legalitas hingga standar *CHSE (Cleanliness - Health - Safety - Environment Sustainability)*. Terlebih, CHSE sebagai jaminan standar kebersihan, diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi calon wisatawan di tengah kondisi pandemi. Melalui kegiatan ini, ada tiga sasaran yang dituju, yaitu mengembangkan kapasitas manajerial pengelolaan BUMDesa wisata, mengembangkan inovasi produk dan pemasaran BUMDesa pariwisata berbasis digital, serta memberdayakan UMKM yang mendukung potensi wisata.

B. Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak

Pada bulan Mei tahun 2022 wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dilaporkan telah masuk ke Kabupaten Lumajang. Penanganan sapi yang terkena PMK pada awal kejadian banyak yang belum mendapatkan penanganan cepat karena cepatnya penyebaran virus. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui tenaga dokter hewan dari PUSKESWAN (Pusat Kesehatan Hewan) telah berbagi prioritas kawasan yang harus ditangani.

Sampai saat ini jumlah total sapi yang terpapar PMK di Kabupaten Lumajang adalah 5.040 ekor. Banyak sapi yang sudah mulai masa pemulihan. Walaupun agak melambat, para peternak sudah mulai melakukan perawatan dengan memberikan empon empon dan obat yang tersedia, baik melalui dokter hewan yang ada di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian maupun di luar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Para peternak lebih sering membersihkan kandang dan membuka kandang agar sapi mendapat sinar matahari.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan PMK meliputi :

1. Pembentukan Satgas PMK Kabupaten Lumajang
2. Melakukan pengadaan obat hewan melalui Belanja Tidak Terduga
3. Mengusulkan bantuan obat ke pemerintah pusat
4. Desinfeksi dan sterilisasi, serta penutupan sementara pasar hewan
5. Membuat call center PMK
6. Pelayanan kesehatan hewan terhadap ternak sakit PMK
7. Komunikasi, Informasi dan Edukasi PMK kepada peternak
8. Membuat posko pelaporan dan pengaduan PMK
9. Penyekatan lalu lintas dari dan keluar Kabupaten Lumajang

4.2.7 Tema Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2023

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kab. Lumajang lima tahun ke depan, ditetapkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya dan menjadi tema Pembangunan selama tahun 2019-2023. Arah kebijakan pembangunan dimulai pada tahun 2019 sebagai tahun pertama pelaksanaan P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.



Gambar 4 2 Pemetaan Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan yang menjadi tema pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2023 yaitu “Melakukan Percepatan Pembangunan Berkelanjutan”.

Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, perlu ada penyesuaian tema pembangunan dan arah kebijakan pada tahun 2023. Dalam rangka mendukung sinergitas pembangunan pusat dan daerah dan upaya pemulihan dari pandemi COVID-19, maka dirumuskan tema RKPD Kab. Lumajang tahun 2023 sebagai berikut :

“OPTIMALISASI REFORMASI STRUKTURAL UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”

Tema tersebut menggambarkan upaya Kabupaten Lumajang untuk bangkit dari dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, setelah adanya upaya penanganan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2019-2020 dan upaya pemulihan pada tahun 2021-2022. Reformasi Struktural merupakan seperangkat Tindakan yang mengubah struktur ekonomi dengan fokus pembangunan pada SDM, infrastruktur, serta upaya perbaikan kemudahan berusaha. Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah dengan manusia dan pembangunan.

Sinkronisasi dan keselarasan perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten Lumajang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 4 4 Keterkaitan Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur, dan RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2023

RKP Nasional	RKPD Provinsi Jatim	RKPD Kabupaten Lumajang
---------------------	----------------------------	------------------------------------

Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Daya Saing Daerah Dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro	Optimalisasi Reformasi Struktural Untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan
--	--	--

4.2.8 Logical Framework Prioritas dan Strategi

Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2023

Memperhatikan prioritas nasional, prioritas Provinsi Jawa Timur, pokok-pokok pikiran DPRD, tema pembangunan serta isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Lumajang. Prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4 5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Lumajang

	NASIONAL	JAWA TIMUR	LUMAJANG
P1	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;	Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;	Pemulihan ekonomi melalui penguatan usaha mikro dan pariwisata
P2	Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;	Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;	Peningkatan layanan infrastruktur pendukung ekonomi
P3	Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decentjob;	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;	Peningkatan kualitas SDM dan perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan
P4	Mendorong pemulihan dunia usaha;	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;	Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
P5	Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;	Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi;	Peningkatan pertanian berkelanjutan dalam rangka ketahanan

	NASIONAL	JAWA TIMUR	LUMAJANG
			pangan
P6	Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;	Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
P7	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum, dan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk kemudahan investasi

Penjabaran fokus tematik dan aktivitas prioritas yang menunjang pencapaian prioritas pembangunan kabupaten sesuai dengan analisis kebutuhan pembangunan berkelanjutan, dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4 6 Prioritas Tematik Kabupaten Lumajang Tahun 2023

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	pelatihan olahan pangan berbasis sumber daya lokal	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM usaha mikro dan kewirausahaan di wil.KSPN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Operasional pasar agro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	pemeliharaan pasar agro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pemasaran Online (produk kuliner atau oleh-oleh khas Lumajang)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan kemasan dan Bantuan kemasan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Sertifikasi Produk (Halal)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pameran Produk Lokal untuk event-event di Dinas Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembangunan Rest Area Ranupane (gazebo)	Dinas Pariwisata
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	pembangunan parkir transit danyangan	Dinas Pariwisata

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan View Point Bantengan (parkir, taman, jembatan sky view, jalur sky view, toilet, gazebo dan signage)	Dinas Pariwisata
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	pengembangan destinasi puncak g.wayang	Dinas Pariwisata
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	pengembangan destinasi titik rest area g.wayang	Dinas Pariwisata
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembangunan jalur bersepeda dari argosari menuju bantengan (1296-RPP PKS)	Dinas Pariwisata
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembinaan terhadap pemangku adat terkait kegiatan adat	Dinas Pariwisata
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Promosi wisata adat	Dinas Pariwisata
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Mahameru Akustik	Dinas Pariwisata
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Sosialisasi Pemanfaatan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan Videografi Bagi Pelaku Wisata	Dinas Pariwisata
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Edukasi masyarakat untuk pengembangan home stay	Dinas Pariwisata
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan Desa Wisata	Dinas Pariwisata
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Perluasan dan Pemeliharaan Danau Ranupane	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pengembangan pusat kebudayaan tengger (amphiteatre)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan Amphiteater	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
	Nasional			
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
	Nasional			
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Talud	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Talud	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Talud	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Talud	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Talud	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembuatan Peta Dasar Rekomendasi BIG	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Penyusunan RDTR	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Penyusunan Pemetaan Tanah Aset Pemda	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Pedestrian dari Kantor TNBTS ke Pos Pendakian Gunung Semeru	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan RTLH di 5 Kec.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	penerangan jalan umum wil.KSPN	Dinas Perhubungan
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Penyediaan Rambu	Dinas Perhubungan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
	Nasional			
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Penyediaan Angkutan Wisata	Dinas Perhubungan
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Nilai Investasi	Penyusunan Peta Potensi Investasi Pariwisata	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatkan Pengelolaan Sampah	Fasilitas pengolahan sampah untuk BUMDes Ranupani (RUMAH KOMPOS)	Dinas Lingkungan Hidup
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatkan Pengelolaan Sampah	Fasilitas pengolahan sampah untuk BUMDes Argosari	Dinas Lingkungan Hidup
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan	Pemeliharaan Taman Angrek di Ranu Regulo	Dinas Lingkungan Hidup
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pembangunan Ruang Publik Selatan	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pembangunan zona camp putri	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pembangunan zona camp putra	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pembangunan Zona Agri Edukasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pembangunan Ruang Publik Utara	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pendampingan BUMDes di Sektor Pariwisata dan Pertanian	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	pelatihan mitigasi bencana di wil KSPN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan budidaya ikan hias dan ikan konsumsi khas dataran tinggi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan budidaya strawberry	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan budidaya apel	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan budidaya bunga edelweiss	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan budidaya bunga Krisan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan Pisang Agung	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan Pisang Mas	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan beras organik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengadaan vacuum sealer	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan budidaya bunga	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan Ubi Jalar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan Manggis	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan Kapulaga	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembinaan dan rehabilitasi pembudidayaan kopi rakyat disekitar gunung wayang	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan Kopi Organik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan Budidaya Tembakau di Dataran Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengadaan mesin pengolah pupuk organik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembibitan/Pengembangan Kambing Senduro	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Sertifikasi organik untuk komoditas padi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Sertifikasi Organik Komoditas Kopi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengelolaan usaha tani berwawasan lingkungan dengan pembuatan terasiring	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengelolaan usaha tani berwawasan lingkungan dengan pembuatan terasiring	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembangunan Cold storage	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembangunan RPH Modern/Higienis	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Fasilitasi Sertifikasi Izin Edar PSAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Fasilitasi Pembuatan Izin Edar PSAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembinaan usaha mikro untuk buah tangan dan kuliner	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan industri olahan susu (susu sapi & susu kambing)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan industri hilir berbahan baku salak	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengelolaan Pasar Agro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembangunan rest area (parkir dan pusat oleh-oleh) di Desa Sidomulyo Pronojiwo	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Branding Kopi Organik	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Branding beras organik lumajang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
				dan Perdagangan
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Daya Tarik Agrowisata	Dinas Pariwisata
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Festival Produk Agro	Dinas Pariwisata
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan Pemandu Wisata Ternak Kambing dan Biogas	Dinas Pariwisata
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan saluran irigasi J.I Mualab	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan saluran irigasi J.I Jombok II	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan saluran irigasi J.I Pakurejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan saluran irigasi J.I Jombok I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan saluran irigasi J.I Sumber Kembang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan saluran irigasi J.I Sumber Nongko I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Peningkatan saluran irigasi J.I Jabon	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
		Daerah		Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan saluran irigasi J.I Sumber Ciri	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan saluran irigasi J.I Glendangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan saluran irigasi J.I Bentrong Suko	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I Jombok	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I Panggung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I Dadapan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I Bacem	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I Suco	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I Lateng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I Pakurejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembuatan Peta Dasar untuk Rekomendasi BIG	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembuatan Peta Dasar untuk Rekomendasi BIG	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembuatan Peta Dasar untuk Rekomendasi BIG	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Penyusunan pemetaan tanah aset pemma	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang sudah ada / meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, SR)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Optimalisasi Jaringan Perpipaan (memperluas jaringan perpipaan dan sambungan rumah serta memperbaiki jaringan perpipaan yang rusak)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Penerangan Jalan Umum di Wilayah Agropolitan	Dinas Perhubungan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Penyediaan Rambu di Wilayah Agropolitan	Dinas Perhubungan
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Nilai Investasi	Penyusunan Peta Potensi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Nilai Investasi	Penyusunan IPRO	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan KEHATI	Dinas Lingkungan Hidup
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Pelestarian sumber Mata Air	Dinas Lingkungan Hidup
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatkan Pengelolaan Sampah	Pengangkutan sampah menuju TPS di wilayah pasar Agro dan Rest Area	Dinas Lingkungan Hidup
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Kegiatan fasilitasi kemitraan BUMDesa dengan petani	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Pengembangan Kawasan Agropolitan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Penguatan dan Pendampingan kelembagaan bumdes)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengadaan 850 ekor sapi perah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengadaan Sapi Potong 10 ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengadaan kambing senduro 30 ekor	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Penanaman Porang seluas 5 Ha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Penanaman Kopi seluas 180 Ha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Penanaman Pisang seluas 50 Ha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Penanaman Kapulaga seluas 5 Ha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan Budidaya Rumput Gajah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan dan pendampingan untuk menerapkan SOP, GAP untuk pengembangan Varietas Kopi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan Pengembangan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan dan Pembinaan peningkatan Kualitas kandang dan pakan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	penanaman budidaya Apel Ana	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Penanaman Teknologi GAP Kentang 50 Ha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan Hidroponik 5 Unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Penanaman Teknologi GAP Bawang Putih 25 Ha	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembuatan 1 kandang komunal @ 100 ekor kambing senduro	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembangunan JUT di Desa Argosari (2km), Wonocempoko Ayu (1 km), Desa Kandangtepus (0,5 km) dan Kandangan (0,5 km) dan Ranu Pani (0,2 km)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan Olahan berbasis pisang, 10 kegiatan pelatihan di 3 desa (Desa Burno, Desa Jambekumbu, Desa Kandangtepus)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan Kewirausahaan dan akuntansi sederhana bagi usaha mikro @60 Orang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan perkoperasian bagi pengurus dan anggota koperasi primer	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Penyuluhan Perkoperasian bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Digital Retail Accounting Training/ Pelatihan Akuntansi Lanjutan Bagi Koperasi Baru	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembangunan 7 unit packing house	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembangunan Packing House dan Solar Dume Kapulaga 2 paket	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembangunan 3 unit Sarana Sentra Susu di Ds. Kandangtepus, Ds. Kandangan, Ds. Wonocempokoayu	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembangunan 2 unit Sarana Sentra Susu Kambing di Ds. Burno	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembangunan 2 unit Sarana Sentra Susu Kambing di Kandangtepus	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
				dan Perdagangan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan pembuatan wood pallet di 6 LMDH	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembangunan 1 unit Sentra Kopi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembangunan sarana pasca panen kopi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembangunan 2 unit Pabrik kecil Pengemasan Susu Kambing Etawa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	2 unit pabrik kecil pengemasan dan pengolahan susu di desa burno dan desa kandang tepus	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Fasilitasi kegiatan promosi produk dan pasar Sentra konvensional / digital)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan membranding produk	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan membranding pengemasan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan membranding pemasaran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan membranding sertifikasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Rest Area Ranu Pane (gazebo)	Dinas Pariwisata
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan View Point Bantengan (parkir, taman, jembatan sky view, jalur sky view, toilet, gazebo dan signage)	Dinas Pariwisata
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembangunan View Point Dayangan	Dinas Pariwisata
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai	Pembangunan tower pemantauan pendakian terkait program zero waste	Dinas Pariwisata

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
		PDRB	and zero accident	
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Sosialisasi program IAD Lumajang kepada masyarakat	Dinas Pariwisata
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	pelatihan jasa usaha	Dinas Pariwisata
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan bahasa asing	Dinas Pariwisata
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Peningkatan kapasitas SDM sebagai tour guide/sertifikasi pemandu wisata dan pengelola wisata	Dinas Pariwisata
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	study banding ke tempat wisata yang sudah berjalan baik pengelolaannya	Dinas Pariwisata
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pendampingan pokdarwis/pendekatan dengan keyperson / keagamaan	Dinas Pariwisata
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Edukasi Pengelolaan Sampah kepada Masyarakat	Dinas Pariwisata
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan Interpretasi Wisata	Dinas Pariwisata
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Kemitraan dengan Swasta/BUMN melalui forum-forum CSR	Dinas Pariwisata

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Gelar budaya tengger dan produk desa penyangga	Dinas Pariwisata
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Normalisasi Ranu Pani	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan rutin jalan di kecamatan senduro dan Pasrujambe	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan lingkaran Argosari	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Talud Kayuenak Argosari	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pendampingan RDTR Senduro	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Air Bersih di Argosari	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan IPAL	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan bangunan konservasi tanah dan air (RPP PKS)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Jalan dan drainase lingkungan desa ranupani	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Jalan dan drainase lingkungan desa argosari	Dinas Perumahan dan Kawasan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
		Daerah		Permukiman
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Pedestrian dan Drainase dari Kantor TNBTS Pendakian menuju Kantor Balai Desa Ranupani	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemasangan Rambu dan apil	Dinas Perhubungan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemasangan PJU Desa Burno dan Desa kandang tepus	Dinas Perhubungan
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Nilai Investasi	fasilitasi promosi investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Nilai Investasi	penyusunan FS investasi wil IAD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Nilai Investasi	video promosi IAD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kualitas Udara	Pembuatan 3 unit pembangkit listrik dan biogas (biogas skala komunal)	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kualitas Udara	Fasilitasi 3 unit sarana pembuatan/ pengolahan pupuk kandang dan 1 unit pengolahan sluri	Dinas Lingkungan Hidup
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatkan Pengelolaan Sampah	5 unit rumah kompos dan sarana pengolahan di 5 desa kandang tepus, Burno, Kandangan, Wonocempokoayu dan Jambekumbu	Dinas Lingkungan Hidup
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatkan Pengelolaan Sampah	Pengadaan Alat Pengolah Pupuk Organik di 6 LMDH	Dinas Lingkungan Hidup
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatkan Pengelolaan Sampah	Pengadaan kendaraan bermotor roda 3 di 6 LMDH	Dinas Lingkungan Hidup
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatkan Pengelolaan Sampah	Pengadaan alat / mesin pres kompos block 6 unit di 6 LMDH	Dinas Lingkungan Hidup
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatkan Pengelolaan Sampah	Rencana TPS Argosari	Dinas Lingkungan Hidup
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Perawatan dan Pemeliharaan Taman Anggrek Ranu Regulo	Dinas Lingkungan Hidup
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Kegiatan fasilitasi kemitraan BUMDesa dengan petani	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Penguatan dan Pendampingan kelembagaan (pokdarwis & bumdes)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Fasilitasi kerjasama Bumdesa dengan KUPS di semua desa IAD PS (di Buper)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pembangunan sarana parkir bis di Buper	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	pembangunan landmark bawah buper	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pujasera camping ground di Buper	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Gazebo, Taman Bunga di buper	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Rumah Container 1 unit di Buper	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pembangunan Lampu Taman di Buper	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pembangunan Rumah Anggrek di Buper	Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Monev pelaksanaan IAD	Kecamatan Senduro
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Monev pelaksanaan IAD	Kecamatan Pasrujambe
3	Pengembangan Perhutanan Sosial	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Pemeliharaan website Perhutanan Sosial /IAD-BF	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Penanaman vegetasi pantai penahan abrasi (mangrove / cemara laut)	Dinas Perikanan
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Penanggulangan pasca bencana di Wilayah Huntara/Huntap dan wilayah bencana lainnya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Peningkatan Lumbung Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pemanfaatan Pekarangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Penyusunan peta tematik yang menggambarkan wilayah tentang ketahanan dan kerentanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Mereview Dok.KRB dan lain-lain	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Mereview Dok. RPB dan lain-lain	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Pengembangan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Daerah-daerah Kawasan Rawan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Gempabumi melalui Perencanaan Kontijensi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tsunami melalui Perencanaan Kontijensi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana erupsi gunungapi melalui Perencanaan Kontijensi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana erupsi gunungapi Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir Bandang melalui Perencanaan Kontijensi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	pembangunan embung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Peningkatan Indeks Ketahanan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
	Daerah	Daerah		Tata Ruang
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Jembatan Kaliregoyo	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Penyediaan air minum dan Perluasan Jaringan di daerah rawan air dan bencana	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Penyediaan air minum dan Perluasan Jaringan di daerah rawan air dan bencana	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Penyediaan air minum dan Perluasan Jaringan di daerah rawan air dan bencana	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pengelolaan IPAL	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan drainasi di area relokasi Pasca bencana	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Penyusunan desain rumah tahan gempa	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Fasum dan Fasos	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Penyusunan dokumen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Penyusunan dokumen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Penyediaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Sosialisasi kampung siaga bencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Sosialisasi taruna siaga bencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
				Anak
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Kapasitas PPGD Awam untuk Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penyediaan Upah Tenaga PSC	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pengadaan Alkes dan APD untuk Tenaga PSC	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pengadaan sarpras Gawat Darurat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pelatihan PPGD (30 orang Puskesmas @4jt)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pelatihan RHA (3 orang x 5 puskesmas) = 15 orang	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pelatihan HDP (5 org x 7 RS) = 35 orang	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
				Berencana
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pelatihan EMT (5 org x 25 puskesmas) =125 orang	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	monev desa tangguh bencana di 30 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Penanaman benih (buah matoa) 1.500 pohon untuk Rehabilitasi lahan kritis	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Pembinaan thd Kelompok masyarakat peduli lingkungan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Pengangkutan sampah di kawasan Huntara/Huntap	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	BOS Regular	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	BOSDA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembangunan Kamar Mandi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembangunan Lab Komputer	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rehabilitasi Ruang guru/Kepala sekolah/TU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rehab perpustakaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rehab kamar mandi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pengadaan Meja Kursi Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	pengadaan kain seragam SD merah putih	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	pengadaan skain seragam SD pramuka	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	pengadaan kain seragam MI hijau putih	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	pengadaan kain seragam MI pramuka	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	monev sarpras SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penerimaan peserta didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Ujian dan penyusunan soal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pemenuhan sarana pembelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penyelenggaraan Kompetisi Sains Nasional (KSN)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Bimtek Sekolah Penggerak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembinaan (Monitoring) Sekolah Penggerak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Akreditasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Stop DO, No DO (Upaya pencegahan putus sekolah)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Manajemen Berbasis Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembinaan Sekolah Inklusi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Gerakan Sekolah Mengaji (GSM)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembinaan Sekolah Literasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Monev madin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembinaan Sekolah ramah anak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pengolahan dan update Dapodik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Monev Pembinaan GTK SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Seleksi Calon Kepala Sekolah SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Seleksi Calon Pengawas SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan Kualitas Data Mutu GTK SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Workshop Koordinator Kelompok Kerja Guru (KKG) terkait penguatan AKM	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	BOS Regular	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	BOSDA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penerimaan peserta didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Ujian dan penyusunan soal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pemenuhan sarana pembelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Kompetisi Sains Nasional (KSN)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Bimtek Sekolah Penggerak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembinaan UKS (Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD); remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin);)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembinaan (Monitoring) Sekolah Penggerak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Akreditasi Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Stop DO, No DO (Upaya pencegahan putus sekolah)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Manajemen Berbasis Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembinaan Sekolah Inklusi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Gerakan Sekolah Mengaji (GSM)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembinaan Sekolah Literasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Monev madin	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembinaan Sekolah ramah anak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pengolahan dan update Dapodik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Monev Pembinaan GTK SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan Kualitas Data Mutu GTK SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan kapasitas GTK SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembangunan Laboratorium Komputer	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembangunan Kamar Mandi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rehabilitasi Ruang Kelas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pengadaan Kain Seragam SMP biru putih	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pengadaan kain Seragam SMP Pramuka	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pengadaan Kain Seragam MTs biru putih	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pengadaan kain Seragam MTs Pramuka	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pengadaan Kain Seragam MA abu-abu putih	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pengadaan kain Seragam MA Pramuka	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	monev sarpras SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	BOP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penyusunan Perbup PAUD HI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rapat Koordinasi lintas sektor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Siswa PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	parenting (keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan; anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	monev sarpras PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Monev kelembagaan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	FGD dan diseminasi hasil monev	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Monev Pembinaan GTK PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan Kualitas Data Mutu GTK PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembangunan taman bermain sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	rehab ruang kelas :	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pengadaan APE Luar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pendampingan Pendidikan Kesetaraan (Gempita Desa)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Monitoring Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rapat Koordinasi Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembuatan Media Promosi Pendidikan Kesetaraan (Gempita Desa)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penyelenggaraan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penyelenggaraan Ujian Pendidikan Kesetaraan (UPK)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penyelenggaraan Ujian Semester Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Bimtek Tutor Keaksaraan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Review regulasi gempita desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penyaluran BOP Kesetaraan Pusat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penyaluran BOP Kesetaraan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Dana Keaksaraan Dasar (Hibah Daerah)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	penyusunan silabus SD SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Sosialisasi Perizinan dan Akreditasi PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Desk Rekonsiliasi Data Guru dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Review Dokumen Pemetaan dan Distribusi Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Museum Wengi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Belajar Bersama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Festival Museum Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pengembangan Aplikasi serta pemeliharaan pada SMARTKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Verifikasi dan Validasi data dapodik dengan Dispendukcapil	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	koordinasi, verifikasi data	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pengadaan benih ikan unuk ditebar (keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi)	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pengadaan sarana usaha perikanan	Dinas Perikanan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
	an Stunting			
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pengembangan kapasitas nelayan kecil	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	koordinasi kerjasama kemitraan usaha	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pembinaan kelembagaan kepada POKDAKAN	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	koordinasi kerjasama kemitraan usaha	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	monitoring dan evaluasi pembudidaya ikan	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	survei dan verifikasi pengajuan rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK)	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pengadaan prasarana untuk POKDAKAN (keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi)	Dinas Perikanan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	monitoring dan evaluasi pembudidaya ikan	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Rehabilitasi BBI	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pengadaan sarana untuk POKDAKAN (keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi)	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	monitoring dan evaluasi pembudidaya ikan	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pengadaan sarana di BBI	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pembinaan pengawasan usaha perikanan tangkap	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pembinaan pengawasan usaha perikanan budidaya	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	koordinasi, verifikasi data	Dinas Perikanan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pemantauan mutu dan kewanamanan pangan produk perikanan	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pengadaan sarpras olahan hasil perikanan	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	monitoring dan evaluasi sarpras pengolahan hasil perikanan	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pengadaan sarpras pemasaran hasil perikanan	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	monitoring dan evaluasi sarpras pemasaran hasil perikanan	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	GEMARIKAN (keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri)	Dinas Perikanan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pelatihan diversifikasi hasil perikanan	Dinas Perikanan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah) (rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah) (rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah) (rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah) (rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
			domestik) layak)	
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulang an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak) (rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulang an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pembinaan KPSPAM	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulang an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pembangunan Sumur Bor	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulang an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pembangunan Pengolahan/Treatme nt Air Minum (rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulang an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Penyusunan Dokumen RISPAL (Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah) (rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Rehabilitasi Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman (rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pembangunan Tangki Septik skala individual perdesaan min 50 kk	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pembinaan Teknik Kepada Kelompok Masyarakat Pengelola Air Limbah Domestik	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pelayanan Jasa dan Administrasi UPT PALD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Rehab IPLT (Bak pengolaan Lumpur Tinja dan Atap)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Penyedotan dan Pengangkutan Lumpur Tinja	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Monitoring dan evaluasi kinerja IPLT	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Sosialisasi L2T2 Tingkat Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Penyusunan SK status jalan Kabupaten dan desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Verifikasi dokumen BKK	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
	an Stunting			
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Penyusunan Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Penyusunan Leger Jalan Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Survei kondisi jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Survei kondisi jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Peningkatan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Rehabilitasi Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pemeliharaan Rutin Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pembangunan Jembatan Bolong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pembangunan Jembatan Jombok, Ruas Sarikemuning - Pagowan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Rehabilitasi Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pemeliharaan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	verval DTKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Verifikasi dan Validasi Data Jaminan Kesehatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Peningkatan kapasitas Pendamping PKH	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pelaksanaan Labelisasi KPM PKH	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Rekonsiliasi Data PKH	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Koordinasi Teknis Pendamping PKH	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pertemuan Sosialisasi Linjamsos	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Monitoring dan Evaluasi Program PKH (kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan;	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat;	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	pemberian bantuan sosial pangan utk keluarga miskin (Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	pemberian bantuan sosial beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu dan penghafal Al Quran	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	sosialisasi program sembako (BPNT)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Koordinasi tim bansos pangan kabupaten, kecamatan dan pendamping bansos pangan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pemberian bantuan sosial beras untuk keluarga miskin	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Sosialisasi bagi penerima Beasiswa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Bimbingan dan Pemantapan pengurus KUBE	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pemberian Hibah PMI	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pemberian Hibah GNOTA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Pembinaan BKB, BKR, BKL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Pembinaan Rumah Curhat Tingkat Kecamatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Pebinaan PATBM	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Pembinaan Puspaga (keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Pembinaan SRA, Dekela	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Pembinaan Tim Gugus Tugas SRA,	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Rakor Forum PUSPA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Desk PPRG semua PD	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Rakor PPRG Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Kegiatan Padat Karya pemeliharaan sarpras lingkungan	Dinas Tenaga Kerja
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Penyelenggaraan Bursa kerja skala Kabupaten	Dinas Tenaga Kerja
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelaatihan bagi pencaker	Dinas Tenaga Kerja

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas air dan udara	Pemantauan kualitas lingkungan (air sungai, air laut, udara dan tanah)	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas air dan udara	Pemantauan kualitas lingkungan (udara)	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas air dan udara	Rapat Koordinasi Pengendalian Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas air dan udara	Pembinaan Adaptasi/Mitigasi Perubahan Iklim di Kelurahan atau Desa	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas air dan udara	Rapat Koordinasi Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca (EGRK)	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas air dan udara	Pembangunan sumur resapan	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas air dan udara	Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup di lahan kritis bekas tambang Kabupaten Lumajang	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pengomposan Sampah Organik	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Penyediaan bahan dan alat kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan Mesin Pencacah Kompos	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan Kendaraan Roda Tiga	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pengangkutan Sampah dari Sumber ke TPA	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan pengelolaan sampah	Penyapuan Fasilitas Umum	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan truk Angkutan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan Kontainer Sampah	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan Gerobak Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan Becak Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan Kendaraan Motor Sampah Roda 3	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan Mesin Pencacah Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan Alat Berat TPA	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan jembatan Timbang TPA	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan instalasi gas metan	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Bimtek Pengelolaan Sampah 3R	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Bimtek Pengelolaan Sampah 3R	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Bimtek Pengelolaan Sampah 3R	Dinas Lingkungan Hidup
5		Meningkatkan pengelolaan sampah	Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pendampingan masyarakat penerima bantuan TPS 3R	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pendampingan usaha/kegiatan pengurangan sampah	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pembangunan Bank Sampah	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pembangunan Rumah Kompos	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pembangunan TPS3R (DAK)	Dinas Lingkungan Hidup
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pelayanan RCP (Reaksi Cepat Pelayanan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pelayanan Pendaftaran Penduduk Cetak Dokumen	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pelayanan Verifikasi Data Kependudukan Pelayanan Perekaman Biometrik Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Jebol Anduk Pelayanan Pendaftaran Pendudukn	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pelayanan Terpadu Adminduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Jebol Anduk Pelayanan Capil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pengembangan BUMDES di Desa yang belum berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Monitoring, Pembinaan, dan Evaluasi BUMDesa yang sudah berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pelatihan Manajemen BUMDesa yang sudah berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pelatihan Pengembangan Usaha BUMDesa yang sudah berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Penguatan kapasitas bumdes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Penguatan peran Kader dalam kelembagaan (FGD)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Monitoring dan pembinaan posyandu gerbangmas siaga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Penyusunan juknis posyandu gerbangmas siaga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	TOT Pokjanal posyandu GMS	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pembinaan dan TL pendataan gerbangmas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	penyediaan posyandu kits untuk posyandu yang naik strata (dari pratama ke purnama atau madya ke mandiri)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	lomba posyandu gerbangmas siaga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Monitoring dan Penilaian Lomba Pasar Desa Tingkat Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Orientasi Pengurus UPKu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Peningkatan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	RAKOR (Rapat Koordinasi)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	RAKER (Rapat Kerja)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Rapat Pleno Dengan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Rapat Pleno Dengan Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pendataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pertemuan Konsolidasi KMPK Se Kabupaten Lumajang	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kapasitas dokter dalam Pelayanan KIA KB dg metode BL	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Kapasitas Bidan dalam Pelayanan KIA dan KB dengan Metode Blended Learning	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	In House Training Kasus Maternal (OJT Tatalaksana Penyebab Kematian Ibu dan Bayi terbanyak bagi Bidan)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pendampingan Rumah Bersalin Dalam Pelayanan Neonatal	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Orientasi Pelayanan Neonatal Esensial bagi Klinik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Skrining Usia Produktif	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Asuhan Keperawatan Keluarga Lansia Mandiri	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Skrining HT tingkat Sekolah Tinggi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Skrining DM pada OPD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Gerakan Lumajang Bebas Pasung	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Bimtek manajemen tatalaksana program TB kabupaten	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penguatan SDM Pemetaan masyarakat beresiko HIV	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Bimtek Penguatan SDM layanan PDP	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PELATIHAN APN	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PPGD	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PELATIHAN KEGAWATDARURATAN MATERNAL NEONATAL	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PELATIHAN ABPK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PHLEBOTOMY	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PELATIHAN MANAJEMEN PUSK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)		Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Updating informasi secara berkala	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	publikasi kegiatan tematik scr periodik	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Pemeliharaan media luar ruang	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Pembuatan dan pemasangan media luar ruang	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Melakukan pembinaan/bimtek peningkatan kapasitas PPID Pembantu	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Melakukan pembinaan/bimtek peningkatan kapasitas PPID Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Melaksanakan Workshop/Bimtek terhadap Pemangku Kepentingan	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan terkait Diseminasi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Siaran radio	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	surat kabar, media massa,	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pemeliharaan perpustakaan elektronik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Penyediaan informasi bagi pemustaka (e book) pengembangan atau penambahan buku elektornik	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pembentukan Forum Penggerak Literasi (8 unsur yi Penerbit, Penulis, Pendongeng, Komunitas, Pendidik, Pustakawan, TBM, Peneliti)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi untuk kesiapan akreditasi di 5 Taman Baca , 6 Perpustakaan Sekolah, 2 Perpustakaan khusus dan 3 Perpustakaan Desa	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pengembangan Perpustakaan Desa terotomasi dengan INLIST-Lite 7 Perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pembinaan perpustakaan desa	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pengelolaan Koleksi bahan pustaka	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	pengadaan buku	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pemberikan Pelayanan Motor Pintar (Mopin) di wilayah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pemberikan Pelayanan Mobil Keliling	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pemberikan pelayanan sistem paket	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pemberian Pelayanan Bis Keliling	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SMA	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Lomba Perpustakaan Desa/Kel.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Lomba Bercerita	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Inklusi Sosial	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pemberikan penghargaan bagi OPD dengan Penulisan Buku Terbaik (10 Pemenang)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pemberikan penghargaan bagi Pemustaka yang aktif di perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pemberikan penghargaan bagi Pemustaka yang berkontribusi pada perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pemberikan penghargaan bagi pemenang lomba perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pemberikan penghargaan pada hari kunjung perpustakaan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Pemberikan penghargaan pemenang lomba Bercerita	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan Tata Kelola, Bisnis dan Pemasaran Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan kebersihan lingkungan, sanitasi dan pengelolaan sampah di Destinasi	Dinas Pariwisata
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pembentukan Asosiasi Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Usaha Pariwisata	Dinas Pariwisata
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Penyediaan media promosi kepariwisataan	Dinas Pariwisata
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Promosi kuda kencak dan topeng kaliwungu	Dinas Pariwisata
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Partisipasi Pameran promosi kepariwisataan Lumajang	Dinas Pariwisata
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Lumajang Mbiyen	Dinas Pariwisata
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pasinan Dingklik	Dinas Pariwisata
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan inovasi kuliner	Dinas Pariwisata
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan tata kelola destinasi	Dinas Pariwisata

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan home stay	Dinas Pariwisata
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan kriya	Dinas Pariwisata
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan ketrampilan kriya	Dinas Pariwisata
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Fasilitasi Pameran Produk Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan SL GAP	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan SL GAP Petani tembakau	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan manajemen agribisnis petani tembakau	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan pengolahan pupuk organik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pendampingan Demplot padi organik/padi sehat,	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pembinaan teknologi ramah lingkungan menuju organik tanaman cabai rawit, cabai besar, kentang, bawang merah,	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
			kapulogo	
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Budidaya tanaman kentang dilahan terassering	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Gerakan gemar makan sayur dan buah bagi anak TK/PAUD (anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pengadaan bibit kambing senduro	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan teknis pemeliharaan sapi dan pengolahan HMT	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan teknis pemeliharaan domba/kambing dan pengolahan HMT	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan Good Farming Practice	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelaksanaan Gerakan gemar minum susu serta makan daging dan telur (anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan pengolahan susu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Gudang Lumbung Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pembangunan Rumah RMU dan Rumah Bed Dryer	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Rice Miling Unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pembangunan Lantai Jemur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Bed Dryer	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Penyusunan dokumen Perencanaan Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	ketersediaan pangan berbasis Sumber daya lokal dan olahannya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Monitoring dan evaluasi stok, pasokan dan harga pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pembinaan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pemberdayaan P2L(Sosialisasi, Koordinasi, Monev, Bimtek, Hibah)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Monev P2L	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Penyusunan dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/ Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Koordinasi penerbitan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Survey produk PSAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Operasi pasar untuk barang kebutuhan pokok yang harganya tidak terjangkau	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Monitoring Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Fasilitasi kegiatan Pameran APKASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Fasilitasi kegiatan Pameran Jatimfair	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pembuatan Video Promosi Produk Ekspor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Penyelenggaraan Pameran Virtual	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pasar Ramadhan dan Pameran ...	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan Pemasaran Online	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan Pemasaran Online	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pengembangan UMKM (Metode Pemasaran Online)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan, Bimbingan Teknis, Pelaku UMKM (Pelatihan Pemasaran Online)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan Kemasan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Bantuan Alat Produksi Usaha Tahu dan Tempe	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan Kemasan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Bantuan Kemasan IKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
				dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Fasilitasi Merk, halal, uji nutrisi dan SNI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Verifikasi Pengajuan ijin Usaha Simpan pinjam	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Monitoring (Identifikasi Koperasi)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Monitoring Kepatuhan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Identifikasi usaha mikro (peningkatan akses kredit)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	sosialisasi kemitraan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pemberdayaan Kelembagaan BUMTren	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	koordinasi terkait pemberdayaan UM (bantuan modal usaha UM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan Produk Olahan Makanan (Sosialisasi BTP)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelaksanaan rakor teknis perizinan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Nilai Investasi	Penyediaan Saluran Komunikasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Nilai Investasi	Pengelolaan dan pengkoordinasian proses penyelesaian pengaduan masyarakat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Nilai Investasi	Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian insentif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Nilai Investasi	Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal terkait layanan perizinan dan nonperizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Fasilitasi IPM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Fasilitasi Aksi Stunting	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Fasilitasi Kabupaten Layak Anak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Fasilitasi Penghapusan Pernikahan Anak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Fasilitasi Germas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Penyusunan Kajian IPM Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Fasilitasi penyusunan Kajian Pembangunan Manusia Desa Ranupane	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	RAD Stunting	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	RAD KLA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Monev IPM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Monev Aksi Stunting	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Monev Kab. Layak Anak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Monev penghapusan Pernikahan Anak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Monev Germas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Identifikasi potensi ekspor kabupaten Lumajang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) sub program interkoneksi wisata	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Asistensi dengan lembaga vertikal (kementerian/provinsi) sub program agro industri	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Penyusunan Strategi Peningkatan Ekonomi Pasca Covid-19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Ekonomi Pesisir	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia			Badan Kepegawaian Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	meningkatkan Profesionalitas ASN	Pelatihan APN bagi bidan (2 angkt)	Badan Kepegawaian Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	meningkatkan Profesionalitas ASN	Diklat kabupaten layak anak (5 angkt)	Badan Kepegawaian Daerah

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	meningkatnya Profesioanlitas ASN	Diklat kompetensi kepala sekolah	Badan Kepegawaian Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	meningkatnya Profesioanlitas ASN	Diklat manajemen puskesmas bagi kepala puskesmas (1 angkt)	Badan Kepegawaian Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Hibah Program Study DiLuar Kampus Utama (PSDKU) Politenik negeri Malang di Lumajang	Sekretariat Daerah
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	POSYANDU di Kelurahan/desa	Kecamatan
5	Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia - Peningkatan Indeks Pendidikan - Penanggulangan Stunting	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	penggerakan PKK	Kecamatan
5	Penanggulangan Stunting	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	BOS Regular	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Penanggulangan Stunting	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Bimtek Sekolah Penggerak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Penanggulangan Stunting	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembinaan UKS (Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD); remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
			status anemia (hemoglobin);)	
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	BOS Regular	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Bimtek Sekolah Penggerak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembinaan UKS (Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD); remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin);)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	BOP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penyusunan Perbup PAUD HI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rapat Koordinasi lintas sektor	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Siswa PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	parenting (keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan; anak berusia di bawah lima tahun (balita)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
			yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;)	
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	monev sarpras PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Bimtek Guru PAUD yang belum menjadi Kader	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	koordinasi, verifikasi data	Dinas Perikanan
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pengadaan benih ikan unuk ditebar (keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi)	Dinas Perikanan
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pengadaan sarana usaha perikanan	Dinas Perikanan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pembinaan kelembagaan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB)	Dinas Perikanan
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	koordinasi kerjasama kemitraan usaha	Dinas Perikanan
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	survei dan verifikasi pengajuan rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK)	Dinas Perikanan
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pengadaan prasarana untuk POKDAKAN (keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi)	Dinas Perikanan
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	monitoring dan evaluasi pembudidaya ikan	Dinas Perikanan
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Rehabilitasi BBI	Dinas Perikanan
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pengadaan sarana untuk POKDAKAN (keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi)	Dinas Perikanan
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	monitoring dan evaluasi pembudidaya ikan	Dinas Perikanan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pengadaan sarana di BBI	Dinas Perikanan
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	koordinasi, verifikasi data	Dinas Perikanan
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pemantauan mutu dan kewanan pangan produk perikanan	Dinas Perikanan
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pengadaan sarpras olahan hasil perikanan	Dinas Perikanan
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	monitoring dan evaluasi sarpras pengolahan hasil perikan	Dinas Perikanan
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pengadaan sarpras pemasaran hasil perikanan	Dinas Perikanan
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	monitoring dan evaluasi sarpras pemasaran hasil perikan	Dinas Perikanan
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	GEMARIKAN (keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri)	Dinas Perikanan
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pelatihan diversifikasi hasil perikanan	Dinas Perikanan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah) (rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah) (rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah) (rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah) (rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
			domestik) layak)	
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak) (rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pembinaan KPSPAM	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pembangunan Sumur Bor	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pembangunan Pengolahan/Treatment Air Minum (rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Perluasan Jaringan Perpipaan (Penambahan Jaringan Pipa dan Sambungan Rumah)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Renovasi Sarana Air Bersih Tandon	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Penyusunan Dokumen RISPAL (Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah) (rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Rehabilitasi Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman (rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pembangunan Tangki Septik skala individual perdesaan min 50 kk	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pembinaan Teknik Kepada Kelompok Masyarakat Pengelola Air Limbah Domestik	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Pelayanan Jasa dan Administrasi UPT PALD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur	Rehab IPLT (Bak pengolaan Lumpur Tinja dan Atap)	Dinas Perumahan dan Kawasan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
		daerah		Permukiman
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Penyedotan dan Pengangkutan Lumpur Tinja	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Monitoring dan evaluasi kinerja IPLT	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Sosialisasi L2T2 Tingkat Kecamatan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	verval DTKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Verifikasi dan Validasi Data Jaminan Kesehatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan	Peningkatan kapasitas Pendamping PKH	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
		sosial		Anak
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pelaksanaan Labelisasi KPM PKH	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Rekonsiliasi Data PKH	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Koordinasi Teknis Pendamping PKH	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pertemuan Sosialisasi Linjamsos	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Monitoring dan Evaluasi Program PKH (kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan	Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
		sosial	Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan;	Anak
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat;	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	pemberian bantuan sosial pangan utk keluarga miskin (Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	sosialisasi program sembako (BPNT)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Bimbingan dan Pemantapan pengurus KUBE	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	lokakarya PATBM	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Pembinaan Puspaga (keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
				Anak
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Pembinaan SRA, Dekela	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Gudang Lumbung Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pembangunan Rumah RMU dan Rumah Bed Dryer	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Rice Miling Unit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pembangunan Lantai Jemur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Bed Dryer	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Penyusunan dokumen Perencanaan Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	ketersediaan pangan berbasis Sumber daya lokal dan olahannya	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Monitoring dan evaluasi stok, pasokan dan harga pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pembinaan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pemberdayaan P2L(Sosialisasi, Koordinasi, Monev, Bimtek, Hibah)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Monev P2L	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Penyusunan dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pengadaan, pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/ Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Koordinasi penerbitan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Survey produk PSAT	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas air dan udara	Pemantauan kualitas lingkungan (air sungai, air laut, udara dan tanah)	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pengomposan Sampah Organik	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Penyediaan keranjang dan sapu lidi	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan Mesin Pencacah Kompos	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan Kendaraan Roda Tiga	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pengangkutan Sampah dari Sumber ke TPA	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Penyediaan peralatan dan bahan kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Penyapuan Fasilitas Umum	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan truk Angkutan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggung an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan Kontainer Sampah	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan Gerobak Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan Becak Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan Kendaraan Motor Sampah Roda 3	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan Mesin Pencacah Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan Alat Berat TPA	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan jembatan Timbang TPA	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pemeliharaan Instalasi Gas Metan	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Bimtek Pengelolaan Sampah 3R	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Bimtek Pengelolaan Sampah 3R	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Bimtek Pengelolaan Sampah 3R	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pembangunan Bank Sampah	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pembangunan Rumah Kompos	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatkan pengelolaan sampah	Pembangunan TPS3R (DAK)	Dinas Lingkungan Hidup
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pengembangan BUMDES di Desa yang belum berjalan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Penguatan peran Kader dalam kelembagaan (FGD)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Monitoring dan pembinaan posyandu gerbangmas siaga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Penyusunan juknis posyandu gerbangmas siaga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	TOT Pokjanal posyandu GMS	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pembinaan dan TL pendataan gerbangmas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pelatihan KPM dan Pembinaan di 13 Lokus	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	penyediaan posyandu kits untuk posyandu yang naik strata (dari pratama ke purnama atau madya ke mandiri)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	lomba posyandu gerbangmas siaga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu KIT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Peningkatan dan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	RAKOR (Rapat Koordinasi)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	RAKER (Rapat Kerja)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Rapat Pleno Dengan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Rapat Pleno Dengan Kecamatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	pendataan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Bumi Dumper, Pawon Urip	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pelatihan Konselor Menyusui pada Bidan Desa dan RS (3 ANGKATAN)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
				Berencana
6	Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Seminar Asi dalam Rangka Peingatan Pekan Asi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Peningkatan Indeks Pendidikan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Monev kegiatan Penjaringan Anak sekolah, Kelas Konselor Remaja	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	sosialisasi dan orientasi 5 pilar STBM bagi kader kesling (STBM)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	pendampingan kader STBM	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	monitoring pasca pendamping kader STBM	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	SOSIALISASI INOVASI JASMU PASTI	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PENDAMPINGAN WIRAUSAHA SANITASI	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PEMBINAAN JEJARING KERJA WIRAUUSAHA SANITASI	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pemberian Nutrisi pada Balita Gizi Buruk dan Stunting dan ibu hamil	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pertemuan Pembentukan KP ASI	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Monitoring Dan Evaluasi TTd Rematri pada sekolah lokus stunting, Pertemuan kantin Sehat, Pemeriksaan Status Gizi remaja dan pemeriksaan HB,	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	implementasi media strakom penanganan stunting, Media Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PELATIHAN KONSELING PEMBERIAN MAKAN BAYI DAN ANAK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PELATIHAN KONSELOR ASI	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pertemuan pembentukan Poktan di Kampung KB	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Minilok Kecamatan terkait stunting	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Audit Stunting	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pengadaan BKB Kit dan KIT siap Nikah	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pengadaan Pulsa Data TPK	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pendampingan Catin	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pendampingan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pendampingan Pasca Salin	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan SL GAP Petani tembakau	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan manajemen agribisnis petani tembakau	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan pengolahan pupuk organik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pendampingan Demplot padi organik/padi sehat,	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pembinaan teknologi ramah lingkungan menuju organik tanaman cabai rawit, cabai besar, kentang, bawang merah, kapulogo	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Budidaya tanaman kentang dilahan terassering	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Gerakan gemar makan sayur dan buah bagi anak TK/PAUD (anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pengadaan bibit kambing senduro	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pengadaan Ternak Sapi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan teknis pemeliharaan sapi dan pengolahan HMT	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	pengadaan domba wonosobo / kambing senduro	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan teknis pemeliharaan domba/kambing dan pengolahan HMT	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan Good Farming Practice	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelaksanaan Gerakan gemar minum susu serta makan daging dan telur (anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan pengolahan susu	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Fasilitasi IPM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Fasilitasi Aksi Stunting	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Penanggung an Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Fasiltasi Kabupaten Layak Anak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Fasilitasi Penghapusan Pernikahan Anak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Fasilitasi Germas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Penyusunan Kajian IPM Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Fasilitasi penyusunan Kajian Pembangunan Manusia Desa Ranupane	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	RAD Stunting	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	RAD KLA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Monev IPM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Monev Aksi Stunting	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Monev Kab. Layak Anak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Monev penghapusan Pernikahan Anak	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Monev Germas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Pelatihan APN bagi bidan (2 angkt)	Badan Kepegawaian Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Diklat manajemen puskesmas bagi kepala puskesmas (1 angkt)	Badan Kepegawaian Daerah

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kepuasan masyarakat	POSYANDU di Kelurahan/desa	Kecamatan
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya kepuasan masyarakat	penggerakan PKK	Kecamatan
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan Produk Olahan Makanan (Sosialisasi BTP)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
7	Penanggulang an Stunting	Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Pelatihan Kemasan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Bantuan sarpras LKSA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Bansos permakanan LKSA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pemberian bantuan makanan untuk anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan dan pengemis	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pemberian bantuan sandang untuk anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan dan pengemis	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Fasilitasi layanan kesehatan dasar anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan dan pengemis	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Fasilitasi Pengiriman dan penjemputan anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan dan pengemis	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Fasilitasi anak berhadapan dengan hukum	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Verval DTKS	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Verval JKN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pertemuan Sosialisasi Linjamsos	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Peningkatan kapasitas Pendamping PKH	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Koordinasi Teknis Pendamping PKH	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Rekonsiliasi Data PKH	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pelaksanaan Labelisasi KPM PKH	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Graduasi PKH	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Monitoring dan Evaluasi Program PKH (kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
			Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi)	
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pemberian bansos beras untuk warga miskin	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pemberian Bansos Pangan / Program Sembako (BPNT) untuk keluarga miskin	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Sosialisasi Bantuan Sosial Pangan / Program Sembako (BPNT)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Koordinasi tim Bantuan Sosial Pangan Kabupaten, Kecamatan dan pendamping bantuan sosial pangan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pemberian Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Sosialisasi penerima beasiswa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pendampingan KUBE	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Santunan kematian	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Bantuan pemulangan orang yang kehabisan bekal ke daerah asal	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Fasilitasi Dapur Umum	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	BOS Reguler	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	BOSDA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pengadaan Kain Seragam SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembayaran Upah dan Tambahan Upah GTK SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Hibah GTK Non NIP SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penyelenggaraan Pendidikan jenjang MI/Ula	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	BOS Reguler	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	BOSDA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pengadaan Kain Seragam SMP/MTs/MA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembayaran Upah dan Tambahan Upah GTK SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Hibah GTK Non NIP SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penyelenggaraan Pendidikan jenjang SMP/MTs/Wustha	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	BOP PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	BOP PAUD Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembayaran Upah dan Tambahan Upah GTK PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Hibah GTK Non NIP PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penyaluran BOP Kesetaraan Pusat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penyaluran BOP Kesetaraan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Hibah Daerah Keaksaraan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pagelaran seni tradisi (Harjalu)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Fasilitasi dalam festival seni budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Fasilitasi Kelompok Seni/Budaya (BKK)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pembayaran Iuran Peserta PBID	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Biaya kesehatan masyarakat miskin (tagihan pembiayaan SKTM di Rumah Sakit)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	jampersal	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pembelian susu ibu hamil dan balita gizi buruk	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pembinaan Posyandu Jiwa	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penggerakan masyarakat untuk pelaksanaan GERMAS	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Penyelenggaraan BIMTEK keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga pangan (IRTP)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pengawasan dalam rangka penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	- Pelayanan Persalinan Gratis - Pelayanan Jampersal - Pelayanan Pasien SKTM	RSU dr. Haryoto
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	- Pelayanan Persalinan Gratis - Pelayanan Jampersal - Pelayanan Pasien SKTM	RSU Pasirian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Klaim Pelayanan KB MKJP	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Pertemuan Pembinaan Pemberi Layanan KB di Faskes	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	monitoring dan evaluasi alat dan obat kontrasepsi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Fasilitasi Pelayanan KB MKJP	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Fasilitasi Penyaluran BLT Dana Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	BKK Jatim Puspa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	BKK Pemberdayaan BUMDesa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pelatihan dan pengadaan alat TKG	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan ketrampilan kerja bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Dinas Tenaga Kerja
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Kegiatan Padat Karya	Dinas Tenaga Kerja
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Penyelenggaraan Bursa Kerja	Dinas Tenaga Kerja

N o	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Fasilitasi Pelatihan CPMI	Dinas Tenaga Kerja
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Sosialisasi Perlindungan CPMI	Dinas Tenaga Kerja
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Fasilitasi pemulangan PMI	Dinas Tenaga Kerja
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Fasilitasi kasus perselisihan tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Monev UMK	Dinas Tenaga Kerja
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan ketrampilan bagi calon transmigran	Dinas Tenaga Kerja
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Fasilitasi Pemberangkatan calon tranasmigran	Dinas Tenaga Kerja
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	fasilitasi kemitraan usaha mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan / peningkatan kapasitas usaha mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Verlap bantuan Pokir	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pemberian Bantuan permodalan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan kewirausahaan (pengolahan, pemasaran dll)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Verlap bantuan usaha mlijo	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Bantuan modal usaha mlijo	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan teknis produksi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan manajemen wirausaha	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pendampingan produksi dan akses bahan baku dengan pemenuhan standar kemitraan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Fasilitasi akses pembiayaan/peningkatan modal koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pemberian Bantuan Koperasi (Pokir)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pembangunan/Rehabilitasi pasar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan Pemasaran Online	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pemberian bantuan alat produksi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan kemasan/packaging	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
				dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Penerapan sertifikasi produk	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pengembangan promosi produk ikm	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	pembinaan/pendampingan IKM untuk pengurusan izin	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Monitoring, koordinasi dan evaluasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelaksanaan operasi pasar sembako	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Monitoring penyaluran pupuk dan kelengkapan legalitas dokumen [perizinan dan penyaluran], serta rapat koordinasi dan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
			evaluasi	
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Fasilitasi pameran dagang/industri lokal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pasar ramadan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pameran Jatim fair (dekranasda)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan Wirausaha Muda	Dinas Pemuda dan Olahraga
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	pelatihan digital marketing untuk pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pembangunan destinasi wisata	Dinas Pariwisata
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pengadaan sarpras destinasi wisata	Dinas Pariwisata
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Revitalisasi pokdarwis	Dinas Pariwisata

N o	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan tata kelola dan pemasaran destinasi wisata	Dinas Pariwisata
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Partisipasi dalam pameran/festival/promosi wisata	Dinas Pariwisata
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Penyelenggaraan Festival Seni/Wisata	Dinas Pariwisata
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Penyediaan gedung/ruang kesenian	Dinas Pariwisata
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan souvenir	Dinas Pariwisata
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan Kuliner	Dinas Pariwisata
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Fasilitasi pameran produk ekraft	Dinas Pariwisata
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan Budidaya Tembakau dan pemberian bantuan saprodi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan Manajemen Agribisnis	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan pengembangan padi organik beserta pemberian bantuan saprodi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pemberian bantuan pupuk komoditas tanaman padi dalam rangka diversifikasi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
			tanaman tembakau	
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Penyediaan / bantuan sarana produksi	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pengadaan alat mesin pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pembinaan teknologi ramah lingkungan tanaman buah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Fasilitasi kemitraan petani	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pengadaan bibit hewan / tanaman	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pemberian Bantuan Modal Usaha Berternak Sapi/Kambing/domba	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pemberian bantuan ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan pengembangan padi ketan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka	Meningkatnya penyerapan	Bantuan alsintan dan saprodi	Dinas Ketahanan Pangan dan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
	Kemiskinan	angkatan kerja	pertanian	Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pembangunan/penge mbangan embung pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pembangunan / Rehabilitasi JUT	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pembangunan Dam Parit	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Penyediaan obat hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan dan bantuan alat bantuan alat pengendalian OPT	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Penyelenggaraan Sekolah Lapang	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pembangunan gudang lumbung pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pembangunan RMU	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pembangunan lantai jemur	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pengembangan bahan pangan lokal	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pembinaan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pemberdayaan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pelatihan olahan makanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Penyusunan peta ketahanan dan kerawanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Restocking (penebaran Benih Ikan)	Dinas Perikanan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengadaan sarana bagi budidaya ikan	Dinas Perikanan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap (perahu, jaring, cool box, life jacket, mesin) untuk nelayan	Dinas Perikanan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengadaan prasarana untuk kelompok pembudidaya ikan	Dinas Perikanan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pendampingan dan pelatihan kpd pembudidaya (akses ilmu pengetahuan, teknologi, informasi,	Dinas Perikanan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
			dll	
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Fasilitasi kemitraan usaha	Dinas Perikanan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pelatihan diversifikasi hasil perikanan	Dinas Perikanan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengadaan sarpras olahan hasil perikanan	Dinas Perikanan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Monev/Penilaian Kelas kelompok pembudidaya Ikan	Dinas Perikanan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengadaan sarpras pemasaran hasil perikanan	Dinas Perikanan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Mualap	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Parapet Menjangan Mati	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Parapet Celeng Mati	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Parapet Hulu Dam Tirtorejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Parapet Hilir Dam Tirtorejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Parapet Dam Tandak	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Parapet Solekan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Parapet Krai	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Pintu Spey Dam Karjono I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Pintu Dam Selok	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Pintu Sumber Glintungan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Pintu Dam Rekesan 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Gogosan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Jombok II	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Pakurejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Kedung Klampok	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Depok	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Sumber Tumpuk	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Solekan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Sopyono	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Krai	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Bodang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Klerek	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Kedung Caring	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Gedangmas	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Lewung	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
		Daerah		Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Gedangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Sempu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. P.Jum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Tandak	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Srenteng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Repeh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Klopogading	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Jerukan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Rakinten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Talang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

N o	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Potehan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Bondeli	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Paleran	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Jombok	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Kedung Lier	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Sinonggo	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Dilem	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Saluran Irigasi J.I. Rekesan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Behabilitasi J.I. Boreng Dam Boreng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Blukon	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

N o	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Solekan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Rakinten	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Bedayu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Jombok	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Rowogedang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Klopogading	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Sumber Bendo	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Duk	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Sumber Kutuk	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Sumber Gogosan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Rehabilitasi J.I. Selokambang	Dinas Pekerjaan Umum dan

N o	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
		Daerah		Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Gubug Domas	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Rejali	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Klakah Pakis	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Lombok	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Sapari	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Panggung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Srenteng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Sarijo	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Dadapan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I.Durek	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Lobang Kiri	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Depok	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Bacem	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Suco	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Lateng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi J.I. Pakurejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Normalisasi saluran Gedangmas II	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Normalisasi saluran Afvour Gedang Klutuk	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Normalisasi saluran Afvour Celengmati	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Normalisasi saluran Afvour Banter	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Normalisasi saluran Afvour Kokapan I	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
		Daerah		Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Normalisasi saluran Afvour Kokapan II	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Normalisasi saluran Wilayah Kerja Korwil Pasirian	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Normalisasi saluran Wilayah Kerja Korwil Tempeh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Normalisasi saluran Wilayah Kerja Korwil Lumajang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Normalisasi saluran Wilayah Kerja Korwil Sukodono	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Normalisasi saluran Wilayah Kerja Korwil Klakah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Normalisasi saluran Wilayah Kerja Korwil Jatiroto	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Normalisasi saluran Wilayah Kerja yosowilangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan J.I. (Teman INCAR) Wilayah Kerja Korwil Pasirian	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan J.I. (Teman INCAR) Wilayah Kerja Korwil Tempeh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

N o	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan J.I. (Teman INCAR) Wilayah Kerja Korwil Lumajang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan J.I. (Teman INCAR) Wilayah Kerja Korwil Sukodono	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan J.I. (Teman INCAR) Wilayah Kerja Korwil Klakah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan J.I. (Teman INCAR) Wilayah Kerja Korwil Jatiroto	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan J.I. (Teman INCAR) Wilayah Kerja yosowilangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan J.I. (Teman INCAR) irigasi Jaringan Irigasi Gedangmas I	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan jaringan irigasi Jaringan Irigasi Gedangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan jaringan irigasi Jaringan Irigasi Srenteng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan jaringan irigasi Wilayah Kerja Korwil Pasirian	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan jaringan irigasi Wilayah Kerja Korwil Tempeh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Pemeliharaan jaringan irigasi Wilayah Kerja Korwil	Dinas Pekerjaan Umum dan

N o	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
		Daerah	Lumajang	Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan jaringan irigasi Wilayah Kerja Korwil Sukodono	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan jaringan irigasi Wilayah Kerja Korwil Klakah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan jaringan irigasi Wilayah Kerja Korwil Jatiroto	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan jaringan irigasi Wilayah Kerja yosowilangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan Pintu Air Di Wilayah Kerja Korwil Pasirian	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan Pintu Air Di Wilayah Kerja Korwil Tempeh	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan Pintu Air Di Wilayah Kerja Korwil Lumajang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan Pintu Air Di Wilayah Kerja Korwil Sukodono	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan Pintu Air Di Wilayah Kerja Korwil Klakah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan Pintu Air Di Wilayah Kerja Korwil Jatiroto	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan Pintu Air Di Wilayah Kerja yosowilangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pelatihan dan Pembinaan HIPPA	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
		Daerah		Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Talud	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase/Gorong-gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase/Gorong-gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase/Gorong-gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase/Gorong-gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Sumur Bor	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Infrastruktur air minum perdesaan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Renovasi sarana air bersih	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan jalan lingkungan dan koordinasi dengan POKMAS dan OPD lain.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) / Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi insfrastruktur sistem pengelola air limbah domestik terpusat skala permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Hibah Air Limbah setempat / Bansos tangki septik individual	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	1. Pembinaan teknik KSM/KPP pasca kontruksi program DAK Sanitasi 2. Pembinaan teknik KSM/KPP pasca kontruksi program HALS 3. Pembinaan teknik operator SPALDT Huntara/Huntap 4. Sosialisasi PHBS dan SOPD SPALDT Masyarakat relokasi 5. Optimalisasi IPAL skala permukiman 6. BOP konsultasi dan perencanaan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	pembangunan sarana pengelolaan air limbah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan baru Infrastruktur Drainase Lingkungan/ Sumur Resapan/ Ecodrain	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Rehabilitasi rumah terdampak bencana	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Rumah untuk masyarakat terdampak bencana	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan hunian baru individu prasejahtera Pada SK Penanganan Kawasan Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Pada Kawasan Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

N o	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan fisik KOTAKU	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan hunian baru individu prasejahtera Pada SK Pencegahan Kawasan Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni diluar Kawasan Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan dan Perawatan Rusunawa	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas air	Pembangunan Sumur Resapan	Dinas Lingkungan Hidup
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas air	Bintek pengelolaan sampah 3R	Dinas Lingkungan Hidup
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas air	Pelaksanaan HPSN	Dinas Lingkungan Hidup
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Pembangunan RTH di Tempursari	Dinas Lingkungan Hidup
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Pembinaan Desa Berseri	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Nilai Investasi	Penyusunan regulasi terkait penetapan kebijakan pemberian insentif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Nilai Investasi	Kegiatan Gathering dengan mengundang calon investor dan OPD terkait	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Nilai Investasi	Pelaksanaan penyaluran Sembako bagi pasukan oranye, Tukang Becak dan Jukir	Bag. Kesejahteraan Rakyat - Sekretariat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Nilai Investasi	Hibah Honor Guru Ngaji	Bag. Kesejahteraan Rakyat - Sekretariat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Nilai Investasi	Pelayanan Pendaftaran Penduduk Cetak Dokumen (KK/KTP/KIA)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Nilai Investasi	Pelayanan reaksi cepat penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Nilai Investasi	Pelayanan Cetak Dokumen Akta Kelahiran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Nilai Investasi	Pelayanan Cetak Dokumen Akta Kematian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Nilai Investasi	Pelayanan Cetak Dokumen Akta Perceraian	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Nilai Investasi	Pelayanan Cetak Dokumen Akta Perkawinan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Nilai Investasi	Pelayanan Cetak Dokumen Akta Perubahan Status Anak	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Nilai Investasi	Pelayanan Cetak Dokumen Perubahan Status Kewarganegaraan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Nilai Investasi	Pelayanan Terpadu adminduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Nilai Investasi	Jebol anduk pelayanan capil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Masyarakat yang tangguh bencana	Pemenuhan logistik bagi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Masyarakat yang tangguh bencana	Pengadaan dan droping air bersih untuk daerah terdampak kekeringan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Fasilitasi DAK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Fasilitasi DBHCHT	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Fasilitasi Forum CSR	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Fasilitasi Usulan Musrenbangprov	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Verifikasi Renja	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Musrenbang Kecamatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Musrenbang Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Fasilitasi RPJMDesa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Fasilitasi RKPDesa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Fasilitasi IPM	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Fasilitasi Aksi Stunting	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka	Meningkatnya Kualitas	Fasilitasi TKPK	Badan Perencanaan Pembangunan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
	Kemiskinan	Perencanaan		Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Penyusunan RPKD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Penyusunan RAT	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Penyusunan LP2KD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Fasilitasi KISS KSPN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	KISS Perhutanan Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	KISS Agropolitan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	KISS IPDMIP	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	KISS Pokja PKP	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Kajian Pengembangan Potensi wisata	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Kajian Pengembangan Koperasi dan usaha Mikro	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

N o	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Kajian Pengembangan Kawasan Ekonomi Pesisir	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Pengembangan inovasi dan teknologi terkait kemiskinan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Koordinasi Pencapaian SPM	Kecamatan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelayanan Adminduk tuntas di kecamatan	Kecamatan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa	Kecamatan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kecamatan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Pembinaan Gerbangmas	Kecamatan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	Kecamatan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Pemberdayaan kelompok masyarakat dan ormas di kelurahan	Kecamatan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelaksanaan Pawon Urip	Kecamatan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelatihan batik	Kecamatan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Penyuluhan dan Penggerakan PHBS	Kecamatan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Pelatihan ketrampilan/wirausaha	Kecamatan
8	Penurunan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Fasilitasi penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa	Kecamatan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rehabilitasi puskesmas	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rehabilitasi Pustu	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pemberian Ijin Praktek Nakes	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pemeriksaan bumil di ponkesdes, polindes, posyandu	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
				Berencana
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Akses ke Posbindu	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Posyandu lansia	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pembinaan penyelenggaraan posyandu	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rapat Kerja Tim Pokjandal Desa Siaga Aktif Kab. Lumajang	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rakor Linsek Linprog dalam upaya Peningkatan Strata Posyandu	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Refreshing Sistem Informasi Posyandu	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Fasilitasi kepesertaan BPJS	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rehabilitasi ruang guru/kepala sekolah/TU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rehabilitasi ruang guru/kepala sekolah/TU	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rehabilitasi sedang/berat gedung/ruang kelas ruang guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pengadaan perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya akses dan kualitas	Penyelenggaraan kejar paket	Dinas Pendidikan dan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
		pendidikan		Kebudayaan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Penyelenggaraan Gempita Desa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Pembinaan Perpustakaan Desa	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Lomba Perpustakaan Desa	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pembinaan Posyandu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Penguatan Pokjanal Posyandu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Fasilitasi sarana Posyandu	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Peningkatan budaya gotong royong	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pembinaan dan pengembangan pasar desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pembinaan kelompok olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pencegahan konflik sosial di masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Patroli keamanan	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Penindakan pelanggaran trantibum	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pengamanan unjuk rasa	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Pembinaan Siskamling	Satuan Polisi Pamong Praja
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pemberian bantuan makanan untuk anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan dan pengemis	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pemberian bantuan sandang untuk anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan dan pengemis	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Fasilitasi layanan kesehatan dasar anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan dan pengemis	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Fasilitasi Pengiriman dan penjemputan anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan dan pengemis	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan yang Sudah Ada/Meningkatkan Idle Capacity (Pembangunan Broncaptering, Reservoir, Jaringan Perpipaan, Sambungan Rumah)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Optimalisasi Jaringan Perpipaan (Memperluas Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah, serta Memperbaiki Jaringan Perpipaan yang Rusak)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Sumur Bor	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Infrastruktur air minum perdesaan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Renovasi sarana air bersih	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) / Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 KK	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Hibah Air Limbah setempat / Bansos tangki septik individual	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	pembangunan sarana pengelolaan air limbah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan draainase pada kawasan huntara/huntap	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Pembangunan/Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas air	Bintek Pengelolaan Sampah 3R	Dinas Lingkungan Hidup
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas air	Pelaksanaan HPSN	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas air	Pemantauan kualitas lingkungan (air sungai, air laut, udara dan tanah)	Dinas Lingkungan Hidup
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas air	Fasilitasi pemenuhan kebutuhan Listrik rumah tangga	Bag. Perekonomian dan SDA - Sekretariat Daerah
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan jaringan telekomunikasi internet	Dinas Komunikasi dan Informatika
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya daya beli masyarakat	fasilitasi kemitraan usaha mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pelatihan / peningkatan kapasitas usaha mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pelatihan Teknik Produksi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pemberian Bantuan permodalan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya daya beli masyarakat	Verlap bantuan permodalan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
				dan Perdagangan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya daya beli masyarakat	Fasilitasi akses pembiayaan/peningkatan modal koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya daya beli masyarakat	Verlap bantuan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pembangunan/Rehabilitasi pasar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya daya beli masyarakat	fasilitasi pemasaran produk melalui kemitraan ritel dan marketplace	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Penyediaan angkutan umum	Dinas Perhubungan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
		Daerah		Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Talud	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase/Gorong-gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase/Gorong-gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase/Gorong-gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase/Gorong-gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase/Gorong-gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pembangunan Drainase/Gorong-gorong	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Daerah	Pemeliharaan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Masyarakat yang tangguh bencana	Sosialisasi potensi rawan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Masyarakat yang tangguh bencana	Pelatihan penanganan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Masyarakat yang tangguh bencana	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Koordinasi Pencapaian SPM	Kecamatan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Koordinasi pemeliharaan sarpras umum (jalan, ruang terbuka hijau, pasar dll)	Kecamatan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Pembinaan Gerbangmas	Kecamatan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Pembinaan Gerbangmas	Kecamatan
9	Peningkatan Indeks Desa membangun	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Pembinaan Linmas	Kecamatan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	- Operasionalisasi SIPD Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	- Pengembangan Dashboard Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	- Pengembangan SIMIN (Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	- Pengembangan Aplikasi E-litbang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Pengembangan Smart City	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Operasionalisasi SIPD Perencanaan	Badan Pengelola Keuangan Daerah
10	Pengembangan Smart City	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pemeliharaan Aplikasi SIPKD	Badan Pengelola Keuangan Daerah
10	Pengembangan Smart City	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pemeliharaan aplikasi SIPBOS	Badan Pengelola Keuangan Daerah
10	Pengembangan Smart City	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pemeliharaan aplikasi SIMBADDA	Badan Pengelola Keuangan Daerah
10	Pengembangan Smart City	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Pembangunan aplikasi manajemen Aset	Badan Pengelola Keuangan Daerah
10	Pengembangan Smart City	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Operasionalisasi E-Pajak Pasir / E-SKAB	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
10	Pengembangan Smart City	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pemasangan dan penggunaan RFID (alternatif pajak pasir)	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
10	Pengembangan Smart City	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Operasionalisasi E-Reklame	Badan Pajak dan Retribusi Daerah

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
10	Pengembangan Smart City	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Operasionalisasi E-BPHTB	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
10	Pengembangan Smart City	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Operasionalisasi SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH (E-SIMPADDA)	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
10	Pengembangan Smart City	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pengembangan Aplikasi E-Retribusi (digunakan oleh PD penghasil)	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
10	Pengembangan Smart City	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pengadaan aplikasi E-SPOP/ LSPOP (Pembayaran Obyek Pajak)	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
10	Pengembangan Smart City	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pengadaan aplikasi GIS	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Operasionalisasi LPSE, E-proc	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa - Sekretariat Daerah
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Pengembangan SMEP	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa - Sekretariat Daerah
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari	sistem audit / pengawasan elektronik	Inspektorat

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
		KKN		
10	Pengembangan Smart City	meningkatnya Profesionalitas ASN	Pengembangan SIPERLU (Sistem Presensi Lumajang)	Badan Kepegawaian Daerah
10	Pengembangan Smart City	meningkatnya Profesionalitas ASN	Pengadaan E-Learning	Badan Kepegawaian Daerah
10	Pengembangan Smart City	meningkatnya Profesionalitas ASN	Pengadaan E-Mutasi	Badan Kepegawaian Daerah
10	Pengembangan Smart City	meningkatnya Profesionalitas ASN	Pengadaan E-Karis/Karsu/Karpeg	Badan Kepegawaian Daerah
10	Pengembangan Smart City	meningkatnya Profesionalitas ASN	Pengadaan E-pencantuman gelar	Badan Kepegawaian Daerah
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	- Optimalisasi E-NADINE	Bag. Organisasi - Sekretariat Daerah
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	- Optimalisasi E-Kinerja	Bag. Organisasi - Sekretariat Daerah
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	- Pengembangan SIMPUL (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas Lumajang)	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	- Operasionalisasi SIMADA (Sistem Informasi Manajemen Dapodik)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	- Operasionalisasi SIRADA (Sistem Informasi Rapor Dapodik)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	- Pengembangan Aplikasi PPDB	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	- Verifikasi dan validasi data DAPODIK PAUD, SD, SMP (aplikasi DAPODIK)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Pembangunan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Optimalisasi SIMTARU (Sistem Informasi Manajemen tata Ruang)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Pengembangan Aplikasi Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Update data E-PAKSI	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Pengembangan Aplikasi Layanan LLTT (Gedang Mesem)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	SIMBG	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Updating e-RTLH	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Pengembangan SIKAT (Sistem Penanganan Kemiskinan Terpadu)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
10	Pengembangan Smart City	Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Pembangunan Sistem Informasi Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Quick Responsibility Report - QRIP (Lapor Cepat)	Satuan Polisi Pamong Praja
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Updating data One-Data	Dinas Perikanan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Updating data One-Data	Dinas Perikanan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Updating data One-Data	Dinas Perikanan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pembangunan Sistem Informasi Sumberdaya Pertanian melalui "SIDA PERDU" Sistem Informasi Data Pertanian Terpadu"	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan Kartu Ternak Elektronik "E-Nak"	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan Aplikasi pemasaran produk UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Operasional E-Retribusi Pasar (Bank Jatim)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
				Perdagangan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan (SINGA BANGKOK)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Updating SISKA PERBAKO	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan Aplikasi SI DILAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Update SIINas dan GIIS	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	- Pengembangan Website / Aplikasi Informasi Sebaran Destinasi Wisata dan Lokasi Ekonomi Kreatif;	Dinas Pariwisata
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Aktivitas Ekonomi/Nilai PDRB	Pengembangan aplikasi E Retribusi Pariwisata	Dinas Pariwisata
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Operasionalisasi Aplikasi KIR	Dinas Perhubungan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Operasionalisasi Aplikasi KIR	Dinas Perhubungan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Pengembangan TRANSINFO LALIN	Dinas Perhubungan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Integrasi CCTV dengan ATCS dan Peningkatan penerapan E-Tilang	Dinas Perhubungan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya kualitas air dan udara	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Lingkungan (SIMPEL)	Dinas Lingkungan Hidup
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Pengembangan SIMNAKER (Sistem Informasi Manajemen Tenaga Kerja) Penambahan Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan	Dinas Tenaga Kerja
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Desa (SID)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Operasionalisasi SIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Optimalisasi penerapan SIPALUKU (Sistem Integrasi Data Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang dengan Data Kependudukan)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pengadaan Aplikasi Tuntas di Desa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pelayanan adminduk berbasis android	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Updating SiPORA (Elektronik Pemuda dan Olahraga)	Dinas Pemuda dan Olahraga
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pengembangan Perpustakaan Digital (Android) Kab. Lumajang	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pengadaan inlislite Kab. Lumajang	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	- Updating data Indonesia one search	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Operasionalisasi SIKD	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Operasional AMAD	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	- Operasionalisasi JDIH	Bag. Hukum - Sekretariat Daerah
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	SIP BOS (Sistem Informasi Pelayanan Berbasis Online Sistem)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Pendaftaran Domain lumajangkab.go.id	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
		(SPBE)		
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Monitoring Domain dan Sub Domain	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Optimalisasi jaringan MPP	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Pembayaran Bandwith Data Centre	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Forum PD Smartcity	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Pengelolaan Data Server (2 unit) di Data Center	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Optimalisasi penggunaan TTE	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis eketronik (SPBE)	Pengadaan Lisensi Zoom Meeting	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis eketronik (SPBE)	Pengadaan Firewall	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis eketronik (SPBE)	-Integrasi website dan aplikasi PD, - Pengembangan Website Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis eketronik (SPBE)	Pemberian Rekomendasi dan Pendampingan Pengembangan Aplikasi PD	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis eketronik (SPBE)	Pengembangan Pemasangan Fiber Optik dan Backbone	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis eketronik (SPBE)	Optimalisasi jaringan Command Centre	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis eketronik (SPBE)	Monev pembangunan aplikasi dan website PD	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis eketronik (SPBE)	Updating konten Satu Data Lumajang	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Optimalisasi SIPIR (Sistem Informasi Pinjam Ruangan) - Media Online	Bag. Umum - Sekretariat Daerah
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Pemeliharaan Sarana Prasarana Command Centre	Bag. Umum - Sekretariat Daerah
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Nilai Investasi	- Operasionalisasi OSS	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Nilai Investasi	- Operasional SIMPADU	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Pengembangan Smart City	Meningkatnya Nilai Investasi	- Operasional MPP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi Pembayaran Pajak Daerah secara Cashless.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Penambahan alternatif pembayaran secara elektronik melalui e-merchand.	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Penambahan alat pemantau transaksi	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pendapatan dari Retribusi Parkir	Dinas Perhubungan
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pendapatan dari Retribusi Terminal tipe C	Dinas Perhubungan
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pendapatan dari Retribusi Uji Kendaraan Bermotor (KIR)	Dinas Perhubungan
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pelaksanaan inspeksi dan audit keselamatan kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pembinaan Kader Kesorga Desa	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Pertemuan pelaksanaan kesehatan olahraga dan Pencegahan Penyakit Metabolik bagi Masyarakat	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	tidak mengusulkan	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Alat PCR untuk mendeteksi DNA semua virus	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Alat kualitas udara ambient untuk mengetahui kualitas udara secara kimiawi yang menyebabkan polusi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Alat imunologi untuk mengetahui deteksi imunologi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	alat deteksi antibody untuk mengetahui deteksi antibody setelah vaksinasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	SIMLAB untuk kecepatan administrasi secara terintegrasi	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Fume Hood / Alat ruang asam untuk savety	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan	ISO 17025 untuk sertifikasi laboratorium	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

N o	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
		masyarakat	lingkungan	Keluarga Berencana
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	KALK untuk akreditasi Laboratorium klinik	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Optimalisasi pendapatan dari Sewa Pemanfaatan Bahu Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pendapatan dari Sewa Tanah Pengairan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pendapatan dari Sewa Tanah Bengkulu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pendapatan dari Retribusi Sewa RUSUNAWA	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pendapatan dari Retribusi IMB dan Retribusi Menara Telekomunikasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pendapatan dari Retribusi Penyedotan Lumpur Tinja	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Optimalisasi pendapatan dari Retribusi Sampah;	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Optimalisasi pendapatan dari Kayu hasil penebangan tanaman	Dinas Lingkungan Hidup
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	- Optimalisasi pendapatan dari Retribusi Penggunaan Stadion - Optimalisasi pendapatan dari Retribusi tiket masuk Kolam Veteran - Lapangan Suko, Lapangan Tenis	Dinas Pemuda dan Olahraga
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pendapatan dari Retribusi Tiket Masuk Obyek Wisata	Dinas Pariwisata
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pendapatan dari Sirkuit BMX	Dinas Pariwisata
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata	Dinas Pariwisata
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pengembangan atraksi Wisata (fisik)	Dinas Pariwisata
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Promosi dan pemasaran destinasi wisata	Dinas Pariwisata
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	Optimalisasi pendapatan dari penjualan benih dan ikan konsumsi	Dinas Perikanan

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
		daerah		
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pendapatan dari penjualan benih dan ikan konsumsi	Dinas Perikanan
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pembangunan sistem transaksi non tunai pada pembayaran Retribusi RPH	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pendapatan dari terra terra ulang	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pendapatan retribusi pasar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	rehabilitasi dan pemeliharaan pasar daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi pendapatan dari perizinan pasar	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian

No	Tematik	Sasaran	AKTIVITAS	Perangkat Daerah
				dan Perdagangan
11	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Optimalisasi retribusi biaya cetak capil dan KSK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah berisi rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan daerah khususnya tahun 2021, kedudukan tahun rencana 2023 Kabupaten Lumajang, serta capaian kinerja yang direncanakan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah dijabarkan pada Bab II-IV dokumen RKPD.

Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2023 juga merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 untuk RKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2023. Musrenbang menjadi media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kabupaten Lumajang.

Untuk mencapai kesamaan arah pembangunan dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD, maka kemudian disusun prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Penetapan prioritas bertujuan agar kinerja pemerintah daerah dapat lebih terfokus, serta lebih terukur pencapaiannya melalui sasaran-sasaran yang di detailkan melalui indikator beserta target kinerja program dan kegiatan.

Program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD) merupakan input timbal-balik dari rencana kerja (renja) Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing-masing Perangkat Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan ditunjang dengan hasil musyawarah rencana pembangunan mulai tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat kabupaten. Proses perencanaan pembangunan secara vertikal menghubungkan proses perencanaan “bottom-up” dan “top-down”.

Penentuan program dan kegiatan daerah Tahun 2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 pada

tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional tahun 2023.

Uraian rencana program tahun 2023 pada Bab V disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2023 sebagaimana dijabarkan pada Bab IV, sedangkan uraian rencana program/kegiatan tahun 2023 disusun berdasarkan urusan yang ditangani oleh masing-masing Perangkat Daerah, maka diperlukan sinkronisasi antara pembagian rencana program per prioritas pembangunan dengan pembagian rencana program/kegiatan per Perangkat Daerah.

Program Prioritas yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga dengan memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, dana umat, pinjaman daerah, obligasi daerah, serta sumber pendanaan lainnya.

a. 5.1. Rencana Pendanaan Daerah Tahun 2023

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Terjadinya pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 berdampak pada terjadinya shock pada kondisi keuangan daerah terutama pendapatan daerah. Namun demikian, diharapkan tahun 2023 pendapatan daerah diproyeksikan akan mulai pulih dan mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 2.159.948.018.718,00 yang bersumber dari PAD sebesar Rp 338.471.890.176,00 Dana Transfer sebesar Rp 1,690,384,224,267.00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 131,091,904,275.00. Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai serangkaian program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja

daerah Tahun 2023. Sementara itu, pembiayaan daerah untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja Kabupaten Lumajang diproyeksikan sebesar Rp 76.408.138.513,00

Belanja daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 2,136,356,157,231.00 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 1,602,613,749,213.00, belanja modal sebesar Rp 141,554,556,822.00 belanja tidak terduga sebesar Rp 40,000,000,000.00, serta belanja transfer sebesar Rp 352,187,851,196 Belanja daerah Tahun 2023 akan diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah. Selain itu, belanja daerah juga digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2022.

Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah disusun berdasarkan hasil analisa keuangan dengan mempertimbangkan regulasi dan kondisi terkini Kabupaten Lumajang yang tertuang dalam tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5 1 Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023

No	Uraian	Proyeksi 2023
1	PENDAPATAN DAERAH	2,159,948,018,718.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	338,471,890,176.00
1.1.1	HASIL PAJAK DAERAH	92,415,000,000.00
1.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	22,677,767,980.00
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	7,964,099,000.00
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	215,415,023,196.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,690,384,224,267.00
1.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1,509,557,031,107.00
1.2.2	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	180.827.193.160,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	131,091,904,275.00
2	BELANJA	2,136,356,157,231.00

No	Uraian	Proyeksi 2023
2.1	BELANJA OPERASI	1,602,613,749,213.00
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	839,760,561,069.00
2.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	565,134,865,004.00
2.1.3	BELANJA HIBAH	176,785,098,140
2.1.4	BELANJA BANTUAN SOSIAL	20,933,225,000
2.2	BELANJA MODAL	141,554,556,822.00
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	40,000,000,000.00
2.4	BELANJA TRANSFER	352,187,851,196
2.4.1	BELANJA BAGI HASIL	7,270,293,196
2.4.2	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	344,917,558,000.00
3	PEMBIAYAAN	-100,000,000,000
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	100,000,000,000

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang, 2021

Proyeksi belanja daerah tahun 2023 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2023 kedalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rencana Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Adalah Sebagai Berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, Angka Partisipasi Murni (APM) SD, Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI), Persentase SD yang terakreditasi, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP, Angka Partisipasi Murni (APM) SMP, Jumlah Warga Negara Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SMP/MTs),

Persentase SMP yang Terakreditasi, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD, Persentase TK Negeri yang terakreditasi, Persentase Partisipasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan, Persentase lembaga kesetaraan/nonformal yang terakreditasi.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang ditetapkan.

c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Persentase satuan pendidikan yang tercukupi pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah diterbitkan dan Jumlah izin PAUD dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah diterbitkan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standard, Gross Death Rate (GDR), Net Death Rate (NDR), Persentase Puskesmas dengan kategori capaian kinerja baik, Persentase fasilitasi Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi, Persentase fasyankes yang memiliki izin operasional, Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Persentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP, Persentase fasyankes dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standard, Jumlah dokumen pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah rekomendasi yang diterbitkan, Persentase sertifikat yang diterbitkan, Jumlah sertifikat PIRT yang di terbitkan, Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan dan Depot Air Minum yang memenuhi syarat, Jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat, Jumlah sarana yang di periksa.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah desa siaga aktif, Persentase Rumah Tangga Sehat/ PHBS Rumah Tangga, Persentase PHBS sekolah, Persentase poskesdes aktif strata madya, purnama dan mandiri.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Panjang Jaringan Irigasi Terbangun.

b. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah terbangun yang ber-IMB, Jumlah rumah yang laik fungsi.

c. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah panjang jalan yang terpelihara, Jumlah jembatan yang terpelihara.

d. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah kegiatan dalam bidang jasa konstruksi yang dilaksanakan, Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Dokumen Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

e. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

f. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah Jiwa yang Terlayani.

g. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah sarana sanitasi terbangun, Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air.

h. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah kawasan yang ditangani.

i. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Panjang Sistem Drainase Terhubung yg terbangun.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Permukiman

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah kawasan permukiman yang ditingkatkan infrastrukturnya.

b. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah penyediaan rumah, Jumlah rumah korban yang direhab, Jumlah rumah korban bencana yang tertangani, Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah, Jumlah rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan.

c. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah Luas Kawasan kumuh tertangani.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah perumahan yang difasilitasi pembangunan PSU nya.

e. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah kawasan permukiman yang dikembangkan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada, Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan,

Prosentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Prosentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota, Prosentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Prosentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Prosentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan bencana.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota, Prosentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Prosentase Investigasi Kejadian Kebakaran, Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran, Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah Kabupaten/Kota yg dikembangkan kemampuannya.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yg mendapat rehabilitasi sosial.

c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah Fakir Miskin Cakupan daerah kabupaten/Kota yg dikelola.

d. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota yg mendapat perlindungan sosial, Jumlah pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana di kabupaten.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial daerah Kabupaten/Kota yg dikembangkan kemampuannya.

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah pencari Kerja dilatih dan Lulus Uji Kompetensi, Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja dibina, Prosentase Perusahaan kecil yang Melakukan Konsultasi, Jumlah perusahaan yang diukur produktifitas tenaga kerjanya.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah pencari kerja ditempatkan melalui program AKL, Jumlah data pasar kerja yang dikelola, Jumlah CPMI dan PMI yang difasilitasi, Jumlah tenaga kerja asing yang dilayani perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

c. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah dokumen peraturan perusahaan yang disahkan,

Jumlah Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang di fasilitasi.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Rencana Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Adalah Sebagai Berikut:

a. Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Persentase lembaga daerah yang telah melaksanakan PUG, Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Memberdayakan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah perempuan yang tersosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, Persentase Perempuan korban kekerasan yang memerlukan layanan rujukan, Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Persentase Wilayah yang mengimplementasikan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah Dokumen anak dan perempuan yang tersedia dalam kelembagaan.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Prosentase Lembaga (Desa Kelurahan) Layak Anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah anak yang mendapatkan perlindungan khusus.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Presentase Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi.

b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya yang difasilitasi, Persentase fasilitasi pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Persentase dokumen peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun, Persentase penanganan Kerawanan Pangan yang terfasilitasi.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Persentase fasilitasi pengawasan Keamanan Pangan Segar.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah Dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah.

b. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah permasalahan tanah kosong yang diselesaikan, Prosentase tanah kosong yang dimanfaatkan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten/ Kota yang disusun, Jumlah kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang terselenggara.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah status mutu lingkungan hidup yang ditetapkan, Jumlah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi, Jumlah pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah keanekaragaman hayati yang dikelola.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah titik usaha dengan penyimpanan sementara LB3 sesuai standard, Jumlah titik usaha dengan pengumpulan LB3 sesuai standard.

e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi perizinan lingkungan.

f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah MHA terkait PPLH yang ditetapkan, Jumlah MHA yang mengalami peningkatan kapasitas terkait dengan PPLH.

g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah Fasilitas Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah lembaga/ masyarakat yang mendapat penghargaan.

i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten/kota yang ditindak lanjuti.

j. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Volume sampah terkelola, Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi, Jumlah Unit usaha yang melakukan pengelolaan sampah sesuai standard.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Persentase Penduduk yang terlayani Pendaftaran Penduduk.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Persentase dokumen Akte Kelahiran yang diterbitkan, Persentase dokumen Akta Perkawinan yang diterbitkan, Persentase dokumen Akta Perceraian yang diterbitkan, Persentase Dokumen Perubahan Status Anak yang diterbitkan, Persentase Dokumen Perubahan Kewarganegaraan yang diterbitkan, Persentase Dokumen Kematian yang diterbitkan, Persentase Penduduk yang terlayani Pencatatan Sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang disajikan, Persentase Lembaga Yang Mengimplementasikan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Persentase Pembinaan Tenaga SDM Adminduk.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah dokumen Profil kependudukan yang disusun.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa sesuai regulasi.

b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi, Jumlah BUMDes yang bertambah unit usahanya.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Jumlah Desa yang terfasilitasi Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa, Jumlah Desa yang Update data Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, Jumlah BUMDes yang berbadan hukum.

d. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator kegiatan Persentase kerjasama Desa yang terfasilitasi.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Seharusnya BerKB tetapi Belum Terlayani, Jumlah PKB, Kader KB yang terlatih, Jumlah akseptor yang terlayani, Prosentase ketersediaan alokon di faskes, Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB.

b. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Seharusnya BerKB tetapi Belum Terlayani (Unmet Need).

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah Keluarga Balita yang mengikuti BKB, Jumlah Keluarga Lansia yang mengikuti BKL, Jumlah Keluarga Remaja yang mengikuti BKR, Jumlah Remaja yang mengikuti PIK-R, Jumlah Akseptor KB yang mengikuti UPPKS.

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan, Jumlah Jenis Perlengkapan Jalan ditingkatkan kondisi baik, Jumlah penumpang pengguna fasilitas terminal yang dilayani, Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang ditetapkan, Jumlah kendaraan yang Laik Jalan (lulus uji), Jumlah pengadaan dan pengembangan prasarana perhubungan yang sesuai manajemen dan rekayasa yang ditetapkan, Jumlah Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang disetujui, Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas, Jumlah Trayek yang dilewati angkutan umum, Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan yang

ditetapkan, Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan, Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan, Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah yang berijin, Jumlah Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang ditetapkan.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah cakupan dan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah domain dan sub domain yang dikelola, Jumlah pusat data pemerintah daerah yang optimal.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi.

b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah koperasi simpan pinjam yang sehat.

c. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian.

d. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah koperasi yang mengikuti Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan,

penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi.

- e. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)** Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah Fasilitas Pemberdayaan Usaha Mikro.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Prosentase Perusahaan Yang mendapatkan insentif, Prosentase Peta Potensi yang disusun.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah investor yang tersosialisasi potensi investasi.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah kab/kota.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah pelaku usaha yang telah melaporkan LKPM.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah data informasi perizinan dan non perizinan yg diolah/disajikan berdasarkan jenis layanan.

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam penyadaran, pemberdayaan dan

pengembangan pemuda, Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan OKP.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Jumlah penyelenggaraan kompetisi olahraga dalam jenjang olahraga pendidikan, Jumlah Sarana Prasarana olahraga yang tefasilitasi, Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan, Jumlah fasilitasi dalam pembinaan & pengembangan olahraga prestasi, Jumlah fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Jumlah fasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah pembinaan dan pengembangan Organisasi kepramukaan yang terfasilitasi.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah data yang didiseminasikan.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi radio, Persentase PD yang memiliki Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola, Persentase jenis kesenian tradisional yang dilestarikan.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Persentase lembaga kesenian tradisional yang dibina.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator jumlah pembinaan sejarah lokal yang dilaksanakan.

d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator jumlah cagar budaya yang ditetapkan, Jumlah Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Yang Dikelola.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah Kunjungan Museum.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah perpustakaan yang di kelola perpustakaan daerah, Persentase sosialisasi pembudayaan perpustakaan.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah naskah kuno yang dilestarikan perpustakaan.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah arsip dinamis yang di kelola LKD, Jumlah arsip statis yang di kelola LKD, Jumlah informasi arsip yang di kelola di simpul jaringan.

b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah Arsip Yang Dimusnahkan Yang Memiliki Retensi Dibawah 10 tahun, Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan akibat bencana.

c. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah standart pelayanan arsip yang bersifat tertutup.

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Persentase KUB yang terfasilitasi, Jumlah penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok nelayan.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah penumbuhan dan peningkatan kelas kelompok pembudidaya ikan, Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk mengelola budidaya ikan dengan baik dan benar.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah penurunan angka pelanggaran usaha perikanan.

d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indicator Jumlah poklaksar yang terfasilitasi legalitas usahanya, Jumlah poklaksar yang dibina dan dipantau jaminan mutu dan keamanan pangan produk perikanannya, Jumlah bahan baku industri pengolahan ikan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah DTW yang ditetapkan dan dikembangkan, Jumlah Kawasan Strategis pariwisata kabupaten /kota yang di kelola, Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola, Jumlah TDUP yang di tetapkan.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah Pemasaran Kepariwisataaan.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah Zona Kreatif di daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif tingkat dasar, Jumlah kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang berkembang.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Persentase Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian yang dibuat, Persentase Fasilitasi pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) yang dilaksanakan, Persentase fasilitasi Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan yang dilaksanakan, Persentase fasilitasi pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit Ternak dan HPT.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan, Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Persentase fasilitasi Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan produk hewan yang dilaksanakan, Persentase fasilitasi pelayanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan, Persentase fasilitasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilakukan.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Persentase izin usaha yang direkomendasikan.

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilakukan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun/direhab, Jumlah Pengelola pasar yang dibina.

b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah harga barang kebutuhan pokok yang dikendalikan, Jumlah objek pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi.

c. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Nilai omset promosi dagang.

d. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Nilai retribusi pelayanan tera / tera ulang.

e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Nilai Perdagangan Daerah.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah industri dalam rencana pembangunan kabupaten yang difasilitasi.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah rekomendasi perolehan IUI.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah dokumen informasi industri yang tersedia.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Rencana Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Adalah Sebagai Berikut:

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini diarahkan pada pemenuhan indikator Jumlah KK Transmigran ditempatkan.

D. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Sekretariat Daerah Rencana Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Adalah Sebagai Berikut:
 - a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Program ini diarahkan kepada persentase terlaksananya administrasi tata pemerintahan, persentase fasilitasi dan koordinasi kerjasama daerah yang dilaksanakan, presentase produk hukum daerah yang dilakukan harmonisasi, persentase fasilitasi kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan.
 - b. Program Perekonomian Dan Pembangunan
Program ini diarahkan kepada persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai aturan, presentase pencapaian pelaksanaan administrasi pembangunan, jumlah kebijakan perekonomian yang dilaksanakan, jumlah kebijakan sumber daya alam yang dilakukan pemantauan.
2. Sekretariat DPRD Rencana Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Adalah Sebagai Berikut:
 - a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
Program ini diarahkan kepada indek kepuasan layanan administrasi dprd, jumlah laporan hasil pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan, jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengawasan pemerintahan, persentase fasilitasi peningkatan kapasitas dprd, persentase fasilitasi penyerapan dan penghimpun aspirasi masyarakat yg dilaksanakan.

E. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Perencanaan Rencana Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Adalah Sebagai Berikut:
 - b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program ini diarahkan kepada persentase tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi, persentase tahapan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitas, persentase tahapan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang terfasilitasi.

- c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini diarahkan kepada persentase dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dimanfaatkan OPD, persentase dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang dimanfaatkan OPD.
2. Keuangan Rencana Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Adalah Sebagai Berikut:
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini diarahkan kepada prosentase ketetapan waktu penyusunan anggaran skpd, prosentase ketepatan waktu laporan penatausahaan keuangan skpd, prosentase ketepatan waktu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd skpd, prosentase penyaluran dana penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, prosentase pembinaan sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan yang terintegrasi.
 - b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program ini diarahkan kepada prosentase ketepatan waktu penyusunan laporan barang milik daerah SKPD,
 - c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Program Ini Diarahkan Kepada prosentase potensi penerimaan pajak daerah
3. Kepegawaian Rencana Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Adalah Sebagai Berikut:
 - a. Program Kepegawaian Daerah
Program ini diarahkan kepada persentase pengadaan ASN yang dibutuhkan, persentase ASN yang menerima SK pensiun, persentase sistem informasi yang dikelola, persentase ASN yang terfasilitasi dokumen kepegawaian, persentase dokumen penataan karier sesuai dengan persyaratan jabatan, persentase pengelolaan kenaikan pangkat ASN, persentase ASN yg mengikuti diklat utk meningkatkan kompetensinya, persentase

arsip dokumen SKP, persentase penyelesaian dokumen disiplin ASN, persentase ASN yang mendapatkan penghargaan.

4. Pendidikan Dan Pelatihan Rencana Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Adalah Sebagai Berikut:

a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan kepada persentase pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, persentase ASN struktural yang memiliki kompetensi dan sertifikasi.

5. Penelitian Dan Pengembangan Rencana Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Adalah Sebagai Berikut:

a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan kepada prosentase hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang di manfaatkan, prosentase hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang di manfaatkan, prosentase hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang di manfaatkan, persentase kegiatan inovasi dan teknologi yang dapat difasilitasi.

F. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Inspektorat Daerah Rencana Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Adalah Sebagai Berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Ini Diarahkan Kepada Jumlah laporan hasil pengawasan umum (general) yang diterbitkan, Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu (spesific) yang diterbitkan.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini diarahkan kepada jumlah laporan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang diterbitkan, Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang diterbitkan,

G. UNSUR KEWILAYAHAN

1. Kecamatan Rencana Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Adalah Sebagai Berikut:
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program ini diarahkan kepada presentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Program ini diarahkan kepada persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan, Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan.
 - c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan kepada jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini diarahkan kepada jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
 - e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan kepada persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

H. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Kesatuan Bangsa Dan Politik Rencana Program Dan Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan Adalah Sebagai Berikut:
 - a. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
Program ini diarahkan kepada jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis fasilitasi teknis pemantapan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.
 - b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
Program ini diarahkan kepada jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Program ini diarahkan kepada jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat.

d. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan kepada jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

e. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan kepada jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

Proyeksi belanja daerah selanjutnya dijabarkan dalam rencana program/kegiatan prioritas daerah seluruh perangkat daerah beserta pagu indikatif yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Tabel 5 2 Rekapitulasi Pagu Indikatif RKPD 2023 berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7
A	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar					
1	Bidang Pendidikan	5	15	85	653.432.414.433	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Bidang Kesehatan	9	35	131	422,563,514,343	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	22	85	85,241,060,567	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	14	37	13,321,879,882	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	5	20	76	18,358,789,194	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja
6	Bidang Sosial	6	15	42	29,372,619,622	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
B	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar					
1	Bidang Tenaga Kerja	4	17	43	4,840,270,659	Dinas Tenaga Kerja
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	8	11	311,847,250	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7
3	Bidang Pangan	4	9	20	18,441,916,794	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Bidang Pertanahan	1	1	1	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Bidang Lingkungan Hidup	11	22	64	31,958,015,428	Dinas Lingkungan Hidup
6	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	15	48	8,502,298,448	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	11	48	7,620,974,743	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	6	19	12,659,384,369	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Bidang Perhubungan	2	21	60	36,704,079,927	Dinas Perhubungan
10	Bidang Komunikasi dan Informatika	3	11	49	8,027,570,546	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8	18	49	11,260,880,717	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
12	Bidang Penanaman Modal	6	14	38	5,377,885,126	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4	17	53	11,786,193,778	Dinas Pemuda dan Olahraga
14	Bidang Statistik	1	1	5	196,625,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	PD Penanggungjawab
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
15	Bidang Persandian	1	2	2	77,099,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Bidang Kebudayaan	5	6	13	1,208,143,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Bidang Perpustakaan	1	2	6	244,280,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
18	Bidang Kearsipan	4	13	30	4,671,154,357	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
C	Urusan Pemerintahan Pilihan					
1	Bidang Kelautan dan Perikanan	5	16	45	4,358,582,329	Dinas Perikanan
2	Bidang Pariwisata	5	16	56	14,826,624,604	Dinas Pariwisata
3	Bidang Pertanian	6	13	22	16,323,577,151	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Bidang Perdagangan	6	8	19	3,602,639,550	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
5	Bidang Perindustrian	3	3	8	3,862,700,000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
6	Bidang Transmigrasi	1	1	6	49,137,800	Dinas Tenaga Kerja
D	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	PD Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	3	20	68	73,168,769,217	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD	2	16	50	58,726,844,657	Sekretariat DPRD
E	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
1	Perencanaan	3	12	54	9,287,694,653	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Keuangan	5	22	131	486,273,175,656	Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah
3	Kepegawaian	2	10	38	6,988,726,630	Badan Kepegawaian Daerah
4	Pendidikan dan Pelatihan	1	2	4	725,405,000	Badan Kepegawaian Daerah
5	Penelitian dan Pengembangan	1	4	9	1,779,800,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
F	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
1	Inspektorat	3	11	38	6,035,491,757	Inspektorat Daerah
G	Unsur Kewilayahan					
1	Kecamatan	6	17	53	57,070,703,699	Kecamatan

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	PD Penanggungjawab
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
H	Unsur Pemerintahan Umum					
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	38	6,848,294,051	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		JUMLAH			2,136,356,157,231	

Tabel 5 3 Rekapitulasi Pagu Indikatif Program/Kegiatan/Sub Kegiatan per Perangkat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
SEKRETARIAT DEWAN														
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	2				SEKRETARIAT DPRD						58,726,844,657			
4	2	0 1			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						40,039,250,657			
4	2	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29,306,500			
4	0 2	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	2 Dokumen	90 persen	7,011,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0 2	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	1 Dokumen	90 persen	6,963,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0 2	0 1	2.0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	1 Dokumen	90 persen	4,119,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0 2	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	1 Laporan	90 persen	5,469,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 0 2 1 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	4 Laporan	90 persen	5,744,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	2	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,427,304,374	
4 0 2 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	21 Orang/bul	an90 persen	2,326,769,374	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 0 2 1 2 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	12 Dokumen	90 persen	85,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 0 2 1 2 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	1 Dokumen	90 persen	5,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	6 Laporan	90 persen	6,755,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	1 Dokumen	90 persen	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
		Daerah								
4 02 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								5,804,000	
4 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi		100 persen	2 Dokumen	90 persen	3,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi		100 persen	2 Laporan	90 persen	2,344,000	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum
4 02 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								419,553,000	
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi		100 persen	2 Paket	90 persen	44,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi		100 persen	12 Dokumen	90 persen	4,983,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Fasilitasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi		100 persen	68 Orang	90 persen	370,370,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								617,529,545	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	24 Paket	100 persen	41,323,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	5 Paket	100 persen	228,853,175	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	12 Paket	100 persen	14,013,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	3 Dokumen	100 persen	13,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	2 Laporan	100 persen	53,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	2 Laporan	100 persen	267,039,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								684,032,390	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	1 Unit	90 persen	388,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase fasilitasi pengadaan BMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	4 Unit	90 persen	295,532,390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,552,738,380	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	12 Laporan	90 persen	18,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	12 Laporan	90 persen	218,623,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	12 Laporan	90 persen	1,315,814,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,024,119,600	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	31 Unit	90 persen	731,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	8 unit	90 persen	76,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	1 Unit	90 persen	216,329,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								31,848,284,258	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase fasilitas layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	50 Orang/Bul	an90 persen	31,180,272,258	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase fasilitas layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	4 Paket	90 persen	568,012,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat di fasilitasi		100 persen	50 Orang	90 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD								1,430,578,610	
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi		100 persen	1 Laporan	90 persen	1,333,283,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 01 2.16 04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi		100 persen	1 Paket	90 persen	97,295,110	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								18,687,594,000	
4 02 02 2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								1,147,612,000	
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Perda yang terbentuk	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi		90 persen	6 Dokumen	100 persen	819,108,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase Perda yang terbentuk	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan Naskah Akademik yang Difasilitasi	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi		90 persen	2 Dokumen	100 persen	328,504,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 02 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran								1,982,640,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi		5 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	284,528,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi		5 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	122,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi		5 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	476,034,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi		5 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	215,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan kebijakan anggaran yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi		5 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	884,538,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 02 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								1,028,321,000	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi		4 Laporan	1 Laporan	100 persen	262,221,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi		4 Laporan	1 Laporan	100 persen	253,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi		4 Laporan	1 Laporan	100 persen	253,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi		4 Laporan	1 Laporan	100 persen	258,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 02 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD								3,234,635,000	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi		100 persen	6 Dokumen	100 persen	2,363,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi		100 persen	50 Dokumen	100 persen	531,195,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi		100 persen	8 Orang	100 persen	340,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 02 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								4,122,208,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yg dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi		100 persen	3 Dokumen	100 persen	4,122,208,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 02 02 2.08	Fasilitasi Tugas DPRD								7,172,178,000	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Fasilitas tugas Anggota DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat di fasilitasi		100 persen	3 Dokumen	100 persen	7,172,178,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									58,726,844,657	
INSPEKTORAT										
6										UNSUR PEDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
6 1										INSPEKTORAT DAERAH
6 1 0 1										PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6 1 1 2										Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6 0 0 2.0 0 1 1 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoranPersentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 persen95 persen	3 Dokumen	3.5 angka	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmu m

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
6 0 1 1 2.0 1 0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 persen 95 persen	3 Dokumen	3.5 angka	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 0 1 1 2.0 1 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 persen 95 persen	5 Laporan	3.5 angka	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 0 1 1 2.0 1 0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 persen 95 persen	8 Laporan	3.5 angka	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,266,594,470	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
6 0 1 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	95 persen	34 Orang/bul	an3.5 angka	4,212,594,470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 0 1 1 2 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang,	95 persen	12 Dokumen	3.5 angka	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi
					Ditotrunan					Umum
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	95 persen	6 Laporan	3.5 angka	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	95 persen	18 Laporan	3.5 angka	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	95 persen	1 Dokumen	3.5 angka	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								227,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	95 persen	28 Orang	3.5 angka	227,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								287,626,200	
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	95 persen	1 Paket	3.5 angka	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	95 persen	2 Paket	3.5 angka	88,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	95 persen	1 Paket	3.5 angka	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	95 persen	40 Laporan	3.5 angka	183,626,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								38,614,687	
6 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	95 persen	4 Unit	3.5 angka	38,614,687	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi
					Ditotrunan					Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
6 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Urusan Pemerintahan Daerah							333,462,400	
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	95 persen	12 Laporan	3.5 angka	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	95 persen	12 Laporan	3.5 angka	159,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	95 persen	12 Laporan	3.5 angka	172,862,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							247,125,000	
6 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	95 persen	27 Unit	3.5 angka	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	95 persen	36 Unit	3.5 angka	47,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai Kapabilitas APIP	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	95 persen	1 Unit	3.5 angka	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								344,730,000	
6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								239,730,000	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	75 persen	64 Laporan	70 persen	66,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	75 persen	18 Laporan	70 persen	64,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	75 persen	2 Laporan	70 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	Kab. Lumajang, Lumajang,	75 persen	1 Laporan	70 persen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi
					Ditotrunan					Umum
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	75 persen	30 Laporan	70 persen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 02 2.01 06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	75 persen	30 Kesepakatan	an70 persen	30,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
6 01 02 2.01 07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	75 persen	2 Dokumen	70 persen	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								105,000,000	
6 01 02 2.02 01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	75 persen	5 Laporan	75 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase OPD dengan maturitas SPIP level 3	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	75 persen	40 Laporan	75 persen	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								268,339,000	
6 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan								59,744,000	
6 01 03 2.01 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP Persentase LHP yang sesuai standar Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	3.5 angka 90 persen 75 persen	15 Rekomend	a8si0 persen	41,744,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
6 01 03 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP Persentase LHP yang sesuai standar Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	3.5 angka 90 persen 75 persen	15 Rekomend	a8si0 persen	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi								208,595,000	
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kapabilitas APIP Persentase LHP yang sesuai standar Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	3.5 angka 90 persen 75 persen	72 perangkat daerah	80 persen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Nilai Kapabilitas APIP Persentase LHP yang sesuai standar Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	3.5 angka 90 persen 75 persen	49 perangkat daerah	80 persen	37,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Nilai Kapabilitas APIP Persentase LHP yang sesuai standar Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	3.5 angka 90 persen 75 persen	10 Kegiatan	80 persen	145,595,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
		(pembinaan) yang ditindak lanjuti									
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Nilai Kapabilitas APIP Persentase LHP yang sesuai standar Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindak lanjuti	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase pemenuhan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	3.5 angka 90 persen 75 persen	56 perangkat daerah	80 persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
TOTAL									6,035,491,757		
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN											
2					UNSUR PEDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					244,280,000	
2	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					244,280,000	
2	2	2	2		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					208,880,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 2 3 0 2 2.0 1 0 1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang di kembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM : information technology service management		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		0 Layanan2 layanan		57,310,000	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmu m
2 2 3 0 2 2.0 1 0 2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perpustakaan yang di kembangkan di tingkat daerah kabupaten/kota sesuai standart nasional perpustakaan di wilayah kabupaten/kota sesuai kewenangan		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Perpustakaa n		129,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 2 3 0 2 2.0 1 0 8	Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		500 Eksempla r		17,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 2 3 0 2 2.0 1 0	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengemabangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		1000 eksempl ar		4,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 2 3	2	2	2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					35,400,000	
2 2 3 0 2 2.0 2 1 0	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200 Lokus		12,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 2 3 0 2 2.0 2 3 0	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten kota		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		5 orang		22,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 2 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								4,671,154,357	
2 2 4 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,428,241,357	
2 24 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10,690,000	
2 24 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		3 Dokumen		2,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 24 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		1 Dokumen		2,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		2 Dokumen		1,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		5 Dokumen		2,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,998,631,996	
2 24 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		25 ASN		1,965,957,996	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		12 Dokumen		21,984,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 24 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		12 Dokumen		2,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		6 Laporan		2,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		12 Dokumen		1,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/tribulan /semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		18 Laporan		2,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
			/semesteran SKPD							
2 24 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								34,950,000	
2 24 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		32,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 24 01 2.05 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		12 Laporan		2,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							186,245,000		
2 24 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		5 paket		21,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		4 Paket		28,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		2 Paket		15,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		1 laporan		4,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Laporan		116,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,029,595,961		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 24 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan danMesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 jenis		1,029,595,961	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmu m
2 24 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							934,286,400		
2 24 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		12 Laporan		600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrk yang disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		12 Laporan		307,128,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		1 Laporan		626,558,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							233,842,000		
2 24 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		25 Kendaraan		163,102,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 24 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara				5 unit		70,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP								241,130,000	
2 24 02 2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota								142,363,000	
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis		Jumlah naskah dinas yang di lakukan pemeliharaan dan penyusutan		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		4000 berkas		142,363,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 02 2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota								98,767,000	
2 24 02 2.02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis		Jumlah arsip statis yang di lakukan akuisisi,pengolahan,preservasi dan akses arsip statis	asi	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		100 arsip		98,767,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 24 03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP								1,783,000	
2 24 03 2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun								1,783,000	
2 24 03 2.01 01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		Jumlah arsip yang dilakukan penilaian,penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun		Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan		4000 Arsip		1,783,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									4,915,434,357	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									8,502,298,448
2 1 0 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									6,275,826,948

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							13,000,000		
2	1	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	90 Persen	2 Dokumen	96 Persen	2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	90 Persen	1 Dokumen	96 Persen	2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	90 Persen	1 Dokumen	96 Persen	2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	90 Persen	1 Laporan	96 Persen	2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	90 Persen	1 Laporan	96 Persen	2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,067,881,603		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
2 2	1 1	0 2	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	90 Persen	28 Orang/bulan	96 Persen	3,017,649,603	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 2	1 1	0 2	2.0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	90 Persen	1 Dokumen	96 Persen	34,632,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	90 Persen	3 Dokumen	96 Persen	2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	12	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	90 Persen	2 Dokumen	96 Persen	2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	90 Persen	1 Laporan	96 Persen	2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	12	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	90 Persen	2 Dokumen	96 Persen	2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 12 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	2 Laporan	96 Persen	2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	1 Dokumen	96 Persen	2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							7,800,000		
2 12 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	4 Dokumen	96 Persen	2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	2 Laporan	96 Persen	2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	3 Fasilitasi	96 Persen	2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
										Alokasi Umum
2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							78,642,396		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 12 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	2 Paket	96 Persen	72,642,396	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	2 Dokumen	96 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	1 Dokumen	96 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,238,453,650	
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	15 Paket	96 Persen	16,001,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	5 Paket	96 Persen	818,913,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	1 Paket	96 Persen	46,701,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 12 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	2 Paket	96 Persen	9,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	1 Laporan	96 Persen	347,437,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								433,926,499	
2 12 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	3 Unit	96 Persen	50,479,189	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	15 Unit	96 Persen	383,447,310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								809,682,800	
2 12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	3 Laporan	96 Persen	23,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	3 Laporan	96 Persen	330,057,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 12 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	1 Laporan	96 Persen	5,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	4 Laporan	96 Persen	450,895,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							626,440,000		
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	28 Unit	96 Persen	184,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)		90 Persen	4 Unit	96 Persen	30,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	0 Unit 200 Unit	96 Persen	347,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	1 Gedung	96 Persen	64,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							472,130,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 12 02 2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk								446,282,000	
2 12 02 2.01 01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 Persen	3 Dokumen	96 Persen	33,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 02 2.01 02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	95 Persen	460000 Doku	m9e6nPersen	351,402,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 02 2.01 03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen pendaftaran penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	95 Persen	70000 Orang/ /Santri	Siswa 96 Persen	49,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 02 2.01 05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	95 Persen	9600 Dokume	n96 Persen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 02 2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								25,848,000	
2 12 02 2.03 02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	95 Persen	1 Dokumen	96 Persen	25,848,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								406,661,000	
2 12 03 2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil								406,661,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 12 03 2.01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase Penerbitan Dokumen Capil Persentase Penerbitan Dokumen Capil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	95 % 95 Persen	41496 Dokum	e9n6 Persen	372,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 03 2.01 02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Capil Persentase Penerbitan Dokumen Capil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	95 % 95 Persen	4 Layanan	96 Persen	33,936,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN								1,333,716,500	
2 12 04 2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								11,420,000	
2 12 04 2.01 02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SIAK	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	43 Dokumen	96 Persen	11,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 04 2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								263,647,000	
2 12 04 2.03 04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SIAK	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	4 Dokumen	96 Persen	115,988,000	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmu m
2 12 04 2.03 05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SIAK	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	1 Laporan	96 Persen	75,309,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 12 04 2.03 07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SIAK	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	4 Laporan	96 Persen	72,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 04 2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								1,058,649,500	
2 12 04 2.04 01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SIAK	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	70 Laporan	96 Persen	1,017,712,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 04 2.04 03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SIAK	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	4 Laporan	96 Persen	40,937,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 12 05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN								13,964,000	
2 12 05 2.01	Penyusunan Profil Kependudukan								13,964,000	
2 12 05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Persentase Pengguna Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Meningkatnya Pelayanan Admindak (Administrasi Kependudukan)	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	90 Persen	2 Dokumen	96 Persen	13,964,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									8,502,298,448	
DINAS KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							130,979,782,691	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							58,881,086,949			
1	2	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							181,686,130			
1	2	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Dokumen	88 .	48,375,630	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Dokumen	88 .	32,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	5 Dokumen	88 .	41,754,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Laporan	88 .	2,916,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	24 Laporan	88 .	55,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								53,382,304,7 80		
1	2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan keehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	795 Orang/bul an	88 .	53,206,219,78 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan keehatan		100 %	12 Dokumen	88 .	156,358,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen dan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan keehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	88 .	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan keehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	88 .	5,487,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.0 2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan keehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	88 .	3,384,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Laporan	88 .	4,372,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.0 2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	88 .	1,484,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							48,596,000		
1	2	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	88 .	6,493,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.0 3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	88 .	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.0 3	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	30 Laporan	88 .	10,862,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	88 .	6,666,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	88 .	1,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.0 3	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	88 .	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.0 4		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							659		
1	2	1	2.0 4	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	88 .	659	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							126,250,000		
1	2	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	280 Paket	88 .	68,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	88 .	38,648,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	855 Dokumen	88 .	12,952,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	240 Orang	88 .	5,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							810,263,340		
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	88 .	22,245,510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	88 .	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Paket	88 .	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	88 .	7,009,580	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	88 .	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	88 .	476,008,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							36,700,000		
1	2	1	2.07	3	Pengadaan Alat Besar	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 jenis	88 .	7,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Unit	88 .	29,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3,308,602,699		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	88 .	391,929,507	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	88 .	43,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	88 .	2,872,923,192	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							986,025,000		
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	54 Unit	88 .	677,225,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	88 .	8,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	212 Unit	88 .	121,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 jenis	88 .	121,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 jenis	88 .	58,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								65,374,387,037	
1	2	2	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								20,524,267,264	
1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	AKB	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	6 Unit	10.5 %	682,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						AKI				216/100.000 kelahiran hidup				
						persentase fasyankes terakreditasi				58 %				
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	AKB	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	10 Unit	10.5 %	522,181,600	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
						AKI				216/100.000 kela hiran hidup				
						persentase fasyankes terakreditasi				58 %				
1	2	2	2.0 1	1 4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	AKB	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	10 Unit	10.5 %	7,496,993,332	Pajak Rokok
						AKI				216/100.000 kela hiran hidup				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						persentase fasyankes terakreditasi				58 %				DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
														Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik
1	2	2	2.0 1	1 6	Pengadaan Obat, Vaksin	AKB	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	1 Paket	10.5 %	3,897,668,271	Pajak Rokok

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
					AKI					216/100.000 kela hiran hidup				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					persentase fasyankes terakreditasi					58 %				DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
1	2	2	2.0 1	1 7	Pengadaan Bahan Habis Pakai	AKB	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	40 Paket	10.5 %	7,712,094,061	Pajak Rokok
					AKI					216/100.000 kela hiran hidup				Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik
					persentase fasyankes terakreditasi					58 %				DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 1	2 0	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	AKB	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	50 Unit	10.5 %	212,830,000	Pajak Rokok
					AKI					216/100.000 kela hiran hidup				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
									Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	
			2.0 2		persentase fasyankes terakreditasi				58 %					
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						44,352,519,4 73			
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	AKB	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	14150 Orang	10.5 %	119,373,800	Pajak Rokok
						AKI				216/100.000 kela hiran hidup				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						persentase fasyankes terakreditasi				58 %				DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	AKB	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	persentase keluarga sehat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	14000 Orang	10.5 %	272,314,000	Pajak Rokok
						AKI				216/100.000 kela hiran hidup				DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
						persentase fasyankes terakreditasi				58 %				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	AKB	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	13700 Orang	10.5 %	121,036,750	Pajak Rokok
						AKI				216/100.000 kelahiran hidup				DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
						persentase fasyankes terakreditasi				58 %				
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	AKB	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	47925 Orang	10.5 %	90,803,250	Pajak Rokok
						AKI				216/100.000 kelahiran hidup				
						persentase fasyankes terakreditasi				58 %				
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	AKB	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	51600 Orang	10.5 %	138,952,800	Pajak Rokok
						AKI				216/100.000 kelahiran hidup				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
			2.0 2		persentase fasyankes terakreditasi					58 %				
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	AKB	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	667790 Orang	10.5 %	123,870,000	Pajak Rokok
					AKI					216/100.000 kelahiran hidup			DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	
					persentase fasyankes terakreditasi					58 %				
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	AKB	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	120150 Orang	10.5 %	68,244,750	Pajak Rokok
					AKI					216/100.000 kelahiran hidup			DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	
					persentase fasyankes terakreditasi					58 %				
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	AKB	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	284001 Orang	10.5 %	53,205,000	Pajak Rokok

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		AKI				216/100.000 kela hiran hidup				DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
		persentase fasyankes terakreditasi				58 %								
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	AKB	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	21846 Orang	10.5 %	40,155,000	Pajak Rokok
		AKI				216/100.000 kela hiran hidup				DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
		persentase fasyankes terakreditasi				58 %								
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	AKB	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	1995 Orang	10.5 %	34,742,500	Pajak Rokok
		AKI				216/100.000 kela hiran hidup				DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
		persentase fasyankes terakreditasi				58 %								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	AKB	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	13009 Orang	10.5 %	535,471,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
					AKI					216/100.000 kelahiran hidup				DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	
						persentase fasyankes terakreditasi				58 %					
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	AKB	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	18121 Orang	10.5 %	5,940,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	
					AKI					216/100.000 kelahiran hidup					
						persentase fasyankes terakreditasi				58 %					
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	AKB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	4 Dokumen	10.5 %	90,060,000	Pajak Rokok	
					AKI					216/100.000 kelahiran hidup				Pajak Rokok-Pelayanan Kesehatan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
						persentase fasyankes terakreditasi					58 %				DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	AKB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	2 Dokumen	10.5 %	2,442,349,330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
					AKI					216/100.000 kelahiran hidup					
					persentase fasyankes terakreditasi					58 %					
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	AKB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	5 Dokumen	10.5 %	9,667,530,450	Pajak Rokok	
					AKI					216/100.000 kelahiran hidup				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
					persentase fasyankes terakreditasi					58 %				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	AKB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	2 Dokumen	10.5 %	238,400,000	Pajak Rokok	
						AKI				216/100.000 kela hiran hidup				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							persentase fasyankes terakreditasi			58 %					DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	AKB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	2 Dokumen	10.5 %	485,398,728	Pajak Rokok	
						AKI				216/100.000 kela hiran hidup				DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	
							persentase fasyankes terakreditasi			58 %					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	AKB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	2 Dokumen	10.5 %	150,850,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
						AKI				216/100.000 kela hiran hidup				
						persentase fasyankes terakreditasi				58 %				
1	2	2	2.0 2	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	AKB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	2 Dokumen	10.5 %	54,927,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						AKI				216/100.000 kela hiran hidup				
						persentase fasyankes terakreditasi				58 %				
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	AKB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	4 Dokumen	10.5 %	201,659,000	Pajak Rokok
						AKI				216/100.000 kela hiran hidup				
						persentase fasyankes				58 %				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
			2.0	2	terakreditasi									
1	2	2	2.0	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	AKB	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	14116 Orang	10.5 %	69,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
			2	1	AKI				216/100.000 kela hiran hidup					
					persentase fasyankes terakreditasi				58 %					
1	2	2	2.0	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	AKB	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	18134 Orang	10.5 %	115,807,700	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
			2	2	AKI				216/100.000 kela hiran hidup					
					persentase fasyankes terakreditasi				58 %					
1	2	2	2.0	2	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	AKB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	3 Dokumen	10.5 %	22,230,000	Pajak Rokok
			2	3	AKI				216/100.000 kela hiran hidup					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	AKB	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	9 Dokumen	10.5 %	375,515,000	Pajak Rokok
						AKI				216/100.000 kela hiran hidup				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
														DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 6	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	AKB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	12 Dokumen	10.5 %	28,037,118,41 5	Pajak Rokok
						AKI				216/100.000 kela hiran hidup				Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja							
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan			
1	2	2	2.0 2	2 7	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	AKB	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	18134 Orang	10.5 %	32,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK			
				AKI						216/100.000 kela hiran hidup							
						persentase fasyankes terakreditasi					58 %						
1	2	2	2.0 2	2 9	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	AKB	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	1 Dokumen	10.5 %	77,600,000	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
						AKI					216/100.000 kela hiran hidup						
						persentase fasyankes terakreditasi					58 %						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
1	2	2	2.0 2	3 0	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	AKB	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	7 Unit	10.5 %	18,167,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						AKI				216/100.000 kelahiran hidup				
							persentase fasyankes terakreditasi			58 %				
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	AKB	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	25 Unit	10.5 %	147,392,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						AKI				216/100.000 kelahiran hidup				Pajak Rokok
							persentase fasyankes terakreditasi			58 %				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	
1	2	2	2.0 2	3 8	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	AKB	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	1 Unit	10.5 %	340,709,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
				AKI					216/100.000 kela hiran hidup						
				persentase fasyankes terakreditasi						58 %					
1	2	2	2.0 2	3 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	AKB	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	persentase keluarga sehat		13.8 per 1.000 kelahiran hidup	243547 Keluar ga	10.5 %	56,102,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
				AKI					216/100.000 kela hiran hidup						
				persentase fasyankes terakreditasi						58 %					
1	2	2	2.0 2	4 0	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	AKB	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persentase keluarga sehat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	2208 Orang	10.5 %	45,599,500	Pajak Rokok	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
						AKI				216/100.000 kela hiran hidup			DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	
						persentase fasyankes terakreditasi				58 %				
1	2	2	2.0 2	4 1	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	AKB	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	persentase keluarga sehat		13.8 per 1.000 kelahiran hidup	594 Orang	10.5 %	31,124,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						AKI				216/100.000 kela hiran hidup			DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	
						persentase fasyankes terakreditasi				58 %				
1	2	2	2.0 2	4 3	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	AKB	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	persentase keluarga sehat		13.8 per 1.000 kelahiran hidup	7 Tatanan	10.5 %	47,670,000	Pajak Rokok
						AKI				216/100.000 kela hiran hidup				
						persentase fasyankes terakreditasi				58 %				
1	2	2	2.0 3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							331,700,300		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	
1	2	2	2.0 3	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	AKB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	2 Laporan	10.5 %	76,680,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
					AKI					216/100.000 kela hiran hidup					
						persentase fasyankes terakreditasi				58 %					
1	2	2	2.0 3	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	AKB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	1 Dokumen	10.5 %	255,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
					AKI					216/100.000 kela hiran hidup					
						persentase fasyankes terakreditasi				58 %					
1	2	2	2.0 4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							165,900,000			
1	2	2	2.0 4	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	AKB	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	7 Unit	10.5 %	81,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
					AKI					216/100.000 kela hiran hidup					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
					persentase fasyankes terakreditasi					58 %				
1	2	2	2.0 4	2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	AKB	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	1 Unit	10.5 %	30,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					AKI					216/100.000 kelahiran hidup				
					persentase fasyankes terakreditasi					58 %				
1	2	2	2.0 4	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	AKB	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	persentase keluarga sehat	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13.8 per 1.000 kelahiran hidup	34 faskes	10.5 %	54,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					AKI					216/100.000 kelahiran hidup				
					persentase fasyankes terakreditasi					58 %				
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							5,788,590,305		
1	2	3	2.0 1		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota							51,400,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	3	2.0 1	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	persentase fasyankes dengan manajemen SDMk sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	1000 SIP	88 .	23,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	3	2.0 1	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	persentase fasyankes dengan manajemen SDMk sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan		70 %	100 Dokumen	88 .	27,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							4,048,807,000		
1	2	3	2.0 2	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				30 Dokumen		31,585,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				2559 Orang		3,947,041,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	3	2.0 2	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				210 Dokumen		70,181,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	3	2.0 3		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,688,383,305		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
1	2	3	2.0 3	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase fasyankes dengan manajemen SDMk sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan		70 %	650 Orang	88 .	1,688,383,305	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								444,423,300	
1	2	4	2.0 1		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								46,361,300	
1	2	4	2.0 1	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase keluarga sehat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	31 Dokumen	10.5 %	41,261,300	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	4	2.0 1	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	persentase keluarga sehat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	94 %	20 Sarana	10.5 %	5,100,000	Pajak Rokok
1	2	4	2.0 3		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							155,050,000		
1	2	4	2.0 3	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	persentase keluarga sehat		94 %	132 Dokumen	10.5 %	155,050,000	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan
1	2	4	2.0 4		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							50,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	4	2.0 4	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	persentase keluarga sehat		94 %	27 Dokumen	10.5 %	50,000,000	Pajak Rokok
1	2	4	2.0 5		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan							35,000,000		
1	2	4	2.0 5	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	persentase keluarga sehat		94 %	2 Dokumen	10.5 %	35,000,000	Pajak Rokok
1	2	4	2.0 6		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							158,012,000		
1	2	4	2.0 6	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	persentase keluarga sehat		94 %	114 Unit	10.5 %	155,042,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	4	2.0 6	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	persentase keluarga sehat		94 %	1 Dokumen	10.5 %	2,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							491,295,100		
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							136,450,000		
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase desa siaga aktif purnama mandiri	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	persentase keluarga sehat		23 %	4 Dokumen	10.5 %	136,450,000	Pajak Rokok Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	5	2.0 2		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							105,814,600		
1	2	5	2.0 2	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	persentase desa siaga aktif purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	persentase keluarga sehat		23 %	3 Dokumen	10.5 %	105,814,600	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							249,030,500		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	persentase desa siaga aktif purnama mandiri	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	persentase keluarga sehat		23 %	4 Dokumen	10.5 %	249,030,500	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	1 4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							12,659,384,3 69		
2	1 4	2			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							120,000,000		
2	1 4	2	2.0 2		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							120,000,000		
2	1 4	2	2.0 2	1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Persentase Peserta KB terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Total Fertility Rate (TFR)		76.5 %	5 Dokumen	1.9 .	24,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
2	1 4	2	2.0 2	1 3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase Peserta KB terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.5 %	1 Dokumen	1.9 .	96,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
2	1 4	3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							7,315,944,36 9		
2	1 4	3	2.0 1		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							2,337,773,00 0		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	3	2.0	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase Peserta terhadap Pasangan Subur (PUS) KB Usia	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.5 %	8 Organisasi	1.9 .	4,375,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
2	1	3	2.0	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Peserta terhadap Pasangan Subur (PUS) KB Usia	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.5 %	1 Dokumen	1.9 .	9,150,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
2	1	3	2.0	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase Peserta terhadap Pasangan Subur (PUS) KB Usia	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.5 %	5 Dokumen	1.9 .	101,573,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	3	2.0	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase Peserta KB terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.5 %	2 Dokumen	1.9 .	320,350,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
2	1	3	2.0	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase Peserta KB terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Total Fertility Rate (TFR)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.5 %	12 Laporan	1.9 .	1,864,475,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
2	1	3	2.0	8	Pengendalian Program KKBPK	Persentase Peserta KB terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.5 %	12 Laporan	1.9 .	37,850,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
2	1	3	2.0		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							2,443,140,000		
2	1	3	2.0	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Peserta KB terhadap Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Total Fertility Rate (TFR)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.5 %	2000 Orang	1.9 .	2,443,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
2	1 4	3	2.0 3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					1,827,206,369					
2	1 4	3	2.0 3	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Peserta terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) KB	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Total Fertility Rate (TFR)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.5 %	3 Laporan	1.9 .	69,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
2	1 4	3	2.0 3	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Peserta terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Total Fertility Rate (TFR)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.5 %	2610 Orang	1.9 .	1,185,171,369	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 4	3	2.0 3	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase Peserta terhadap Pasangan Usia Subur (PUS) KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Total Fertility Rate (TFR)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.5 %	3 Unit	1.9 .	546,400,000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	3	2.0	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Peserta terhadap Pasangan Subur (PUS) KB Usia	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Total Fertility Rate (TFR)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.5 %	1 Laporan	1.9 .	26,535,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
														DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
2	1	3	2.0		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							707,825,000		
2	1	3	2.0	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase Peserta terhadap Pasangan Subur (PUS) KB Usia	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Total Fertility Rate (TFR)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76.5 %	30 Kampung KB	1.9 .	707,825,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
2	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							5,223,440,000		
2	1	4	2.0	1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							5,223,440,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
2	1 4	4	2.0 1	1	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Keluarga menjadi Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKA	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Total Fertility Rate (TFR)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68.750 KK	1563 Kelompok	1.9 .	179,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
						ntase Penurunan Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 Tahun				12.5 %				
2	1 4	4	2.0 1	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Keluarga menjadi Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKA	Jumlah Unit Sarana Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68.750 KK	19 Unit	1.9 .	306,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
						ntase Penurunan Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 Tahun				12.5 %				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
2	1 4	4	2.0 1	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Keluarga menjadi Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKA	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Total Fertility Rate (TFR)	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	68.750 KK	1843 Orang	1.9 .	4,738,040,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
						ntase Penurunan Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 Tahun				12.5 %				
TOTAL												143,639,167,060		
UPT PUSKESMAS TEMPURSARI														
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2,792,140,196	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1,687,738,200	
1	2	1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD								1,687,738,200	
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			Kab. Lumajang, Tempursari, Tempursari		1 Unit Kerja		1,687,738,200	Pendapatan dari BLUD
												Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								975,575,796	
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								975,575,796	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		440 Orang		29,325,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		420 Orang		9,300,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		375 Orang		6,300,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		1555 Orang		8,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		3587 Orang		13,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		18928 Orang		3,375,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		4901 Orang		14,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		8055 Orang		16,800,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		620 Orang		16,800,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		57 Orang		9,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		351 Orang		10,650,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		826 Orang		9,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		1 Dokumen		1,579,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		1 Dokumen		525	
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		1 Dokumen		49,725,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		1 Dokumen		5,580,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		10,350,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		2 Dokumen		27,450,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		2 Dokumen		2,725,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		1 Dokumen		27,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		1 Dokumen		18,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		1 Dokumen		27,375,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		0 Paket		600	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		1 Dokumen		576,216,796	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		1 Unit		76,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		1 Laporan		1,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		1 Dokumen		900	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								92,251,200	
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								92,251,200	
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		4 Orang		92,251,200	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								36,575,000	
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								10,000,000	
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Tempursari, Tempursari		1 Dokumen		10,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1	2	5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								26,575,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		1 Dokumen		26,575,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
TOTAL												2,792,140,196					
UPT PUSKESMAS PRONOJIWO																	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													2,694,931,792		
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,601,104,200		
1	2	1	2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD												1,601,104,200	
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		1 Unit Kerja		1,601,104,200	Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												1,011,139,192		
1	2	2	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												1,011,139,192	
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		545 Orang		69,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		520 Orang		5,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		470 Orang		10,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		1951 Orang		12,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		4496 Orang		5,550,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		23718 Orang		24,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		6140 Orang		20,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		10092 Orang		2,775,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		776 Orang		2,775,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		71 Orang		16,950,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		427 Orang		8,550,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		738 Orang		8,175,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan		1 Dokumen		10,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		1 Dokumen		1,800,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan		1 Dokumen		39,090,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan		1 Dokumen		3,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan		2 Dokumen		30,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		2 Dokumen		48,750,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan		1 Dokumen		18,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		71 Orang		5,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan		1 Dokumen		39,075,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		1 Dokumen		573,649,192	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		1 Unit		50,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		0 Laporan		1,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							69,188,400		
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							69,188,400		
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		3 Orang		69,188,400	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							13,500,000		
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							4,500,000		
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		1 Dokumen		4,500,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					9,000,000					
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		1 Dokumen		9,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	
TOTAL											2,694,931,79 2				
UPT PUSKESMAS CANDIPURO															
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									3,222,499,56 1	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									1,790,590,76 1	
1	2	1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD									1,790,590,76 1	
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		1 Unit Kerja		1,790,590,761	Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									1,404,946,00 0	
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									1,404,946,00 0	
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		510 Orang		36,375,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		468 Orang		14,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		1951 Orang		7,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		4500 Orang		15,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		23676 Orang		5,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		6111 Orang		36,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		10068 Orang		675	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan		774 Orang		675	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		71 Orang		17,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		421 Orang		15,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		803 Orang		750	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		1 Dokumen		12,750,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		1 Dokumen		46,890,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		1 Dokumen		8,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		2 Dokumen		19,650,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		2 Dokumen		12,525,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		1 Dokumen		19,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		1 Dokumen		21,815,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		1 Dokumen		81,150,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		1 Dokumen		1,002,841,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		1 Unit		21,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		1 Laporan		9,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								23,062,800			
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								23,062,800			
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		2 Orang		23,062,800	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								3,900,000			
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								3,900,000			
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro		1 Dokumen		3,900,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		
TOTAL												3,222,499,561				
UPT PUSKESMAS PENANGGAL																
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												2,160,723,420		
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											987,059,440		
1	2	1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD										987,059,440	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		1 Unit Kerja		987,059,440	Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,056,918,98 0		
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,056,918,98 0		
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		371 Orang		63,140,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		354 Orang		750	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		332 Orang		4,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		1336 Orang		9,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		3079 Orang		24,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		16233 Orang		3,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		4199 Orang		18,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		6906 Orang		9,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		531 Orang		9,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		48 Orang		16,110,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		308 Orang		20,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		1 Dokumen		12,375,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		1 Dokumen		1,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		1 Dokumen		20,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		1 Dokumen		12,770,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		2 Dokumen		13,275,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		2 Dokumen		36,215,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		2 Dokumen		5,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		1 Dokumen		25,650,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		48 Orang		1,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		1 Dokumen		44,615,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		1 Dokumen		56,850,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan		1 Paket		4,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		1 Dokumen		627,718,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit		14,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		1 Laporan		1,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							86,400,000		
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							86,400,000		
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		1 Dokumen		86,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang			
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							30,345,000		
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							15,000,000		
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		1 Dokumen		15,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	2	5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					15,345,000						
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal		1 Dokumen		15,345,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
TOTAL											2,160,723,420					
UPT PUSKESMAS PASIRIAN																
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												3,838,463,860		
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,753,828,393		
1	2	1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD					2,753,828,393						
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		1 Unit Kerja		2,753,828,393	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												979,024,267	
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					979,024,267						
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				691 Orang		70,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		660 Orang		18,750,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		651 Orang		1,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		2712 Orang		28,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		6258 Orang		16,125,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		32873 Orang		1,875,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		8477 Orang		3,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		13977 Orang		1,575,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		1075 Orang		1,575,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				98 Orang		11,550,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		567 Orang		4,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		1 Dokumen		3,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		1 Dokumen		43,125,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		1 Dokumen		5,550,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		2 Dokumen		57,975,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		2 Dokumen		17,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		1 Dokumen		20,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		1 Dokumen		55,425,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		1 Dokumen		613,549,267	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
												DAK Non Fisik-BOKKB- BOK		
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		1 Laporan		1,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								92,251,200	
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								92,251,200	
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		3 Orang		92,251,200	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								13,360,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					13,360,000				
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian		1 Dokumen		13,360,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	
TOTAL											3,838,463,860			
UPT PUSKESMAS BADES														
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2,578,747,380	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1,378,543,080	
1	2	1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD								1,378,543,080	
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		1 Unit Kerja		1,378,543,080	Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,042,340,900	
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,042,340,900	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		514 Orang		49,300,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		491 Orang		7,200,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		442 Orang		9,300,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		1837 Orang		4,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		4233 Orang		9,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		22334 Orang		6,725,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		5780 Orang		13,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		67 Orang		9,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		405 Orang		13,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		703 Orang		1,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		1 Dokumen		6,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		1 Dokumen		19,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		1 Dokumen		11,750,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		9,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		2 Dokumen		43,290,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		1 Dokumen		70,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		1 Dokumen		43,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		1 Paket		1,950,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Hasil Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		1 Dokumen		673,875,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
												DAK Non Fisik-BOKKB- BOK		
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		1 Unit		34,350,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3 7	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		1 Dokumen		2,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							112,388,400		
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							112,388,400		
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	persentase fasyankes dengan manajemen SDMk sesuai standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan	70 %	3 Orang	88 .	112,388,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
													112,388,400	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							45,475,000		
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							6,000,000		
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Pasirian, Bades		1 Dokumen		6,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1	2	5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							39,475,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		1 Dokumen		39,475,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
TOTAL												2,578,747,380					
UPT PUSKESMAS TEMPEH																	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												4,090,269,580			
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,934,240,180		
1	2	1	2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD												2,934,240,180	
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja		2,934,240,180	Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												1,061,416,000		
1	2	2	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												1,061,416,000	
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		719 Orang		34,350,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		686 Orang		14,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		682 Orang		19,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		2691 Orang		40,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		6204 Orang		29,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		32662 Orang		9,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		8439 Orang		23,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		13892 Orang		4,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		1069 Orang		4,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		98 Orang		26,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				567 Orang		22,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				975 Orang		14,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		1 Dokumen		7,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		51,626,750	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		5,050,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		8,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		2 Dokumen		16,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		1 Dokumen		43,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		58,425,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		1 Paket		2,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		1 Dokumen		605,914,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
														DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		1 Unit		14,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		1 Laporan		3,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							69,188,400		
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							69,188,400		
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		3 Orang		69,188,400	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							25,425,000		
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							12,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		1 Dokumen		12,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	
1	2	5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							13,425,000			
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		1 Dokumen		13,425,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	
TOTAL												4,090,269,580			
UPT PUSKESMAS GESANG															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												2,608,577,296	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,536,829,400	
1	2	1	2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD										1,536,829,400	
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		1 Unit Kerja		1,536,829,400	Pendapatan dari BLUD	
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											965,376,696	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	2	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							965,376,696			
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		407 Orang		19,275,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		388 Orang		3,750,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		346 Orang		1,875,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		1436 Orang		3,375,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		3311 Orang		2,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		900000 Orang		19,650,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		4528 Orang		1,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		52 Orang		4,350,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		324 Orang		22,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen		1,125,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		1 Dokumen		23,350,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		1 Dokumen		4,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		2 Dokumen		23,625,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		2 Dokumen		37,753,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		2 Dokumen		24,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		1 Dokumen		86,925,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		52 Orang		1,125,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		2,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		1 Dokumen		47,625,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan		1 Paket		1,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		1 Dokumen		616,273,696	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		1 Unit		15,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		1 Laporan		750	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								92,251,200	
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								92,251,200	
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang		92,251,200	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								14,120,000	
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								8,000,000	
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang		1 Dokumen		8,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1	2	5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								6,120,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen		6,120,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK			
TOTAL													2,608,577,296					
UPT PUSKESMAS ROGOTRUNAN																		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													4,697,449,949			
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													2,892,501,249		
1	2	1	2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD													2,892,501,249	
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan			1 Unit Kerja		2,892,501,249	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													1,572,473,700		
1	2	2	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													1,572,473,700	
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan			1.15 Orang		74,550,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK			
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan			1.098 Orang		9,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1.034 Orang		3,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		4.296 Orang		7,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		52.149 Orang		19,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		13.478 Orang		9,150,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		22.182 Orang		16,843,500	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1.706 Orang		16,843,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		156 Orang		13,050,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		875 Orang		18,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1893 Orang		6,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Dokumen		6,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Dokumen		68,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Dokumen		12,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		2 Dokumen		21,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen		43,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		2 Dokumen		63,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Dokumen		16,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Dokumen		285,230,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		9 Dokumen		56,625,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Dokumen		756,582,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Unit		45,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		1 Laporan		3,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							21,600,000		
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							21,600,000		
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruran		0 Orang		21,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang				
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							61,500,000		
1	2	4	2.0 4		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							61,500,000		
1	2	4	2.0 4	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruran		2 Dokumen		61,500,000	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					149,375,000						
1	2	5	2.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					16,000,000						
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Dokumen		16,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	
1	2	5	2.0 2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					72,825,000						
1	2	5	2.0 2	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Dokumen		72,825,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	
1	2	5	2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					60,550,000						
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Dokumen		60,550,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	
TOTAL												4,697,449,949			
UPT PUSKESMAS LABRUK KIDUL															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												2,463,094,100	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,151,073,200		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD								1,151,073,20 0	
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		1 Unit Kerja		1,151,073,200	Pendapatan dari BLUD
														Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,232,832,50 0	
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,232,832,50 0	
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		497 Orang		51,200,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		474 Orang		5,250,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		465 Orang		4,200,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		1942 Orang		15,525,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		4476 Orang		12,150,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		23521 Orang		3,525,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		6066 Orang		10,500,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		70 Orang		3,375,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		421 Orang		12,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		1069 Orang		5,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		1 Dokumen		7,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		1 Dokumen		75,067,500	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		1 Dokumen		450	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		2 Dokumen		15,300,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		2 Dokumen		103,270,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		2 Dokumen		6,000,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		1 Dokumen		12,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		70 Orang		1,350,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		1 Dokumen		98,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen		37,050,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		1 Paket		6,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		1 Dokumen		628,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		1 Unit		114,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		1 Laporan		2,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								69,188,400			
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								69,188,400			
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		3 Orang		69,188,400	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								10,000,000			
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								10,000,000			
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan		1 Dokumen		10,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
												TOTAL	2,463,094,100			
UPT PUSKESMAS TEKUNG																
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										3,099,655,533	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,699,035,133	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD					1,699,035,133				
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja		1,699,035,133	Pendapatan dari BLUD
														Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1,251,147,000				
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,251,147,000				
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tekung, Tekung		434 Orang		23,925,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				415 Orang		5,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan		389 Orang		1,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1618 Orang		4,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3730 Orang		10,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19650 Orang		3,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5078 Orang		14,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8359 Orang		1,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan		643 Orang		1,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				59 Orang		23,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				362 Orang		14,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				635 Orang		9,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen		34,390,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen		3,105,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen		20,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen		6,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				2 Dokumen		3,780,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		48,450,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				59 Orang		3,240,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				1 Dokumen		344,815,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		49,950,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen		579,407,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
														DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	3	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit		37,385,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	3	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan		1 Laporan		4,350,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								69,188,400	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	2.0 2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							69,188,400			
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang		69,188,400	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							80,285,000			
1	2	5	2.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							11,420,000			
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen		11,420,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
1	2	5	2.0 2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							49,125,000			
1	2	5	2.0 2	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen		49,125,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	5	2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							19,740,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen		19,740,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				
TOTAL												3,099,655,533						
UPT PUSKESMAS KUNIR																		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													4,049,959,961			
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,858,829,461			
1	2	1	2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD													2,858,829,461	
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		1 Unit Kerja		2,858,829,461	Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP				
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												957,015,500			
1	2	2	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													957,015,500	
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		748 Orang		55,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		0 Orang		2,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			714 Orang				
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		666 Orang		450	DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		2770 Orang		3,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		6383 Orang		39,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		33637 Orang		4,425,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		8695 Orang		1,260,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		100 Orang		4,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		583 Orang		6,150,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		1238 Orang		3,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		1 Dokumen		1,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		1 Dokumen		600	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		2 Dokumen		22,350,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		2 Dokumen		118,115,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		1 Dokumen		15,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		100 Orang		3,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB
1	2	2	2.0 2	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		1 Dokumen		26,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		1 Dokumen		86,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		1 Dokumen		562,565,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								43,200,000	
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								43,200,000	
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		2 Orang		43,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								190,915,000	
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								118,115,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		1 Dokumen		118,115,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	
1	2	5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							72,800,000			
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan		1 Dokumen		72,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	
TOTAL												4,049,959,961			
UPT PUSKESMAS YOSOWILANGUN															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												4,178,948,157	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,746,648,019	
1	2	1	2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD										2,746,648,019	
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja		2,746,648,019	Pendapatan dari BLUD	
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											1,393,237,33	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
										8				
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1,393,237,338			
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul		733 Orang		76,350,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul		699 Orang		6,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul		671 Orang		3,750,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2793 Orang		2,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul		6440 Orang		30,150,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul		33880 Orang		12,825,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Yosowilangu n Kidul		8750 Orang		17,475,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Yosowilangu n Kidul		14409 Orang		8,625,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Yosowilangu n Kidul		1109 Orang		5,750,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Yosowilangu n Kidul		101 Orang		3,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Yosowilangu n Kidul		589 Orang		37,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Yosowilangu n Kidul		996 Orang		750	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul		1 Dokumen		1,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul		1 Dokumen		69,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul		1 Dokumen		16,605,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					2 Dokumen		15,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					2 Dokumen		78,525,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen		35,850,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					101 Orang		3,375,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul		1 Dokumen		158,745,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Yosowilangun, Semua Kelurahan		1 Dokumen		46,125,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Kab. Lumajang, Yosowilangun, Semua Kelurahan		1 Paket		750	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen		728,837,338	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit		32,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Lumajang, Yosowilangun, Semua Kelurahan		1 Laporan		450	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							23,062,800				
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							23,062,800				
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang		23,062,800	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							16,000,000				
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							16,000,000				
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Yosowilangun, Semua Kelurahan		1 Dokumen		16,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		
TOTAL												4,178,948,157				
UPT PUSKESMAS SUMBERSARI																
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										3,082,327,449	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,893,855,349	
1	2	1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD										1,893,855,349	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Sumbersari		1 Unit Kerja		1,893,855,349	Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,073,522,10 0		
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,073,522,10 0		
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Sumbersari		438 Orang		120,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Sumbersari		1740 Orang		11,025,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Sumbersari		4014 Orang		21,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		21092 Orang		2,400,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan		5436 Orang		40,950,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				63 Orang		14,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				383 Orang		22,050,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				629 Orang		1,575,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Sumbersari		1 Dokumen		1,575,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Sumbersari		1 Dokumen		3,150,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Rowokangkung, Sumbersari		1 Dokumen		4,875,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen		12,450,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen		46,863,500	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Rowokangkung, Sumbersari		1 Dokumen		31,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				63 Orang		3,400,000	
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Rowokangkung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		24,975,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen		698,133,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
														DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				1 Unit		11,700,000		
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							86,400,000			
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							86,400,000			
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang		86,400,000		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							28,550,000			
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							8,000,000			
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Rowokangkung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		8,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	
1	2	5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							20,550,000			
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen		20,550,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	
TOTAL												3,082,327,449			
UPT PUSKESMAS JATIROTO															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												3,596,549,040	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							2,302,497,040			
1	2	1	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD							2,302,497,040			
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto		1 Unit Kerja		2,302,497,040	Pendapatan dari BLUD
												Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		
1	2	2		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,172,513,600			
1	2	2	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,172,513,600			
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		592 Orang		22,075,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		565 Orang		4,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		553 Orang		5,850,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		2304 Orang		4,050,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		5312 Orang		16,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		27927 Orang		2,925,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		7205 Orang		17,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		11875 Orang		5,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		914 Orang		5,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		83 Orang		19,650,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		491 Orang		18,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		810 Orang		4,050,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		1 Dokumen		2,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		1 Dokumen		38,030,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		1 Dokumen		4,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		1 Dokumen		23,490,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		2 Dokumen		31,330,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	2	2.0 2	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		1 Dokumen		65,035,000	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		1 Dokumen		81,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		83 Orang		34,117,600	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		1 Dokumen		93,215,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		1 Dokumen		39,150,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		1 Paket		1,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		1 Dokumen		597,846,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		1 Unit		32,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		1 Laporan		1,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							69,188,400		
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							69,188,400		
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		3 Orang		69,188,400	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							34,350,000		
1	2	4	2.0 4		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							34,350,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	2	4	2.0 4	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		1 Dokumen		34,350,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								18,000,000			
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								18,000,000			
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan		1 Dokumen		18,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		
TOTAL												3,596,549,040				
UPT PUSKESMAS RANDUAGUNG																
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										3,456,943,300	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,317,379,050	
1	2	1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD										2,317,379,050	
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Randuagung,		1 Unit Kerja		2,317,379,050	Pendapatan dari BLUD		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
									Randuagung						Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,002,651,150			
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,002,651,150			
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		555 Orang		32,850,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		530 Orang		14,550,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		501 Orang		7,350,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		2087 Orang		9,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		4812 Orang		10,125,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		25342 Orang		9,000,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		6547 Orang		12,000,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		10778 Orang		300	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		829 Orang		300	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		76 Orang		3,075,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		454 Orang		5,325,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		748 Orang		300	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		2,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		71,325,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		3,750,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		2 Dokumen		9,600,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		2 Dokumen		65,545,250	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		60,450,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		46 Orang		1,402,500	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		53,850,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Paket		1,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		588,453,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
												DAK Non Fisik-BOKKB- BOK		
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Unit		39,600,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								46,125,600	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								46,125,600		
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		3 Orang		46,125,600	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								90,787,500		
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								12,000,000		
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		12,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	
1	2	5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								78,787,500		
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		78,787,500	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
TOTAL												3,456,943,300			
UPT PUSKESMAS SUKODONO															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												3,614,855,453	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											2,339,142,053	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD								2,339,142,053	
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		1 Unit Kerja		2,339,142,053	Pendapatan dari BLUD
													Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,082,215,400	
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,082,215,400	
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		14.15 Orang		51,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		14 Orang		900	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		13.7 Orang		15,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		47.925 Orang		4,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		51.6 Orang		17,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		667.79 Orang		1,875,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		120.15 Orang		9,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		1.995 Orang		12,750,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		13.009 Orang		9,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		18.121 Orang		3,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		1 Dokumen		30,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		1 Dokumen		4,200,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		1 Dokumen		13,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		1 Dokumen		450	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		2 Dokumen		16,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		0 Dokumen		47,850,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			2 Dokumen				
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		1 Dokumen		58,950,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		1 Dokumen		1,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		1 Dokumen		99,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		1 Paket		825	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		1 Dokumen		681,565,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								1,950,000	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							174,048,000		
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							174,048,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	2	3	2.0 2	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		29 Dokumen		87,024,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang		87,024,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								19,450,000		
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								16,000,000		
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		1 Dokumen		16,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	
1	2	5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								3,450,000		
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan		1 Dokumen		3,450,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	
												TOTAL	3,614,855,453		
UPT PUSKESMAS PADANG															
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												2,890,879,458	
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											1,807,264,558	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD								1,807,264,558	
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		1 Unit Kerja		1,807,264,558	Pendapatan dari BLUD
														Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,008,426,500	
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,008,426,500	
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		456 Orang		34,690,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		435 Orang		6,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		404 Orang		6,750,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		1683 Orang		8,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		3878 Orang		12,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		20435 Orang		300	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		5282 Orang		12,750,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		8692 Orang		1,200,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		669 Orang		1,200,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		61 Orang		4,125,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		373 Orang		22,050,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		5,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		12,690,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		14,475,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		2 Dokumen		6,450,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		2 Dokumen		93,130,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		2 Dokumen		4,400,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		25,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		61 Orang		4,045,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		27,000,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		52,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		1 Paket		15,750,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		617,371,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
														DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		1 Unit		18,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		1 Laporan		750	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								69,188,400	
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								69,188,400	
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		3 Orang		69,188,400	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								6,000,000	
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								6,000,000	
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		6,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
												TOTAL	2,890,879,458	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
UPT PUSKESMAS PASRUJAMBE										
1										
1	2									URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	2									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1	2	1								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	1	2.1 0							Peningkatan Pelayanan BLUD
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe	1 Unit Kerja	
										Pendapatan dari BLUD
										1,047,045,684
										Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	2	2								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	2	2	2.0 2							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe	549 orang	
										44,250,000
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe	524 Orang	
										25,200,000
										Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		499 Orang		12,600,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		2076 Orang		6,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		4788 Orang		9,675,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		25201 Orang		7,800,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		6507 Orang		16,510,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		10717 Orang		900	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		824 Orang		900	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		75 Orang		15,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		448 Orang		7,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		743 Orang		1,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		1 Dokumen		7,650,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		1 Dokumen		29,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		1 Dokumen		35,490,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		2 Dokumen		28,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		2 Dokumen		44,719,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		2 Dokumen		24,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		1 Dokumen		47,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		75 Orang		13,350,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		1 Dokumen		4,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		1 Dokumen		86,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan		1 Paket		9,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Operasional Puskesmas	Dokumen Pelayanan		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		1 Dokumen		689,954,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
														DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		1 Unit		5,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							138,376,800		
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							138,376,800		
1	2	3	2.0 2	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Hasil dan pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				3 Dokumen		69,188,400	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)					3 Orang		69,188,400	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							12,000,000		
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							12,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe		1 Dokumen		12,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi			
TOTAL												2,373,571,184					
UPT PUSKESMAS SENDURO																	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												3,552,352,460			
1	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												2,352,267,410		
1	2	1	2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD												2,352,267,410	
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		1 Unit Kerja		2,352,267,410	Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP			
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												1,120,896,650		
1	2	2	2.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												1,120,896,650	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		666 Orang		50,550,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		636 Orang		1,575,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		626 Orang		2,250,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		2609 Orang		2,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		6015 Orang		11,850,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		31632 Orang		5,100,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		8155 Orang		8,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		13448 Orang		2,550,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		1034 Orang		2,550,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		94 Orang		13,350,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		551 Orang		19,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		880 Orang		2,475,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		1 Dokumen		3,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		1 Dokumen		22,320,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		1 Dokumen		23,175,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		2 Dokumen		15,300,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		2 Dokumen		54,288,750	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		1 Dokumen		78,750,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		94 Orang		3,825,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		1 Dokumen		7,910,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		1 Dokumen		52,950,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		1 Dokumen		725,577,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Lumajang, Senduro, Semua Kelurahan		1 Laporan		11,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						69,188,400			
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						69,188,400			
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		3 Orang		69,188,400	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						10,000,000			
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10,000,000			
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		1 Dokumen		10,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	
											TOTAL	3,552,352,460		
UPT PUSKESMAS GUCIALIT														
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2,309,388,390				
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,238,053,360				
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					1,238,053,360				
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		1 Unit Kerja		1,238,053,360	Pendapatan dari BLUD
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD								1,238,053,360	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1,010,809,430				
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,010,809,430				
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		328 Orang		65,200,000	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		313 Orang		600	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		299 Orang		900	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		1246 Orang		8,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		2870 Orang		9,975,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		15117 Orang		12,450,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		3901 Orang		16,675,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		44 Orang		7,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		291 Orang		10,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		495 Orang		3,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		1 Dokumen		4,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		1 Dokumen		99,145,250	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		1 Dokumen		1,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		2 Dokumen		25,050,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		2 Dokumen		9,250,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		1 Dokumen		24,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		44 Orang		20,125,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		1 Dokumen		34,650,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		1 Dokumen		63,150,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket		3,750,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		1 Dokumen		555,839,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		1 Unit		27,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Lumajang, Gucialit, Semua Kelurahan		1 Laporan		6,750,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								46,125,600	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	3	2.0 2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				46,125,600					
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		2 Orang	46,125,600	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
1	2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				14,400,000					
1	2	5	2.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				9,750,000					
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		1 Dokumen	9,750,000	DAK NonFisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	
1	2	5	2.0 3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				4,650,000					
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit		1 Dokumen	4,650,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
TOTAL											2,309,388,390		
UPT PUSKESMAS KEDUNGGAJANG													
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									3,470,234,858		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								2,287,494,958	
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD								2,287,494,958	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Kedungjangan, Semua Kelurahan		1 Unit Kerja		2,287,494,958	Pendapatan dari BLUD
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								1,119,914,300	
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								1,119,914,300	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kedungjangan, Semua Kelurahan		652 Orang		19,680,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kedungjangan, Semua Kelurahan		623 Orang		16,500,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Semua Kelurahan		569 Orang		2,880,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Semua Kelurahan		2363 Orang		18,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Semua Kelurahan		5449 Orang		14,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Semua Kelurahan		28737 Orang		1,875,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Semua Kelurahan		7433 Orang		19,800,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Semua Kelurahan		12226 Orang		10,800,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Semua Kelurahan		941 Orang		10,800,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Semua Kelurahan		86 Orang		10,875,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Semua Kelurahan		508 Orang		29,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Semua Kelurahan		858 Orang		18,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		2,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		154,290,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Semua Kelurahan		2 Dokumen		9,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Semua Kelurahan		2 Dokumen		3,900,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		9,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		67,050,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				1 Paket		300	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		646,064,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
												DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Semua Kelurahan		1 Unit		54,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							46,125,600		
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							46,125,600		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Semua Kelurahan		2 Orang		46,125,600	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								16,700,000			
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								14,000,000			
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		14,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		
1	2	5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								2,700,000			
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		2,700,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
												TOTAL	3,470,234,858			
UPT PUSKESMAS KLAKAH																
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										4,127,943,606	
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,634,708,286	
1	2	1	2.1 0		Peningkatan Pelayanan BLUD										2,634,708,286	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	1	2.1 0	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Klakah, Klakah		1 Unit Kerja		2,634,708,286	Pendapatan dari BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							1,384,246,920		
1	2	2	2.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,384,246,920		
1	2	2	2.0 2	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		740 Orang		84,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		707 Orang		12,150,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		707 Orang		3,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		2975 Orang		7,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		6863 Orang		19,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		36029 Orang		2,175,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		9281 Orang		10,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		15315 Orang		750	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		1178 Orang		1,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		108 Orang		4,350,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		621 Orang		12,825,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				973 Orang		1,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		1 Dokumen		5,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		1 Dokumen		44,695,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		1 Dokumen		7,425,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		2 Dokumen		33,975,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		2 Dokumen		61,270,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		2 Dokumen		61,660,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		1 Dokumen		8,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		108 Orang		10,025,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 3	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		1 Dokumen		67,325,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		1 Dokumen		91,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		1 Dokumen		714,671,920	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		1 Unit		113,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		1 Laporan		3,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							69,188,400		
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							69,188,400		
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		3 Orang		69,188,400	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							39,800,000		
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							14,000,000		
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		1 Dokumen		14,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1	2	5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							25,800,000		
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan		1 Dokumen		25,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
TOTAL								4,127,943,606					
UPT PUSKESMAS RANUYOSO													
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					3,886,736,992			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,623,184,400			
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					2,623,184,400			
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Ranuyoso	1 Unit Kerja				Pendapatan dari BLUD
											2,623,184,400		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1,165,934,192			
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,165,934,192			
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	664 Orang			65,400,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		634 Orang		750	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		634 Orang		36,300,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		2729 Orang		6,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		6293 Orang		28,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		33011 Orang		600	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		8499 Orang		19,050,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		14030 Orang		600	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		1079 Orang		600	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		99 Orang		9,450,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		572 Orang		13,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		902 Orang		3,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		1 Dokumen		6,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		1 Dokumen		11,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		1 Dokumen		6,600,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		2 Dokumen		16,350,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		2 Dokumen		31,350,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		1 Dokumen		125,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		1 Dokumen		45,150,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		1 Dokumen		709,334,192	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
														DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		1 Unit		26,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		12 Laporan		1,800,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							69,188,400		
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							69,188,400		
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		3 Orang		69,188,400	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							28,430,000		
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							3,000,000		
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		1 Dokumen		3,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1	2	5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							25,430,000		
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan		1 Dokumen		25,430,000	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
								TOTAL	3,886,736,992				
UPT PUSKESMAS TUNJUNG													
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					2,867,962,410			
1	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,639,141,560			
1	2	1	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD					1,639,141,560			
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		Kab. Lumajang, Randuagung, Tunjung		1 Unit Kerja			Pendapatan dari BLUD
											1,639,141,560		Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
1	2	2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					1,147,632,450			
1	2	2	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					1,147,632,450			
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		384 Orang		46,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		366 Orang		7,650,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		306 Orang		6,450,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1.269 Orang		1,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		2.924 Orang		21,750,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		15.492 Orang		11,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		4.021 Orang		19,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		6.595 Orang		12,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK
1	2	2	2.0 2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		508 Orang		12,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		46 Orang		10,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		297 Orang		14,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		551 Orang		4,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		2,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		106,575,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		8,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	1 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		2 Dokumen		24,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	1 8	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		2 Dokumen		30,987,250	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 0	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		17,850,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 5	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		55,275,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	2 8	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional		Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		Kab. Lumajang, Randuagung, Tunjung		1 Paket		8,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 3	Operasional Pelayanan Puskesmas		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		527,645,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	2	2.0 2	3 5	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Unit		194,850,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	2	2	2.0 2	3 6	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Laporan		3,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								69,188,400	
1	2	3	2.0 2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								69,188,400	
1	2	3	2.0 2	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		3 Orang		69,188,400	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK
1	2	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								12,000,000	
1	2	5	2.0 1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								6,000,000	
1	2	5	2.0 1	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kab. Lumajang, Randuagung, Tunjung		1 Dokumen		6,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1	2	5	2.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								6,000,000	
1	2	5	2.0 3	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan		1 Dokumen		6,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
												TOTAL	2,867,962,410	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
UPT LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN												
1												
1	2									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	2	1								1,339,175,038		
1	2	1								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	2	1	2.10							948,698,198		
1	2	1	2.10	1	Peningkatan Pelayanan BLUD					948,698,198		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit Kerja	948,698,198	Pendapatan dari BLUD
1	2	2								PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	390,476,840	
1	2	2	2.02							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	390,476,840	
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	390,476,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									TOTAL	1,339,175,038		
UPT INSTALASI FARMASI												
1												
1	2									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	2	2								528,071,940		
1	2	2	2.02							PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
1	2	2	2.02							528,071,940		
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	528,071,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									TOTAL	528,071,940		
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN												
2										URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	9			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								18,441,916,794		
2	9	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								17,637,716,794		
2	9	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								3,000,000		
2	9	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	7654088.53 juta	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	9	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7654088.53 juta	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	9	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								15,077,996,594		
2	9	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	136 Orang/bulan	7654088.53 juta	15,032,720,594	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	9	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	7654088.53 juta	45,276,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	9	1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah								412,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	7654088.53 juta	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	7654088.53 juta	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	9	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	7654088.53 juta	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	7654088.53 juta	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	9	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	7654088.53 juta	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	7654088.53 juta	155,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	9	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,894,720,200		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	9	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	7654088.53 juta	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	7654088.53 juta	416,565,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	184 Laporan	7654088.53 juta	1,475,155,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	9	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							250,000,000		
2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	8 Unit	7654088.53 juta	220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran				100 %			
2	9	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai PDRB Sektor Pertanian		0 0	87 Unit	7654088.53 juta	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran				100 %									
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						679,200,000						
2	9	3	2.0 1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						80,000,000					
2	9	3	2.0 1	7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Skor Pola Pangan Harapan	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Sumberurip	1 %	150 Keluarga	97.74 skor	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
									Kab. Lumajang, Pronojiwo, Supiturang						
									Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro						
									Kab. Lumajang, Candipuro, Sumber Wuluh						
									Kab. Lumajang, Candipuro, Sumber Mujur						
2	9	3	2.0 4	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						599,200,000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 9 3 2.0 4 2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Presentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Skor Pola Pangan Harapan	Kab. Lumajang, Candipuro, Jarit	1 %	8 Laporan	97.74 skor	599,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Kab. Lumajang, Pasirian, Sememu					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
					Kab. Lumajang, Pasirian, Selokanyar					
					Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul					
					Kab. Lumajang, Tekung, Karangbendo					
					Kab. Lumajang, Padang, Bodang					
					Kab. Lumajang, Kedungjajangg, Grobogan					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
2	9	4												
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN										25,000,000				
2	9	4	2.0 1							25,000,000				
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan														
2	9	4	2.0 1	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Prosentase Penanganan Kerawanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Skor Pola Pangan Harapan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	0 Dokumen	97.74 skor	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				4 Dokumen			
2	9	5			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					100,000,000				
2	9	5	2.0 1		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota					100,000,000				
2	9	5	2.0 1	2	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Skor Pola Pangan Harapan	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 %	2 Sertifikat	97.74 skor	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									Kab. Lumajang, Senduro, Semua Kelurahan					
2	9	5	2.0 1	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Skor Pola Pangan Harapan	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	97.74 skor	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
3					Kab. Lumajang, Senduro, Semua Kelurahan									
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						16,323,577,151				
3	2	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						4,381,116,051				
3	2	2	2.0 1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						2,896,316,051				
3	2	2	2.0 1	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Produksi Daging	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5923868 Kw	3 Laporan	7654088.53 juta	1,170,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Jumlah Produksi Susu			Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10,933,359 Kw				DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
						Jumlah Produksi Tanaman Buah			Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	1581854 Kw				
						Jumlah Produksi Tanaman Buah dan Sayur Semusim			Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan	583109 Kw				
						Jumlah Produksi Tanaman Pangan			Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan	5923868 Kw				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
						Jumlah Produksi Tanaman Semusim			Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan	583109 Kw				
						Jumlah Produksi Tanaman Tahunan			Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Semua Kelurahan	1581854 Kw				
						Jumlah Produksi Telur			Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Semua Kelurahan	99,725 Kw				
						Popoulasi Ternak Besar			Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan	20,740,917 Kg				
						Popoulasi Ternak Kecil				13,029,090 Kg				
						Popoulasi Ternak Unggas				15,435,158 Kg				
3	2	2	2.0	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Produksi Daging	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5923868 Kw	3 Laporan	7654088.53 juta	1,725,916,051	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Jumlah Produksi Susu			Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	10,933,359 Kw				Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
						Jumlah Produksi Tanaman Buah			Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	1581854 Kw				DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
		Jumlah Produksi Tanaman Buah dan Sayur Semusim			Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	583109 Kw			Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan			Kab. Lumajang, Kunir, Kabuaran	5923868 Kw			
		Jumlah Produksi Tanaman Semusim			Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Semua Kelurahan	583109 Kw			
		Jumlah Produksi Tanaman Tahunan			Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	1581854 Kw			
		Jumlah Produksi Telur			Kab. Lumajang, Senduro, Semua Kelurahan	99,725 Kw			
		Popoulasi Ternak Besar			Kab. Lumajang, Senduro, Purworejo	20,740,917 Kg			
		Popoulasi Ternak Kecil			Kab. Lumajang, Senduro, Argosari	13,029,090 Kg			
		Popoulasi Ternak Unggas			Kab. Lumajang, Senduro, Ranupani	15,435,158 Kg			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja									
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
					Kab. Lumajang, Gucialit, Semua Kelurahan										
					Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan										
					Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan										
					Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan										
3	2	2	2.0	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota					480,800,000						
3	2	2	2.0	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian Hewan/Tanaman	Jumlah Produksi Daging	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Kalipepe	20,740,917 Kg	1 VUB	7654088.53 juta	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Jumlah Produksi Susu				15,435,158 Kg					
						Jumlah Produksi Tanaman Buah				1,581,854 Kw					
						Jumlah Produksi Tanaman Buah dan Sayur Semusim				583,109 Kw					
						Jumlah Produksi Tanaman Pangan				5,923,868 Kw					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Jumlah Produksi Tanaman Semusim				10,933,359 Kw								
		Jumlah Produksi Tanaman Tahunan				99,725 Kw								
		Jumlah Produksi Telur				13,029,090 Kg								
		Populasi Ternak Besar				249,872 ekor								
		Populasi Ternak Kecil				191,031 ekor								
		Populasi Ternak Unggas				15,496,037 ekor								
3	2 7	2	2.0 2	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Produksi Daging	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	20,740,917 Kg	6 Dokumen	7654088.53 juta	180,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Jumlah Produksi Susu			Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	15,435,158 Kg				
						Jumlah Produksi Tanaman Buah			Kab. Lumajang, Senduro, Semua Kelurahan	1,581,854 Kw				
						Jumlah Produksi Tanaman Buah dan Sayur Semusim			Kab. Lumajang, Gucialit, Semua Kelurahan	583,109 Kw				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	
					Jumlah Produksi Tanaman Pangan			Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan	5,923,868 Kw						
					Jumlah Produksi Tanaman Semusim			Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	10,933,359 Kw						
					Jumlah Produksi Tanaman Tahunan				99,725 Kw						
					Jumlah Produksi Telur				13,029,090 Kg						
					Populasi Ternak Besar				249,872 ekor						
					Populasi Ternak Kecil				191,031 ekor						
					Populasi Ternak Unggas				15,496,037 ekor						
3	2	2	2.0	3	Pemanfaatan Hewan/Tanaman	SDG	Jumlah Produksi Daging	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Sumberurip	20,740,917 Kg	1 Dokumen	7654088.53 juta	250,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Produksi Susu			Kab. Lumajang, Pronojiwo, Oro-oro Ombo	15,435,158 Kg				
							Jumlah Produksi Tanaman Buah			Kab. Lumajang, Pasirian, Sememu	1,581,854 Kw				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
		Jumlah Produksi Tanaman Buah dan Sayur Semusim			Kab. Lumajang, Kunir, Kedungmoro	583,109 Kw			
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan			Kab. Lumajang, Kunir, Karanglo	5,923,868 Kw			
		Jumlah Produksi Tanaman Semusim			Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Krai	10,933,359 Kw			
		Jumlah Produksi Tanaman Tahunan			Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan	99,725 Kw			
		Jumlah Produksi Telur			Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe	13,029,090 Kg			
		Populasi Ternak Besar			Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	249,872 ekor			
		Populasi Ternak Kecil			Kab. Lumajang, Ranuyoso, Wates Kulon	191,031 ekor			
		Populasi Ternak Unggas			Kab. Lumajang, Sumbersuko, Purwosono	15,496,037 ekor			
3	2 7	2	2.0 3	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				185,600,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
3	2 2 2.0 3 1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Produksi Daging	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Gucialit, Semua Kelurahan	20,740,917 Kg	1 Laporan	7654088.53 juta	185,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
			Jumlah Produksi Susu				15,435,158 Kg							
			Jumlah Produksi Tanaman Buah				1,581,854 Kw							
			Jumlah Produksi Tanaman Buah dan Sayur Semusim				583,109 Kw							
			Jumlah Produksi Tanaman Pangan				5,923,868 Kw							
			Jumlah Produksi Tanaman Tahunan				10,933,359 Kw							
			Jumlah Produksi Tanaman Tahunan				99,725 Kw							
			Jumlah Produksi Telur				13,029,090 Kg							
			Populasi Ternak Besar				249,872 ekor							
			Populasi Ternak Kecil				191,031 ekor							
			Populasi Ternak Unggas				15,496,037 ekor							
3	2 7	2	2.0 5	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota					818,400,000					
3	2 7	2	2.0 5	3	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	0	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	2100 Ekor	7654088.53 juta	818,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
		Jumlah Produksi Daging				20,740,917 Kg				
		Jumlah Produksi Susu				15,435,158 Kg				
		Jumlah Produksi Tanaman Buah				1,581,854 Kw				
		Jumlah Produksi Tanaman Buah dan Sayur Semusim				583,109 Kw				
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan				5,923,868 Kw				
		Jumlah Produksi Tanaman Semusim				10,933,359 Kw				
		Jumlah Produksi Tanaman Tahunan				99,725 Kw				
		Jumlah Produksi Telur				13,029,090 Kg				
		Populasi Ternak Besar				249,872 ekor				
		Populasi Ternak Kecil				191,031 ekor				
		Populasi Ternak Unggas				15,496,037 ekor				
3	2 7	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					8,322,975,000		
3	2 7	3	2.0 1	Pengembangan Prasarana Pertanian					2,302,975,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3	2	7	3	2.0	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Persentase kualitas prasarana pertanian yang memenuhi standart	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	1 Dokumen	7654088.53 juta	85,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
										Kab. Lumajang, Senduro, Ranupani					
3	2	7	3	2.0	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Persentase kualitas prasarana pertanian yang memenuhi standart	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	5 %	1 Laporan	7654088.53 juta	2,217,775,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
										Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan					
										Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan					
										Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan					
										Kab. Lumajang, Yosowilangun, Semua Kelurahan					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
3					Kab. Lumajang, Rowokangkung, Semua Kelurahan				6,020,000,000					
2					Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan									
3			2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian										
3	2	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Persentase kualitas prasarana pertanian yang memenuhi standart	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal	5 %	13 Unit	7654088.53 juta	2,400,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
									Kab. Lumajang, Yosowilangun, Darungan					
									Kab. Lumajang, Rowokangkung, Nogosari					
									Kab. Lumajang, Rowokangkung, Kedungrejo					
									Kab. Lumajang, Rowokangkung, Sumberanyar					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
								Kab. Lumajang, Tekung, Tukum						
								Kab. Lumajang, Pasrujambe, Sukorejo						
								Kab. Lumajang, Pasrujambe, Kertosari						
								Kab. Lumajang, Sukodono, Dawuhan Lor						
								Kab. Lumajang, Jatiroto, Rojopolo						
								Kab. Lumajang, Randuagung, Kalipenggun g						
								Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung						
								Kab. Lumajang, Sumpersuko, Mojosari						
3	2	3	2.0	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Persentase kualitas prasarana pertanian yang memenuhi standart	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro	5 %	15 Unit	7654088.53 juta	2,850,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal				Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik
					Kab. Lumajang, Pasirian, Condro				
					Kab. Lumajang, Kunir, Jatirejo				
					Kab. Lumajang, Kunir, Sukosari				
					Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Kalipepe				
					Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Sumbersari				
					Kab. Lumajang, Senduro, Pandansari				
					Kab. Lumajang, Senduro, Kandangtepu s				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
								Kab. Lumajang, Senduro, Kandangan						
								Kab. Lumajang, Senduro, Argosari						
								Kab. Lumajang, Senduro, Ranupani						
								Kab. Lumajang, Padang, Tanggung						
								Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon						
								Kab. Lumajang, Randuagung, Tunjung						
3	2	3	2.0	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Persentase kualitas prasarana pertanian yang memenuhi standart	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Klakah, Kebonan	5 %	1 Unit	7654088.53 juta	770,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
3	2	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER							1,261,395,900		
3	2	4	2.0		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota							382,671,900		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	2	4	2.0	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Laporan		382,671,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	4	2.0	3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota							472,724,000		
3	2	4	2.0	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan	90 %	1 Laporan	7654088.53 juta	472,724,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
									Kab. Lumajang, Senduro, Semua Kelurahan					
									Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan					
3	2	4	2.0	4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner							42,000,000		
3	2	4	2.0	1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	2 Laporan	7654088.53 juta	42,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
					Kelurahan									
3	2 7	4	2.0 5	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan					364,000,000					
3	2 7	4	2.0 5	1	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Nilai PDRB Sektor Pertanian		90 %	8 Laporan	7654088.53 juta	364,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2 7	5		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					100,000,000					
3	2 7	5	2.0 1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					100,000,000					
3	2 7	5	2.0 1	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	% pengurangan nilai kerugian	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Ha	7654088.53 juta	100,000,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
3	2 7	6		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					86,400,000					
3	2 7	6	2.0 1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					86,400,000					
3	2 7	6	2.0 1	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	7654088.53 juta	86,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2 7	7		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					2,171,690,200					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
3	2	7	7	2.0 1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								2,171,690,200			
3	2	7	7	2.0 1	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	72 Unit	7654088.53 juta	517,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
																Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
3	2	7	7	2.0 1	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	1100 Unit	7654088.53 juta	370,000,000	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
										Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan						
										Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan						
										Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
									Kab. Lumajang, Senduro, Semua Kelurahan					
									Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan					
									Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan					
									Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan					
3	2	7	2.0	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 %	4 Unit	7654088.53 juta	783,990,200	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
3	2	7	2.0	5	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	5 %	25 Unit	7654088.53 juta	500,000,000	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
									Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
					Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
TOTAL								34,765,493,945						
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	1 6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							8,027,570,546			
2	1 6	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,153,037,406			
2	1 6	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							14,115,000			
2	1 6	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		98 %	4 Dokumen	90 %	3,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 6	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		98 %	1 Dokumen	90 %	2,145,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 6	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		98 %	2 Dokumen	90 %	3,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 6	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		98 %	5 Laporan	90 %	2,145,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		98 %	24 Laporan	90 %	2,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,720,975,926		
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		98 %	25 Orang/bulan	90 %	2,649,127,926	
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		98 %	12 Dokumen	90 %	68,667,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		98 %	5 Laporan	90 %	1,639,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		98 %	18 Laporan	90 %	1,542,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							6,745,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	12 Laporan	90 %	6,745,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							61,594,000		
2	1	1	2.0	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	2 Paket	90 %	45,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	12 Dokumen	90 %	3,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	7 Orang	90 %	12,444,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah							413,499,479		
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	1 Paket	90 %	8,444,330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	6 Paket	90 %	77,718,366	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	2 Paket	90 %	28,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	2 Paket	90 %	5,008,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	12 Laporan	90 %	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	12 Laporan	90 %	287,988,783	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							156,354,384		
2	1	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		98 %	31 Unit	90 %	156,354,384	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							469,860,400		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		98 %	12 Laporan	90 %	2,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		98 %	12 Laporan	90 %	218,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		98 %	12 Laporan	90 %	248,600,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							309,893,217		
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		98 %	28 Unit	90 %	180,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		98 %	1 Unit	90 %	7,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		98 %	101 Unit	90 %	112,203,217	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		98 %	1 Unit	90 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							2,211,473,340		
2	1	2	2.0	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							2,211,473,340		
2	1	2	2.0	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase Informasi yang dipublikasikan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	3 Dokumen	90 %	73,948,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik				100 %				
2	1	2	2.0	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase Informasi yang dipublikasikan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	12 Dokumen	90 %	148,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik				100 %				
2	1	2	2.0	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi yang dipublikasikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	12 Dokumen	90 %	255,860,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase PPID yang telah memperbarui				100 %				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
						informasi publik								
2	1	2	2.0	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase Informasi yang dipublikasikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	12 Dokumen	90 %	138,982,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik				100 %				
2	1	2	2.0	6	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi yang dipublikasikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	4 Dokumen	90 %	99,630,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik				100 %				
2	1	2	2.0	7	Layanan Hubungan Media	Persentase Informasi yang dipublikasikan	Jumlah Layanan Hubungan Media	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	48 Layanan	90 %	991,536,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik				100 %				
2	1	2	2.0	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase Informasi yang dipublikasikan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	12 Dokumen	90 %	136,094,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik				100 %								
2	1 6	2	2.0 1	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Persentase Informasi yang dipublikasikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	48 Dokumen	90 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik				100 %								
2	1 6	2	2.0 1	1	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase Informasi yang dipublikasikan	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	118 Orang	90 %	32,592,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik				100 %								
2	1 6	2	2.0 1	1	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Persentase Informasi yang dipublikasikan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir		100 %	12 Dokumen	90 %	184,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik				100 %								
2	1 6	3			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							1,663,059,800		
2	1 6	3	2.0 1		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							389,279,400		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	1	3	2.0	1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase pengguna elektronik terpadu	PD sistem yang		100 %	1 Domain	100 %	100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	2.0	2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengguna elektronik terpadu	PD sistem yang		100 %	0 Dokumen	100 %	33,984,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				96 Dokumen				
2	1	3	2.0	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase pengguna elektronik terpadu	PD sistem yang		100 %	13 Unit	100 %	355,195,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	2.0	2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								1,273,780,400		
2	1	3	2.0	2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase pengguna elektronik terpadu	PD sistem yang		100 %	4 Dokumen	100 %	201,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	1	3	2.0	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Persentase pengguna elektronik terpadu	PD sistem yang		100 %	1 Unit	100 %	815,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	2.0	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase pengguna elektronik terpadu	PD sistem yang		100 %	5 Dokumen	100 %	18,892,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	2.0	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase pengguna elektronik terpadu	PD sistem yang		100 %	28 Perangkat Daerah	100 %	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	2.0	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.	Jumlah Aplikasi dan Proses Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Persentase pengguna elektronik terpadu	PD sistem yang		100 %	1 Unit	100 %	118,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Aplikasi dan Proses Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan					65 Website			
2	1	3	2.0	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Persentase pengguna elektronik terpadu	PD sistem yang		100 %	12 Layanan	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	1	3	2.0	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Persentase pengguna elektronik terpadu	PD sistem yang		100 %	4 Dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	2.0	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu.	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Persentase pengguna elektronik terpadu	PD sistem yang		100 %	10 Dokumen	100 %	12,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	2	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								196,625,000		
2	2	0	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								196,625,000		
2	2	0	2	2.0	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								196,625,000	
2	2	0	2	2.0	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase data yang terintegrasi		100 %	39 Dokumen	100 %	42,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	2	0	2	2.0	2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Persentase data yang terintegrasi		100 %	80 Orang	100 %	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	2	0	2	2.0	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Persentase data yang terintegrasi		100 %	32 Dokumen	100 %	2,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	2	2	2.0	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Persentase data yang statistik terintegrasi		100 %	40 Orang	100 %	1,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							77,099,500			
2	2	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							77,099,500			
2	2	2	2.0		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							64,477,000			
2	2	2	2.0	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		100 %	5 Perangkat Daerah	100 %	64,477,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	2	2	2.0		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota							12,622,500			
2	2	2	2.0	1	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		1 Peraturan	56 Perangkat Daerah	100 %	12,622,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
TOTAL												8,301,295,046			
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN															
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									11,260,880,717	
2	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									9,856,520,717	
2	1	1	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									10,100,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	2 Dokumen	4259412080 Rp	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	1 Dokumen	4259412080 Rp	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	5 Laporan	4259412080 Rp	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	8 Dokumen	4259412080 Rp	2,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,901,229,744		
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	88 Orang/bulan	189035108703 Rp	7,842,233,744	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	12 Dokumen	189035108703 Rp	51,996,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	12 Dokumen	189035108703 Rp	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							5,000,000		
2	1	1	2.0	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	1 Dokumen	189035108703 Rp	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	4 Laporan	189035108703 Rp	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	2 Laporan	189035108703 Rp	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							5,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Ketetapan Dokumen Retribusi Daerah	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	2 Dokumen	189035108703 Rp	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah							288,797,949		
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	1 Paket	189035108703 Rp	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	4 Paket	189035108703 Rp	84,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	2 Paket	189035108703 Rp	53,597,949	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	1 Paket	189035108703 Rp	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	90 Laporan	189035108703 Rp	141,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	1	1	2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								10,000,000		
2	1	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	4 Unit Usah	189035108703 Rp	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,381,603,024		
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	12 Laporan	189035108703 Rp	400,861,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	12 Laporan	189035108703 Rp	980,741,424	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								254,790,000		
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	73 Unit	189035108703 Rp	179,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	66 Unit	189035108703 Rp	50,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	100 %	1 Unit	189035108703 Rp	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	1 Unit	189035108703 Rp	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM							3,000,000		
2	1	2	2.0	1	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							3,000,000		
2	1	2	2.0	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Omset Koperasi Simpan Pinjam	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	10000000 juta	5 Unit Usaha	189035108703 Rp	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI							28,400,000		
2	1	3	2.0	1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota							28,400,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	3	2.0	1	Pengawasan Kesehatan, Ketangguhan, Akuntabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kesehatan, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	82 %	40 Koperasi	189035108703 Rp	23,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	2.0	2	Pemeriksaan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	82 %	40 Unit Usaha	189035108703 Rp	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI							37,560,000		
2	1	4	2.0	1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							37,560,000		
2	1	4	2.0	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	82 %	100 Unit Usaha	189035108703 Rp	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	4	2.0	2	Penghargaan Kesehatan Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang Sehat	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	82 %	4 Unit Usaha	189035108703 Rp	22,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							450,000,000		
2	1	5	2.0	1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota							450,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	5	2.0	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Pendidikan Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	86 %	250 Orang	189035108703 Rp	450,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
														DAK Non Fisik- PK2UMK
2	1	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							78,000,000		
2	1	6	2.0	1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota							78,000,000		
2	1	6	2.0	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Nilai PDRB sektor Koperasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	81 %	250 anggota atau pengurus koperasi	189035108703 Rp	78,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							197,400,000		
2	1	7	2.0	1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan							197,400,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	7	2.0	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Stadaisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kabupaten	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	76 %	220 Unit Usaha	1048991326079 2 Rp	197,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	7	8		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM							610,000,000		
2	1	7	2.0	1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil							610,000,000		
2	1	7	2.0	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase Perkembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	74 %	220 Unit Usaha	1048991326079 2 Rp	610,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	3	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							3,602,639,550		
3	3	0	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN							1,450,000		
3	3	0	2.0	6	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							1,450,000		
														DAK Non Fisik- PK2UMK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	3	2	2.0	3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Nilai PDRB sektor perdagangan	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwang an	90 %	3 Laporan	3.454887194442 Rp	1,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	3	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							3,117,800,000		
3	3	3	2.0	1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							2,272,800,000		
3	3	3	2.0	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai retribusi pelayanan pasar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwang an	8500000000 Rp	30 Unit	3454887194.442 Rp	687,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	3	3	2.0	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai retribusi pelayanan pasar	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwang an	8500000000 Rp	30 Unit	3454887194.442 Rp	1,585,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	3	3	2.0	2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya							845,000,000		
3	3	3	2.0	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai retribusi pelayanan pasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Nilai PDRB sektor perdagangan	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwang an	8500000000 Rp	12 Dokumen	3454887194442 Rp	845,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	3	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							39,800,000		
3	3	4	2.0	2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							9,800,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3	3	0	4	2.0 2	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Prosentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Nilai Pendapatan Per Kapita	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	84 %	12 Laporan	22279998.92 Rp	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	3	0	4	2.0 2	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Prosentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Nilai Pendapatan Per Kapita	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	84 %	4 Laporan	22279998.92 Rp	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	3	0	4	2.0 3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								30,000,000		
3	3	0	4	2.0 3	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Prosentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Nilai Pendapatan Per Kapita	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	84 %	4 Laporan	22279998.92 Rp	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	3	0	5		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								173,000,000		
3	3	0	5	2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								173,000,000		
3	3	0	5	2.0 1	2	Pameran Dagang Nasional	Nilai Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Nilai PDRB sektor perdagangan	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	10000000000000 Rp	35 Pelaku Usaha	3454887194442 Rp	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Nilai Perdagangan Antar Daerah					4161600000000h Rp			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	3	5	2.0	3	Pameran Dagang Lokal	Nilai Eksport	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Nilai PDRB sektor perdagangan	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	10000000000000 Rp	15 Pelaku Usaha	3454887194442 Rp	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	0		1			Nilai Perdagangan Antar Daerah				4161600000000h Rp				
3	3	5	2.0	4	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Nilai Eksport	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Nilai PDRB sektor perdagangan	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	10000000000000 Rp	1 Pelaku Usaha	3454887194442 Rp	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	0		1			Nilai Perdagangan Antar Daerah				4161600000000h Rp				
3	3	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							200,589,550		
3	3	6	2.0		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							200,589,550		
3	3	6	2.0	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Prosentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Nilai Pendapatan Per Kapita	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	84 %	12000 Unit	22279998.92 Rp	175,389,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	3	6	2.0	2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Prosentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Nilai Pendapatan Per Kapita	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	84 %	900 Orang	22279998.92 Rp	25,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	3	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							70,000,000		
3	3	7	2.0		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							70,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3	3	7	2.0	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Prosentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Nilai Pendapatan Per Kapita	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	4 %	150 UMKM	22279998.92 Rp	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3	3	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							3,862,700,000			
3	3	1	2		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							3,855,000,000			
3	3	1	2	2.0	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							3,855,000,000			
3	3	1	2	2.0	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Nilai produksi industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	1379000000000 Rp	1 Dokumen	4934785719830 Rp	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	3	1	2	2.0	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Nilai produksi industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	1379000000000 Rp	8 Dokumen	4934785719830 Rp	65,000,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
3	3	1	2	2.0	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Nilai produksi industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Nilai PDRB Sektor Industri	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	1379000000000 Rp	1 Dokumen	4934785719830 Rp	3,690,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
									Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
3	3	3		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							2,000,000		
3	3	3	2.0	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							2,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
3	3	1	3	2.0 1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Prosentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh IUI	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai PDRB Sektor Industri	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	90 %	4 Dokumen	4934785719830 Rp	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
3	3	1	4		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								5,700,000				
3	3	1	4	2.0 1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								5,700,000				
3	3	1	4	2.0 1	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Prosentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terkait SIINAS	Nilai PDRB Sektor Industri	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	66 %	2 kali	4934785719830 Rp	5,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
													TOTAL	18,726,220,267			
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	1	1													31,958,015,428		
2	1	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												19,224,452,597	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							11,607,000			
2	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		2 Dokumen		2,018,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		1 Dokumen		1,345,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		2 Dokumen		1,345,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		5 laporan		4,878,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		16 Laporan		2,018,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							17,750,716,346			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		271 Orang/bulan		17,676,788,896	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		5 Dokumen		54,528,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		12 Dokumen		13,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		12 Dokumen		1,682,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		6 Laporan		1,345,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		2 Dokumen		1,345,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0 2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		1 Dokumen		1,345,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah							280,980,323		
2	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		1 Paket		8,005,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		1 Paket		94,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		1 Paket		33,910,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		1 Paket		3,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		1 Laporan		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		2 Laporan		137,719,423	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							834,573,928		
2	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		12 Laporan		3,282,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		12 Laporan		335,497,528	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		12 Laporan		495,794,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							346,575,000		
2	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		92 Unit		301,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		66 Unit		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP							598,202,000			
2	1	2	2.0 1		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota							171,002,000			
2	1	2	2.0 1	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun		Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		2 Dokumen		171,002,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1	2	2.0 2		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota							427,200,000			
2	1	2	2.0 2	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun		Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan		3 Dokumen		320,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
									Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan						
									Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan						
2	1	2	2.0 2	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun		Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		106,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	1	3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					687,878,916				
2	1	3	2.0 1		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					545,378,916				
2	1	3	2.0 1	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Kab. Lumajang, Tempursari, Tempursari		1 Dokumen		97,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo					
									Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro					
									Kab. Lumajang, Candipuro, Sumberejo					
									Kab. Lumajang, Pasirian, Bago					
									Kab. Lumajang, Pasirian, Selok Awar - Awar					
									Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian					
									Kab. Lumajang, Tempeh, Lempeni					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
					Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah					
					Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor					
					Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Yosowilangu n Lor					
					Kab. Lumajang, Tekung, Tekung					
					Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwang an					
					Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan					
					Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n					
					Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Senduro, Senduro				
					Kab. Lumajang, Senduro, Argosari				
					Kab. Lumajang, Senduro, Ranupani				
					Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit				
					Kab. Lumajang, Padang, Kedawung				
					Kab. Lumajang, Padang, Padang				
					Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari				
					Kab. Lumajang, Sukodono, Selokbesuki				
					Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Kedungjajan g				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
					Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Wonorejo					
					Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto					
					Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung					
					Kab. Lumajang, Klakah, Ranupakis					
					Kab. Lumajang, Klakah, Klakah					
					Kab. Lumajang, Klakah, Mlawang					
					Kab. Lumajang, Ranuyoso, Ranubedali					
					Kab. Lumajang, Ranuyoso, Ranuyoso					
					Kab. Lumajang, Sumbersuko, Sumbersuko					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 1 3 2.0 1 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Sumberrip		1 Dokumen		125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Kidul					
					Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Lor					
					Kab. Lumajang, Tekung, Tukum					
					Kab. Lumajang, Tekung, Karangbendo					
					Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan					
					Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan					
					Kab. Lumajang, Senduro, Senduro					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
									Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung					
									Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul					
									Kab. Lumajang, Sumbersuko, Purwosono					
2	1	3	2.0	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo		3 Dokumen		323,118,916	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	2.0		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota							30,500,000		
2	1	3	2.0	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat		Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		1 Laporan		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	2.0	2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi		Kab. Lumajang, Tempursari, Tempursari		1 Lokasi		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo				
					Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro				
					Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian				
					Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng				
					Kab. Lumajang, Tekung, Tekung				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo				
					Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe				
					Kab. Lumajang, Senduro, Senduro				
					Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit				
					Kab. Lumajang, Padang, Padang				
					Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Kedungjajan g				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto				
					Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung				
					Kab. Lumajang, Klakah, Klakah				
					Kab. Lumajang, Ranuyoso, Ranuyoso				
					Kab. Lumajang, Sumbersuko, Sumbersuko				
2	1 1 3 2.0 2 3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		Kab. Lumajang, Tempursari, Tempursari		1 Titik		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo			13,000,000	
					Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro				
					Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Tempeh, Gesang				
					Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng				
					Kab. Lumajang, Tekung, Tekung				
					Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Senduro, Senduro				
					Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit				
					Kab. Lumajang, Padang, Padang				
					Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Kedungjajan g				
					Kab. Lumajang, Jatiroto, Rojopolo				
					Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto				
					Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung				
					Kab. Lumajang, Klakah, Klakah				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
2	1 1	3	2.0 3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					112,000,000				
2	1 1	3	2.0 3	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		Kab. Lumajang, Pasirian, Bades		1 Dokumen		112,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Kab. Lumajang, Pasirian						
							Kab. Lumajang, Kedungjajang, Grobogan						
2	1 1	4		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					2,130,361,225				
2	1 1	4	2.0 1	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					2,130,361,225				
2	1 1	4	2.0 1	2	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Senduro, Ranupani		400 Ha		18,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 1 1 4 2.0 1 4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Tempursari, Tempursari		12.89 Ha		2,111,371,225	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro					
					Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian					
					Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng					
					Kab. Lumajang, Tekung, Tekung					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe				
					Kab. Lumajang, Senduro, Senduro				
					Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit				
					Kab. Lumajang, Padang, Padang				
					Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Kedungjajan g				
					Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
					Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung							
					Kab. Lumajang, Klakah, Klakah							
					Kab. Lumajang, Ranuyoso, Ranuyoso							
					Kab. Lumajang, Sumpersuko, Sumpersuko							
2	1 1	5		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					58,400,000			
2	1 1	5	2.0 1	Penyimpanan sementara Limbah B3					58,400,000			
2	1 1	5	2.0 1	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	6 Dokumen		58,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
								Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan				
								Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Senduro, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Gucialit, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Klakah, Semua				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					Kelurahan						
					Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan						
					Kab. Lumajang, Sumpersuko, Semua Kelurahan						
2	1 1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					149,522,000		
2	1 1	6	2.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					149,522,000		
2	1 1	6	2.0 1	1	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			Kab. Lumajang, Tempursari, Tempursari	14 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo		62,948,000	
								Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro			
								Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
					Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng					
					Kab. Lumajang, Tekung, Tekung					
					Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe					
					Kab. Lumajang, Senduro, Senduro					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit				
					Kab. Lumajang, Padang, Padang				
					Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Kedungjajan g				
					Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto				
					Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung				
					Kab. Lumajang, Klakah, Klakah				
					Kab. Lumajang, Ranuyoso, Ranuyoso				
					Kab. Lumajang, Sumbersuko, Sumbersuko				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	6	2.0	2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup		Jumlah ASN yang Dilakukan Pelatihan peningkatan Kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD		Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		5 Orang		11,010,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	6	2.0	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		14 Laporan		68,854,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	6	2.0	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD		Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		14 Dokumen		6,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							187,550,000		
2	1	8	2.0		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							187,550,000		
2	1	8	2.0	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH		Kab. Lumajang, Tempeh, Pandanwangi		5 lembaga		45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									Kab. Lumajang, Lumajang, Labruk Lor					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
								Kab. Lumajang, Sukodono, Dawuhan Lor						
								Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Curahpetung						
								Kab. Lumajang, Randuagung, Buwek						
								Kab. Lumajang, Ranuyoso, Sumberpetu ng						
								Kab. Lumajang, Sumbersuko, Petahunan						
2	1	8	2.0	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		20 Dokumen		62,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
	1		1					Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan						
								Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Senduro, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Gucialit, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
2	1	8	2.0 1	3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		400 orang		80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo					
									Kab. Lumajang, Senduro, Senduro					
									Kab. Lumajang, Sukodono, Sumberejo					
									Kab. Lumajang, Jatiroto, Kaliboto Kidul					
									Kab. Lumajang, Sumpoko, Labruk Kidul					
									Kab. Lumajang, Sumpoko, Purwosono					
2	1 1	9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT							43,000,000		
2	1 1	9	2.0 1		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							43,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 1 1 9 2.0 1 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan		12 Entitas		43,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan					
					Kab. Lumajang, Tempeh, Pandanwangi					
					Kab. Lumajang, Yosowilangun, Semua Kelurahan					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Lumajang, Labruk Lor				
					Kab. Lumajang, Lumajang, Boreng				
					Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Senduro, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Gucialit, Semua Kelurahan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Sukodono, Dawuhan Lor				
					Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon				
					Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Curahpetung				
					Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
2	1 1	1 0												
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP									65,760,000					
2	1 1	1 0	2.0 1											
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota									65,760,000					
2	1 1	1 0	2.0 1	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani		Kab. Lumajang, Tempursari, Tempursari		1 dokumen		63,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
								Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo						
								Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro						
								Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian						
								Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan						
								Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng				
					Kab. Lumajang, Tekung, Tekung				
					Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe				
					Kab. Lumajang, Senduro, Senduro				
					Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit				
					Kab. Lumajang, Padang, Padang				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Kedungjajan g				
					Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto				
					Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung				
					Kab. Lumajang, Klakah, Klakah				
					Kab. Lumajang, Ranuyoso, Ranuyoso				
					Kab. Lumajang, Sumbersuko, Sumbersuko				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja									
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
2	1	1	2.0	1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan			Kab. Lumajang, Tempursari, Tempursari		1 dokumen		2,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
										Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo					
										Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro					
										Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian					
										Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan					
										Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan					
										Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Semua Kelurahan					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng				
					Kab. Lumajang, Tekung, Tekung				
					Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe				
					Kab. Lumajang, Senduro, Senduro				
					Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit				
					Kab. Lumajang, Padang, Padang				
					Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					Kab. Lumajang, Kedungjajang, Kedungjajang						
					Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto						
					Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung						
					Kab. Lumajang, Klakah, Klakah						
					Kab. Lumajang, Ranuyoso, Ranuyoso						
					Kab. Lumajang, Sumpalsari, Sumpalsari						
2	1 1	1 1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					8,812,888,690	
2	1 1	1 1	2.0 1		Pengelolaan Sampah					8,725,288,690	
2	1 1	1 1	2.0 1	2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	12 Laporan	29,182,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
2	1	1	2.0	1	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan		104697 Ton		3,797,346,190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
										Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan					
										Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan					
										Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan					
										Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan					
										Kab. Lumajang, Yosowilangun, Semua Kelurahan					
										Kab. Lumajang, Rowokangkung, Semua Kelurahan					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Senduro, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Gucialit, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
								Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Semua Kelurahan						
								Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan						
								Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan						
								Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan						
								Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan						
								Kab. Lumajang, Sumbersuko, Semua Kelurahan						
2	1	1	2.0	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		Kab. Lumajang, Tempursari, Tegalrejo		32 Kelompok		213,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Tempursari, Bulurejo				
					Kab. Lumajang, Tempursari, Purorejo				
					Kab. Lumajang, Tempursari, Tempurejo				
					Kab. Lumajang, Tempursari, Tempursari				
					Kab. Lumajang, Tempursari, Pundungsari				
					Kab. Lumajang, Tempursari, Kaliuling				
					Kab. Lumajang, Pronojiwo, Sidomulyo				
					Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo				
					Kab. Lumajang, Pronojiwo, Tamanayu				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Pronojiwo, Sumberurip				
					Kab. Lumajang, Pronojiwo, Oro-oro Ombo				
					Kab. Lumajang, Pronojiwo, Supiturang				
					Kab. Lumajang, Candipuro, Jugosari				
					Kab. Lumajang, Candipuro, Jarit				
					Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro				
					Kab. Lumajang, Candipuro, Sumberejo				
					Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal				
					Kab. Lumajang, Candipuro, Tambahrejo				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Candipuro, Klopo Sawit				
					Kab. Lumajang, Candipuro, Tumpeng				
					Kab. Lumajang, Pasirian, Gondoruso				
					Kab. Lumajang, Pasirian, Kalibendo				
					Kab. Lumajang, Pasirian, Bades				
					Kab. Lumajang, Pasirian, Bago				
					Kab. Lumajang, Pasirian, Selok Awar - Awar				
					Kab. Lumajang, Pasirian, Madurejo				
					Kab. Lumajang, Pasirian, Sememu				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Pasirian, Nguter				
					Kab. Lumajang, Pasirian, Selokanyar				
					Kab. Lumajang, Tempeh, Pandanwangi				
					Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Kidul				
					Kab. Lumajang, Tempeh, Lempeni				
					Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah				
					Kab. Lumajang, Tempeh, Kaliwungu				
					Kab. Lumajang, Tempeh, Besuk				
					Kab. Lumajang, Tempeh, Jatisari				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
					Kab. Lumajang, Tempeh, Pulo					
					Kab. Lumajang, Kunir, Dorogowok					
					Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Darungan					
					Kab. Lumajang, Yosowilangu n, Kalipepe					
					Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Sumpersari					
					Kab. Lumajang, Tekung, Wonogriyo					
					Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan					
					Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo					
					Kab. Lumajang, Lumajang, Blukon					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Senduro, Sarikemunin g				
					Kab. Lumajang, Senduro, Kandangan				
					Kab. Lumajang, Senduro, Bedayu				
					Kab. Lumajang, Senduro, Wonocepoko ayu				
					Kab. Lumajang, Gucialit, Tunjung				
					Kab. Lumajang, Gucialit, Sombo				
					Kab. Lumajang, Padang, Kalisemut				
					Kab. Lumajang, Padang, Merakan				
					Kab. Lumajang, Sukodono, Dawuhan Lor				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Sukodono, Uranggantun g				
					Kab. Lumajang, Sukodono, Bondoyudo				
					Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Sawaran Kulon				
					Kab. Lumajang, Jatiroto, Sukosari				
					Kab. Lumajang, Randuagung, Kalipenggun g				
					Kab. Lumajang, Randuagung, Buwek				
					Kab. Lumajang, Klakah, Mlawang				
					Kab. Lumajang, Klakah, Sruni				
					Kab. Lumajang, Ranuyoso, Jenggong				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
					Kab. Lumajang, Ranuyoso, Alun-alun								
					Kab. Lumajang, Sumpalsari, Sentul								
2	1 1	1 1	2.0 1	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		Kab. Lumajang, Candipuro, Jarit	41 Unit		4,685,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
					Kab. Lumajang, Candipuro, Sumber Mujur								
					Kab. Lumajang, Pasirian, Bades								
					Kab. Lumajang, Kunir, Semua Kelurahan								
					Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Lor								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Pasrujambe, Jambekumbu				
					Kab. Lumajang, Senduro, Semua Kelurahan				
					Kab. Lumajang, Senduro, Senduro				
					Kab. Lumajang, Senduro, Burno				
					Kab. Lumajang, Senduro, Kandangtepu s				
					Kab. Lumajang, Senduro, Kandangan				
					Kab. Lumajang, Senduro, Wonocepoko ayu				
					Kab. Lumajang, Senduro, Argosari				
					Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung						
					Kab. Lumajang, Ranuyoso, Ranuyoso						
					Kab. Lumajang, Sumpersuko, Labruk Kidul						
2	1 1	1 1	2.0 3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta					87,600,000		
2	1 1	1 1	2.0 3	2	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja			2 Unit	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 1	1 1	2.0 3	3	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota			2 Laporan	75,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									31,958,015,428		
DINAS PARIWISATA											
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3	2 6			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						14,826,624,604	
3	2 6	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,366,898,146	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	2	1	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								15,289,500	
3	2	6	1	2.0	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	3 Dokumen	3,314,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Jenis			
3	2	6	1	2.0	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	2 Dokumen	3,040,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3	2	6	1	2.0	1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	1 Dokumen	1,593,500		
3	2	6	1	2.0	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	7 Laporan	4,203,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3	2	6	1	2.0	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	10 Laporan	3,137,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	2	1	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,378,040,721				
3	2	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo		32 Orang/bulan		3,309,202,721	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo		3 Dokumen		63,606,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo		1 Dokumen		1,976,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo		1 Dokumen		2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo		1 Dokumen		756	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3,000,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	2	1	2.0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Wonorejo		1 Laporan		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah							263,004,875		
3	2	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Wonorejo		11 Paket		13,314,296	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Wonorejo		3 Paket		72,101,195	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Wonorejo		9 Paket		24,553,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	7	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Wonorejo		2 Paket		1,545,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Wonorejo		2 Laporan		151,491,084	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							6,654,450		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	2	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Wonorejo		1 Unit		6,654,450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,290,758,600		
3	2	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Wonorejo		2 Laporan		555	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan		468,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Wonorejo		137 Orang/bul an		821,403,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							410,150,000		
3	2	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Wonorejo		33 Unit		185,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	2	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Wonorejo		36 Unit		25,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA							4,982,765,458		
3	2	2	2.0	1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							174,200,000		
3	2	2	2.0	2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Wonorejo		2 Dokumen		100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	2	2.0	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Wonorejo		49 DTW		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	2	2.0	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Wonorejo		1 Dokumen		64,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
3	2	2	2.0	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota							64,200,000			
3	2	2	2.0	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Wonorejo		1 Dokumen		64,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	2	2.0	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							4,713,965,458			
3	2	2	2.0	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara					1 Unit	4,067,250,458	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	2	2.0	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Wonorejo		1 Dokumen		45,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	2	2.0	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Wonorejo		4 Laporan		585,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
3	2 6	2	2.0 3	7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Senduro, Ranupani		3 Lokasi		15,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
3	2 6	2	2.0 4		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						30,400,000			
3	2 6	2	2.0 4	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo		225 Laporan		30,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2 6	3			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						1,294,629,000			
3	2 6	3	2.0 1		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						1,294,629,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	2	3	2.0	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo		2 Dokumen		95,589,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	3	2.0	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo		1 Laporan		849,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	3	2.0	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo		6 Dokumen		277,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	3	2.0	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo		2 Dokumen		69,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	3	2.0	5	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo		3 Dokumen		2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	4			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							632,764,500		
3	2	4	2.0	1	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota							599,264,500		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	2	4	2.0	1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif		Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo		2 Unit		599,264,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	4	2.0	2	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif							33,500,000		
3	2	4	2.0	7	Fasilitasi Kekayaan Intelektual		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 Dokumen		33,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	5			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF							2,549,567,500		
3	2	5	2.0	1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar							2,485,967,500		
3	2	5	2.0	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo		40 Orang		85,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	5	2.0	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo		200 Orang		1,167,067,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3 2 5 2.0 1 3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo		40 Orang		60,700,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
3 2 5 2.0 1 5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		Kab. Lumajang, Tekung, Karangbendo		1 Laporan		781,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3 2 5 2.0 1 6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo		500 Orang		356,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3 2 5 2.0 1 7	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Kab. Lumajang, Senduro, Senduro		1 Dokumen		35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3 2 5 2.0 2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif							63,600,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
3	2	5	2.0	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo		60 Orang		63,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
TOTAL												14,826,624,604						
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG																		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	3													57,870,140,162				
1	3	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												13,221,295,162			
1	3	1	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												24,770,000	
1	3	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	3 Dokumen	81.5 %	6,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
1	3	1	2.0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	4 Dokumen	81.5 %	3,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
1	3	1	2.0	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Dokumen	81.5 %	3,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	3	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	4 Dokumen	81.5 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Dokumen	81.5 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Laporan	81.5 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	4 Laporan	81.5 %	3,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,634,139,362		
1	3	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	86 Orang/Bulan	81.5 %	7,501,299,362	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	3	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	12 Dokumen	81.5 %	126,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Laporan	81.5 %	4,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Dokumen	81.5 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							763,189,000		
1	3	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Dokumen	81.5 %	2,293,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	750 Dokumen	81.5 %	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 3	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	4 Laporan	81.5 %	7,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						perkantoran								
1	3	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Laporan	81.5 %	3,456,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								370,320,000	
1	3	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	61 Paket	81.5 %	54,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Dokumen	81.5 %	1,496,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 5	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Dokumen	81.5 %	4,324,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	22 Orang	81.5 %	310,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	3	1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah							714,451,000			
1	3	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Paket	81.5 %	23,854,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	4 Paket	81.5 %	239,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	3 Paket	81.5 %	103,858,125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Dokumen	81.5 %	6,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Paket	81.5 %	4,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	6 Laporan	81.5 %	9,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	3	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	24 Laporan	81.5 %	326,808,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							1,114,499,800		
1	3	1	2.0 7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	3 Unit	81.5 %	540,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	259 Unit	81.5 %	574,499,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,599,926,000		
1	3	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	2 Laporan	81.5 %	996	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	46 Laporan	81.5 %	285,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	4 Laporan	81.5 %	1,313,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,000,000,000		
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	77 Unit	81.5 %	383,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Unit	81.5 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	143 Unit	81.5 %	280,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Unit	81.5 %	236,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							6,950,000,000		
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							1,250,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	3	2	2.0 1	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Presentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Candipuro, Sumber Mujur	70 %	1 Unit	81.5 %	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	2	2.0 1	4 5	Revitalisasi Danau	Presentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Senduro, Ranupani	70 %	1 Unit	81.5 %	750,000,000	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
1	3	2	2.0 2		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							5,700,000,000		
1	3	2	2.0 2	1 4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Presentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Randuagung, Semua Kelurahan	70 %	0.21 km	81.5 %	400,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	2	2.0 2	2 1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Presentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	13.253 km	81.5 %	5,100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	2	2.0 2	2 7	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Presentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Indeks Kinerja Irigasi	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	7 Unit	81.5 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG							11,945,600,000		
1	3	8	2.0 1		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung							11,945,600,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	3	8	2.0 1	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketersediaan gedung/bangunan Pemerintah di wilayah daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang	Kab. Lumajang, Tempeh, Semua Kelurahan	53 %	2 Dokumen	70 %	11,945,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan					
									Kab. Lumajang, Klakah, Kebonan					
1	3	1 0			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							23,539,863,000		
1	3	1 0 1	2.0 1		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota							23,539,863,000		
1	3	1 0	2.0 1	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	prosentase jumlah jembatan yang terpelihara	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Prosentase Panjang Jalan kondisi Mantap	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.56 %	249 Dokumen	89.5 %	390,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						prosentase panjang jalan yang terpelihara				89.5 %				
1	3	1 0	2.0 1	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	prosentase jumlah jembatan yang terpelihara	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Prosentase Panjang Jalan kondisi Mantap	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	92.56 %	491 M ²	89.5 %	49,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
						prosentase panjang jalan yang terpelihara				Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan	89.5 %				
1	3	10	2.01	3	Pengelolaan Leger Jalan	prosentase jumlah jembatan yang terpelihara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Prosentase Panjang Jalan kondisi Mantap	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.56 %	50 Dokumen	89.5 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						prosentase panjang jalan yang terpelihara				89.5 %					
1	3	10	2.01	4	Survey Jalan/Jembatan Kondisi	prosentase jumlah jembatan yang terpelihara	jumlah data dan informasi terkait jalan/jembatan kondisi	Prosentase Panjang Jalan kondisi Mantap	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.56 %	2 Dokumen	89.5 %	600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						prosentase panjang jalan yang terpelihara				89.5 %					
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	prosentase jumlah jembatan yang terpelihara	Panjang Jalan yang Dibangun	Prosentase Panjang Jalan kondisi Mantap	Kab. Lumajang, Tempursari, Bulurejo	92.56 %	1.82 KM	89.5 %	1,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						prosentase panjang jalan yang terpelihara				89.5 %					
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	prosentase jumlah jembatan yang terpelihara	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	Prosentase Panjang Jalan kondisi Mantap	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.56 %	3.08 KM	89.5 %	4,663,908,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						prosentase panjang jalan yang terpelihara				89.5 %				
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	prosentase jumlah jembatan yang terpelihara	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Prosentase Panjang Jalan kondisi Mantap	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.56 %	1.37 KM	89.5 %	2,200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						prosentase panjang jalan yang terpelihara				89.5 %				
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	prosentase jumlah jembatan yang terpelihara	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Prosentase Panjang Jalan kondisi Mantap	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.56 %	56.18 KM	89.5 %	9,979,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						prosentase panjang jalan yang terpelihara				89.5 %				
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	prosentase jumlah jembatan yang terpelihara	Panjang Jembatan yang Dibangun	Prosentase Panjang Jalan kondisi Mantap	Kab. Lumajang, Pasirian, Bades	92.56 %	11 M	89.5 %	2,857,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						prosentase panjang jalan yang terpelihara			Kab. Lumajang, Pasrujambe, Karanganom	89.5 %				
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	prosentase jumlah jembatan yang terpelihara	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Prosentase Panjang Jalan kondisi Mantap	Kab. Lumajang, Sukodono, Kebonagung	92.56 %	13 M	89.5 %	1,200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
					prosentase panjang jalan yang terpelihara				Kab. Lumajang, Kedungjajang, Bence	89.5 %				
1	3	1	2.0	2	Pemeliharaan Berkala Jembatan	prosentase jumlah jembatan yang terpelihara	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Prosentase Panjang Jalan kondisi Mantap	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	92.56 %	10 M	89.5 %	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					prosentase panjang jalan yang terpelihara					89.5 %				
1	3	1			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							496,200,000		
1	3	1	2.0		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi							275,600,000		
1	3	1	2.0	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase penyelenggaraan pelatihan sertifikat keterampilan (SKT)	Jumlah Tenaga Kerja Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Prosentase Panjang Jalan kondisi Mantap	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	60 %	150 Orang	89.5 %	150,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0	7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Persentase penyelenggaraan pelatihan sertifikat keterampilan (SKT)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Prosentase Panjang Jalan kondisi Mantap	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	60 %	75 Orang	89.5 %	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2.0		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							220,600,000		
1	3	1	2.0	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase penyelenggaraan pelatihan sertifikat keterampilan (SKT)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Prosentase Panjang Jalan kondisi Mantap	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	60 %	1 Laporan	89.5 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	3	1	2.0	7	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Persentase penyelenggaraan pelatihan sertifikat keterampilan (SKT)	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Prosentase Panjang Jalan kondisi Mantap	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	60 %	5 Dokumen	89.5 %	200,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							1,717,182,000		
1	3	1	2.0	1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota							1,500,000,000		
1	3	1	2.0	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Prosentase Luas Wilayah Pemanfaatan sesuai tata ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Prosentase cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	17.3 %	12 Dokumen	70 %	1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan					
									Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan					
									Kab. Lumajang, Gucialit, Semua Kelurahan					
									Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1 3 1 2 2.0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota								217,182,000	
1 3 1 2 2.0 3 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Presentase Luas Wilayah Pemanfaatan sesuai tata ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Presentase cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	17.3 %	3 Dokumen	70 %	114,512,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 3 1 2 2.0 3 2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Presentase Luas Wilayah Pemanfaatan sesuai tata ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Presentase cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	17.3 %	1 Dokumen	70 %	102,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 1 0	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								250,000,000	
2 1 0 6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								250,000,000	
2 1 0 6 2.0 1	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								250,000,000	
2 1 0 6 2.0 1 1	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Presentase Luas Tanah yang di Redistribusikan	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Indeks tertib administrasi pertanahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan	6 %	2 Dokumen	49 %	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
					Kab. Lumajang, Senduro, Semua Kelurahan						
TOTAL									58,120,140,162		
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	1 3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					7,620,974,743	
2	1 3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,197,409,836	
2	1 3	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					12,630,500	
2	1 3	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	5,808,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 3	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4 Dokumen	3,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 3	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	2,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan		1,232,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,112,164,596		
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan		2,062,902,596	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen		47,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen		396	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan		396	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen		450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD				12 Laporan		420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen		560	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							458		
2	1	1	2.0	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan		458	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							575		
2	1	1	2.0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen		575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah							167,503,800		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	1	3	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		3,081,711	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket		61,273,013	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		28,749,076	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan		74,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							25,864,900		
2	1	3	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit		25,864,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							2,695,893,840		
2	1	3	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan		91,902,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				96 Laporan		2,603,871,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							182,319,200		
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit		151,219,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			24 Unit				
2	1	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit		31,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA							41,700,000		
2	1	3	2.0	1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa							41,700,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	3	2.0	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				5 Dokumen		13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	2.0	2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen		24,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	2.0	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen		3,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	4		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								1,228,372,90	
2	1	3	4	2.0	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								1,228,372,90	
2	1	3	4	2.0	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				8 Dokumen		70,710,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				198 Dokumen			
2	1	3	4	2.0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				198 Dokumen		75,219,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	4	2.0	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				2 Dokumen		26,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	4	2.0	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				13 Laporan		203,041,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	4	2.0	1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				205 Dokumen		11,205,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	4	2.0	1	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa				14 Dokumen		638,302,407	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	4	2.0	1	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				1 Dokumen		750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	4	2.0	1	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				5 Desa		202,495,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							1,153,492,000		
2	1	5	2.0		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							1,153,492,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	1	3	5	2.0 1	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				9 Dokumen		72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	5	2.0 1	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				4 Dokumen		260,867,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	5	2.0 1	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				20 Laporan		38,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3	5	2.0 1	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa				9 Dokumen		25,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2 1 3 5 2.0 1 9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				227 Dokumen		756,895,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									7,620,974,743	

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
2			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	1 9 1 2.0 1 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	2 Dokumen	54.6 %	2,147,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 9 1 2.0 1 2	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	1 Dokumen	54.6 %	2,147,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	1 Dokumen	54.6 %	2,147,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	5 Laporan	54.6 %	2,147,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	12 Laporan	54.6 %	2,147,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,662,198,161		
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	22 Orang	54.6 %	2,619,966,161	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemuda dan atlet berprestasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	12 Dokumen	54.6 %	36,732,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	12 Dokumen	54.6 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	5 Laporan	54.6 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	2 Dokumen	54.6 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	18 Laporan	54.6 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2,500,000		
2	1	1	2.0	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	2 Dokumen	54.6 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	12 Laporan	54.6 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							1,500,000		
2	1	1	2.0	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	12 Laporan	54.6 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah							200,996,500		
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemuda dan atlet berprestasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	5 Paket	54.6 %	50,036,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	2 Paket	54.6 %	11,430,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemuda dan atlet berprestasi	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	6 Laporan	54.6 %	4,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	50 Laporan	54.6 %	134,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							10,000,000		
2	1	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	1 Unit	54.6 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							477,058,812		
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	12 Laporan	54.6 %	281,484,012	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	60 Laporan	54.6 %	195,574,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							181,275,000		
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	19 Unit	54.6 %	133,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	58 Unit	54.6 %	40,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		100 %	1 Unit	54.6 %	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							966,906,205		
2	1	2	2.0	1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							861,256,205		
2	1	2	2.0	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Persentase pemuda berprestasi	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		55,6 %	5 Orang	54.6 %	16,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan				100 %				
2	1	2	2.0	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula	Persentase pemuda berprestasi	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		55,6 %	25 Orang	54.6 %	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan				100 %								
2	1 9	2	2.0 1	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda berprestasi	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		55,6 %	50 Orang	54.6 %	47,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan					100 %				
2	1 9	2	2.0 1	5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pemuda berprestasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi rencana aksi daerah / RAD Tingkat kab / Kota	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		55,6 %	1 Dokumen	54.6 %	14,117,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah implementasi RAD				100 %	1 Aktifitas			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	1	9	2	2.0 1	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Persentase pemuda berprestasi	Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan kab / Kota dari seluruh kecamatan	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		55,6 %	31 Orang	54.6 %	59,759,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan				100 %				
2	1	9	2	2.0 1	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Persentase pemuda berprestasi	Jumlah Paskibraka yang diberikan pelatihan	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		55,6 %	74 Orang	54.6 %	715,055,205	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Jumlah pemuda Kab / Kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera			100 %	500 Orang			
2	1	9	2	2.0 2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							105,650,000			
2	1	9	2	2.0 2	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Persentase pemuda berprestasi	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		55,6 %	2 Dokumen	54.6 %	105,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Persentase peningkatan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan				100 %				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	1	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					5,273,024,100					
2	1	3	2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					1,001,024,100					
2	1	3	2.0 1	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Persentase atlet berprestasi	Jumlah sarana dan prasarana olahraga Kab/Kota yang tersedia dan dimanfaatkan	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		54,5 %	5 Unit	54.6 %	1,001,024,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				100 %				
2	1	3	2.0 4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					4,061,200,000					
2	1	3	2.0 4	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Persentase atlet berprestasi	Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		54.5 %	1 Dokumen	54.6 %	4,061,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				100 %				
2	1	3	2.0 5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					210,800,000					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
2	1 9	3	2.0 5	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Persentase atlet berprestasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	Persentase pemuda dan atlet berprestasi		54.5 %	1 Dokumen	54.6 %	190,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				100 %				
2	1 9	3	2.0 5	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Persentase atlet berprestasi	Jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai	Persentase pemuda dan atlet berprestasi	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	54.5 %	5 Paket	54.6 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan				100 %				
2	1 9	4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN							2,000,000,000		
2	1 9	4	2.0 1		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan							2,000,000,000		
2	1 9	4	2.0 1	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase fasilitasi dalam peningkatan pengembangan kapasitas kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase pemuda dan atlet berprestasi	Kab. Lumajang, Senduro, Kandangtepu s	100 %	1 Laporan	54.6 %	2,000,000,000	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
TOTAL												11,786,193,778		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	1 8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5,377,885,126				
2	1 8	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,837,660,126				
2	1 8	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					14,041,000				
2	1 8	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen	87.5 Indeks	4,577,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 8	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	87.5 Indeks	4,371,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 8	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	87.5 Indeks	1,091,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 8	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Laporan	87.5 Indeks	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	16 Laporan	87.5 Indeks	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,215,307,248		
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Orang/bulan	87.5 Indeks	2,163,056,248	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	87.5 Indeks	48,251,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Laporan	87.5 Indeks	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	18 Laporan	87.5 Indeks	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							3,500,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	87.5 Indeks	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	87.5 Indeks	2,000,000	
2	1	1	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							31,100,000		
2	1	1	2.0	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Paket	87.5 Indeks	31,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah							320,304,810		
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	87.5 Indeks	7,576,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	87.5 Indeks	163,921,390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	87.5 Indeks	14,694,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	48 Dokumen	87.5 Indeks	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	87.5 Indeks	12,207,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	87.5 Indeks	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	14 Laporan	87.5 Indeks	112,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							571,991,576		
2	1	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	90 Unit	87.5 Indeks	541,991,576	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	87.5 Indeks	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							502,295,291		
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	87.5 Indeks	1,002,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	24 Laporan	87.5 Indeks	291,773,991	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	84 Laporan	87.5 Indeks	209,518,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							179,120,201		
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Unit	87.5 Indeks	111,970,201	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	60 Unit	87.5 Indeks	37,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	87.5 Indeks	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL							196,586,000		
2	1	2	2.0	1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							41,000,000		
2	1	2	2.0	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Nilai Investasi PMA	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Persen	1 Dokumen	2305.4 Juta	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2	2.0	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	Nilai Investasi PMA	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Persen	1 Kegiatan Usaha	2305.4 Juta	31,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2	2.0	2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							155,586,000		
2	1	2	2.0	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Nilai Investasi PMA	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15 Persen	4 Dokumen	2305.4 Juta	155,586,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL							424,474,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
8														
2	1 8	3	2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						424,474,000				
2	1 8	3	2.0 1	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Nilai Investasi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai Investasi PMA	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	201756.6 Juta	1 Dokumen	2305.4 Juta	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 8	3	2.0 1	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Investasi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Nilai Investasi PMA	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	201756.6 Juta	2 Dokumen	2305.4 Juta	414,474,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 8	4		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								379,027,000		
2	1 8	4	2.0 1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota								379,027,000		
2	1 8	4	2.0 1	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Persen	3000 Pelaku Usaha	87.5 Indeks	353,317,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 8	4	2.0 1	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Persen	90 Orang	87.5 Indeks	13,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	4	2.0	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 Persen	2 Kegiatan Usaha	87.5 Indeks	12,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							405,578,000		
2	1	5	2.0		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							405,578,000		
2	1	5	2.0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi PMDN	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Persen	250 Pelaku Usaha	199451.2 Juta	271,883,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	5	2.0	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase tingkat kepatuhan pelaporan pada aplikasi LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Nilai Investasi PMDN	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 Persen	150 Kegiatan Usaha	199451.2 Juta	133,695,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							134,560,000		
2	1	6	2.0		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							134,560,000		
2	1	6	2.0	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Jenis Layanan Perizinan Yang Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan penanaman modal	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 Persen	4 Dokumen	87.5 Indeks	134,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
TOTAL								5,377,885,126						
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN														
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	1								653,432,414,433					
1	1	1							393,700,310,898					
1	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					7,631,500				
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	5 Laporan	100 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	20 Laporan	100 Persen	1,631,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							390,732,423,353		
1	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	3000 Orang/bulan	100 Persen	390,540,581,328	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	186,954,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	6 Laporan	100 Persen	2,888,025	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	1	1	2.0 2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							72,200,500		
1	1	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	1	2.0 3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	49,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	13,700,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							373,783,839		
1	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	7,919,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	187,417,719	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	1 Paket	100 Persen	20,335,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	80,112,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							77,000,000		
1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase fasilitas pengadaan BMD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	11 Unit	100 Persen	77,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,034,562,406		
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	482,838,806	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	1,551,723,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								402,709,300		
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Roda 2	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	230 Unit	100 Persen	191,609,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Roda 4				4 Unit			
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	2 Unit	100 Persen	61,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	100 Persen	1 Unit	100 Persen	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN								259,725,103,535		
1	1	2	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar								138,914,701,757		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
1	1	2	2.0 1	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	3 Ruang	100 Persen	257,382,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen				
1	1	2	2.0 1	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	1 Ruang	100 Persen	223,411,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen								
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen								
1	1	2	2.0 1	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	3 Unit	100 Persen	174,980,400	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama					80 Persen				
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD					93 Persen				
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar					99 Persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
1	1	2	2.0 1	8	Rehabilitasi Ruang Kelas Sedang/Berat	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	11 Ruang	100 Persen	2,926,286,380	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen				
1	1	2	2.0 1	9	Rehabilitasi Ruang Sekolah/TU Sedang/Berat Guru/Kepala	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	3 Ruang	100 Persen	220,337,300	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen									
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen									
1	1	2	2.0	1	0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	1 Ruang	100 Persen	51,476,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama					80 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD					93 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar					99 Persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
1	1	2	2.0 1	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	3 Ruang	100 Persen	272,447,400	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen				
1	1	2	2.0 1	1 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	4 Unit	100 Persen	227,166,648	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen								
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen								
1	1	2	2.0 1	1 4	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	1 Paket	100 Persen	158,209,632	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	1	2	2.0 1	1 6	Pengadaan Sekolah	Perlengkapan Sekolah	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	1 Paket	100 Persen	1,050,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
							Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				
							Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen				
							Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen				
1	1	2	2.0 1	1 7	Pengadaan Siswa	Perlengkapan	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Peserta Didik yang Tersedia	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	2 Unit	100 Persen	4,276,294,966	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen									
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen									
1	1	2	2.0	2	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	526 Satuan Pendidikan	100 Persen	48,933,689	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama					80 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD					93 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar					99 Persen				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	1	2	2.0 1	2 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap dan Melaksanakan Rekomendasi	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	20 Satuan Pendidikan	100 Persen	24,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen					
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen					
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen					
1	1	2	2.0 1	2 5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Siswa yang Mengikuti Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	276 Peserta Didik	100 Persen	421,977,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen								
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen								
1	1	2	2.0	2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	120 Orang	100 Persen	37,552,038,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama					80 Persen			Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD					93 Persen				
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar					99 Persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan		
1	1	2	2.0 1	2 8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	526 Satuan Pendidikan	100 Persen	555,780,732	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen						
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD					93 Persen					
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar					99 Persen					
1	1	2	2.0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	526 Satuan Pendidikan	100 Persen	88,618,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama					80 Persen					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen				Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen								
1	1	2	2.0	3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	526 Orang	100 Persen	145,836,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama					80 Persen				
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD					93 Persen				
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar					99 Persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	
1	1	2	2.0 1	3 1	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Persentase yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	7 Ruang	100 Persen	1,708,819,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	
				Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama						80 Persen					
				Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD						93 Persen					
				Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar						99 Persen					
1	1	2	2.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							73,422,829,331			
1	1	2	2.0 2	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	1 Ruang	100 Persen	162,939,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen							
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen							
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen							
1	1	2	2.0 2	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	95.5 Persen	2 Ruang	100 Persen	440,844,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama					80 Persen		
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD					93 Persen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar					99 Persen				
1	1	2	2.0 2	6	Pembangunan Laboratorium	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	3 Ruang	100 Persen	1,282,652,999	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen					
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen					
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen					
1	1	2	2.0 2	1 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	1 Unit	100 Persen	94,350,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen								
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen								
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen								
1	1	2	2.0	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	10 Ruang	100 Persen	3,580,831,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar					99 Persen				
1	1	2	2.0 2	1 5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	1 Ruang	100 Persen	194,250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen					
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen					
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen					
1	1	2	2.0 2	1 6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	1 Ruang	100 Persen	39,371,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen								
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen								
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen								
1	1	2	2.0	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	2 Ruang	100 Persen	299,700,001	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama					80 Persen				
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD					93 Persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar					99 Persen				
1	1	2	2.0 2	1 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	3 Ruang	100 Persen	638,250,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen					
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen					
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen					
1	1	2	2.0 2	2 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	4 Unit	100 Persen	229,678,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen					
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen					
1	1	2	2.0 2	2 5	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	6 Paket	100 Persen	303,696,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen					
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen				
1	1	2	2.0 2	2 8	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	2 Paket	100 Persen	5,733,415,626	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen				
1	1	2	2.0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	28000 Peserta Didik	100 Persen	42,933,689	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen								
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen								
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen								
1	1	2	2.0	3	7	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	20 Satuan Pendidikan	100 Persen	19,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar					99 Persen				
1	1	2	2.0 2	3 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Siswa yang Mengikuti Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	250 Peserta Didik	100 Persen	686,876,315	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen					
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen					
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen					
1	1	2	2.0 2	4 0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	125 Orang	100 Persen	16,218,913,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen			Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen				
1	1	2	2.0 2	4 1	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	71 Satuan Pendidikan	100 Persen	210,994,471	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen				
1	1	2	2.0 2	4 2	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	71 Satuan Pendidikan	100 Persen	43,184,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen				Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	
1	1	2	2.0 2	4 3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	71 Orang	100 Persen	58,658,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
				Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama						80 Persen					
				Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD						93 Persen					
				Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar						99 Persen					
1	1	2	2.0 3		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							40,773,002,667			
1	1	2	2.0 3	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	3 Unit	100 Persen	481,278,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan					80 Persen				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Menengah Pertama												
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen								
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen								
1	1	2	2.0 3	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	2 Unit	100 Persen	215,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar					99 Persen			
1	1	2	2.0 3	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	2 Unit	100 Persen	197,509,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen				
1	1	2	2.0 3	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	1 Unit	100 Persen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan								
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen										
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen										
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen										
1	1	2	2.0	1	Penyelenggaraan Belajar PAUD	Proses	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	20000 Peserta Didik	100 Persen	87,601,877	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
							Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama									
							Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen				
1	1	2	2.0 3	1 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	5 Satuan Pendidikan	100 Persen	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen				
1	1	2	2.0 3	1 6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	20 Orang	100 Persen	18,122,643,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi				
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen								
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen								
1	1	2	2.0 3	1 7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	5 Satuan Pendidikan	100 Persen	19,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen								
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	5 Satuan Pendidikan	100 Persen	21,571,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen				Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen				
						Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen				
1	1	2	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan							6,614,569,780		
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Persentase Partisipasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	9000 Peserta Didik	0.91 Persen	227,894,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama				80 Persen								
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen								
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen								
1	1	2	2.0 4	1 7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Persentase Partisipasi Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	95.5 Persen	29 Satuan Pendidikan	0.91 Persen	6,386,675,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama					80 Persen				DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				93 Persen				Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi				
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar				99 Persen								
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						7,000,000					
1	1	4	2.0	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						7,000,000				
1	1	4	2.0 1	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terqualifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase satuan pendidikan yang tercukupi pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	83 Persen	1 Dokumen	76 Persen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	1	4	2.0 1	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terqualifikasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase satuan pendidikan yang tercukupi pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	83 Persen	1 Laporan	76 Persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1,208,143,50					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
										0					
2	2	2			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					357,400,000					
2	2	2	2.0 1		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					152,400,000					
2	2	2	2.0 1	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikelola	Objek yang	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	90 Persen	1 Objek	9 Objek	152,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	2	2	2.0 2		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					205,000,000					
2	2	2	2.0 2	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase Pengembangan Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Persentase jenis kesenian tradisional yang dilestarikan		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	90 Persen	5 Objek	42.86 Persen	205,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	2	3			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					33,600,000					
2	2	3	2.0 1		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					33,600,000					
2	2	3	2.0 1	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Persentase Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase lembaga kesenian tradisional yang dibina		Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	40 Persen	1 Lembaga	100 Persen	33,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	2	5			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					118,283,500					
2	2	5	2.0 2		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					118,283,500					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	2	2	5	2.0 2	1	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Yang Dikelola	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	60 Persen	3 Objek	3 Situs	111,683,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	2	2	5	2.0 2	3	Pemanfaatan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Jumlah Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Yang Dikelola	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	60 Persen	3 Objek	3 Situs	6,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	2	2	6			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN								698,860,000	
2	2	2	6	2.0 1		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota								698,860,000	
2	2	2	6	2.0 1	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Kunjungan Museum	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	84 Persen	194 Unit	4000 Orang	380,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2	2	2	6	2.0 1	2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Jumlah Kunjungan Museum	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	84 Persen	3 Orang	4000 Orang	10,585,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	2	2	6	2.0 1	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Kunjungan Museum	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	84 Persen	3 Unit	4000 Orang	216,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
2	2 2	6	2.0 1	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Jumlah Kunjungan Museum	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Wonorejo	84 Persen	4 Unit	4000 Orang	91,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL												654,640,557,933		
DINAS PERHUBUNGAN														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	1 5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							36,704,079,927		
2	1 5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							13,720,908,479		
2	1 5	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							16,900,000		
2	1 5	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	4 Dokumen	93.11 %	2,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	25 Dokumen	93.11 %	2,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	2 Dokumen	93.11 %	2,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	1 Dokumen	93.11 %	2,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	1 Dokumen	93.11 %	2,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	93.11 %	3,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Laporan	93.11 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							9,651,195,981		
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	121 Orang/bulan	93.11 %	9,558,762,481	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Dokumen	93.11 %	83,936,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Dokumen	93.11 %	2,217,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	6 Laporan	93.11 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	18 Laporan	93.11 %	2,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	1 Dokumen	93.11 %	1,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							6,400,000		
2	1	1	2.0	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	93.11 %	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Laporan	93.11 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Laporan	93.11 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah							2,125,400,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	4.11 %	2,125,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							11,495,000		
2	1	1	2.0	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Dokumen	93.11 %	2,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	3 Dokumen	93.11 %	1,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Dokumen	93.11 %	2,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	333 Orang	93.11 %	4,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah							372,004,934		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	1 Paket	93.11 %	20,638,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	1 Paket	93.11 %	123,864,734	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	2 Paket	93.11 %	111,162,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Laporan	93.11 %	116,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							15,400,000		
2	1	1	2.0	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	8 Unit	93.11 %	15,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							719,559,600		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Laporan	93.11 %	21,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Laporan	93.11 %	150,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe	100 %	12 Laporan	93.11 %	15,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Laporan	93.11 %	531,459,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							802,552,964		
2	1	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	53 Unit	93.11 %	639,052,964	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	1 jenis	93.11 %	43,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	1 Unit	93.11 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	1	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	1 Unit	93.11 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							22,983,171,48		
2	1	2	2.0		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							60,000,000		
2	1	2	2.0	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,81 %	1 Dokumen	4.11 %	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2	2.0	2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,81 %	1 Dokumen	4.11 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2	2.0	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,81 %	1 Laporan	4.11 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2	2.0		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota							18,848,062,330		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	2	2.0	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,11 %	143 Unit	93.11 %	1,096,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2	2.0	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,11 %	5200 Unit	93.11 %	17,752,062,330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2	2.0	3	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C							375,621,118		
2	1	2	2.0	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	14.7 %	375,621,118	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									Kab. Lumajang, Pasirian, Semua Kelurahan					
									Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan					
									Kab. Lumajang, Klakah, Klakah					
2	1	2	2.0	4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir							15,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	2	2.0	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	Jumlah Dokumen Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,81 %	6 Dokumen	4.11 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2	2.0	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	Jumlah Laporan dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,81 %	6 Laporan	4.11 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2	2.0		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor							767,352,000		
2	1	2	2.0	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Kedungjajang	2,81 %	18 Unit	4.11 %	372,352,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2	2.0	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Kedungjajang	2,81 %	1 Dokumen	4.11 %	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	2	2.0	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Kedungjajang	2,81 %	18 Unit	4.11 %	275,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Bermotor yang Terpelihara					0 Unit		
2	1	2	2.0		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota							1,188,400,000		
2	1	2	2.0	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,11 %	1322 Unit	93.11 %	1,149,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2	2.0	4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai	Jumlah Laporan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	91,11 %	12 Laporan	93.11 %	19,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
														Kab. Lumajang, Yosowilangun, Semua Kelurahan
2	1	2	2.0	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	91,11 %	1 Laporan	93.11 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023											
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana						
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan								
2	1	2	2.0	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota							82,400,000								
2	1	2	2.0	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Hasil Andalalin	Laporan dan Penilaian	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,81 %	12 Laporan	4.11 %	77,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2	1	2	2.0	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	Jumlah Rekomendasi yang Terawasi	Laporan Andalalin	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,81 %	12 Laporan	4.11 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
2	1	2	2.0	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan							914,200,000								
2	1	2	2.0	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	0	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	2,81 %	12 Laporan	4.11 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	2	2.0	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	0Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,81 %	12 Laporan	4.11 %	894,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2	2.0	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	0Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2,81 %	6 Laporan	4.11 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2	2.0	9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							672,136,000		
2	1	2	2.0	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	120 Unit	14.7 %	662,136,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2	2.0	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	14.7 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2	2.1	1	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							40,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	1	2	2.1	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	14.7 %	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2	2.1	4	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							5,000,000		
2	1	2	2.1	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	14.7 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1	2	2.1	6	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							15,000,000		
2	1	2	2.1	1	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	14.7 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	1	2	2.1	2	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	14.7 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	1	2	2.1	3	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	Jumlah Laporan dan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	14.7 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
TOTAL												36,704,079,927				
DINAS PERIKANAN																
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN											
3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										4,358,582,329	
3	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,589,690,309	
3	2	1	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										14,089,000	
3	2	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 persen	0 Dokumen	499.3 milyar (rupiah)	3,337,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	2	1	2.0	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 persen	1 Dokumen	499.3 milyar (rupiah)	2,490,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 persen	2 Dokumen	499.3 milyar (rupiah)	3,333,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 persen	5 Laporan	499.3 milyar (rupiah)	2,434,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 persen	8 Laporan	499.3 milyar (rupiah)	2,495,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,655,024,724		
3	2	1	2.0	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai PDRB sub sektor perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 persen	25 Orang/bulan	499.3 milyar (rupiah)	2,615,329,724	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	2	1	2.0	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Nilai PDRB sub sektor perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 persen	12 Dokumen	499.3 milyar (rupiah)	32,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Nilai PDRB sub sektor perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 persen	12 Dokumen	499.3 milyar (rupiah)	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai PDRB sub sektor perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 persen	6 Laporan	499.3 milyar (rupiah)	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Nilai PDRB sub sektor perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 persen	2 Dokumen	499.3 milyar (rupiah)	2,495,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Nilai PDRB sub sektor perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 persen	18 Laporan	499.3 milyar (rupiah)	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1,402,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	2	1	2.0	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 persen	2 Dokumen	499.3 milyar (rupiah)	791	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 persen	2 Laporan	499.3 milyar (rupiah)	611	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah							159,292,318		
3	2	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 Persen	1 Paket	499.3 milyar (rupiah)	4,330,554	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 Persen	2 Paket	499.3 milyar (rupiah)	53,684,706	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 Persen	2 Paket	499.3 milyar (rupiah)	8,111,058	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 Persen	12 Laporan	499.3 milyar (rupiah)	93,166,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							7,560,767		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	2	1	2.0	5	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	jumlah paket mebel yang disediakan	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 Persen	1 Paket	499.3 milyar (rupiah)	7,560,767	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit			
3	2	1	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							527,904,000		
3	2	1	2.0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 Persen	12 Laporan	499.3 milyar (rupiah)	900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 Persen	12 Laporan	499.3 milyar (rupiah)	75,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 Persen	12 Bulan	499.3 milyar (rupiah)	451,884,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	1	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							224,417,500		
3	2	1	2.0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 Persen	44 Unit	499.3 milyar (rupiah)	149,617,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	2	1	2.0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 Persen	0 Unit	499.3 milyar (rupiah)	24,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					41 Unit			
3	2	1	2.0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 Persen	1 Paket	499.3 milyar (rupiah)	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP							215,550,020		
3	2	3	2.0	1	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							103,550,020		
3	2	3	2.0	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6490 ton	17 Dokumen	499.3 milyar (rupiah)	32,783,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	3	2.0	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6490 ton	20 Unit	499.3 milyar (rupiah)	70,766,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	3	2.0	2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota							112,000,000		
3	2	3	2.0	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Tempursari, Tegalrejo	6490 ton	20 Orang	499.3 milyar (rupiah)	112,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
					Kab. Lumajang, Tempursari, Bulurejo									
					Kab. Lumajang, Pasirian, Bades									
					Kab. Lumajang, Pasirian, Selok Awar - Awar									
					Kab. Lumajang, Yosowilangun, Wotgalih									
3	2 5	4			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					300,008,000				
3	2 5	4	2.0 2		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil					45,000,000				
3	2 5	4	2.0 2	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	3616 ton	12 Kelompok	499.3 milyar (rupiah)	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2 5	4	2.0 4		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan					255,008,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3	2	4	2.0	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3616 ton	17 Dokumen	499.3 milyar (rupiah)	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	4	2.0	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3616 ton	12 Unit	499.3 milyar (rupiah)	192,708,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	4	2.0	4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	3616 ton	2 Dokumen	499.3 milyar (rupiah)	56,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	6			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							253,334,000		
3	2	6	2.0	1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil							25,862,500		
3	2	6	2.0	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4271 ton	17 Dokumen	499.3 milyar (rupiah)	25,862,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	2	6	2.0	2	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil							28,770,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja								
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
3	2 5	6	2.0 2	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Semua Kelurahan	4271 ton	63 Unit Usaha	499.3 milyar (rupiah)	28,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									Kab. Lumajang, Rowokangkung, Semua Kelurahan					
									Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan					
									Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan					
									Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan					
3	2 5	6	2.0 3		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota							198,701,500		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
3	2	5	6	2.0	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Nilai PDRB sub Sektor Perikanan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4271 ton	20 Pelaku Usaha	499.3 milyar (rupiah)	198,701,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
TOTAL													4,358,582,329						
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													27,370,920,405				
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM													13,267,700,000			
1	3	3	2.0	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota													13,267,700,000	
1	3	3	2.0	1	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciaptakaryaan	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Nogosari	77.53 persen	4100 SR	77.34 %	1,525,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
										Kab. Lumajang, Rowokangkung, Kedungrejo									
										Kab. Lumajang, Rowokangkung, Sumpersari									
1	3	3	2.0	1	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang ditingkatkan	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciaptakaryaan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.53 persen	1000 SR	77.34 %	7,145,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
					Kab. Lumajang, Tempursari, Bulurejo					
					Kab. Lumajang, Pronojiwo, Oro-oro Ombo					
					Kab. Lumajang, Pasrujambe, Kertosari					
					Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pagowan					
					Kab. Lumajang, Senduro, Senduro					
					Kab. Lumajang, Senduro, Kandangan					
					Kab. Lumajang, Gucialit, Pakel					
					Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit					
					Kab. Lumajang, Padang, Barat					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
								Kab. Lumajang, Padang, Bodang						
								Kab. Lumajang, Padang, Kedawung						
								Kab. Lumajang, Randuagung, Gedangmas						
								Kab. Lumajang, Ranuyoso, Ranuyoso						
1	3	3	2.0 1	8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	Jumlah penambahan SR Kawasan Pedesaan	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciaptakaryaan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.53 persen	90 SR	77.34 %	420,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
								Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng						
								Kab. Lumajang, Senduro, Purworejo						
								Kab. Lumajang, Senduro, Burno						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
									Kab. Lumajang, Padang, Kalisemut					
									Kab. Lumajang, Kedungjajangg, Sawaran Kulon					
									Kab. Lumajang, Klakah, Sawaran Lor					
1	3	3	2.0 1	1 1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakaryaan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.53 persen	1 Kelompok Masyarakat	77.34 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	3	2.0 1	1 7	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani melalui Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakaryaan	Kab. Lumajang, Klakah, Semua Kelurahan	77.53 persen	50 Rumah Tangga	77.34 %	262,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan					
1	3	3	2.0 1	1 9	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	Jumlah SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan yang diperluas	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakaryaan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	77.53 persen	500 SR	77.34 %	3,815,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
					Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung									
					Kab. Lumajang, Randuagung, Buwek									
					Kab. Lumajang, Klakah, Kudus									
					Kab. Lumajang, Klakah, Tegalcuit									
1	3	5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						11,795,220,000				
1	3	5	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						11,795,220,000				
1	3	5	2.01	4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciaptakaryaan	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Kidul	73.29 persen	160 Rumah Tangga	77.34 persen	330,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
								Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan						
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciaptakaryaan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73.29 persen	1624 Rumah Tangga	77.34 persen	9,079,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan		
					Kab. Lumajang, Tempursari, Purorejo				
					Kab. Lumajang, Tempursari, Tempursari				
					Kab. Lumajang, Pasrujambe, Pasrujambe				
					Kab. Lumajang, Senduro, Purworejo				
					Kab. Lumajang, Senduro, Sarikemunin g				
					Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit				
					Kab. Lumajang, Gucialit, Kertowono				
					Kab. Lumajang, Padang, Bodang				
					Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	3	5	2.0 1	7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciaptakaryaan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73.29 persen	100 Orang	77.34 persen	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									Kab. Lumajang, Candipuro, Sumber Mujur					
1	3	5	2.0 1	1 0	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Dipeliharakan dan Dipeelihara	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciaptakaryaan	Kab. Lumajang, Candipuro, Sumber Mujur	73.29 persen	10 Unit	77.34 persen	684,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	5	2.0 1	1 4	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciaptakaryaan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73.29 persen	10 Rumah Tangga	77.34 persen	526,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	5	2.0 1	1 6	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciaptakaryaan	Kab. Lumajang, Tempeh, Lempeni	73.29 persen	25 M ³ /Hari	77.34 persen	1,070,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	5	2.0 1	1 7	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi i/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciaptakaryaan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	73.29 persen	1 Dokumen	77.34 persen	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE							321,042,405		
1	3	6	2.0 1		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota							321,042,405		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	3	6	2.0 1	1 2	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Persentase Panjang Drainase Terbangun	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciaptakaryaan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 persen	2000 M	77.34 persen	321,042,405	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									Kab. Lumajang, Candipuro, Sumber Mujur					
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN							1,155,000,000		
1	3	7	2.0 1		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							1,155,000,000		
1	3	7	2.0 1	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan terfasilitasi dengan baik	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	Kab. Lumajang, Senduro, Senduro	100 persen	1 Sistem Jaringan	16.76 persen	275,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	3	7	2.0 1	2	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kawasan terfasilitasi dengan baik	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 persen	4 Sistem Jaringan	16.76 persen	880,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan					
									Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1 3 8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								446,358,000	
1 3 8 2.0 1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung								446,358,000	
1 3 8 2.0 1 1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Penataan Bangunan di Kabupaten	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 persen	50 Dokumen	64.75 persen	412,358,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 3 8 2.0 1 3	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan di Kabupaten	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	30 persen	3 Dokumen	64.75 persen	34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 3 9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA								385,600,000	
1 3 9 2.0 1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota								385,600,000	
1 3 9 2.0 1 5	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase kawasan yang tertangani	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 persen	1000 Orang	16.76 persen	385,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								13,321,879,882	
1 4 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4,503,660,527	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	4	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								12,500,000		
1	4	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 persen	2 Dokumen	54.91 persen	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 persen	20 Dokumen	54.91 persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 persen	20 Dokumen	54.91 persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 persen	5 Laporan	54.91 persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,031,126,927		
1	4	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 persen	34 Orang/bula n	54.91 persen	2,905,502,927	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	4	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 persen	12 bulan	54.91 persen	102,624,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 persen	12 Dokumen	54.91 persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 persen	4 Laporan	54.91 persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								54,500,000	
1	4	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 persen	6 Dokumen	54.91 persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.0 3	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 persen	25 Dokumen	54.91 persen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 persen	6 Laporan	54.91 persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						perkantoran								
1	4	1	2.0	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							10,000,000		
1	4	1	2.0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan		6 Orang		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah							299,300,000		
1	4	1	2.0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	100 persen	2 Paket	54.91 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.0	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	100 persen	3 Paket	54.91 persen	131,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.0	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	100 persen	4 Paket	54.91 persen	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.0	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	100 persen	100 Laporan	54.91 persen	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						perkantoran								
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitasi rakor SKPD	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	100 persen	12 bulan	54.91 persen	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							685,479,600		
1	4	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	100 persen	1000 Laporan	54.91 persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	100 persen	4 Laporan	54.91 persen	161,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Fasilitasi Jasa Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 bulan	54.91 persen	521,379,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							410,754,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	100 persen	8 Unit	54.91 persen	154,604,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	100 persen	50 Unit	54.91 persen	56,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	100 persen	5 Unit	54.91 persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN								3,302,314,885	
1	4	2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota								200,000,000	
1	4	2	2.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Ratio Rumah terbangun	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan backlog	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	30 ratio	1 Dokumen	54.91 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	4	2	2.0 1	2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ratio Rumah terbangun	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase pemenuhan backlog	Kab. Lumajang, Senduro, Semua Kelurahan	30 ratio	2 Dokumen	54.91 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	2	2.0 3		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota							2,838,200,885		
1	4	2	2.0 3	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Ratio Rumah Terbangun	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 ratio	2 Dokumen	54.91 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	2	2.0 3	3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ratio Rumah Terbangun	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Tempursari, Bulurejo	30 ratio	1 Ha	54.91 persen	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	2	2.0 3	5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Ratio Rumah Terbangun	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 ratio	35 Unit Rumah	54.91 persen	1,613,700,885	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	4	2	2.0 3	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Ratio Rumah Terbangun	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Candipuro, Sumber Mujur	30 ratio	2170 Unit Rumah	54.91 persen	624,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	2	2.0 6		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan							264,114,000		
1	4	2	2.0 6	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Ratio Rumah Terbangun	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Pemenuhan Backlog	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 ratio	21 Dokumen	54.91 persen	264,114,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							825,900,000		
1	4	3	2.0 3		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha							825,900,000		
1	4	3	2.0 3	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	presentase kawasan kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Persentase Peningkatan Kawasan Tertangani Luasan Kumuh	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 persen	10 Unit Rumah	64.75 persen	183,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	4	3	2.0 3	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	presentase kawasan kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Persentase Peningkatan Kawasan Tertangani Luasan Kumuh	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 persen	1 Ha	64.75 persen	642,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
									Kab. Lumajang, Lumajang, Banjarwaru					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1 4 4					Kab. Lumajang, Lumajang, Denok							
1 4 4					Kab. Lumajang, Lumajang, Boreng							
1 4 4									4,453,650,000			
1 4 4	2.0 1								4,453,650,000			
1 4 4	2.0 1	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	presentase RTLH diluar kawasan kumuh yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Persentase Peningkatan Kawasan Tertangani Luasan Kumuh	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7.2 HA	262 Unit Rumah	64.75 persen	4,453,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 4 5											236,354,470	
1 4 5	2.0 1										236,354,470	
1 4 5	2.0 1	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase PSU Perumahan yang terpelihara	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Peningkatan Kawasan Tertangani Luasan Kumuh	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 persen	1 Lokasi	64.75 persen	236,354,470	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									40,692,800,287			
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
		Capaian	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu	Sumber				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
Kegiatan		Program			Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Indikatif (Rp.)	Dana				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							29,372,619,622					
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,687,575,991				
1	6	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							35,423,000			
1	6	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	2 Dokumen	86 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	1 Dokumen	86 %	9,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	1 Dokumen	86 %	2,536,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	6	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	5 Laporan	86 %	2,227,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	11 Laporan	86 %	18,129,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,390,562,122	
1	6	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	28 Orang/bulan	86 %	3,320,845,122	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	12 Dokumen	86 %	60,477,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	1 Laporan	86 %	3,536,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	6	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	3 Laporan	86 %	5,704,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1,249,000		
1	6	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	2 Dokumen	86 %	562	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	2 Laporan	86 %	687	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							4,088,000		
1	6	1	2.0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	12 Dokumen	86 %	4,088,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							280,158,449		
1	6	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	14 Paket	86 %	18,819,606	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	6	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	155 Paket	86 %	94,023,993	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	6 Paket	86 %	19,999,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	12 Dokumen	86 %	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	2 Laporan	86 %	4,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	199 Laporan	86 %	139,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							27,972,000		
1	6	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	7 Unit	86 %	27,972,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	6	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							424,103,420			
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	12 Laporan	86 %	1,604,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	12 Laporan	86 %	166,287,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	12 Laporan	86 %	256,212,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							524,020,000			
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	21 Unit	86 %	281,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	65 Unit	86 %	42,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	6	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Unit	86 %	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL								2,135,984,000	
1	6	2	2.0 3		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota								2,135,984,000	
1	6	2	2.0 3	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Kesos	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	86 %	205 Orang	86 %	32,985,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	2	2.0 3	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Kesos	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 %	21 Orang	86 %	299,668,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	2	2.0 3	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM Kesos	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 %	316 Lembaga	86 %	1,803,331,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								4,238,820,131	
1	6	4	2.0 1		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial								4,187,304,031	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1	6	4	2.0 1	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	714 Orang	86 %	4,133,708,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti				100 %				
						Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100 %				
						Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas Setiap Tahun yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100 %				
						Prosentase PPKS Yang Telah Mendapatkan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				86 %				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
1	6	4	2.0	1	2	Penyediaan Sandang	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	15 Orang	86 %	28,794,510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti				100 %				
							Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100 %				
							Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas Setiap Tahun yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100 %				
							Prosentase PPKS Yang Telah Mendapatkan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				86 %				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1 6 4 2.0 1 3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	7 Orang	86 %	8,836,821	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti				100 %				
		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100 %				
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas Setiap Tahun yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100 %				
		Prosentase PPKS Yang Telah Mendapatkan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				86 %				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1 6 4 2.0 1 8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	86 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Jumlah Warga Negara/gelangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti				100 %				
		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100 %				
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas Setiap Tahun yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100 %				
		Prosentase PPKS Yang Telah Mendapatkan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				86 %				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1 6 4 2.0 1 9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Orang	86 %	2,304,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
		Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti				100 %				
		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100 %				
		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas Setiap Tahun yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100 %				
		Prosentase PPKS Yang Telah Mendapatkan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				86 %				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1	6	4	2.0	1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Orang	86 %	12,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti				100 %				
						Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100 %				
						Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas Setiap Tahun yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti				100 %				
						Prosentase PPKS Yang Telah Mendapatkan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				86 %				
1	6	4	2.0	2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							51,516,100		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan	
1	6	4	2.0 2	2	Pemberian Kedaruratan Layanan	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	24 Orang	86 %	51,516,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
					Jumlah Warga Negara/gelandan gan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti					100 %					
					Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti					100 %					
					Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas Setiap Tahun yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti					100 %					
					Prosentase PPKS Yang Telah Mendapatkan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial					86 %					
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							17,869,972,3 00			
1	6	5	2.0 2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							17,869,972,3 00			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	6	5	2.0 2	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Prosentase PPKS yg mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Fakir Miskin Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 %	500000 Orang	86 %	124,054,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	5	2.0 2	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota	Prosentase PPKS yg mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 %	200000 Keluarga	86 %	105,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	6	5	2.0 2	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Prosentase PPKS yg mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	86 %	7733 Keluarga	86 %	17,640,848,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
														DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA							336,807,000		
1	6	6	2.0 1		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							55,827,000		
1	6	6	2.0 1	4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10070 Orang	86 %	55,827,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Persentase Korban bencana yg mendapat pemenuhan kebutuhan dasar				100 %								
1	6	6	2.0 2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					280,980,000					
1	6	6	2.0 2	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Kampung	86 %	41,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase Korban bencana yg mendapat pemenuhan kebutuhan dasar				100 %				
1	6	6	2.0 2	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	86 %	239,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase Korban bencana yg mendapat pemenuhan kebutuhan dasar				100 %				
1	6	7		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					103,460,200					
1	6	7	2.0 1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					103,460,200					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	6	7	2.0 1	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Prosentase Taman Makam Pahlawan yg dikelola sesuai standart kemensos	Jumlah Makam yang Terpenuhi pada Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan dalam penanganan PPKS	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	63 %	435 Makam	86 %	103,460,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	8				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2	8	2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									
2	8	2	2.0 1		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota									
2	8	2	2.0 1	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	22 %	21 Dokumen	59.25 Angka	58,519,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	8	2	2.0 2		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
2	8	2	2.0 2	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase ARG pada Belanja APBD	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 %	1 Dokumen	59.25 Angka	16,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	8	3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN									
2	8	3	2.0 1		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	8	3	2.0 1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang terfasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	2 Dokumen	59.25 Angka	21,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	8	3	2.0 1	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang terfasilitasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	15 Perangkat Daerah	59.25 Angka	5,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	8	3	2.0 2		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							8,000,000		
2	8	3	2.0 2	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang terfasilitasi	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Indeks Pemberdayaan Gender	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Orang	59.25 Angka	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	8	4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							32,950,000		
2	8	4	2.0 1		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							32,950,000		
2	8	4	2.0 1	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase cakupan penurunan KDRT	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	1 Laporan	59.25 Angka	32,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Persentase penurunan perceraian				6 %								
		Persentase penurunan pernikahan usia anak				100 %								
2	8	5		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					13,665,000					
2	8	5	2.0 1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					13,665,000					
2	8	5	2.0 1	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Gender, Perempuan dan Anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Indeks Pemberdayaan Gender	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	1 Buku	2 Dokumen	59.25 Angka	13,665,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	8	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					82,512,000					
2	8	6	2.0 2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					82,512,000					
2	8	6	2.0 2	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan yang memfasilitasi hak anak	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	780 Orang	59.25 Angka	53,795,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	8	6	2.0 2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan yang memfasilitasi hak anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	1 Dokumen	59.25 Angka	15,556,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	8	6	2.0 2	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan yang memfasilitasi hak anak	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 %	1 Dokumen	59.25 Angka	13,161,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2 8 7					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK								72,651,250	
2 8 7 2.0 2					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								72,651,250	
2	8	7	2.0 2	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 %	50 Orang	59.25 Angka	72,651,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL												29,684,466,872		
DINAS TENAGA KERJA														
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2 7					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								4,840,270,659	
2 7 1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,993,205,991	
2 7 1 2.0 2					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,446,530,191	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	7	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bula n		3,397,314,191	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen		49,216,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							176,072,200		
2	7	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		6,279,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket		53,056,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		21,096,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen		1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	7	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan		94,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							284,553,600		
2	7	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan		194,553,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							86,050,000		
2	7	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit		44,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit		24,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	7	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	7	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit		6,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								447,737,168			
2	7	3	2.0 1		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								410,862,168			
2	7	3	2.0 1	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berdasarkan Kompetensi pada Tahun n			Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		140 Orang		410,862,168	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	
										Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal						
										Kab. Lumajang, Candipuro, Tambahrejo						
										Kab. Lumajang, Tekung, Wonogriyo						
										Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan						

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
					Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan							
					Kab. Lumajang, Gucialit, Tunjung							
					Kab. Lumajang, Kedungjajan g, Kedungjajan g							
					Kab. Lumajang, Randuagung, Ledoktempur o							
					Kab. Lumajang, Klakah, Kudus							
					Kab. Lumajang, Klakah, Tegalciut							
					Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul							
2	7	3	2.0 2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						10,575,000		
2	7	3	2.0 2	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina			19 Lembaga	10,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2	7	3	2.0 4	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil								20,000,000		
2	7	3	2.0 4	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				70 Perusahaan		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	3	2.0 5	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								6,300,000		
2	7	3	2.0 5	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				2 Dokumen		6,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	4		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								283,375,500		
2	7	4	2.0 1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota								54,005,500		
2	7	4	2.0 1	2	Pelayanan antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				100 Orang		19,755,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	4	2.0 1	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD				10 Orang		34,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	4	2.0 3	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja								184,244,000		
2	7	4	2.0 3	3	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				500 Orang		184,244,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	7	4	2.0 4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					45,126,000				
2	7	4	2.0 4	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				5 Orang	45,126,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	5		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					115,952,000				
2	7	5	2.0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					74,009,000				
2	7	5	2.0 1	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				15 Perusahaan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	5	2.0 1	2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				5 Perusahaan	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	5	2.0 1	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				6 Laporan	44,009,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	5	2.0 2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					41,943,000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	7	5	2.0 2	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perselisihan yang Dicegah				3 Perkara		32,868,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	5	2.0 2	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan				10 Perkara		3,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	7	5	2.0 2	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				10 Asosiasi dan Serikat Pekerja		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	7	5	2.0 2	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga		2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							49,137,800		
3					PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							49,137,800		
3					Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							49,137,800		
3	3 2	3	2.0 1	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				9 Laporan		16,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	3 2	3	2.0 1	6	Pelatihan Transmigrasi		Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan				20 Orang		12,667,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	3 2	3	2.0 1	2 0	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi		Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				2 KK		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL												4,889,408,45 9		
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA														
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							13,814,440,3 83		
1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,437,598,35 3		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	5	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								13,902,000	
1	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		3 Dokumen		12,306,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		5 Laporan		1,596,000	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum
1	5	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,220,292,141	
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		38 Orang/bula n		4,164,604,141	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		12 Dokumen		38,424,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		12 Dokumen		12,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1 0 0 2.0 0 5 1 2 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		5 Laporan		2,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 0 0 2.0 0 5 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		18 Laporan		1,784,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	5	1	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					174,416,520	
1 0 0 2.0 0 5 1 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		1 Paket		10,549,329	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		4 Paket		81,481,871	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		2 Paket		11,581,320	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		12 Laporan		70,804,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							623,211,600		
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		12 Laporan		240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		12 Laporan		116,667,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		12 Laporan		506,304,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							405,776,092		
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		40 Unit		381,676,092	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1 05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		4 Unit		24,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 05 02	PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								7,620,707,600	
1 05 02 2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								4,881,254,500	
1 05 02 2.01 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		365 Kasus		429,456,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		476 Kasus		2,541,476,000	Pajak Rokok Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		12 Dokumen		511,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 05 02 2.01 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		12 Dokumen		116,795,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		40 Orang		204,931,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 05 02 2.01 06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		12 Dokumen		1,063,236,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1 05 02 2.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		12 Laporan		13,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 05 02 2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							2,739,453,100		
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/PelakuUsaha/		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		12 Laporan		1,208,611,100	
1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		12 Laporan		50,034,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Bupati/Wali Kota		Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		12 Laporan		1,480,808,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							756,134,430		
1 05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							700,057,930		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1 05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		509,047,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		5 Unit		86,818,930	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 05 04 2.01 07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		40 Orang		104,192,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								25,842,500	
1 05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		20 orang		25,842,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1 05 04 2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia								30,234,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1 05 04 2.05 01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia		Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan		12 Laporan		30,234,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
TOTAL									13,814,440,383			
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH												
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5	3				KEPEGAWAIAN					6,988,726,630		
5	3	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,144,329,275		
5	3	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					3,000,000		
5	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2 Dokumen	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5 0 3 1 1 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan		500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 0 3 1 1 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan		500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 3 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4,930,311,058	
5 0 3 1 2 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/12 bulan		4,894,083,058	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 0 3 1 2 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen		34,748,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 0 3 1 2 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen		480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5 0 3 1 2 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan		500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 0 3 1 2 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran				3 Laporan		500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi
	SKPD		SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD							Umum
5 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								318,417,117	
5 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket		9,877,335	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket		145,347,446	
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket		20,212,936	
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				3 Dokumen		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5 03 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket		6,455,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 03 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan		3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan		129,924,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								2,280,000	
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit		2,280,000	
5 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								664,409,800	
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan		3,691,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan		361,114,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3 Laporan		299,604,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
			yang Disediakan							Umum
5 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								225,911,300	
5 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit		135,861,300	
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		81 Unit		80,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		1 Unit		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								844,397,355	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN								389,061,155	
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen		6,350,000	
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		345 Dokumen		174,594,545	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		574 Dokumen		25,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				4 Lembaga		45,576,000	
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		11 Dokumen		116,665,610	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				12 Dokumen		20,400,000	
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN								311,286,000	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan,		30 Dokumen		102,296,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
			Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah		Semua Kelurahan					
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		46,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4 Dokumen		162,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 03 02 2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							144,050,200		
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				6044 Dokumen		62,110,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				700 Orang		17,840,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				900 Orang		58,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				60 Laporan		5,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							725,405,000		
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							725,405,000		
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis							282,960,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5 04 02 2.01 03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		350 Orang		220,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5 04 02 2.01 04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi				180 Dokumen		62,260,000	
	Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum							
5 04 02 2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional								442,445,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
5 04 02 2.02 05	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		5 Dokumen		314,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
5 04 02 2.02 07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				150 Laporan		128,195,000					
TOTAL									7,714,131,630					
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK														
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					6,848,294,051				
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3,244,360,051				
8	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					36,000,000				
8	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase masalah yang ditangani (terkait lpoleksosbud dan Tibmas)	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 persen	3 Dokumen	100 persen	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran				100 %				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran				100 persen								
8	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase masalah yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 persen	1 Dokumen	100 persen	4,479,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran				100 %				
						Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran				100 persen				
8	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase masalah yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 persen	1 Dokumen	100 persen	2,521,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran				100 %				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran				100 persen								
8	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 persen	5 Laporan	100 persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran					100 %				
					Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran					100 persen				
8	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,481,122,051		
8	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)	Kab. Lumajang, Sukodono, Kutorenon	100 persen	26 orang	100 persen	2,444,122,051	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
8	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	12 Dokumen	100 persen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	4 Laporan	100 persen	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2,000,000		
8	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	2 Laporan	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							13,300,000		
8	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	38 Paket	100 persen	13,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							233,728,000		
8	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	5 Paket	100 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
8	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	2 Paket	100 persen	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	2 Paket	100 persen	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	12 Dokumen	100 persen	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	70 Laporan	100 persen	4,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	386 Laporan	100 persen	115,808,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							83,510,000		
8	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	11 Unit	100 persen	83,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran				100 persen								
8	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					240,600,000					
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	48 Laporan	100 persen	93,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	60 Laporan	100 persen	147,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					154,100,000					
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	20 Unit	100 persen	121,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	37 Unit	100 persen	32,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	2		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					232,454,000					
8	1	2	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					232,454,000					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
8	1	2	2.0 1	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	1 Dokumen	100 persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	2	2.0 1	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	13851 Orang	100 persen	197,454,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	2	2.0 1	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	25 Laporan	100 persen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							2,471,575,000		
8	1	3	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							2,471,575,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
8	1	3	2.0 1	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	1 Dokumen	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	3	2.0 1	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	422 Orang	100 persen	2,456,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
8	1	3	2.0 1	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	10 Laporan	100 persen	12,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							100,960,000		
8	1	4	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							100,960,000		
8	1	4	2.0 1	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	1 Dokumen	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
8	1	4	2.0 1	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	201 Orang	100 persen	85,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	4	2.0 1	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	52 Laporan	100 persen	13,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							298,155,000		
8	1	5	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							298,155,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
8	1	5	2.0 1	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	3 Dokumen	100 persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	5	2.0 1	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	680 Orang	100 persen	250,155,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
8	1	5	2.0 1	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	7 Laporan	100 persen	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							500,790,000		
8	1	6	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							500,790,000		
8	1	6	2.0 1	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase potensi permasalahan strategis yang ditangani	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	2 Dokumen	100 dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
8	1	6	2.0 1	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase potensi permasalahan strategis yang ditangani	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	185 Orang	100 dokumen	198,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	1	6	2.0 1	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase potensi permasalahan strategis yang ditangani	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	160 Orang	100 dokumen	87,070,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
8	1	6	2.0 1	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase potensi permasalahan strategis yang ditangani	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)		100 persen	4 Dokumen	100 dokumen	205,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
TOTAL												6,848,294,051					
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH																	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	2	KEUANGAN												14,104,077,260			
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												9,738,717,260		
5	2	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												28,724,600	
5	2	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	3 Dokumen	10 persen	5,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
5	2	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	1 Dokumen	10 persen	6,736,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
5	2	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	0 Dokumen	10 persen	2,948,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	3 Laporan	10 persen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	10 Laporan	10 persen	9,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7,525,071,519		
5	2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	31 ASN	10 persen	7,394,331,519	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	12 Dokumen	10 persen	109,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	12 Dokumen	10 persen	5,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	1 Laporan	10 persen	3,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	3 Dokumen	10 persen	9,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	12 Laporan	10 persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							758,435,249		
5	2	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	1 Paket	10 persen	11,148,285	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	5 Paket	10 persen	309,604,124	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	2 Paket	10 persen	118,792,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	15 Dokumen	10 persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	1 Paket	10 persen	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 6	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	12 Laporan	10 persen	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	% potensi penerimaan pajak daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	10 persen	294,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							66,427,062		
5	2	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	26 Unit	10 persen	66,427,062	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5	2	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,116,690,000		
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	12 Laporan	10 persen	14,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	12 Laporan	10 persen	642,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	12 Laporan	10 persen	459,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								243,368,830		
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	60 Unit	10 persen	179,218,830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	65 Unit	10 persen	64,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	4		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								4,365,360,000		
5	2	4	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								4,365,360,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	4	2.0 1	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	persentase penerimaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	4 Dokumen	10 persen	26,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah				10 persen				
5	2	4	2.0 1	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	persentase penerimaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	% potensi penerimaan pajak daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Dokumen	10 persen	130,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah				10 persen				
5	2	4	2.0 1	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	persentase penerimaan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	% potensi penerimaan pajak daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	28 Laporan	10 persen	162,451,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah				10 persen				
5	2	4	2.0 1	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	persentase penerimaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	1 Aplikasi	10 persen	112,392,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
						Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			10 persen	40 Unit			
5	2	4	2.0 1	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	persentase penerimaan pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	33 Laporan	10 persen	184,728,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah				10 persen				
5	2	4	2.0 1	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	persentase penerimaan pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	18 Laporan	10 persen	57,396,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah				10 persen				
5	2	4	2.0 1	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	persentase penerimaan pajak daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	10005 Obyek Pajak	10 persen	171,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah				10 persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	persentase penerimaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	36 Dokumen	10 persen	168,855,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah				10 persen				
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	persentase penerimaan pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	25000 Layanan	10 persen	1,304,598,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah				10 persen				
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	persentase penerimaan pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Dokumen	10 persen	58,185,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah				10 persen				
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	persentase penerimaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Dokumen	10 persen	1,254,680,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah					10 persen			
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	persentase penerimaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	1500 Dokumen	10 persen	28,908,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah				10 persen				
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	persentase penerimaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	26 Dokumen	10 persen	660,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah				10 persen				
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	persentase penerimaan pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Laporan	10 persen	35,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah				10 persen				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
5	2	4	2.0 1	1 5	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	persentase penerimaan pajak daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Transaksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	% potensi penerimaan pajak daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 persen	6 Laporan	10 persen	8,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
					Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah				10 persen							
TOTAL												14,104,077,260				
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	5				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										4,544,348,811	
1	5	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3,045,229,811	
1	5	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,885,715,235	
1	5	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		16 Orang/bulan		1,847,075,235	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
1	5	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		38,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	5	1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah							96,357,600			
1	5	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Paket		2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	5	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Paket		24,878,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	5	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Paket		11,474,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	5	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		57,305,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	5	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							379,430,976			
1	5	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		121,434,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		12,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan		245,756,976	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	5	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							683,726,000		
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		25 Unit		376,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	5	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Unit		287,036,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		30 Unit		19,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	5	3			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							1,499,119,000		
1	5	3	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota							13,185,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	5	3	2.0 1	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		11,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	5	3	2.0 1	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		300 Orang		1,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	5	3	2.0 2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana							418,559,000		
1	5	3	2.0 2	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		21,159,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	5	3	2.0 2	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		750 Orang		32,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1	5	3	2.0 2	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Dokumen		191,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	5	3	2.0 2	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Kab. Lumajang, Candipuro, Sumber Mujur		4 Kawasan		45,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	5	3	2.0 2	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		60 Orang		32,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	5	3	2.0 2	9	Penyusunan Rencana Kontijensi		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6 Dokumen		95,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
1	5	3	2.0 3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana							1,025,460,000		
1	5	3	2.0 3	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		3 Dokumen		631,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1	5	3	2.0 3	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 Orang		57,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	3	2.0 3	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 Orang		336,290,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	3	2.0 4		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana							41,915,000			
1	5	3	2.0 4	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen		13,515,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	5	3	2.0 4	6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen		28,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
TOTAL												4,544,348,811			
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH															
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	2	KEUANGAN												472,169,098,396	
5	2	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											69,240,107,669	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5	2	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							44,264,000			
5	2	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Dokumen		4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Dokumen		3,187,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		4 Dokumen		7,998,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 1	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Dokumen		2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		4 Dokumen		7,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		5 Laporan		7,596,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		13 Laporan		12,458,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							65,240,963,199		
5	2	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1085 Orang/bulan		64,412,228,999	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Dokumen		670,867,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Dokumen		123,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		5 Laporan		5,033,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		2 Dokumen		23,114,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		14 Laporan		5,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							6,044,000		
5	2	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		2 Dokumen		2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		2 Laporan		2,024,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		2,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								68,994,000	
5	2	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket		24,864,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Dokumen		2,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 5	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Dokumen		7,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		6 Orang		17,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang		16,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,545,946,870	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		8 Paket		10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		4 Paket		640,428,870	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		2 Paket		604,543,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		243 Dokumen		5,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		2 Paket		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		12 Laporan		19,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		36 Laporan		246,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 6	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		6 Dokumen		4,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 6	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		4 Dokumen		7,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							946,364,000		
5	2	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		8 Unit		746,364,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 7	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Unit		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							758,871,600		
5	2	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		15,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan		396,592,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan		346,469,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							628,660,000		
5	2	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29 Unit		119,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		28 Unit		49,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 9	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				4 Unit		260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Unit		200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							401,363,021,		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
												937		
5	2	2	2.0 1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								1,630,078,08 1		
5	2	2	2.0 1	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Dokumen		35,965,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Dokumen		35,965,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 1	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		5 Dokumen		322,716,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 1	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Dokumen		145,326,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 1	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		4 Dokumen		79,869,664	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 1	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Dokumen		55,385,085	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	2	2.0 1	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		5 Dokumen		162,199,840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 1	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		2 Dokumen		111,130,192	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 1	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		2 Dokumen		114,013,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 1	1 0	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		12 Dokumen		246,195,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 1	1 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		12 Dokumen		122,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 1	1 2	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		5 Dokumen		118,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	2	2.0 1	1 3	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		500 Orang		80,909,960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 2		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah							603,679,600		
5	2	2	2.0 2	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		22000 Dokum en		117,033,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 2	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Laporan		4,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 2	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		4 Dokumen		8,142,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 2	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Dokumen		4,944,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	2	2.0 2	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		25 Dokumen		123,198,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotonga n dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotonga n dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		96 Laporan		66,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	2	2.0 2	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan atas SP2D dengan Instansi Terkait		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		10 Dokumen		6,807,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 2	1 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Dokumen		35,206,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 2	1 1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		348 Orang		237,139,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah							526,993,700		
5	2	2	2.0 3	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan		48,301,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	2	2.0 3	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		1164 Dokumen		36,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 3	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		137 Laporan		30,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 3	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		2 Laporan		171,657,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 3	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		2 Dokumen		18,444,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	2	2.0 3	6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Dokumen		26,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 3	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen		3,219,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 3	1 1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		392 Orang		191,887,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 4		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah							398,579,170, 556		
5	2	2	2.0 4	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		5,700,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 4	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		36 Laporan		345,608,877,3 60	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	2	2.0 4	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan		40,000,000,00 0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 4	1 0	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		2 Laporan		7,270,293,196	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	2	2.0 5		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah							23,100,000		
5	2	2	2.0 5	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		330 Orang		23,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH							1,565,968,79 0		
5	2	3	2.0 1		Pengelolaan Barang Milik Daerah							1,565,968,79 0		
5	2	3	2.0 1	1	Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang Disusun		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Dokumen		206,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	3	2.0 1	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Dokumen		50,995,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	2	3	2.0 1	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Dokumen		75,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	3	2.0 1	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Dokumen		26,905,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	3	2.0 1	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Laporan		19,944,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	3	2.0 1	7	Pengamanan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Laporan		839,533,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	3	2.0 1	8	Penilaian Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Laporan		10,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	2	3	2.0 1	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan		8 Laporan		21,990,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
5	2	3	2.0 1	1 0	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		20 Dokumen		180,684,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
5	2	3	2.0 1	1 1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		3 Laporan		37,238,240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
5	2	3	2.0 1	1 2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		1 Laporan		24,405,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
5	2	3	2.0 1	1 3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		130 Orang		71,478,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
												TOTAL	472,169,098, 396			
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
5	1				PERENCANAAN										9,287,694,65 3	
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										4,527,226,42 8	
5	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										13,130,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	2 Dokumen	100 persen	4,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	2 Dokumen	100 persen	2,190,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	2 Dokumen	100 persen	3,390,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	3 Laporan	100 persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	2 Laporan	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,121,738,755	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	27 Orang/bulan	100 persen	3,038,867,755	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	2 Dokumen	100 persen	82,871,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							65,570,000		
5	1	1	2.0 5	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	3 Dokumen	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	1	2.0 5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	9 Orang	100 persen	63,570,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							494,399,773		
5	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	4 Paket	100 persen	2,267,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	5 Paket	100 persen	61,616,623	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	3 Paket	100 persen	44,583,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	3 Laporan	100 persen	385,932,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							439,783,100		
5	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	1 Laporan	100 persen	9,767,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	4 Laporan	100 persen	156,472,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	4 Laporan	100 persen	273,543,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
5	1	1	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							392,604,800			
5	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa pemenuhan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	25 Unit	100 persen	111,004,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	3 Unit	100 persen	81,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	2 Unit	100 persen	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	2		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH							1,941,258,125			
5	1	2	2.0 1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan							1,404,451,125			
5	1	2	2.0 1	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika Rancangan Maka Rancangan Teknokratik)	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	3 Dokumen	100 persen	83,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	2	2.0 1	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	2 Dokumen	100 persen	46,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	1	2	2.0 1	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	2 Berita Acara	100 persen	18,734,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	2	2.0 1	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Daerah/Lintas Daerah Perangkat Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Daerah/Lintas Daerah Perangkat Perangkat Daerah	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	11 Berita Acara	100 persen	80,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	2	2.0 1	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	22 Berita Acara	100 persen	584,999,125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	2	2.0 1	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	21 Usulan	100 persen	8,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	2	2.0 1	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD /RKPD)	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	4 Dokumen	100 persen	581,418,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	2	2.0 2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							162,190,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	1	2	2.0 2	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	3 Masukan	100 persen	135,846,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	2	2.0 2	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	1 Orang	100 persen	26,344,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	2	2.0 3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah							374,617,000		
5	1	2	2.0 3	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	4 Laporan	100 persen	293,561,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	2	2.0 3	2	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kerja Sama yang Daerah Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	1 Kerja Sama	100 persen	5,026,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	2	2.0 3	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		100 persen	4 Laporan	100 persen	76,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							2,819,210,100		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	1	3	2.0 1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								1,361,014,600	
5	1	3	2.0 1	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	3 Dokumen	100 persen	676,413,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	3	2.0 1	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	3 Perangkat Daerah	100 persen	22,554,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	3	2.0 1	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	21 Perangkat Daerah	100 persen	22,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	3	2.0 1	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	3 Dokumen	100 persen	305,331,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	1	3	2.0 1	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	3 Perangkat Daerah	100 persen	21,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	3	2.0 1	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	21 Perangkat Daerah	100 persen	84,137,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	3	2.0 1	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	5 Laporan	100 persen	229,048,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	3	2.0 2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							961,751,500		
5	1	3	2.0 2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	4 Dokumen	100 persen	427,402,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	1	3	2.0 2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	3 Perangkat Daerah	100 persen	8,876,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	3	2.0 2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	3 Perangkat Daerah	100 persen	87,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	3	2.0 2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	2 Laporan	100 persen	36,535,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	3	2.0 2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	2 Dokumen	100 persen	255,047,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	1	3	2.0 2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	3 Perangkat Daerah	100 persen	8,876,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	3	2.0 2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	4 Perangkat Daerah	100 persen	92,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	3	2.0 2	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	3 Laporan	100 persen	45,705,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	3	2.0 3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							496,444,000		
5	1	3	2.0 3	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	4 Dokumen	100 persen	272,866,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	1	3	2.0 3	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	2 Perangkat Daerah	100 persen	8,876,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	3	2.0 3	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	2 Perangkat Daerah	100 persen	54,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	3	2.0 3	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang disusun	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	2 Dokumen	100 persen	17,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	3	2.0 3	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	1 Dokumen	100 persen	29,176,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	1	3	2.0 3	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Dokumen Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	1 Dokumen	100 persen	8,876,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	3	2.0 3	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Dokumen Monitoring Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	3 Dokumen	100 persen	63,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	1	3	2.0 3	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang disusun	Persentase Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		95 persen	4 Dokumen	100 persen	41,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							1,779,800,000		
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							1,779,800,000		
5	5	2	2.0 1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan							1,087,969,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	5	2	2.0 1	1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Presentase Pemanfaatan hasil kelitbangan perencanaan dasar		100 persen	3 Laporan	80 persen	563,592,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	5	2	2.0 1	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Presentase Pemanfaatan hasil kelitbangan perencanaan dasar		100 persen	1 Laporan	80 persen	308,052,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	5	2	2.0 1	7	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Presentase Pemanfaatan hasil kelitbangan perencanaan dasar		100 persen	1 Laporan	80 persen	102,013,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	5	2	2.0 1	1 2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Presentase Pemanfaatan hasil kelitbangan perencanaan dasar		100 persen	2 Laporan	80 persen	114,312,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	5	2	2.0 2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan							100,000,000		
5	5	2	2.0 2	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Presentase Pemanfaatan hasil kelitbangan perencanaan dasar		100 persen	1 Dokumen	80 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
5	5	2	2.0 3		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					190,991,000				
5	5	2	2.0 3	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Presentase Pemanfaatan hasil dasar kelitbang perencanaan		100 persen	1 Dokumen	80 persen	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	5	2	2.0 3	1 3	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Presentase Pemanfaatan hasil dasar kelitbang perencanaan		100 persen	1 Dokumen	80 persen	90,991,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	5	2	2.0 4		Pengembangan Inovasi dan Teknologi					400,840,000				
5	5	2	2.0 4	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Presentase Pemanfaatan hasil dasar kelitbang perencanaan		100 persen	4 Dokumen	80 persen	380,614,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	5	2	2.0 4	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Presentase Pemanfaatan hasil dasar kelitbang perencanaan		100 persen	1 Laporan	80 persen	20,226,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL												11,067,494,653		
SEKRETARIAT DAERAH														
4					UNSUR PEDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	1				SEKRETARIAT DAERAH								1,799,674,030	
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								270,025,200	
4	1	0 1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								25,150,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Dokumen		25,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah								122,619,600	
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		3 Paket		4,299,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		117,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								80,955,600	
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		10,528,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 0 1 1 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		69,976,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					41,300,000	
4 0 1 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Unit		25,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 0 1 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		23 Unit		15,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	2		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					1,529,648,830	
4	1	2	2.0 1	Administrasi Tata Pemerintahan					1,331,093,030	
4 0 1 2 1 1	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		4 Dokumen		261,422,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Dokumen		657,287,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		4 Dokumen		412,383,270	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
4 01 02 2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah								198,555,800	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		13 Dokumen		195,555,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Laporan		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									1,799,674,030	
4										UNSUR PEDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 1										SEKRETARIAT DAERAH
4 1 0 1										PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4 1 1 2										Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
										2,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Dokumen		2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								17,040,500	
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		12 Dokumen		14,656,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Laporan		2,384,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								1,260,000	
4	0	0	2.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		12 Laporan		1,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								284,000,000	
4	0	0	2.0	1	Sosialisasi PeraturanPerundang- Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		500 Orang		284,000,000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
4	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah								44,557,800	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 0 0 2.0 0 1 1 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Paket		7,851,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 0 0 2.0 0 1 1 6 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Dokumen		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 0 0 2.0 0 1 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		10 Laporan		33,706,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 1 1 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								63,992,600	
4 0 0 2.0 0 1 1 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		9,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		54,902,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								31,600,000	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Unit		18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		20 Unit		13,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								921,627,572		
4 01 02 2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								921,627,572		
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		500 Dokumen		347,025,830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		5 Kasus		349,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		500 Dokumen		224,901,742	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
TOTAL									1,366,078,472		
4					UNSUR PEDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
4 1					SEKRETARIAT DAERAH					42,256,818,807	
4 1 0 1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					353,904,100	
4 1 1 2					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2,800,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Dokumen		2,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								38,820,000	
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Dokumen		38,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah								126,594,500	
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Paket		7,694,500	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Paket		2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Dokumen		1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 0 0 2.0 0 1 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		111,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 1 1 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								143,039,600	
4 0 0 2.0 0 1 1 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Laporan		15,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 0 0 2.0 0 1 1 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Laporan		127,839,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 1 1 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								42,650,000	
4 0 0 2.0 0 1 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Unit		25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		26 Unit		17,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								41,902,914,707	
4 01 02 2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								41,902,914,707	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		24 Dokumen		40,659,912,207	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 02 2.02 02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		5 Dokumen		558,828,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 02 2.02 03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Dokumen		684,174,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									42,256,818,807	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
4														
4	1										434,504,750			
4	1	0									294,826,750			
4	1	1	2								27,476,000			
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Dokumen		27,476,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2										2,880,000	
4	0	0	2.0	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		2,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2										150,556,350	
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		3 Paket		4,998,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Paket		3,830,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Laporan		3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 0 0 2.0 0 1 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		3 Laporan		138,128,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 1 1 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								76,964,400	
4 0 0 2.0 0 1 1 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		2,976,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 0 0 2.0 0 1 1 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Laporan		8,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 0 0 2.0 0 1 1 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Laporan		65,588,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 1 1 2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								36,950,000	
4 0 0 2.0 0 1 1 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Unit		24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		19 Unit		12,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								139,678,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 01 03 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								119,328,000	
4 01 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		5 Dokumen		20,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		4 Laporan		81,934,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Dokumen		16,634,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 03 2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								20,350,000	
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Dokumen		4,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		2 Dokumen		7,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		2 Dokumen		8,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									434,504,750	
4										UNSUR PEDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 1										SEKRETARIAT DAERAH
4 1 0 1										PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4 1 1 2										Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4 0 0 2.0 0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Dokumen		1,872,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 1 1 2										Administrasi Umum Perangkat Daerah
									65,080,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		3 Paket		4,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Paket		1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		3 Laporan		59,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							407,751,600		
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		210,986,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		196,765,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							50,800,000		
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Unit		20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 0 0 2.0 0 1 1 9 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		28 Unit		30,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 1 3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								222,555,500	
4 1 3 2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								53,300,000	
4 0 0 2.0 0 1 3 2 3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Laporan		53,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 1 3 2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								169,255,500	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		125 Dokumen	/Paket	84,208,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Dokumen/	Laporan	25,642,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 03 2.03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		180 Orang		59,405,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									748,059,100	
4	UNSUR PEDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 1	SEKRETARIAT DAERAH								690,579,800	
4 1 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								690,579,800	
4 1 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								18,122,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 0 1 1 2 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		12 Dokumen		18,122,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								4,550,000	
4 0 1 1 5 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Paket		4,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah								42,275,700	
4 0 1 1 6 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Paket		283,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 0 1 1 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Paket		5,794,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 0 1 1 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Paket		3,403,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 0 1 1 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Laporan		4,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 0 1 1 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Laporan		27,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					105,637,600	
4 0 1 1 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Laporan		210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 0 1 1 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		9,988,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 0 1 1 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Laporan		95,439,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					41,600,000	
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Unit		25,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		24 Unit		16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	01	01	2.13	Penataan Organisasi					478,394,500	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Dokumen		58,384,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Laporan		351,668,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Dokumen		57,542,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Dokumen		10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			
TOTAL									690,579,800				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan					
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4	1		SEKRETARIAT DAERAH								6,827,076,871		
4	1	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								6,827,076,871		
4	1	1	2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								13,035,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		3 Dokumen		3,065,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		1 Dokumen		2,477,500	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum
4	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		1 Dokumen		1,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		1 Dokumen		641,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan		1 Dokumen		641,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
4 0 1 1 2.0 1 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		5 Laporan		2,838,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
4 0 1 1 2.0 1 0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		8 Laporan		1,396,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
4	1	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						32,370,000	
4 0 1 1 2.0 2 0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		6 Dokumen		26,445,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
4 0 1 1 2.0 2 0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Dokumen		2,124,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
4 0 1 1 2.0 2 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		6 Laporan		3,801,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
4	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4,476,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Dokumen		2,238,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Laporan		2,238,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								112,595,150	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Paket		112,595,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								752,725,733	
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		4 Paket		40,762,733	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.06 05	Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		3 Paket		11,025,000	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmu m
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Dokumen		44,895,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		4,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		24 Laporan		651,093,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								851,407,200	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Laporan		22,454,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		24 Laporan		127,288,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Laporan		12,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		36 Laporan		689,414,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								1,157,350,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		4 Unit		300,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		16 Unit		818,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		47 Unit		38,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								1,590,056,005	
4 01 01 2.11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Orang/Bulan	n	769,535,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		1 Paket		36,194,325	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
4 01 01 2.11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		8 Orang		60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
4 01 01 2.11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		2 Orang/Bulan	n	724,326,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
4 01 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								2,313,061,783		
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		12 Laporan		1,320,121,783	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		12 Laporan		992,940,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
TOTAL									6,827,076,871		
4	UNSUR PEDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4 1	SEKRETARIAT DAERAH									19,045,977,387	
4 1 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									19,045,977,387	
4 1 1 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									20,010,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Dokumen		10,890,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Dokumen		6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		2 Laporan		3,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8,662,789,872		
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		85 Orang/bulan		8,563,054,672	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Dokumen		83,263,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		3 Dokumen		9,552,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		4 Laporan		6,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							14,400,000		
4	0	0	2.0	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		2 Dokumen		14,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah							2,574,620,006		
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		1 Paket		39,925,673	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		2 Paket		25,917,748	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		7 Paket		625,955,700	Dana Transfer Umum-Dana AlokasiUmum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		4 Paket		142,702,185	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		12 Dokumen		3,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		4 Paket		85,107,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		12 Laporan		1,254,202,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		12 Laporan		396,848,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1,159,964,297	
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman		247 Unit		1,159,964,297	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,261,459,600	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		1,010,430,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		4 Laporan		153,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		12 Laporan		1,097,079,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2,157,162,582	
4 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		5 Unit		115,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		160 Unit		970,244,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		42 Unit		77,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		87 Unit		211,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		6 Unit		783,288,582	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah								2,195,571,030	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		15 Paket		1,231,472,657	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		15 Paket		886,266,693	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan		5 Paket		77,831,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL									19,045,977,387	

KECAMATAN LUMAJANG

7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN					6,792,656,708	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,367,261,70	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
									8					
7	1	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					24,648,000					
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	3 Dokumen	100 %	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Dokumen	100 %	3,512,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	2 Dokumen	100 %	3,012,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
														Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Laporan	100 %	2,624,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	12 Laporan	100 %	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,815,121,708		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	59 Orang/bulan	100 %	5,756,289,708	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	12 Dokumen	100 %	37,824,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	12 Dokumen	100 %	11,256,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	12 Dokumen	100 %	4,272,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	5 Laporan	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	2 Dokumen	100 %	780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	12 Laporan	100 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							6,000,000		
7	1	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	2 Dokumen	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	2 Laporan	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							19,000,000		
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	2 Paket	100 %	16,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 5	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							108,500,000		
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Paket	100 %	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Paket	100 %	29,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Paket	100 %	17,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Laporan	100 %	10,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Laporan	100 %	46,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							50,000,000		
7	1	1	2.0 7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Persentase fasilitas pengadaan BMD	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase fasilitas pengadaan BMD	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	2 Unit	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							278,742,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	2 Laporan	100 %	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	3 Laporan	100 %	72,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	3 Laporan	100 %	203,142,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							65,250,000		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	3 Unit	100 %	40,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	17 Unit	100 %	24,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							9,000,000		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							9,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	2	2.0 1	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	90 %	1 Dokumen	100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							247,225,000		
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							189,750,000		
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	86 %		100 %	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	86 %	1 Dokumen	100 %	3,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	86 %	1 Laporan	100 %	184,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							57,475,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	86 %	1 Keluarga	100 %	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	86 %	1 Keluarga	100 %	21,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	86 %	1 Keluarga	100 %	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	86 %	1 Keluarga	100 %	2,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	1 1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	86 %	1 Keluarga	100 %	2,825,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	1 2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	86 %	1 Keluarga	100 %	16,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								20,820,000	
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								20,820,000	
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	86 %	1 Laporan	100 %	20,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								7,950,000	
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								7,950,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Dokumen	100 %	7,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								140,400,000			
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								140,400,000			
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	82 %	3 Dokumen	100 %	140,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				82 %						
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu				82 %						
TOTAL												6,792,656,708				
KELURAHAN CITRODIWANGSAN																
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN										928,229,300	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										274,946,800	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										1,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	2 Dokumen	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							22,500,000		
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	12 Dokumen	100 %	22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							38,550,000		
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	1 Paket	100 %	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	1 Paket	100 %	19,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	1 Paket	100 %	5,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	1 Laporan	100 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	1 Laporan	100 %	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							154,216,800		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	2 Laporan	100 %	25,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	3 Laporan	100 %	128,776,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							58,180,000		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	3 Unit	100 %	4,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	17 Unit	100 %	9,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	100 %	1 Unit	100 %	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								653,282,500	
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								625,132,500	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat		Persentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	86 %		100 %	4,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwangsan	86 %	4 Pokmas / Ormas	100 %	620,282,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								28,150,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	3	2.0 6	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwang an	86 %	1 Keluarga	100 %	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	1	3	2.0 6	1 2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Citrodiwang an	86 %	1 Keluarga	100 %	24,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
TOTAL												928,229,300			
KELURAHAN DITOTRUNAN															
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN									635,625,600	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									277,399,600	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									4,500,000	
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 %	2 Dokumen	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		100 %	12 Laporan	100 %	500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								22,500,000	
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 %	12 Dokumen	100 %	22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,000,000	
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 %	12 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah								36,820,000	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 %	1 Paket	100 %	1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 %	1 Paket	100 %	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 %	1 Paket	100 %	5,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 %	1 Laporan	100 %	8,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							171,979,600		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 %	2 Laporan	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 %	2 Laporan	100 %	18,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 %	3 Laporan	100 %	150,639,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	1	2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							38,600,000			
7	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 %	3 Unit	100 %	4,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 %	16 Unit	100 %	9,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	100 %	1 Unit	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							348,361,000			
7	1	3	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							332,161,000			
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat		Persentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	86 %		100 %	4,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	86 %	4 Pokmas / Ormas	100 %	327,311,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							16,200,000			
7	1	3	2.0 6	1 2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	86 %	1 Keluarga	100 %	16,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							9,865,000			
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							9,865,000			
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Lumajang, Ditotrunan	86 %	1 Laporan	100 %	9,865,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
TOTAL												635,625,600			
KELURAHAN JOGOTRUNAN															
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN									903,097,400	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									307,462,400	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									2,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							28,194,000		
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	100 %	12 Dokumen	100 %	24,894,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	100 %	12 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	100 %	5 Laporan	100 %	800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1,500,000		
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	100 %	12 Laporan	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							4,200,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	100 %	1 Paket	100 %	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							33,366,000		
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	100 %	1 Paket	100 %	2,775,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	100 %	1 Paket	100 %	19,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	100 %	1 Paket	100 %	8,011,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	100 %	1 Laporan	100 %	3,280,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							188,902,400		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	100 %	4 Laporan	100 %	18,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	100 %	3 Laporan	100 %	170,102,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							48,800,000		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	100 %	3 Unit	100 %	4,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	100 %	16 Unit	100 %	6,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	100 %	1 Unit	100 %	38,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							585,135,000		

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	3	2.0 2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							561,735,000			
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	86 %	4 Lembaga Masyarakat	100 %	6,615,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	86 %	4 Pokmas / Ormas	100 %	555,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							23,400,000			
7	1	3	2.0 6	1 2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	86 %	1 Keluarga	100 %	23,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							10,500,000				
7	1	4	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							10,500,000			
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogotrunan	86 %	1 Laporan	100 %	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL												903,097,400		

KELURAHAN JOGOYUDAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
7		UNSUR KEWILAYAHAN												
7	1	KECAMATAN								554,182,000				
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								223,682,000			
7	1	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								4,500,000		
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	2 Dokumen	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	12 Laporan	100 %	500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								25,758,000		
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	12 Dokumen	100 %	23,208,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	5 Laporan	100 %	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							43,820,000		
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Paket	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Paket	100 %	16,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Paket	100 %	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Laporan	100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Laporan	100 %	10,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
					perkantoran									
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							127,254,000		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	3 Laporan	100 %	20,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	4 Laporan	100 %	106,914,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							22,350,000		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	3 Unit	100 %	4,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	16 Unit	100 %	8,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	100 %	1 Unit	100 %	9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							313,150,000		
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							289,480,000		
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat		Persentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	86 %		100 %	6,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	86 %	4 Pokmas / Ormas	100 %	282,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							23,670,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	86 %	1 Keluarga	100 %	2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	86 %	1 Keluarga	100 %	3,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	86 %	1 Keluarga	100 %	1,370,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	3	2.0 6	1 2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	86 %	1 Keluarga	100 %	16,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							17,350,000			
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							17,350,000			
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Lumajang, Jogoyudan	86 %	1 Laporan	100 %	17,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
TOTAL												554,182,000			
KELURAHAN TOMPOKERSAN															
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN									1,248,988,700	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									358,091,700	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									4,078,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 %	1 Dokumen	100 %	2,255,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		100 %	2 Dokumen	100 %	1,323,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 %	12 Laporan	100 %	500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							30,711,000		
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 %	12 Laporan	100 %	25,704,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 %	12 Dokumen	100 %	2,457,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 %	5 Laporan	100 %	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							5,904,000		
7	1	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 %	2 Dokumen	100 %	1,476,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 %	2 Laporan	100 %	1,476,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 %	12 Laporan	100 %	2,952,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							41,497,700		
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	2,145,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 %	1 Paket	100 %	21,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 %	1 Paket	100 %	4,355,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD		100 %	1 Laporan	100 %	4,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 %	1 Laporan	100 %	9,717,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							238,351,000		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 %	2 Laporan	100 %	2,403,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 %	3 Laporan	100 %	22,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 %	3 Laporan	100 %	213,828,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							37,550,000		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 %	3 Unit	100 %	4,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 %	16 Unit	100 %	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersa n	100 %	1 Unit	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							871,697,000		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							842,572,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	86 %	4 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	7,515,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	86 %	4 Pokmas / Ormas	100 %	835,057,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							29,125,000		
7	1	3	2.0 6	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	86 %	1 Keluarga	100 %	3,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	86 %	1 Keluarga	100 %	2,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	86 %	1 Keluarga	100 %	2,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	86 %	1 Keluarga	100 %	4,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	86 %	1 Keluarga	100 %	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	3	2.0 6	1 2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	86 %	1 Keluarga	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								19,200,000		
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								19,200,000		
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Lumajang, Tompokersan	86 %	1 Laporan	100 %	19,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
TOTAL												1,248,988,700			
KELURAHAN ROGOTRUNAN															
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN										656,885,300
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										212,395,300
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										3,000,000
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan	100 %	1 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan	100 %	12 Laporan	100 %	500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							25,292,500		
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan	100 %	12 Dokumen	100 %	22,792,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan	100 %	12 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							3,900,000		
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan	100 %	1 Paket	100 %	3,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							29,900,000		
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan	100 %	1 Paket	100 %	1,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman	100 %	1 Paket	100 %	18,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman	100 %	1 Paket	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman	100 %	1 Laporan	100 %	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							125,402,800		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman	100 %	3 Laporan	100	18,488,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotruman	100 %	3 Laporan	100	106,914,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							24,900,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Rogotruman	100 %	3 Unit	100 %	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Rogotruman	100 %	16 Unit	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Rogotruman	100 %	1 Unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								433,540,000	
7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								418,440,000	
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Lumajang, Rogotruman	86 %	4 Lembaga Masyarakat	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Fasilitas Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Lumajang, Rogotruman	86 %	4 Pokmas / Ormas	100 %	415,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								15,100,000	
7	1	3	2.0 6	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan	86 %	1 Keluarga	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan	86 %	1 Keluarga	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrungan	86 %	1 Keluarga	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan	86 %	1 Keluarga	100 %	500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	1 2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan	86 %	1 Keluarga	100 %	10,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								10,950,000	
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								10,950,000	
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan	86 %	1 Laporan	100 %	3,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Lumajang, Rogotrunan	86 %	1 Laporan	100 %	7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL												656,885,300		
KELURAHAN KEPUHARJO														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
7 1		KECAMATAN							722,841,527			
7 1 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							385,432,400			
7 1 1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							4,500,000			
7 1 1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7 1 1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	2 Dokumen	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7 1 1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	12 Laporan	100 %	500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7 1 1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							27,550,000			
7 1 1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	12 Dokumen	100 %	22,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7 1 1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	12 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	5 Laporan	100 %	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							6,000,000		
7	1	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	2 Dokumen	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	2 Laporan	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase fasilitas Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	12 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							48,630,000		
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Paket	100 %	1,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Paket	100 %	17,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang dan Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Paket	100 %	4,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Laporan	100 %	8,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Laporan	100 %	16,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							185,902,400		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	2 Laporan	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	3 Laporan	100 %	12,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	4 Laporan	100 %	170,702,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							112,850,000		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	3 Unit	100 %	4,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	16 Unit	100 %	8,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	100 %	1 Unit	100 %	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							321,759,127		
7	1	3	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							275,669,127		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat		Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	86 %		100 %	5,525,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 2	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	86 %	4 Pokmas / Ormas	100 %	270,144,127	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							46,090,000		
7	1	3	2.0 6	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	86 %	1 Keluarga	100 %	5,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	86 %	1 Keluarga	100 %	6,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	86 %	1 Keluarga	100 %	6,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	86 %	1 Keluarga	100 %	5,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	1 2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kelurahan	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	86 %	1 Keluarga	100 %	22,165,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							15,650,000		
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							15,650,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Lumajang, Kepuharjo	86 %	1 Laporan	100 %	15,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
TOTAL													722,841,527		
KECAMATAN CANDIPURO															
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN									2,442,661,172	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									2,000,721,172	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									8,500,000	
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	3 Dokumen	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase fasilitasi kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase fasilitasi kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	3 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,539,217,163		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	15 Orang/bulan	100 %	1,517,867,163	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	12 Dokumen	100 %	15,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	1 Dokumen	100 %	1,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	5 Laporan	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1,980,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase fasilitas pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	12 Laporan	100 %	1,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							110,741,309		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas pemenuhan administrasi umum	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	1 Paket	100 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas pemenuhan administrasi umum	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	2 Paket	100 %	27,996,309	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Barang dan Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase fasilitas pemenuhan administrasi umum	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	1 Paket	100 %	13,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase fasilitas pemenuhan administrasi umum	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	1 Paket	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase fasilitas pemenuhan administrasi umum	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	12 Laporan	100 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitas pemenuhan administrasi umum	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	12 Laporan	100 %	55,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							38,000,000		
7	1	1	2.0 7	5	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase fasilitas pemenuhan pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	1 Unit	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase fasilitas pemenuhan pengadaan Barang Milik Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	3 Unit	100 %	28,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							230,007,700		
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase fasilitas pemenuhan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	12 Laporan	100 %	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase fasilitas pemenuhan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro	80 %	3 Laporan	100 %	37,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	12 Laporan	100 %	189,807,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							72,275,000		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	8 Unit	90 %	36,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	5 Unit	90 %	3,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	2 Unit	90 %	32,925,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							12,600,000		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							12,600,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	81 %	12 Laporan	81 %	12,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							148,740,000		
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							112,840,000		
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	92 %	8 Lembaga Kemasyarakatan	92 %	1,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	92 %	1 Dokumen	92 %	6,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	92 %	5 Laporan	92 %	104,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							35,900,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat KecamatanPancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	92 %	50 Keluarga	90 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat KecamatanPancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	92 %	50 Keluarga	90 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat KecamatanPancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	92 %	50 Keluarga	90 %	3,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat KecamatanPancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	92 %	50 Keluarga	90 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat KecamatanPancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	92 %	50 Keluarga	90 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat KecamatanPancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	92 %	50 Keluarga	90 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat KecamatanPancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	92 %	50 Keluarga	90 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat KecamatanPancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	92 %	50 Keluarga	90 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat KecamatanPancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	92 %	50 Keluarga	90 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6	1 0	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat KecamatanPancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	92 %	50 Keluarga	90 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	1 1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat KecamatanPancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	92 %	50 Keluarga	90 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	1 2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat KecamatanPancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	92 %	50 Keluarga	90 %	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							8,600,000		
7	1	4	7.0 3		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							8,600,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	4	7.0 3	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	persentase pemenuhan upaya trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	1 Fasilitasi	8,600,000	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								2,400,000	
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								2,400,000	
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	81 %	1 Dokumen	81 %	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								269,600,000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								269,600,000	
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lumajang, Candipuro, Semua Kelurahan	80 %	10 Dokumen	8 Desa	252,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu				60 %				
						Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu				80 %				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
7	1	6	2.0 1	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBdes Tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lumajang, Candipuro, Candipuro	80 %	1 Dokumen	8 Desa	17,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
					Persentase Desa yang menetapkan LPPdes Tepat waktu			Kab. Lumajang, Candipuro, Penanggal	60 %						
					Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepat waktu					80 %					
TOTAL												2,442,661,172			

KECAMATAN GUCIALIT

7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN								2,110,965,619	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1,742,355,619	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								7,000,000	
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Koordinasi dan Hasil yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	3 Dokumen	100 persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Fasilitasi Koordinasi dan Hasil yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	5 laporan	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,298,979,620		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	12 Orang/ 12 bulan	100 Persen	1,267,579,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	29,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	6 Laporan	100 Persen	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								1,500,000		
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									10,500,000	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Oprasional Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	30 Paket	100 persen	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									62,375,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Fasilitas Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	1 Paket	100 Persen	1,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Fasilitas Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	1 paket	100 Persen	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Fasilitas Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	1 Paket	100 Persen	5,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Fasilitas Koordinasi dan yang ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	136 kali	100 Persen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								235,642,400		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	27,849,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	207,793,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								126,358,599		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase fasilitas koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	7 Unit	100 Persen	36,323,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase fasilitas koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	16 Unit	100 Persen	10,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	2 Unit	100 Persen	75,535,199	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	6 Unit	100 Persen	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							5,915,000		
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							5,915,000		
7	1	2	2.0 1	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	2 Dokumen	100 Persen	5,915,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							122,800,000		
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							105,800,000		
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rata-rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	9 Lembaga	100 Persen	4,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rata-rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti		100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	5,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rata-rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	6 Laporan	100 Persen	95,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 5		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							2,000,000		
7	1	3	2.0 5	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Rata-rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Hasil dan yang Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 5	3	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Rata-rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Hasil dan yang Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							15,000,000		
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rata-rata Persentase Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase hasil dan yang Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	36 Keluarga	100 Persen	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							15,695,000		
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							15,695,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil dan yang fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	1 Laporan	100 persen	8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase hasil dan yang fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	3 Laporan	100 persen	7,695,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								4,200,000			
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								4,200,000			
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Umum Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Hasil dan yang fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	4,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								220,000,000			
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								220,000,000			
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa tertib Administrasi	Kab. Lumajang, Gucialit, Gucialit	100 persen	12 Dokumen	88.88 persen	220,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
TOTAL												2,110,965,619				
KECAMATAN JATIROTO																
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN										2,044,632,430	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,753,622,43	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
											0			
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							7,000,000		
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	2 Dokumen	93.33 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	1 Dokumen	93.33 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	5 Laporan	93.33 %	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,197,949,473		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	10 Orang/bulan	93.33 %	1,174,003,473	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	12 Dokumen	93.33 %	21,276,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	12 Dokumen	93.33 %	1,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	5 Laporan	93.33 %	750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2,500,000		
7	1	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	12 Laporan	93.33 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	12 Laporan	93.33 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							6,250,000		
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	25 Paket	93.33 %	6,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							65,203,200		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase hasil dan yang koordinasi yang ditindaklanjuti		100 %	1 Paket	93.33 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase hasil dan yang koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	2 Paket	93.33 %	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase hasil dan yang koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	2 Paket	93.33 %	8,823,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase hasil dan yang koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	12 Laporan	93.33 %	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase hasil dan yang koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	12 Laporan	93.33 %	22,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							41,000,000		
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase hasil dan yang koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	3 Unit	93.33 %	41,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							234,199,757			
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	3 Laporan	93.33 %	47,659,757	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	12 Laporan	93.33 %	186,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							199,520,000			
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	8 Unit	93.33 %	29,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	17 Unit	93.33 %	11,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	1 Unit	93.33 %	153,270,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 9	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase hasil dan yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	1 Unit	93.33 %	5,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							1,200,000		
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							1,200,000		
7	1	2	2.0 1	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase hasil dan yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	6 Dokumen	93.33 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							111,750,000		
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							95,250,000		
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase hasil dan yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan	91.56 %	9 Lembaga Masyarakat	93.33 %	600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rata - rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase hasil dan yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan	91.56 %	1 Dokumen	93.33 %	3,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rata - rata prsentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil dan yang fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan	91.56 %	6 Laporan	93.33 %	90,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							16,500,000		
7	1	3	2.0 6	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Rata - rata prsentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase hasil dan yang fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	91.56 %	50 Keluarga	93.33 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Rata - rata prsentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Persentase hasil dan yang fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	91.56 %	50 Keluarga	93.33 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	1	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Rata - rata prsentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase hasil dan yang fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	91.56 %	50 Keluarga	93.33 %	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							11,680,000		
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							11,680,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	1 Laporan	93.33 %	7,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase fasilitasi koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Jatiroto	100 %	2 Laporan	93.33 %	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							2,400,000		
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							2,400,000		
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	93.33 %	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							163,980,000		
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							163,980,000		
7	1	6	2.0 1	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	94.44 %	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu					83 %				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu				100 %				
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	94.44 %	152,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu				83 %				
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu				100 %				
7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan	100 %	6 Dokumen	94.44 %	2,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu				83 %				
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu				100 %				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	6	2.0 1	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	94.44 %	5,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu				83 %				
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu				100 %				
7	1	6	2.0 1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	94.44 %	600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu				83 %				
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu				100 %				
7	1	6	2.0 1	1 8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Jatiroto, Semua Kelurahan	100 %	6 Laporan	94.44 %	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu				83 %				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		waktu												
		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu				100 %								
TOTAL									2,044,632,430					
KECAMATAN KEDUNGGAJANG														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN					2,298,161,786				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,836,648,786				
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6,200,000				
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 dokumen	100 Persen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Meningkatnya Persentase fasilitas dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	1 dokumen	100 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 laporan	100 Persen	2,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,398,951,596		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Kedungjajang	100 Persen	12 orang / bulan	100 Persen	1,372,494,346	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 dokumen	100 Persen	24,457,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 laporan	100 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2,000,000		
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 laporan	100 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah								78,876,291		
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 paket	100 Persen	3,546,672	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Paket	100 Persen	32,474,973	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Meningkatnya Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 paket	100 Persen	7,044,746	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 laporan	100 Persen	2,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Kedungjajang	100 Persen	3 laporan	100 Persen	33,109,900	
7	1	1	2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								233,288,400		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Meningkatnya Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	44,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Meningkatnya Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	189,068,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							117,332,499		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Meningkatnya Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	6 unit/tahun	100 Persen	33,542,499	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Meningkatnya Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Kedungjajang	100 Persen	21 unit	100 Persen	14,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Meningkatnya Persentase fasilitas pemeliharaan BMD		100 Persen	1 Unit	100 Persen	69,540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							10,350,000		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							10,350,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Opersentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Meningkatnya Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Kedungjajang	90 Persen	6 Laporan	90 Persen	10,350,000		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					0 Laporan				
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					6 Laporan				
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							146,863,000			
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							131,713,000			
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Kedungjajang	83 Persen	10 lembaga masyarakat	83 Persen	8,505,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					12 desa				
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Kedungjajang	83 Persen	4 Laporan	83 Persen	123,208,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 kegiatan							
7	1	3	2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					15,150,000					
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83 Persen	15 keluarga	83 Persen	8,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Kedungjajang	83 Persen	33 orang	83 Persen	6,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				105 keluarga			
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					304,300,000					
7	1	6	2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					304,300,000					
7	1	6	2.0 1	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Desa yang difasilitasi	Meningkatnya Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Kedungjajang	89 Persen	12 dokumen	12 desa	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				
										Program	Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			89 Persen	12 dokumen			
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu				89 Persen				
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		89 Persen	12 desa	12 desa	291,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				89 Persen				
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu				89 Persen				
7	1	6	2.0 1	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Meningkatnya Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lumajang, Kedungjajang, Kedungjajang	89 Persen	1 dokumen	12 desa	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				89 Persen				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
		Waktu													
		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu				89 Persen									
TOTAL									2,298,161,786						
KECAMATAN KLAKAH															
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN					2,591,280,918					
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,087,463,918					
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6,139,500					
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 persen	3 Dokumen	91 Persen	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 persen	1 Dokumen	91 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Fasilitas Koordinasi Ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 persen	5 Laporan	91 Persen	1,568,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Koordinasi Ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 persen	10 Laporan	91 Persen	1,521,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									1,633,780,628	
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	15 ASN	91 Persen	1,614,323,628	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	12 Dokumen	91 Persen	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	5 Laporan	91 Persen	1,457,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah									67,771,290	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	1 Paket	91 Persen	1,836,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	3 Paket	91 Persen	29,422,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Barang dan Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	2 Paket	91 Persen	9,182,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	1 Paket	91 Persen	1,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	12 Laporan	91 Persen	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	12 Laporan	91 Persen	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							229,776,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Fasilitas dan Koordinasi yang Ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	12 Laporan	91 Persen	32,976,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitas dan Koordinasi yang Ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	12 Laporan	91 Persen	196,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							149,996,500		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	10 Unit	91 Persen	34,336,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	8 Unit	91 Persen	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	1 Unit	91 Persen	110,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							10,360,000		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							5,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	2	2.0 1	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	1 Dokumen	91 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							5,360,000		
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pelayanan administrasi kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase hasil dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	2 Laporan	91 persen	5,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							172,132,000		
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							152,392,000		
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase hasil dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 persen	6 Lembaga	91 Persen	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase hasil dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 persen	1 Dokumen	91 Persen	13,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 persen	1 Laporan	91 Persen	134,942,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan									19,740,000	
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	100 Keluarga	91 persen	19,740,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									5,100,000	
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									5,100,000	
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	1 Laporan	91 Persen	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									7,800,000	
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									7,800,000	
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	12 Dokumen	91 Persen	7,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									308,425,000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									308,425,000	
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu	Kab. Lumajang, Klakah, Klakah	100 Persen	12 Dokumen	95.23 Persen	308,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Persentase Desa yang menetapkan LPPdes tepat waktu				95,23 Persen								
		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu				100 Persen								
TOTAL									2,591,280,918					
KECAMATAN KUNIR														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN					2,006,135,297				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,541,776,481				
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8,000,000				
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	2 Dokumen	100 persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	1 Dokumen	100 persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	2 Dokumen	100 persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	5 Laporan	100 persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	"Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah"	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	12 Laporan	100 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,183,502,239		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase hasil dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	12 bulan	92 persen	1,151,890,239	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					14 Orang/bulan			
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	"Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN"	Persentase hasil dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	12 Dokumen	92 persen	27,612,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase fasilitas dan hasil yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	5 Laporan	92 persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase fasilitas dan hasil yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	2 Dokumen	92 persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase fasilitas dan hasil yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	18 Laporan	92 persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							3,500,000		
7	1	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan BMD	Persentase fasilitas dan hasil yang ditindaklanjuti		100 persen	2 Dokumen	92 persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD	Persentase fasilitas dan hasil yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	2 Laporan	92 persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitas penatausahaan BMD	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	12 Laporan	92 persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							9,600,000		
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	"Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan"	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	1 Paket	92 persen	9,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							66,130,000		
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	1 Paket	92 persen	2,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti		100 persen	1 Paket	92 persen	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	"Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan"	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	2 Paket	92 persen	3,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti		100 persen	1 Paket	92 persen	1,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	20 Laporan	92 persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	1000 Laporan	92 persen	28,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							24,987,485		
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	"Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan"	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	2 Unit	92 persen	24,987,485	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							206,306,757		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat"	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	12 Laporan	92 persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase hasil dan yang ditindaklanjuti		100 persen	12 Laporan	92 persen	38,113,557	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	"Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"	Persentase hasil dan yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	12 Laporan	92 persen	166,693,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							39,750,000		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase hasil dan yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	8 Unit	92 persen	33,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	"Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara"	Persentase hasil dan yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	10 Unit	92 persen	6,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							16,250,000		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							9,800,000		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase hasil dan yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	12 Dokumen	92 persen	9,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							6,450,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase hasil dan yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	12 Laporan	92 persen	6,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							148,902,550		
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							132,227,550		
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase hasil dan yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	2 Lembaga Kemasyarakatan	92 persen	1,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase hasil dan yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	2 Dokumen	92 persen	7,577,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	"Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan"	Persentase hasil dan yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	12 Laporan	92 persen	122,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							16,675,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase hasil dan yang fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	3 Keluarga	92 persen	1,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase hasil dan yang fasilitasi dan Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	3 Keluarga	92 persen	1,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase hasil dan yang fasilitasi dan Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	3 Keluarga	92 persen	6,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase hasil dan yang	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	3 Keluarga	92 persen	1,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase hasil dan yang	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	3 Keluarga	92 persen	1,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase hasil dan yang	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	3 Keluarga	92 persen	1,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase hasil dan yang	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	3 Keluarga	92 persen	2,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6	1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	3 Keluarga	92 persen	1,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							6,429,266		
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							6,429,266		
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	"Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan"	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	2 Laporan	92 persen	6,429,266	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							2,400,000		
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							2,400,000		
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	"Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan"	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti		100 persen	3 Dokumen	92 persen	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							290,377,000		
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							290,377,000		
7	1	6	2.0 1	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	1 Dokumen	96.6 persen	1,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				100 persen									
		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu				100 persen									
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	1 Dokumen	96.6 persen	259,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				100 persen					
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu				100 persen					
7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	1 Dokumen	96.6 persen	19,077,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				100 persen					
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu				100 persen					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
7	1	6	2.0 1	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	1 Dokumen	96.6 persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				100 persen				
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu				100 persen				
7	1	6	2.0 1	8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Kunir, Kunir Lor	100 persen	1 Dokumen	96.6 persen	975	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				100 persen				
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu				100 persen				
TOTAL												2,006,135,297		

KECAMATAN PADANG

7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN									1,917,329,658
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									1,539,039,658

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								8,920,000	
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		0 Dokumen		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen			
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		2 Dokumen		2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan		1,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan		2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,247,398,058	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		13 Orang/bula n		1,212,678,058	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		12 Dokumen		31,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		2 Dokumen		1,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		2 Laporan		1,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2,880,000		
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		12 Laporan		2,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							3,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		6 Paket		3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah								70,366,600	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		1 Paket		2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		1 Paket		29,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		13 Paket		6,196,600	
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		12 Laporan		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		12 Laporan		25,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan				
7	1	1	2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					4,000,000		
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan	3 Unit	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					165,075,000		
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan	12 Laporan	1,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan	12 Laporan	43,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan	12 Bulan	120,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					37,400,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		7 Unit		25,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		0 Unit		11,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			17 Unit				
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							4,500,000		
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							4,500,000		
7	1	2	2.0 1	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		4 Laporan		4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							135,140,000		
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							120,440,000		
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan				675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		1 Dokumen		6,265,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		0 Laporan		113,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			6 Laporan				
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							14,700,000		
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		45 Keluarga		14,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							8,000,000		
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							8,000,000		
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan		1 Laporan		8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					2,400,000					
7	1	5	2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					2,400,000					
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan	2 jenis		2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					228,250,000					
7	1	6	2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					228,250,000					
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kab. Lumajang, Padang, Semua Kelurahan	12 Dokumen		228,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
TOTAL										1,917,329,658				
KECAMATAN PASIRIAN														
7				UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1			KECAMATAN					2,288,451,589					
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,861,817,589					
7	1	1	2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					6,950,000					
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi dokumen perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	3 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	1 Dokumen	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	2 Dokumen	100 %	1,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	4 Laporan	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,500,266,762		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	15 Orang/bulan	100 %	1,472,358,762	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	5 Dokumen	100 %	24,408,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	1 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	1 Laporan	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1,510,000		
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	4 Laporan	100 %	1,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							68,278,500		
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	3 Paket	100 %	1,070,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	3 Paket	100 %	22,042,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	2 Paket	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket yang Disediakan	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	2 Paket	100 %	996	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Fasilitas Administrasi Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	12 Laporan	100 %	40,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								223,856,000	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	12 Laporan	100 %	1,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	4 Laporan	100 %	31,880,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	3 Laporan	100 %	190,056,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								60,956,327	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	7 Unit	100 %	32,785,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	22 Unit	100 %	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya fasilitas pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	1 Unit	100 %	13,170,927	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							7,800,000		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							3,900,000		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	95 %	1 Dokumen	95 %	3,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							3,900,000		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya pemenuhan urusan pemerintahan yang dillimpahkan kepada Camat	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	100 %	12 Laporan	90 %	3,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							135,249,000		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							109,530,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	95 %	3 Dokumen	95 %	109,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							25,719,000		
7	1	3	2.0 6	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	95 %	240 Keluarga	90 %	3,499,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	95 %	240 Keluarga	90 %	13,445,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	95 %	240 Keluarga	90 %	2,025,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	95 %	240 Keluarga	90 %	6,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								10,000,000	
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								10,000,000	
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	95 %	1 Laporan	95 %	8,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	95 %	2 Laporan	95 %	1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								4,800,000	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
7	1	5	2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					4,800,000						
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	95 %	12 Dokumen	95 %	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					268,785,000						
7	1	6	2.0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					268,785,000						
7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes, LPPDes Tepat Waktu	Kab. Lumajang, Pasirian, Pasirian	95 %	12 Dokumen	95 %	268,785,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
					Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				95 %						
					Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu				95 %						
								TOTAL	2,288,451,589						
KECAMATAN PASRUJAMBE															
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN									2,053,148,794	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									1,704,904,794	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									5,721,750	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen	100 persen	2,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 persen	1,165,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	100 persen	474	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Laporan	100 persen	1,612,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,313,063,006		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Orang/bulan	100 persen	1,284,270,506	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 persen	26,544,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 persen	1,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Laporan	100 persen	898,5	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1,896,000		
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 persen	1,896,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							10,500,000		
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 persen	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							67,143,858		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 persen	2,450,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 persen	26,154,058	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 persen	4,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	100 persen	1,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 persen	1,929,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 persen	31,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							262,528,180		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 persen	780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Presentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 persen	32,617,780	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Presentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Laporan	100 persen	229,130,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							44,052,000		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Presentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Unit	100 persen	34,652,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Unit	100 persen	9,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							9,900,000		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							9,900,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Lumajang, Pasuruan, Semu Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 persen	9,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							137,244,000		
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							114,964,000		
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Pasuruan, Semu Kelurahan	90 Persen	7 LSM	100 persen	525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Pasuruan, Semu Kelurahan	90 Persen	1 Dokumen	100 persen	3,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Pasuruan, Semu Kelurahan	90 Persen	12 Laporan	100 persen	110,929,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							22,280,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	90 Persen	7 Keluarga	100 persen	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	90 Persen	7 Keluarga	100 persen	1,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	90 Persen	7 Keluarga	100 persen	4,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	90 Persen	7 Keluarga	100 persen	1,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	90 Persen	7 Keluarga	100 persen	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	90 Persen	7 Keluarga	100 persen	2,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	1 2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Pasrujambe, Semua Kelurahan	90 Persen	7 Keluarga	100 persen	9,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							11,350,000		
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							11,350,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Pasuruan, Semu Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	12 Kali	6,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Pasuruan, Semu Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	12 Kali	4,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								2,400,000	
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								2,400,000	
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Lumajang, Pasuruan, Semu Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	12 Kali	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								187,350,000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								187,350,000	
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	desa yang menyusun dokumen administrasi desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Pasuruan, Semu Kelurahan	86 Persen	12 Dokumen	6 desa	187,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu					86 Persen				
					Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu					86 Persen				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
		Waktu													
TOTAL									2,053,148,794						
KECAMATAN PRONOJIWO															
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN						2,657,535,411				
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,291,025,411				
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13,000,000				
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen	93 Persen	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	93 Persen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	93 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Laporan	93 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	93 Persen	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,508,367,631		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	14 Orang/bulan	93 Persen	1,470,255,631	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	93 Persen	20,676,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	93 Persen	6,936,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	93 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Laporan	93 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	93 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	18 Laporan	93 Persen	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									7,000,000	
7	1	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Dokumen	93 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	93 Persen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	93 Persen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									9,600,000	
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Paket	93 Persen	9,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah									105,100,000	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Paket	93 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Paket	93 Persen	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Paket	93 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Paket	93 Persen	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	93 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	93 Persen	60,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									6,000,000	
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Unit	93 Persen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									254,067,600	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	93 Persen	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	93 Persen	29,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	93 Persen	219,267,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								387,890,180		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	6 Unit	93 Persen	32,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Unit	93 Persen	18,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Pronojiwo	100 Persen	1 Unit	93 Persen	337,470,180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								15,350,000			
7	1	2	2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								3,600,000			
7	1	2	2.0 1	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	90 Persen	1 Dokumen	93 Persen	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2	2.0 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								2,250,000			
7	1	2	2.0 3	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	90 Persen	1 Dokumen	93 Persen	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2	2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								9,500,000			
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	90 Persen	2 Laporan	93 Persen	9,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								167,060,000			
7	1	3	2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								119,010,000			
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat		Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	88 Persen		93 Persen	450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	3	2.0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	88 Persen	1 Dokumen	93 Persen	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	88 Persen	7 Laporan	93 Persen	114,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 5		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)								11,700,000		
7	1	3	2.0 5	2	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	88 Persen	4 Dokumen	93 Persen	11,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								36,350,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	3	2.0 6	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	88 Persen	15 Keluarga	93 Persen	16,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	88 Persen	15 Keluarga	93 Persen	2,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	88 Persen	15 Keluarga	93 Persen	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	1 0	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Persentase Fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	88 Persen	15 Keluarga	93 Persen	4,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								10,500,000		
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								10,500,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	90 Persen	1 Laporan	93 Persen	5,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	90 Persen	1 Laporan	93 Persen	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									2,400,000	
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									2,400,000	
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	persentase fasilitas koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	90 Persen	12 Dokumen	93 Persen	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									171,200,000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									171,200,000	
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu		Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	88 Persen	3 Dokumen	85 Persen	161,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				88 Persen					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu				88 Persen								
7	1	6	2.0	8	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Pronojiwo, Semua Kelurahan	88 Persen	1 Dokumen	85 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
					Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				88 Persen					
					Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu				88 Persen					
TOTAL										2,657,535,411				
KECAMATAN RANDUAGUNG														
7	UNSUR KEWILAYAHAN													
7	1	KECAMATAN										2,212,738,610		
7	1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									1,742,928,610		
7	1	1	2.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							5,000,000		
7	1	1	2.0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	3 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	1 dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	5 laporan	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,349,497,259		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	12 orang/12 bulan	100 %	1,323,337,259	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	12 dokumen	100 %	24,660,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	persentase fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	5 laporan	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							9,600,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	1 paket	100 %	9,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							58,565,351		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	1 paket	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	3 paket	100 %	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	2 paket	100 %	3,965,351	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	1 paket	100 %	600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	12 laporan	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	12 laporan	100 %	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							203,256,000		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Presentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	12 laporan	100 %	33,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Presentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	12 laporan	100 %	169,656,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							117,010,000		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	5 unit	100 %	33,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	10 unit	100 %	6,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiJumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	Presentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	1 unit	100 %	76,810,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								9,000,000	
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								9,000,000	
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Prosentase fasilitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	2 laporan	100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								146,560,000	
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								127,610,000	
7	1	3	2.0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	1 dokumen	100 %	9,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	7 laporan	100 %	118,610,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 5		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)								1,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 5	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	1 dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							17,950,000		
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang ditindaklanjuti		100 %	60 keluarga	100 %	17,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							16,650,000		
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							16,650,000		
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	12 laporan	2 fasilitasi	11,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100 %	1 Laporan	2 fasilitasi	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							2,400,000		
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							2,400,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan UJumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumurusan Pemerintahan Umum	Kab. Lumajang, Randuagung, Randuagung	100 %	1 dokumen	12 fasilitas	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							295,200,000			
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							295,200,000			
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	12 dokumen	80 %	295,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
					Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				100 %						
					Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu				100 %						
TOTAL													2,212,738,610		
KECAMATAN RANUYOSO															
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN									2,040,676,118	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									1,617,751,118	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									9,500,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Dokumen	100 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen			
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Laporan	100 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,206,766,473		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	14 Orang/12 bulan	100 Persen	1,187,286,473	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	15,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								11,200,000	
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	32 Paket	100 Persen	11,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah								68,780,000	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	4 Paket	100 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	38 Paket	100 Persen	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	2 Paket	100 Persen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	25,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							33,571,645		
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase fasilitas pengadaan BMD	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Unit	100 Persen	33,571,645	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							213,588,000			
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	43,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor		100 Persen	12 Laporan	100 Persen	170,388,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							74,345,000			
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	7 Unit	100 Persen	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Unit	100 Persen	7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD		100 Persen	1 Unit	100 Persen	45,145,000	
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							5,000,000			
7	1	2	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							5,000,000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	2	2.0 1	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							146,325,000		
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							133,325,000		
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	5 lembaga	100 Persen	825	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	7 Laporan	100 Persen	122,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							13,000,000		
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	55 Keluarga	100 Persen	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	55 Keluarga	100 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	20 Keluarga	100 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							5,000,000		
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							5,000,000		
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							2,400,000		
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							2,400,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								264,200,000			
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								264,200,000			
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu, Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu, Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	Kab. Lumajang, Ranuyoso, Semua Kelurahan	100 Persen	33 Dokumen	11 Desa	264,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu				100 Persen						
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu				100 Persen						
												TOTAL	2,040,676,118			
KECAMATAN ROWOKANGKUNG																
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN										2,367,515,178	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										2,036,394,254	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										6,492,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung	100 persen	3 Dokumen	88 persen	3,024,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung	100 persen	1 dokumen	88 persen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung	100 persen	5 Laporan	88 persen	968	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,367,600,074	
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase fasilitasi administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung	100 persen	12 Orang/bulan	88 persen	1,348,090,074	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase fasilitasi administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung	100 persen	12 Dokumen	88 persen	19,510,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah								55,606,580	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng	100 p	1 Paket	88 persen	1,373,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng	100 p	2 Paket	88 persen	24,497,330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng	100 p	2 Paket	88 persen	4,071,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng	100 p	12 Laporan	88 persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitas administrasi umum Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng	100 p	12 Laporan	88 persen	22,664,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							201,870,600		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng	100 persen	12 Laporan	88 persen	20,065,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor	Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng	100 persen	12 Laporan	88 persen	181,804,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							404,825,000		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng	100 persen	6 Unit	88 persen	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng	100 persen	11 Unit	88 persen	7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng	100 persen	2 Unit	88 persen	367,325,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							6,800,000		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							1,800,000		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng	90 persen	1 dokumen	90 persen	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							5,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng	90 persen	6 Laporan	90 persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							124,120,924		
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							110,970,924		
7	1	3	2.0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng	90 persen	3 dokumen	90 persen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng	90 persen	4 Laporan	90 persen	104,970,924	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							13,150,000		
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Rowokangku ng, Rowokangku ng	90 persen	35 keluarga	90 persen	13,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							10,000,000		
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							10,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung	90 persen	1 Laporan	1 fasilitasi	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								2,400,000	
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								2,400,000	
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung	90 persen	12 Dokumen	1 fasilitasi	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								187,800,000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								187,800,000	
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Lumajang, Rowokangkung, Rowokangkung	90 persen	7 Dokumen	90 persen	187,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
				Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu						90 persen				
				Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu						90 persen				
												TOTAL	2,367,515,178	

KECAMATAN SENDURO

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023														
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana									
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan											
7																UNSUR KEWILAYAHAN			
7	1															KECAMATAN			2,485,358,646
7	1	1														PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1,925,558,646
7	1	1	2.0 1													Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13,000,000
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja		100 Persen	3 Dokumen	100 Persen	3,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0 Dokumen		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum							
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja		100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
7	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja		100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0 Dokumen									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD					1 Dokuman			
7	1	1	2.0 1	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja		100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja		100 Persen	1 Dokumen	100 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja		100 Persen	8 Laporan	100 Persen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,425,669,331		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase fasilitasi Administrasi keuangan daerah		100 Persen	13 Orang/12bulan	84 Persen	1,397,382,131	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase fasilitasi Administrasi keuangan daerah		100 Persen	12 Dokumen	84 Persen	23,287,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi keuangan daerah		100 Persen	12 Dokumen	84 Persen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi keuangan daerah		100 Persen	0 Laporan	84 Persen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah laporan keuangan Akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				1 Laporan			
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							2,500,000		
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase hasil dan koordinasi yang ditindak lanjuti		100 Persen	2 Laporan	88 Persen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							87,100,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	1 Paket	88 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	3 Paket	88 Persen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase fasilitas administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	2 Paket	88 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	Persentase fasilitas administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	1 paket	88 Persen	1,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket			
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan tamu	Persentase fasilitas administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	12 Laporan	88 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitas administrasi umum perangkat daerah		100 Persen	4 Laporan	88 Persen	42,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								20,000,000	
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	persentase fasilitas pengadaan BMD		100 Persen	2 Unit	88 Persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								250,489,315	
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor		100 persen	2 Laporan	88 Persen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor		100 persen	12 Laporan	88 Persen	43,989,315	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor		100 persen	12 Laporan	88 Persen	205,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								126,800,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	perentase fasilitas pemeliharaan BMD		100 persen	12 Unit	88 Persen	33,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	perentase fasilitas pemeliharaan BMD		100 persen	0 Unit	88 Persen	15,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				21 Unit			
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	perentase fasilitas pemeliharaan BMD		100 persen	2 Unit	88 Persen	77,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit			
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								12,000,000	
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								7,000,000	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan		85 Persen	1 Dokumen	88 Persen	7,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								5,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		100 Persen	0 Laporan	88 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					5 Laporan			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							236,000,000		
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							170,000,000		
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		100 Persen	12 Lembaga	86 persen	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa		100 Persen	0 Laporan	86 persen	164,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					8 Laporan			
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							66,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan		100 Persen	15 Keluarga	88 Persen	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan		100 Persen	50 Keluarga	88 Persen	46,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								13,800,000	
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								13,800,000	
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		100 persen	12 Laporan	88 Persen	9,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		100 persen	1 Laporan	88 Persen	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								7,200,000	
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								7,200,000	
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		85 persen	12 Dokumen	1 Fasilitasi	7,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								290,800,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					290,800,000				
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu		86 Persen	12 Dokumen	86 Persen	290,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu			86 Persen					
						Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu			86 Persen					
TOTAL											2,485,358,646			
KECAMATAN SUKODONO														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN								2,430,321,765	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1,986,851,765	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								12,500,000	
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase hasil dan yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	3 Dokumen	93 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase hasil dan yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	1 Dokumen	93 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	2 Dokumen	93 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	5 Laporan	93 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Laporan	93 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,563,209,265		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan	100 %	14 Orang	93 %	1,530,709,265	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Dokumen	93 %	29,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	5 Laporan	93 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	2 Dokumen	93 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								5,500,000		
7	1	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	2 Dokumen	93 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	2 Laporan	93 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Laporan	93 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								6,500,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase hasil dan yang fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	26 Paket	93 %	6,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							54,832,500		
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase hasil dan yang fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	1 Paket	93 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase hasil dan yang fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	3 Paket	93 %	25,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase hasil dan yang fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	2 Paket	93 %	5,032,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase hasil dan yang fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Laporan	93 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase hasil dan yang fasilitas Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Laporan	93 %	16,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							37,500,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	7 Unit	93 %	37,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							206,340,000		
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Laporan	93 %	1,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Laporan	93 %	34,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Laporan	93 %	170,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							100,470,000		
7	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	6 Unit	93 %	34,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	33 Unit	93 %	21,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	2 Unit	93 %	45,020,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							10,250,000		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							5,250,000		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	2 Dokumen	93 %	5,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP				79.5 %				
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							5,000,000		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase hasil dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	100 %	12 Laporan	93 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP				79.5 %				

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								168,220,000		
7	1	3	2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								154,220,000		
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase hasil dan yang fasilitasi dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	79.2 %	8 Lembaga	93 %	750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase hasil dan yang fasilitasi dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	79.2 %	1 Dokumen	93 %	5,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil dan yang fasilitasi dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan	79.2 %	12 Laporan	93 %	147,950,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan								14,000,000		
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase hasil dan yang fasilitasi dan yang Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	79.2 %	50 Keluarga	93 %	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								10,000,000		
7	1	4	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								10,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil dan yang fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan	79.2 %	1 Laporan	93 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase hasil dan yang fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Semua Kelurahan	79.2 %	1 Laporan	93 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								2,400,000	
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								2,400,000	
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase hasil dan yang fasilitasi Koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	79.2 %	12 Dokumen	93 %	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								252,600,000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								252,600,000	
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rata-rata persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Sukodono, Karangsari	79.2 %	3 Dokumen	85 %	252,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu					79.2 %				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
		Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu				79.2 %					
TOTAL									2,430,321,765		
KECAMATAN SUMBERSUKO											
7					UNSUR KEWILAYAHAN						
7	1				KECAMATAN					2,192,779,332	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1,822,884,332	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					11,350,000	
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul	3 Dokumen	4,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul	1 Dokumen	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul	1 Dokumen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		1 Laporan		1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		4 Laporan		2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,423,138,360		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		13 Orang/bulan		1,387,461,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		12 Dokumen		27,612,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		4 Dokumen		2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		1 Laporan		1,665,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		1 Dokumen		1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		17 Laporan		3,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							4,700,000		
7	1	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		2 Dokumen		2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		2 Laporan		1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kab. Lumajang, Sumpusuko, Labruk Kidul		12 Laporan		1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								15,500,000	
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Kab. Lumajang, Sumpusuko, Labruk Kidul		21 Paket		15,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah								68,508,372	
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Sumpusuko, Labruk Kidul		2 Paket		5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Sumpusuko, Labruk Kidul		67 Paket		29,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Kab. Lumajang, Sumpusuko, Labruk Kidul		4 Paket		7,848,372	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kab. Lumajang, Sumpusuko, Labruk Kidul		12 Laporan		7,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		4 Laporan		19,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							225,867,600		
7	1	1	2.0 8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		12 Laporan		600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		4 Laporan		39,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		12 Laporan		185,667,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							73,820,000		
7	1	1	2.0 9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		8 Unit		28,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Jenis Peralatan yang Dipelihara		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		28 Unit		20,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		4 Unit		25,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								11,475,000	
7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								6,075,000	
7	1	2	2.0 1	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		8 Dokumen		6,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								5,400,000	
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		4 Laporan		5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								138,620,000	
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								117,500,000	
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		10 Lembaga Masyarakat		1,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kab. Lumajang, Sumpalsari, Labruk Kidul		7 Laporan		115,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 5		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)							6,570,000		
7	1	3	2.0 5	1	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Kab. Lumajang, Sumpalsari, Labruk Kidul		8 Dokumen		4,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 5	4	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Kab. Lumajang, Sumpalsari, Labruk Kidul		8 Dokumen		1,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							14,550,000		
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		Kab. Lumajang, Sumpalsari, Labruk Kidul		48 Keluarga		6,075,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	1 2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas		Kab. Lumajang, Sumpalsari, Labruk Kidul		48 Keluarga		8,475,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							8,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					8,000,000				
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Kab. Lumajang, Sumpalsuko, Labruk Kidul		8 Laporan		8,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					2,400,000				
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					2,400,000				
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Kab. Lumajang, Sumpalsuko, Labruk Kidul		2 Dokumen		2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					209,400,000				
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					209,400,000				
7	1	6	2.0 1	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kab. Lumajang, Sumpalsuko, Labruk Kidul		8 Dokumen		600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Kab. Lumajang, Sumpalsuko, Labruk Kidul		8 Dokumen		202,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		8 Dokumen		1,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	1	6	2.0 1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		8 Dokumen		1,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	1	6	2.0 1	1 6	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		8 Dokumen		1,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
7	1	6	2.0 1	1 8	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Kab. Lumajang, Sumbersuko, Labruk Kidul		8 Laporan		1,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
TOTAL												2,192,779,332				
KECAMATAN TEKUNG																
7					UNSUR KEWILAYAHAN											
7	1				KECAMATAN										2,056,603,197	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										1,661,941,197	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										7,250,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindak lanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindak lanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindak lanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	1,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindak lanjuti	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,360,459,997	
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	12 Orang/bulan	100 %	1,333,159,997	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase fasilitas koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	25,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase fasilitas koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	5 Laporan	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,000,000		
7	1	1	2.0 3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase fasilitas koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase fasilitas koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	1 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								13,500,000		
7	1	1	2.0 5	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase fasilitas koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	1 Paket	100 %	13,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah								74,977,200		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	15 Paket	86 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	43 Paket	86 %	27,512,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	4 Paket	86 %	10,345,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	86 %	1,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	86 %	32,820,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							171,342,000		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	140,742,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							31,412,000		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	28,062,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	5 Unit	100 %	3,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							8,300,000		
7	1	2	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							6,300,000		
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	12 Dokumen	100 %	6,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							2,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	2	2.0 4	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	persentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							157,112,000		
7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							117,862,000		
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	20 Lembaga Kemasyarakatan	100 %	8,887,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	108,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							39,250,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	3	2.0 6	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	20 Keluarga	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	40 Keluarga	100 %	11,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	20 Keluarga	100 %	8,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	3	2.0 6	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	20 Keluarga	100 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	40 Keluarga	100 %	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6	1 2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	100 Keluarga	100 %	14,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									13,150,000	
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									13,150,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil dan yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	10,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4	2.0 1	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase hasil dan yang ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	2,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								216,100,000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								216,100,000	
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rata-rata Presentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	200,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu				100 %				
						Persentase desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu				100 %				
7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rata-rata Presentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	3 Dokumen	100 %	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
		Persentase desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu				100 %									
		Persentase desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu				100 %									
7	1	6	2.0 1	1 7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rata-rata Presentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Tekung, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Persentase desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu				100 %					
						Persentase desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu				100 %					
TOTAL													2,056,603,197		
KECAMATAN TEMPEH															
7					UNSUR KEWILAYAHAN										
7	1				KECAMATAN									2,361,323,171	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									1,843,764,595	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									8,500,000	
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan fasilitas operssional kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	3 Dokumen	88 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase pemenuhan fasilitasi operssional kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	1 Dokumen	88 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase pemenuhan fasilitasi operssional kantor	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	2 Dokumen	88 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase pemenuhan fasilitasi operssional kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	5 Laporan	88 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan fasilitasi operssional kantor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	8 Laporan	88 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1,406,921,415		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	presentase fasilitasi operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	14 Orang/bulan	88 %	1,380,241,415	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	presentase fasilitasi operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	12 Dokumen	88 %	21,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	presentase fasilitasi operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	12 Dokumen	88 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	presentase fasilitasi operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	5 Laporan	88 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	presentase fasilitasi operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	2 Dokumen	88 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	presentase fasilitasi operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	18 Laporan	88 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								3,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Presentase pemenuhan fasilitasi operasional perkantoran	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase hasil dan yang fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	2 Dokumen	88 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Presentase pemenuhan fasilitasi operasional perkantoran	Jumlah Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase hasil dan yang fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	2 Laporan	88 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								64,779,000	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Presentase pemenuhan fasilitasi operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase hasil dan yang fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	1 Paket	88 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase pemenuhan fasilitasi operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase hasil dan yang fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	2 Paket	88 %	26,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Presentase pemenuhan fasilitasi operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase hasil dan yang fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	1 Paket	88 %	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Presentase pemenuhan fasilitasi operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase hasil dan yang fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	1 Paket	88 %	459	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Presentase pemenuhan fasilitasi operasional perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	12 Laporan	88 %	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase pemenuhan fasilitasi operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	12 Laporan	88 %	32,220,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								23,710,080		
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase pemenuhan fasilitasi operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	4 Unit	88 %	23,710,080	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								302,730,000		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentase pemenuhan fasilitasi operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	12 Laporan	88 %	600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentase pemenuhan fasilitasi operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	12 Laporan	88 %	50,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase pemenuhan fasilitasi operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	hasil dan yang	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	12 Laporan	88 %	251,370,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	1	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								34,124,100		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase pemenuhan fasilitas operasional perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	6 Unit	88 %	27,574,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase pemenuhan fasilitas operasional perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	100 %	6 Unit	88 %	6,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								7,800,000		
7	1	2	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								7,800,000		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Presentase pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	86 %	1 Laporan	88 %	7,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								164,518,576		
7	1	3	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								149,368,576		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rata-rata presentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase hasil dan yang koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	88 %	7 Lembaga	88 %	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rata-rata presentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase hasil dan yang fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	88 %	1 Dokumen	88 %	7,518,576	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rata-rata presentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil dan yang fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	88 %	12 Laporan	88 %	136,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							15,150,000		
7	1	3	2.0 6	1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Rata-rata presentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase hasil dan yang fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	88 %	45 Keluarga	88 %	15,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							13,460,000		
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							13,460,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase fasilitasi Koordinasi ketentrangan dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase hasil dan yang fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	87 %	13 Laporan	88 %	13,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							2,400,000			
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							2,400,000			
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase hasil dan yang fasilitasi koordinasi ditindaklanjuti	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	88 %	12 Dokumen	88 %	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							329,380,000			
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							329,380,000			
7	1	6	2.0 1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	88 %	12 Dokumen	75 %	315,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
				Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu						88 %					
				Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu							88 %				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
7	1	6	2.0 1	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Kab. Lumajang, Tempeh, Tempeh Tengah	88 %	2 Dokumen	75 %	13,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu				88 %					
					Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu				88 %					
TOTAL												2,361,323,171		
KECAMATAN TEMPURSARI														
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN								1,897,014,957	
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								1,593,426,957	
7	1	1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10,000,000	
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 persen	0 Dokumen	90 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 persen	1 Dokumen	90 Persen	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 persen	1 Laporan	90 Persen	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 persen	2 Laporan	90 Persen	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,187,621,860		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase Pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	11 Orang/bulan	90 %	1,169,899,860	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					12 Bulan		
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Presentase Pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	12 Dokumen	90 %	15,972,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase Pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	5 Laporan	90 %	1,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah							94,417,400		
7	1	1	2.0 6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Fasilitas Administrasi Umum	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	6 Paket	90 %	3,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Fasilitas Administrasi Umum	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	32 Paket	90 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Fasilitas Administrasi Umum	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	4 Paket	90 %	4,767,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Fasilitas Administrasi Umum	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	2 Paket	90 %	1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pemenuhan Fasilitas Administrasi Umum	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	12 Laporan	90 %	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
						perkantoran								
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pemenuhan Fasilitas Administrasi Umum	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	12 Laporan	90 %	55,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							4,945,500		
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Presentase Fasilitas Pengadaan BMD	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	1 Unit	90 %	4,945,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							217,116,000		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	12 Laporan	90 %	5,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	12 Laporan	90 %	28,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	12 Laporan	90 %	183,216,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							79,326,197		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	8 Unit	90 %	33,876,197	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	0 Unit	90 %	7,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit			
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	1 Unit	90 %	37,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							6,138,000		
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							6,138,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Berkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase fasilitasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	0 Laporan	90 %	6,138,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6 Laporan			
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							111,250,000		
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							94,100,000		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	6 Lembaga Kemasyarakatan	90 %	600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	7 Dokumen	90 %	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	0 Laporan	90 %	89,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
7	1	3	2.0 6	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					17,150,000					
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	42 Keluarga	90 %	17,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					5,500,000					
7	1	4	2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					1,500,000					
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	12 Laporan	1 Fasilitasi	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4	7.0 3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					4,000,000					
7	1	4	7.0 3	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 persen	1 Laporan	1 fasilitasi	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					2,400,000					
7	1	5	2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					2,400,000					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	12 Dokumen	1 Fasilitasi	2,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							178,300,000		
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							178,300,000		
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes, LPPDes tepat Waktu	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	12 Dokumen	7 Desa	176,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat Waktu				90 %				
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat Waktu				90 %				
7	1	6	2.0 1	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Persentase Desa yang menetapkan APBDes tepat Waktu	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes, APBDes, LPPDes tepat Waktu	Kab. Lumajang, Tempursari, Semua Kelurahan	90 %	1 Dokumen	7 Desa	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						Persentase Desa yang menetapkan LPPDes tepat Waktu				90 %				
						Persentase Desa yang menetapkan RKPDes tepat Waktu				90 %				
												TOTAL	1,897,014,957	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
KECAMATAN YOSOWILANGUN														
7														
UNSUR KEWILAYAHAN														
7	1										2,172,655,810			
KECAMATAN														
7	1	1									1,654,428,310			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7	1	1	2.0 1								7,000,000			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
7	1	1	2.0 1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	4 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	2 Dokumen	100 %	2,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	5 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,174,535,036			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.0 2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	10 Orang/bulan	100 %	1,142,598,036	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	12 Dokumen	100 %	27,612,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	12 Dokumen	100 %	1,065,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	1 Laporan	100 %	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	1 Laporan	100 %	1,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							3,820,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	12 Laporan	100 %	1,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	12 Laporan	100 %	1,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							89,884,670		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	1 Paket	100 %	2,284,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan administrasi umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	2 Paket	100 %	27,873,670	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan administrasi umum	Jumlah Paket Barang dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	2 Paket	100 %	7,655,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pemenuhan administrasi umum	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	1 Paket	100 %	1,350,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	12 Laporan	100 %	3,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	12 Laporan	100 %	47,721,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								10,008,204	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	1 Unit	100 %	10,008,204	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								277,531,200	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	47,086,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	12 Laporan	100 %	230,444,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								91,649,200	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Presentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	10 Unit	100 %	38,469,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Presentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	0 Unit	100 %	6,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit			
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Presentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	1 Unit	100 %	46,380,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								13,062,000	
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								13,062,000	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Pelayanan PATEN sesuai SP dan SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	93,33 %	12 Laporan	12 Laporan	13,062,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								187,659,250	
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								165,869,250	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	3	2.0 1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rata-rata Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	9 Lembaga	100 %	3,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rata-rata Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	2 Dokumen	100 %	8,212,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rata-rata Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	7 Laporan	100 %	154,506,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							21,790,000		
7	1	3	2.0 6	3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Rata-rata Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	93,33 %	20 Keluarga	90 %	21,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							9,286,250		
7	1	4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							9,286,250		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
7	1	4	2.0 1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	2 Laporan	100 %	9,286,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								4,800,000	
7	1	5	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								4,800,000	
7	1	5	2.0 1	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	100 %	1 Dokumen	100 %	4,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								303,420,000	
7	1	6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								303,420,000	
7	1	6	2.0 1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1. Persentase Desa yang Menetapkan RKPDesa Tepat Waktu	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Lumajang, Yosowilangun, Yosowilangun Kidul	91,67 %	12 Dokumen	90 %	303,420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						2. Persentase Desa yang Menetapkan APBDDesa Tepat Waktu				91,67 %				
						3. Persentase Desa yang Menetapkan LPPDesa Tepat Waktu					91,67 %			
												TOTAL	2,172,655,81	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
									0	

Tabel 5 4 Rekapitulasi Pagu Indikatif RKPD 2023 berdasarkan Perangkat Daerah

No.	PD Penanggungjawab	Pagu Sekretariat	Pagu Bidang	Jumlah Pagu	Proporsi (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	393.700.310.898	260,940,247,035	654,640,557,933.00	30.64
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	58.881.086.949	376,341,811,763	435.222.898.712,00	20.37
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	13.221.295.162	44,898,845,000	58.120.140.162,00	2.72
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.267.700.000	27,425,100,287	40.692.800.287,00	1.90
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.045.229.811	1,499,118,840	4,544,348,811.00	0.21
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.437.598.353	8,376,842,030	13.814.440.383,00	0.65
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.687.575.991	24,996,890,881	29,684,466,872.00	1.39
8	Dinas Tenaga Kerja	3.993.205.991	896,202,468	4,889,408,459.00	0.23
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.637.716.794	17,127,777,151	34.765.493.945,00	1.63
10	Dinas Lingkungan Hidup	19.224.452.597	12,733,562,831	31.958.015.428,00	1.50
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.275.826.948	2,226,471,500	8,502,298,448.00	0.40

No.	PD Penanggungjawab	Pagu Sekretariat	Pagu Bidang	Jumlah Pagu	Proporsi (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.197.409.836	2,423,564,907	7.620.974.743,00	0.36
13	Dinas Perhubungan	13.720.908.479	22,983,171,448	36,704,079,927.00	1.72
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.153.037.406	4,148,257,640	8,301,295,046.00	0.39
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	9.856.520.717	8,869,699,550	18.726.220.267.00	0.88
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.837.660.126	1,540,225,000	5,377,885,126.00	0.25
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.546.263.473	8,239,930,305	11.786.193.778.00	0.55
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.428.241.357	487,193,000	4,915,434,357.00	0.23
19	Dinas Perikanan	3.589.690.309	768,892,020	4.358.582.329.00	0.20
20	Dinas Pariwisata	5.366.898.146	9,459,726,458	14.826.624.604.00	0.69
21	Sekretariat Daerah	28.452.344.608	44,716,424,609	73.168.769.217.00	3.42
22	Sekretariat DPRD	40.039.250.657	18,687,594,000	58,726,844,657.00	2.75
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.527.226.428	6,540,268,225	11.067.494.653.00	0.52

No.	PD Penanggungjawab	Pagu Sekretariat	Pagu Bidang	Jumlah Pagu	Proporsi (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
24	Badan Pengelola Keuangan Daerah	69.240.107.669	402,928,990,727	472,169,098,396.00	22.10
25	Badan Pajak dan Retribusi Daerah	9.738.717.260	4,365,360,000	14,104,077,260.00	0.66
26	Badan Kepegawaian Daerah	6.144.329.275	1,569,802,355	7,714,131,630.00	0.36
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.244.360.055	3,603,933,996	6,848,294,051.00	0.32
27	Inspektorat Daerah	5.422.422.757	613,069,000	6,035,491,757.00	0.28
29	Kecamatan Candipuro	2.000.721.172	441,940,000	2,442,661,172	0.11
30	Kecamatan Gucialit	1.742.355.619	368,610,000	2,110,965,619	0.10
31	Kecamatan Jatiroto	1.753.622.430	291,010,000	2,044,632,430	0.10
32	Kecamatan Kedungjajang	1.836.648.786	461,513,000	2,298,161,786	0.11
33	Kecamatan Klakah	2.087.463.918	503,817,000	2,591,280,918	0.12
34	Kecamatan Kunir	1.541.776.481	464,358,816	2,006,135,297	0.09
35	Kecamatan Lumajang	6.367.261.708	6,075,244,827	12.442.506.535	0.58
36	Kecamatan Padang	1.539.039.058	378,290,600	1.917.329.658	0.09

No.	PD Penanggungjawab	Pagu Sekretariat	Pagu Bidang	Jumlah Pagu	Proporsi (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
37	Kecamatan Pasrujambe	1.704.904.794	348,244,000	2,053,148,794	0.10
38	Kecamatan Pasirian	1.801.817.589	486,634,000	2,288,451,589	0.11
39	Kecamatan Pronojiwo	2.291.025.411	366,510,000	2,657,535,411	0.12
40	Kecamatan Randuagung	1.742.928.610	469,810,000	2,212,738,610	0.10
41	Kecamatan Ranuyoso	1.617.751.118	422,925,000	2,040,676,118	0.10
42	Kecamatan Rowokangkung	2.036.394.254	331,120,924	2,367,515,178	0.11
43	Kecamatan Senduro	1.925.558.646	559,800,000	2,485,358,646	0.12
44	Kecamatan Sumbersuko	1.822.884.332	369,895,000	2,192,779,332	0.10
45	Kecamatan Sukodono	1.986.851.765	443,470,011	2,430,321,765	0.11
46	Kecamatan Tekung	1.661.941.197	394,662,000	2,056,603,197	0.10
47	Kecamatan Tempeh	1.843.764.595	517,558,576	2,361,323,171	0.11
48	Kecamatan Tempursari	1.593.426.957	303,588,000	1.897.014.957	0.09
49	Kecamatan Yosowilangun	1.654.428.310	518,227,500	2,172,655,810	0.10

No.	PD Penanggungjawab	Pagu Sekretariat	Pagu Bidang	Jumlah Pagu	Proporsi (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	JUMLAH	802,429,954,802	1,333,926,202,429	2,136,356,157,231	100.00

Ket.: Pagu Indikatif PD terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Hibah-Bansos bagi OPD Pengelola Hibah-Bansos, Belanja Barang/Jasa, Belanja Subsidi) dan Belanja Modal

Adapun gambaran rekapitulasi program, kegiatan, sub kegiatan beserta pagu indikatif sebagaimana terlampir

d. 5.2. Program Prioritas Daerah yang Mendukung Pogram Prioritas Nasional

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pencapaian sasaran visi Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, selanjutnya dirumuskan dalam Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2023 yang diharapkan dapat mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-2023. Rencana program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 yang mendukung pencapaian program prioritas nasional, dapat dilihat pada tabel 5.4.

Tabel 5 5 Matriks Program RKPD 2023 yang Mendukung Program

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	5.100.000.000	
					Operasional Unit Pengelola Irigasi	200.000.000	
		1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.525.200.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.145.000.000	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	420.000.000	
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	100.000.000	
					Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	262.500.000	
					Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.815.000.000	
		2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	599.200.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan. Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	25.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		2 17 02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang. Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.000.000	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah. Perindustrian dan Perdagangan
		2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas. Nilai Tambah. Akses Pasar. Akses Pembiayaan. Penguatan Kelembagaan. Penataan Manajemen. Standarisasi. dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	78.000.000	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah. Perindustrian dan Perdagangan

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	197.400.000	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah. Perindustrian dan Perdagangan
		2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan. Pemasaran. SDM. serta Desain dan Teknologi	610.000.000	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah. Perindustrian dan Perdagangan
		2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	184.244.000	Dinas Tenaga Kerja
		2 18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan	10.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			MODAL	Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kemudahan Penanaman Modal		Terpadu Satu Pintu
					Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	31.000.000	
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	155.586.000	
		2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	10.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
					Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	414.474.000	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		3 26 02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Pariwisata
					Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10.000.000	
					Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	64.200.000	
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	64.200.000	
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.067.250.458	
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	30.400.000	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik. Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi melalui Media Cetak. Elektronik. dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	95.589.000	Dinas Pariwisata
					Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	849.100.000	
					Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota. Baik Dalam dan Luar Negeri	277.560.000	
					Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	69.880.000	
					Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	2.500.000	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		3 26 05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	85.800.000	Dinas Pariwisata
					Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat. Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	60.700.000	
					Fasilitasi Proses Kreasi. Produksi. Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	781.200.000	
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan. Bimbingan Teknis. dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	63.600.000	
		3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.170.400.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.725.916.051	
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	50.000.000	
					Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	180.000.000	
					Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	250.800.000	
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak. Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	185.600.000	
					Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	818.400.000	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	85.200.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
					Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	2.217.775.000	
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.400.000.000	
					Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.850.000.000	
					Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	770.000.000	
		3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	517.700.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					di Kecamatan dan Desa		
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	370.000.000	
					Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	783.990.200	
					Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	500.000.000	
		3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100.000.000	Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengah. Perindustrian dan Perdagangan
					Koordinasi. Sinkronisasi. dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	65.000.000	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.690.000.000	
2	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	48.933.689	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
					Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	421.977.360	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	555.780.732	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	42.933.689	
					Pembinaan Minat. Bakat dan Kreativitas Siswa	686.876.315	
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	210.994.471	
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah	58.658.000	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Menengah Pertama		
		1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	119.373.800	Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	272.314.000	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	121.036.750	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	90.803.250	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	5.940.000	
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	201.659.000	
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	76.680.300	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	255.020.000	
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	27.375.000	
					Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	48.750.000	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	675	
					Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.500.000	
					Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	54.000.000	
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	81.400.000	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		1 06 04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	4.133.708.700	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Penyediaan Sandang	28.794.510	
					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.500.000	
					Pemberian Layanan Kedaruratan	12.160.000	
		1 06 05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	124.054.000	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	105.070.000	
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	17.640.848.300	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	10.575.000	Dinas Tenaga Kerja
		2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	184.244.000	Dinas Tenaga Kerja
		2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	58.519.000	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi	16.800.000	
		2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan. Program	21.700.000	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Anak
					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.050.000	
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.000.000	
		2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	13.665.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		2 10 06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH. SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	18.990.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.111.371.225	
		2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	2.443.140.000	Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	69.100.000	
					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.185.171.369	
				Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	
3	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	2 22 02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan. Pengembangan. Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	152.400.000	Dinas Pendidikan dan kebudayaan

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	111.683.500	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
					Pemanfaatan Cagar Budaya	6.600.000	
		2 23 02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	12.680.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
					Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	22.720.000	
		4 01 02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	40.659.912.207	Sekretariat Daerah
		8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka	5.000.000	Bakesbangpol

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kebangsaan	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	197.454.000	
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan. Bela Negara. Karakter Bangsa. Pembauran Kebangsaan. Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30.000.000	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3.000.000	Bakesbangpol
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250.155.000	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial. Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	45.000.000	
4	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	105.814.600	Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.525.200.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.145.000.000	
					Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	420.000.000	
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	100.000.000	
					Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	262.500.000	
					Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	315.000.000	
					Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.815.000.000	
		1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	5.100.000.000	
					Operasional Unit Pengelola Irigasi	200.000.000	
		1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	330.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	9.079.100.000	
					Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	60.000.000	
					Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	526.900.000	
					Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana	1.070.000.000	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					dan Prasarana IPLT		
					Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	45.000.000	
		1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	183.400.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	642.500.000	
		1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	11.905.000	Badan Penangkulana Bencana Daerah
					Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	1.280.000	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		
		2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah. Air. Udara. dan Laut	97.260.000	Dinas Lingkungan Hidup
		2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan. Pengumpulan. Pengangkutan. Pengolahan. dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	3.797.346.190	Dinas Lingkungan Hidup
					Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	213.760.000	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.685.000.000	
		2 15 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan. Pemasangan. Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.149.400.000	Dinas Perhubungan
					Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	19.000.000	
					Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	20.000.000	
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5.000.000	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	662.136.000	
					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	10.000.000	
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	
		2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	32.592.500	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANA N INFORMASI	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.622.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Membangun Lingkungan Hidup. Meningkatkan Ketahanan Bencana. dan Perubahan Iklim	1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	11.905.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	1.280.000	
				Pelayanan Pencegahan dan	Penyusunan Rencana Penanggulangan	21.159.000	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Bencana Kabupaten/Kota		
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	32.800.000	
					Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	45.600.000	
					Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	32.040.000	
					Penyusunan Rencana Kontijensi	95.440.000	
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	631.730.000	
					Pencarian. Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	57.440.000	
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	336.290.000	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	13.515.000	
		2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi. Sinkronisasi. dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah. Air. Udara. dan Laut	97.260.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	323.118.916	
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	112.000.000	
6	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi	3 26 03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik. Destinasi dan	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	69.880.000	Dinas Pariwisata

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pelayanan Publik			Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
		6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan. Asistensi. Verifikasi. dan Penilaian Reformasi Birokrasi	37.000.000	Inspektorat
		8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2.000.000	Bakesbangpol
					Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan	2.456.750.000	

No	Prioritas Nasional	Kode Program	Nomenklatur Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
					Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai		
					Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan	12.825.000	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembangunan untuk kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan Visi dan Misi dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator kinerja pembangunan.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditetapkan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2022 atau pada setiap tahun periode P-RPJMD Tahun 2018- 2023.

Selain penetapan indikator kinerja utama dan indikator kinerja sasaran untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang menetapkan target indikator kinerja makro pembangunan yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, dan Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun penentuan target indikator kinerja makro disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 6 1 Penetapan Indikator Makro Kabupaten Lumajang
Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target	
			2021	2022	2023

1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	3,14	3,5	3,5
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	indeks	64,95	64,35	64,44
3	IPM	indeks	66,07	66,83	67,53
4	Indeks Gini	indeks	0,309	0,271	0,258
5	Angka Kemiskinan	%	10,05	9	8,5
6	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	58,94	65	70

Sumber : LKJIP Tahun 2021 dan Perda No. 1 Tahun 2022 tentang PRPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023

2. 6.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu parameter yang dibentuk untuk mengetahui keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dari suatu organisasi . IKU berfungsi untuk memperoleh informasi kinerja yang dinilai penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis. Kedua fungsi tersebut dapat digunakan untuk evaluasi dalam rangka memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Aspek akuntabilitas kinerja menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan implementasi pembangunan khususnya di Kabupaten Lumajang. Pengimplementasian indeks kinerja utama di Kabupaten Lumajang dalam perencanaan akan menghasilkan dampak secara simultan. Dampak tersebut akan dirasakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Indikator Kinerja Utama beserta target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lumajang Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya aktivitas ekonomi/nilai PDRB	Nilai PDRB	Rupiah (Juta)	21.933,79	23.425,30	21.931,60	22.370,23	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi Usaha Mikro perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	8,25	7,84	8,65	8,85	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Indeks	0,50	N/A	0,52	0,53	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Nilai	0,40	0,39	0,38	0,36	Dinas Perhubungan
Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	Rp (juta)	174.284,9	61.275,24	192.149,1	201.756,6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Indeks	54,34	53,54	53,49	53,59	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,37	84,74	84,65	84,75	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	92,4	47,95	45,45	45,50	Dinas Lingkungan Hidup
Mewujudkan masyarakat yang tangguh bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	122,6	118,7	109,3	107,9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,54	0,55	0,57	0,58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,770	0,77	0,775	0,777	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya daya beli	Pengeluaran per	Rp	9.088	9.203	9.455	9.644	Dinas Koperasi Usaha Mikro

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	PD Penanggung Jawab
masyarakat	Kapita	(juta)					Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,09	88,09	88,41	88,43	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,25	0,25	0,23	0,22	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,36	3,51	2,75	2,50	Dinas Tenaga Kerja
Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	N/A	8,26	18,02	29,70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Persentase PPKS mandiri	%	13,08	14,40	15,84	17,35	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	66,13	76,49	66,51	66,75	Badan Kepegawaian Daerah
Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,50	82,72	83,00	83,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Satpol PP, Bakesbangpol, Dinas Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Indeks	Baik (3,20)	Cukup (2,56)	Baik (2,60- <3,50)	Sangat Baik (3,50- <4,20)	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	PD Penanggung Jawab
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN	Efektivitas Pengelolaan Risiko	Angka	2,5	N/A	2,5	3	Inspektorat Daerah
	Indeks Survei Penilaian Integritas	Angka	N/A	N/A	80	82,5	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	N/A	N/A	Baik (7,43-8,70)	Baik (7,43-8,70)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	N/A	N/A	Kategori "Perlu Perbaikan"	Kategori "Perlu Perbaikan"	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	Rasio Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target	%	29,70	37,37	37,62	37,87	Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	PD Penanggung Jawab
	PAD						
Meningkatnya nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai	B 66,88	B 67,60	BB 70-80	BB 70-80	Sekretariat Daerah
Sumber : LKJIP Tahun 2021 dan Perda No. 1 Tahun 2022 tentang PRPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023							

6.2 Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/ layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. IKK Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2023 merupakan bagian dari capaian pembangunan jangka menengah periode 2018-2023.

6.2.1 Indikator Kinerja Kunci Tingkat Dampak (Impact)

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) memuat IKU daerah maupun IKU Perangkat Daerah. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat dampak (impact) yang digunakan untuk menggambarkan aspek/indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama bersama seluruh perangkat daerah terkait yang dirangkum pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 3 Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target		Keterangan
				2022	2023	
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,14	3,5	3,5	Indikator Makro
2	Nilai PDRB	Rp (juta)	23.425,30	21.931,60	22.370,23	IKU Pemda
3	Indeks Gini	Indeks	0,309	0,271	0,258	Indikator Makro
4	Angka Kemiskinan	Persen	10,05	9,00	8,50	Indikator Makro
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66,07	66,83	67,53	Indikator Makro
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	64,95	64,35	64,44	Indikator Makro
7	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,54	53,49	53,59	IKU Pemda
8	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,74	84,65	84,75	IKU Pemda
9	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	47,95	45,45	45,50	IKU Pemda
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,94	65,00	70,00	Indikator Makro
11	Kinerja lalu lintas Kabupaten	Nilai	0,39	0,38	0,36	IKU Pemda

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target		Keterangan
				2022	2023	
12	Indeks Risiko bencana	Indeks	118,74	109,3	107,9	IKU Pemda
13	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,51	2,75	2,50	IKU Pemda
14	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76,49	66,51	66,75	IKU Pemda
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,72	83,00	83,00	IKU Pemda
16	Indeks SPBE	Indeks	Cukup 2,56	Baik (2,60-<3,50)	Sangat Baik (3,50-<4,20)	IKU Pemda
17	Efektivitas Pengelolaan Risiko	Angka	N/A	2,5	3	IKU Pemda
18	Indeks Survei Penilaian Integritas	Angka	N/A	80	82,5	IKU Pemda
19	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	IKU Pemda
20	Rasio penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap target PAD	%	37,37	31,75	37,87	IKU Pemda
21	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	N/A	Baik (7,43-8,70)	Baik (7,43-8,70)	IKU Pemda
22	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	N/A	Kategori "Perlu	Kategori "Perlu	IKU Pemda

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target		Keterangan
				2022	2023	
				Perbaikan”	Perbaikan”	
23	Nilai SAKIP	Nilai	B 67,60	BB 70-80	BB 70-80	IKU Pemda
24	Indeks Pendidikan	Indeks	0,55	0,57	0,58	IKU Pemda
25	Indeks Kesehatan	Indeks	0,77	0,775	0,777	IKU Pemda
26	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,39	88,41	88,43	IKU Pemda
27	Angka Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,25	0,23	0,22	IKU Pemda
28	Persentase PPKS mandiri	%	14,40	15,84	17,35	IKU Pemda
29	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	8,26	18,02	29,70	IKU Pemda
II ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Pengeluaran per kapita	Rp (juta)	9.203	9.455	9.644	IKU Pemda
2	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	7,84	8,65	8,85	IKU Pemda
3	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	N/A	0,52	0,53	IKU Pemda

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target		Keterangan
				2022	2023	
	Dasar					
4	Nilai Investasi	Rp (juta)	61.275,24	192.149,10	201.756,60	IKU Pemda
III	ASPEK PELAYANAN UMUM					
3.1	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR					
3.1.1	PENDIDIKAN					
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka	11,88	11,95	12	IKU Dinas Pendidikan dan kebudayaan
2	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Angka	6,67	6,80	7,00	IKU Dinas Pendidikan dan kebudayaan
3.1.2	KESEHATAN					
1	Persentase Keluarga Sehat	%	10,8	11,6	12	IKU Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan kesehatan	Indeks	85,56	87,00	88,00	IKU Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target		Keterangan
				2022	2023	
						Keluarga Berencana
3.1.3	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					
1	Persentase Panjang Jalan kondisi Mantap	%	88,80	89	89,5	IKU Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
2	Persentase Jumlah Jembatan Kondisi Baik	%	78,82	92,06	92,56	IKU Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
3	Indeks Kinerja Irigasi	Indeks	78,63	80	81,5	IKU Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
4	Persentase cakupan wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang	%	67,58	68	70,00	IKU Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
3.1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN					
1	Persentase Peningkatan Capaian Layanan Keciptakarya	%	N/A	76,34	77,34	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur pada Kawasan Strategis	%	N/A	15,85	16,76	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Kumuh Tertangani	%	N/A	62,77	64,75	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target		Keterangan
				2022	2023	
						Permukiman
4	Persentase pemenuhan <i>backlog</i>	%	N/A	54,32	54,91	IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.1.5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Persentase Penegakan Perda/Perkada	%	100	71,71	85	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
2	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	25	75	IKU Satuan Polisi Pamong Praja
3	Persentase Capaian Indikator Tingkat Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	%	76	76	77	IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.1.6	SOSIAL					
1	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	84,47	85	86,00	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase Peningkatan Jumlah PSKS yang berperan	%	84,40	85	86,00	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target		Keterangan
				2022	2023	
	aktif dalam penanganan PPKS					Perempuan dan Perlindungan Anak
3.2	LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR					
3.2.1	TENAGA KERJA					
1	Persentase Pencari kerja yang terlatih	%	100	100	100	IKU Dinas Tenaga Kerja
2	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	%	100	100	100	IKU Dinas Tenaga Kerja
3	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	131,86	47,00	48,00	IKU Dinas Tenaga Kerja
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	72,69	73,00	74,00	IKU Dinas Tenaga Kerja
3.2.2	PEMBERDAYAAN ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
1	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	58,91	59,20	59,25	IKU Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.2.3	PANGAN					
1	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	95,43	96,68	97,74	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target		Keterangan
				2022	2023	
						Pertanian
3.2.4	PERTANAHAN					
1	Indeks tertib administrasi pertanahan	Indeks	N/A	45,00	49,00	IKU Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3.2.5	LINGKUNGAN HIDUP					
1	Persentase titik pantau dengan kualitas udara baik	%	75	75,0	87,5	IKU Dinas Lingkungan Hidup
2	Persentase titik pantau dengan kualitas air baik	%	55,95	57,14	59,52	IKU Dinas Lingkungan Hidup
3	Persentase tutupan lahan	%	105,62	22,63	25,61	IKU Dinas Lingkungan Hidup
4	Persentase pengelolaan sampah	%	39,25	77,08	84,39	IKU Dinas Lingkungan Hidup
3.2.6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan (KK,KTP,KIA,AKTA,HAK AKSES)	%	93	94,50	96,00	IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.2.7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target		Keterangan
				2022	2023	
1	Nilai SHU (Sisa Hasil Usaha) Lembaga Ekonomi Desa	Rp (juta)	- 1.444.516.966	275	300	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Persentase desa dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas	%	1,98	25,00	30,00	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Persentase Dana Swadaya Masyarakat	%	6,67	2,30	2,40	IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.2.8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
1	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	%	1,93	1,91	1,90	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.2.9	PERHUBUNGAN					
1	Rasio penurunan pelanggaran lalu lintas	%	0,01	4,86	4,11	IKU Dinas Perhubungan
2	Persentase Angkutan Umum yang Berstandar Keselamatan	%	8,1	13,20	14,70	IKU Dinas Perhubungan
3	Persentase Peningkatan Kualitas Prasarana perhubungan	%	92	92,57	93,11	IKU Dinas Perhubungan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target		Keterangan
				2022	2023	
3.2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1	Persentase PD pengguna sistem elektronik yang terpadu	%	90,38	95,00	100	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase ketersediaan informasi publik yang mutakhir	%	99,13	88,00	90,00	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
3.2.11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
1	Nilai PDRB sektor Usaha Mikro	Rp (Juta)	N/A	N/A	10.489.913,3	IKU Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
2	Nilai PDRB Sektor Koperasi	Rp (Juta)	N/A	N/A	189.035,1	IKU Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
3.2.12	PENANAMAN MODAL					
1	Nilai Investasi PMA	Rp (Juta)	1.384,14	2.195,7	2.305,4	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target		Keterangan
				2022	2023	
2	Nilai Investasi PMDN	Rp (Juta)	59.891,10	189.953,5	199,451,2	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Indeks Kepuasan Masyarakat sektor penanaman modal	Indeks	86,59	87,00	87,5	IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
1	Persentase pemuda dan atlet berprestasi	%	40,40	45,4	54,6	IKU Dinas Pemuda dan Olahraga
3.2.14	STATISTIK					
1	Persentase data statistik yang terintegrasi	%	64,86	80,00	100	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
3.2.15	PERSANDIAN					
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	IKU Dinas Komunikasi dan Informatika
3.2.16	KEBUDAYAAN					

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target		Keterangan
				2022	2023	
1	Persentase Cakupan Pelestarian Budaya	%	N/A	15,25	16,95	IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.2.17	PERPUSTAKAAN					
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	N/A	30,00	35,00	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.2.18	KEARSIPAN					
1	Persentase tingkat Ketersediaan arsip daerah	%	75	50,30	50,50	IKU Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3.3	UNSUR PILIHAN					
3.3.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Nilai PDRB sub sektor perikanan	Rp (juta)	478,9	489,5	499,3	IKU Dinas Perikanan
3.3.2	PARIWISATA					
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisatawan	379.758	454.500	459.045	IKU Dinas Pariwisata
2	Rata-rata lama tinggal	Hari/	N/A	1,27	1,37	IKU Dinas Pariwisata

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target		Keterangan
				2022	2023	
	wisatawan	orang				
3	Persentase usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang memenuhi standar	%	N/A	8,50	12,80	IKU Dinas Pariwisata
3.3.3	PERTANIAN					
1	Nilai PDRB sub sektor Tanaman Pangan	Rp (juta)	2.516.900,20	1.981.818,1	2.080.909,0	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Nilai PDRB sub sektor Hortikultura	Rp (juta)	1.136.318	1.453.669,1	1.526.352,6	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Nilai PDRB sub sektor Perkebunan	Rp (juta)	1.625.700,2	1.997.285,2	2.097.149,5	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Nilai PDRB sub sektor Peternakan	Rp (juta)	1.640.870,9	1.759.200,4	1.759.200,4	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Nilai PDRB Sub Sektor Jasa Pertanian dan Perburuhan	Rp (juta)	89.696,4	97.635,3	102.517,1	IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.3.4	PERDAGANGAN					
1	Nilai PDRB sektor perdagangan	Rp	3.328.274,28	3.354.259,41	3.454.887,19	IKU Dinas Koperasi Usaha

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target		Keterangan
				2022	2023	
		(juta)				MikroPerindustrian dan Perdagangan
2	Nilai Pendapatan Per Kapita	Rp (juta)	22,63	23,08	23,54	IKU Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
3.3.5	PERINDUSTRIAN					
1	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp (juta)	4.923.084,51	5.021.545,34	5.121.976,25	IKU Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
3.3.6	TRANSMIGRASI					
1	Persentase penempatan transmigran sesuai standar	%	0	100	100	IKU Dinas Tenaga Kerja
3.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
3.4.1	SEKRETARIAT DAERAH					
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kerumahtanggaan	Indeks	85,73	89,00	90,00	IKU Sekretariat Daerah

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target		Keterangan
				2022	2023	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Keprotokolan	Indeks	85,73	86.50	87,00	IKU Sekretariat Daerah
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pengadaan Barang /Jasa	Indeks	87,72	88,00	89,00	IKU Sekretariat Daerah
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Tata Pemerintahan	Indeks	86,11	87,00	88,00	IKU Sekretariat Daerah
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan perekonomian	Indeks	87,47	88,00	89,00	IKU Sekretariat Daerah
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesejahteraan Rakyat	Indeks	86,73	89,00	90,00	IKU Sekretariat Daerah
7	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	85,73	100	100	IKU Sekretariat Daerah
8	Persentase Kebijakan yang mendukung penyelarasan regulasi, penyederhanaan prosedur, dan menjawab kebutuhan masyarakat	%	87,72	94,00	96,00	IKU Sekretariat Daerah

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target		Keterangan
				2022	2023	
3.4.2	SEKRETARIAT DEWAN					
1	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang dapat difasilitasi	%	90,91	92,00	93,00	IKU Sekretariat Dewan
2	Persentase Aspirasi Masyarakat yang dapat difasilitasi	%	100	100	100	IKU Sekretariat Dewan
3.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
3.5.1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN					
1	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	85	100	100	IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.5.2	KEUANGAN					
1	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	%	100	100	100	IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Perubahan APBD	%	100	100	100	IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD kepada BPK-RI	%	100	100	100	IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target		Keterangan
				2022	2023	
4	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD	%	100	100	100	IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	100	100	100	IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
6	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	%	100	8,25	8,50	IKU Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3.5.3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
1	Indeks Kualifikasi Pendidikan ASN	Indeks	78,65	11,73	11,74	IKU Badan Kepegawaian Daerah
2	Indeks Kinerja ASN	Indeks	84,52	23,80	24,00	IKU Badan Kepegawaian Daerah
3	Indeks Disiplin ASN	Indeks	1,10	4,92	4,93	IKU Badan Kepegawaian Daerah
4	Indeks Kompetensi ASN	Indeks	78,54	26,06	26,08	IKU Badan Kepegawaian Daerah
3.5.4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dasar perencanaan	%	N/A	80,00	95,00	IKU Badan Perencanaan Pembangunan

No	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kinerja Tahun 2021	Target		Keterangan
				2022	2023	
						Daerah
3.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Minimal 3,5	%	N/A	70,00	75,00	IKU Inspektorat
3.7.	UNSUR KEWILAYAHAN					
1	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	%	90,21	92,00	93,00	IKU Kecamatan
2	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	89,62	89,80	90,00	IKU Kecamatan
3.8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
1	Persentase masalah strategis yang ditangani (terkait Ipoleksosbud dan Tibmas)	%	100	100	100	IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : LKJIP Tahun 2021 dan Perda No. 1 Tahun 2022 tentang PRPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023

6.2.2 Indikator Kinerja Kunci Tingkat Hasil (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci Tingkat Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tingkat hasil (outcome) merupakan indikator kinerja program yang terdiri dari program Perangkat daerah dan Program Prioritas atau Program Pembangunan Daerah. Indikator Kinerja Daerah bersama seluruh perangkat daerah terkait yang dirangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 6 4 Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Pendidikan			
1	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD;	%	93	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar;	%	99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Tingkat Partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	80	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	%	95,50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	Persentase Lembaga Pendidikan yang terfasilitasi Kurikulum Muatan Lokal	%	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Persentase pendidik yang terqualifikasi	%	82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki izin	%	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
2	Kesehatan			
1	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Persentase Fasyankes terakreditasi	%	58	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Angka kematian ibu	per 100.000 KH	216 per 100.000 KH	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Angka Kematian Bayi		13,8 per 1000 KH	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	persentase fasyankes dengan manajemen SDMK sesuai standar	%	70	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	persentase sarana kefarmasian alat kesehatan dan makanan minuman yang sesuai standar	%	94	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	persentase desa siaga aktif purnama mandiri	%	23	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
1	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Persentase panjang jaringan	%	70,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
	irigasi dalam kondisi baik			Ruang
3	Persentase penduduk yang terlayani Infrastruktur Air Minum	%	79,53	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Persentase penduduk yang Terlayani Sanitasi	%	73,29	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Persentase Panjang Drainase Terbangun	%	30	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Persentase kawasan terfasilitasi dengan baik	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9	Persentase ketersediaan gedung/bangunan pemerintah di wilayah daerah kabupaten/kota	%	60	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10	Persentase ketersediaan gedung/bangunan pemerintah di wilayah daerah kabupaten/kota	%	30	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Persentase Kawasan yang tertangani	%	40	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	1. Persentase panjang jalan yang terpelihara;	%	83,21	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13	2. Persentase jumlah jembatan yang terpelihara	%	92,56	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14	Persentase penyelenggaraan pelatihan sertifikat keterampilan (SKT)	%	60	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
15	Persentase luas wilayah pemanfaatan sesuai dengan	%	17,30	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
	rencana tata ruang			Ruang
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Ratio Rumah Terbangun	%	35	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Persentase Kawasan Kumuh	%	10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Persentase RTLH diluar kawasan kumuh tertangani	%	7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Persentase PSU Perumahan yang Terpelihara	%	20	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	SATPOL PP
2	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Presentasee peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	%	85	SATPOL PP
4	Persentase capaian indikator tingkat ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	%	77	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Persentase Penanganan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di	%	100	SATPOL PP

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
	Wilayah Kabupaten			
6	Sosial			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM kesos	%	84	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Persentase PPKS yang telah mendapatkan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	84	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Jumlah warga negara penyandang disabilitas setiap tahun yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	84	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Penanganan Kebutuhan Dasar	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
	sosial			Perlindungan Anak
11	Persentase Taman makam Pahlawan yang dikelola sesuai standart Kemensos	%	63	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Tenaga Kerja			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Dinas Tenaga Kerja
2	Persentase pencari kerja dilatih	%	100	Dinas Tenaga Kerja
3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	48	Dinas Tenaga Kerja
4	Persentase perusahaan yang mempunyai PP	%	25	Dinas Tenaga Kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak			
1	Persentase ARG pada belanja APBD	%	22	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase Jumlah Perempuan Korban kekerasan yg terfasilitasi	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Persentase penurunan perceraian	%	6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Persentase penurunan pernikahan usia anak	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Persentase cakupan penurunan KDRT	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Tersedianya Data Gender, Perempuan dan Anak (buku)	buku	1	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
				Perlindungan Anak
7	Persentase kelembagaan yang memfasilitasi hak anak	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus	%	10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Pangan			
1	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	Presentase Peningkatan Infrastruktur Kemandirian Pangan yang Difasilitasi	%	7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	%	1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	Presentase penanganan kerawanan pangan	%	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Aman	%	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	Pertanahan			
1	Persentase luas tanah yang didistribusi	%	6,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Persentase pengelolaan tanah kosong	%	2,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11	Lingkungan Hidup			
1	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
2	Persentase dokumen	%	100	Dinas Lingkungan

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
	perencanaan lingkungan hidup yang tersusun			Hidup
3	Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi minimal cemar ringan/ agak kritis	%	76	Dinas Lingkungan Hidup
4	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	%	35	Dinas Lingkungan Hidup
5	Persentase titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai standar	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
6	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi perizinan lingkungannya	%	35	Dinas Lingkungan Hidup
7	Persentase MHA terkait PPLH yang memiliki kapasitas pengelola lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
8	Persentase lembaga / masyarakat yang mendapat fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
9	Persentase lembaga/masyarakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
10	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	%	90	Dinas Lingkungan Hidup
11	Persentase sampah terkelola	%	84,39	Dinas Lingkungan Hidup
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	90	DISPENDUKCAPIL
2	Persentase penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	%	95	DISPENDUKCAPIL

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
3	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil	%	95	DISPENDUKCAPIL
4	Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SIAK	%	90	DISPENDUKCAPIL
5	Persentase pengguna profil kependudukan	%	90	DISPENDUKCAPIL
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Persentase desa yang terfasilitasi penataan desa sesuai regulasi	%	80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Persentase Desa Yang Melakukan Kerjasama	%	12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Persentase desa yang administrasi pemerintahan desa sesuai aturan	%	80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	%	85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana			
1	Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Seharusnya BerKB tetapi Belum Terpenuhi (Unmet Need)	%	8,35	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Persentase peserta KB terhadap pasangan usia subur (PUS)	%	76,50	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
3	Persentase Penurunan Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 Tahun	%	12,50	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Jumlah Keluarga menjadi Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKA (KK)	KK	68.750	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Perhubungan			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Dinas Perhubungan
2	Persentase peningkatan angkutan umum yang memadai	%	100	Dinas Perhubungan
3	Persentase ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai	%	91,11	Dinas Perhubungan
4	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	%	2,81	Dinas Perhubungan
16	Komunikasi dan Informatika			
1	Persentase PPID yang telah memperbarui informasi publik	%	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase Informasi yang dipublikasikan	%	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Persentase terbangunnya website perangkat daerah yang terpadu	%	90	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan
2	Nilai Omset Koperasi	%	10.000.000	Dinas Koperasi, UM

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
	Simpan Pinjam			dan Perdagangan
3	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	82	Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan
4	Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang sehat	%	82	Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan
5	Persentase Pendidikan Koperasi	%	86	Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan
6	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%	81	Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan
7	Persentase Pemberdayaan Usaha Mikro	%	76	Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan
8	Persentase Perkembangan Usaha Mikro	%	74	Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan
18	Penanaman Modal			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	DPMPTSP
2	Persentase Peningkatan Realisasi Penanaman Modal	%	5	DPMPTSP
3	Nilai Investasi Penanaman Modal (dalam juta)	Juta	201.756,60	DPMPTSP
4	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dengan Rekomendasi dan/atau Pertimbangan Teknis	%	90	DPMPTSP
5	Persentase Tingkat kepatuhan Pelaporan pada Aplikasi LKPM	%	60	DPMPTSP
6	Persentase Jenis Layanan Perizinan yang Terintegrasi secara Elektronik	%	75	DPMPTSP
19	Kepemudaan dan Olahraga			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Persentase pemuda	%	55,60	Dinas Pemuda dan

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
	berprestasi			Olahraga
3	Persentase fasilitasi dalam pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
4	Persentase Atlet berprestasi	%	55	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Persentase Fasilitasi dalam Peningkatan Pengembangan kapasitas daya Saing keolahragaan	%	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
6	Persentase Fasilitasi dalam Peningkatan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Statistik			
1	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	%	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Persandian			
1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah	%	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Kebudayaan			
1	Persentase Pengembangan Pemajuan Budaya Lokal	%	90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	%	40	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Persentase pembinaan Sejarah yang dilaksanakan	%	33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan dan dikelola	%	60	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	%	84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
23	Perpustakaan			
1	RasioKetercukupanKoleksiP erpustakaandenganpendud uk		1 : 0,0371	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan
2	Persentase perpustakaan yang dibina	%	45,45	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan
3	persentase naskah kuno yang dilestarikan	%	50	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan
24	Kearsipan			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100%	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan
2	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100%	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan
3	Persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	100%	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan
4	persentase peningkatan arsip yang di lindungi dan diselamatkan	%	100%	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan
5	Persentasejumlahperijinan dan penggunaanarsip yang bersifattertutup	%	25%	Dinas Kearsiapan dan Perpustakaan
25	Kelautan dan Perikanan			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Dinas Perikanan
2	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	ton	6.490	Dinas Perikanan
3	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	ton	3.616	Dinas Perikanan
4	Persentase penurunan pelanggaran	ton	17%	Dinas Perikanan
5	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	ton	4.271	Dinas Perikanan

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
26	Pariwisata			
1	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Dinas Pariwisata
2	Persentase daya tarik destinasi wisata yang memenuhi kriteria 3A	%	1,00	Dinas Pariwisata
3	Persentase DPK yang dipasarkan	%	25	Dinas Pariwisata
4	Presentaseindustri kreatif yang berkembang	%	1,00	Dinas Pariwisata
5	Presentase sub sektorekraf yang berkembang	%	100	Dinas Pariwisata
27	Pertanian			
1	Jumlah Produksi Tanaman Pangan			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	- TanamanPangan (kwintal / kw)	kwintal / kw	5.923.868	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	- TanamanBuah (kwintal / kw)	kwintal / kw	1.581.854	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	- Tanaman Buah dan SayurSemusim (kwintal / kw)	kwintal / kw	583.109	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	- TanamanTahunan (kwintal / kw)	kwintal / kw)	99.725	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	- TanamanSemusim (kwintal / kw)	kwintal / kw)	10.933.359	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2	- Produksi Ternak :			
	- Daging (Kg)	kg	20.740.917	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	- Telur (Kg)	kg	13.029.090	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
	- Susu (Kg)	kg	15.435.158	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	- Populasi Ternak Besar (ekor)	ekor	249.872	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
4	- Populasi Ternak Kecil (ekor)	ekor	191.031	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5	- Populasi Ternak Unggas (ekor)	ekor	15.496.037	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
6	Persentase kualitas prasarana pertanian yang memenuhi standart	%	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Persentase produksi ternak yang aman konsumsi (daging, susu, telur)	%	90	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
8	Persentase pengurangan nilai kerugian	%	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
9	Persentase izin usaha pertanian yang direkomendasikan	%	100	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
10	Persentase Peningkatan Kualitas Penyuluhan Pertanian	%	5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
28	Perdagangan			
1	Persentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh izin usaha	%	90%	Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan
2	Nilai retribusi pelayanan pasar (Rp dalam juta)	Rp (dalam Juta)	8.500	Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan
3	Persentase barang kebutuhan pokok yang harganya stabil	%	84	Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan
4	Nilai Ekspor (Rp dalam juta)	Rp (dalam Juta)	1.000	Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
5	Nilai Perdagangan Antar Daerah (Rp dalam juta)	Rp (dalam Juta)	4.161.600	Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan
6	Persentase tingkat kepatuhan wajib tera ulang	%	84,00	Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan
7	Persentase pertumbuhan nilai perdagangan daerah	%	4	Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan
29	Perindustrian			
1	Nilai Produksi Industri (dalam Rp. Juta)	Rp (dalam Juta)	1.379.000	Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan
2	Persentase perusahaan yang mendapat rekomendasi untuk memperoleh IUI	%	90%	Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan
3	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian data industri	%	66%	Dinas Koperasi, UM dan Perdagangan
30	Transmigrasi			
1	Prosentase transmigran terlatih yang ditempatkan	%	100	Dinas Tenaga Kerja
31	Perencanaan			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	BAPPEDA
2	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	100	BAPPEDA
3	Persentase dokumen perencanaan yang dimanfaatkan PD	%	95	BAPPEDA
32	Keuangan			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
2	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
3	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda tentang APBD	%	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah
4	Persentase ketetapan waktu penyusunan Raperda Perubahan APBD	%	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah
5	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Penatausahaan BUD	%	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah
6	Persentase ketepatan waktu penyusunan LKPD	%	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah
7	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Barang Milik daerah	%	100	Badan Pengelola Keuangan Daerah
8	Persentase Penerimaan Pajak daerah	%	100	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
9	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	%	10	Badan Pajak dan Retribusi Daerah
33	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Badan Kepegawaian Daerah
2	Persentase Pelayanan Kepegawaian	%	90	Badan Kepegawaian Daerah
3	Persentase ASN yang memiliki Pendidikan sesuai Kualifikasi	%	67	Badan Kepegawaian Daerah
4	Persentase ASN yang memiliki Kinerja Baik	%	95	Badan Kepegawaian Daerah
5	Persentase ASN yang tidak melakukan Indisipliner	%	99	Badan Kepegawaian Daerah
6	Persentase Pengembangan SDM	%	80	Badan Kepegawaian Daerah

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
34	Penelitian dan Pengembangan			
1	Persentase hasil penelitian / kajian yang menjadi acuan kebijakan perencanaan	%	80	Bappeda
35	Sekretariat Daerah			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	90	Sekretariat Daerah
2	persentase kegiatan pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi	%	100	Sekretariat Daerah
3	Angka inflasi Daerah		2,35	Sekretariat Daerah
36	Sekretariat DPRD			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Sekretariat DPRD
2	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi DPRD	%	80	Sekretariat DPRD
37	Inspektorat			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	95	Inspektorat
2	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang Ditindaklanjuti	%	75	Inspektorat
3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan lainnya (pembinaan) yang ditindaklanjuti	%	75	Inspektorat
4	Nilai Kapabilitas APIP		3,50	Inspektorat

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
38	KECAMATAN			
	KecamatanLumajang			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Kec. Lumajang
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	%	90	Kec. Lumajang
3	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	86	Kec. Lumajang
4	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	86	Kec. Lumajang
5	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	Kec. Lumajang
6	PersentaseDesa yang menetapkanRKPDesTepat Waktu	%	82	Kec. Lumajang
7	PersentaseDesa yang menetapkanAPBDesTepat Waktu	%	82	Kec. Lumajang
8	PersentaseDesa yang menetapkanLPPDesTepat Waktu	%	82	Kec. Lumajang
	KecamatanSukodono			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Kec. Sukodono
2	persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	79,50	Kec. Sukodono
3	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	79,50	Kec. Sukodono
4	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	79,50	Kec. Sukodono
5	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan		79,50	Kec. Sukodono

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
	Pemerintahan Umum	%		
6	PersentaseDesa yang menetapkanRKPDesTepat Waktu	%	79,50	Kec. Sukodono
7	PersentaseDesa yang menetapkanAPBDesTepat Waktu	%	79,50	Kec. Sukodono
8	PersentaseDesa yang menetapkanLPPDesTepat Waktu	%	79,50	Kec. Sukodono
	Kecamatan Padang			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Kec. Padang
2	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	90	Kec. Padang
3	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	93	Kec. Padang
4	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	93	Kec. Padang
5	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	Kec. Padang
6	PersentaseDesa yang menetapkanRKPDesTepat Waktu	%	93	Kec. Padang
7	PersentaseDesa yang menetapkanAPBDesTepat Waktu	%	93	Kec. Padang
8	PersentaseDesa yang menetapkanLPPDesTepat Waktu	%	93	Kec. Padang
	KecamatanGucialit			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Kec. Guccialit
2	persentase fasilitasi penyelenggaraan		95	Kec. Guccialit

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
	pemerintahan dan pelayanan publik	%		
3	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	85	Kec. Gucialit
4	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	95	Kec. Gucialit
5	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	95	Kec. Gucialit
6	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	%	95	Kec. Gucialit
7	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	%	95	Kec. Gucialit
8	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	%	95	Kec. Gucialit
	Kecamatan Senduro			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Kec. Senduro
2	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	85	Kec. Senduro
3	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	100	Kec. Senduro
4	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	83	Kec. Senduro
5	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	85	Kec. Senduro
6	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	%	83	Kec. Senduro
7	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	%	83	Kec. Senduro

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
	Waktu			
8	PersentaseDesa yang menetapkanLPPDesTepat Waktu	%	83	Kec. Senduro
	KecamatanPasrujambe			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran			Kec. Pasrujambe
2	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	Kec. Pasrujambe
3	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	90	Kec. Pasrujambe
4	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	Kec. Pasrujambe
5	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	0	Kec. Pasrujambe
6	PersentaseDesa yang menetapkanRKPDesTepat Waktu	%	79,5	Kec. Pasrujambe
7	PersentaseDesa yang menetapkanAPBDesTepat Waktu	%	79,5	Kec. Pasrujambe
8	PersentaseDesa yang menetapkanLPPDesTepat Waktu	%	79,5	Kec. Pasrujambe
	KecamatanSumbersuko			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Kec. Sumbersuko
2	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	Kec. Sumbersuko
3	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	100	Kec. Sumbersuko

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
4	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	Kec. Sumbersuko
5	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	Kec. Sumbersuko
6	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	%	100	Kec. Sumbersuko
7	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	%	100	Kec. Sumbersuko
8	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	%	100	Kec. Sumbersuko
	Kecamatan Tempeh			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Kec. Tempeh
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	%	86	Kec. Tempeh
3	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	88	Kec. Tempeh
4	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	88	Kec. Tempeh
5	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	88	Kec. Tempeh
6	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	%	87	Kec. Tempeh
7	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	%	87	Kec. Tempeh
8	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	%	87	Kec. Tempeh
	Kecamatan Pasirian			

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Kec. Pasirian
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	%	95	Kec. Pasirian
3	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	95	Kec. Pasirian
4	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	95	Kec. Pasirian
5	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	95%	Kec. Pasirian
6	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	%	95	Kec. Pasirian
7	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	%	95	Kec. Pasirian
8	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	%	95	Kec. Pasirian
Kecamatan Candipuro				
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional kantor	%	80	Kec. Candipuro
2	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	81	Kec. Candipuro
3	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	92	Kec. Candipuro
4	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	90	Kec. Candipuro
5	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	81	Kec. Candipuro
6	Persentase Desa yang menetapkan RKPdes Tepatwa	%	80	Kec. Candipuro

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
	ktu			
7	PersentaseDesa yang menetapkanAPBdesTepatwa ktu	%	80	Kec. Candipuro
8	PersentaseDesa yang menetapkanLPPdesTepatwa ktu	%	60	Kec. Candipuro
	KecamatanPronojiwo			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Kec. Pronojiwo
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	%	90	Kec. Pronojiwo
3	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	90	Kec. Pronojiwo
4	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	90	Kec. Pronojiwo
5	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	90	Kec. Pronojiwo
6	PersentaseDesa yang menetapkanRKPDesTepat Waktu	%	90	Kec. Pronojiwo
7	PersentaseDesa yang menetapkanAPBDesTepat Waktu	%	90	Kec. Pronojiwo
8	PersentaseDesa yang menetapkanLPPDesTepat Waktu	%	90	Kec. Pronojiwo
	KecamatanTempursari			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	90	Kec. Tempursari
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	%	90	Kec. Tempursari
3	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan	%	90	Kec. Tempursari

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
	masyarakat			
4	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	90	Kec. Tempursari
5	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	90	Kec. Tempursari
6	PersentaseDesa yang menetapkanRKPDesTepat Waktu	%	90	Kec. Tempursari
7	PersentaseDesa yang menetapkanAPBDesTepat Waktu	%	90	Kec. Tempursari
8	PersentaseDesa yang menetapkanLPPDesTepat Waktu	%	90	Kec. Tempursari
	Kecamatan Kunir			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Kec. Kunir
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	%	100	Kec. Kunir
3	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	84	Kec. Kunir
4	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	Kec. Kunir
5	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	Kec. Kunir
6	PersentaseDesa yang menetapkanRKPDesTepat Waktu	%	100	Kec. Kunir
7	PersentaseDesa yang menetapkanAPBDesTepat Waktu	%	100	Kec. Kunir
8	PersentaseDesa yang menetapkanLPPDesTepat Waktu	%	100	Kec. Kunir

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
Kecamatan Yosowilangun				
1	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Kec. Yosowilangun
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	%	100	Kec. Yosowilangun
3	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	%	91	Kec. Yosowilangun
4	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	90	Kec. Yosowilangun
5	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	91	Kec. Yosowilangun
6	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	%	91,67	Kec. Yosowilangun
7	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	%	91,67	Kec. Yosowilangun
8	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	%	91,67	Kec. Yosowilangun
Kecamatan Tekung				
1	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Kec. Tekung
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	%	86	Kec. Tekung
3	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	%	86	Kec. Tekung
4	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	86	Kec. Tekung
5	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	86	Kec. Tekung

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
6	PersentaseDesa yang menetapkanRKPDesTepat Waktu	%	86	Kec. Tekung
7	PersentaseDesa yang menetapkanAPBDesTepat Waktu	%	86	Kec. Tekung
8	PersentaseDesa yang menetapkanLPPDesTepat Waktu	%	86	Kec. Tekung
	KecamatanRowokangkun g			
1	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	90	Kec. Rowokangkung
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	%	90	Kec. Rowokangkung
3	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	%	90	Kec. Rowokangkung
4	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	90	Kec. Rowokangkung
5	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	90	Kec. Rowokangkung
6	PersentaseDesa yang menetapkanRKPDesTepat Waktu	%	90	Kec. Rowokangkung
7	PersentaseDesa yang menetapkanAPBDesTepat Waktu	%	90	Kec. Rowokangkung
8	PersentaseDesa yang menetapkanLPPDesTepat Waktu	%	90	Kec. Rowokangkung
	KecamatanJatiroto			
1	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Kec. Jatiroto
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	%	100	Kec. Jatiroto

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
3	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	91,56	Kec. Jatiroto
4	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	Kec. Jatiroto
5	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	Kec. Jatiroto
6	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	%	100	Kec. Jatiroto
7	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	%	100	Kec. Jatiroto
8	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	%	83	Kec. Jatiroto
	Kecamatan Randuagung			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Kec. Randuagung
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	%	100	Kec. Randuagung
3	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	100	Kec. Randuagung
4	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	Kec. Randuagung
5	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	Kec. Randuagung
6	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	%	100	Kec. Randuagung
7	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	%	100	Kec. Randuagung
8	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	%	83	Kec. Randuagung

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
	Waktu			
	Kecamatan Klakah			
1	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Kec. Klakah
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	%	100	Kec. Klakah
3	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	%	100	Kec. Klakah
4	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	Kec. Klakah
5	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	Kec. Klakah
6	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	%	100	Kec. Klakah
7	Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	%	100	Kec. Klakah
8	Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	%	100	Kec. Klakah
	Kecamatan Ranuyoso			
1	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Kec. Ranuyoso
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	%	100	Kec. Ranuyoso
3	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	%	100	Kec. Ranuyoso
4	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	Kec. Ranuyoso
5	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan	%	100	Kec. Ranuyoso

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
	Pemerintahan Umum			
6	PersentaseDesa yang menetapkanRKPDesTepat Waktu	%	100	Kec. Ranuyoso
7	PersentaseDesa yang menetapkanAPBDesTepat Waktu	%	100	Kec. Ranuyoso
8	PersentaseDesa yang menetapkanLPPDesTepat Waktu	%	100	Kec. Ranuyoso
	KecamatanKedungjajang			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Kec. Kedungjajang
2	Persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP	%	90	Kec. Kedungjajang
3	Rata-rata persentase fasilitasi pemberdayaan masyarakat	%	83	Kec. Kedungjajang
4	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	90	Kec. Kedungjajang
5	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	82	Kec. Kedungjajang
6	PersentaseDesa yang menetapkanRKPDesTepat Waktu	%	82	Kec. Kedungjajang
7	PersentaseDesa yang menetapkanAPBDesTepat Waktu	%	82	Kec. Kedungjajang
8	PersentaseDesa yang menetapkanLPPDesTepat Waktu	%	82	Kec. Kedungjajang
39	Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	%	100	Bakesbangpol

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target PRPJMD Tahun 2023	Perangkat daerah Penanggung Jawab
2	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	Bakesbangpol
3	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	100	Bakesbangpol
4	Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	100	Bakesbangpol
5	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	100	Bakesbangpol
6	Persentase potensi permasalahan strategis yang ditangani	%	100	Bakesbangpol

Sumber : Dokumen Perubahan RPJMD 2018-2023

BAB VII PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dalam pentahapan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023. Dimana sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta dijadikan pedoman dalam menyempurnakan Rancangan Renja PD Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang merupakan tahap keempat ini menjadi sangat penting untuk memantapkan langkah Kabupaten Lumajang dalam mencapai target pembangunan jangka menengah menjelang berakhirnya periode pembangunan daerah jangka menengah di tahun 2023. Sehingga semua sektor dan prioritas pembangunan diarahkan untuk pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah tahun 2023.

Prioritas pembangunan tahun 2023 mengikuti prinsip *money follow priority program* dan *program follow result*, serta berorientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial. Proses penyusunan Dokumen RKPD ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, melalui beberapa mekanisme tekno koordinasi antar lintas instansi pemerintah dengan seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu Forum konsultasi publik, forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum Musrenbang dilakukan dari tingkat Kecamatan sampai dengan Kabupaten untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan arah dan kebijakan pembangunan. Tentunya, kebijakan yang diharapkan adalah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hal-hal lain yang secara substansial mengakibatkan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian dengan tetap berpedoman pada kebijakan yang berlaku serta memperhatikan analisis situasi dan kondisi dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.


BUPATI LUMAJANG
H. THORIQUL HAQ, M.ML.

